

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Bupati adalah Bupati Bantul.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

#### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) RKPD Tahun 2025 memuat:
  - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah tahun 2025;
  - b. prioritas pembangunan Daerah tahun 2025; dan
  - c. rencana kerja dan pendanaan Daerah tahun 2025.
- (3) RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII	: PENUTUP
- (4) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2025 menjadi dasar untuk:
  - a. perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
  - b. penyusunan rancangan KUA Tahun 2025 dan rancangan PPAS Tahun 2025.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang akan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal ...  
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025



**RANCANGAN AWAL**

# **RKPD 2025**

## **KABUPATEN BANTUL**

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Dasar Hukum .....	I-6
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I-11
1.4. Maksud dan Tujuan .....	I-12
1.4.1. Maksud .....	I-12
1.4.2. Tujuan .....	I-12
1.5. Sistematika Penulisan .....	I-13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah .....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-33
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum .....	II-49
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah .....	II-349
2.2 Layanan Keistimewaan .....	II-369
2.2.1 Urusan Keistimewaan .....	II-369
2.2.2 Urusan Pemerintah Daerah yang didukung Pembiayaan Dana Keistimewaan .....	II-392
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .....	II-397
2.3.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bantul .....	II-399
2.3.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 .....	II-407
2.3.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 .....	II-419
2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah .....	II-463
2.4.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	II-463

<b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1 Kondisi dan Arah Kebijakan Perekonomian Nasional .....	III-1
3.1.2 Kondisi dan Arah Kebijakan Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta .	III-3
3.1.3 Kondisi dan Arah Kebijakan Perekonomian Kabupaten Bantul .....	III-4
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III-7
3.2.1 Kemampuan Keuangan Daerah .....	III-7
3.2.2 Analisis Keuangan Daerah.....	III-11
3.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2025 .....	III-15
<b>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025.....	IV-41
4.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM) .....	IV-54
4.4 Pokok Pikiran DPRD BantulIV- .....	IV-59
4.4.1 PENDAHULUAN .....	IV-59
4.4.2 LANDASAN HUKUM .....	IV-60
4.4.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	IV-60
4.4.4 POKOK PIKIRAN DPRD DALAM RKPd TAHUN 2025.....	IV-61
4.4.5 SARAN.....	IV-63
<b>BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....</b>	<b>V-1</b>
5.1 Rencana Pendanaan Program Perangkat Daerah .....	V-1
5.2 Rencana Pendanaan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	V-55
5.3 Rencana Dana Keistimewaan.....	V-79
<b>BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>VII-1</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	II-3
Tabel 2.2 Formasi Batuan Kabupaten Bantul .....	II-8
Tabel 2.3 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul.....	II-10
Tabel 2.4 Sungai di Kabupaten Bantul.....	II-11
Tabel 2.5 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023 .....	II-13
Tabel 2.6 Alih Fungsi Sawah Irigasi (Ha) Kabupaten Bantul Tahun 2019-2022.....	II-13
Tabel 2.7 Kawasan Rawan Bencana Menurut Perda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.....	II-22
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul menurut Kapanewon.....	II-29
Tabel 2.9 Kepadatan Penduduk Geografis di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-30
Tabel 2.10 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia di Kabupaten Bantul .....	II-31
Tabel 2.11 Perkembangan Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%) .....	II-34
Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional .....	II-36
Tabel 2.13 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2018-2022.....	II-37
Tabel 2.14 Perkembangan PDRB Per Kapita di Kabupaten Bantul Tahun 2018 – 2022 .....	II-39
Tabel 2.15 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2018-2022 .....	II-40
Tabel 2.16 Rasio Gini Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II-41
Tabel 2.17 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2019 – 2023 .....	II-42
Tabel 2.18 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2018 – 2022.....	II-42
Tabel 2.19 Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) per Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022 .....	II-43
Tabel 2.20 Tingkat Kemiskinan Ekstrem di DIY Tahun 2021-2022 .....	II-44
Tabel 2.21 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2019 – 2023.....	II-45
Tabel 2.22 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2019 – 2023 .....	II-46
Tabel 2.23 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2019 – 2023.....	II-47

Tabel 2.24 Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2019 – 2023.....	II-47
Tabel 2.25 Jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2018-2022 .....	II-48
Tabel 2.26 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2019-2023 .....	II-48
Tabel 2.27 Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-49
Tabel 2.28 Perkembangan APK dan APM PAUD di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-51
Tabel 2.29 Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-52
Tabel 2.30 Rasio Murid dan Guru Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul .....	II-53
Tabel 2.31 Ketersediaan Sekolah per Jumlah Penduduk Usia Sekolah .....	II-53
Tabel 2.32 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2022 ...	II-54
Tabel 2.33 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bantul Tahun 2019- 2023 .....	II-55
Tabel 2.34 Perkembangan Tingkat Kelulusan Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-55
Tabel 2.35 Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-56
Tabel 2.36 Kondisi Lembaga Pendidikan Non Formal di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-56
Tabel 2.37 Kondisi Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-57
Tabel 2.38 Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2021 .....	II-58
Tabel 2.39 Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023.....	II-58
Tabel 2.40 Angka Kematian Bayi Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-59
Tabel 2.41 Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023	II-60
Tabel 2.42 Angka Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-60
Tabel 2.43 Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 ..	II-61
Tabel 2.44 Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kabupaten Bantul Tahun 2019–2023 .....	II-62
Tabel 2.45 Strata Posyandu Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2023.....	II-62
Tabel 2.46 Rasio Posyandu Lansia per 1.000 Lansia di Kabupaten Bantul ....	II-63
Tabel 2.47 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul .....	II-64
Tabel 2.48 Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan per Satuan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2022 .....	II-64
Tabel 2.49 Jumlah Puskesmas Menurut Status Akreditasi Tahun 2019-2023.....	II-65
Tabel 2.50 Kelas Rumah Sakit Tahun 2023 .....	II-65

Tabel 2.51 Net Death Rate (NDR) Rumah Sakit di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-66
Tabel 2.52 Bed Occupation Rate (BOR) Rumah Sakit di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-67
Tabel 2.53 Turn Over Interval (TOI) di Rumah Sakit Tahun 2019-2023 .....	II-67
Tabel 2.54 Bed Turn Over (BTO) di Rumah Sakit Tahun 2019-2023 .....	II-68
Tabel 2.55 Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional .....	II-68
Tabel 2.56 Jumlah Pemeriksaan Lab. Medik Labkesda Bantul Tahun 2023...II-69	
Tabel 2.57 Jumlah Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Pemerintah di Kabupaten Bantul Tahun 2019 – 2023.....	II-70
Tabel 2.58 Jumlah Dokter per 1.000 Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2023.....	II-71
Tabel 2.59 Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-71
Tabel 2.60 Jumlah dan Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-72
Tabel 2.61 Penyebab Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2023 .....	II-73
Tabel 2.62 Jumlah Desa Siaga Purnama Mandiri menurut Strata di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-74
Tabel 2.63 Hasil Capaian Tatanan PHBS di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2023.....	II-74
Tabel 2.64 Akses Sanitasi di Kabupaten Bantul tahun 2022.....	II-75
Tabel 2.65 Akses Air Minum Aman di Kabupaten Bantul tahun 2022-2023 ..	II-76
Tabel 2.66 Data Penyakit Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023...II-76	
Tabel 2.67 CNR dan SR Penderita TB di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-77
Tabel 2.68 Penemuan Kasus HIV AIDS di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-78
Tabel 2.69 Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-79
Tabel 2.70 Data Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-81
Tabel 2.71 Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023.....	II-82
Tabel 2.72 Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-85
Tabel 2.73 Data Penerbitan IMB dan PBG di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023.....	II-86
Tabel 2.74 Saluran Irigasi Primer dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-87
Tabel 2.75 Saluran Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-88
Tabel 2.76 Target dan Capaian Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi.....	II-88
Tabel 2.77 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-90
Tabel 2.78 Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-91

Tabel 2.79 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-91
Tabel 2.80 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik .....	II-91
Tabel 2.81 Data Penambahan SR Pengelolaan Air Limbah Terpusat Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-92
Tabel 2.82 Data Penanganan Banjir di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-94
Tabel 2.83 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2019 – 2023 .....	II-94
Tabel 2.84 Kesesuaian Pola Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023 .....	II-95
Tabel 2.85 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2023 .....	II-97
Tabel 2.86 Produk Perencanaan dan Peraturan Tata Ruang di Kabupaten Bantul sampai dengan Tahun 2023.....	II-98
Tabel 2.87 Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Maupun Kegiatan Non Berusaha Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2023 .....	II-100
Tabel 2.88 Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2021 .....	II-101
Tabel 2.89 Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2021-2022.....	II-103
Tabel 2.90 Penanganan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha Tahun 2021-2022.....	II-103
Tabel 2.91 Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani di Kabupaten Bantul Tahun 2018 -2022 .....	II-104
Tabel 2.92 Peningkatan Kualitas RTLH di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-104
Tabel 2.93 Data Penanganan RTLH Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2022.....	II-105
Tabel 2.94 Data Perumahan Terfasilitasi PSU di Kabupaten Bantul .....	II-106
Tabel 2.95 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-107
Tabel 2.96 Jumlah Hasil Operasi Yustisi dan Non Yustisi yang Ditindaklanjuti .....	II-108
Tabel 2.97 Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-109
Tabel 2.98 Jumlah Sasaran Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-110
Tabel 2.99 Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-110
Tabel 2.100 Rasio Jumlah Petugas Linmas di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-111
Tabel 2.101 Persentase Kelompok Jagawarga yang terbentuk di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023 .....	II-112
Tabel 2.102 Perhitungan Nilai Variabel Penyusun Indeks Rasa Aman di Kabupaten Bantul Tahun 2023 .....	II-113
Tabel 2.103 Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-113

Tabel 2.104 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023.....	II-114
Tabel 2.105 Capaian Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-115
Tabel 2.106 Kejadian Bencana di Kabupaten Bantul Tahun 2019 – 2023 ....	II-115
Tabel 2.107 Kerugian dan Korban Bencana di Kabupaten Bantul 2019-2023II-	116
Tabel 2.108 Togor EWS Kabupaten Bantul .....	II-117
Tabel 2.109 Cakupan Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2023.....	II-118
Tabel 2.110 Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-118
Tabel 2.111 Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan .....	II-119
Tabel 2.112 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022.....	II-121
Tabel 2.113 Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana .....	II-122
Tabel 2.114 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-123
Tabel 2.115 Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) .....	II-130
Tabel 2.116 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bantul ...	II-130
Tabel 2.117 Jumlah Kampung Siaga Bencana (KSB) Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-131
Tabel 2.118 Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-131
Tabel 2.119 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-133
Tabel 2.120 Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan.....	II-133
Tabel 2.121 Upah Minimum Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-134
Tabel 2.122 Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Jamsostek di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-135
Tabel 2.123 Persentase Sengketa Hubungan Industrial yang terselesaikan.	II-135
Tabel 2.124 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-136
Tabel 2.125 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Bantul .....	II-138
Tabel 2.126 Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-138
Tabel 2.127 Data Kasus Anak Korban Kekerasan Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-139
Tabel 2.128 Jumlah KDRT di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-140
Tabel 2.129 Persentase PNS Perempuan yang Menduduki Jabatan Eselon di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 .....	II-141

Tabel 2.130 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 .....	II-142
Tabel 2.131 Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023.....	II-143
Tabel 2.132 Kasus Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-145
Tabel 2.133 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-146
Tabel 2.134 Ketersediaan Energi dan Protein untuk dikonsumsi Kabupaten Bantul .....	II-147
Tabel 2.135 Cadangan Pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-148
Tabel 2.136 Pengembangan Desa Mandiri Pangan .....	II-149
Tabel 2.137 Desa Rentan Pangan Berdasarkan Peta FSVA di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-152
Tabel 2.138 Luas Wilayah Kerja dan Kepemilikan Hak Atas Tanah.....	II-153
Tabel 2.139 Pendaftaran Tanah Pemerintah (bidang) 2019-2023 .....	II-153
Tabel 2.140 Permasalahan Tanah di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-154
Tabel 2.141 Persentase Jumlah Izin Lokasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2020.....	II-156
Tabel 2.142 Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bantul melalui <a href="http://izinonline.bantulkab.go.id">izinonline.bantulkab.go.id</a> Tahun 2021-2023.....	II-157
Tabel 2.143 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bantul melalui <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> Tahun 2021-2023.....	II-157
Tabel 2.144 Indeks Kualitas Air Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-158
Tabel 2.145 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023....	II-160
Tabel 2.146 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-161
Tabel 2.147 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2019-2023... ..	II-162
Tabel 2.148 Dokumen Persetujuan Teknis Tahun 2022-2023.....	II-163
Tabel 2.149 Dokumen Rincian Teknis LB3 dan Berita Acara Penerimaan Berkas Pengelolaan LB3 Tahun 2022-2023 .....	II-164
Tabel 2.150 Hasil Pengawasan terhadap Ketentuan Izin Lingkungan Tahun 2019-2023.....	II-164
Tabel 2.151 Pokok Aduan Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Tahun 2019-2023.....	II-165
Tabel 2.152 Pengelolaan Sampah Tahun 2019-2023.....	II-167
Tabel 2.153 Rasio Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Bantul .....	II-168
Tabel 2.154 Jumlah Bank Sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023.....	II-169
Tabel 2.155 Pengelolaan Sampah di TPS3R di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023.....	II-169
Tabel 2.156 Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Bantul ....	II-170
Tabel 2.157 Cakupan Kepemilikan KTP di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-171

Tabel 2.158 Cakupan Penerbitan KTP di Kabupaten Bantul Tahun 2019 – 2023.....	II-171
Tabel 2.159 Cakupan Kepemilikan KIA di Kabupaten Bantul.....	II-172
Tabel 2.160 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-173
Tabel 2.161 Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-1 di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-173
Tabel 2.162 Cakupan Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Bantul.....	II-174
Tabel 2.163 Status Kabupaten Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) ....	II-175
Tabel 2.164 Jumlah Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul Menurut Status Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2019-2023.....	II-175
Tabel 2.165 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPMD di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 .....	II-176
Tabel 2.166 Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-176
Tabel 2.167 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate -TFR) Kabupaten Bantul Tahun 2022 .....	II-177
Tabel 2.168 Kepesertaan KB di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-178
Tabel 2.169 Cakupan Anggota Kelompok BKB ber-KB di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-178
Tabel 2.170 Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Kelompok Tribina Tahun 2022 ....	II-179
Tabel 2.171 Profesi Korban dan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2023 .....	II-181
Tabel 2.172 Rasio Konektivitas Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-182
Tabel 2.173 V/C Ratio Jalan Kabupaten.....	II-183
Tabel 2.174 Data Trayek Kendaraan Angkutan Umum yang masih Beroperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-185
Tabel 2.175 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-187
Tabel 2.176 Pembangunan Halte 2017- 2021 .....	II-188
Tabel 2.177 Aktivitas di Terminal yang berada di Satuan Ruang Strategis Tahun 2021- 2023 .....	II-188
Tabel 2.178 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-190
Tabel 2.179 Nilai Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) .....	II-191
Tabel 2.180 Jumlah Badan Publik Informatif Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023.....	II-192
Tabel 2.181 Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik di Kabupaten Bantul .....	II-193
Tabel 2.182 Indeks Pembangunan TIK Tahun 2023 .....	II-194
Tabel 2.183 Follower Media Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-197

Tabel 2.184 Koperasi Berbadan Hukum di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-198
Tabel 2.185 Jumlah Koperasi Menurut Bentuk Koperasi Tahun 2019-2023	II-199
Tabel 2.186 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi Tahun 2019-2023 ...	II-199
Tabel 2.187 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Tahun Tutup Buku .....	II-200
Tabel 2.188 Keragaan Koperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 ....	II-201
Tabel 2.189 Jumlah UMKM di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-201
Tabel 2.190 Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM di Kabupaten Bantul....	II-203
Tabel 2.191 Persentase Usaha Mikro Berizin di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-203
Tabel 2.192 Capaian UMKM Naik Kelas di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-204
Tabel 2.193 Realisasi Investasi Per Sektor Kabupaten Bantul Tahun 2022..	II-205
Tabel 2.194 Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul Sampai dengan Tahun 2023 .....	II-206
Tabel 2.195 Rasio Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul .....	II-207
Tabel 2.196 Daya Serap Investasi terhadap Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul .....	II-207
Tabel 2.197 Kegiatan Pengawasan Usaha Tahun 2022 .....	II-209
Tabel 2.198 Jumlah Pemuda Pelopor di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-210
Tabel 2.199 Data Organisasi Kepemudaan Tahun 2019-2023 .....	II-210
Tabel 2.200 Organisasi Olahraga di Kabupaten Bantul.....	II-211
Tabel 2.201 Perolehan Medali pada Pekan Olahraga Pelajar Tingkat DIY .....	II-214
Tabel 2.202 Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) Tahun 2019-2023 .....	II-214
Tabel 2.203 Jumlah Produsen Data Tahun 2019 – 2023.....	II-215
Tabel 2.204 Jumlah Kegiatan Statistik menurut Cara Pengumpulan Data ..	II-215
Tabel 2.205 Jumlah Penyebarluasan Data Statistik dan Data Geospasial....	II-215
Tabel 2.206 Tolak Ukur Kinerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Tahun 2019-2023.....	II-216
Tabel 2.207 Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain Tahun 2023.....	II-216
Tabel 2.208 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Kontra Penginderaan (Sterilisasi Ruang) Tahun 2022-2023.....	II-218
Tabel 2.209 Jumlah Aduan/Panggilan Valid, Prank dan Ghost Call Tahun 2020-2022.....	II-219
Tabel 2.210 Jumlah Panggilan Masuk Call Center 112 Menurut Jenis Kejadian Tahun 2020-2023 .....	II-220
Tabel 2.211 Rekapitulasi Tindak Lanjut OPD terhadap Panggilan Darurat 112.....	II-221
Tabel 2.212 Insiden Keamanan Informasi Tahun 2020-2023 .....	II-222
Tabel 2.213 Rekapitulasi Asesmen Keamanan Aplikasi Tahun 2020-2023...	II-224
Tabel 2.214 Hasil Pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMI) .....	II-226



Tabel 2.215 Data Register Kelompok Seni dan Budaya di Kabupaten Bantul .....	II-229
Tabel 2.216 Rekapitulasi Fasilitas Kelompok Seni di Kabupaten Bantul .....	II-231
Tabel 2.217 Fasilitas Pentas Seni di Kabupaten Bantul Tahun 2019–2023 .....	II-232
Tabel 2.218 Jumlah (Kumulatif) Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten Bantul .....	II-234
Tabel 2.219 Data Budaya Tak Benda Potensi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) .....	II-235
Tabel 2.220 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bantul tahun 2019-2023 .....	II-239
Tabel 2.221 Jumlah Pojok Baca sampai dengan Tahun 2023 .....	II-240
Tabel 2.222 Jumlah Perpustakaan Terakreditasi di Kabupaten Bantul.....	II-241
Tabel 2.223 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-241
Tabel 2.224 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Usia tahun 2019-2023.....	II-242
Tabel 2.225 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2023.....	II-243
Tabel 2.226 Jumlah Koleksi Buku/ Bahan Pustaka di Kabupaten Bantul ...	II-244
Tabel 2.227 Data Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2019-2023.....	II-245
Tabel 2.228 Daftar Akuisisi yang Telah Dilaksanakan .....	II-246
Tabel 2.229 Jumlah Arsip yang Disimpan dan Dikelola pada Tahun 2020-2023.....	II-247
Tabel 2.230 Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-250
Tabel 2.231 Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Komoditi di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-253
Tabel 2.232 Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-254
Tabel 2.233 Produksi Benih Ikan (ekor) dan Ikan Konsumsi (Kg) dari UPTD. BBI di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-255
Tabel 2.234 Produksi Benih Ikan (Ekor), Calon Induk (Ekor), Dan Ikan Konsumsi (Kg) Per Jenis Ikan di UPTD BBI Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	II-256
Tabel 2.235 Produksi Garam, Luas Tambak Dan Rerata Produktivitas Per Bulan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-257
Tabel 2.236 Kejadian pelanggaran aturan di Kabupaten Bantul tahun 2019-2023.....	II-259
Tabel 2.237 Jumlah UKM, Tenaga Kerja dan Produksi Olahan (Ton) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-260
Tabel 2.238 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-261
Tabel 2.239 Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-262
Tabel 2.240 Jumlah Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	II-263
Tabel 2.241 Data Usaha Pariwisata Yang Sudah Mempunyai Koordinat .....	II-264
Tabel 2.242 Data Event di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2023 .....	II-264

Tabel 2.243 Jumlah Wisatawan per Destinasi Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-265
Tabel 2.244 Data Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bantul Tahun 2023 ..	II-266
Tabel 2.245 Jumlah Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-269
Tabel 2.246 Jumlah Desa Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 ..	II-270
Tabel 2.247 Desa Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2023 .....	II-272
Tabel 2.248 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023	II-274
Tabel 2.249 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-276
Tabel 2.250 Produktivitas Komoditas Perkebunan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-278
Tabel 2.251 Daftar Kelompok Penangkar Benih Padi .....	II-280
Tabel 2.252 Produksi Benih Padi (ton) Tahun 2021-2023 .....	II-280
Tabel 2.253 Panjang Irigasi Tersier (dalam meter) Tahun 2023 .....	II-281
Tabel 2.254 Populasi Ternak Besar (Ekor) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-282
Tabel 2.255 Populasi Ternak Kecil (ekor) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-282
Tabel 2.256 Populasi Ternak Unggas (ekor) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-282
Tabel 2.257 Produksi Komoditas Hasil Peternakan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-283
Tabel 2.258 Pelayanan Kesehatan Ternak UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) Kabupaten Bantul, Tahun 2019-2023.....	II-284
Tabel 2.259 Jenis Penyakit Hewan Ternak Kabupaten Bantul, Tahun 2019-2023.....	II-284
Tabel 2.260 Pelayanan Pemotongan UPT RPH Kabupaten Bantul, Tahun 2019-2023.....	II-285
Tabel 2.261 Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 (dalam miliar rupiah).....	II-286
Tabel 2.262 Data Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2023 .....	II-287
Tabel 2.263 Perkembangan Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	II-290
Tabel 2.264 Perkembangan Ekspor di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023	II-294
Tabel 2.265 Perkembangan Sektor Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2019 – 2023 .....	II-295
Tabel 2.266 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2019 – 2023.....	II-296
Tabel 2.267 Sentra Industri Kabupaten Bantul Berdasar Cabang Bidang Industri Tahun 2023 .....	II-296
Tabel 2.268 Data Industri Kreatif di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 ..	II-298
Tabel 2.269 Izin Usaha Berdasar Tingkat Risiko .....	II-300

Tabel 2.270 Jumlah Kepala Keluarga Transmigran di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-301
Tabel 2.271 Jumlah Pendaftar Transmigrasi di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-302
Tabel 2.272 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2018-2019 .....	II-303
Tabel 2.273 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022 .....	II-304
Tabel 2.274 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2017-2021.....	II-306
Tabel 2.275 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-307
Tabel 2.276 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan .....	II-307
Tabel 2.277 Top Inovasi Pelayanan Publik di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020.....	II-308
Tabel 2.278 Target Raperda Tahun 2022 .....	II-309
Tabel 2.279 Produk Hukum yang Dihasilkan Tahun 2022.....	II-311
Tabel 2.280 Persentase Raperda yang Disetujui Bersama Kabupaten Bantul, Tahun 2018-2022 .....	II-313
Tabel 2.281 Capaian Indikator Perencanaan 2018-2022.....	II-314
Tabel 2.282 Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 .....	II-316
Tabel 2.283 Gambaran Keuangan Kabupaten Bantul .....	II-318
Tabel 2.284 Persentase Komponen Belanja terhadap Total Belanja Tahun 2021-2022.....	II-319
Tabel 2.285 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Kabupaten Bantul Tahun 2017-2022 .....	II-323
Tabel 2.286 IKU Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020-2022 .....	II-325
Tabel 2.287 Indeks Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	II-326
Tabel 2.288 Pengembangan Inovasi Kabupaten Bantul Tahun 2018-2021.....	II-328
Tabel 2.289 Inovasi Kabupaten Bantul Tahun 2022 .....	II-330
Tabel 2.290 Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK Tahun 2021-2023 .....	II-334
Tabel 2.291 Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-336
Tabel 2.292 Nilai SPIP Kabupaten Bantul tahun 2019-2023.....	II-338
Tabel 2.293 Realisasi Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-340
Tabel 2.294 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kapanewon Lingkup Kabupaten Bantul 2018-2022 .....	II-341
Tabel 2.295 Kegiatan Sosialisasi Pemilos (Pemilihan OSIS) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	II-343
Tabel 2.296 Kegiatan Pendidikan politik di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-344
Tabel 2.297 Persentase Pemilih yang Berpartisipasi.....	II-344

Tabel 2.298 Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bantul Menurut Kapanewon Tahun 2020.....	II-345
Tabel 2.299 Jumlah ormas yang terverifikasi di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-346
Tabel 2.300 Organisasi Masyarakat (Ormas) yang terverifikasi pada Tahun 2019-2023.....	II-347
Tabel 2.301 Kasus Intoleransi Tahun 2019-2023.....	II-348
Tabel 2.302 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribuan rupiah/orang/tahun) Tahun 2018 – 2022.....	II-349
Tabel 2.303 Persentase Pengeluaran Konsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-350
Tabel 2.304 Perkembangan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-351
Tabel 2.305 Sistem Informasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 .....	II-352
Tabel 2.306 Pemanfaatan CSR di Kabupaten Bantul Tahun 2022 .....	II-354
Tabel 2.307 Pemanfaatan CSR di Kabupaten Bantul Tahun 2021 .....	II-356
Tabel 2.308 Angka Kriminalitas di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2021.....	II-358
Tabel 2.309 Angka Kriminalitas di Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	II-359
Tabel 2.310 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022..	II-359
Tabel 2.311 Rekapitulasi Kesesuaian SOP dalam Penerbitan Izin di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2022 .....	II-363
Tabel 2.312 Penetapan IMB per Satuan Bangunan Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2021 .....	II-363
Tabel 2.313 Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha/Investasi di Kabupaten Bantul .....	II-364
Tabel 2.314 Persentase Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2022.....	II-366
Tabel 2.315 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bantul Tahun 2018–2022	II-367
Tabel 2.316 Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tindak Lanjut Urusan Keistimewaan .....	II-371
Tabel 2.317 Kalurahan Mandiri Budaya Kabupaten Bantul.....	II-373
Tabel 2.318 Penetapan Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul .....	II-375
Tabel 2.319 Penetapan Rintisan Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul .....	II-376
Tabel 2.320 Desa Wisata di Kabupaten Bantul .....	II-377
Tabel 2.321 Kelompok Prima di Desa Prima Kabupaten Bantul Tahun 2012 – 2022 .....	II-379
Tabel 2.322 Desa Preneur Kabupaten Bantul Tahun 2023 .....	II-382
Tabel 2.323 Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022 .....	II-383
Tabel 2.324 Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan di Kabupaten Bantul .....	II-384
Tabel 2.325 Daftar Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Tahun 2022 Kabupaten Bantul.....	II-387
Tabel 2.326 Produk Perencanaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Strategis Keistimewaan di Kabupaten Bantul.....	II-391

Tabel 2.327 Kegiatan Muatan Lokal Pendidikan Berbasis Budaya .....	II-392
Tabel 2.328 Puskesmas dan Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi .....	II-394
Tabel 2.329 Sebaran Kelompok Jagawarga Tahun 2022 .....	II-395
Tabel 2.330 Jumlah Kelompok Jagawarga di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	II-395
Tabel 2.331 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023 .....	II-400
Tabel 2.332 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Bantul Tahun 2023 .....	II-410
Tabel 2.333 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 .....	II-419
Tabel 2.334 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	II-473
Tabel 3.7 Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Bantul Tahun 2025....	III-5
Tabel 3.8 Kategori Fiskal Daerah dalam PMK.....	III-8
Tabel 3.9 Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah .....	III-9
Tabel 3.10 Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	III-9
Tabel 3.11 Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Bantul .....	III-10
Tabel 3.12 Perhitungan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	III-11
Tabel 3.13 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2023 .....	III-11
Tabel 3.14 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2023 .....	III-12
Tabel 3.15 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2023 .....	III-13
Tabel 3.16 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2022.....	III-13
Tabel 3.17 Persentase Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2023.....	III-18
Tabel 3.18 Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	III-19
Tabel 3.19 Penyandingan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	III-24
Tabel 3.20 Penyandingan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	III-25
Tabel 3.21 Penyandingan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	III-30
Tabel 4. 1 Sinkronisasi Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Bantul dengan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 .....	IV-5

Tabel 4. 2 Interkoneksi Pendekatan Rancangan Prioritas dan sasaran Kabupaten Bantul dengan sasaran dan program prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025.....	IV-43
Tabel 4. 3 Jenis dan Indikator Pelayanan SPM yang Harus Dipenuhi .....	IV-54
Tabel 5.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pendanaan Menurut Perangkat Daerah .....	V-1
Tabel 5.2 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Bantul Tahun 2025 .....	V-3
Tabel 5.3 Kebutuhan Pendanaan per Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Perangkat Daerah Tahun 2025 .....	V-6
Tabel 5.4 Rencana Pemenenuhan SPM Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	V-56
Tabel 5.5 Rencana Usulan BKK Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	V-79
Tabel 5.6 Anggaran Keistimewaan Urusan Kelembagaan Berdasarkan Program dan Kegiatan di Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	V-80
Tabel 5.7 Anggaran Keistimewaan Urusan Kebudayaan Berdasarkan Program dan Kegiatan di Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	V-94
Tabel 5.8 Anggaran Keistimewaan Urusan Pertanahan Berdasarkan Program dan Kegiatan di Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	V-107
Tabel 5.9 Anggaran Keistimewaan Urusan Tata Ruang Berdasarkan Program dan Kegiatan di Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	V-109
Tabel 6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	VI-1

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan Dokumen dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	I-12
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Bantul.....	II-2
Gambar 2.2 Luas Wilayah Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul.....	II-2
Gambar 2.3 Peta Wilayah menurut Ketinggian dari Permukaan Laut .....	II-5
Gambar 2.4 Peta Kemiringan Lereng di Kabupaten Bantul .....	II-6
Gambar 2.5 Peta Geologi Kabupaten Bantul .....	II-8
Gambar 2.6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Bantul .....	II-9
Gambar 2.7 Peta Sub Das di Kabupaten Bantul .....	II-10
Gambar 2.8 Curah Hujan menurut Bulan di 6 Stasiun Pemantauan di Kabupaten Bantul Tahun 2022 .....	II-12
Gambar 2.9 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bantul	II-22
Gambar 2.10 Peta Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Bantul .....	II-23
Gambar 2.11 Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Bantul .....	II-23
Gambar 2.12 Peta Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang Kabupaten Bantul .....	II-24
Gambar 2.13 Peta Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Bantul	II-24
Gambar 2.14 Peta Bahaya Cuaca Ekstrem Kabupaten Bantul .....	II-25
Gambar 2.15 Peta Bahaya Tsunami Kabupaten Bantul .....	II-26
Gambar 2.16 Peta Bahaya Kebakaran Kabupaten Bantul .....	II-26
Gambar 2.17 Peta Bahaya Epidemii Wabah Penyakit Kabupaten Bantul .....	II-27
Gambar 2.18 Peta Bahaya Penyebaran Covid-19 Kabupaten Bantul.....	II-28
Gambar 2.19 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul 2018-2022 .....	II-32
Gambar 2.20 Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-34
Gambar 2.21 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kelompok Sektor Tahun 2018-2022 (%) ...	II-35
Gambar 2.22 Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul	II-38
Gambar 2.23 Peta Indeks Risiko Air Limbah Domestik .....	II-93
Gambar 2.24 Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	II-97
Gambar 2.25 Peta Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	II-120
Gambar 2.26 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2018- 2022.....	II-136
Gambar 2.27 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2018- 2022.....	II-137
Gambar 2.28 Persentase Partisipasi PNS Perempuan di Lembaga Pemerintahan .....	II-141
Gambar 2.29 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-180

Gambar 2.30 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2023.....	II-186
Gambar 2.31 Capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK ....	II-195
Gambar 2.32 Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 .....	II-250
Gambar 2.33 Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Bantul Tahun 2022	II-251
Gambar 2.34 Persentase Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Tiap Tahun dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 .....	II-252
Gambar 2.35 Pertumbuhan Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2018-2022.....	II-253
Gambar 2.36 Indeks RB Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 .....	II-305
Gambar 2.37 Statistik Penerbitan Nomor Induk Berusaha/NIB (04 Agustus 2021 s.d 29 Desember 2022) .....	II-361
Gambar 2.38 Kesesuaian SOP dalam Penerbitan Izin di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2022.....	II-363
Gambar 2.39 Grafik target dan realisasi fisik Tahun 2023.....	II-408
Gambar 2.40 Grafik target dan realisasi keuangan Tahun 2022 .....	II-408



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pasal 260 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah yang berupa dokumen perencanaan Daerah untuk periode satu tahun. RKPD disusun oleh pemerintah daerah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu:

1. Secara substansial menjadi arah kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab program kegiatan;
2. Secara normatif menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta landasan bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Secara operasional berfungsi sebagai arahan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan menjadi tanggung jawab SKPD sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) PD dan
4. Secara faktual berfungsi sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun keempat RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. RKPD Tahun 2025, disusun dengan menggunakan empat pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan

mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Selain itu, RKPD Tahun 2025 juga disusun menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial. Pendekatan tematik-holistik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus pada pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang meliputi:

1. Persiapan penyusunan

Pada tahap persiapan serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:

- a. penyusunan Rancangan SK Bupati Bantul tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Tahap penyusunan Rancangan Awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis Rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
- d. penelaahan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
- e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
- g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;

- h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
- i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- j. perumusan prioritas pembangunan Daerah;
- k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

3. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pelaksanaan forum konsultasi publik merupakan pembahasan Rancangan Awal RKPD bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Masukan dan saran tersebut, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik. Selanjutnya, Rancangan Awal RKPD yang telah disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan forum konsultasi publik diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

4. Penyusunan rancangan RKPD

Penyusunan Rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan Rancangan awal RKPD disempurnakan berdasarkan:

- a. Rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi;
- b. hasil penelaahan terhadap Rancangan awal RKPD DIY, RKP dan program strategis nasional.

5. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pelaksanaan musrenbang RKPD terdiri atas musrenbang RKPD di kapanewon dan musrenbang RKPD di kabupaten. Musrenbang RKPD di kapanewon merupakan forum pembahasan daftar usulan kalurahan lingkup kapanewon. Sedangkan musrenbang RKPD di kabupaten merupakan forum

pembahasan Rancangan RKPD yang dilaksanakan dalam rangka:

- a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
- b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
- c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
- d. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan DIY;
- e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

#### 6. Perumusan rancangan akhir RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD. Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.

#### 7. Penetapan RKPD

Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan penetapan dan pengundangan. Peraturan Bupati tentang RKPD dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
- b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang RKPD disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

Seluruh proses penyusunan RKPD Tahun 2025 tersebut, memerlukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan serta dilakukan dengan berbasis *e-planning* dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Bidang Kesehatan;
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran

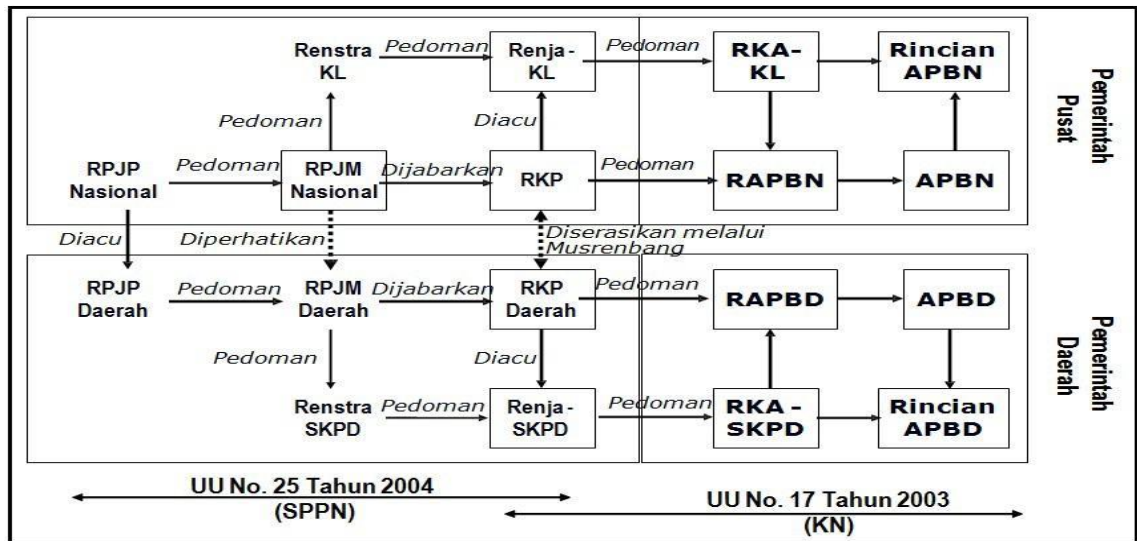
Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 108).

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun. Penyusunan RKPD harus diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD DIY Tahun 2025.

Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Hubungan Dokumen dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan RKPd diselaraskan dengan RKP, program strategis nasional yang ditetapkan pemerintah pusat, dan RKPd DIY. Selanjutnya RKPd menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD, rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta menjadi pedoman dalam proses penyusunan rancangan APBD. Dokumen RKPd juga menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. Proses penyusunan RKPd dilakukan secara simultan dan bersinergi dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah.

## 1.4. Maksud dan Tujuan

### 1.4.1. Maksud

RKPd disusun untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan serta antar lembaga pemerintahan pusat dan daerah provinsi maupun kabupaten, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.

### 1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKPd adalah

1. Sebagai arah pembangunan tahunan pemerintah Kabupaten Bantul;

2. Sebagai tolok ukur tahunan keberhasilan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan;
3. Sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; dan
4. Sebagai acuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada Tahun 2025.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur sistematika penulisan dokumen RKPD sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini menjelaskan aspek kondisi umum daerah (aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, permasalahan pembangunan daerah (yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta penyelenggaraan urusan pemerintah daerah).

#### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang: (1) Arah kebijakan ekonomi daerah yang memuat arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari RKP dan kebijakan ekonomi dalam dokumen RPJMD; (2) Arah kebijakan keuangan daerah menguraikan mengenai arah kebijakan

pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah serta belanja daerah.

#### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2025.

#### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit rencana kerja dan pendanaan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan daerah Tahun 2025.

#### **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Bab ini mengemukakan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan.

#### **BAB VII PENUTUP**

Bab ini memuat penutup dan kaidah pelaksanaan dari RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

##### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

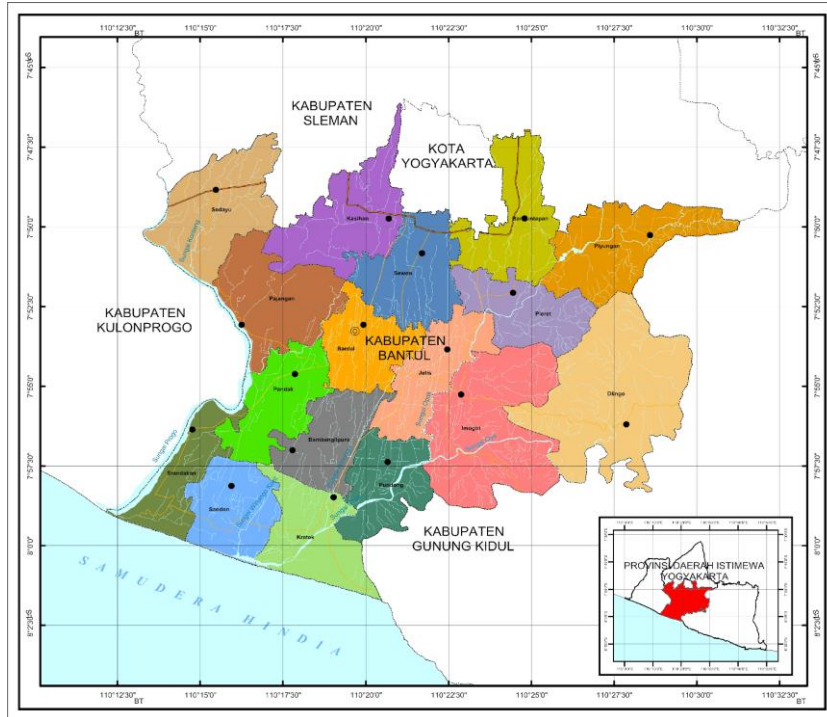
##### 2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

##### 2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di wilayah bagian selatan dengan luas wilayah 511,706 km<sup>2</sup> (sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau). Wilayah administratif Kabupaten Bantul memiliki batas-batas sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo
- Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul

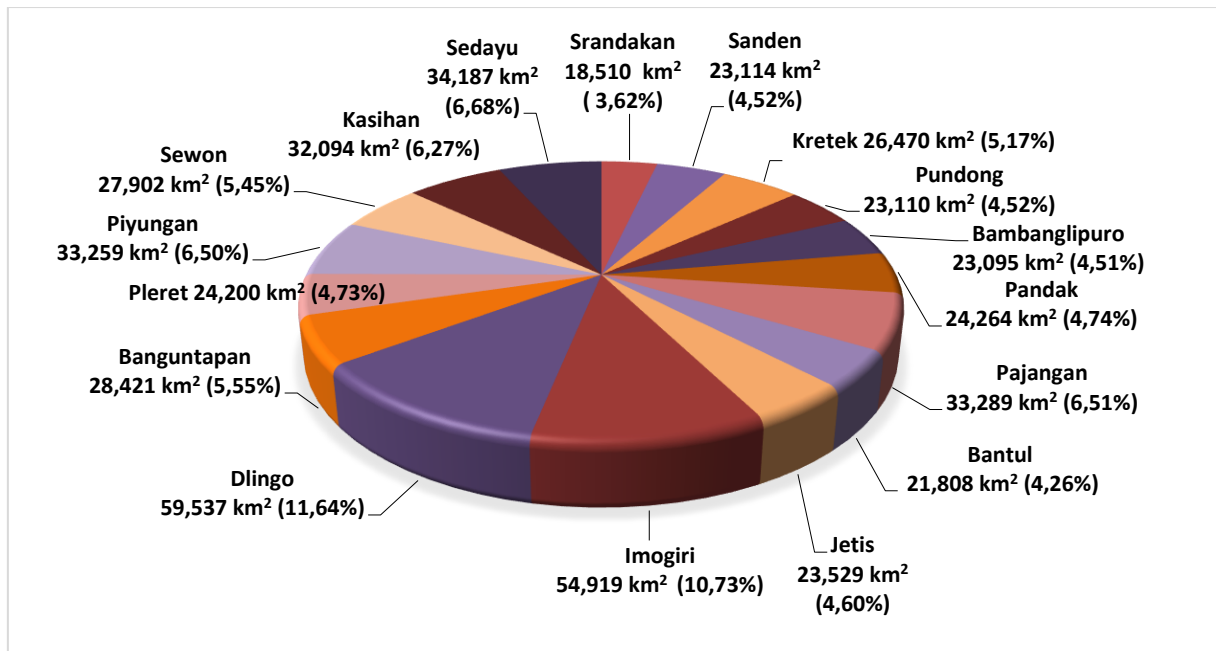
Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kapanewon. Sebutan kapanewon merupakan sebutan lain kecamatan di wilayah kabupaten/kota di DIY sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Demikian pula sebutan kalurahan merupakan sebutan lain desa di wilayah DIY yang merupakan gabungan beberapa pedukuhan dan berkedudukan di bawah kapanewon.



Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2024

**Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Bantul**

Persentase luas wilayah menurut kapanewon di Kabupaten Bantul disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2024

**Gambar 2.2 Luas Wilayah Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul**

Kapanewon Dlingo adalah kapanewon yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 59,537 km<sup>2</sup> (11,64%) sementara Kapanewon Srandakan



adalah kapanewon dengan wilayah paling sempit, yaitu 18,51 Km<sup>2</sup> (3,62%). Wilayah Kabupaten Bantul juga terbagi atas 75 kalurahan dan 933 pedukuhan. Luas wilayah secara detail setiap kapanewon dan kalurahan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Luas Wilayah Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul Tahun 2023**

<b>Nama Desa</b>	<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>
<b>Bantul</b>	<b>511,706</b>		
<b>Srandakan</b>	<b>18,510</b>	<b>Imogiri</b>	<b>54,919</b>
Poncosari	11,911	Selopamioro	20,709
Trimurti	6,599	Sriharjo	5,945
<b>Sanden</b>	<b>23,114</b>	Wukirsari	17,559
Gadingsari	7,776	Kebonagung	1,556
Gadingharjo	3,089	Karangtengah	2,744
Srigading	7,696	Girirejo	3,893
Murtigading	4,553	Karangtalun	1,360
<b>Kretek</b>	<b>26,470</b>	Imogiri	1,154
Tirtomulyo	4,027	<b>Dlingo</b>	<b>59,537</b>
Parangtritis	10,995	Mangunan	11,123
Donotirto	4,492	Muntuk	12,913
Tirtosari	3,081	Dlingo	9,701
Tirtoharjo	3,875	Temuwuh	7,145
<b>Pundong</b>	<b>23,110</b>	Terong	8,912
Seloharjo	10,751	Jatimulyo	9,743
Panjangrejo	5,284	<b>Banguntapan</b>	<b>28,421</b>
Srihardono	7,074	Baturetno	3,853
<b>Bambanglipuro</b>	<b>23,095</b>	Banguntapan	7,881
Sidomulyo	8,202	Jagalan	0,308
Mulyodadi	6,474	Singosaren	0,752
Sumbermulyo	8,420	Jambidan	3,509
<b>Pandak</b>	<b>24,264</b>	Potorono	3,963
Caturharjo	5,306	Tamanan	3,838
Triharjo	7,045	Wirokerten	4,317
Gilangharjo	7,491	<b>Pleret</b>	<b>24,200</b>
Wijirejo	4,421	Wonokromo	4,001
<b>Pajangan</b>	<b>33,289</b>	Pleret	4,800
Triwidadi	12,307	Segoroyoso	5,927
Sendangsari	12,996	Bawuran	3,925
Guwosari	7,986	Wonolelo	5,547
<b>Bantul</b>	<b>21,808</b>	<b>Piyungan</b>	<b>33,259</b>
Palbapang	5,439	Sitimulyo	10,059

<b>Nama Desa</b>	<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>
Ringinharjo	2,740	Srimulyo	14,203
Bantul	5,199	Srimartani	8,996
Trirenggo	6,008	<b>Sewon</b>	<b>27,902</b>
Sabdodadi	2,422	Pendowoharjo	6,445
<b>Jetis</b>	<b>23,529</b>	Timbulharjo	8,712
Patalan	5,745	Bangunharjo	7,098
Canden	5,262	Panggunharjo	5,647
Sumberagung	6,186	<b>Kasih</b>	<b>32,094</b>
Trimulyo	6,336	Bangunjiwo	14,774
		Tirtonirmolo	5,625
		Tamantirto	6,806
		Ngestiharjo	4,889
		<b>Sedayu</b>	<b>34,187</b>
		Argodadi	11,268
		Argorejo	7,849
		Argosari	5,667
		Argomulyo	9,404

*Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, 2024*

#### **2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis**

Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 110°12'34"-110°31'08" Bujur Timur dan 7°44'04" 8°00'27" Lintang Selatan.

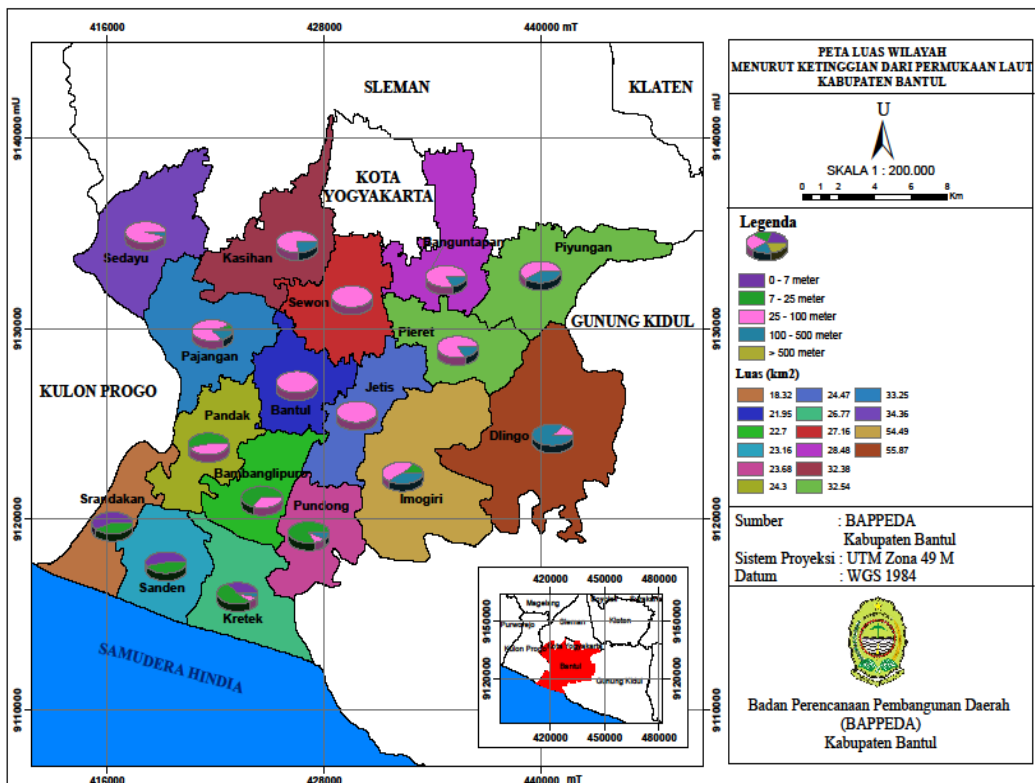
Bentang alam wilayah Kabupaten Bantul merupakan dataran rendah 40% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari:

- a. Bagian Barat seluas 17,73 % dari seluruh wilayah adalah daerah landai merupakan daerah yang kurang subur serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan.
- b. Bagian Tengah seluas 41,62 % dari seluruh wilayah adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur.
- c. Bagian Timur seluas 40,65 % dari seluruh wilayah adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat.
- d. Bagian Selatan, adalah daerah yang sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan

sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan wilayah Kapanewon Srandakan, Sanden dan Kretek.

### 2.1.1.1.3 Kondisi Topografi

Ketinggian tempat Kabupaten Bantul meliputi empat kelas ketinggian dan hubungan kelas ketinggian dengan luas sebarannya secara spasial ditunjukkan pada peta luas wilayah menurut ketinggian dari permukaan laut.



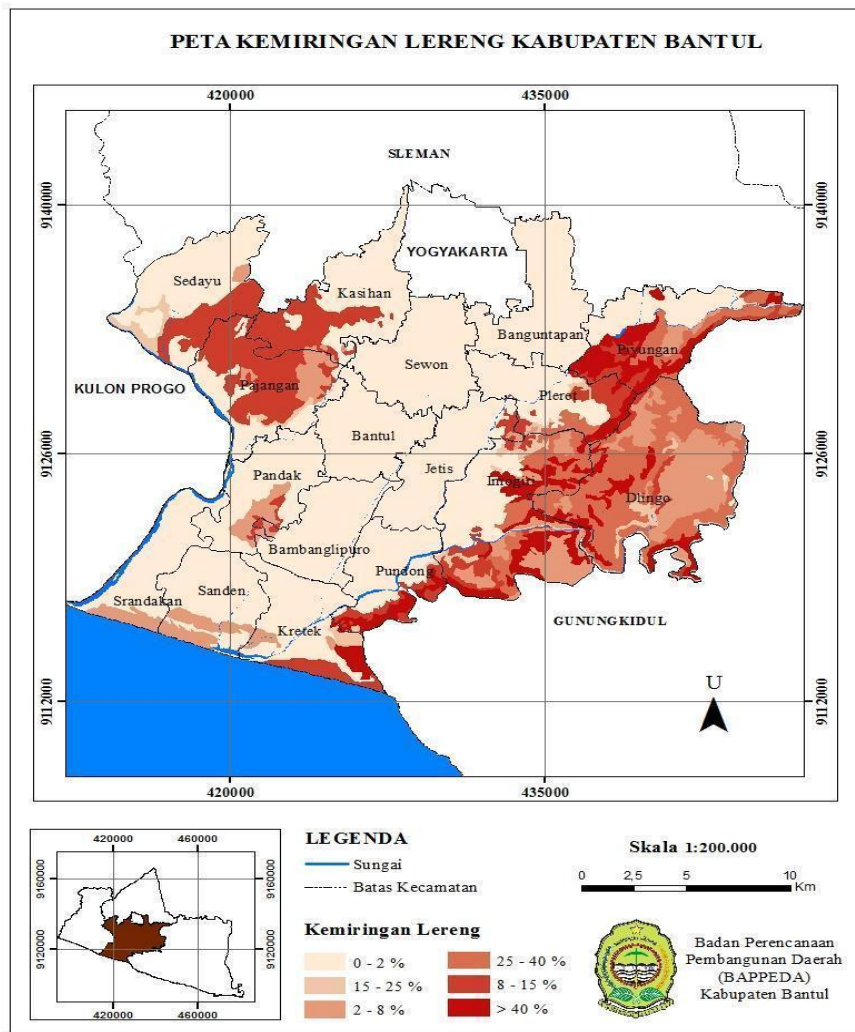
Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2024

**Gambar 2.3 Peta Wilayah menurut Ketinggian dari Permukaan Laut di Kabupaten Bantul**

Kelas ketinggian tempat yang dimiliki Kabupaten Bantul penyebaran paling luas adalah:

- Wilayah yang mempunyai elevasi antara 25–100meter seluas 54,67% dari seluruh wilayah yang merupakan daerah datar landai dan sedikit berbukit dengan sebagian merupakan daerah pertanian yang subur, terletak pada bagian utara, bagian tengah dan bagian tenggara Kabupaten Bantul.

- b. Wilayah yang mempunyai elevasi rendah (elevasi <7 meter) seluas 6,37% dari seluruh wilayah terdapat di bagian selatan yaitu di Kapanewon Kretek, Kapanewon Sanden dan Kapanewon Srandakan. Wilayah dengan elevasi rendah umumnya berbatasan dengan Samudra Hindia dengan keadaan alamnya berpasir dan sedikit berlaguna.
- c. Wilayah yang mempunyai elevasi di atas 100meter terdapat di Kapanewon Dlingo, Imogiri, Piyungan, dan Pajangan.



Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2024

**Gambar 2.4** Peta Kemiringan Lereng di Kabupaten Bantul

Klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Bantul dibagi menjadi enam kelas, yaitu:

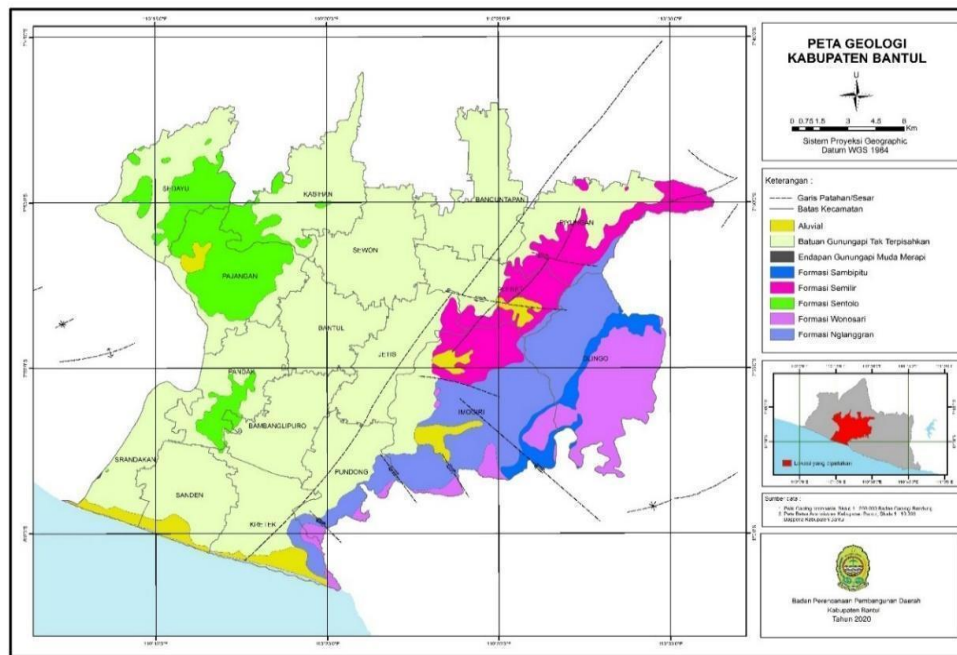
- a. Wilayah Kabupaten Bantul pada umumnya berupa daerah dataran (kemiringan kurang dari 2%) dengan penyebaran di wilayah selatan, tengah, dan utara dari Kabupaten Bantul dengan luas 5,67% dari seluruh wilayah.
- b. Wilayah dengan kemiringan 2%-8% seluas 39,79% dari seluruh wilayah, berada di wilayah selatan, tengah dan utara.
- c. wilayah dengan kemiringan 8%-15% seluas 28,29% dari seluruh wilayah, berada di wilayah barat dan timur,
- d. Wilayah dengan kemiringan 15%-25% seluas 14,71% dari seluruh wilayah, berada di wilayah barat dan timur.
- e. Wilayah dengan kemiringan 25%-40% seluas 7,79% dari seluruh wilayah, berada di wilayah barat dan timur.
- f. wilayah dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 4,15% dari seluruh wilayah, berada di wilayah timur Kabupaten Bantul.

Apabila dilihat per wilayah kapanewon terlihat bahwa wilayah kapanewon yang paling luas memiliki lahan miring terletak di Kapanewon Dlingo dan Imogiri, sedangkan wilayah kapanewon yang didominasi oleh lahan datar terletak di Kapanewon Sewon dan Banguntapan.

#### **2.1.1.1.4 Kondisi Geologi**

Geologi menunjukkan kelompok batuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang. Untuk mengetahui jumlah cadangan bahan galian dan prospek pengembangannya memerlukan penanganan lebih lanjut. Formasi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak di permukaan bumi atau di bawah permukaan.

Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Bantul secara umum terdiri dari dua jenis batuan yaitu batuan beku dan batuan sedimen. Berdasarkan sifat-sifat batumannya dapat dirinci menjadi beberapa formasi. Formasi batuan di Kabupaten Bantul sesuai Peta Geologi, dapat dilihat pada peta di bawah ini.



Sumber: Badan Geologi Kementerian ESDM 2003 (diolah) Bappeda Kabupaten Bantul, 2024

**Gambar 2.5 Peta Geologi Kabupaten Bantul**

Sedangkan formasi batuan di Kabupaten Bantul menurut persentase luasannya disajikan pada tabel berikut:

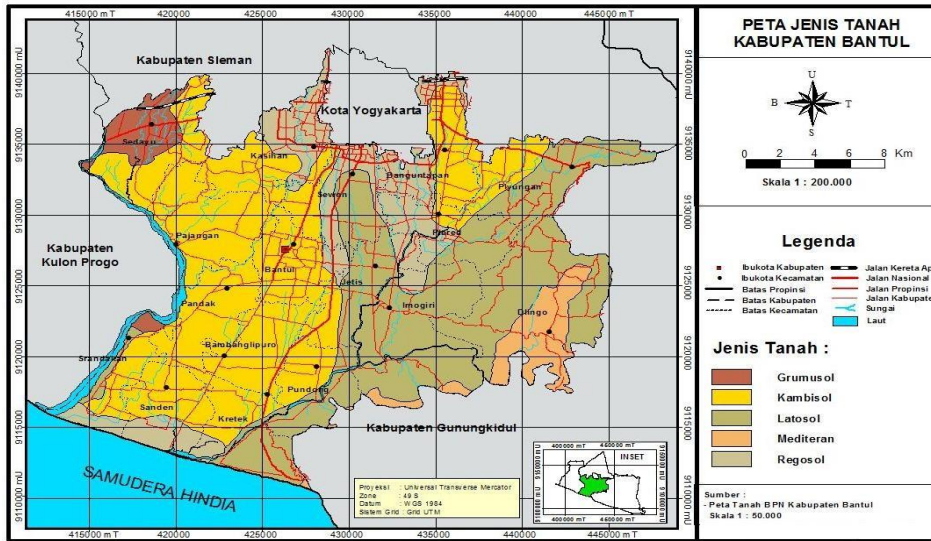
**Tabel 2.2 Formasi Batuan Kabupaten Bantul**

No.	Formasi Batuan	%
1	Aluvial	3,27
2	Batuan Gunung api Tak Terpisah	60,6
3	Endapan Gunung api Muda Merapi	0,01
4	Formasi Sambipitu	1,86
5	Formasi Semilir	7,25
6	Formasi Sentolo	9,04
7	Formasi Wonosari	6,63
8	Formasi Nglanggran	11,3
9	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>

Sumber: Badan Geologi Kementerian ESDM 2003 (diolah) Bappeda Kabupaten Bantul, 2024

### 2.1.1.1.5 Jenis Tanah

Wilayah Kabupaten Bantul mempunyai lima jenis tanah yaitu tanah Grumusol, Kambisol, Latosol, Mediteran, Regosol. Peta jenis tanah dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.



Sumber: BPN, 2024

**Gambar 2.6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Bantul**

Tanah Grumusol berasal dari batuan induk batu gamping berlapis, napal, dan tuff, terdapat di Kapanewon Sedayu, Pajangan, Kasihan, Pandak, Sanden, Bambanglipuro, dan Srandakan. Jenis tanah Kambisol merupakan jenis tanah yang dominan di wilayah Kabupaten Bantul. Jenis tanah ini tersebar pada Kapanewon Kasihan, Sewon, Banguntapan, Jetis, Bantul, dan Bambanglipuro. Tanah Latosol berasal dari batuan induk breksi, tersebar di Kapanewon Dlingo, Imogiri, Pundong, Kretek, Piyungan, dan Pleret. Tanah Mediteran berasal dari batu gamping karang, batu gamping berlapis, dan batupasir, tersebar di Kapanewon Dlingo dan sedikit di Sedayu. Tanah Regosol adalah tanah yang berasal dari material gunung berapi, bertekstur (mempunyai butiran) kasar bercampur dengan pasir, dengan solum tebal dan memiliki tingkat kesuburan rendah.

### 2.1.1.1.6 Hidrologi

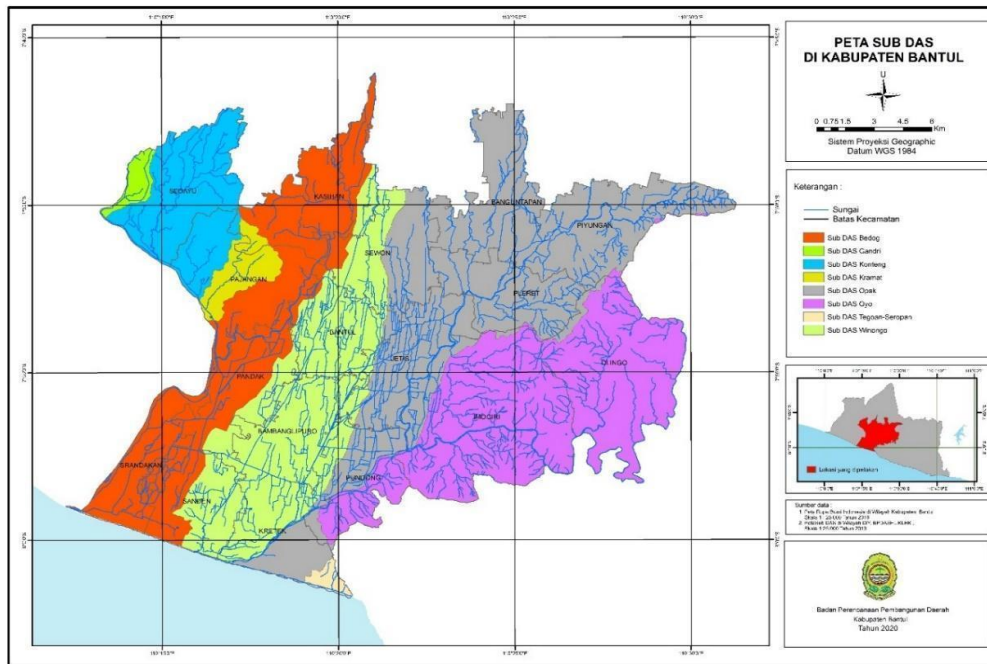
Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum adalah suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang berfungsi untuk menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar di muara sungai. Kabupaten Bantul terdapat dua Daerah Aliran Sungai (DAS)

yaitu DAS Progo dan DAS Opak. Rincian DAS tersebut dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

**Tabel 2.3 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul**

No.	DAS	Sub DAS	Luas (Ha)	Sub Luas DAS (Ha)
1	DAS Progo	Sub DAS Bedog Progo	7.979,02	19.118,16
		Sub DAS Gandri	310,5	
		Sub DAS Koteng	5.602,93	
		Sub DAS Progo Hilir	5.225,71	
2	DAS Opak	Sub DAS Opak	15.037,44	36.500,12
		Sub DAS Oyo	11.576,88	
		Sub DAS Winongo	9.885,80	

Sumber: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai KLHK, 2024



Sumber: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai KLHK, 2024

**Gambar 2.7 Peta Sub Das di Kabupaten Bantul**

Wilayah Kabupaten Bantul dilewati sungai besar dan sungai kecil. Dari sungai tersebut, 5 sungai merupakan sungai prioritas yaitu Sungai Bedog, Winongo, Code, Gajah Wong dan Opak. Sungai-sungai tersebut berperan sebagai sumber air irigasi pertanian, perikanan, namun juga digunakan sebagai pembuangan akhir dari kegiatan manusia baik kegiatan domestik maupun kegiatan usaha/industri yang menjadi sumber pencemar bila tidak dikelola dengan baik dan benar.



**Tabel 2.4 Sungai di Kabupaten Bantul**

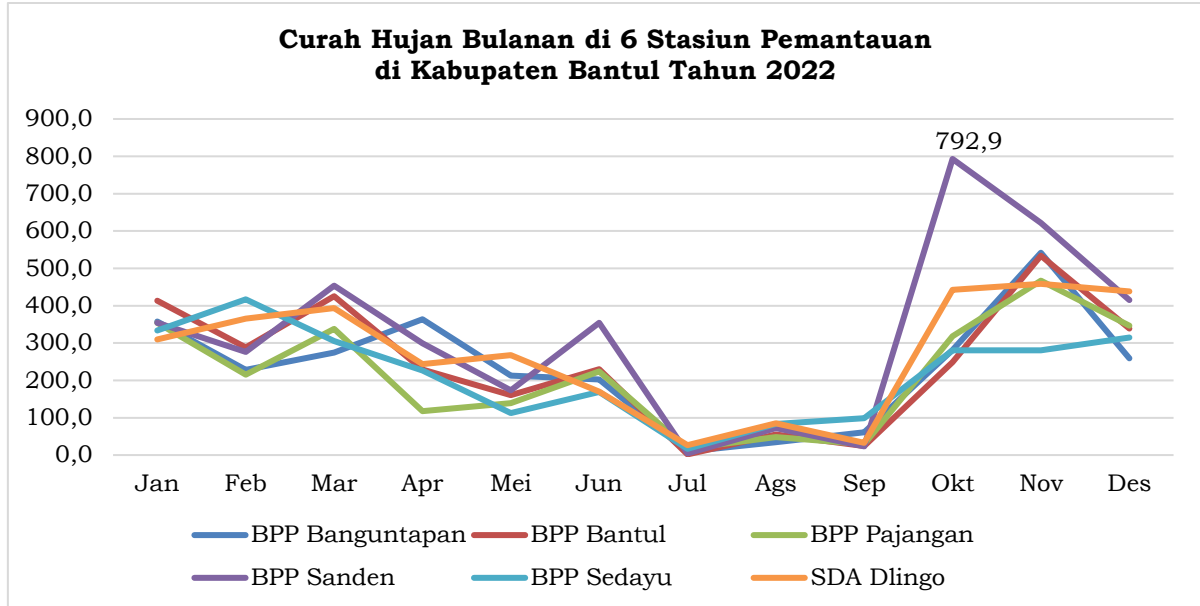
No.	Nama Sungai	Panjang (m)	Hulu	Hilir
<b>I. Sungai Besar (Lintas Provinsi)</b>				
1	Opak	36.140	Srimulyo, Piyungan	Samudera Indonesia, Parangtritis Kretek
2	Oyo	22.850	Jatimulyo, Dlingo	Sungai Opak, Selopamioro Imogiri
3	Progo	26.440	Argosari, Sedayu	Samudera Indonesia, Poncosari Srandakan
<b>II. Sungai Kecil (Lintas Kabupaten)</b>				
1	Bedog	2.700	Tirtonirmolo, Kasihan	Sungai Progo, Triharjo Pandak
2	Buntung	1.950	Srimartani, Piyungan	Kali Gawe, Srimulyo Piyungan
3	Code	9.440	Tamanan, Banguntapan	Sungai Opak, Trimulyo Jetis
4	Gajah Wong	5.520	Singosaren, Banguntapan	Sungai Opak, Wonokromo Pleret
5	Gawe	8.200	Srimartani, Piyungan	Sungai Opak, Srimulyo Piyungan
6	Kedung Semerangan	9.860	Baturetno, Banguntapan	Sungai Gajah Wong, Pleret
7	Kenteng	5.040	Srimartani, Piyungan	Sungai Gawe, Srimartani, Piyungan
8	Konteng	5.570	Argomulyo, Sedayu	Sungai Progo, Argodadi Sedayu
9	Krusuk	5.740	Argosari, Sedayu	Sungai Konteng, Argorejo Sedayu
10	Kuning	1.940	Sitimulyo, Piyungan	Sungai Opak, Sitimulyo, Piyungan
11	Mruwe	7.910	Baturetno, Banguntapan	Sungai Opak, Jambidan Banguntapan
12	Timoho	11.960	Argomulyo, Sedayu	Sungai Konteng, Argorejo Sedayu
13	Winongo	20.080	Ngestiharjo, Kasihan	Sungai Opak, Donotirto Kretek
<b>III. Sungai Kecil (Dalam Kabupaten)</b>				
1	Belik	5.130	Tamanan, Banguntapan	Sungai Opak, Trimulyo Jetis
2	Celeng	10.370	Muntuk, Dlingo	Sungai Oyo, Sriharjo Imogiri
3	Kedung miri	6.280	Terong, Dlingo	Sungai Oyo, Terong Dlingo
4	Kramat	5.230	Bangunjiwo, Kasihan	Sungai Progo, Triwidadi Pajangan
5	Pesing	8.500	Srimulyo, Piyungan	Sungai Opak, Segoroyoso Pleret
6	Plilan	3.570	Selopamioro, Imogiri	Sungai Kajor, Selopamioro Imogiri
7	Urang	5.670	Muntuk, Dlingo	Sungai Oyo, Dlingo
8	Winongo lama	2.200	Tirtohargo Kretek	Sungai Opak, Tirtohargo Kretek

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024

### 2.1.1.1.7 Klimatologi

Ada dua musim yang terjadi di Indonesia, yaitu kemarau dan penghujan. Disebut musim kemarau jika curah hujan per bulan berada di bawah 60 mm per bulan dan sebaliknya terjadi di musim penghujan. Menurut klasifikasi iklim Koppen, Bantul memiliki iklim muson tropis, sama seperti daerah lain di Indonesia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari BMKG DIY terdapat enam Stasiun Pemantauan yang dapat menggambarkan curah hujan di berbagai lokasi di Kabupaten Bantul.



Sumber: BMKG, DIY 2023  
Satuan: mm<sup>3</sup>/bulan

**Gambar 2.8 Curah Hujan menurut Bulan di 6 Stasiun Pemantauan di Kabupaten Bantul Tahun 2022**

Pada tahun 2022, curah hujan tertinggi pada bulan Oktober, November dan menurun di bulan Desember, sedangkan curah hujan terendah pada Juli sampai dengan September. curah hujan maksimum tercatat di BPP Sanden pada bulan Oktober yaitu 792,9 mm<sup>3</sup>/bulan. Sedangkan curah hujan minimum tercatat di BPP Bantul pada bulan Juli yaitu 1,8 mm<sup>3</sup>/bulan.

#### 2.1.1.1.8 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Bantul. Luas lahan di Kabupaten Bantul sebesar 51.170,6 ha terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan. Data penggunaan lahan Kabupaten Bantul, tahun 2023 digunakan citra satelit dengan resolusi spasial yang tinggi (skala 1:50.000) dan mengikuti SNI-7645-1:2014.

Tabel 2.5 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	
		2022	2023
1	Gosong Sungai	33,5	15,56
2	Hutan Kerapatan Rendah	642,6	1.139,83
3	Hutan Kerapatan Sedang	360,2	362,09
4	Hutan Kerapatan Tinggi	611,6	583,84
5	Industri	90,2	167,10
6	Kebun Campuran	6.407,8	7.318,54
7	Lahan Terbuka	78,6	209,59
8	Mangrove	4,0	8,51
9	Pasir Pantai	157,5	160,07
10	Permukiman	23.760,5	22.110,26
11	Sawah Irigasi	12.261,7	12.808,44
12	Sawah Tadah Hujan	1.127,3	1.172,77
13	Semak/Belukar	471,8	213,29
14	Tambak		63,32
15	Tegalan/Ladang	4.175,8	4.303,56
16	Tubuh Air	501,9	533,88
Total		50.685,0	51.170,65

Sumber: DPTR Kabupaten Bantul, 2024

Bersumber dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 51.170,65 ha dari luas semula 50,685,0 ha.

Pada tahun 2019-2022 Terjadi pengurangan sawah di Kabupaten Bantul berdasarkan data Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) oleh BPN Bantul dan data hasil digitasi alih fungsi lahan pertanian dari citra satelit resolusi tinggi (CSRT) setiap tahunnya. Adapun pengurangan sawah irigasi dan tadah hujan 2019 s.d. 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Alih Fungsi Sawah Irigasi (Ha) Kabupaten Bantul Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Alih Fungsi Sawah Irigasi (Ha)	455,22	171,93	106,43	67,38

Sumber: Bappeda dan DPTR 2024, diolah

Fakta perubahan lahan dimaksud di atas mengindikasikan terjadinya alih fungsi lahan pada sawah irigasi menjadi pemanfaatan lahan

yang lain. Hal ini berdampak pada berkurangnya lahan pertanian, terancamnya keseimbangan ekosistem, serta banyaknya buruh tani yang kehilangan pekerjaan yang berakibat pada tingginya angka urbanisasi.

Penyebab kenaikan alih fungsi lahan pada 2019 merupakan masa masa pasca pencabutan moratorium alih fungsi lahan sehingga terjadi derasnya alih fungsi, dan menurun pada tahun 2021 karena diterbitkan Keputusan Bupati nomor 463 Tahun 2021 tentang LP2B Bantul dan adanya aturan LSD.

#### **2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah**

Potensi pengembangan wilayah berada pada kawasan budidaya. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan manusia. Rencana pola ruang kawasan budidaya Kabupaten Bantul sebesar 86% dari luasan pola ruang Kabupaten Bantul. Rencana pola ruang budidaya Kabupaten Bantul terdiri atas: kawasan peruntukan hutan rakyat; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; dan kawasan peruntukan peruntukan lainnya.

##### **a. Kawasan Perkebunan Rakyat**

Kawasan peruntukan perkebunan rakyat direncanakan seluas kurang lebih 16,86% dari luas wilayah Kabupaten Bantul yang penyebarannya difokuskan pada Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Jetis, Kapanewon Pundong, Kapanewon Kretek, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Srandakan, Kapanewon Pandak, dan Kapanewon Sanden.

**b. Kawasan Peruntukan Pertanian**

Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian tanaman lahan kering, dan kawasan peternakan, yaitu:

- 1) Kawasan pertanian lahan basah direncanakan seluas kurang lebih 26,29% dari luas wilayah Kabupaten Bantul difokuskan terutama pada bagian tengah dan selatan, tetapi penyebarannya terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Bantul kecuali Kecamatan Kasihan hanya sebagian kecil wilayah.
- 2) Kawasan pertanian lahan kering di Kabupaten direncanakan seluas kurang lebih 10,35% dari luas wilayah Kabupaten Bantul difokuskan terutama pada bagian timur yaitu di Desa Jatimulyo, Desa Terong, Desa Muntuk, Desa Dlingo Kecamatan Dlingo, sebagian Desa Srimartani, Desa Srimulyo, Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan, Desa Wonolelo, Desa Bawuran, Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret, Desa Imogiri, Desa Selopamioro, Desa Wukirsari, Desa Girirejo, Desa Karangtalun Kecamatan Imogiri, Desa Parangtritis Kecamatan Kretek, Desa Seloharjo Kecamatan Pundong.
- 3) Kawasan peternakan di Kabupaten direncanakan sebagai berikut:
  - a) peternakan itik di Kecamatan Kretek, Kecamatan Bantul, dan Kecamatan Sanden;
  - b) peternakan sapi perah di Kecamatan Srandakan, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Sedayu;
  - c) peternakan sapi potong tersebar di hampir seluruh kecamatan;
  - d) peternakan babi di Kecamatan Srandakan dan Kecamatan Kasihan;
  - e) peternakan kambing tersebar di hampir seluruh kecamatan;
  - f) peternakan kerbau di Kecamatan Sanden dan Kecamatan Banguntapan; dan
  - g) peternakan kelinci di Kecamatan Sanden.

**c. Kawasan Peruntukan Perikanan**

Kawasan peruntukan perikanan terdiri dari:

- 1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap di Kabupaten direncanakan di wilayah Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden dan Kecamatan Kretek untuk pengembangan jenis perikanan laut dan untuk jenis perikanan darat direncanakan di seluruh kecamatan.
- 2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan di Kabupaten direncanakan di Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Sedayu.

**d. Kawasan Peruntukan Pertambangan**

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam meliputi:

- 1) Kecamatan Dlingo berupa Breksi Andesit, Batu Gamping, Batu Pasir, Batu Lempung, dan Fosfat;
- 2) Kecamatan Imogiri berupa Breksi Andesit, Batu Gamping, Mangaan, Lempung, Breksi Pumice, Batu Pasir Tufan, dan Batu Pasir Pumice;
- 3) Kecamatan Piyungan berupa Lempung, Breksi Pumice, dan Batu Pasir Pumice;
- 4) Kecamatan Banguntapan berupa Usaha Lempung dan Tanah Urug;
- 5) Kecamatan Sewon berupa Batu Pasir dan Tanah Urug;
- 6) Kecamatan Pleret berupa Batu Pasir Pumice, Breksi Pumice, Lempung, dan Pasir Tufan;
- 7) Kecamatan Jetis berupa Pasir, Lempung, Breksi Batu Apung, dan Breksi Andesit;
- 8) Kecamatan Banguntapan berupa Batu lempung dan Tanah Urug;
- 9) Kecamatan Pajangan berupa Batu Gamping Berlapis, Pasir, Kerikil berpasir (sirtu), dan Tanah Urug;
- 10) Kecamatan Sedayu berupa Batu Pasir, Batu Gamping, dan Tanah Urug.
- 11) Kecamatan Pandak berupa Batu Gamping, Pasir, Kerikil berpasir, dan Tanah Urug;

- 12) Kecamatan Bambanglipuro berupa Tanah Urug dan Pasir;
- 13) Kecamatan Srandakan berupa Pasir, Kerikil berpasir (Sirtu), Pasir Besi, dan Tanah urug;
- 14) Kecamatan Sanden berupa Tanah Urug, Pasir, dan Pasir Besi.
- 15) Kecamatan Kretek berupa Tanah Urug, Pasir, dan Pasir Besi;
- 16) Kecamatan Pundong berupa Pasir, Lempung, dan Breksi Andesit; dan Seluruh kecamatan yang meliputi Wilayah Kerja Eksplorasi ataupun Wilayah Kerja Eksploitasi minyak dan gas bumi.

**e. Kawasan Peruntukan Industri**

Kawasan peruntukan industri meliputi:

- 1) Kawasan peruntukan industri direncanakan meliputi industri menengah dan besar di Desa Argosari, Desa Argorejo, Desa Argodadi, Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu dan Desa Srimulyo, Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan, industri kecil, dan menengah tersebar di seluruh Kecamatan.
- 2) Industri mikro dan kecil dapat berada di luar kawasan peruntukan industri sepanjang tidak bertentangan sifat dominasi kawasan dan sesuai dengan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi.
- 3) Industri mikro dan kecil merupakan industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan akan diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.
- 4) Pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang tersebar di seluruh kecamatan diarahkan menjadi kawasan industri tertentu UMKM.

**f. Kawasan Peruntukan Pariwisata**

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan.

- 1) Kawasan peruntukan pariwisata budaya di Kabupaten terdapat di:
  - a) Kompleks Makam Raja-raja Imogiri di Desa Girirejo Kecamatan Imogiri;

- b) Kompleks Situs Ambarbinangun di Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan;
  - c) Situs Keraton Mataram di Desa Pleret Kecamatan Pleret;
  - d) Padepokan Ki Ageng Mangir di Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan;
  - e) Kawasan Kotagedhe di Desa agalan dan Desa Singosaren Kecamatan Banguntapan;
  - f) Gua Selarong di Desa Guwosari Kecamatan Pajangan;
  - g) Gua Jepang di Desa Seloharjo Kecamatan Pundong;
  - h) Desa Budaya Dlingo Kecamatan Dlingo, Desa Seloharjo Kecamatan Pundong, Desa Srigading Kecamatan Sanden, Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan, Desa Trimurti Kecamatan Srandakan; Padepokan Seni Bagong Kusudiharja di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan;
  - i) Cepuri Parangkusumo di Desa Parangtritis; dan
  - j) Parangendog di Desa Parangtritis;
- 2) Kawasan peruntukan pariwisata alam terdapat di:
- a) Kawasan Pantai Parangtritis (Parangtritis, Parangkusumo, Depok);
  - b) Kawasan Pantai Samas (Pantai Samas, Pandansari, Patehan);
  - c) Kawasan Pantai Pandansimo (Kuwaru, Pandansimo);
  - d) Kompleks Gua Cerme di Desa Selopamiro, Kecamatan Imogiri;
  - e) Goa Jepang di Desa Seloharjo Kecamatan Pundong;
  - f) Agrowisata Samas di Desa Srigading, Kecamatan Sanden; dan
  - g) Agrowisata Dlingo di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo.
- 3) Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdapat di:
- a) Desa Wisata Kebon Agung di Desa Kebon Agung, Kecamatan Imogiri.
  - b) Desa Kerajinan Gabusan-Manding-Tembi (GMT) di Kecamatan Bantul dan Kecamatan Sewon;
  - c) Desa Kerajinan Krebet di Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan. Desa Kerajinan Kasongan-Jipangan-Gendeng-Lemahdadi (Kajigelem) di Kecamatan Kasihan;



- d) Desa Kerajinan Panjangrejo Kecamatan Pundong;
- e) Desa Wisata Serut;
- f) Desa Wisata Trimulyo; dan
- g) Tempat Rekreasi dan Taman Bermain di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan.

**g. Kawasan Peruntukan Permukiman**

Kawasan peruntukan permukiman terbagi menjadi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.

- 1) Rencana kawasan permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Bantul direncanakan seluas kurang lebih 10,72% dari luas wilayah Kabupaten Bantul penyebarannya difokuskan di wilayah Kecamatan Sewon, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Pleret, dan Kecamatan Piyungan.
- 2) Rencana Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun (Kasiba/Lisiba) Bantul Kota Mandiri di Desa Guwosari, Desa Sendangsari dan Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan dan di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan direncanakan seluas kurang lebih 1.300 (seribu tiga ratus) Hektar.
- 3) Rencana untuk kawasan permukiman perdesaan di wilayah Kabupaten Bantul direncanakan seluas kurang lebih 11,32% dari luas wilayah Kabupaten Bantul penyebarannya di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten, kecuali Kecamatan Banguntapan.

**h. Kawasan Peruntukan Lainnya**

Kawasan peruntukan lainnya meliputi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, dan kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya, dengan sebaran sebagai berikut:

- 1) Rencana kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan di Kabupaten meliputi:
  - a) Akademi Angkatan Udara dan Sekolah Penerbangan TNI Angkatan

- Udara di Kecamatan Banguntapan;
- b) Sekolah Polisi Negara di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri;
  - c) Kompi Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Gondowulung;
  - d) Polisi Air Udara di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek;
  - e) Pos Angkatan Laut di Desa Srigading Kecamatan Sanden; dan
  - f) Stasiun Radar di Kecamatan Kretek.
- 2) Rencana pengembangan kawasan fasilitas pelayanan umum lainnya diarahkan sebagai berikut:
- a) Rencana pengelolaan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa, yaitu:
    - b) pertumbuhan perdagangan secara linier diarahkan sepanjang jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder;
    - c) pengembangan perdagangan dan jasa wajib menyediakan parkir dalam halaman atau gedung;
    - d) perencanaan pintu masuk keluar gedung agar tidak mengganggu sirkulasi dan keamanan berlalulintas; dan
    - e) pengaturan jadwal waktu penyaluran (loading) barang-barang perdagangan pada kawasan yang padat bangunan dan aktivitas.
- 3) Rencana pengembangan fasilitas pendidikan, yaitu :
- a) mengupayakan terlayannya wilayah Kabupaten secara merata dengan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar (TK dan SD) sampai dengan SMA;
  - b) pengembangan kawasan pendidikan tinggi terpadu di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Sewon; dan
  - c) meningkatkan estetika, keamanan, kenyamanan lingkungan, dan lokasi sehingga menunjang kegiatan belajar.
  - d) Rencana pengembangan fasilitas kesehatan, yaitu:
  - e) menjamin kelancaran aksesibilitas terhadap fasilitas Kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit; dan
  - f) menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi pengguna/pasien dalam menjalani perawatan dan pengobatan.
- 4) Rencana pengelolaan peribadatan dilakukan dengan memperhatikan

aspek sumber dayalahan dan potensi umat, kegiatan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lahan yang layak bagi pengembangan, sedangkan potensi umat sebagai barometer untuk mengukur tingkat kebutuhan sarana peribadatan.

- 5) Rencana pengembangan fasilitas rekreasi/olah raga, yaitu:
  - a) fasilitas olah raga skala Kabupaten berpusat di area Stadion Sultan Agung;
  - b) pengembangan rekreasi terpadu dengan skala Kabupaten dan regional dan rekreasi tematik yang dikelola secara profesional;
  - c) pengembangan pusat rekreasi skala regional dan lokal diarahkan pada wilayah-wilayah yang masih tersedia lahan yang besar dengan tingkat pertumbuhan rendah, agar menarik kegiatan yang lain sehingga tercapai dekonsentrasi pembangunan di Kabupaten; dan
  - d) fasilitas rekreasi dan olahraga diarahkan tersebar di masing-masing kecamatan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan.
- 6) Rencana pengembangan fasilitas perkantoran yaitu:
  - a) fungsi perkantoran dibangun dekat dengan sasaran pelayanannya; dan
  - b) perkantoran swasta lainnya dapat berlokasi pada semua kawasan budidaya kecualipadakawasan pertanian.
- 7) Rencana pengembangan taman pekuburan/pemakaman.

Luasan yang direncanakan untuk permukiman akan terpenuhi di akhirtahun perencanaan, karena pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan migrasi pendatang yang ingin investasi maupun menyekolahkan anak di wilayah Yogyakarta umumnya dan Kabupaten Bantul khususnya.

### **2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 disebutkan kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam, meliputi kawasan rawan gempa bumi,

kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan kekeringan. Berdasarkan hasil kajian dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2011, Kawasan rawan bencana sebagai berikut:

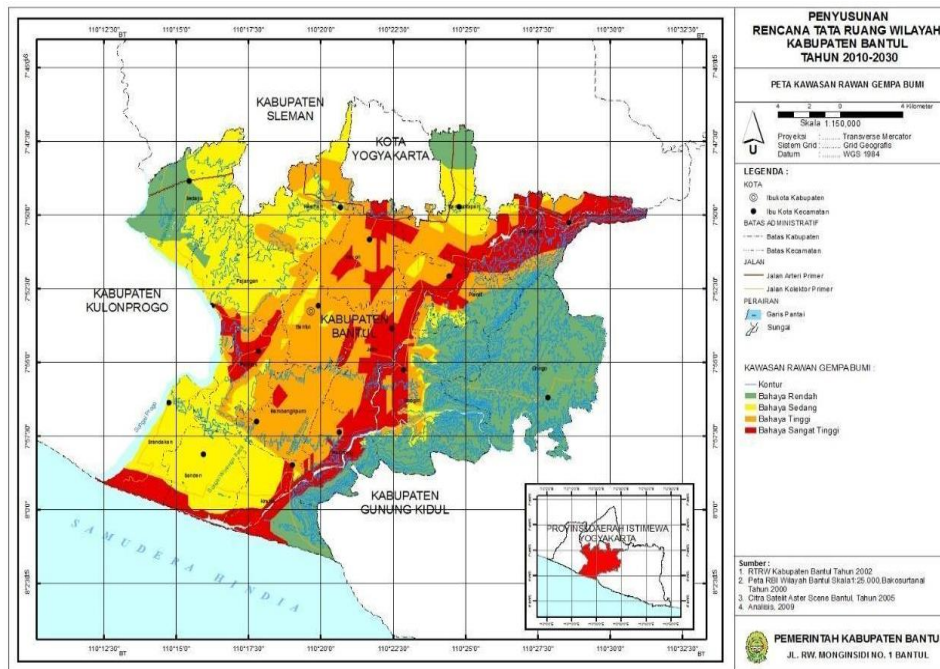
**Tabel 2.7 Kawasan Rawan Bencana Menurut Perda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030**

No	Jenis Bencana	Lokasi yang Berpotensi
1.	Kawasan rawan gempa bumi	Di seluruh Kapanewon
2.	Kawasan rawan longsor	Piyungan, Pleret, Dlingo, Imogiri, Pundong dan Pajangan
3.	Kawasan rawan banjir	Srandakan, Pandak, Kretek, Sanden, Pundong, Jetis dan Pleret
4.	Kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi	Kretek, Srandakan, dan Sanden, sebagian Kapanewon Pandak, sebagian Kapanewon Pundong, sebagian Kapanewon Imogiri, sebagian Kapanewon Jetis, dan sebagian Kapanewon Bambanglipuro
5.	Kawasan rawan kekeringan	Dlingo, sebagian Piyungan, sebagian Pajangan, sebagian Pleret, sebagian Imogri, sebagian Pundong, sebagian Sedayu, sebagian Kasihan, dan sebagian Kretek

Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

Kawasan Rawan bencana di Kabupaten Bantul disajikan dalam gambar berikut:

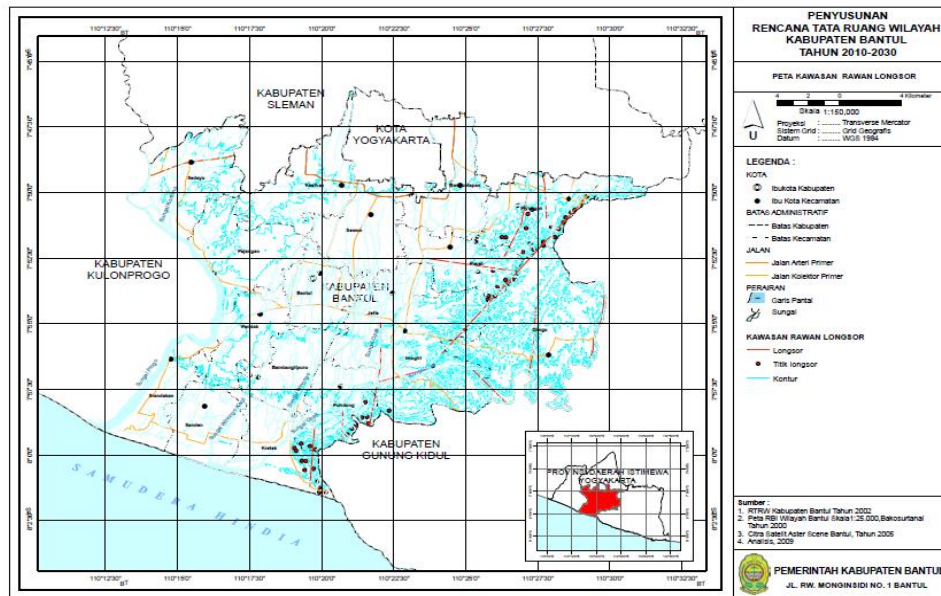
1. Kawasan rawan bencana gempa bumi meliputi seluruh kapanewon.



Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

**Gambar 2.9 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bantul**

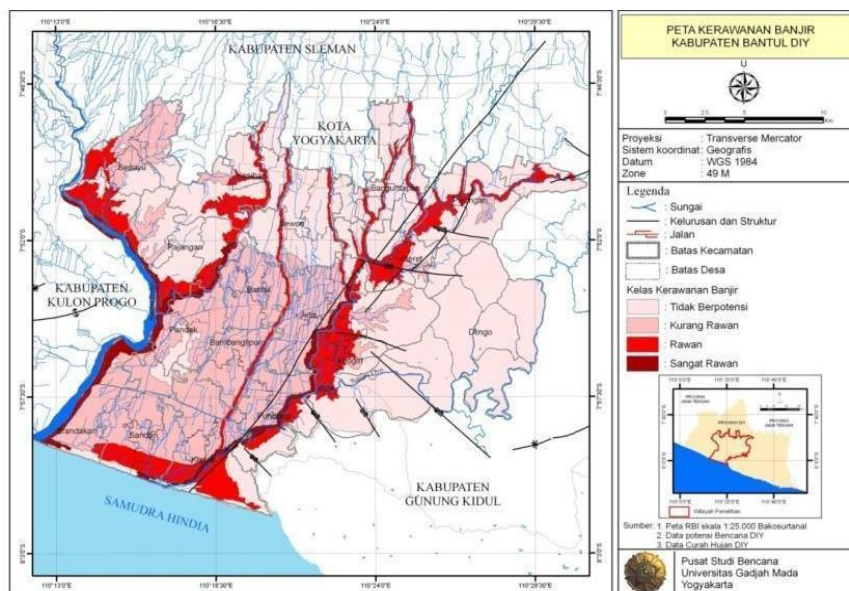
2. Kawasan rawan longsor meliputi wilayah Kapanewon Piyungan, Pleret, Dlingo, Imogiri, Pundong dan Pajangan.



Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

**Gambar 2.10 Peta Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Bantul**

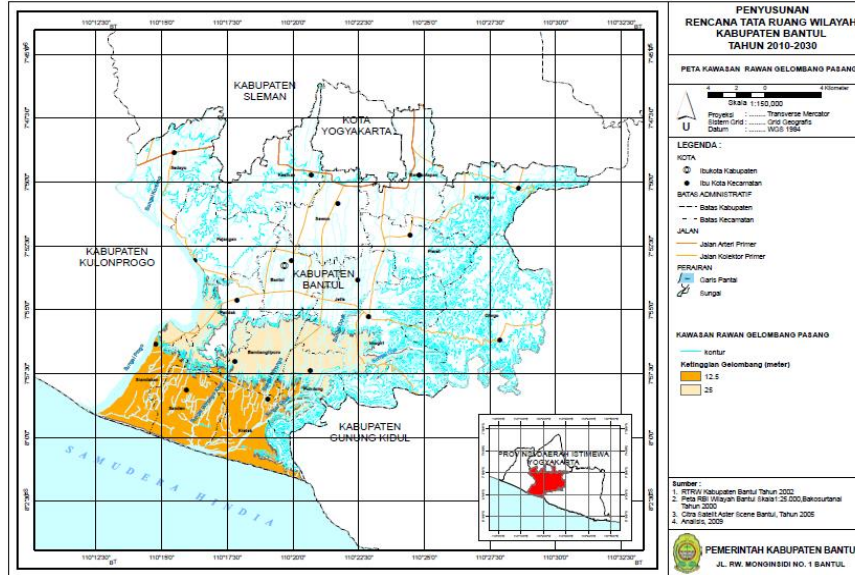
3. Kawasan rawan banjir meliputi wilayah Kapanewon Srandakan, Pandak, Kretek, Sanden, Pundong, Jetis dan Pleret



Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

**Gambar 2.11 Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Bantul**

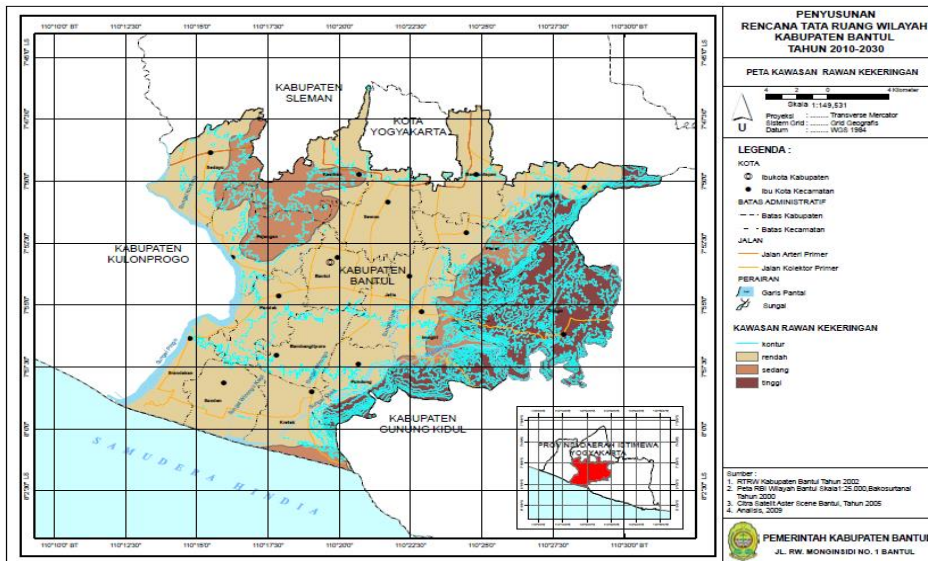
4. Kawasan rawan gelombang ekstrem dan abrasi meliputi Kapanewon Kretek, Srandakan, dan Sanden, sebagian Kapanewon Pandak, Pundong, Imogiri, Jetis, dan Bambanglipuro.



Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

**Gambar 2.12** Peta Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang Kabupaten Bantul

5. Kawasan rawan kekeringan meliputi Kapanewon Dlingo, sebagian Piyungan, sebagian Pajangan, sebagian Pleret, sebagian Imogiri, sebagian Pundong, sebagian Sedayu, sebagian Kasihan, dan sebagian Kretek.

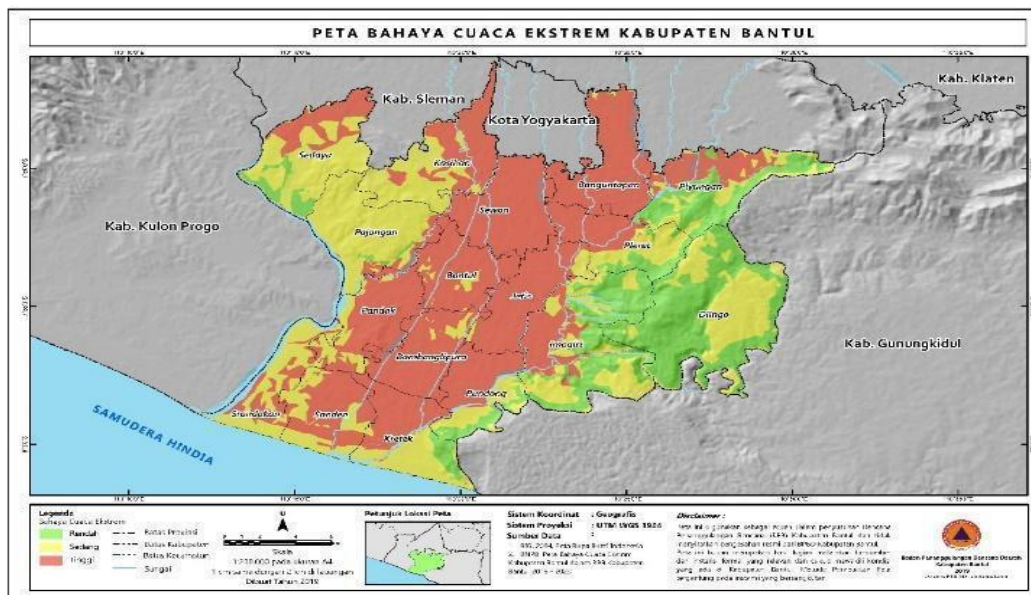


Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

**Gambar 2.13** Peta Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Bantul

Selain kawasan rawan bencana tersebut di atas masih ada potensi bencana lain di Kabupaten Bantul, diantaranya bahaya cuaca ekstrem, tsunami, kebakaran, dan epidemi wabah penyakit. Peta potensi bencana disajikan pada gambar berikut.

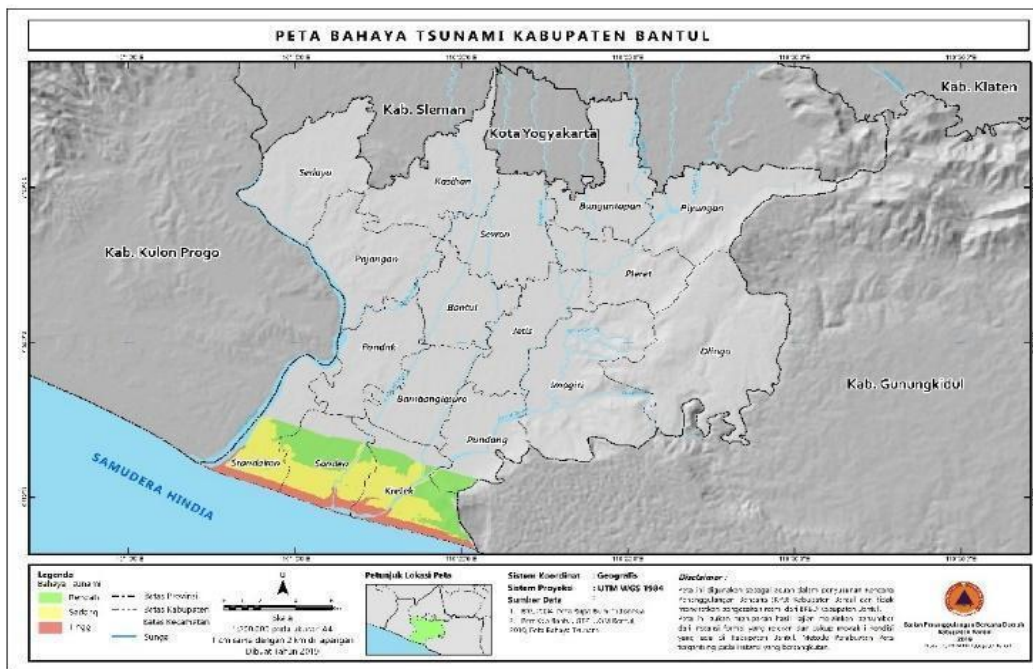
1. Potensi bahaya cuaca ekstrem meliputi Kapanewon Banguntapan, Sewon, Bantul, Jetis, Pandak, Bambanglipuro, Sanden, dan sebagian Kretek, Kasihan, Piyungan, Imogiri.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

**Gambar 2.14 Peta Bahaya Cuaca Ekstrem Kabupaten Bantul**

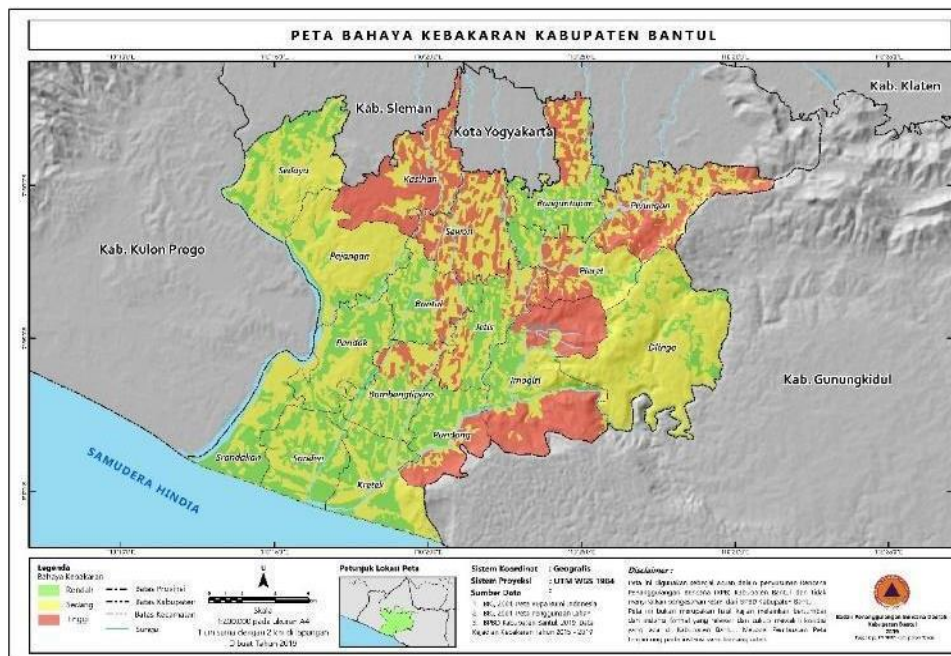
2. Potensi bahaya tsunami meliputi Kapanewon Srandakan, Sanden, dan Kretek.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

**Gambar 2.15** Peta Bahaya Tsunami Kabupaten Bantul

- Potensi bahaya kebakaran meliputi Kapanewon Kasihan, Sewon, Piyungan, dan sebagian Pleret, dan Imogiri, Pundong, Bantul, Bambanglipuro.

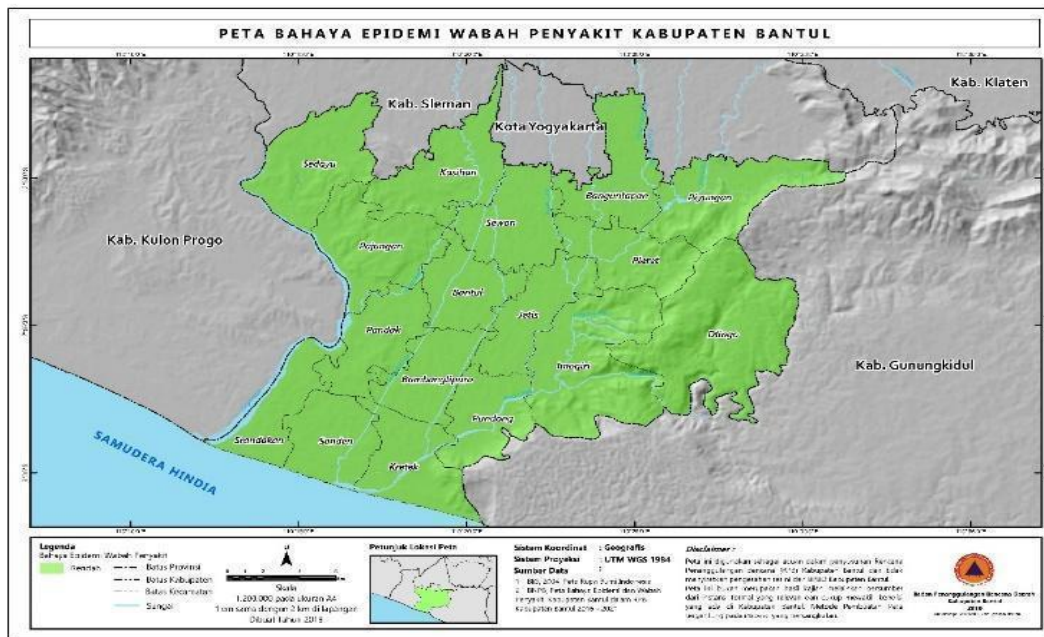


Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

**Gambar 2.16** Peta Bahaya Kebakaran Kabupaten Bantul

- Potensi bahaya epidemi wabah meliputi seluruh kapanewon.

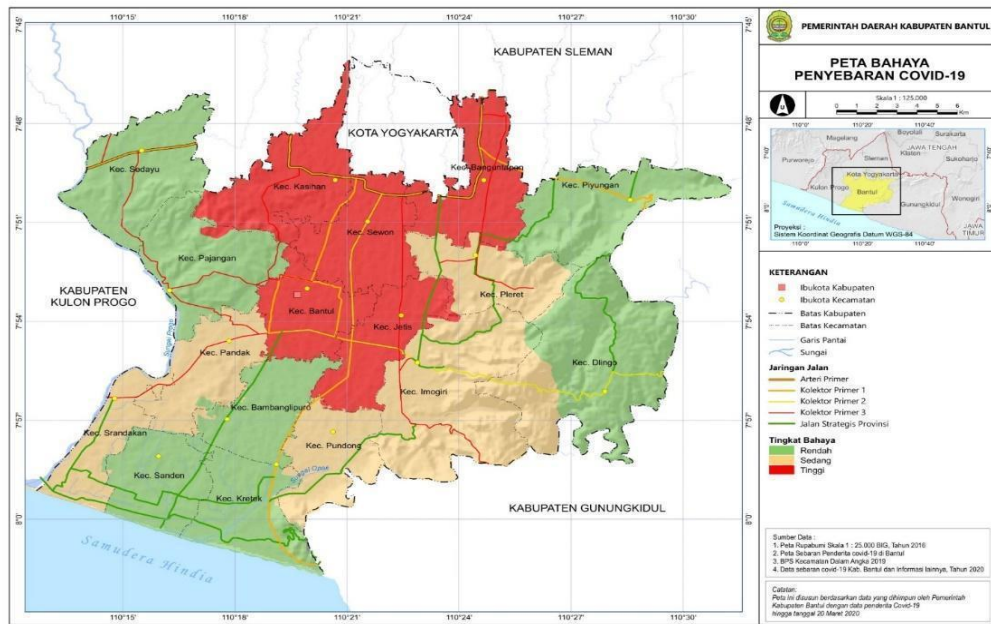




Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

**Gambar 2.17 Peta Bahaya Epidemi Wabah Penyakit Kabupaten Bantul**

Pada tahun 2019 terjadi wabah pandemi Covid-19. Pasien positif Covid-19 di DIY mulai terkonfirmasi pada tanggal 15 Maret 2020 sebanyak satu orang dan terus meningkat dan menyebar sampai wilayah Kabupaten Bantul. Dari 17 kecamatan terdapat tiga wilayah kapanewon terkonfirmasi lebih dari 1000 kasus pada tahun 2020 yaitu Kapanewon Banguntapan, Sewon, dan Kasihan. Peta Penyebaran Covid-19 menurut Dokumen Rencana Kontijensi Menghadapi Covid-19 Kabupaten Bantul, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, 2020

**Gambar 2.18 Peta Bahaya Penyebaran Covid-19 Kabupaten Bantul**

Upaya pemerintah dalam mengendalikan covid berhasil, pembatasan aktivitas, sosialisasi pola hidup sehat, pemakaian masker dan vaksinasi mampu meredam gejala covid pada tahun 2022. Mempertimbangkan situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik, pemulihan ekonomi yang berjalan cepat, dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia untuk menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada seluruh wilayah Indonesia maka keluarlah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi.

#### 2.1.1.4 Demografi

Keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari kebijakan kependudukan yang berdampak terhadap dinamika penduduk suatu daerah. Kebijakan kependudukan pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia secara menyeluruh. Secara umum kebijakan kependudukan didasarkan pada kondisi demografis daerah.

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2019-2023 menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul cenderung meningkat . Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul menurut Kapanewon Tahun 2019 – 2023**

No.	Kapanewon	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Srandakan	31.218	31.082	31.078	31.069	31.123
2	Sanden	31.972	31.810	31.786	31.844	31.879
3	Kretek	30.863	30.764	30.667	30.720	30.828
4	Pundong	35.908	35.666	35.811	35.896	36.180
5	Bambanglipuro	41.880	41.706	41.693	41.861	42.026
6	Pandak	52.013	52.036	51.892	52.218	52.434
7	Bantul	64.365	64.652	64.730	65.451	66.027
8	Jetis	58.549	58.631	58.709	59.199	59.554
9	Imogiri	63.542	63.835	63.820	64.281	64.723
10	Dlingo	39.537	39.998	40.002	40.257	40.460
11	Pleret	48.170	48.497	48.570	49.052	49.640
12	Piyungan	52.333	52.862	53.025	53.457	54.112
13	Banguntapan	111.955	113.298	113.684	115.127	116.177
14	Sewon	99.807	100.563	100.872	101.431	102.256
15	Kasihan	103.527	104.599	104.961	106.202	107.495
16	Pajangan	36.040	36.551	36.768	37.281	37.740
17	Sedayu	47.646	48.156	48.445	48.899	49.507
<b>Jumlah</b>		<b>949.325</b>	<b>954.706</b>	<b>956.513</b>	<b>964.245</b>	<b>972.161</b>
<b>Pertumbuhan (%)</b>		<b>1,02</b>	<b>0,57</b>	<b>0,19</b>	<b>0,81</b>	<b>0,82</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, diolah, 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2023 meningkat 0,82% dibandingkan tahun 2022. Kenaikan ini cukup signifikan dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di masa pandemi covid-19 tahun 2020 dan tahun 2021.

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul menurut wilayah kapanewon, terbanyak ada di Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Kasihan dan Kapanewon Sewon. Daerah tersebut merupakan daerah percepatan pengembangan wilayah dan pusat-pusat perekonomian sehingga secara umum menjadi daya tarik bagi penduduk untuk tinggal dilokasi tersebut.

Dilihat dari kepadatan penduduk kapanewon, penyebaran penduduk belum merata, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.9 Kepadatan Penduduk Geografis di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No.	Kapanewon	Luas (km <sup>2</sup> )	Luas 2023 (km <sup>2</sup> )	Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> )				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Srandakan	18,32	18,51	1.704,04	1.696,62	1.696,40	1.695,91	1.681,38
2	Sanden	23,16	23,11	1.380,48	1.373,49	1.372,45	1.374,96	1.379,23
3	Kretek	26,77	26,47	1.152,90	1.149,20	1.145,57	1.147,55	1.164,65
4	Pundong	23,68	23,11	1.516,39	1.506,17	1.512,29	1.515,88	1.565,58
5	Bambanglipuro	22,70	23,10	1.844,93	1.837,27	1.836,70	1.844,10	1.819,68
6	Pandak	24,30	24,26	2.140,45	2.141,40	2.135,47	2.148,89	2.160,98
7	Bantul	21,95	21,81	2.932,35	2.945,42	2.948,97	2.981,82	3.027,66
8	Jetis	24,47	23,53	2.392,68	2.396,04	2.399,22	2.419,25	2.531,12
9	Imogiri	54,49	54,92	1.166,12	1.171,50	1.171,22	1.179,68	1.178,53
10	Dlingo	55,87	59,54	707,66	715,91	715,98	720,55	679,57
11	Pleret	22,97	24,20	2.097,08	2.111,32	2.114,50	2.135,48	2.051,27
12	Piyungan	32,54	33,26	1.608,27	1.624,52	1.629,53	1.642,81	1.627,01
13	Banguntapan	28,48	28,42	3.931,00	3.978,16	3.991,71	4.042,38	4.087,76
14	Sewon	27,16	27,90	3.674,78	3.702,61	3.713,99	3.734,57	3.664,88
15	Kasih	32,38	32,09	3.197,25	3.230,36	3.241,54	3.279,86	3.349,36
16	Pajangan	33,25	33,29	1.083,91	1.099,28	1.105,80	1.121,23	1.133,70
17	Sedayu	34,36	34,19	1.386,67	1.401,51	1.409,92	1.423,14	1.448,11
<b>Kepadatan Penduduk Geografis Kabupaten Bantul</b>		<b>506,85</b>	<b>511,706</b>	<b>1.872,99</b>	<b>1.883,61</b>	<b>1.887,17</b>	<b>1.902,43</b>	<b>1.899,84</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, diolah, 2024

Pada tahun 2023 kepadatan penduduk Kabupaten Bantul menurun menjadi 1.899,84 jiwa untuk setiap km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi ada di 3 (tiga) wilayah kapanewon yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yaitu Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Sewon dan Kapanewon Kasihan. Sementara itu kepadatan penduduk geografis terendah ada di wilayah dataran tinggi yang berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul yaitu Kapanewon Dlingo.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hampir di semua kapanewon mengalami peningkatan kepadatan penduduk. Hal ini perlu diwaspadai terkait kebijakan alih fungsi lahan pertanian, karena dengan semakin pesatnya penambahan penduduk akan menyebabkan masalah daya

dukung lingkungan menjadi semakin terbatas, dan akan berdampak pada peningkatan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman.

Kebijakan kependudukan perlu mempertimbangkan komposisi penduduk menurut kelompok usia, di mana ada perbedaan perlakuan terhadap kelompok usia produktif dan non produktif. Disamping itu kelompok usia dapat dibedakan menjadi kelompok pra kerja (usia muda atau 1000 hari pertama kehidupan sampai dengan usia sekolah pendidikan dasar), kelompok kerja (usia produktif) dan kelompok pasca kerja (usia lanjut/pensiun).

**Tabel 2.10 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia di Kabupaten Bantul Tahun 2019 – 2023**

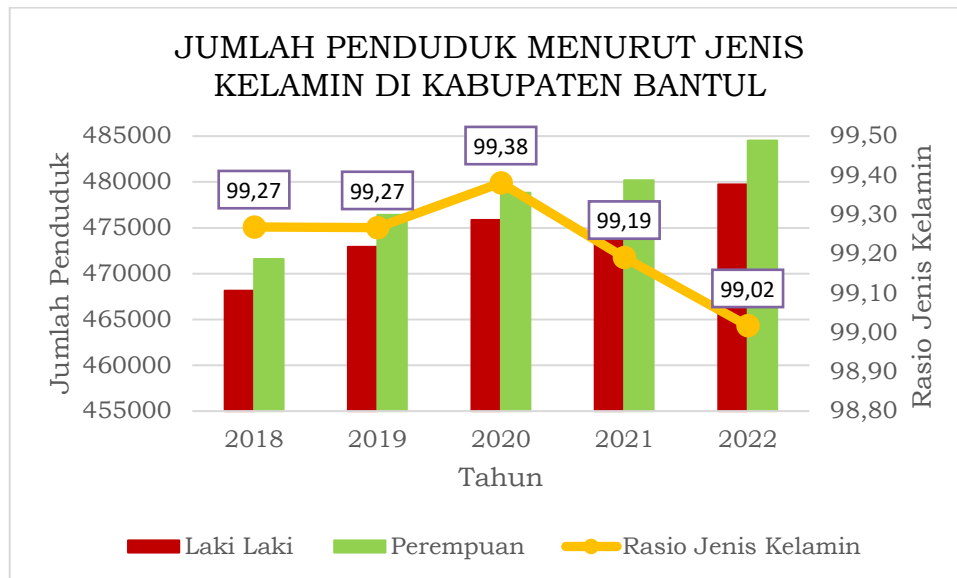
No	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Proporsi 2023 (%)	
		2019	2020	2021	2022	2023		
1	0 – 4	58.270	59.539	59.207	59.634	57.300	5,89	20,20
2	5 – 9	69.500	69.111	68.092	66.877	66.343	6,82	
3	10 – 14	71.130	72.451	73.244	73.462	72.771	7,49	
4	15 – 19	65.820	66.698	65.845	67.128	68.913	7,09	69,54
5	20 – 24	64.420	65.883	66.389	67.164	68.297	7,03	
6	25 – 29	66.659	67.959	68.474	68.236	67.884	6,98	
7	30 – 34	65.916	65.634	65.952	66.976	68.179	7,01	
8	35 – 39	75.583	75.793	73.867	70.939	68.885	7,09	
9	40 – 44	72.659	73.010	73.867	76.039	76.730	7,89	
10	45 – 49	67.358	68.073	69.495	69.154	70.703	7,27	
11	50 – 54	68.482	67.487	67.217	68.528	67.973	6,99	
12	55 – 59	59.016	59.606	60.798	61.455	63.389	6,52	
13	60 – 64	49.665	51.923	52.007	53.728	55.099	5,67	
14	65 – 69	32.746	33.929	35.888	38.087	41.080	4,23	10,25
15	70 – 74	21.437	21.111	21.771	23.429	24.808	2,55	
16	> 75	40.664	36.499	34.400	33.409	33.807	3,48	
<b>JUMLAH</b>		<b>949.325</b>	<b>954.706</b>	<b>956.513</b>	<b>964.245</b>	<b>972.161</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa proporsi penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2023 didominasi kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebesar 69,54%, sementara itu penduduk kelompok usia muda (0-14 tahun) sebesar 20,20%, dan kelompok usia lanjut (di atas 64 tahun) sebesar 10,25%. Penduduk usia muda dan penduduk usia lanjut disebut juga penduduk non produktif.

Menurut proyeksi penduduk Indonesia yang didasarkan pada survei penduduk antar sensus 2015, tahun 2020-2024 merupakan puncak bonus demografi/puncak keemasan (*the window of opportunity*). *The Window of Opportunity* (jendela peluang) merupakan kondisi saat rasio ketergantungan (*dependency ratio*) mencapai titik terendah<sup>1</sup>. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menentukan kebijakan pembangunan manusia harus dapat menangkap peluang adanya bonus demografi khususnya kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2022

**Gambar 2.19 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul 2018-2022**

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin diperlukan guna menentukan kebijakan yang berperspektif *gender*. Penduduk laki-laki Kabupaten Bantul pada tahun 2022 sebanyak 479.742 jiwa (49,75%) dan penduduk perempuan sebanyak 484.503 jiwa (50,25%). Informasi mengenai komposisi jenis kelamin penduduk di Kabupaten Bantul dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan sehingga kelompok penduduk laki – laki dan perempuan dapat memiliki akses yang sama

<sup>1</sup> Population Policy, Sonny Harry B Harmadi dan Riant Nugroho, 2020

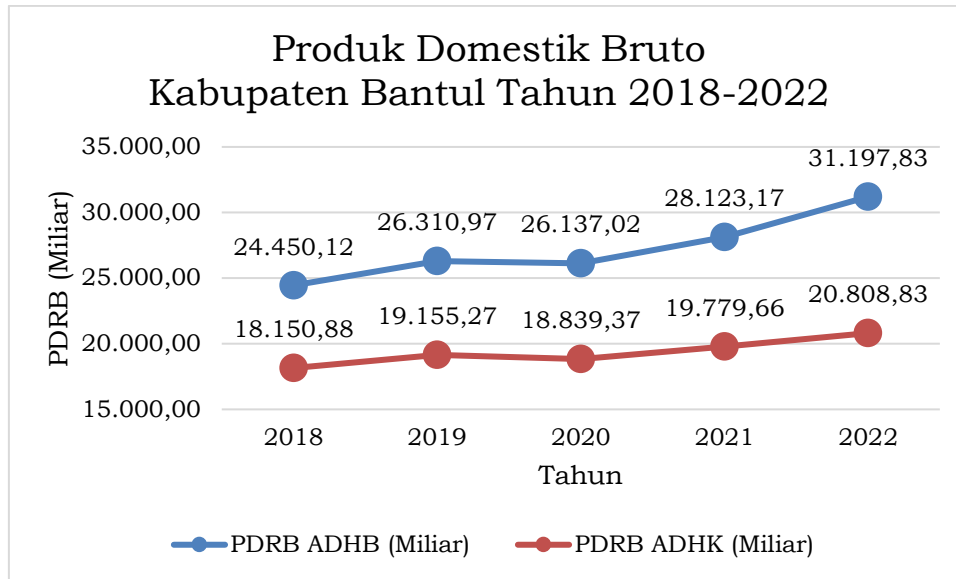
untuk berperan dalam pembangunan serta menerima manfaat dari pembangunan secara adil dan setara.

### **2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat antara lain dengan pembangunan terhadap masyarakat pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

#### **2.1.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB pada dasarnya merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi suatu wilayah tertentu dalam satu tahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. PDRB selain menjadi bahan penyusunan perencanaan juga bermanfaat untuk bahan evaluasi dari hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Besaran PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

**Gambar 2.20 Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022**

Berdasarkan grafik, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) mempunyai *trend* yang sama, yaitu mengalami kenaikan berturut turut dalam kurun waktu 2016 – 2019. Namun pada tahun 2020 PDRB mengalami penurunan, hal ini karena dampak pandemi Covid-19 yang memengaruhi penurunan kontribusi beberapa sektor lapangan usaha secara signifikan. Pada tahun 2022 PDRB ADHK maupun ADHB mengalami kenaikan dan merupakan PDRB tertinggi Kabupaten Bantul dalam kurun waktu lima tahun. Kontribusi PDRB ADHB menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.11 Perkembangan Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022**

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,65	13,10	14,09	13,60	13,78
2	Pertambangan dan Penggalian	0,54	0,51	0,46	0,42	0,41
3	Industri Pengolahan	15,21	15,16	14,84	14,50	14,16
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
6	Konstruksi	9,72	9,75	8,50	9,00	8,82
7	Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor	8,69	8,64	8,47	8,18	8,29
8	Transportasi dan Pergudangan	4,72	4,85	4,46	4,44	4,89

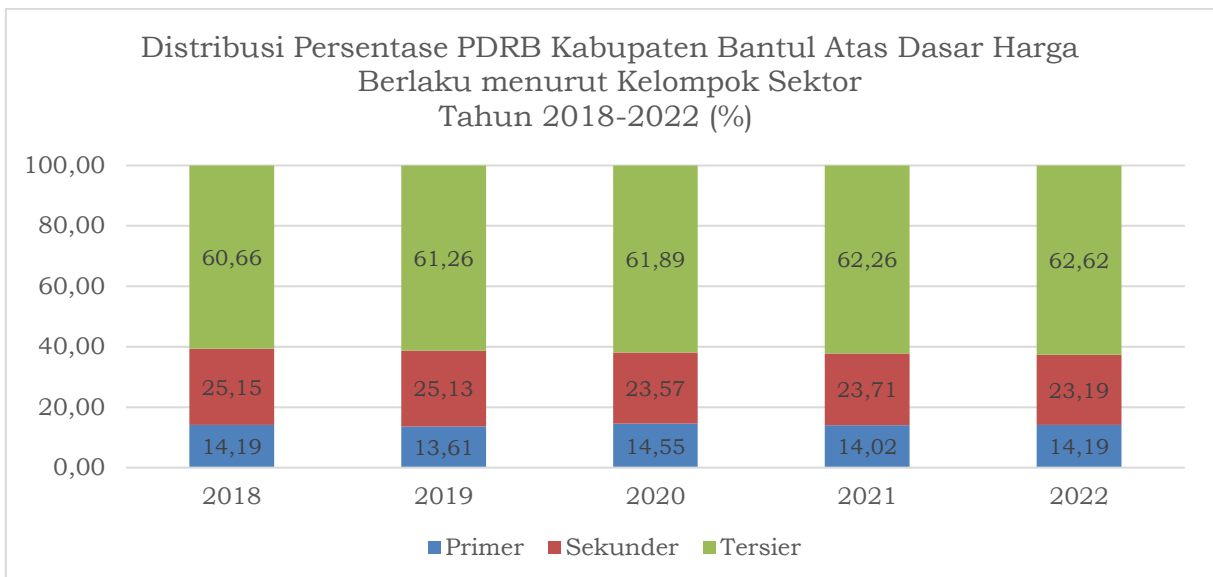


No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,68	11,95	10,74	11,12	11,97
10	Informasi dan Komunikasi	7,32	7,26	8,73	9,66	9,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,83	2,95	2,88	2,88	3,01
12	Real Estate	6,56	6,71	6,91	6,57	6,30
13	Jasa Perusahaan	0,47	0,49	0,43	0,43	0,44
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	7,72	7,58	7,73	7,41	7,13
15	Jasa Pendidikan	6,83	6,93	7,40	7,32	6,96
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,81	1,85	2,29	2,28	2,23
17	Jasa-jasa Lainnya	2,04	2,05	1,86	1,97	2,13
<b>PDRB</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel di atas menjelaskan terdapat tiga lapangan usaha yang kontribusinya relatif besar dibanding dengan lapangan usaha yang lainnya. Ketiga lapangan usaha tersebut adalah pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; penyediaan akomodasi dan makan minum.

Berdasarkan data PDRB ADHB, distribusi persentase PDRB dikelompokkan dalam sektor tersier, sekunder dan primer.



Sumber: BPS Kabupaten Bantul (2023), diolah.

**Gambar 2.21 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kelompok Sektor Tahun 2018-2022 (%)**

Dari Gambar di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 pangsa sektor primer (pertanian dan pertambangan dan penggalian) cenderung

meningkat dari 14,02% di tahun 2021 menjadi 14,19% di tahun 2022. Sebaliknya pada sektor sekunder (industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan konstruksi) mengalami penurunan dari 23,71% di tahun 2021 menjadi 23,19% di tahun 2022. Sektor tersier (kategori lainnya) secara konsisten mengalami *trend* kenaikan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Sektor tersier ini memberikan kontribusi lebih dari 60% dari total PDRB Kabupaten Bantul.

### 1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan kapasitas produksi secara berkesinambungan. Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul tahun 2018-2022 cenderung fluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Bantul	5,47	5,53	-1,65	4,99	5,2
DIY	6,2	6,59	-2,67	5,53	5,15
Nasional	5,17	5,02	-2,07	3,7	5,31

Sumber: BPS, 2023

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bantul tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat besar atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,65%. Penurunan tersebut disebabkan pandemic covid-19 yang terjadi sejak awal maret 2020. Perekonomian Bantul selama 2021 tumbuh sebesar 4,49 persen, hal ini karena 13 (tiga belas) lapangan usaha yang tumbuh lebih cepat dari tahun sebelumnya.

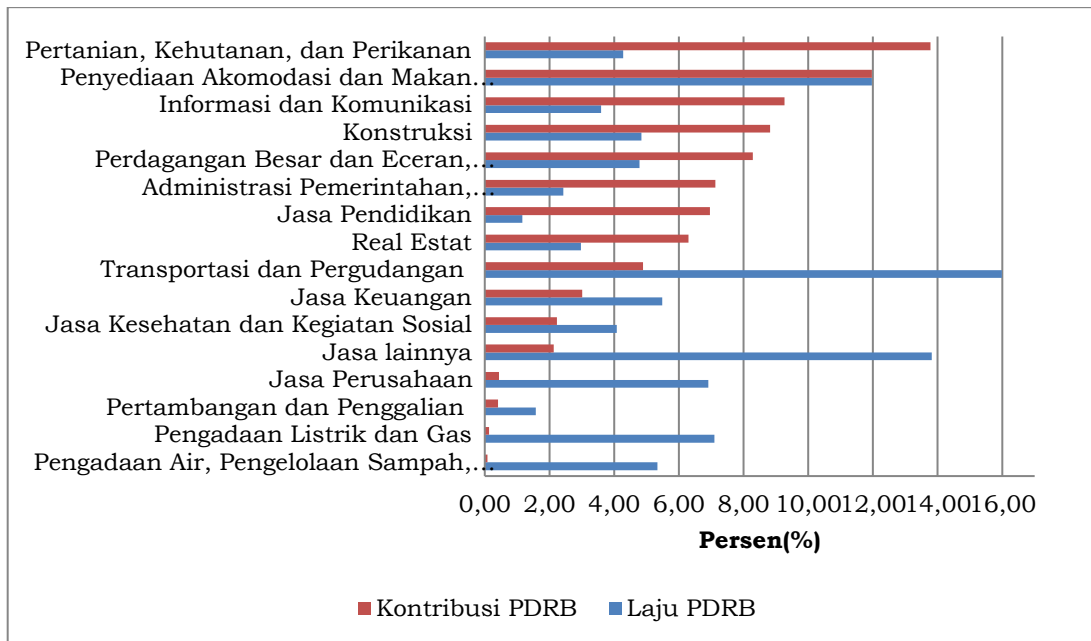
Pada tahun 2022, perekonomian Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional secara umum mulai mengalami perbaikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai LPE yang meningkat dua tahun berturut-turut. LPE Kabupaten Bantul tahun 2022 sebesar 5,20 melebihi DIY 5,15 persen, namun masih di bawah Nasional sebesar 5,31 persen. Besarnya pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Tabel 2.13 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2018-2022**

No	Kategori/Industri/Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,00	0,13	4,80	1,60	4,28
2	Pertambangan dan Penggalian	1,57	-0,27	-11,32	-5,14	1,58
3	Industri Pengolahan	5,53	5,48	-4,71	0,82	3,09
4	Pengadaan Listrik, Gas	4,85	4,83	-1,77	2,48	7,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4,80	8,62	0,61	6,62	5,34
6	Konstruksi	7,39	5,08	-13,78	10,80	4,84
7	Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor	5,59	5,11	-4,20	1,23	4,78
8	Transportasi dan Pergudangan	5,51	6,45	-12,58	3,71	15,99
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,69	8,77	-11,55	7,04	11,97
10	Informasi dan Komunikasi	6,20	7,27	19,89	16,21	3,60
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,59	10,00	-2,41	2,03	5,49
12	Real Estate	5,41	6,51	0,23	0,27	2,97
13	Jasa Perusahaan	5,37	7,38	-14,40	6,69	6,91
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,44	3,21	-1,96	-0,42	2,43
15	Jasa Pendidikan	6,08	6,65	3,79	3,92	1,16
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,74	7,18	18,86	4,17	4,08

No	Kategori/Industri/Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
17	Jasa Lainnya	7,14	6,09	-11,21	11,95	13,82
<b>PDRB</b>		<b>5,47</b>	<b>5,53</b>	<b>-1,65</b>	<b>4,99</b>	<b>5,20</b>

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

**Gambar 2.22 Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2022**

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, pada tahun 2022 seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan minimal 1%. Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor dengan pertumbuhan terendah sebesar 1,58%. Sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 15,99%. PDRB Kabupaten Bantul tahun 2022 didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 14,16%, pertanian sebesar 13,78%, dan penyediaan akomodasi sebesar 11,97%.

## 2) PDRB Perkapita

PDRB per kapita secara teoritis merupakan ketersediaan barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh setiap masyarakat di daerah tersebut. Semakin besar nilai PDRB per kapita, semakin banyak pula ketersediaan

barang dan jasa yang dapat mereka nikmati. Dengan demikian semakin besar PDRB per kapita, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Bantul.

**Tabel 2.14 Perkembangan PDRB Per Kapita di Kabupaten Bantul Tahun 2018 – 2022**

No	Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan Tahun 2010	
		Nilai (000 Rp)	Nilai (000 Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2018	24.287,59	18.030,22	4,27
2	2019	25.725,00	18.728,00	3,87
3	2020	26.556,00	19.141,00	2,20
4	2021	28.161,00	19.806,00	3,48
5	2022	30.792,00	20.538,00	3,70

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Nilai PDRB per kapita baik ADHK maupun ADHB Kabupaten Bantul sejak tahun 2018-2022 senantiasa mengalami kenaikan, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan penduduk Kabupaten Bantul, meskipun pada tahun 2020 laju PDRB per kapita lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat serta terganggunya distribusi barang dan jasa akibat pembatasan kegiatan masyarakat.

Terdapat kenaikan PDRB per kapita tahun 2020 meskipun PDRB mengalami penurunan, hal ini karena jumlah penduduk dari hasil SP2020 jumlahnya lebih kecil daripada data jumlah penduduk pada tahun sebelumnya (menggunakan data proyeksi). PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, tahun 2021 sebesar Rp28.161.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp30.792.000,00.

### 2.1.2.2 Laju Inflasi

Inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Tinggi rendahnya

inflasi dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah keseimbangan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*), biaya produksi, jumlah uang beredar, nilai tukar dan ekspektasi. Perkembangan tingkat inflasi Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.15 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Laju Inflasi Kabupaten Bantul	2,61	2,71	1,4	2,29	6,49
Laju Inflasi Kota Yogyakarta/DIY	2,66	2,77	1,4	2,29	6,49
Laju Inflasi Nasional	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Besaran inflasi Kabupaten Bantul dari tahun 2018 dan tahun 2019 lebih rendah dari pada inflasi DIY dan Nasional. Mulai tahun 2020 BPS Kabupaten Bantul sudah tidak menghitung laju inflasi di Kabupaten Bantul karena perubahan indeks harga di Kabupaten Bantul relatif mirip dengan perubahan indeks harga di Kota Yogyakarta. Inflasi tahun 2021 sebesar 2,29, penyebab inflasi ini karena komoditas pangan cabe rawit merah yang tidak stabil. Pada tahun 2022 Inflasi Kota Yogyakarta meningkat menjadi 6,49 melebihi laju inflasi Nasional. Laju inflasi pada tahun 2022 merupakan laju inflasi tertinggi selama lima tahun terakhir disebabkan oleh adanya kenaikan bensin dan bahan bakar rumah tangga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Komoditas lain yang dominan menyumbang inflasi di DIY dan Nasional adalah angkutan udara, beras dan telur ayam ras.

Dinamika naik turunnya inflasi Kabupaten Bantul sejalan dengan Inflasi Nasional. Kabupaten Bantul membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Kegiatan koordinasi secara periodik dilaksanakan guna mengidentifikasi dan menentukan solusi dalam pengendalian inflasi. Bantul telah membuat Peraturan Bupati tentang peta jalan pengendalian inflasi daerah tahun 2022-2024 dimana terdapat 4 indikator yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

### 2.1.2.3 Rasio Gini

Rasio Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna.

Menurut Harry T. Oshima, nilai Rasio Gini dibagi menjadi tiga tingkatan, jika nilai kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

**Tabel 2.16 Rasio Gini Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2018-2022**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Gini Kabupaten Bantul	0,422	0,418	0,441	0,41	0,454
Rasio Gini DIY	0,423	0,434	0,441	0,439	0,449
Rasio Gini Nasional	0,38	0,385	0,384	0,384	

Sumber: BPS, 2023

Tingkat kesenjangan di Kabupaten Bantul pada kurun waktu 2019-2023 masih tergolong dalam kategori “kesenjangan sedang” karena berkisar antara 0,400-0,500. Pada tahun 2023 Rasio Gini Kabupaten Bantul mengalami penurunan menjadi 0,410, angka ini merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir. Hampir seluruh Kabupaten/Kota se DIY mengalami kenaikan di tahun 2023. Gini rasio Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah 0,454 naik 0,044 dibanding tahun 2022.

### 2.1.2.4 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan krusial dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

**Tabel 2.17 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2019 – 2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul	12,92	13,50	14,04	12,27	11,96
Tingkat Kemiskinan D.I Yogyakarta	11,70	12,28	12,80	11,34	11,04
Tingkat Kemiskinan Nasional	9,41	9,78	10,14	9,54	9,36

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Pada Tahun 2023 tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul menurun menjadi 11,96% atau lebih rendah 0,31% dibandingkan tahun 2022. Tingkat kemiskinan di Bantul relatif lebih tinggi dibandingkan kemiskinan DIY dan Nasional.

Kemiskinan bukan hanya masalah jumlah jiwa atau proporsi penduduk miskin (P0) tetapi juga menyangkut kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur sejauh mana perbedaan antara rerata pengeluaran miskin dari garis kemiskinannya. Semakin tinggi nilai P1, maka semakin jauh rerata pengeluaran masyarakat miskin dari garis kemiskinannya. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

**Tabel 2.18 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2018 – 2022**

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	369.480	381.538	405.613	418.265	445.511
2	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	134.835	131.151	138.660	146.980	130.130
3	Tingkat Kemiskinan (%)	13,43	12,92	13,5	14,04	12,27
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,17	1,87	1,85	2,24	2,11
5	Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	0,46	0,43	0,43	0,54	0,5

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul pada tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2020 dan 2021 angka kemiskinan mengalami peningkatan karena adanya pandemi Covid-19. Jumlah penduduk miskin tahun 2022 berkurang sekitar 16 ribu jiwa dibandingkan dengan tahun 2021. Indeks kedalaman kemiskinan dan



keparahan kemiskinan mengalami penurunan dan garis kemiskinan naik 6,51% menjadi Rp. 445.511.

**Tabel 2.19 Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) per Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022**

No	Kapanewon	2020	2021	2022
1	Bambanglipuro	6.698	9.262	4.974
2	Banguntapan	8.224	7.981	6.566
3	Bantul	6.309	5.743	6.734
4	Dlingo	9,775	9.241	10.531
5	Imogiri	13.949	13.099	14.529
6	Jetis	8.895	8.274	9.053
7	Kasih	10.836	9.820	9.021
8	Kretek	3,562	4.906	3.350
9	Pajangan	8.897	9.551	10.207
10	Pandak	11.453	13.198	8.167
11	Piyungan	7.708	7.530	4.980
12	Pleret	8.731	8.672	8.814
13	Pundong	6.516	9.045	5.760
14	Sanden	5.110	6.698	4.959
15	Sedayu	6.015	6.650	7.903
16	Sewon	10.579	9.594	8.954
17	Srandakan	5.403	7.716	5.628
<b>Total</b>		<b>138.660</b>	<b>146.980</b>	<b>130.130</b>

Sumber: Dinas Sosial dan Bappeda Kabupaten Bantul, diolah 2023

Pada tahun 2021 kapanewon dengan kemiskinan tertinggi di Kabupaten Bantul adalah Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pandak dan Kapanewon Kasihan. Pada tahun 2022 kapanewon dengan kemiskinan tertinggi adalah Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo dan Kapanewon Pajangan. Perubahan daerah kantong kemiskinan ini disebabkan oleh perbedaan *baseline* data, tahun 2021 menggunakan data DTKS sedangkan tahun 2022 menggunakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diperoleh dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Tabel 2.20 Tingkat Kemiskinan Ekstrem di DIY Tahun 2021-2022

Kabupaten/ Kota	2021		2022	
	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (ribuan)	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (ribuan)	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem
Kulon Progo	15,18	3,44	14,78	3,31
Bantul	27,73	2,65	27,51	2,59
Gunungkidul	39,24	5,13	33,26	4,3
Sleman	19,41	1,54	18,16	1,42
Yogyakarta	2,34	0,53	3,01	0,67
<b>DIY</b>	<b>103,91</b>	<b>2,63</b>	<b>96,73</b>	<b>2,41</b>

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Pemerintah Pusat menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada tahun 2024. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, kemiskinan ekstrem Kabupaten Bantul tahun 2022 sebesar 2,59% atau sebanyak 27.510 orang.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengendalian harga tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul nomor 15 tahun 2022 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024 yang mencakup 4 (empat) strategis pengendalian yaitu: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

#### 2.1.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM diukur dengan pendekatan tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup layak. Penghitungan IPM untuk dimensi pengetahuan menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Dimensi standar hidup layak menggunakan indikator Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita, sedangkan untuk menghitung dimensi kesehatan menggunakan indikator Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH). Metode

agregasinya disempurnakan menjadi rata-rata geometrik. Ketidakterdediaan data PNB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, digunakan proksi pengeluaran perkapita yang disesuaikan, dari data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

**Tabel 2.21 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2019 – 2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
IPM Kabupaten Bantul	80,01	80,36	80,63	81,04	81,74
IPM D.I Yogyakarta	79,99	79,95	80,22	80,65	81,09
IPM Nasional	71,92	72,81	73,16	73,77	74,39

*Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024*

Berdasarkan hasil penghitungan IPM, dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir nilai IPM Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang positif. Nilai IPM terus mengalami peningkatan mencapai 81,74 pada tahun 2023 dengan level capaiannya menjadi sangat tinggi (IPM  $\geq$  80).

Capaian IPM Kabupaten Bantul konsisten naik dari tahun ke tahun dan lebih tinggi dibandingkan DIY dan nasional. Hal ini menunjukkan kinerja pembangunan pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi semakin dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat.

IPM Kabupaten Bantul masih dapat ditingkatkan antara lain dengan peningkatan laju pertumbuhan indeks kesehatan yaitu lebih mengutamakan perbaikan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kemudahan akses sarana kesehatan yang tersedia, penggunaan air bersih, keberadaan fasilitas BAB penduduk dan kualitas kesehatan lingkungan tempat tinggal penduduk; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengetahuan yaitu dengan meningkatkan partisipasi sekolah penduduk melalui upaya semua anak usia sekolah (SD-SLTA) bisa bersekolah dan tidak putus sekolah; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengeluaran dengan meningkatkan daya beli penduduk melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, membuka lapangan usaha baru, dan adanya program bantuan sosial pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH).

### 2.1.2.6 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Angka RLS adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

**Tabel 2.22 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2019 – 2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
RLS Kabupaten Bantul	9,54	9,55	9,57	9,59	9,79
RLS D.I Yogyakarta	9,38	9,55	9,64	9,75	9,83
RLS Nasional	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan, dari 9,54 tahun pada tahun 2019 menjadi 9,79 tahun pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan minat penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat, meskipun angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bantul menamatkan sekolah setingkat Sekolah Menengah Pertama. Angka RLS di Kabupaten Bantul lebih tinggi satu tahun daripada angka RLS Nasional. Tingginya angka RLS di Kabupaten Bantul didukung dengan sarana prasarana berupa ketersediaan lembaga penyelenggara pendidikan baik formal dan non formal, negeri maupun swasta di Kabupaten Bantul.

Upaya peningkatan RLS di Kabupaten Bantul perlu dilakukan dengan menekan angka putus sekolah melalui kebijakan Bantuan Operasional Sekolah dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bidang pendidikan.

### 2.1.2.7 Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) merupakan indikator kinerja daerah dalam bidang pendidikan. AHLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan bidang pendidikan di berbagai jenjang dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

**Tabel 2.23 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2019 – 2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
AHLS Kabupaten Bantul	15,15	15,17	15,38	15,48	15,61
AHLS D.I Yogyakarta	15,58	15,59	15,64	15,65	15,66
AHLS Nasional	12,95	12,98	13,08	13,1	13,15

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024

AHLS Kabupaten Bantul pada tahun 2023 sebesar 15,61 tahun meningkat dari tahun 2022 sebesar 15,48 tahun. Hal ini berarti lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (tujuh tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 15,61 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan perguruan tinggi jenjang Diploma III.

AHLS Kabupaten Bantul secara konsisten naik dari tahun ke tahun dan melebihi AHLS Nasional, meskipun masih dibawah AHLS DIY.

#### **2.1.2.8 Usia Harapan Hidup (UHH)**

Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

**Tabel 2.24 Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2019 – 2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
UHH Kabupaten Bantul	73,77	74,58	74,6	74,61	74,64
UHH D.I Yogyakarta	74,92	74,95	75,04	75,11	75,18
UHH Nasional	71,34	73,37	73,46	73,7	73,93

Sumber: BPS, 2023

UHH pada tahun 2019 sebesar 73,77 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 74,64. UHH Kabupaten Bantul secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun dan melebihi UHH Nasional meskipun tidak setinggi UHH DIY.

Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor antara lain Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), prevalensi balita gizi buruk, prevalensi HIV /AIDS, dan angka kesakitan (Incidence Rate/ IR) DBD. Penyakit Tidak Menular (PTM) juga memengaruhi pencapaian indikator UHH. Kelompok PTM, seperti stroke, Diabetes Mellitus, kanker,

hipertensi merupakan kelompok penyakit penyebab kematian terbanyak di Indonesia, dengan kecenderungan meningkat. Peningkatan PTM jelas berdampak negatif pada produktivitas masyarakat. Di sisi lain, penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan. Kondisi morbiditas dan mortalitas PTM makin meningkat disertai dengan masih banyaknya penyakit menular di masyarakat, akan menjadikan beban ganda dalam pelayanan kesehatan sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan. Untuk itu penanganan penyakit menular dan tidak menular harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis.

### 2.1.2.9 Tingkat Pengangguran

Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (*open unemployment*) dan setengah pengangguran (*disguised unemployment*). Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan). Jumlah pengangguran Kabupaten Bantul pada tahun 2022 meningkat jika dibandingkan tahun 2021.

**Tabel 2.25 Jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Bantul	16.188	18.080	24.783	24.075	24.875
DIY	75.032	71.482	101.846	106.432	94.945
Nasional	7.073.390	7.104.420	9.767.750	9.102.050	8.425.930

Sumber: BPS, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.26 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
TPT Kabupaten Bantul	3,06	4,06	4,04	3,97	3,78
TPT DIY	3,14	4,57	4,56	4,06	3,69
TPT Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber: BPS, 2024

Data menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 3,97% di tahun 2022 menjadi 3,78% di tahun 2023, namun lebih tinggi dibandingkan DIY. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu program peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja.

### **2.1.3 Aspek Pelayanan Umum**

#### **2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib Dasar**

##### **2.1.3.1.1 Pendidikan**

##### **a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

##### **1) Kondisi Pendidikan PAUD**

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal meliputi TK dan RA, sedangkan jalur pendidikan non formal meliputi Kelompok Bermain (KB), TPA, dan satuan PAUD sejenis.

**Tabel 2.27 Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bantul  
Tahun 2019-2023**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah		Jumlah Peserta Didik	Guru			Rasio Murid/Guru
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%	
<b>2019</b>								
1	TK/RA	2	544	27.360	2.357	1.258	53,37	11,61
2	KB	0	490	10.286	1.373	0	0	7,49
3	TPA	0	57	1.125	189	0	0	5,95
4	SPS	0	237	4.283	653	0	0	6,58
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>1.328</b>	<b>43.054</b>	<b>4.572</b>	<b>1.258</b>	<b>27,51</b>	<b>9,42</b>

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah		Jumlah Peserta Didik	Guru			Rasio Murid/Guru
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%	
<b>2020</b>								
1	TK/RA	7	553	26.188	2.886	1.674	58,00	9,07
2	KB	0	492	8.263	1.605	0	0	5,15
3	TPA	0	56	811	214	0	0	3,79
4	SPS	0	237	3.604	778	0	0	4,63
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>1.338</b>	<b>38.866</b>	<b>5.483</b>	<b>1.674</b>	<b>30,53</b>	<b>7,09</b>
<b>2021</b>								
1	TK/RA	7	553	22.810	2.844	1.627	57,35	8,02
2	KB	0	489	7.864	1.031	0	0	7,63
3	TPA	0	55	670	154	0	0	4,35
4	SPS	0	235	3.109	493	0	0	6,31
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>1.332</b>	<b>34.453</b>	<b>4.522</b>	<b>1.627</b>	<b>35,98</b>	<b>7,62</b>
<b>2022</b>								
1	TK/RA	7	553	26.169	2.816	1.649	58,56	9,29
2	KB	0	495	4.826	1.047	0	0	4,61
3	TPA	0	54	848	149	0	0	5,69
4	SPS	0	232	3.485	525	0	0	6,64
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>1.334</b>	<b>35.328</b>	<b>4.537</b>	<b>1.649</b>	<b>36,35</b>	<b>7,79</b>
<b>2023</b>								
1	TK/RA	7	552	26.432	2.766	1.598	57,77	9,56
2	KB	0	497	10.047	1.601	0	0	6,28
3	TPA	0	60	1.064	248	0	0	4,29
4	SPS	0	233	3.600	737	0	0	4,88
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>1.342</b>	<b>32.143</b>	<b>5.352</b>	<b>1.598</b>	<b>29,86</b>	<b>6,01</b>

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2024

Pada tahun 2023 lembaga PAUD yang dikelola swasta di Kabupaten Bantul sebanyak 1.342 lembaga sehingga dapat membantu dalam peningkatan Pendidikan PAUD di Kabupaten Bantul. Secara umum rasio murid per guru pada tahun 2019-2023 di bawah angka 10, artinya seorang guru membimbing kurang dari 10 siswa PAUD.

## **2) Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan PAUD**

Indikator untuk mengukur tingkat partisipasi Pendidikan PAUD adalah APK dan APM. APK PAUD menunjukkan proporsi anak yang terdaftar dalam Pendidikan Anak Usia Dini terhadap penduduk pada kelompok usia 4-6 tahun. Adapun APM PAUD menunjukkan Proporsi



penduduk pada kelompok umur tertentu yang terdaftar dalam PAUD terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM PAUD juga menunjukkan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia PAUD. Nilai APK dan APM PAUD di Kabupaten Bantul dari tahun 2019-2023 sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.28 Perkembangan APK dan APM PAUD di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	106,24	97,7	100,17	103,86	106,04
2.	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (%)	83,84	81,2	85,21	87,43	88,07

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2024

Nilai APK yang semakin tinggi menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk secara umum semakin meningkat, hal ini berarti kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan yang dimulai pada usia dini semakin meningkat pula, sebagaimana diketahui bahwa usia PAUD merupakan masa emas perkembangan otak dan kecerdasan anak. Turunnya nilai APK pada tahun 2020 merupakan dampak pandemi Covid-19 dimana terjadi perubahan pola pembelajaran yang menuntut penggunaan teknologi informasi/internet yang belum sepenuhnya dapat diakses oleh siswa PAUD secara optimal. Fasilitas pendidikan jenjang PAUD yang tersedia pada masa pandemi dan PPKM mikro atau PPKM darurat membatasi ruang gerak masyarakat termasuk pembelajaran tatap muka.

## **b. Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**

### **1) Kondisi Pendidikan Dasar**

Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun merupakan program pemerintah yang menjamin penduduk usia 7-15 tahun untuk mengenyam pendidikan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun ditentukan oleh banyak faktor diantaranya kualitas tenaga pendidik, lembaga pendidikan dan partisipasi peserta didik. Kondisi pendidikan dasar sembilan tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.29 Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bantul  
Tahun 2019-2023**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah		Jumlah Siswa	Guru		
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%
<b>2019</b>							
1	SD	281	82	75.099	5.007	2.507	50,07
2	MI	3	29	6.195	450	136	30,22
3	SMP	47	45	31.552	2.399	1.612	67,19
4	MTs	9	15	8.026	693	436	62,91
<b>2020</b>							
1	SD	281	83	73.523	5.033	2.552	50,71
2	MI	3	30	6.584	492	215	43,70
3	SMP	47	46	31.618	2.268	1.461	64,42
4	MTs	9	16	8.273	735	368	50,07
<b>2021</b>							
1	SD	281	84	70.941	5.125	2.374	46,32
2	MI	3	30	6.584	496	219	44,15
3	SMP	47	48	31.933	2.323	1.355	58,32
4	MTs	9	16	8.469	706	346	49,01
<b>2022</b>							
1	SD	281	85	70.428	5.214	2.454	47,07
2	MI	3	38	6.808	570	197	34,56
3	SMP	47	48	31.618	2.357	1.269	53,84
4	MTs	9	19	8.983	781	387	49,55
<b>2023</b>							
1	SD	281	86	69.267	5173	2.621	50,67
2	MI	3	38	7.386	613	244	39,80
3	SMP	47	48	31.618	2295	1.193	51,98
4	MTs	9	23	9.055	797	369	46,30

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase pendidik bersertifikasi mulai tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pusat bahwa mulai tahun 2021 membatasi kuota dan menaikkan *passing grade* pemberkasan sertifikasi pendidik. Penurunan jumlah pendidik yang bersertifikasi juga disebabkan oleh pembatasan peserta penjarangan Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPG) serta masa pensiun pendidik.

Rasio murid dan guru pada jenjang Sekolah Dasar dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.30 Rasio Murid dan Guru Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
	Jumlah Guru	5.457	5.525	5.621	5.784	5.786
	Jumlah Murid	81.294	80.107	77.525	77.236	76.653
	Rasio murid per guru	14,9	14,5	13,79	13,35	13,25
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>					
	Jumlah Guru	3.092	3.003	3.029	3.138	3.092
	Jumlah Murid	39.578	39.891	40.402	40.601	40.673
	Rasio murid per guru	12,8	13,28	13,33	12,94	13,15

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2024

Pada tahun 2023 rasio perbandingan jumlah murid dengan jumlah guru jenjang SD/MI adalah 13,25, artinya satu guru melayani 13 murid, menurun dibandingkan tahun 2022. Sementara itu rasio perbandingan jumlah guru dengan jumlah murid jenjang SMP/MTS adalah 13,15 artinya satu guru melayani 13 murid, mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021. Membaiknya rasio murid-guru dalam satu sekolah meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar.

**Tabel 2.31 Ketersediaan Sekolah per Jumlah Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No.	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
	Jumlah gedung sekolah	395	397	398	407	408
	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	86.394	86.597	85.631	84.291	83.096
	Rasio	45,72	45,84	46,48	48,28	49,10
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>					
	Jumlah gedung sekolah	116	118	120	123	127
	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	40.424	41.694	43.624	44.732	44.776
	Rasio	28,70	28,30	27,51	27,49	28,36

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2024

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 setiap 10.000 penduduk usia 7 – 12 tahun tersedia 49 fasilitas pendidikan sekolah dasar, sementara itu untuk setiap 10.000 penduduk usia 13 – 15 tahun tersedia 28 fasilitas pendidikan menengah pertama. Ketersediaan sekolah di wilayah Kabupaten Bantul di atas sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.

## 2) Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan.

APM merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya terhadap jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.

**Tabel 2.32 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2022**

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Partisipasi Kasar					
	APK SD/MI	95,26	101,78	99,38	92,95	93,78
	APK SMP/MTs	101,38	102,86	104,45	92,01	92,99
2.	Angka Partisipasi Murni					
	APM SD/MI	85,86	92,96	92,08	85,94	89,51
	APM SMP/MTs	76,8	79,01	80,88	72,62	77,92

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2024

Dari tabel diketahui bahwa realisasi APK SD/MI dan APK SMP/MTs pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022, begitu juga yang terjadi pada APM SD/MI dan APM SMP/MTs juga mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi penduduk yang bersekolah sesuai kelompok usia secara umum meningkat.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah indikator pendidikan yang menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

**Tabel 2.33 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bantul Tahun 2019- 2023**

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
	Jumlah murid usia 7-12 tahun	80.902	82.166	81.865	85.283	78.807
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	86.394	86.597	85.631	84.291	83.096
	APS SD/MI	93,64	94,88	95,6	101,18	94,84
<b>2</b>	<b>SMP/Mts</b>					
	Jumlah murid usia 13-15 tahun	39.047	41.006	41.888	44.354	42.418
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	40.424	41.694	43.624	44.732	44.766
	APS SMP/MTs	96,59	98,35	96,02	99,15	94,73

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2024

Pada tahun 2023 Angka Partisipasi Sekolah di Bantul mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan masih banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah tidak sesuai dengan kelompok usianya. Data menunjukkan bahwa penduduk usia sekolah 7-12 yang bersekolah diluar kelompok usia mencapai 4,23% dari penduduk usia sekolah 7-12 tahun, sedangkan kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah diluar kelompok usia 13-15 tahun mencapai 17,84% dari penduduk kelompok usia 13-15 tahun.

### 3) Tingkat Kelulusan dan Putus Sekolah Jenjang SD dan SMP

Tingkat kelulusan jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada lima tahun terakhir hingga tahun 2023 mencapai 100%.

**Tabel 2.34 Perkembangan Tingkat Kelulusan Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Persentase Kelulusan	2019	2020	2021	2022	2023
SD / MI	100	100	100	100	100
SMP / MTs	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2024

Dalam kaitannya dengan angka putus sekolah, segala upaya telah dilakukan untuk meniadakan anak putus sekolah. Angka putus sekolah pada tahun 2019-2023 menunjukkan penurunan. Hal ini terjadi karena meningkatnya kesadaran dan pemahaman orang tua siswa tentang pentingnya pendidikan.

**Tabel 2.35 Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
SD/MI	0,004	0,004	0,003	0,03	0,0039
SMP/MTs	0,01	0,004	0,004	0,04	0,0098

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2024

### c. Kondisi Pendidikan NonFormal

Penyelenggaraan program pendidikan non formal diselenggarakan dalam rangka mendukung dan melengkapi pendidikan formal. Program Pendidikan non formal meliputi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (KLP), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rumah Pintar (Rumpin), *Homeschooling*. Sampai tahun 2023 Rumah Pintar dan *Homeschooling* tidak mengajukan izin dan masyarakat banyak memilih ke Program Pendidikan Kesetaraan.

Kondisi Lembaga Pendidikan NonFormal dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.36 Kondisi Lembaga Pendidikan Non Formal di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Nama Lembaga dan Keterangan	Jumlah Perkembangan Per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)</b>					
	- Jumlah Lembaga	1	1	1	1	1
	- Jumlah Warga Belajar	317	379	404	374	385
	- Jumlah Tutor	36	35	31	13	34
<b>2</b>	<b>Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)</b>					
	- Jumlah Lembaga	31	26	27	27	29
	- Jumlah Warga Belajar	3.115	3.009	2.898	3.267	3346
	- Jumlah Tutor	226	404	393	380	289
<b>3</b>	<b>Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)</b>					
	- Jumlah Lembaga	34	42	42	42	25
	- Jumlah Warga Belajar	2.296	2.296	1.886	2.059	6895
	- Jumlah Tutor	315	264	172	264	124
<b>4</b>	<b>Taman Bacaan Masyarakat (TBM)</b>					
	- Jumlah Lembaga	n/a	66	66	66	n/a
	- Jumlah Warga Belajar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	- Jumlah Tutor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2024

Pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang belum mampu menamatkan pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA) dilakukan melalui

program pendidikan kesetaraan yaitu Kelompok Belajar (Kejar) paket. Kejar paket A setara dengan SD, Kejar paket B setara dengan SMP, dan Kejar paket C setara dengan SMA. Hasil Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) baik paket A, B dan C penentuan kelulusan dilaksanakan oleh lembaga masing-masing.

**Tabel 2.37 Kondisi Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Kelompok Belajar	Laki-laki	Perempuan	Total	Peserta UN	Lulus	Belum Lulus	% Kelulusan
<b>2019</b>							
Paket A	178	377	555	245	209	36	85,31
Paket B	203	372	575	400	301	99	75,25
Paket C	679	761	1.440	1.084	859	225	79,24
<b>2020</b>							
Paket A	563	469	1.032	182	175	7	96,15
Paket B	466	203	669	368	356	12	96,74
Paket C	998	458	1.456	610	573	37	93,93
<b>2021</b>							
Paket A	548	430	978	221	215	6	97,29
Paket B	513	311	824	305	283	22	92,79
Paket C	984	516	1.500	583	548	35	94,00
<b>2022</b>							
Paket A	599	492	1.091	192	192	0	100
Paket B	305	261	566	296	285	11	96,28
Paket C	717	401	1.118	571	519	52	90,89
<b>2023</b>							
Paket A	646	630	1.276	187	187	0	100
Paket B	484	480	964	301	301	0	100
Paket C	747	744	1.491	474	474	0	100

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2024

#### **d. Capaian SPM Bidang Pendidikan**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan Pendidikan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Dengan berlakunya Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang pendidikan.

Capaian SPM bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2020 dan 2021 telah memenuhi 100% yang disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.38 Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 – 6 tahun dalam PAUD yang mendapat layanan	25.029	25.029	100	24.933	24.933	100
2	Pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 – 12 tahun dalam pendidikan dasar (SD/MI) yang mendapat layanan	82.166	82.166	100	80.963	80.963	100
3	Pendidikan dasar	Jumlah anak usia 12 – 15 tahun dalam pendidikan dasar (SMP/MTs) yang mendapat layanan	41.006	41.006	100	38.895	38.895	100
4	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2.046	2.046	100	2.021	2.021	100

*Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2024*

Jenis pelayanan dan indikator SPM bidang Pendidikan pada tahun 2022 mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Capaian SPM bidang Pendidikan Kabupaten Bantul tahun 2022-2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.39 Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Pendidikan anak usia dini	Warga Negara yang usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	24.933	24.933	100	23.050	23.050	100
2	Pendidikan dasar	Warga Negara yang usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	110.859	110.859	100	107.398	107.398	100



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3	Pendidikan Kesetaraan	Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar atau Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	2.021	2.021	100	2.382	2.382	100

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2024

### 2.1.3.1.2 Kesehatan

#### a. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia di bawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.40 Angka Kematian Bayi Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kematian Bayi Kabupaten Bantul	8,41	6,93	5,4	8,3	7,59
Angka Kematian Bayi DIY	6,7	7,9	7	3,36	7,8
Angka Kematian Bayi Nasional	21,12	17,6	17,2	16,9	*

Keterangan: \*: data belum tersedia

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tabel di atas bahwa capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2023 tercatat 7,59 per 1000 kelahiran hidup (81 kematian) terjadi penurunan dibanding tahun 2022 sebesar 8,30 per 1.000 kelahiran hidup (90 kematian).

Apabila dibandingkan dengan AKB di DIY, AKB di Bantul pada tahun 2023 lebih rendah. Hal ini kemungkinan disebabkan kenaikan Angka Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Penyebab kematian bayi pada tiap tahunnya beragam, secara lengkap data penyebab kematian bayi di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.41 Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Sebab Kematian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bayi berat lahir rendah	28	16	16	13	15
2	Asfiksia	27	16	12	23	16
3	Kelainan bawaan	20	26	19	19	21
4	Lain2 (Aspirasi, diare, perdarahan intrakranial dan penyebab lainnya)	35	17	16	33	29
<b>J u m l a h</b>		<b>109</b>	<b>75</b>	<b>63</b>	<b>90</b>	<b>81</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Pada tahun 2023 faktor penyebab kematian bayi terbanyak disebabkan karena aspirasi, diare, perdarahan intrakranial dan penyebab lainnya dengan jumlah 29 kasus atau 36%. Selanjutnya, faktor kedua terbanyak penyebab kematian bayi di tahun 2023 yaitu disebabkan kelainan bawaan dengan jumlah 21 kasus atau 26%. Kemudian, faktor berikutnya penyebab kematian bayi adalah adanya asfiksia sebesar 20% atau 16 kasus dan bayi berat lahir rendah sebesar 18% atau 15 kasus.

Hal-hal yang dilakukan untuk menurunkan AKB antara lain meningkatkan peran serta masyarakat melalui program dan keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada bayi dan program perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya kesehatan serta dengan meningkatkan kualitas pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

#### **b. Angka Kematian Ibu**

Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung dari jumlah kematian ibu maternal (hamil, melahirkan, dan nifas atau selama 42 hari setelah persalinan), bukan karena sebab kecelakaan ataupun penyakit lainnya dibagi jumlah kelahiran hidup kali 100.000. Angka kematian ibu di kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.42 Angka Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kematian Ibu Kabupaten Bantul	99,45	157,6	374,1	146,88	84,36
Angka Kematian Ibu DIY	84,8	122	337,07	119,3	62,7
Angka Kematian Ibu Nasional	119,8	64	305	183	*

Keterangan:

\*: data belum tersedia

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

AKI pada tahun 2023 mencapai 84,36 per 100.000 kelahiran hidup (9 kasus kematian ibu dari 10.669 kelahiran hidup) menurun dibandingkan tahun AKI pada tahun 2022 sebesar 146,88 per 100.000 kelahiran hidup (16 kasus kematian ibu dari 10.893 kelahiran hidup). Penyebab kematian ibu di kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.43 Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Penyebab Kematian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perdarahan	4	1	5	4	3
2	PER/PEB/ Eklampsi	4	5	2	2	0
3	Emboli air ketuban	0	0	0	0	0
4	Syok Septic	0	5	2	6	3
5	Lain2/Penyakit penyerta	2	0	4	1	1
6	Penyakit Jantung	2	5	3	2	1
7	<i>Psikosis postpartum dengan acute coronary syndrome</i>	0	0	0	0	0
8	Ileus paralitik	1	0	0	0	0
9	Kanker	0	2	0	0	1
10	Covid-19	0	2	28	0	0
<b>J u m l a h</b>		<b>13</b>	<b>20</b>	<b>44</b>	<b>16</b>	<b>9</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kematian ibu di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 sebagian besar disebabkan oleh kejadian syok septic dan perdarahan (sebanyak 6 kasus) . Hal lain yang menyebabkan kematian ibu dikarenakan pada masa kehamilan hingga masa nifas terdapat ibu yang terinfeksi akibat komplikasi berbagai penyakit sebanyak 3 ibu atau sebesar 33,33%. Berbagai upaya telah dilakukan untuk pencegahan kematian ibu baik di masyarakat, puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya maupun rumah sakit sebagai fasilitas rujukan.

### c. Pelayanan Kesehatan

#### 1) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

##### • Posyandu Balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk memberikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasar, maka strategi

operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu.

**Tabel 2.44 Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kabupaten Bantul Tahun 2019–2023**

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah posyandu balita	1.139	1.139	1.148	1.148	1.150
2	Jumlah balita	57.627	56.111	57.448	51.192	52.870
3	Rasio posyandu per 1000 balita	19,77	20.30	19,98	22,45	21,7

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 terdapat 1.148 posyandu. Rasio posyandu per 1.000 balita pada tahun 2022 sebesar 22,452, artinya dalam 1.000 balita terdapat setidaknya 22 posyandu, atau satu posyandu melayani sekitar 51 balita. Idealnya satu Posyandu melayani 50 Balita.

Posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Setiap dusun idealnya minimal ada satu posyandu balita.

Sebelum tahun 2023 Posyandu dikelompokkan ke dalam 4 strata posyandu berdasarkan fasilitas dan keaktifan yaitu strata pratama, strata madya, strata purnama dan strata mandiri. Pada tahun 2023 penyebutan strata posyandu menjadi kategori posyandu aktif dan tidak aktif.

**Tabel 2.45 Strata Posyandu Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2023**

Strata Posyandu	2019		2020		2021		2022		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pratama	40	3,51	836	73,40	153	13	18	2	0	0
Madya	187	16,42	143	12,55	109	7	5	0	0	0
Purnama	523	45,92	86	7,55	206	18	130	11	0	0
Mandiri	389	34,15	74	6,50	680	62	995	87	0	0
Aktif	0	0	0	0	0	0	0	0	1.148	99,8
Non Aktif	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,2
Total	1.139	100	1.139	100	1.148	100	1.148	100	1.150	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Berdasarkan data posyandu aktif dalam *microsite website* Promkes pada tahun 2023 posyandu aktif berjumlah 1.148 posyandu (99,8%). Posyandu yang tidak aktif ada 2 posyandu, yaitu Posyandu Alam Citra dan Posyandu Megantara Lanud. Dengan demikian, posyandu Balita di Kabupaten Bantul sudah tercapai target yang ditetapkan oleh Kemenkes adalah 80%.

- **Posyandu Lansia**

Posyandu lansia merupakan suatu wadah untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pembinaan kepada kelompok usia lanjut di suatu wilayah dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat melalui kader kesehatan dan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam rangka untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat pada umumnya dan khususnya kelompok usia lanjut.

**Tabel 2.46 Rasio Posyandu Lansia per 1.000 Lansia di Kabupaten Bantul Tahun 2019 – 2023**

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah posyandu Lansia	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
2	Jumlah Lansia	119.898	132.562	145.380	144.640	137.342
3	Rasio posyandu per 1000 lansia	8,62	7,8	7,11	7,15	7,53

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Jumlah Posyandu Lansia setiap tahun sama yaitu sebanyak 1.034, sampai dengan tahun 2023 belum terdapat penambahan jumlah Posyandu Lansia. Rasio posyandu per 1000 lansia tahun 2023 adalah 7,53 meningkat dari tahun 2022. Kegiatan Posyandu lansia berupa skrining, senam lansia dan penyuluhan kesehatan.

## 2) **Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

Keberhasilan program pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dapat diketahui dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan oleh pemerintah dan swasta. Secara umum fasilitas kesehatan semakin meningkat, dengan demikian diharapkan lebih banyak kemudahan akses masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan.

**Tabel 2.47 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (unit)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rumah Sakit Umum	10	10	10	11	11
2	Rumah Sakit Khusus (Bedah, Paru, KIA)	6	6	6	5	5
3	Klinik Utama	2	2	5	5	7
4	Klinik Pratama:					
	Klinik Pratama Rawat Jalan	50	59	59	65	57
	Klinik Pratama Rawat Inap	11	11	11	11	12
5	Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar	0	0	0	0	0
6	Apotek	157	175	210	210	210
7	Laboratorium	4	3	3	1	2
8	Toko obat	8	10	11	11	11
9	Optik	7	7	7	7	7
10	Puskesmas :					
	Puskesmas Rawat Inap	16	16	16	16	16
	Puskesmas Non Rawat Inap	11	11	11	11	11
	Puskesmas Pembantu (Pustu)	67	67	57	48	48
	Puskesmas Keliling	27	27	27	27	27
11	Posyandu :					
	Posyandu Balita	1.139	1.139	1.148	1.148	1150
	Posyandu Lansia	1034	1034	1.034	1.034	1.034

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Merujuk Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 534/KPTS/M/2001 diatur bahwa setiap 240.000 penduduk harus tersedia satu unit RS. Penduduk Kabupaten Bantul tahun 2023 sebanyak 968.237 jiwa, berarti minimal harus ada 4 unit RS. Sampai tahun 2022 terdapat RS Umum sejumlah 11 unit, Rumah Sakit Khusus 5 unit. Hal ini menunjukkan ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Bantul telah mencukupi.

**Tabel 2.48 Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan per Satuan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2022**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah sakit	16	16	16	16	16
2	Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu	157	166	153	160	160
3	Jumlah penduduk	949.325	954.706	956.513	964.245	968.237
4	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk	0,165	0,173	0,159	0,166	0,166

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
5	Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk	0.017	0,017	0,017	0,016	0,016

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Seluruh puskesmas di Kabupaten Bantul sudah berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) penuh sejak tanggal 2 Januari 2016. Pelaksanaan BLUD puskesmas ini dilaksanakan di 27 puskesmas yang terdiri dari 16 puskesmas rawat inap, dan 11 puskesmas rawat jalan. Adapun hasil penilaian akreditasi puskesmas sebanyak 27 puskesmas telah terakreditasi.

**Tabel 2.49 Jumlah Puskesmas Menurut Status Akreditasi Tahun 2019-2023**

No	Puskesmas	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paripurna	2	2	2	2	27
2	Utama	16	16	16	16	0
3	Madya	9	9	9	9	0
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Dari tabel dapat dilihat bahwa Puskesmas di Bantul seluruhnya akreditasi paripurna (100%). Selain puskesmas standarisasi pelayanan kesehatan juga dilakukan di rumah sakit. Standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dilakukan melalui penetapan kelas dan akreditasi rumah sakit milik pemerintah dan swasta. Penetapan kelas dan status akreditasi rumah sakit pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.50 Kelas Rumah Sakit Tahun 2023**

No	Sarana Pelayanan Kesehatan	Kepemilikan	Mutu & Akreditasi	
			Kelas	Akreditasi
1	RUMAH SAKIT UMUM			
	1. RSUD Panembahan Senopati	Pemda Bantul	B Pend.	Paripurna
	2. RSU Griya Mahardhika	Swasta	D	Utama
	3. RSU Universitas Islam Indonesia	PT Unisia Edu Medika	C	Paripurna
	4. RSU Rajawali Citra	Yayasan	D	Paripurna
	5. RSU PKU Muhammadiyah Bantul	Persyarikatan Muhammadiyah	C	Paripurna
	6. RSU Rachma Husada	Yayasan Bina Mitra Husada	C	Paripurna
	7. RSU Nur Hidayah	Yayasan	D	Paripurna
	8. RSPA dr. S. Hardjolukito	TNI Angkatan Udara	B	Paripurna
	9. RSU Santa Elisabeth	Yayasan Panti Rapih	D	Paripurna
	10. RSUD Saras Adyatma	Pemda Bantul	D	Paripurna
	11. RSU Permata Husada	PT Purwahardja Husada	D	Paripurna

No	Sarana Pelayanan Kesehatan	Kepemilikan	Mutu & Akreditasi	
			Kelas	Akreditasi
2	RUMAH SAKIT KHUSUS			
	1. RSKIA Ummi Khasanah	SWASTA	C	Paripurna
	2. RSKB Adelia	Yayasan	C	Paripurna
	3. RSKB Ring Road Selatan	Perkumpulan	C	Paripurna
	4. RSKIA Kahyangan	PT RSKIA KAHYANGAN	C	Paripurna
	5. RS Paru Respira	Pemerintah Daerah DIY	C	Paripurna

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

### 3) Rumah Sakit

#### a) Net Death Rate (NDR)

Net Death Rate (NDR) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini menggambarkan mutu pelayanan rumah sakit. Nilai NDR yang dianggap masih ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000. Berikut merupakan NDR di Kabupaten Bantul

**Tabel 2.51 Net Death Rate (NDR) Rumah Sakit di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Nama Rumah Sakit	2019	2020	2021	2022	2023
1	RSUD Panembahan Senopati	18.70	21.10	36.3	20.4	20.55
2	RSU Griya Mahardhika	0.25	0.06	5.1	0.0	0.0
3	RSKIA Ummi Khasanah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	RSKB Adelia	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0
5	RSKB Ring Road Selatan	2.00	3.50	2.2	0.0	0.0
6	RSU Universitas Islam Indonesia	2.82	3.32	2.8	2.9	0.0
7	RSU Rajawali Citra	5.06	5.97	11.2	0.5	0.0
8	RSU PKU Muhammadiyah Bantul	16.39	20.90	22.7	12.7	8.15
9	RSU Rachma Husada	6.07	1.98	8.9	6.9	7.36
10	RSU Nur Hidayah	25.58	14.47	14.5	1.9	3.6
11	RSPAU dr. S. Hardjolukito	17.20	20.83	42.0	20.7	17.08
12	RSKIA Kahyangan	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
13	RSU Santa Elisabeth	15.02	11.79	22.5	25.0	6.9
13	RSUD Saras Adyatma	belum ada	belum ada	belum ada	0.0	0.0
15	RSU Permata Husada	0.00	5.81	24.8	5.2	0.0
16	RS Khusus Paru Respira	14.24	0.0	19.3	0.0	13.06
<b>KABUPATEN/KOTA</b>		<b>20.05</b>	<b>11.97</b>	<b>23.3</b>	<b>13.2</b>	<b>5,92</b>

Sumber: Dinkes Kabupaten Bantul, 2024



Capaian *Net Death Rate* di Bantul tahun 2023 mencapai 5,92 permil menurun dibandingkan tahun 2022. NDR dari tahun 2021 menurun sejak meredanya Covid-19.

**b) Bed Occupation Rate (BOR)**

Bed Occupation Rate (BOR) adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85%.

**Tabel 2.52 Bed Occupation Rate (BOR) Rumah Sakit di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Bed Occupation Rate_ (BOR) (%)</i>	54,0	57,29	39,39	42,65	63,62

Sumber: Dinas Kesehatan 2024

**c) Turn Over Interval (TOI)**

*Turn Over Interval* (TOI) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati, yaitu dari setelah terisi sampai ke saat terisi berikutnya. *Turn Over Interval* (TOI) ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong/tidak terisi yaitu pada kisaran 1-3 hari.

**Tabel 2.53 Turn Over Interval (TOI) di Rumah Sakit Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Turn Over Interval _TOI (hari)</i>	2.90	2,69	5,22	4.62	3,83

Sumber: Dinas Kesehatan 2024

Capaian TOI Rumah Sakit di Kabupaten Bantul sebesar 3,83 hari. TOI yang semakin panjang menunjukkan semakin lama interval tempat tidur tidak digunakan, sehingga memungkinkan proses pembersihan dan sterilisasi ruangan dan sarana prasarana semakin maksimal dilakukan.

**d) Bed Turn Over (BTO)**

*Bed Turn Over* (BTO) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, yaitu berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. *Bed Turn Over* (BTO) berguna untuk melihat berapa kali tempat tidur rumah sakit digunakan/ditempati oleh pasien. Semakin

rendah BTO berarti semakin jarang tempat tidur digunakan, sehingga ada kesempatan untuk mensterilkan tempat tidur tersebut sebelum digunakan kembali.

**Tabel 2.54 Bed Turn Over (BTO) di Rumah Sakit Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Bed Turn Over _BTO (kali)	57,91	46,29	42,38	45,33	54,91

Sumber: Dinas Kesehatan 2024

#### 4) Jaminan Kesehatan Nasional

Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Pemerintah Kabupaten Bantul memberi pelayanan Kesehatan berupa pembiayaan pelayanan kesehatan penduduk Bantul melalui kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

**Tabel 2.55 Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No.	Jenis Kepesertaan Jaminan Kesehatan	2019		2020		2021		2022		2023	
		Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%
1	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN	443.462	46,71	442.505	46,35	399.908	41,81	497.322	51,58	494.248	51,26
2	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD	46.674	4,92	50.887	5,33	54.861	5,74	59.437	6,16	78.149	8,10
3	Pekerja Penerima Upah (PPU)	216.212	22,78	224.980	23,57	240.358	25,13	251.139	26,05	256.673	26,62
4	Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)	88.543	9,33	88.688	9,29	91.296	9,54	84.043	8,72	84.085	8,72
5	Bukan Pekerja	32.340	3,41	31.048	3,25	32.166	3,36	30.661	3,18	34.663	3,59

No.	Jenis Kepesertaan Jaminan Kesehatan	2019		2020		2021		2022		2023	
		Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%
	Jumlah penduduk yang terdaftar JKN	827.231	87,14	838.108	87,79	818.589	85,58	922.602	95,63	947.818	98,30
	Jumlah penduduk yang belum terdaftar JKN	122.094	12,86	116.598	12,21	137.924	14,42	41.643	4,32	16.427	1,70
	Total penduduk Kab Bantul	949.325	100	954.706	100	956.513	100	964.245	100	964.245	100

Sumber: BPJS Kesehatan Bantul, 2024

Pada tahun 2023 pembiayaan pelayanan kesehatan penduduk Bantul telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) melalui kepesertaan JKN telah terdaftar sebesar 947.818 jiwa atau 98,80%, meningkat dari tahun 2022 yaitu 85,68%. Jumlah penduduk yang belum terdaftar kepesertaan JKN sebesar 16.427 jiwa atau 1,70%.

### 5) Laboratorium Kesehatan Daerah

UPT Labkesda dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor: 5 Tahun 2021. Pada awalnya UPT Labkesda merupakan laboratorium untuk pemeriksaan kualitas air, tetapi pada tahun 2020 seiring dengan adanya Pandemi Covid 19, terjadi keterlambatan pemeriksaan PCR Covid 19 di seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mengembangkan laboratorium air menjadi laboratorium daerah dengan memperluas jenis pemeriksaan dan melengkapi sarana prasarana laboratorium.

**Tabel 2.56 Jumlah Pemeriksaan Lab. Medik Labkesda Bantul Tahun 2023**

No	Jenis Pemeriksaan	2023
1	HEMATOLOGI (Diebetes, Profil Lemak, Fungsi Hati, Fungsi Ginjal)	1.091
2	KIMIA KLINIK	15.457
3	IMUNOLOGI / SEROLOGI	51
4	URINALISIS	44
5	FAESES	-

No	Jenis Pemeriksaan	2023
6	MIKROBIOLOGI/ PARASITOLOGI	-
7	BIOLOGI MOLEKULER (RT-PCR)	521
8	RDT ANTIGEN	291
9	Pemeriksaan	17.455
10	Pasien Klinik dan PCR	2.131
11	Sampel (Darah, Urine, Faeses, Sputum, Swab)	3.183

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

## 6) Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan yang disertai dengan peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Setiap tenaga yang bekerja di sektor kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, nutrisionis, analis, *radiographer*, fisioterapis dan sanitarian) wajib memiliki surat izin sebelum melakukan pekerjaan sesuai kompetensinya.

**Tabel 2.57 Jumlah Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Pemerintah di Kabupaten Bantul Tahun 2019 – 2023**

No	Jenis Tenaga	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dokter Spesialis	40	44	45	49	50
2	Dokter Umum	135	137	180	159	170
3	Dokter Gigi Spesialis	6	5	5	5	5
4	Dokter Gigi	42	42	45	49	56
5	Perawat	604	595	627	638	653
6	Perawat Gigi	57	60	72	76	78
7	Bidan	294	312	308	309	318
8	Kefarmasian	92	53	101	92	125
9	Kesehatan Masyarakat	36	47	58	52	45
10	Sanitarian	44	45	57	66	61
11	Gizi	62	59	74	93	83
12	Keterampilan Fisik	30	34	35	48	43

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Ketersediaan tenaga kesehatan erat kaitannya dengan rasio dokter per jumlah penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada.

**Tabel 2.58 Jumlah Dokter per 1.000 Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Dokter Umum	135	137	180	209	480
2	Jumlah Dokter Spesialis	46	50	50	49	287
3	Jumlah Penduduk	949.325	954.706	956.513	964.245	972.161
4	Rasio Dokter Umum (per 1000 penduduk)	0,14	0,14	0,19	0,21	0,49
5	Rasio Dokter Spesialis (per 1000 penduduk)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,30

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Menurut KEPMENKES Nomor 81/MENKESTS/SK/I/2004, standar kebutuhan tenaga dokter spesialis adalah 9/100.000 penduduk, dokter umum adalah 30/100.000 penduduk dan standar untuk kebutuhan tenaga dokter gigi adalah 11/100.000 penduduk. Tahun 2023 ketersediaan dokter umum di Bantul mencapai 49 dokter per 100.000 penduduk dan dokter spesialis 30 dokter per 100.000 penduduk.

#### **d. Kesehatan Masyarakat**

##### **1) Status Gizi Balita**

Status gizi Balita dapat diketahui dari berat badan menurut umur, yaitu membandingkan antara berat badan menurut umur ataupun panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan.

**Tabel 2.59 Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Balita yang diukur	48.502	18.621	47.788	46.722	44.382
Jumlah Balita Gizi Buruk	199	57	59	85	55
Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,41%	0,31%	0,12%	0,18%	0,12%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Balita gizi buruk di Kabupaten Bantul hingga tahun 2019 menggunakan indikator berat badan berdasarkan usia sedangkan tahun 2020 hingga 2023 menggunakan indikator yang berbeda yaitu berat badan berdasarkan tinggi badan. Jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Bantul sejak tahun 2020 hingga 2023 mengalami fluktuatif, tercatat di tahun 2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2023 prevalensi balita gizi buruk tercatat 0,12% atau 55 balita. Terjadi penurunan kasus dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 0,18% atau 85 balita. Masih banyaknya kasus gizi buruk disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya

asupan, pola asuh yang kurang tepat, sanitasi lingkungan, penyakit infeksi, penyakit bawaan, riwayat BBLR dan adanya permasalahan sosial di dalam keluarga.

Disamping gizi buruk balita, masalah lain yang sangat erat dengan gizi adalah stunting. Stunting adalah kondisi tubuh anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan ukuran tubuh yang lebih pendek daripada teman-teman seusianya. Kondisi stunting tidak bisa dikembalikan seperti semula. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun. Kondisi stunting dapat dicegah, dengan memenuhi kebutuhan nutrisi sejak hamil hingga anak berusia dua tahun (periode 1000 hari pertama kehidupan).

Upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan prevalensi balita stunting diantaranya adalah kampanye dan deklarasi penanggulangan stunting, penyusunan Peraturan Bupati dan RAD Stunting, peningkatan kapasitas kader dalam pemantauan pertumbuhan, konsultasi dan pemeriksaan dokter spesialis anak pada balita stunting, dan pendampingan balita stunting oleh kader.

Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.60 Jumlah dan Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Balita yang Diukur	48.181	18.638	47.786	55.256	44.382
Jumlah Balita Stunting	3.725	1.816	3.996	3.001	2.863
Prevalensi Balita Stunting (%)	7,73%	9,74%	8,36%	6,42%	6,45%

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Tahun 2019 Kabupaten Bantul ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai lokasi khusus (lokus) dalam penanggulangan Stunting Tahap 2. Prevalensi stunting berhasil diturunkan, yaitu pada tahun 2018 sebesar 9,75% menurun pada tahun 2019 menjadi sebesar 7,73%. Namun angka prevalensi stunting kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,74%. Prevalensi stunting kembali turun ada tahun 2021 menjadi 8,36% dan tahun 2022 menjadi 6,42%, sedangkan tahun 2023 sedikit naik menjadi

6,45 %. Tetapi untuk angka absolut jumlah balita stunting di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu jumlah balita stunting pada tahun 2023 sebanyak 2.863 balita. Adanya penurunan angka prevalensi stunting kembali pada tahun 2021 dan 2022 karena intervensi program percepatan penurunan stunting. Determinan masalah penyebab stunting di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.61 Penyebab Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2023**

No	Analisa Penyebab	Balita Stunting (%)
1	Keluarga Miskin	47,29
2	Usia Ibu < 20	3,05
3	Usia Ibu > 35	9,20
4	Ibu KEK Sewaktu Hamil	15,60
5	Ibu Anemia Sewaktu Hamil	11,41
6	Tidak ASI Eksklusif	21,04
7	Pengasuhan Anak kepada Orang Lain	2,7
8	Pengasuhan Anak kepada Campuran	30,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

## 2) Desa Siaga

Desa siaga merupakan strategi baru pembangunan kesehatan. Desa siaga lahir sebagai respon pemerintah terhadap masalah kesehatan di Indonesia yang tak kunjung selesai. Tingginya angka kematian ibu dan bayi, munculnya kembali berbagai penyakit lama seperti tuberkulosis paru, merebaknya berbagai penyakit baru yang bersifat pandemi serta belum hilangnya penyakit endemis seperti diare dan demam berdarah merupakan masalah utama kesehatan di Indonesia. Bencana alam yang sering menimpa bangsa Indonesia seperti gunung meletus, tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor dan kecelakaan massal menambah kompleksitas masalah kesehatan di Indonesia.

Desa siaga dibagi menjadi 4 strata yaitu pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. Perkembangan jumlah desa sesuai strata dapat dilihat pada tabel berikut,

**Tabel 2.62 Jumlah Desa Siaga Purnama Mandiri menurut Strata di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Strata	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pratama	3	2	6	2	1
2	Madya	11	6	7	11	3
3	Purnama	24	26	19	22	20
4	Mandiri	37	41	43	40	51
	Jumlah	75	75	75	75	75

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

### 3) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga, institusi tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tempat-tempat umum. Data capaian PHBS tahun 2019 hingga 2023 di Kabupaten Bantul pada semua tatanan disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.63 Hasil Capaian Tatanan PHBS di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2023**

No	Tatanan PHBS	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rumah Tangga	53,00%	53,10%	51,14%	53,00%	54,31%
2	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	91,67%	91,70%	94,84%	94,34%	97,18%
3	Institusi Pendidikan	61,00%	62,20%	72,15%	70,39%	53,40%
4	Tempat Kerja	41,21%	41,21%	43,38%	47,00%	53,59%
5	Tempat-tempat umum	59,00%	59,15%	55,60%	71,84%	70,01%

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Tatanan PHBS di Rumah Tangga masih relatif rendah (54,31%). Dari tahun ke tahun relatif sama sehingga upaya promosi kesehatan sangat diperlukan. Pola hidup sehat masih rendah di tingkat rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, dan tempat-tempat umum. Lingkungan permukiman kumuh berpotensi menjadi semakin buruk dengan tren pola hidup sehat di lingkungan rumah tangga yang masih rendah.

Tatanan PHBS meliputi berbagai sub indikator. Sub indikator yang paling berperan sehingga tatanan PHBS belum tercapai adalah larangan merokok di dalam rumah dan larangan meludah di sembarang tempat. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk memenuhi sub indikator ini antara



lain konsultasi berhenti merokok dan pembentukan kawasan bebas asap rokok.

#### 4) Sanitasi

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), mencakup lima pilar, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT), pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah rumah tangga. *Open Defecation Free* (ODF) di Kabupaten Bantul dari tahun 2018-2022 adalah 100%.

**Tabel 2.64 Akses Sanitasi di Kabupaten Bantul tahun 2022**

Jumlah KK	Jumlah KK Pengguna			
	Akses Sanitasi Layak Aman	Akses Sanitasi Layak	Akses Sanitasi Belum Layak	BABS
343.879	81.671	271.160	45.048	-

Sumber: Hasil Monev Sanitasi DIY, Bappeda diolah, 2023

##### a) Akses Jamban

Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) telah dilakukan oleh 27 puskesmas dengan memotret kondisi kesehatan dari anggota keluarga sekaligus memberikan intervensi dan edukasi kesehatan salah satunya adalah tersedianya akses/jamban sehat untuk keluarga sebesar 100%, meskipun masih ada yang menggunakan jenis cemplung dan plengsengan. Adanya jamban jenis cemplung/plengsengan yang berpotensi mengakibatkan memburuknya kualitas lingkungan permukiman, terutama di permukiman padat dapat berdampak pada pola hidup yang kurang sehat dan kesehatan masyarakat.

##### b) Akses Air Minum

Kegiatan pengawasan kualitas air meliputi pengawasan kualitas air baik secara internal maupun eksternal serta pembinaan DAM dan pengelola air minum peKalurahan Yogyakarta. Pengawasan dilakukan terhadap air bersih maupun air minum. Pengawasan dilakukan pada

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), perusahaan Depot Air Minum (DAM), Pengelola Air Minum PeKalurahanan (Pamdes), dan sumber air bersih masyarakat (sumur gali, mata air, dan lain-lain). Pada tahun 2021 kegiatan pengawasan eksternal dilakukan dengan pengambilan sampel dan pengujian kualitas air bagi masyarakat dan dunia usaha. Pengawasan kualitas mencakup sampel sejumlah 3.005 sampel, yang terdiri dari sampel air minum yang bersumber dari PDAM adalah lima sampel tiap Kapanewon dan jumlah sampel air bersih sebanyak lima sampel tiap Kalurahan.

**Tabel 2.65 Akses Air Minum Aman di Kabupaten Bantul tahun 2022-2023**

Tahun	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Sarana Air Minum	Sarana Air Minum Yang Diawasi/ Diperiksa Kualitas Air Minumnya Sesuai Standar (Aman)	
			Jumlah	%
2022	75	207	166	80,2
2023	75	235	141	60

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

## 5) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

### a) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Data penyakit menular di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.66 Data Penyakit Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Angka Kesakitan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Covid-19	0	3.163	53.953	18.483	659
2	Tuberkulosis (TB) BTA Positif	112	343	220	283	570
3	Kasus HIV	127	103	97	160	175
4	Kasus AIDS	22	38	15	52	47
5	Kasus Syphilis	64	25	18	8	7
6	Kusta	8	4	4	4	14
7	Jumlah Kasus Campak	1	0	0	0	343
8	Pneumonia Balita ditemukan dan ditangani	941	424	499	582	1.034
9	Diare ditemukan dan ditangani	4.622	6.005	4.136	7.812	8.587
10	AFP Rate (non polio) < 15 th	5	3	4	0	11
11	DBD	1.424	1.222	410	957	132
12	Malaria	7	3	0	3	15

No	Angka Kesakitan	2019	2020	2021	2022	2023
13	Leptospirosis	92	79	42	140	168

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 penyakit menular yang sangat membutuhkan perhatian dalam pencegahan dan penanggulangannya yaitu:

**1) Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis (TB)**

Tuberkulosis adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh *mycobacterium*, yang berkembang biak di dalam bagian tubuh di mana terdapat banyak aliran darah dan oksigen. Tuberkulosis adalah penyakit yang paling umum yang dialami oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena masyarakat kurang bisa menjaga kebersihan yang ada di lingkungannya.

Masalah yang dihadapi terkait penyakit TB adalah penemuan kasus dan kesembuhan penderita TB. Adapun grafik notifikasi kasus TB (*Case Notification Rate/CNR*) dan keberhasilan pengobatan (*Success Rate/SR*) dapat dilihat pada data di bawah ini.

**Tabel 2.67 CNR dan SR Penderita TB di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kasus TB ( <i>Case Notification Rate/CNR</i> )_%	34,8	19,1	30,8	50,5	82
2	Keberhasilan Pengobatan ( <i>Success Rate/SR</i> )_%	81	83,6	95	88,1	91

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten, 2024

Dari data di atas dapat dilihat bahwa angka notifikasi semua kasus TBC (*Case Notification Rate/CNR*) mengalami tren kenaikan pada tahun 2022 dan 2023. Selanjutnya, terkait dengan angka keberhasilan TB yang pada tahun 2023 keberhasilan pengobatan mencapai 91% terjadi peningkatan bila dibandingkan tahun 2022 sebesar 89% dan berada di atas target keberhasilan pengobatan yaitu 90%.

Upaya penanganan kasus TB antara lain adalah Penyusunan dan pelaksanaan RAD penanggulangan TB; Meningkatkan peran serta dari layanan kesehatan swasta dalam penemuan TB; Kemitraan dan kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat; Revitalisasi Gerakan Terpadu

Daerah (Gerduda) Kapanewon; Aktivasi puskesmas satelit untuk layanan TB Resisten Obat melalui penyiapan tenaga kesehatan terlatih, penyediaan ruang tersendiri untuk poli batuk dan TB MDR di puskesmas; dan Pendampingan penemuan TB di puskesmas melalui kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan fokus pada penyegaran tentang strategi DOTS, *Active Selective Case Finding* (ASCF) melalui pemeriksaan dahak pada suspek, pemberian makanan tambahan pada penderita TB yang sedang diobati.

## 2) Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS

Penyebaran HIV-AIDS memang sangat sulit terdeteksi. Data yang didapatkan saat ini hanya sebagian kecil dari besarnya jumlah orang yang sebenarnya mengidap HIV-AIDS. Banyak orang yang tidak memeriksakan dirinya sehingga angka pasti jumlah ODHA hingga saat ini tidak dapat diketahui. Inilah yang dinamakan fenomena gunung es. Masih banyak ODHA yang tidak terdeteksi hingga hari ini. Lebih dari itu, banyak ODHA yang tidak sadar bahwa saat ini dirinya terjangkit HIV. Data penemuan kasus HIV AIDS tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Tabel 2.68 Penemuan Kasus HIV AIDS di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	HIV	184	127	103	109	160
2	AIDS	16	22	38	24	52

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten, 2024

Penemuan kasus HIV dan AIDS pada tahun 2023 terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2022 kasus HIV sebanyak 160 kasus dan 52 kasus diantaranya sudah masuk Fase AIDS. Sedangkan Tahun 2023 ditemukan kasus HIV sebanyak 175 kasus dan 47 kasus diantaranya sudah masuk fase AIDS. Data HIV tidak dijumlahkan dengan data AIDS, karena didalam data HIV sudah termasuk data AIDS.

Alur Pencatatan Data HIV AIDS:

- Data didapatkan dari laporan masing-masing layanan kesehatan (Puskesmas dan RS) di Kabupaten Bantul, melalui aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS).

- Validasi data di tingkat kabupaten dilakukan setiap 3 bulan sekali.
- Setiap 6 bulan dilakukan validasi tingkat provinsi.

Akselerasi pengendalian HIV-AIDS dilakukan melalui kegiatan :

- Pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko HIV, yaitu Bumil, TBC dan Penderita Infeksi Menular Seksual (IMS) dan populasi kunci (WPS, LSL, Waria WBP) dengan pengadaan rapid HIV Sifilis yang didistribusikan ke seluruh fasyankes yang sudah mampu melaksanakan pemeriksaan HIV (27 puskesmas dan 9 Rumah Sakit);
- Penambahan layanan PDP dengan melatih Puskesmas Imogiri I, Puskesmas Pajangan, Puskesmas Sewon I dan Puskesmas Dlingo I untuk memudahkan akses pengobatan Orang dengan HIV AIDS (ODHA);
- Konseling dan testing HIV di 27 puskesmas dan 9 RS (RS PKU, RS Elizabeth, RS Nur Hidayah, RS Rahma Husada, RS Rajawali Citra, RSK Paru Respira, RSPAU Hardjolukito, RS Panembahan Senopati dan RS UII).
- Layanan Perawatan dukungan dan pengobatan (PDP) meliputi: RS Panembahan Senopati, Puskesmas Kretek, RSPAU Hardjolukito, Puskesmas Srandakan, Puskesmas Banguntapan I, Puskesmas Piyungan, Puskesmas Sedayu II, Puskesmas Kasihan II)
- Mentoring Klinis layanan PDP oleh tim mentor Kabupaten kepada layanan PDP untuk mencari solusi terhadap kendala yang muncul di layanan.
- Pelatihan notifikasi pasangan pada layanan PDP untuk menemukan kasus baru HIV.

### **3) Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD)**

Jumlah kasus DBD di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.69 Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kasus	1424	1222	410	957	132
IR (‰)	151,5	129	43,2	99,9	14

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Meninggal	4	4	1	5	0
CFR (%)	0,28	0,33	0,24	0,5	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Angka kesakitan DBD pada tahun 2022 sebesar 14 per 100.000 penduduk (132 kasus). Terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 99,9 per 100.000 penduduk (957 kasus). Pada tahun 2023 tidak ada kematian karena DBD, terjadi penurunan jika dibandingkan tahun 2022 dengan 5 penderita DBD yang meninggal.

Berbagai upaya yang dilaksanakan dalam menangani kasus DBD yang meningkat antara lain melalui kegiatan :

- Pengendalian bekerjasama dengan Yayasan Tahija dalam Eliminate Dengue Project (EDP), yaitu dengan melepas nyamuk Wolbacia;
- Peningkatan penyuluhan oleh petugas DBD;
- Pemberdayaan kader-kader dusun, remaja dan siswa SD untuk PSN; Melakukan dan koordinasi dan komunikasi di tingkat Kapanewon; Melaksanakan *fogging* sesuai Standar Prosedur yang telah ditetapkan;
- Pelaksanaan pelayanan deteksi dini DB di puskesmas pada semua kasus demam yang sudah  $\geq 2$  hari, dengan cara pemeriksaan menggunakan antigen dengue;
- Promosi kesehatan tentang kewaspadaan DB melalui media elektronik; Pembagian Larvasida di wilayah endemik pada saat PE;
- KIE dan kerjasama Lintas program dan lintas sektor;
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui gertak PSN; dan *Fogging* Fokus untuk memutus mata rantai penularan.

Penyakit menular lain yang saat ini tetap harus ada pemantauan adalah malaria. Status yang sudah eliminasi mengharuskan tetap diadakan kegiatan untuk mempertahankannya. Begitu juga dengan leptospirosis. Pada tahun 2023 ini terjadi peningkatan kasus yang perlu diwaspadai yaitu 168 kasus. Meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 140 kasus.

**b) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular**

Data penyakit tidak menular di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.70 Data Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Angka Kesakitan	Jumlah Kasus				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kasus IVA positif pada perempuan usia 30-50 tahun	44	6	17	401	33
2	Jumlah tumor/benjolan payudara pada perempuan 30-50 tahun	45	2	7	10	10
3	Kalurahan/Kelurahan terkena KLB ditangani < 24 jam	12	81	75	74	
4	Diabetes Melitus	43.696	18.516	18.306	15.727	18.294
5	Gangguan Jiwa	9.761	2.097	2.682	2.784	2.462
6	Hipertensi/tekanan darah tinggi	91.266	58.069	34.913	39.053	49.350

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Tahun 2019-2023 dilakukan upaya *screening* awal untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular Diabetes Mellitus (DM) dan Hipertensi. Pada tahun 2023, jumlah penderita DM yang ditemukan dan mendapat layanan sebanyak 18.294 kasus, meningkat dibandingkan pada tahun 2022 sebanyak 15.727 kasus. Adapun penderita Hipertensi yang ditemukan dan mendapat layanan sebanyak 49.350 kasus, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebanyak 39.053 kasus.

**e. Capaian SPM Bidang Kesehatan**

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang kesehatan. Data capaian dan kendala dalam pemenuhan SPM bidang kesehatan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.71 Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	2020			2021			2022			2023		
			Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil	12.708,00	12.088,00	95,12	11.779,00	11.569,00	98,22	10,89	10,51	96,51	10.679,00	10.332,00	99,75
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	12.708,00	12.697,00	99,91	11.779,00	11.757,00	99,81	10,89	10,89	99,92	10.679,00	10.672,00	99,93
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	12.624,00	10.680,00	84,60	11.713,00	9.595,00	81,92	10,83	8,99	83,02	10.618,00	8.893,00	83,75
4.	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	53.647,00	39.055,00	72,80	56.311,00	41.713,00	74,08	57,21	49,82	87,08	55.170,00	48.885,00	88,61
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	113.058,00	106.072,00	93,82	114.343,00	103.409,00	90,44	122,03	117,70	96,45	123.618,00	123.510,00	99,91
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrinning	584.084,00	407.090,00	69,70	664.592,00	252.244,00	37,95	533,30	234,86	44,04	262.200,00	223.248,00	85,14



**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	2020			2021			2022			2023		
			Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
		kesehatan sesuai standar												
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	121.619,00	35.247,00	28,98	145.380,00	61.680,00	42,43	144,64	77,42	53,53	136.409,00	81.485,00	59,74
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60.204,00	36.777,00	61,09	61.916,00	23.757,00	38,37	39,05	4,39	11,25	39.053,00	12.360,00	31,65
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	21.138,00	13.584,00	64,26	22.646,00	12.252,00	54,10	15,73	4,75	30,23	15.727,00	6.040,00	38,41
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	2.353,00	2.178,00	92,56	2.489,00	2.248,00	90,32	2,78	2,34	84,20	2.720,00	2.462,00	90,50

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	2020			2021			2022			2023		
			Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	4.438,00	4.438,00	100,00	3.370,00	3.370,00	100,00	10,40	10,24	98,51	10.530,00	13.599,00	129,15
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	16.101,00	16.101,00	95,60	14.231,00	13.660,00	95,99	18,01	18,01	100,00	20.712,00	20.815,00	100,50

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

### 2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### 2.1.3.1.3.1 Pekerjaan Umum

##### a. Jaringan Jalan

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh sebab itu jalan harus dalam kondisi baik untuk memperlancar transportasi.

Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY nomor 41/KEP/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi, ruas jalan provinsi di Kabupaten Bantul sepanjang 162,15 KM. Sedangkan, berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 609 Tahun 2022 tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul, jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 1001 ruas, dengan panjang 1210,72 Km.

Jalan kondisi mantap yaitu jalan aspal kondisi baik dan sedang, sebaliknya kondisi belum mantap yaitu kondisi jalan rusak dan rusak berat. Kondisi jalan di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.72 Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Tahun	Panjang (km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
		Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
2019	624,47	468,97	75,10	156,64	24,90
2020	624,47	470,98	75,42	153,49	24,58
2021	624,47	472,49	75,66	151,98	24,34
2022	624,47	473,57	75,84	150,90	24,16
2023	1.210,72	783,09	64,68	427,63	35,32

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024

Pada Tahun 2023 jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 783,09 km (64,68%). Prosentase kondisi mantap ini turun dibandingkan kondisi mantap pada Tahun 2022 dikarenakan ada perubahan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Status Jalan Kabupaten. Panjang jalan kabupaten Bantul sesuai SK lama hanya 624,47 km sedangkan sesuai SK baru bertambah menjadi 1.210,72 km. Kabupaten Bantul masih memiliki

jalan dalam kondisi belum mantap dengan panjang 427,63 km (35,32%), sehingga untuk memperlancar transportasi dan mendukung perekonomian masih diperlukan penanganan jalan agar semua jalan di Kabupaten Bantul bisa dalam kondisi mantap.

**b. Gedung Bangunan**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Dalam mendirikan bangunan gedung, masyarakat harus memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Data IMB dan PBG Tahun 2020-2023 di Kabupaten Bantul seperti pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.73 Data Penerbitan IMB dan PBG di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023**

Tahun	IMB			PBG
	Gedung	Non Gedung	RTLH	
2020	1.652	107	n/a	n/a
2021	2.096	129	54	2
2022	-	-	-	362
2023	-	-	-	220*

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024

\*) Angka sementara sampai dengan Bulan Oktober

Untuk dapat dimanfaatkan, bangunan gedung harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan. SLF yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2021 sebanyak 80 meningkat dari tahun 2020 yaitu 48.

### c. Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier.

Dalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektivitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik.

Berdasarkan Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi bahwa kewenangan Kabupaten Bantul meliputi 118 DI terdiri dari 100 DI Permukaan dan 18 DI Air Tanah dengan luas total 9.368 Ha.

Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, dengan adanya saluran irigasi dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai).

Data capaian saluran irigasi dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.74 Saluran Irigasi Primer dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Tahun	Panjang saluran irigasi primer (m)	Kondisi Baik	
		Panjang (m)	%
2019	96.724	79.427,97	82,12
2020	96.724	79.724,50	82,42
2021	96.724	80.029,00	82,74
2022	96.724	79.626,00	82,32
2023	101.351*)	88.784,00	87,60

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024

Kondisi jaringan irigasi primer berfungsi baik yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah 87,60% (88.784 m) naik 49.158 m dibandingkan tahun 2022.

**Tabel 2.75 Saluran Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Tahun	Panjang saluran irigasi sekunder (m)	Kondisi Baik	
		Panjang (m)	%
2019	140.877	115.761,25	82,17
2020	140.877	115.096,00	81,70
2021	140.877	111.974,00	79,48
2022	140.877	114.710,70	81,43
2023	130.509	118.958,00	91,15

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023

Kondisi jaringan irigasi sekunder berfungsi baik yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah 91,15% atau 118.958 m meningkat 7.247,3 m dibandingkan tahun 2022.

Data target dan capaian daerah irigasi yang terlayani air irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.76 Target dan Capaian Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Tahun	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik			
	Target (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
2018	7.050,52	81,16	6.945,19	80,44
2019	7.093,69	82,16	7.096,28	82,19
2020	7.136,86	82,66	6.908,06	80,01
2021	7.180,03	83,16	6.997,86	81,05
2022	6.939,15	80,37	6.946,82	80,46
2023	7.079,88	82,00	6.964,03	80,66

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024

Luas sawah sepanjang daerah irigasi kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik mencapai 80,66% atau 6.964 ha di tahun 2023. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa belum semua daerah irigasi memiliki saluran irigasi kualitas baik dan terairi dengan baik. Hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan ketimpangan infrastruktur terutama di wilayah-wilayah yang memiliki potensi basis pertanian, tetapi memiliki keterbatasan sarana prasarana pendukung. Adapun kegiatan yang mendukung pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi adalah pemeliharaan jaringan irigasi.

Salah satu dampak alih fungsi lahan pertanian adalah fungsi jaringan irigasi terganggu. Kejadian ini terjadi pada beberapa daerah irigasi, antara lain terjadi di:

- DI Bengkung; dihapus karena untuk hutan rakyat, memenuhi kebutuhan air minum dan untuk komplek makam raja-raja (Imogiri).
- Embung Ngentak; dihapus karena lahan dipergunakan untuk tambak udang.
- Embung Pandansimo, lahan dipergunakan untuk tambak udang.
- DI Kretek, daerah irigasi dihapus karena lahan menjadi perumahan, dan lahan tidak produktif.

Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, dengan adanya saluran irigasi dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai).

#### **d. Akses Air Minum**

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Akan tetapi peningkatan populasi manusia dan aktivitasnya telah membawa dampak terhadap ketersediaan dan kualitas air di alam. Air minum yang dikatakan layak adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.

Akses air minum layak di Kabupaten Bantul dari segi kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan jangkauan belum sepenuhnya terpenuhi sehingga salah satu upaya pemenuhannya dapat dilakukan dengan penambahan sambungan rumah melalui jaringan PDAM, membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di daerah yang rawan air bersih. Berikut merupakan persentase penduduk berakses air minum layak di Kabupaten Bantul tahun 2019-2023.

**Tabel 2.77 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	97,14	98,09	97,03	97,03*

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Dalam penyediaan air minum layak, capaian layak kabupaten Bantul tahun 2022 adalah 97,03%, sedang capaian layak aman adalah 13,29%. SPAM Regional Kartamantul sebagai penyedia air baku akan melayani kebutuhan air bersih bagi warga yang tinggal di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. SPAM ini mempunyai kapasitas air 700 liter per detik, dengan alokasi serapan untuk Bantul 100 liter per detik. Sampai dengan tahun 2022 dari target 100 liter per detik serapan Bantul pada angka 78 liter per detik.

#### **e. Sanitasi**

Pengertian Sanitasi adalah cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Manfaat sanitasi untuk mencegah penyakit menular, mencegah kecelakaan, mencegah timbulnya bau tidak sedap, menghindari pencemaran, mengurangi jumlah presentase sakit, serta lingkungan menjadi bersih, sehat dan nyaman. Permasalahan sanitasi harus segera ditangani dengan lebih optimal terutama permasalahan air limbah, drainase dan persampahan.

##### **1) Penanganan Air Limbah**

Air limbah domestik diklasifikasikan menjadi dua yaitu *grey water* dan *black water*. Air limbah yang termasuk dalam kategori *grey water* adalah air limbah rumah tangga berupa limbah cucian dapur, cucian pakaian (sabun), dan air buangan dari kamar mandi, sedangkan yang termasuk dalam *black water* adalah, tinja manusia, urine, air penggelontor, kertas pembersih, dan air pembersih. Secara umum dari hasil survey air limbah relatif terkelola dengan baik. Limbah rumah tangga selain tinja masuk



dalam saluran air limbah ataupun sumur peresapan, sedangkan limbah tinja dikelola dengan tangki septik ataupun IPAL Komunal.

**Tabel 2.78 Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022
Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak	98,35	99,5	97,19	97,19*

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024

Pengelolaan air limbah ini sangat mempengaruhi derajat kesehatan di masyarakat. Jika limbah tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan terutama pada air tanah. Pengelolaan air limbah yang baik dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: kesadaran masyarakat akan kesehatan, sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung, dan kelembagaan yang ada.

**Tabel 2.79 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Tahun	SPALD-T Skala Permukiman		SPALD-T Skala Kota	
	Jumlah Unit	Jumlah SR	Jumlah Unit	Jumlah SR
2019	130	11.013	1	2.509
2020	140	11.663	1	2.899
2021	144	11.919	2	3.124
2022	151	12.304	2	3.448
2023	151	12.304	2	3.598

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024

**Tabel 2.80 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2023**

No	Jenis	Satuan	Jumlah/ Kapasitas	Kondisi	
				Berfungsi	Tdk berfungsi
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	<b>SPALD-Setempat</b>				
1	Berbasis komunal				
	- MCK Komunal	unit	-		-
2	Truk Tinja	unit	2	√	
3	IPLT: kapasitas	m3/hari	50	√	
	<b>SPALD-Terpusat</b>				
1	Berbasis komunal				
	- Tangki septik komunal >10KK	unit	-	-	-
	- IPAL Komunal	Unit/kk	170/12.521	√	-
2	IPAL Kawasan/Terpusat				
	- Kapasitas	kk	3.000	√	-
	- Sistem		-	-	-
3	- SPAL-DT Bambanglipuro	SR	6.000		√

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa prasarana dan sarana yang terbangun sampai 2023 ini masih berfungsi dengan baik.

Penanganan pengelolaan air diupayakan dengan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik setempat meliputi pembuangan air limbah domestik ke dalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat adalah pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Balai PIALAM di IPAL Sewon.

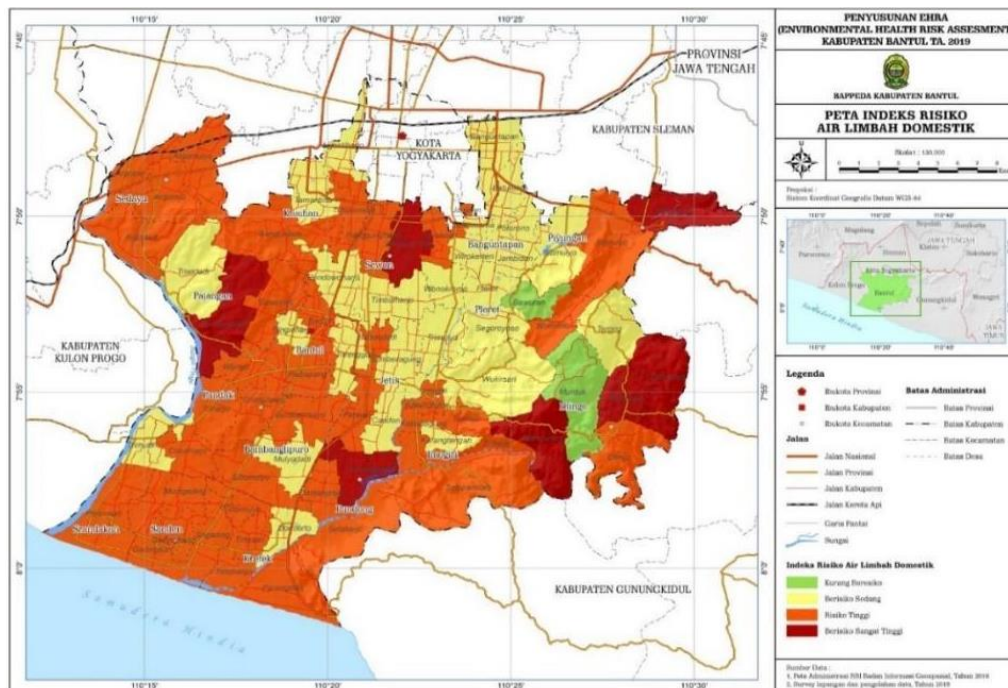
**Tabel 2.81 Data Penambahan SR Pengelolaan Air Limbah Terpusat Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Tahun	Penambahan SR	Jumlah SR
2022	380	3.506
2023	150	3.598

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024

Pada tahun 2023 ada penambahan sebanyak 150 SR, sehingga jumlah SR IPAL Sewon yang di wilayah Kabupaten Bantul menjadi 3.598 SR.

Berdasarkan Studi Strategi Sanitasi Kabupaten (2021), ditinjau dari sanitasi air limbah domestik Kabupaten Bantul terbagi menjadi 2 zona tingkat risiko sanitasi yang menunjukkan skala 4 (resiko sangat tinggi) dan 3 (resiko tinggi), dapat dilihat pada peta di bawah ini.



Sumber: Bappeda, Studi SSK, 2022

**Gambar 2.23** Peta Indeks Risiko Air Limbah Domestik

Zona tingkat risiko sanitasi pada air limbah domestik yaitu :

- a) Risiko Sangat Tinggi (skala 4), yang meliputi Kalurahan Gilangharjo, Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Tamanan, Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Panggunharjo, dan Kalurahan Tirtonirmolo.
- b) Risiko Tinggi (skala 3), yang meliputi Kalurahan Poncosari, Kalurahan Trimurti, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Srigading, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Tirtosari, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Seloharjo, Kalurahan Panjangrejo, Kalurahan Srihardono, Kalurahan Sidomulyo, Kalurahan Caturharjo, Kalurahan Triharjo, Kalurahan Wijirejo, Kalurahan Palbapang, Kalurahan Ringin Harjo, Kalurahan Bantul, Kalurahan Tirenggo, Kalurahan Sabdodadi, Kalurahan Patalan, Kalurahan Sumber Agung, Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Sriharjo, Kalurahan Karangtalun, Kalurahan Imogiri, Kalurahan Wukirsari, Kalurahan Dlingo, Kalurahan Temuwuh, Kalurahan Terong, Kalurahan Sitimulyo, Kalurahan Srimulyo, Kalurahan Srimartani, Kalurahan Jagalan, Kalurahan Singosaren, Kalurahan Wirokerten, Kalurahan Baturetno, Kalurahan Pendowoharjo, Kalurahan Timbulharjo, Kalurahan Tamantirto, Kalurahan Ngestiharjo, Kalurahan Sendangsari, Kalurahan Guwosari, dan Kalurahan Argomulyo.

## **2) Drainase**

Drainase merupakan pembuangan air permukaan baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Bantul pada saat ini sedang menyusun rencana induk sistem drainase cakupan kabupaten. Kondisi eksisting saat ini di Bantul masih bersifat parsial, belum terintegrasi dalam satu sistem kabupaten. Rencana induk sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, karena masuk dalam sistem daerah aliran sungai Opak, dan Progo. Sehingga, kondisi drainase yang baik atau tidak tersumbat dapat diwakili oleh ada/tidaknya

banjir genangan akibat curah hujan yang tinggi. Semakin luas banjir genangan menunjukkan drainase tidak berfungsi dengan baik.

**Tabel 2.82 Data Penanganan Banjir di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Tahun	Luas daerah rawan banjir (ha)	Realisasi	
		Penanganan Banjir (ha)	%
2019	893,56	257,49	28,82
2020	893,56	297,58	33,30
2021	893,56	338,48	37,88
2022	893,56	353,69	39,58
2023	893,56	368,96	41,29

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024

#### f. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Pekerjaan Umum. Capaian SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2023 telah memenuhi 100%, disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.83 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2023**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET	REALISASI				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100%	$\frac{222.979}{222.979} \times 100\%$ = 100 %	$\frac{329.616}{329.616} \times 100\%$ = 100 %	$\frac{333.130}{333.130} \times 100\%$ = 100%	$\frac{335.389}{335.389} \times 100\%$ = 100%	$\frac{340.161}{340.161} \times 100\%$ = 100%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem	100%	$\frac{318.539}{318.539} \times 100\%$ = 100 %	$\frac{329.616}{329.616} \times 100\%$ = 100 %	$\frac{333.130}{333.130} \times 100\%$ = 100 %	$\frac{335.389}{335.389} \times 100\%$ = 100%	$\frac{340.161}{340.161} \times 100\%$ = 100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET	REALISASI				
				2019	2020	2021	2022	2023
		Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)						

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024

### 2.1.3.1.3.2 Penataan Ruang

#### a. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Penyelenggaraan urusan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sehingga terwujud keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan harus memperhatikan sumber daya manusia, dan perlindungan fungsi ruang serta mencegah dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Dengan adanya penataan ruang yang baik diharapkan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta, maupun pemerintah dapat lebih terkendali dan berwawasan lingkungan.

Untuk dapat menjaga konsistensi dan perwujudan dari pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah, maka perlu dilakukan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang yang ada terhadap rencana tata ruang wilayahnya.

Hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.84 Kesesuaian Pola Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023**

Fungsi Kawasan		Belum Terwujud (Ha)	Belum Terwujud (%)	Terwujud (Ha)	Terwujud (%)	Tidak Sesuai (Ha)	Tidak Sesuai (%)	Total
<b>Lindung</b>	HUTAN LINDUNG	-	-	1.800,65	24,88	123,22	6,40	1.923,87
	KAWASAN CAGAR BUDAYA	-	-	44,76	0,62	245,80	3,40	290,56
	KAWASAN RESAPAN AIR	-	-	2.176,22	30,07	259,48	3,59	2.435,70

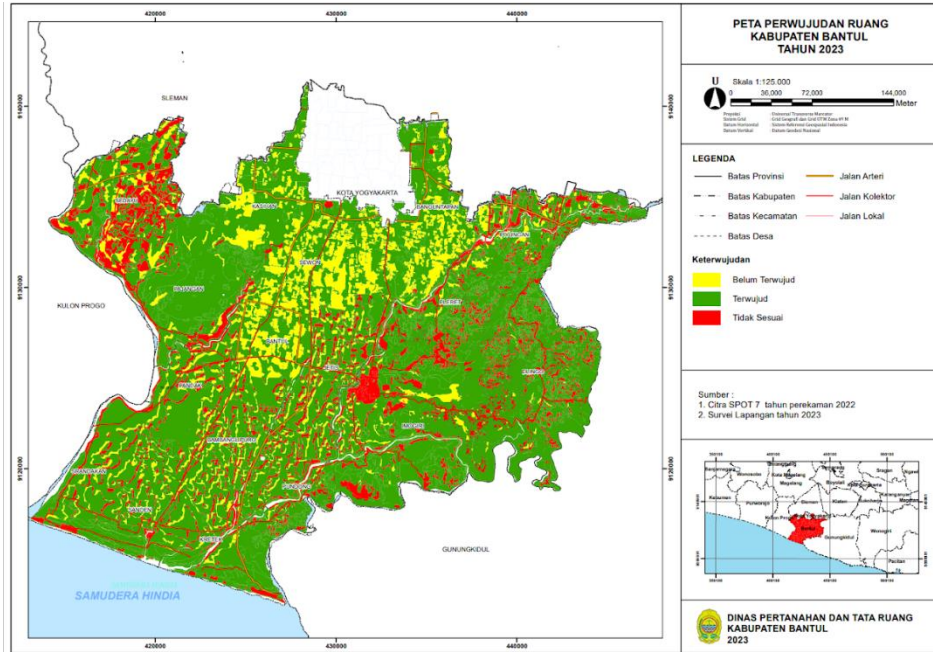
## RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

Fungsi Kawasan		Belum Terwujud (Ha)	Belum Terwujud (%)	Terwujud (Ha)	Terwujud (%)	Tidak Sesuai (Ha)	Tidak Sesuai (%)	Total
	SEMPADAN PANTAI	-	-	218,46	3,02	118,70	1,64	337,16
	SEMPADAN SUNGAI	-	-	1.580,53	21,84	668,26	9,24	2.248,79
	<b>Total Kawasan Lindung</b>	-	-	<b>5.820,61</b>	<b>80,44</b>	<b>1.415,46</b>	<b>19,56</b>	<b>7.236,07</b>
<b>Budidaya</b>	KAWASAN INDUSTRI	225,87	0,54	754,64	1,79	832,21	1,97	1.812,73
	KAWASAN PARIWISATA	-	-	696,50	1,65	4,86	0,01	701,36
	KAWASAN PERDESAAN	1.901,59	4,51	8.205,33	19,44	-	-	10.106,91
	KAWASAN HUTAN RAKYAT	239,81	0,57	759,35	1,80	391,48	0,93	1.390,64
	KAWASAN PERKOTAAN	3.331,31	7,89	8.917,09	21,13	-	-	12.248,40
	KAWASAN PERTANIAN LAHAN BASAH	-	-	8.103,05	19,20	2.819,66	6,68	10.922,71
	KAWASAN PERTANIAN LAHAN KERING	-	-	4.108,80	9,73	915,25	2,17	5.024,05
	<b>Total Kawasan Budidaya</b>	<b>5.698,57</b>	<b>13,50</b>	<b>31.544,76</b>	<b>74,74</b>	<b>4.963,46</b>	<b>11,76</b>	<b>42.206,79</b>
<b>Total Kawasan Lindung + Budidaya</b>		<b>5.698,57</b>		<b>37.365,36</b>		<b>6.378,92</b>		<b>49.442,86</b>
<b>Presentase Kawasan Lindung + Budidaya</b>			<b>11,53</b>		<b>75,57</b>		<b>12,90</b>	

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, 2024

Evaluasi terhadap kesesuaian pemanfaatan pola ruang diperoleh hasil bahwa tingkat kesesuaian pola ruang Kabupaten Bantul tahun 2023 dengan kriteria ‘terwujud’ sebesar 75,20%; ‘belum terwujud’ sebesar 11,53%; dan ‘tidak sesuai’ sebesar 12,90%.

Berdasarkan penilaian kesesuaian pola ruang tersebut, maka tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Bantul menurut klasifikasi dari Permen ATR/Kepala BPN No. 9/2017 secara umum berada pada klasifikasi tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kurang berkualitas (50% - 80%), artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.



Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2024

**Gambar 2.24 Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023**

Kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bantul tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.85 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	72,50	75,01	75,50	75,20	75,57

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, 2024

Persentase pemanfaatan ruang dari 2019-2023 mengalami peningkatan. Akan tetapi, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 75,20 dan meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 75,57.

**b. Perencanaan Tata Ruang**

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Produk perencanaan tata ruang yang telah dimiliki Kabupaten Bantul sampai tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.86 Produk Perencanaan dan Peraturan Tata Ruang di Kabupaten Bantul sampai dengan Tahun 2023**

No.	Produk Perencanaan Tata Ruang
1.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030
2.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sewon 2018-2038
3.	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kasihan 2018-2038
4.	Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sejumlah 4 dokumen : RDTR WP Pantai Selatan (Kretek, Sanden, Srandakan) RDTR WP Perkotaan Bantul (Bantul, Kasihan, Sewon, Banguntapan) RDTR WP Bantul Timur ( Imogiri, Pleret, Jetis, Pundong, Piyungan, Dlingo) RDTR WP Bantul Barat (Pajangan, Sedayu, Pandak, Bambanglipuro) RDTR dan PZ Perkotaan dan Pansela (2022)
6.	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) : RTBL Kawasan Srandakan, Kawasan Bantul Kota , Kawasan Sanden (2018) RTBL Zona pengembangan Kawasan Parangtritis II (2018) RTBL Jetis, Kawasan Industri Kasihan, Watu Gilang, Depok, Parangtritis (2019) RTBL Segoroyoso, RTBL Imogiri, Masjid Pathok Negoro Babadan, Masjid Pathok Negoro Dongkelan (2020) RTBL Perbukitan Parangtritis (2021) RTBL Kawasan Karangkitri (2022)
7.	Kajian KLHS RTRW dan review Naskah Akademik RTRW (2018) Dokumen Draft Peninjauan Kembali RTRW (2020) Dokumen Permohonan Persetujuan Substansi reuiu RTRW ke Kementerian ATR/BPN dan lampirannya (2021)
8.	Masterplan, Rencana Induk dan DED: Desain Citra Kota Bantul, Jalan Jendral Sudirman (2017) Masterplan dan DED Gerbang masuk Kabupaten Bantul dan Kawasan Lindung Hargodumilah (2018) Rencana Induk dan reuiu DED SRS Kerto – Pleret (2018) Rencana Induk dan reuiu DED SRS Kawasan Imogiri (2018) Masterplan Watu Amben (2019) Rencana Induk SRS Samas-Parangtritis (2022)

Sumber: *Bappeda dan DPTR Kabupaten Bantul, 2024*

Rencana Detail Tata Ruang di Kabupaten Bantul yang awalnya disusun per kecamatan, dalam perkembangannya menjadi 4 (empat), yaitu RDTR Perkotaan, RTDR Pansela, RDTR Bantul Barat, dan RDTR Bantul Timur.

- RDTR yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yaitu RDTR dan PZ BWP Sewon dan RDTR dan PZ BWP Kasihan kemudian digabung



dalam RDTR WP Perkotaan Bantul. Penyusunan RDTR Perkotaan dilaksanakan tahun 2022 dan ditargetkan mengikuti lintas sektor tahun 2024.

- RDTR WP Pantai Selatan Kabupaten Bantul yang disusun tahun 2019 mendapat persetujuan substansi tahun 2023 dan ditargetkan akan ditetapkan tahun 2024.
- RDTR WP Bantul Barat dan RDTR WP Bantul Timur yang awalnya merupakan RDTR dan PZ BWP Perdesaan penyusunannya telah dilaksanakan tahun 2023 dan akan dilanjutkan tahun 2024 dengan target lintas sektor Kementerian ATR/BPN.

Review Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kabupaten Bantul tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 saat ini telah mengajukan Permohonan Persetujuan Substansi ke Kementerian ATR/BPN. Proses di 2023 tertunda karena menunggu pengesahan RTRW DIY yang dilaksanakan bersamaan dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043 tertanggal 6 November 2023. Hasil dari RTRW DIY ini kemudian akan menjadi dasar pertimbangan reviu RTRW Kabupaten Bantul yang prosesnya dilanjutkan tahun 2024 ini.

### **c. Pelaksanaan Tata Ruang**

Dalam rangka mengefektifkan pemanfaatan ruang, mencegah terjadinya konflik antar fungsi dalam proses pemanfaatan ruang, melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan, serta menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi dibutuhkan suatu bentuk pelaksanaan penataan ruang dalam bentuk rekomendasi atau izin untuk melaksanakan suatu kegiatan di suatu lokasi dengan mempertimbangkan kesesuaian peruntukan lokasi tersebut terhadap perencanaan peruntukan awalnya.

**Tabel 2.87 Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Maupun Kegiatan Non Berusaha Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Permohonan Masuk			1.398		1.236
Permohonan diizinkan			1.229		1.209
Permohonan Tidak Dizinkan			169		27

*Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, 2024*

Kegiatan pelaksanaan penataan ruang melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2023 telah masuk permohonan rekomendasi kesesuaian pemanfaatan tata ruang untuk kegiatan berusaha maupun kegiatan non berusaha sejumlah 1.236 permohonan. Dari jumlah permohonan tersebut sejumlah 1.209 diizinkan seluruhnya/Sebagian dan 27 permohonan ditolak karena lokasi yang dimohonkan melanggar aturan rencana penggunaan.

#### **d. Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang**

Kegiatan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan berasal dari penilaian KKPR/Pernyataan Mandiri (OSS RBA), penilaian kesesuaian aspek tata ruang yang telah dikeluarkan DPTR. Penilaian dilakukan dengan melakukan validasi pembangunan di lapangan terkait dengan pemanfaatan ruang dan ketentuan perizinan teknis dari fungsi zona. Selain itu, fasilitasi pengendalian dan pengawasan tata ruang dilakukan dari aduan masyarakat. Untuk kegiatan terkait OSS RBA KKPR sudah dilakukan dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian di 115 lokasi yang dimohonkan secara keseluruhan.

Target yang ditetapkan tahun 2022 dan merupakan target akhir Renstra adalah 80% dengan realisasi 95%. Pencapaian target kinerja tahun 2022 dengan rincian yang dilakukan inspeksi pengendalian dan pengawasan di lapangan sejumlah 565 lokasi. Dari hasil inspeksi tersebut terdapat 16 titik lokasi yang terindikasi pelanggaran dan ditindaklanjuti dengan surat peringatan.

### 2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

#### a. Penanganan Kawasan Kumuh

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahal nya harga tanah di di wilayah perkotaan mendorong muncul nya permukiman kumuh. Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 220 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 364 Tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, sebanyak 19 lokasi dengan luas 79,58 Ha.

Selanjutnya untuk mewujudkan nol persen kawasan kumuh, pada tahun 2020 dilakukan peninjauan kembali kondisi kekumuhan. Berdasarkan hasil *review* ditetapkan Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 193 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Bantul Lokasi Kawasan kumuh ada di 31 Kalurahan pada 7 Kapanewon dengan luas 330,26 Ha.

SK Kumuh yang lama mencakup 4 kapanewon Kawasan Perkotaan Yogyakarta yaitu Banguntapan, Kasihan, Sewon, dan Bantul. Sedangkan SK Kumuh yang baru meliputi 7 (tujuh) kapanewon, yaitu Sewon, Kasihan, Banguntapan, Bantul, Sedayu, Pajangan, dan Piyungan. Penambahan 3 kapanewon dengan alasan pada Kapanewon Sedayu, Pajangan, dan Piyungan merupakan kawasan yang sangat pesat perkembangan jumlah penduduk, aktivitas industri, serta perumahan maupun kawasan permukimannya.

**Tabel 2.88 Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2021**

No	Kapanewon	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan Kumuh (Lokasi)	Keterangan (Dusun)
1	Pajangan	31,15	12	Dukuh, Benyo, Ngincep
2	Bantul	73,54	34	Bantul Warung, Badegan, Geblag, Serayu, Soropaten,

No	Kapanewon	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan Kumuh (Lokasi)	Keterangan (Dusun)
				Gemahan, Deresan, Bogoran, Cepoko, Priyan, Kweden, Taskombang, Serut, Bolon, Neco
3	Banguntapan	75,75	43	Plumbon – Karangbendo, Wiyoro, Pamotan, Bodon, Singosaren 3, Grojogan, Dladan, Kragilan, Nglaren, Salakan, Sampangan
4	Piyungan	21,58	10	Ngablak, Wanujaya Kidul, Sandeyan
5	Sewon	59,74	28	Sawahan, Kaliputih, Banyon, Semail, Randubelang, Ngireng Ireng, Geneng, Jaranan, Pelemsewu, Glugo, Glondong, Cabean, Pandes, Ngentak
6	Kasihani	40,94	17	Kasongan, Jogonalan Lor, Jogonalan Kidul, Kembaran Jetis, Brajan, Kasihan, Ngewotan/Janten
7	Sedayu	27,56	15	Sungapan Dukuh, Bakal Dukuh, Sukoharjo, Pereng Wetan, Jaten Plawonan, Watu
<b>Total</b>		<b>330,26</b>	<b>159</b>	

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023

Skema pengentasan permukiman kumuh tertuang dalam dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) dan direncanakan dalam dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Sinergi penanganan Kawasan kumuh di Kabupaten Bantul dilaksanakan baik oleh pusat, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kalurahan sesuai kewenangan. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, 10– 15 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan sampai dengan 10 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selengkapnya, data penanganan Kawasan kumuh Tahun 2021 dan 2022 seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.89 Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2021-2022

No	Kapanewon	Jumlah RT/RW	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Penanganan Kawasan Kumuh (Ha)		Total Penanganan (Ha)	Kawasan Kumuh Belum Tertangani (Ha)
				2021	2022		
1	Banguntapan	43	75,75	9,17	6,58	15,75	50,95
2	Bantul	34	73,54	55,54	3,24	58,78	14,76
3	Kasihani	17	40,94	19,28	0	19,28	26,44
4	Pajangan	12	31,15	-	9,11	9,11	22,04
5	Piyungan	10	21,58	-	3,72	3,72	17,86
6	Sedayu	15	27,56	13,85	0,29	14,14	13,42
7	Sewon	28	59,74	24,46	2,48	26,94	32,8
<b>Jumlah</b>		<b>159</b>	<b>330,26</b>	<b>122,3</b>	<b>25,42</b>	<b>147,72</b>	<b>178,27</b>

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023

Sedangkan khusus Kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bantul, sampai dengan Tahun 2022 telah ditangani seluas 102,10 Ha dari total Kawasan kumuh di bawah 10 Ha 196,19 Ha atau sekitar 52,04%. Penanganan Kawasan kumuh di bawah 10 Ha tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.90 Penanganan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha Tahun 2021-2022

No	Kapanewon	Jumlah RT/RW	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Penanganan Kawasan Kumuh (Ha)			Kawasan Kumuh Belum Tertangani (Ha)
				2021	2022	Total Penanganan	
1	Banguntapan	11	23,23	7,3	6,58	13,88	9,35
2	Bantul	32	60,90	42,9	3,24	46,14	14,76
3	Kasihani	7	8,52	2,32	0	2,32	6,20
4	Pajangan	4	7,10	-	0	0	7,10
5	Piyungan	10	21,58	-	0	0	21,58
6	Sedayu	15	27,56	13,85	0,29	14,14	13,42
7	Sewon	23	47,30	23,14	2,00	25,14	22,16
<b>Jumlah</b>		<b>102</b>	<b>196,19</b>	<b>89,51</b>	<b>12,59</b>	<b>102,10</b>	<b>94,06</b>

Sumber: DPUPKP, Bappeda, 2023 diolah

**Tabel 2.91 Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani di Kabupaten Bantul Tahun 2018 -2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Luas kawasan kumuh(ha)	79,58	79,58	79,58	330,26	330,26
Luas kawasan kumuh yang tertangani (ha)	73,26	73,60	73,60	122,30	147,72
Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani (%)	92,06	92,49	92,49	37,03	44,72
Dasar Peraturan	SK Bupati Nomor 220 Tahun 2016	SK Bupati Nomor 220 Tahun 2016	SK Bupati Nomor 220 Tahun 2016	SK Bupati Nomor 193 Tahun 2021	SK Bupati Nomor 193 Tahun 2021

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023

**b. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah bangunan tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan hunian secara teknis maupun non teknis. Kriteria atau persyaratan yang dimaksud, yaitu keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni

**Tabel 2.92 Peningkatan Kualitas RTLH di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Sumber Anggaran RTLH	2019	2020	2021	2022	2023
BSPS (Unit)	1365	1.577	925	35	
DAK (Unit)	176	139	127	132	
APBD I (Unit)	443	-	368	200	
APBD II (Unit)	83	-	-	150	155
<b>Total</b>	<b>2.067</b>	<b>1.716</b>	<b>1.420</b>	<b>517</b>	

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023

Sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Nomor 056/PERKIM-648/2020 tentang Penetapan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bantul terdapat 6.381unit RTLH di Kabupaten Bantul. Berbagai upaya dalam rangka penanganan dan peningkatan kualitas RTLH telah dilakukan.

Data penanganan RTLH Tahun 2020-2022 di Kabupaten Bantul tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.93 Data Penanganan RTLH Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2022

No	Kapanewon	RTLH	Penanganan			Total Penanganan RTLH
			2020	2021	2022	
1	Bambanglipuro	302	80	56	32	168
2	Banguntapan	294	47	32	21	100
3	Bantul	263	71	126	35	232
4	Dlingo	347	300	96	34	430
5	Imogiri	472	83	221	72	376
6	Jetis	472	82	54	49	185
7	Kasihan	261	0	141	17	158
8	Kretek	305	60	8	8	76
9	Pajangan	717	117	64	22	203
10	Pandak	296	83	68	77	228
11	Piyungan	186	124	58	1	183
12	Pleret	415	212	142	82	438
13	Pundong	217	90	21	60	171
14	Sanden	392	85	38	19	142
15	Sedayu	523	164	111	23	298
16	Sewon	373	60	175	17	252
17	Srandakan	546	57	9	40	106
<b>Jumlah</b>		<b>6.381</b>	<b>1.715</b>	<b>1.420</b>	<b>609</b>	<b>3.746</b>

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023

### c. Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan Permukiman.

Penyediaan PSU pada perumahan di Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa prasarana lingkungan perumahan meliputi jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase dan tempat pembuangan sampah. Sarana lingkungan perumahan meliputi fasilitas sarana Pendidikan, sarana Kesehatan, sarana perniagaan/perbelanjaan, sarana rekreasi dan olahraga, sarana peribadatan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana pemakaman, sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau dan sarana parkir. Sedangkan utilitas umum perumahan meliputi jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi dan halte, sarana pemadam kebakaran dan sarana penerangan jalan umum.

Perumahan di Kabupaten Bantul yang telah terfasilitasi PSU Tahun 2020 - 2022 seperti pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.94 Data Perumahan Terfasilitasi PSU di Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2022**

No	Uraian	2020	2021	2022
1	Jumlah Perumahan (unit)	265	279	192
2	Luas perumahan (Ha)	3.033.255	3.291.449	3.444.237
3	Rumah dengan Akses Air Minum (unit)	17.791	19.634	20.777
4	Rumah dengan Akses Jalan Lingkungan (unit)	17.791	19.634	20.777
5	Rumah dengan Akses Sanitasi (unit)	17.791	19.634	20.777
6	Rumah dengan Akses PJU (unit)	17.791	19.634	20.777

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023

#### **d. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat**

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Perumahan Rakyat. Capaian SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten



Bantul Tahun 2019, 2020 dan 2021 telah memenuhi 100%, disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.95 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR (Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018)	TARGET	REALISASI				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	100%	$\frac{110}{110} \times 100\%$ = 100 %	$\frac{10}{10} \times 100\%$ = 100 %	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 100 %  (tidak terjadi bencana)	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 100 %  (tidak terjadi bencana)	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 100 %  (tidak terjadi bencana)
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh penyediaan rumah layak huni karena terkena relokasi program pemerintah daerah	100%	$\frac{5}{5} \times 100\%$ = 100 %	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 100 %	$\frac{5}{5} \times 100\%$ = 100 %	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 100 %  (baru ada pendataan tahun 2022, sehingga belum dilaksanakan fisiknya)	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 100 %  (baru ada pendataan tahun 2022, sehingga belum dilaksanakan fisiknya)

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2024 DPUPKP, 2024

### 2.1.3.1.5 Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

#### 2.1.3.1.5.1 Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengatur standar pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan dari dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

##### a. Penegakan Perda

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas Penegakan Perda melalui operasi Yustisi dan Non Yustisi serta melaksanakan patroli wilayah untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Operasi Yustisi dan non yustisi dilaksanakan berdasarkan peraturan

daerah untuk meminimalisir penyakit masyarakat dan pelanggaran peraturan daerah dengan tujuan akhir menurunnya Pelanggaran Perda.

Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan penyuluhan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dengan penyuluhan pencegahan praktek prostitusi, pencegahan miras dan pemberantasan cukai ilegal.

Dalam rangka mencegah dan menindak terjadinya pelanggaran Perda dilaksanakan Operasi Penegakan Perda. Rekapitulasi hasil operasi penegakan Perda dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.96 Jumlah Hasil Operasi Yustisi dan Non Yustisi yang Ditindaklanjuti di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Tindakan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Berijin	77	6	0	0	0
2	Proses Hukum	77	28	7	11	10
3	Pembinaan	191	86	418	70	65
4	Panggilan PPNS	25	11	6	105	33
5	Bukti Pelanggaran Perda	8	41	0	62	39
6	Membuat Surat Pernyataan	4	18	154	21	25
7	Pembongkaran Pribadi	0	0	0	10	0
8	Tidak Memenuhi Panggilan	4	6	10	20	8
9	Tidak Ditemukan Barang Bukti	0	0	0	0	0
10	Pembubaran Kegiatan	n/a	n/a	18	0	0
11	Penutupan Sementara	n/a	n/a	22	0	0
Jumlah		<b>406</b>	<b>196</b>	<b>635</b>	<b>299</b>	<b>180</b>

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bantul, 2024

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul mendapatkan hasil operasi yustisi dan non yustisi sebanyak 10 kali proses hukum yang selanjutnya dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Bantul. Selain itu dilakukan pembinaan sebanyak 65 kali kegiatan, pemanggilan oleh PPNS sebanyak 33 kali, tidak memenuhi panggilan PPNS sebanyak 8 kali, ditemukan bukti pelanggaran perda sebanyak 39 bukti, dan membuat surat pernyataan sebanyak 25 kali. Untuk kegiatan terkait perizinan, Satpol PP tidak menemukan pelanggaran, pembubaran dan penutupan sementara tidak ditemukan karena penyesuaian kondisi PPKM pandemi *covid-19* di Kabupaten Bantul telah menurun, serta tidak ditemukannya pembongkaran baliho secara mandiri karena pada tahun 2023 pembongkaran baliho dilakukan oleh Satpol PP sebanyak 16 kali kegiatan. Data pada setiap tindakan tahun 2023 sekaligus menunjukkan jumlah total

temuan/ kasus, karena setiap terjadi kasus langsung dilakukan tindakan sampai kasus dinyatakan selesai.

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.97 Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Tindakan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	n/a	32	18	19	14
Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi	n/a	32	25	25	18
Persentase Perda yang ditegakkan	66%	100%	72%	76%	78%

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bantul, 2024

Hasil persentase perda dan perkada yang ditegakkan di Kabupaten Bantul didapatkan dari jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang ditegakkan terhadap jumlah peraturan Daerah yang memuat sanksi. Menurunnya jumlah perda dan perkada yang memuat sanksi merupakan penyesuaian di tahun 2023, setelah adanya perubahan status pandemi *covid-19*. Realisasi pada tahun 2023 adalah 78% dengan rincian jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan sebanyak 14 dari jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi sebanyak 18, hasil ini meningkat dibandingkan dengan hasil persentase pada tahun sebelumnya.

#### **b. Peningkatan Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**

Program ini dilaksanakan dengan menjalin kerja sama lintas sektoral yang intensif dan diimbangi dengan penambahan jaringan intelijen, serta peningkatan kinerja pemberantasan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah penertiban PKL, penertiban Anak Jalanan (Anjal), dan menindaklanjuti aduan masyarakat yang masuk.

**Tabel 2.98 Jumlah Sasaran Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Sasaran	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pedagang Kaki Lima (PKL)	130	27	149	20	28
2	Anak Jalanan (Anjal)	49	36	40	18	23
3	Aduan	80	101	124	165	66
<b>Total</b>		<b>259</b>	<b>164</b>	<b>313</b>	<b>203</b>	<b>117</b>

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bantul, 2023

Jumlah kegiatan dalam upaya penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) tahun 2023 sebanyak 117 kasus dengan rincian penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 66 kali, penertiban Anak Jalanan (Anjal) 23 kegiatan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) sebanyak 28 kali kegiatan yang dilaksanakan dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan penertiban anjal dilaksanakan bersama Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Anjal yang terjaring diserahkan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan assesmen dan diberikan pembinaan berupa pengarahan.

**Tabel 2.99 Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Tindakan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bantul, 2023

Capaian kinerja dalam penyelesaian pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) oleh Satpol PP Kabupaten Bantul tahun 2022 menunjukkan hasil yang baik dengan capaian 100%. Hasil ini merupakan capaian dari program yang telah dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat dengan target penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL), kegiatan patroli Anak Jalanan (Anjal), dan penanganan aduan masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bantul.

### c. Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.

**Tabel 2.100 Rasio Jumlah Petugas Linmas di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Jumlah	2019	2020	2021	2022	2023
1	Petugas Linmas	5.501	6.522	6.562	6.575	6.575
2	Rukun Tetangga (RT)	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775
Rasio Jumlah Petugas Linmas		95,3 %	112,9%	113,6%	113,8%	113,8%

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bantul, 2024

Jumlah Petugas Linmas di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 sebanyak 6.575 orang, jumlah yang sama dari tahun sebelumnya dengan rasio jumlah petugas linmas 113,8%.

### d. Kelompok Jagawarga

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendorong/menggerakkan prakarsa masyarakat melalui pranata sosial dalam upaya menggali, menjaga dan menumbuhkembangkan nilai-nilai luhur, kearifan budaya daerah dan sistem sosial yang hidup dalam masyarakat; melakukan mediasi penanganan dan penyelesaian gangguan sosial dalam kehidupan masyarakat dan melakukan upaya cegah dini dan deteksi dini atau kewaspadaan dini untuk mencegah timbulnya gangguan terhadap keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Indikator program ini adalah persentase pembentukan kelompok jagawarga. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di pedukuhan oleh Satpol PP, namun demikian terdapat beberapa dusun yang membentuk kelompok jagawarga secara mandiri.

**Tabel 2.101 Persentase Kelompok Jagawarga yang terbentuk di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kelompok Jagawarga yang terbentuk	279	358	648	803
2	Jumlah Dusun	933	933	933	933
3	Persentase Kelompok Jagawarga yang terbentuk	29,90%	38,37%	69,45%	86,07%

Sumber : Kesbangpol Kabupaten Bantul dan Satpol PP Kabupaten Bantul, 2024

Pengampu kegiatan pembentukan Jagawarga di Kabupaten Bantul diawali oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2021. Sesuai dengan Peraturan Gubernur No 28 Tahun 2021 tentang Jagawarga, tahun 2022 diampu oleh Satpol PP. Dari anggaran yang didanai oleh Dana Keistimewaan DIY, Satpol PP melakukan pembentukan kelompok Jagawarga sebanyak 155 dusun pada Tahun Anggaran 2023. Kelompok Jagawarga yang sudah terbentuk di Kabupaten Bantul sebanyak 803 dusun dari jumlah keseluruhan 933 dusun, dengan persentase sebesar 69,45%. Pada tahun 2024 ditargetkan semua dusun sudah terbentuk Jagawarga.

#### **e. Indeks Rasa Aman (IRA) Kabupaten Bantul**

Indeks Rasa Aman dilakukan bertujuan untuk mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat Kabupaten Bantul dengan menggunakan 4 variabel penyusun utama yaitu keamanan bencana, pemenuhan kesejahteraan sosial, perlindungan dan pemanfaatan kebhinekaan, dan keamanan dari kekerasan. Variabel-variabel tersebut diturunkan menjadi 10 sub-variabel yang kemudian diturunkan menjadi 33 sub-variabel turunan sebagai indikator penilaian rasa aman Kabupaten Bantul. Variabel dan indikator tersebut komponen yang bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Indeks Keamanan Manusia Indonesia (2015). Perhitungan Nilai Variabel Penyusun Indeks Rasa Aman Di Kabupaten Bantul Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.102 Perhitungan Nilai Variabel Penyusun Indeks Rasa Aman di Kabupaten Bantul Tahun 2023**

No	Variabel	Nilai Likert	Bobot	Nilai Variabel	Indeks Rasa Aman
1	Keamanan dari Bencana	4.4	0.25	1.1	<b>4.7</b> <b>(sangat baik)</b>
2	Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	4.5	0.25	1.1	
3	Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan	5	0.25	1.3	
4	Keamanan dan Kekerasan	4.9	0.25	1.2	

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penilaian indeks rasa aman terdiri dari 4 variabel yakni keamanan dari bencana memiliki nilai 4.4; variabel pemenuhan kesejahteraan sosial memiliki nilai 4.5; variabel perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan memiliki nilai 5; dan variabel keamanan dari kekerasan memiliki nilai 4.9. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh indeks rasa aman Kabupaten Bantul sebesar 4.7 dan termasuk kategori sangat baik.

#### **2.1.3.1.5.2 Sub Urusan Bencana Daerah**

Sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, terdapat tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada setiap warga negara secara minimal, yaitu (1) pelayanan informasi rawan bencana; (2) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan (3) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

- **Pelayanan Informasi Rawan Bencana.**

Pelayanan Informasi rawan bencana diwujudkan dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang menerangkan bahwa terdapat 9 (Sembilan) ancaman bencana dengan berbagai tingkat risiko.

**Tabel 2.103 Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022**

No	Indeks Risiko Bencana (IRB)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bantul	187,2	187,2	157,3	167,97	149,27
2	Kulon Progo	203,2	203,2	180,8	157,94	140,98
3	Gunungkidul	157,6	157,6	142,09	122,42	106,55

No	Indeks Risiko Bencana (IRB)	2019	2020	2021	2022	2023
4	Sleman	83,72	83,72	78,96	80,01	77,33
5	Kota Yogyakarta	72,86	72,86	72,57	69,46	66,62
<b>6</b>	<b>DIY</b>	<b>140,92</b>	<b>140,92</b>	<b>126,34</b>	<b>119,56</b>	<b>108,15</b>

Sumber: BNPB, 2024

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah 149,27 lebih rendah dari tahun 2022 yaitu 167,97, terjadi penurunan indeks risiko sebesar 18,7%, namun masih masuk kelas “risiko tinggi”.

Komponen perhitungan selain dari bahaya (*hazzard*) adalah kapasitas yang diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Berdasarkan penilaian terhadap 71 Indikator, diperoleh nilai IKD Kabupaten Bantul dengan hasil pengukuran nilai IKD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.104 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023**

No	Prioritas	2022	2023
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,93	0,96
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,77	0,80
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,69	0,87
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,63	0,63
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,58	0,62
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,36	0,48
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,20	0,30
<b>Indeks Ketahanan Daerah (IKD)</b>		<b>0,5 (Sedang)</b>	<b>0,58 (Sedang)</b>

Sumber: BPBD, 2023

Keterangan:

Nilai indeks ketahanan daerah berada pada rentang nilai 0-1

Dengan pembagian kelas Tingkat ketahanan daerah:

Indeks  $\leq 0,4$  adalah rendah

Indeks 0,4-0,8 adalah sedang

Indeks 0,8 – 1 adalah tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran IKD tersebut, nilai IKD kabupaten Bantul tahun 2023 adalah 0,58 meningkat dari tahun 2022 yang bernilai 0,5. Terdapat 2 Prioritas yang tidak meningkat nilainya yaitu Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.



- **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, berupa serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana).

**Tabel 2.105 Capaian Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	20	20	27	33	45
2	Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana)	35	35	39	42	46

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul, 2023

Percepatan pengembangan SPAB merupakan amanat Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2022 tentang Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan melalui pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) SPAB yang melibatkan semua sektor di bidang pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 2023 jumlah SPAB meningkat menjadi 45 SPAB dari 33 SPAB di tahun 2022.

Desa Tangguh Bencana yang terbentuk sampai dengan tahun 2022 sebanyak 46 Kalurahan atau mencapai 61,33% dari 75 Kalurahan di Kabupaten Bantul. Tahun 2023 dilaksanakan pembentukan 3 Kalurahan tangguh bencana di Kalurahan Argosari, Kalurahan Sitimulyo, dan Kalurahan Murtigading.

- **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, berupa serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Kejadian bencana tahun 2019 -2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.106 Kejadian Bencana di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2023**

No	Jenis Ancaman	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kebakaran	Kali	227	130	124	134	357

No	Jenis Ancaman	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
2	Banjir	Kali	8	0	5	12	3
3	Tsunami	Kali	0	0	0	0	0
4	Gempa (dirasakan)	Kali	6	13	204	153	15
5	Tanah Longsor	Kali	176	85	93	144	61
6	Kekeringan	Desa	26	9	0	0	
7	Gelombang Ekstrim	Kali	0	1	0	1	0
8	Cuaca Ekstrim	Kali	16	22	83	38	10
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	Kali	0	1	1	1	0

Sumber : BPBD Kabupaten Bantul, 2024

Sepanjang tahun 2018-2023 Kabupaten Bantul mencatat kejadian bencana terbesar adalah kejadian kebakaran, tanah longsor, dan cuaca ekstrim yang menyebabkan pohon tumbang dan tanah longsor, dengan tren yang cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir. Cuaca ekstrim pada tahun 2019 berupa siklon tropis Dahlia dan siklon tropis Savanna yaitu terjadinya peningkatan intensitas hujan, angin puting beliung di Kabupaten Bantul menyebabkan terjadi banjir besar di beberapa wilayah menyebabkan korban jiwa dan kerusakan sejumlah infrastruktur. Kerugian akibat bencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.107 Kerugian dan Korban Bencana di Kabupaten Bantul 2019-2023**

Tahun	Estimasi kerusakan (Rp)	Jumlah Korban	
		Luka	MD
2019	95.675.921.376	7	7
2020	14.576.944.000	4	2
2021	15.298.418.000	17	0
2022	23.762.130.000	19	0
2023	25.584.175.000	21	4

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul, 2024

Untuk mengurangi kerugian yang besar akibat terjadinya bencana, diperlukan *Early Warning System* (EWS). EWS yang ada di Kabupaten Bantul meliputi EWS tsunami, banjir dan longsor. EWS Tsunami di Kabupaten Bantul berfungsi sebagai diseminasi informasi dan komando dan sudah terintegrasi dengan sistem yang ada di BMKG untuk meneruskan informasi peringatan diri bencana tsunami sekaligus komando evakuasi kepada masyarakat di kawasan rawan tsunami. Titik-titik penempatan diseminasi EWS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.108 Togor EWS Kabupaten Bantul

No	Lokasi
<b>EWS Tsunami</b>	
1	Padukuhan Ngentak Kalurahan Poncosari, Srandakan
2	TPR Samas Kalurahan Srigading, Sanden
3	Pos SAR Parangtritis, Kretek/Paranghargo
4	Padukuhan Cangkring, Kalurahan Poncosari, Srandakan
5	Padukuhan Muneng Kalurahan Tirtohargo, Kretek
6	Padukuhan Depok Kalurahan Parangtritis, Kretek
7	Padukuhan Mancingan Kalurahan Parangtritis, Kretek
8	Padukuhan Parangkusumo Kalurahan Parangtritis, Kretek
9	Padukuhan Babakan Kalurahan Poncosari, Srandakan
10	Masjid Pranasakti Padukuhan Ngepet Kalurahan Srigading, Sanden
11	Padukuhan Mancingan Belakang Pendopo Parangtritis, Kretek
12	Masjid Al-Fajar, Ngentak, Poncosari, Srandakan
13	Masjid Kuwatul Islam, Kuwaru, Poncosari, Srandakan
14	Masjid Makmur, Babakan Kalurahan Poncosari, Srandakan
15	Masjid Sabilil Huda, Bondowaluh, Poncosari, Srandakan
16	Masjid Singgelo, Singgelo, Poncosari, Srandakan
17	Masjid Baiturrahman, Krajan, Poncosari, Srandakan
18	Masjid Baitur Rohman, Demangan, Gadingsari, Sanden
19	Masjid Bismillahinur, Wonorejo, Gadingsari, Sanden
20	Masjid An-Nur Era, Patehan, Gadingsari, Sanden
21	Masjid Wonoroto, Gadingsari, Sanden
22	Masjid Al-Haadti, Gadingsari, Sanden
23	Masjid Al-Muttaqin, Ngepet, Srigading, Sanden
24	Masjid Al-Huda, Tegalrejo, Srigading, Sanden
25	Masjid Al-Mujahidin, Bros Muneng, Tirtohargo, Kretek
26	Masjid Nurul Hidayah, Gegunung, Tirtohargo, Kretek
<b>EWS Banjir</b>	
1.	Jembatan Dzikrul Ghafilin, Pajangan
2.	Jembatan Benyo. Sendangsari
3.	Jembatan Kiringan,
4.	Jembatan Kedungjati, Imogiri
5.	Jembatan Gayam, Segoroyoso
<b>EWS Longsor</b>	
1.	Wonolelo
2.	Srimartani
3.	Selopamioro
4.	Muntutuk

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

### 2.1.3.1.5.3 Sub Urusan Kebakaran

Penanganan kebakaran, mengacu Permendagri No 114 Tahun 2018 yaitu SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, berupa layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran; layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; layanan

pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) merupakan wilayah dengan karakteristik memiliki kesamaan kebutuhan sistem proteksi kebakaran dalam batas wilayah tertentu. Layanan WMK ditentukan oleh *response time* yang tidak boleh lebih dari 15 menit dengan radius daerah layanan tidak lebih dari 7,25 km. Kinerja pelayanan sub urusan kebakaran dinyatakan dalam cakupan pelayanan dan tingkat waktu tanggap (*response time rate*). Cakupan pelayanan kebakaran dinyatakan dengan perbandingan jumlah penanganan kejadian di wilayah Kabupaten Bantul terhadap jumlah kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Bantul. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) merupakan perbandingan antara jumlah kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu tanggap 15 menit terhadap jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK. Cakupan pelayanan Sub Urusan Kebakaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.109 Cakupan Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	7	7	7	7	7
2	Mobil Damkar yang dimiliki (unit)	8	8	8	8	8
3	Luas WMK (ha)	176,62	176,62	176,62	176,62	176,62
	Jumlah kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Bantul	193	114	123	134	357
	Jumlah penanganan kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Bantul	193	114	123	134	357
4.	Cakupan pelayanan kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2024

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) merupakan perbandingan antara jumlah kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu tanggap 15 menit terhadap jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) Sub Urusan Kebakaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 2.110 Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap (a)	203	114	123	126	328

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK (b)	193	114	123	126	328
3	Jumlah kebakaran di luar jangkauan WMK (c)	34	16	6	8	29
4	Jumlah total terjadi kebakaran (b+c)	227	130	129	134	357
5	Tingkat waktu tanggap (a/b)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul, 2024

Cakupan pelayanan kebakaran dan Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) sangat tergantung dengan jumlah mobil pemadam kebakaran, personil dan peralatan pendukung yang dimiliki. Tahun 2022 Kabupaten Bantul memiliki 7 sektor Pemadam Kebakaran dan penyelamatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.111 Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Bantul**

No	Nama Sektor	Alamat
1.	Sektor Bantul	Sumuran, Palbapang, Bantul
2.	Sektor Kasihan	Kembaran, Tamantirto, Kasihan
3.	Sektor Banguntapan	Klakaran, Baturetno, Banguntapan
4.	Sektor Imogiri	Manggung, Wukirsari, Imogiri
5.	Sektor Sedayu	Semampir, Argorejo, Sedayu
6.	Sektor Pundong	Piring, Srihardono, Pundong
7.	Sektor Piyungan	Kabregan, Srimulyo, Piyungan

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul, 2024



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

Gambar 2.25 Peta Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Bantul Tahun 2022

### Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Capaian SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2020, 2021, dan 2022, disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.112 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	0	0	100%	0	0	100%	600	600	100%
		Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	32	32	100%	18	18	100%	19	19	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana	826.056	826.056	100%	897.306	897.306	100%	100%	70,15%	70,15%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	954.706	954.706	100%	956.513	956.513	100%	964.245	964.245	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3.159	3.159	100%	56.696	56.696	100%	1.852	1.852	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban	130	130	100%	390	390	100%	285	285	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		kebakaran									

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kabupaten Bantul, 2023

Capaian SPM tahun 2020 dan 2021 telah mencapai 100%, sedangkan tahun 2022 dari 5 (lima) jenis layanan dengan 6 indikator, 5 indikator mencapai 100%. Indikator layanan jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana pada jenis layanan pelayanan informasi rawan bencana terealisasi 70,15%. Faktor penghambat capaian jenis layanan ini adalah ada informasi bencana yang belum tersampaikan ke seluruh warga yaitu gempa bumi, abrasi, dan kekeringan. Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.113 Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana**

No.	Jenis Ancaman Bencana	Target	Realisasi	Persentase
1	Gempa Bumi	94.878	2.850	3,00
2	Tsunami	24.558	22.733	92,57
3	Banjir	34.735	36.065	103,83
4	Longsor	93.414	93.681	100,29
5	Cuaca Ekstrem	63.369	50.975	80,44
6	Gelombang Ekstrem/ Abrasi	93.460	40.593	43,43
7	Kekeringan	692.936	100	0,01
8	Kebakaran	7.031	7.571	107,68
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	837.734	837.734	100,00
Rata-rata persentase capaian				70,15

Sumber: BPBD Bantul, 2023

Adapun upaya pemenuhan SPM pada jenis layanan untuk kelompok rentan dilaksanakan dengan:

1. Memberi fasilitasi SPAB di SLB Mardimulyo Kretek,
2. Pembentukan Difabel Siaga Bencana (Difagana),
3. Memberi fasilitasi akreditasi puskesmas aman bencana.



### 2.1.3.1.6 Sosial

Penyelenggaraan pelayanan urusan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi sosial melalui sumberdaya yang dimiliki.

#### a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

PPKS adalah adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diketahui terdapat 26 jenis PPKS. Namun demikian di Kabupaten Bantul hanya terdapat 25 jenis PPKS karena tidak adanya jenis PPKS Komunitas Adat Terpencil.

**Tabel 2.114 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Jenis PPKS	Definisi	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Anak Balita Terlantar	Seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.	65	34	31	21	35
2	Anak Terlantar	Seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun,	1.731	1.475	1.277	574	579

No	Jenis PPKS	Definisi	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
		meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.					
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.	124	121	74	6	15
4	Anak Jalanan	Anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.	12	5	6	2	0
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.	450	353	352	539	515
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	Anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan,	115	114	128	113	86

No	Jenis PPKS	Definisi	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
	atau Diperlakukan Salah	diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.					
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.	115	114	205	120	37
8	Lanjut Usia Terlantar	Seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.	8.085	7.684	7.208	5.363	4614
9	Penyandang Cacat/disabilitas	Mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.	6.137	6.535	6.264	7.983	7254

No	Jenis PPKS	Definisi	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
10	Tuna Susila	Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.	46	24	35	9	8
11	Gelandangan	Orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.	35	12	32	26	22
12	Pengemis	Orang-orang yang mendapat penghasilan memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.	22	25	21	19	16
13	Pemulung	Orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.	154	66	133	94	87
14	Korban Minoritas	Kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial,	0	0	0	n/a	0

No	Jenis PPKS	Definisi	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
		seperti gay, waria, dan lesbian.					
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.	151	47	105	41	56
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.	127	103	77	125	1248
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di luar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.	97	21	71	60	162
18	Korban Trafficking	Seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.	1	0	0	0	0
19	Korban Tindak Kekerasan	Orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi	229	231	113	232	23

No	Jenis PPKS	Definisi	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
		berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.					
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.	57	30	49	52	34
21	Korban Bencana Alam	Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.	21	405	533	222	612
22	Korban Bencana Sosial	Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.	100	0	709	0	0
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk	2.991	2.865	2.714	2.667	

No	Jenis PPKS	Definisi	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
		dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.					
24	Fakir Miskin	Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.	52.509	50.609	57.299	54.539	22.127
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.	1.319	1.228	1.198	882	792
26	Komunitas Adat Terpencil	Kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.	-	-	-	n/a	0

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2024

#### a. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

PSKS seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terdiri dari : Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan

Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Dunia Usaha. Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.115 Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

<b>PSKS</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Karang Taruna	93	93	93	93	93
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	17	17	17	17	17
Organisasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	43	52	60	62	69
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	400	630	631	400	631
Taruna Siaga Bencana (Tagana)	119	137	137	117	105
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	34	47	62	78	80

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2024

### **b. Sarana Sosial**

Kabupaten Bantul memiliki sarana sosial berupa Lembaga Kesejahteraan Sosial yang jumlahnya cenderung mengalami peningkatan dapat di lihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 2.116 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

<b>Sarana Sosial</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	43	52	60	62	69

Sumber: Dinsos Kabupaten Bantul, 2024

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Kabupaten Bantul sejumlah 62 lembaga dengan rincian:

- 32 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
- 5 Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
- 2 Lembaga Kesejahteraan Sosial Disabilitas; dan
- 23 Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya



**c. Kampung Siaga Bencana (KSB)**

Kampung Siaga Bencana yang selanjutnya disebut KSB adalah wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana, tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 Tentang Kampung Siaga Bencana (KSB). Berikut ini data jumlah Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.

**Tabel 2.117 Jumlah Kampung Siaga Bencana (KSB) Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah KSB	6	6	6	11	36

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2024

**d. Capaian SPM Bidang Sosial**

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang sosial. Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bantul telah memenuhi 100%.

**Tabel 2.118 Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial (Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma)	$\frac{200}{200} \times 100\%$ = 100%	$\frac{6535}{6535} \times 100\%$ = 100%	$\frac{6.264}{6.264} \times 100\%$ = 100%	$\frac{8.522}{8.522} \times 100\%$ = 100%	$\frac{7.769}{7.769} \times 100\%$ = 100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial (Pelayanan dasar bagi anak asuh panti sosial)	$\frac{500}{500} \times 100\%$ = 100%	$\frac{1475}{1475} \times 100\%$ = 100%	$\frac{1.308}{1.308} \times 100\%$ = 100%	$\frac{595}{595} \times 100\%$ = 100%	$\frac{614}{614} \times 100\%$ = 100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial (Bimbingan sosial dan	$\frac{200}{200} \times 100\%$ = 100%	$\frac{7684}{7684} \times 100\%$ = 100%	$\frac{7.208}{7.208} \times 100\%$ = 100%	$\frac{5.363}{5.363} \times 100\%$ = 100%	$\frac{4.614}{4.614} \times 100\%$ = 100%

No	Uraian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
	bantuan bagi KK miskin non potensial/kesrakat dan lansia rentan sosial ekonomi)					
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial (Penanganan dan pembinaan permasalahan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat)	$\frac{57}{57} \times 100\%$ = 100%	$\frac{40}{40} \times 100\%$ = 100%	$\frac{53}{53} \times 100\%$ = 100%	$\frac{45}{45} \times 100\%$ = 100%	$\frac{38}{38} \times 100\%$ = 100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota (Penyediaan beras penyangga/Buffer stock)	$\frac{92}{92} \times 100\%$ = 100%	$\frac{405}{405} \times 100\%$ = 100%	$\frac{1.201}{1.201} \times 100\%$ = 100%	$\frac{750}{750} \times 100\%$ = 100%	$\frac{612}{612} \times 100\%$ = 100%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2024

### 2.1.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

#### 2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Konsep tenaga kerja yang digunakan BPS mengikuti konsep internasional, mengacu pada *The Labour International Concept* yang disarankan oleh *International Labour Organization (ILO)*, bahwa penduduk usia kerja adalah yang telah berumur 15 tahun keatas.

##### a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.119 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Pembilang:</b> Jumlah Angkatan Kerja	577.530	579.229	609.943	595.343	626.283
<b>Penyebut:</b> Jumlah Usia Kerja	781.731	791.533	819.264	830.967	841.939
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	73,87	73,18	74,45	71,64	74,38

Sumber: *Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2023*

Berdasarkan tabel di atas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bantul di tahun 2022 sebesar 74,38%, mengalami peningkatan sekitar 2,74% dibandingkan tahun 2021.

#### **b. Pencari Kerja yang Ditempatkan**

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah persentase jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja yaitu perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas kabupaten/kota. Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan tahun 2019-2023 di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.120 Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Pembilang:</b> Pencari kerja yang ditempatkan	3.329	2.556	3.033	3.681	3.055
<b>Penyebut:</b> Pencari kerja yang terdaftar	3.828	4.816	5.953	6.762	3.787
Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	86,96%	53,07%	50,95%	54,44%	80,67%

Sumber: *Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2023*

Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2023 sebesar 80,67% meningkat dari tahun 2022 sebesar 54,44%. Hal ini disebabkan adanya penurunan pencari kerja terdaftar di tahun 2023.

Formula perhitungan adalah jumlah tenaga kerja yang terserap dari program penempatan tenaga kerja meliputi Alokasi Kerja Lokal (AKL), Alokasi Kerja Antar Daerah (AKAD), Alokasi Kerja Antar Negara (AKAN) dan

Program Padat Karya. Program Padat Karya masuk dalam salah satu unsur pendukung serapan tenaga kerja disebabkan karena pekerja pada program padat karya, merupakan tenaga kerja informal yang rata-rata berprofesi sebagai tukang, asisten tukang, petani, pedagang dan buruh, manakala mereka tidak sedang bekerja pada program padat karya, mereka kembali bekerja pada pekerjaan mereka masing-masing.

Upah Minimum Kabupaten Bantul Tahun 2019- 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.121 Upah Minimum Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2019-2023

<b>Uraian</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Upah Minimum Kabupaten Bantul	1.649.800	1.790.500	1.842.460	1.916.848	2.066.438
Upah Minimum DIY	1.570.923	1.704.608	1.765.000	1.840.916	1.981.782
Dasar	Keputusan Gubernur DIY Nomor 320/KEP/2018	Keputusan Gubernur DIY Nomor 257/KEP/2019	Keputusan Gubernur DIY Nomor 340/KEP/2020	Keputusan Gubernur DIY Nomor 373/KEP/2021	Keputusan Gubernur DIY Nomor 353/KEP/2022

Sumber: *Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2024*

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Bantul Tahun 2022 mengalami menjadi Rp2.066.438. Kenaikan ini disebabkan adanya perhitungan terhadap penyesuaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

### **c. Perlindungan Tenaga Kerja**

Pelaksanaan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Bantul, dilakukan melalui program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan serta program peningkatan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan setiap tahun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perlindungan tenaga kerja adalah besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (kepesertaan BPJS ketenagakerjaan) dan besaran penyelesaian sengketa hubungan industrial.

Data jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek dan jumlah pekerja buruh diambil dari sistem Wajib Lapo Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP). Kenaikan pekerja/buruh di Kabupaten Bantul yang menjadi peserta Jamsostek/kepesertaan BPJS ketenagakerjaan merupakan hasil dari kegiatan pendampingan dan sosialisasi terhadap Peraturan Perusahaan(PP), Perjanjian Kerja Bersama(PKB) dan Lembaga Kerja Sama Bipartit yang dilaksanakan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bantul.

Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek tahun 2019-2023 Kabupaten Bantul ditampilkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.122 Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Jamsostek di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	<b>Pembilang:</b> Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek	28.666	30.686	35.825	40.536	48.636
2	<b>Penyebut:</b> Jumlah pekerja/buruh	49.036	41.140	45.705	49.895	61.560
3	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	58,46%	74.56%	78,38%	81,24%	75,76%

Sumber: Data Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan, diolah Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2024

Pada tahun 2023 tingkat kepesertaan Jamsostek/BPJS ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul adalah 75,75% menurun dari tahun 2022.

Persentase penyelesaian sengketa hubungan industrial tahun 2019-2023 Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.123 Persentase Sengketa Hubungan Industrial yang terselesaikan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah sengketa	37	36	24	31	43
Jumlah sengketa yang terselesaikan	37	36	24	31	43
Persentase sengketa yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2023

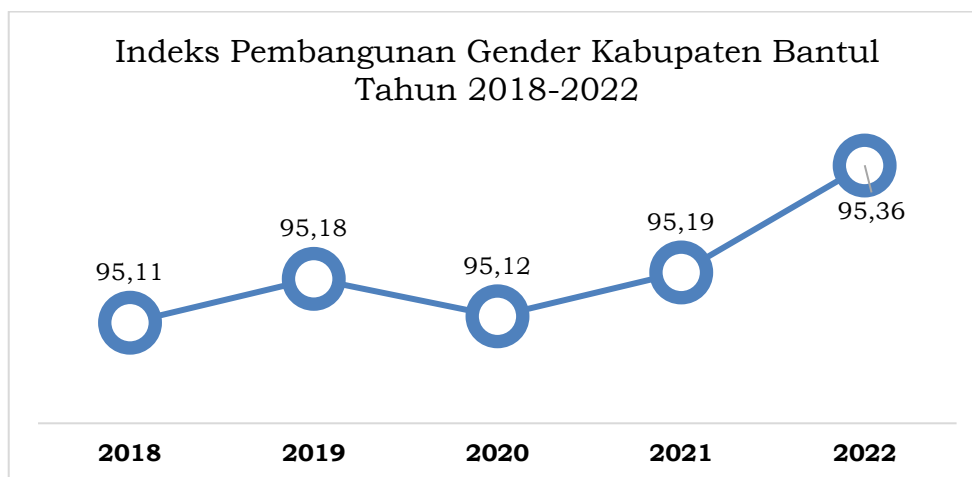
Di tahun 2023 persentase sengketa yang ditangani Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencapai 100%. Hal ini karena adanya komitmen

dari para mediator, disertai dengan itikad pekerja dan perusahaan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.

### 2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak ada kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG sama dengan IPM.



Sumber : Badan Pusat Statistik DIY 2023

**Gambar 2.26 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022**

Pada kurun waktu 2018-2022 capaian IPG Kabupaten Bantul cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 IPG Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. IPG Kabupaten Bantul lebih tinggi jika dibandingkan IPG DIY dan IPG Nasional.

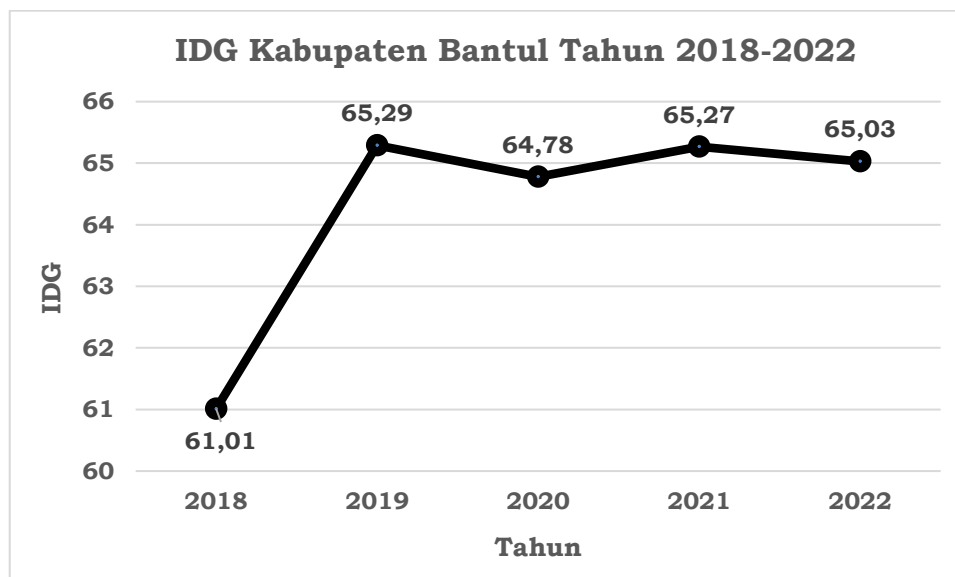
**Tabel 2.124 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
IPG Kabupaten Bantul	95,11	95,18	95,12	95,19	95,36
IPG DIY	94,73	94,77	94,80	94,88	94,99
IPG Nasional	90,99	91,07	91,06	91,27	91,63

Sumber: BPS, 2023

### b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi.



Sumber : Badan Pusat Statistik DIY 2022

#### **Gambar 2.27 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022**

Pada tahun 2019 Kabupaten Bantul mengalami peningkatan capaian IDG yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang dari nilai 61,01 menjadi 65,29, sementara untuk tahun 2020 capaian IDG Kabupaten Bantul menurun menjadi 64,78 dan meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 65,27. Capaian IDG tahun 2022 turun menjadi 65,03. Penyebab menurunnya IDG tersebut antara lain karena faktor berkurangnya sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi.

IDG Kabupaten Bantul lebih rendah jika dibandingkan IDG DIY dan IDG Nasional, artinya tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi di Kabupaten Bantul lebih rendah dari DIY dan Nasional.

**Tabel 2.125 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
IDG Kabupaten Bantul	61,01	65,29	64,78	65,27	65,03
IDG DIY	69,64	73,59	74,73	76,7	76,87
IDG Nasional	72,1	75,24	75,57	76,26	76,59

Sumber: BPS, 2023

### c. Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan mengamanatkan bahwa anak dan perempuan berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman, bebas dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak, seperti kekerasan fisik (*physical violence*), kekerasan psikis (*psychological violence*), pencabulan (*molestation*), perkosaan (*rape*), pelecehan seksual (*sexual harassment*), eksploitasi (*sexual exploitation*), perdagangan orang (*trafficking*), dan penelantaran (*neglect*).

Pada tahun 2022 Kabupaten Bantul menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Meskipun demikian masih ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada table di bawah ini.

**Tabel 2.126 Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Bentuk Kekerasan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Fisik	85	95	72	53	88
2	Psikis	69	45	69	53	104
3	Perkosaan	10	16	9	4	7
4	Pelecehan Seksual	23	20	18	18	37
5	Pencabulan	32	41	70	17	37
6	Penelantaran	9	14	17	15	8
7	Eksploitasi	0	0	0	1	1
8	<i>Trafficking</i>	1	0	0	0	3
<b>Jumlah</b>		<b>229</b>	<b>231</b>	<b>255</b>	<b>161</b>	<b>285</b>

Sumber: Aplikasi SIGA OUTD Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, 2024



Pada tahun 2023 terdapat 285 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat dari tahun 2022. Kekerasan ini terjadi di lingkup keluarga maupun di luar lingkup keluarga dan sudah mendapatkan penanganan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Kepolisian Resort Bantul, dan Rumah Sakit. Adapun jenis pelayanan yang diberikan adalah layanan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. Layanan pendampingan korban termasuk di dalamnya pendampingan kesehatan, hukum, psikologi, dan sosial.

Masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak membuktikan bahwa masih sangat diperlukan upaya:

- Sosialisasi pencegahan perkawinan anak, *parenting*, dan pencegahan *bullying*;
- Optimalisasi peran kader Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tingkat Kalurahan, Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) tingkat kabupaten dan tim pendamping korban kekerasan tingkat kapanewon;
- Penegakan peraturan daerah tentang perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan, serta penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di daerah harus dioptimalkan.

Kasus kekerasan terhadap anak berdasar rentang usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.127 Data Kasus Anak Korban Kekerasan Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Rentang Usia (tahun)	2019	2020	2021	2022	2023
0-5	18	12	7	17	4
6-10	33	33	27	9	22
11-17	64	69	92	45	89
<b>Total</b>	<b>115</b>	<b>114</b>	<b>126</b>	<b>71</b>	<b>115</b>

Sumber: Aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, 2024

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan pada tahun 2023. Kenaikan kasus kekerasan terhadap anak meningkat

disebabkan masih lemahnya ketahanan keluarga, dalam hal ini 8 (delapan) fungsi keluarga belum dipahami oleh keluarga, baik ibu, ayah, anak maupun orang dewasa lain dengan hubungan kekerabatan. Komunikasi antar anggota keluarga yang kurang intens, pengasuhan positif yang belum optimal dipahami dan dilakukan oleh orang tua juga menjadi pemicu semakin tingginya angka kekerasan terhadap anak, sehingga pembangunan keluarga menjadi hal yang sangat penting untuk diupayakan oleh pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua pihak agar kesadaran orang tua dan/atau orang dewasa untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat diwujudkan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

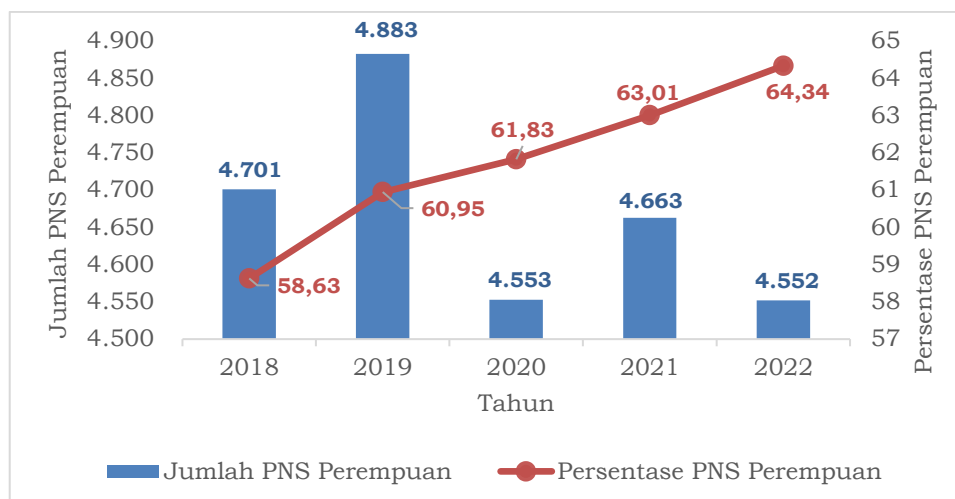
**Tabel 2.128 Jumlah KDRT di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kasus	113	107	179	78	131
2	Persentase Kasus Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, 2024

#### **d. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**

Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja. Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah ini diwakili dengan persentase Pegawai Negeri Sipil perempuan yang disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber: BKPSDM Kabupaten Bantul diolah, 2022

**Gambar 2.28 Persentase Partisipasi PNS Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022**

Berdasarkan data pilah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan pemberdayaan perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Bantul semakin meningkat. Untuk jumlah total ASN di Kabupaten Bantul per 31 Desember 2022 sebanyak 7.075 ASN. Persentase PNS Perempuan yang menduduki jabatan eselon II-IV di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.129 Persentase PNS Perempuan yang Menduduki Jabatan Eselon di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	4	4	3	4	6
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	43	46	47	52	56
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	231	250	227	228	155
4	Jumlah Pekerja perempuan yang menempati jabatan eselon II -IV	278	300	277	284	217
5	Jumlah PNS perempuan	4.701	4.883	4.553	4.663	4.552
6	Persentase PNS perempuan yang menempati jabatan eselon II – IV (4/5)	5,91	6,14	6,08	6,09	4,77

Sumber: BKPSDM Kabupaten Bantul, 2023

Jumlah PNS perempuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang menduduki jabatan eselon II dan III mengalami peningkatan di tahun

2022 dibandingkan pada tahun 2021. Hal ini menandakan perempuan lebih diperhitungkan dan diberi kesempatan menduduki jabatan yang lebih tinggi, Sedangkan penurunan pejabat Eselon IV karena adanya penyetaraan jabatan Eselon IV menjadi jabatan fungsional.

#### e. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk perempuan usia kerja. Angka tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.130 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022**

No	Tahun	Jumlah Angkatan Kerja Perempuan	Jumlah Penduduk Perempuan Usia Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
1	2018	254.243	399.001	63,72
2	2019	259.445	401.996	64,54
3	2020	269.969	415.798	64,93
4	2021	255.177	421.516	60,54
5	2022	278.233	427.799	65,03

Sumber: Sakernas, BPS, 2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Kabupaten Bantul cenderung naik dari tahun 2018 sampai tahun 2022, kecuali pada tahun 2021 karena adanya pandemi covid-19. Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bantul mengalami kenaikan dari 60,54% di tahun 2021 menjadi 65,03% di tahun 2022 atau meningkat sebanyak 4,49%.

#### f. Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan yang berbasis hak anak yang dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. Kabupaten/Kota Layak Anak diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan anak yang juga

didukung oleh Undang-Undang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah dipertegas bahwa urusan Pemerintah di bidang perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan didukung oleh masyarakat, media, dan dunia usaha sebagai empat pilar pembangunan. Disamping itu pada tahun 2021 telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak, dengan lahirnya Peraturan Presiden ini berarti dasar hukum pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia menjadi lebih kuat.

Kabupaten/Kota Layak Anak terdiri dari lima predikat yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA. Penghargaan kabupaten kota layak anak akan diberikan kepada daerah yang mempunyai komitmen tinggi untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh tim dari Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tim Kementerian lembaga dan tim independen.

Capaian Kabupaten Layak Anak Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.131 Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Kategori KLA	Madya	Madya	Nindya	Utama
2	Kecamatan/Kapanewon Layak Anak (Kelana)	11	17	17	17
3	Desa/Kalurahan Layak Anak (Delana)	13	18	75	75

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2023

Upaya percepatan pencapaian status Kabupaten Layak Anak pada tahun 2022 dilakukan dalam semua kluster. Pada Kluster kelembagaan dilakukan dengan penetapan kebijakan penyelenggaraan yang mendukung perwujudan Kabupaten Layak Anak yaitu:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- 3) Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, yang telah dalam proses pembahasan di tingkat inisiator (DPRD Kabupaten Bantul) dan telah menjadi program pembentukan peraturan daerah Triwulan I Tahun 2023.
- 4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2022 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah.

Selain itu komitmen pencapaian status Kabupaten Layak Anak dilakukan dengan penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat melalui pelatihan Konvensi Hak Anak kepada tenaga pendidik, aparatur pemerintah di semua OPD dan Kapanewon, Penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan Konvensi Hak Anak dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada 21 Kalurahan.

Pada Kluster Hak Sipil dan Kebebasan, dilakukan penguatan pelembagaan partisipasi anak melalui pelibatan forum anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan, baik di tingkat Kalurahan, Kapanewon maupun Kabupaten, pengukuhan kepengurusan forum anak di tingkat Kalurahan dan Kapanewon, dan penguatan kapasitas forum anak melalui pelatihan Konvensi Hak Anak, Latihan Dasar Kepemimpinan dan Pelatihan Pelopor dan Pelapor. Selain itu, peningkatan informasi layak anak dilakukan melalui optimalisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), kampanye literasi melalui penguatan peran “Bunda Literasi” ke sekolah-sekolah, serta perpustakaan keliling.

Pada Kluster Lingkungan Keluarga dan pengasuhan Alternatif, dilakukan dengan layanan *one stop services* pada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), pencegahan pernikahan usia anak melalui sekolah, masyarakat dan dunia usaha, penyediaan fasilitas ruang bermain/ ruang terbuka hijau ramah anak serta pengembangan PAUD Holistik Integratif melalui Bina Keluarga Balita di semua Kalurahan.

Pada Kluster Kesehatan Dasar dan Kesehatan, melalui penetapan Pelayanan Ramah Anak pada Puskesmas dari 17 menjadi 27 Puskesmas

pada tahun 2022, percepatan penurunan stunting, penerapan dan penetapan kawasan tanpa rokok pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, kantor pemerintah, tempat wisata, tempat ibadah dan tempat umum lainnya, serta monitoring dan evaluasi Sekolah Ramah Anak, fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana dan fasilitasi pembentukan sekolah Bebas Narkoba (Bersinar) di wilayah Kecamatan Bersinar.

Pada Kluster Perlindungan Khusus Anak, dilakukan melalui penerapan kebijakan *restorative justice* bagi anak berhadapan dengan hukum, pencegahan pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak pada perusahaan dan pemantauan melalui pemerintah Kalurahan.

Pencapaian status Kabupaten Layak Anak melalui dukungan Kapanewon dan Kalurahan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi Kapanewon dan Kalurahan secara berkala.

#### g. Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang terjadi di bawah batas usia minimal yaitu batas usia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun undang-undang memberlakukan usia minimum pernikahan adalah 19 tahun, namun pada praktiknya perkawinan di bawah umur cenderung meningkat.

**Tabel 2.132 Kasus Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Kasus Perkawinan di Bawah Umur	125	246	163	147	123

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Bantul, 2023

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur cenderung menurun pada kurun waktu tahun 2020-2023. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur diantaranya kurangnya perhatian orangtua dan pengawasan lingkungan terhadap

anak. Pengaruh perkembangan zaman dengan adanya dunia maya (internet) yang terbuka, Pergaulan, perceraian orang tua, *broken home*, Pola asuh dalam keluarga kurang baik, faktor Pendidikan orang tua yang masih kurang.

### 2.1.3.2.3 Pangan

#### a. Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah PPH dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Skor PPH semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin beragam dan mengindikasikan kualitas pola konsumsi pangan sudah menerapkan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) beragam diantara 9 kelompok pangan utama.

**Tabel 2.133 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan					Skor Maks
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Padi-padian	25,0	25,0	24,8	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	1,3	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5
3	Pangan hewani	24,0	22,4	23,0	24,0	24,0	24,0
4	Minyak dan lemak	1,8	1,2	1,2	0,2	0,0	5,0
5	Buah/biji berlemak	1,0	0,5	0,2	0,1	0,1	1,0
6	Kacang-kacangan	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7	Gula	0,6	0,3	0,3	0,3	0,6	2,5
8	Sayur dan buah	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total</b>		<b>93,7</b>	<b>91,4</b>	<b>91,5</b>	<b>92,1</b>	<b>92,2</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2024

Hasil perhitungan analisis PPH tahun 2022 sebesar 92,2. Skor tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 92,1. Angka ini mengindikasikan kualitas konsumsi pangan masyarakat Bantul meningkat. Hal ini karena telah meningkatnya ketersediaan bahan pangan keluarga yang beragam, berimbang dan kecukupan gizi yang diperoleh dari hasil pemanfaatan pekarangan sehingga tidak harus membeli dari pasar.



### b. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 dan Rekomendasi dari Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2012, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia yaitu energi sebesar 2.150 kal/kap/hr dan protein sebesar 57 gr/kap/hr pada tingkat konsumsi.

**Tabel 2.134 Ketersediaan Energi dan Protein untuk dikonsumsi Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Tahun	Energi (kal/kap/hr)	Tingkat Ketersediaan Energi (%)	Protein (gram/kap/hr)		
			Nabati	Hewani	Total
2019	3.123	130,13	75,10	14,86	89,95
2020	3.092	100,00	71,28	11,62	82,90
2021	3.112	129,67	74,56	9,52	84,08
2022	3.114	129,75	74,50	28,80	101,30
2023	3.115	129,79	68,41	25,75	94,16

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Bantul sudah di atas rata-rata kecukupan energi dan protein penduduk Indonesia. Pada tahun 2023 ketersediaan energi mencapai 3.115 kal/kap/hr atau 29,75% di atas standar nasional. Ketersediaan protein mencapai 94,16 gram/kap/hr. Secara kuantitas ketersediaan energi dan protein sudah terpenuhi, namun secara kualitas masih perlu peningkatan ketersediaan terhadap kelompok bahan pangan hewan.

### c. Penguatan Cadangan Pangan

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu (1) produksi dalam negeri; (2) pasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan.

Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan

dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu, sehingga diharapkan tidak terjadi lonjakan harga pangan pokok. Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang mencakup pangan tertentu yang bersifat pangan pokok. Cadangan pangan masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga, termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga.

**Tabel 2.135 Cadangan Pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cadangan Pangan Pemerintah (ton)	5,036	5,036	5,036	15,036	38,861
2	Cadangan Pangan Masyarakat (ton)	8,41	-	13,70	30,20	20
3	Lumbung Pangan Masyarakat (unit)	27	27	28	29	31
4	Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) (unit)	18	18	18	18	18

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, 2024

Cadangan pangan pemerintah daerah dikelola oleh Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Koperasi Beras Sehat Makmur Wijirejo Pandak.

Sejak tahun 2009 di Kabupaten Bantul telah berkembang kelompok-kelompok lumbung pangan baik kelompok yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah maupun kelompok-kelompok lumbung swadaya. Sampai dengan tahun 2031 ada 31 kelompok lumbung yang aktif.

Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras) dihitung dari jumlah cadangan pangan dibagi jumlah kebutuhan pangan. Jumlah cadangan pangan terdiri dari jumlah cadangan pangan pemerintah serta jumlah cadangan pangan masyarakat yang terdiri dari stok pangan di lumbung pangan masyarakat dan 10% jumlah produksi beras. Sedangkan jumlah kebutuhan pangan terdiri dari kebutuhan per kapita dikalikan jumlah penduduk.

#### **d. Desa Mandiri Pangan (Demapan)**

Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui

pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.

Pada tahun 2023, terdapat 21 Desa Mandiri Pangan (Demapan), 1 Desa Pengembangan dan 1 Desa Penumbuhan di Kabupaten Bantul yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.136 Pengembangan Desa Mandiri Pangan**

No	Tahun	Desa	Tahapan
1	2006	Kalurahan Muntuk, Dlingo	Exit Program
2	2006	Kalurahan Selopamioro, Imogiri	Exit Program
3	2007	Kalurahan Wukirsari, Imogiri	Exit Program
4	2007	Kalurahan Jatimulyo, Dlingo	Exit Program
5	2008	Kalurahan Seloharjo, Pundong	Exit Program
6	2009	Kalurahan Srihardono, Pundong	Exit Program
7	2010	Kalurahan Temuwuh, Dlingo	Exit Program
8	2010	Kalurahan Dlingo, Dlingo	Exit Program
9	2010	Kalurahan Mangunan, Dlingo	Exit Program
10	2011	Kalurahan Argodadi, Sedayu	Exit Program
11	2011	Kalurahan Sriharjo, Imogiri	Exit Program
12	2011	Kalurahan Girirejo, Imogiri	Exit Program
13	2011	Kalurahan Karangtengah, Imogiri	Exit Program
14	2012	Kalurahan Triwidadi Pajangan	Exit Program
15	2012	Kalurahan Bangunjiwo, Kasihan	Exit Program
16	2012	Kalurahan Bawuran, Pleret	Exit Program
17	2012	Kalurahan Segoroyoso, Pleret	Exit Program
18	2012	Kalurahan Wonolelo, Pleret	Exit Program
19	2013	Kalurahan Tamantirto, Kasihan	Exit Program
20	2013	Kalurahan Jagalan, Banguntapan	Exit Program
21	2014	Kalurahan Argorejo, Sedayu	Exit Program
22	2021	Kalurahan Trimurti, Srandakan	Tahap Pengembangan
23	2021	Kalurahan Guwosari, Pajangan	Tahap Penumbuhan

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, 2023

#### **e. Kerawanan Pangan dan Kerentanan Pangan**

Pengukuran Kerentanan Pangan dan Kerawanan Pangan adalah sebagai berikut:

##### 1) Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Penyusunan Peta Desa Rawan Pangan dan Gizi berdasarkan pada 3 indikator yaitu:

- a) Ketersediaan Pangan dipengaruhi oleh Produksi, Jumlah Penduduk, dan Cadangan Pangan;
- b) Akses Pangan diperoleh dari jumlah keluarga prasejahtera;

- c) Pemanfaatan Pangan diperoleh dari data kekurangan energi protein (KEP).

Berdasarkan hasil analisis dan kajian kerawanan pangan/Situasi Pangan dan Gizi tahun 2023 di 75 kalurahan dan 17 kapanewon se Kabupaten Bantul, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Analisis Komposit Ketahanan Pangan (Tahunan), situasi Pangan dan Gizi di Kabupaten Bantul untuk tingkat kapanewon, semua kapanewon memiliki indek ketahanan pangan 1 atau aman (wama hijau). Untuk tingkat kalurahan ada 4 kalurahan yaitu Seloharjo, Ringinharjo, Imogiri, dan Jagalan yang memiliki Indek Ketahanan Pangan 2 atau waspada (wama kuning), sedangkan 71 kalurahan lainnya memiliki Indek Ketahanan Pangan (tahunan) 1 atau Aman (warna hijau).
2. Aspek Ketersediaan Pangan, ada 3 kapanewon yaitu, Banguntapan, Kasihan dan Pajangan yang memiliki skor 2 atau resiko pangan dan gizi waspada (warna kuning), sedangkan 14 kapanewon lainnya memiliki skor 1 atau resiko pangan dan gizi aman (warna hijau). Untuk tingkat kalurahan ada 30 kalurahan yang memiliki skor 2 atau resiko pangan dan gizi waspada (warna kuning) yaitu kalurahan Trimurti, Parangtritis, Seloharjo, Ringinharjo, Bantul, Karangtengah, Girirejo, Imogiri, Wukirsari, Wonolelo, Srimartani, Banguntapan, Tamanan, Jagalan, Singosaren, Wirokerten, Baturetno, Banguntapan, Bangunharjo, Panggungharjo, Kasihan, Bangunjiwo, Tirtonirmolo, Tamantirto, Ngestiharjo, Pajangan, Triwidadi, Sendangsari, Guwosari, Argorejo. Sedangkan 45 kalurahan lainnya memiliki skor 1 atau resiko pangan dan gizi aman (warna hijau).
3. Aspek Akses Pangan, dari 17 kapanewon, semua kapanewon memiliki skor 1 atau resiko pangan dan gizi aman (warna hijau). Dilihat dari tingkat kalurahan ada 1 kalurahan yang memiliki skor 2 atau waspada (warna kuning) yaitu Seloharjo dan 74 kalurahan yang memiliki skor 1 atau aman (warna hijau).

4. Aspek Pemanfaatan Pangan, 17 kapanewon semuanya memiliki skor 1 atau resiko pangan dan gizi aman (warna hijau), dan dari 75 kalurahan ada 12 kalurahan memiliki skor 2 atau resiko pangan dan gizi waspada (warna kuning) yaitu Gadingsari, Donotirto, Tirtosari, Ringinharjo, Patalan, Selopamioro, Sriharjo, Karangtalun, Imogiri, Wonokromo, Jagalan, Timbulharjo dan 63 kalurahan memiliki skor 1 atau aman (warna hijau).
  5. Penyebab adanya kondisi waspada (warna kuning) dari semua aspek yaitu, ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan sumber karbohidrat menurun, disebabkan penurunan produksi pangan sumber karbohidrat karena beralih ke komoditas hortikultura (bawang merah dan cabai). Untuk itu kalurahan yang memiliki skor 2 (waspada) perlu mendapatkan perhatian dan pemantauan yang serius dari Dinas/Instansi terkait melalui program/kegiatan yang dapat meningkatkan ketersediaan dan akses pangan serta pemanfaatan pangan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi rentan pangan, harapannya dari skor 2 atau waspada menjadi skor 1 atau aman (wama hijau).
- 2) Analisis *Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA)*/ Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
- Penyusunan Peta FSVA disusun berdasarkan pada indikator sebagai berikut:
- a) Aspek Ketersediaan Pangan
    - 1) Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah Kalurahan;
    - 2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga.
  - b) Aspek Akses terhadap Pangan
    - 1) Rasio jumlah penduduk dengan kesejahteraan rendah pada desil I dibanding dengan jumlah penduduk kalurahan;
    - 2) Kalurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air dan udara.

c) Aspek Pemanfaatan Pangan

- 1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga kalurahan;
- 2) Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kalurahan.

Kalurahan pada prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah.

Berdasarkan Peta FSVA Kabupaten Bantul tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.137 Desa Rentan Pangan Berdasarkan Peta FSVA di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Desa Rentan Pangan	2019		2020		2021		2022		2023	
		Jumlah	Kalurahan	Jumlah	Kalurahan	Jumlah	Kalurahan	Jumlah	Kalurahan	Jumlah	Kalurahan
1	Prioritas 1	5	Selopamioro, Muntuk, Jatimulyo, Sendangsari Triwidadi	5	Selopamioro, Muntuk, Jatimulyo, Sendangsari, Triwidadi.	3	Jatimulyo, Sendangsari Triwidadi	1	Jatimulyo	0	-
2	Prioritas 2	2	Mangunan Dlingo	1	Dlingo	3	Selopamioro, Muntuk Dlingo	1	Dlingo	1	Jatimulyo
3	Prioritas 3	9	Seloharjo, Gilangharjo, Wukirsari, Temuwuh, Segoroyoso, Bawuran, Wonolelo, Bangunharjo, Argodadi	12	Seloharjo, Triharjo, Sriharjo, Girirejo, Wukirsari, Mangunan, Temuwuh, Bawuran, Wonolelo, Bangunjiwo, Guwosari Argodadi.	5	Poncosari, Seloharjo, Triharjo, Wonolelo, Argodadi	5	Seloharjo, Kebonagung, Girirejo, Wonolelo dan Jagalan	0	-
<b>Total</b>		<b>16</b>		<b>18</b>		<b>11</b>		<b>7</b>		<b>1</b>	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kalurahan pada prioritas 1 (tingkat rentan pangan tinggi) menurun dari tahun 2019 s.d. 2023 sehingga pada tahun 2023 tidak ada kalurahan masuk prioritas 1, dan pada Tahun 2023 tinggal 1 kalurahan saja yang masuk prioritas 2. Sedangkan pada rentan pangan rendah (prioritas 3) tidak terdapat kalurahan yang masuk kriteria tersebut.

**2.1.3.2.4 Pertanahan**

**a. Luas Lahan Bersertifikat**

Luas wilayah kerja dan kepemilikan hak atas tanah di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.138 Luas Wilayah Kerja dan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022**

Tahun	Kepemilikan Tanah Terdaftar (Bersertifikat)			Kepemilikan Tanah belum Terdaftar		Kepemilikan Tanah Total	
	Jumlah bidang	Luas (m <sup>2</sup> )	Persentase Luas	Luas (m <sup>2</sup> )	Persentase Luas	Luas (m <sup>2</sup> )	Persentase Luas
2018	587.300	343.736.990	67,81	163.113.010	32,19	506.850.000	100
2019	639.312	371.041.984	73,19	135.808.016	26,81	506.850.000	100
2020	664.139	378.533.558	74,65	128.316.442	25,35	506.850.000	100
2021	678.521	387.339.670	76,42	119.510.330	23,58	506.850.000	100
2022	687.446	390.974.077	77,14	115.875.923	22,86	506.850.000	100

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, 2023

Pada tahun 2022 luas kepemilikan tanah yang terdaftar sebesar 77,14% naik 0,72% dari tahun 2021 dengan luas tanah belum terdaftar 115.875.923m<sup>2</sup>. Dalam proses pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum di Kabupaten Bantul selalu memerlukan tanah sebagai lokasi pembangunan. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada awalnya hanya berfokus pada proses pembebasan tanahnya, sehingga kemudian diperlukan kegiatan lanjutan untuk memproses pendaftaran sertifikasi bidang tanah yang telah dilakukan pembebasan atas hak tersebut di Badan Pertanahan Nasional untuk kemudian menjadi aset atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pendaftaran tanah milik Pemerintah Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.139 Pendaftaran Tanah Pemerintah (bidang) 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pendaftaran Tanah Pemerintah	16	1	7	2	10

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, 2024

Secara umum kendala yang dihadapi saat proses pendaftaran dan pemberkasan bidang tanah milik Pemda Kabupaten Bantul adalah persyaratan dokumen pengadaan yang tidak dapat dilengkapi karena riwayat pengadaan sulit ditelusuri kembali.

Terkait dengan kepemilikan tanah, pada masa lalu banyak terjadi proses tukar menukar tanah desa dengan tanah warga yang dilaksanakan untuk menunjang pembangunan fasilitas kepentingan umum. Pada saat ini kedua belah pihak secara fisik sudah menguasai dan mengolah tanah masing-masing bahkan sudah sampai pada ahli waris yang bertingkat dan bahkan sudah ada yang dijual dan atau berpindah hak. Kondisi ini tentu saja akan merugikan bagi masyarakat pemilik tanah maupun pemerintah kalurahan. Pada saat ini pemerintah kalurahan dan masyarakat pemilik tanah mempunyai keinginan untuk memiliki secara utuh sesuai dengan aturan dan alas hak yang tetap yaitu sertifikat sehingga masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum. Sebagai langkah untuk penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga yang digunakan untuk kepentingan umum, maka perlu dilakukan identifikasi permasalahan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga yang selanjutnya untuk diproses tukar menukarnya secara administrasi pertanahan sehingga masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum.

**Tabel 2.140 Permasalahan Tanah di Kabupaten Bantul Tahun 2019 – 2023**

No	Tahun	Masalah	Lokasi	Jumlah
1	2019	Tukar guling tanah (14 Kasus)	Kalurahan Sitimulyo	1
			Kalurahan Bangunharjo	1
			Kalurahan Triwidadi	1
			Kalurahan Argomulyo	1
			Kalurahan Tamantirto	1
			Kalurahan Srimulyo	1
			Kalurahan Bantul	1
			Kalurahan Sumberagung	1
			Kalurahan Sriharjo	5
			Kalurahan Tirtonirmolo	1
2	2020	Tukar guling tanah (18 kasus)	Kalurahan Murtigading	1
			Kalurahan Sumberagung	1
			Kalurahan Canden	1
			Kalurahan Tirtohargo	2
			Kalurahan Poncosari	1
			Kalurahan Terong	1



No	Tahun	Masalah	Lokasi	Jumlah
			Kalurahan Pleret	1
			Kalurahan Mangunan	1
			Kalurahan Srigading	1
			Kalurahan Tamantirto	1
			Kalurahan Patalan	1
			Kalurahan Segoroyoso	1
			Kalurahan Tirtonirmolo	1
			Kalurahan Argomulyo	1
			Kalurahan Temuwuh	1
			Kalurahan Bawuran	1
			Kalurahan Timbulharjo	1
			3	2021
Kalurahan Tirtosari	4			
Kalurahan Tirtomulyo	6			
Kalurahan Tirtonirmolo	1			
Kalurahan Parangtritis	1			
Kalurahan Sitimulyo	2			
Kalurahan Bantul	7			
Kalurahan Srihardono	7			
Kalurahan Trimulyo	3			
Kalurahan Gilangharjo	1			
Kalurahan Sumberagung	3			
Klarifikasi kepemilikan tanah (25 kasus)	Kalurahan Segoroyoso	23		
	Kalurahan Banguntapan	1		
4	2022	Tukar menukar tanah (19 kasus)	Kalurahan Tirtosari, Kretek	4
			Kalurahan Tirtomulyo, Kretek	6
			Kalurahan Srihardono, Pundong	7
			Kalurahan Gilangharjo, Pandak	1
			Kalurahan Tamantirto, Kasihan	1
5	2023	Tukar menukar tanah (8 kasus)	Kalurahan Trirenggo, Bantul	1
			Kalurahan Srihardono, Pundong	2
			Kalurahan Tirtonirmolo, Kasihan	1
			Kalurahan Selopamioro, Imogiri	3
			Kalurahan Sriharjo, Imogiri	1

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, 2024

Pada tahun 2023 permasalahan tanah menurun dari tahun 2022 sebanyak 19 kasus menjadi 8 kasus. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat Bantul pada umumnya tentang status hukum kepemilikan bidang tanah.

#### **b. Penyelesaian Izin Lokasi dan KKPR**

Perizinan terkait pemanfaatan ruang berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul yaitu persetujuan prinsip, kesesuaian aspek tata ruang, Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT), perizinan klarifikasi/perizinan lokasi, perizinan mendirikan bangunan, perizinan gangguan, dan perizinan teknis operasional. Perizinan lokasi di

peruntukan untuk izin pemanfaatan ruang dengan luasan lahan di atas satu hektar.

**Tabel 2.141 Persentase Jumlah Izin Lokasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2020**

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Jumlah Permohonan Izin Lokasi	6	7	10
2	Jumlah Izin Lokasi	4	6	8
3	Persentase (%)	66,67	85,71	80,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, 2024

Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2021 tentang Izin Lokasi dan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 18), maka dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, diberikan dalam bentuk Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), dengan mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 Pasal 97 terdiri atas:

- Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha yang penyelenggaraan pengurusannya melalui Aplikasi *Online Single Submission* (*oss.go.id*)
- Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha yang penyelenggaraan pengurusannya melalui Aplikasi *izinonline.bantulkab.go.id* dan

- Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

**Tabel 2.142 Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bantul melalui *izinonline.bantulkab.go.id* Tahun 2021-2023**

No	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah Permohonan PKKPR <b>Non Berusaha</b>	882	735	840
2	Jumlah PKKPR <b>Non Berusaha</b> yang terbit	258	724	197
3	Persentase (%)	29,25	98,50	23,45

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, 2024

Jumlah PKKPR Berusaha yang terbit di Bantul pada tahun 2021 tidak tersedia data, sedangkan yang terbit tahun 2022 sebanyak 402 dan tahun 2023 sebanyak 11, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.143 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bantul melalui *oss.go.id* Tahun 2021-2023**

No	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah PKKPR <b>Berusaha</b> yang terbit	n/a	402	11

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, 2024

### 2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

#### a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan. Dasar hukum yang mengatur IKLH didasarkan pada PermenLHK No. 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Dalam melakukan penghitungan untuk mendapatkan nilai IKLH, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan secara langsung maupun tidak langsung. Pemantauan secara langsung dilakukan untuk

mendapatkan data primer IKA dan IKU, sementara untuk IKTL dilakukan penghitungan menggunakan data sekunder.

IKLH terdiri dari 3 indikator: Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, parameter yang diukur yaitu TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform (mengacu Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air); Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30%, parameter yang diukur yaitu: SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>; dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan bobot 40%, yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan.

### 1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Nilai IKA didapatkan dari pengukuran parameter kualitas air sungai yang mengalir di Kabupaten Bantul. Sampel air berjumlah 15 sampel dari 15 titik pengambilan, yaitu mewakili hulu, tengah, hilir pada 2 (dua) periode (penghujan dan kemarau). Pemantauan kualitas air sungai berdasarkan beberapa parameter, antara lain: derajat keasaman (pH), kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi (TSS), oksigen terlarut (DO), nitrat (NO<sub>3</sub>-N), total fosfat dan fecal coliform. Selanjutnya dianalisa dan dihitung untuk mengetahui kondisi kualitas air di masing masing sungai. Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 5 (lima) sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Bantul, yaitu Winongo, Oyo, Bedog, Opak dan Gajahwong.

Hasil capaian IKA Kabupaten Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.144 Indeks Kualitas Air Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Target Kabupaten	45,00	50,00	56,00	40	40.5
Realisasi	39,63	51,80	56,00	36.67	39.83

Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2024

Keterangan :

Sangat baik ( $90 \leq IKA \leq 100$ )

Baik ( $70 \leq \text{IKA} < 90$ )  
Sedang ( $50 \leq \text{IKA} < 70$ )  
Kurang ( $25 \leq \text{IKA} < 50$ )  
Sangat Kurang ( $0 \leq \text{IKA} < 25$ )

Hasil capaian IKA Kabupaten Tahun 2023 sebesar 39,83 atau termasuk kategori kurang, meningkat dibandingkan capaian IKA tahun 2022 sebesar 36,67. Target IKA Kabupaten Bantul diharapkan terus bertambah sehingga kualitas air dapat terjaga. Namun pada kenyatannya pada tahun 2023 realisasi terhadap target tidak dapat terpenuhi karena pada saat dilakukan sampling pola perilaku masyarakat dalam membuang sampah maupun limbah domestik ke sungai masih cukup tinggi. Secara visual pada saat pemantauan terlihat warna air keruh.

Faktor konsentrasi Fecal Coliform yang tinggi yang menyebabkan kategori Indeks Pencemaran menjadi Cemar Berat. Konsentrasi Fecal Coliform tertinggi terjadi di Sungai Winongo, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan yaitu sebesar 920.000 MPN/100 mL. Dari seluruh pemantauan tersebut, jika konsentrasi Fecal Coliform mencapai 430.000 MPN/100 mL atau lebih, maka dapat dipastikan masuk dalam kategori Cemar Berat.

Sumber pencemaran bakteri koliform bersumber dari buangan limbah rumah tangga, buangan septictank, cemaran kotoran hewan ternak dan pupuk. Diperlukan keterlibatan antar OPD dalam hal pengawasan terhadap pelaku usaha memiliki pengaruh besar terhadap tercapainya target IKA. Pengawasan terhadap limbah domestik yang masuk ke badan sungai, perijinan dari pelaku usaha memberikan pengaruh besar terhadap IKA dengan pemenuhan baku mutu air limbah pada dokumen lingkungan tersebut. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga diatur dalam dokumen perijinan sehingga kualitas air limbah yang dibuang ke badan air telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

## **2) Indeks Kualitas Udara**

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai

komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Pemantauan udara ambien dilakukan di 4 (empat) titik pantau/lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Bantul, pada lokasi-lokasi yang mewakili daerah padat transportasi, daerah atau kawasan industri, pemukiman padat penduduk dan kawasan perkantoran. Parameter pemantauannya, yaitu Sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>) dan Nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>). Kategori IKU mengacu Permen LHK nomor 27/2021.

Hasil capaian IKU Kabupaten Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.145 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Target Kabupaten	87,73	80,00	90,00	87	87.5
Realisasi	85,25	85,18	83,27	86.34	88.16

Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2024

Keterangan :

Sangat baik ( $90 \leq \text{IKU} \leq 100$ )

Baik ( $70 \leq \text{IKU} < 90$ )

Sedang ( $50 \leq \text{IKU} < 70$ )

Kurang ( $25 \leq \text{IKU} < 50$ )

Sangat Kurang ( $0 \leq \text{IKU} < 25$ )

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa nilai IKU di Kabupaten Bantul mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2023 yang berarti meningkatnya kualitas udara di Bantul. IKU tahun 2023 juga melebihi dari target Kabupaten sebesar 87.5. Indeks Kualitas Udara sebesar 88.16 termasuk dalam kategori baik, yang berarti kualitas udara di Kabupaten masih dalam kategori baik.

### 3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang merupakan salah satu komponen dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan untuk mewakili isu hijau dalam penilaian kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup. IKL

saat ini sama dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) untuk provinsi yang tidak memiliki lahan gambut. Sementara IKL untuk provinsi yang memiliki lahan gambut nilai IKL adalah nilai IKTL yang telah dikoreksi dengan faktor dampak kebakaran dan kanal pada lahan gambut (DKK) Luas Tutupan Lahan (LTL) dihitung dari penjumlahan :

- Hutan Lindung;
- Hutan Rakyat;
- Ruang Terbuka Hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati. Rehabilitasi hutan dan lahan. Upaya untuk meningkatkan luas tutupan lahan dilakukan secara intensif melalui penanaman pohon dengan sasaran pada hutan, lahan kritis, sempadan sungai, jalur selatan, kawasan mangrove dan area bekas tambang dan pembangunan RTH.

Pada tahun 2023 terdapat komponen luas tutupan lahan baru sesuai dengan PermenPU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan.

Hasil capaian IKTL Kabupaten Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.146 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Target Kabupaten	58,18	52,93	61,20	57	59
Realisasi	58,20	54,82	55,21	57,42	59.34

Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2024

Keterangan :

Sangat baik ( $90 \leq IKU \leq 100$ )

Baik ( $70 \leq IKU < 90$ )

Sedang ( $50 \leq IKU < 70$ )

Kurang ( $25 \leq IKU < 50$ )

Sangat Kurang ( $0 \leq IKU < 25$ )

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 sampai 2023 realisasi nilai IKTL terhadap target RPJMD Kabupaten dapat tercapai. Indeks Kualitas Tutupan Lahan dipengaruhi oleh :

- Kecukupan luas (kawasan hutan dan) penutupan hutan pada daerah aliran sungai dan/ atau pulau sesuai kondisi eksisting.

- Kemampuan dan kesesuaian lahan pada karakteristik lahan tertentu yang membutuhkan Tutupan Lahan berupa pepohonan, seperti pada sempadan sungai, pantai dan sekitar danau/waduk, lahan kemiringan lereng >25% (lebih dari dua puluh lima persen).
- Berkaitan dengan arahan penggunaan lahan di wilayah perkotaan, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) peruntukan lahannya berupa ruang terbuka hijau.
- Penggunaan data citra satelit Landsat dalam analisis Tutupan Lahan, terdapat keterbatasan khususnya pada wilayah perkotaan sehingga diperlukan pendetailan data untuk pelaksanaan pemantauan kondisi ruang terbuka hijau dan rehabilitasi hutan dan lahan.

Berdasarkan data dan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), maka dapat dihitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sesuai PermenLHK No. 27 Tahun 2021 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.147 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2019-2023**

No	Indeks Kualitas	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	39,63	51,80	56	36,67	39,83
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,9	85,18	83,28	86,34	88,16
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	53,09	54,82	55,21	64,34	59,34
<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>		<b>60,40</b>	<b>63,02</b>	<b>66,87</b>	<b>62,84</b>	<b>63,68</b>

Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2024

Keterangan :

Sangat baik ( $90 \leq \text{IKLH} \leq 100$ )

Baik ( $70 \leq \text{IKLH} < 90$ )

Sedang ( $50 \leq \text{IKLH} < 70$ )

Kurang ( $25 \leq \text{IKLH} < 50$ )

Sangat Kurang ( $0 \leq \text{IKLH} < 25$ )

Capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bantul tahun 2023 sebesar 63,68 meningkat dari tahun 2022, namun masih masuk kategori sedang.



## **b. Izin Lingkungan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup**

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Mulai tahun 2019 Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa izin lingkungan hanya untuk kantor pemerintah, sekolah, pasar dan tambang pasir. Sedangkan Izin untuk badan usaha maupun perorangan diterbitkan melalui *Online Single Submission* (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk dan atas nama Bupati Bantul yaitu Dinas Perijinan dan Penanaman Modal. Sejak *launching Online Single Submission Risk Based Assessment* (OSS RBA) pada tanggal 9 Agustus 2021 penapisan dokumen lingkungan telah dilakukan secara otomatis oleh sistem OSS. Adapun verifikasi dokumen lingkungan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam PP Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, izin PPLH berubah menjadi persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah, pemenuhan baku mutu emisi dan rincian teknis limbah B3. Izin lingkungan berubah menjadi persetujuan lingkungan dan persetujuan pemerintah untuk kegiatan yang dilaksanakan pemerintah.

**Tabel 2.148 Dokumen Persetujuan Teknis Tahun 2022-2023**

No	Uraian	2022	2023
1	Surat Permohonan Persetujuan Teknis	12	11
2	Surat Persetujuan Diterbitkan	7	2
3	Dalam Proses Penilaian Subtansi	5	9

Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2024

Adapun jumlah persetujuan dokumen rincian teknis LB3 dan Berita Acara Penerimaan Berkas Pengelolaan Limbah B3 tahun 2022-2023, ditampilkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.149 Dokumen Rincian Teknis LB3 dan Berita Acara Penerimaan Berkas Pengelolaan LB3 Tahun 2022-2023**

No	Uraian	2022	2023
1	Surat Permohonan Persetujuan Teknis	34	36
2	Surat Persetujuan Teknis LB3	7	9
3	Surat Rincian Teknis LB3	22	25

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, 2024

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 jumlah permohonan persetujuan yang diterima sebanyak 36. Dari 36 permohonan terbit 29 persetujuan yang terdiri atas 2 persetujuan teknis dan 25 rincian teknis limbah B3.

Untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah serta peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan kegiatan pengawasan, sesuai pasal 496 PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengawasan dilakukan dengan cara pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Pengawasan langsung dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau kegiatan secara regular dan insidental. Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dalam hal hasil pengawasan tidak langsung menunjukkan pelanggaran yang berulang atau mengindikasikan ancaman yang serius terhadap lingkungan hidup selanjutnya dilakukan pengawasan langsung.

**Tabel 2.150 Hasil Pengawasan terhadap Ketentuan Izin Lingkungan Tahun 2019-2023**

Pengawasan	2019	2020	2021	2022	2023
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang	24	19	24	24	30

<b>Pengawasan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
dilakukan pengawasan langsung					
Hasil pengawasan (Kegiatan yang taat)	13	12	11	4	5

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2024

Pada tahun 2023, dari 30 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan langsung, hasil pengawasan menunjukkan bahwa terdapat 5 atau 16,67 persen usaha yang memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku. Penyebab utama ketidaktaatan usaha/kegiatan di Kabupaten Bantul adalah pelaku usaha belum melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan dalam izin lingkungan/persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan, seperti air limbah belum seluruhnya memenuhi baku mutu; perubahan kegiatan yang mengakibatkan perubahan persetujuan lingkungan namun tidak dilaksanakan; dan belum melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkan sesuai peraturan yang berlaku.

Tingkat penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diharapkan setiap tahun semakin meningkat dan diharapkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah taat dapat mempertahankan pengelolaan lingkungannya. laporan yang masuk dievaluasi, kemudian data dimasukkan aplikasi sebagai bahan untuk evaluasi perusahaan dan evaluasi bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam merencanakan pengawasan lanjutan. Beberapa kasus setelah diverifikasi dan ditemukan terjadi pelanggaran peraturan daerah akan ditindaklanjuti oleh Satpol PP Kabupaten Bantul.

**Tabel 2.151 Pokok Aduan Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Tahun 2019-2023**

<b>Pokok Aduan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Gangguan Kebisingan dan Pencemaran Udara	11	28	28	18	26
Pencemaran Air dan Pencemaran akibat Limbah Cair	27	5	9	6	8
Pencemaran akibat Sampah dan Limbah Padat	-	-	-	-	1
Kerusakan lingkungan	0	0	2	0	0
Total	38	33	39	24	28*)

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2024

*Keterangan:*

*\*) Terdapat lebih dari 1 pokok aduan dalam 1 aduan*

### **c. Penanganan Sampah**

Pelaksanaan pengelolaan sampah Kabupaten Bantul diatur melalui Peraturan Bupati nomor 156 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: arah kebijakan, strategi, program, target pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Bantul. Kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ini wajib dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi. Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga diukur dengan indikator : besaran penurunan jumlah timbulan, besaran peningkatan jumlah Sampah dan besaran peningkatan jumlah Sampah termanfaatkan kembali di Sumber Sampah. Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga diukur dengan indikator: besaran peningkatan jumlah Sampah yang terpilah di Sumber Sampah; besaran penurunan jumlah Sampah yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir; besaran peningkatan jumlah sampah diangkut ke pusat pengolahan untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi; besaran peningkatan jumlah yang terolah menjadi bahan baku; besaran peningkatan jumlah yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan besaran penurunan jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir. Hasil pemantauan tersebut disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.

Sejak akhir November 2022 sel sampah TPAS Regional Piyungan eksisting telah ditutup. Sampah rumah tangga yang berasal dari kabupaten dan kota sementara dibuang di TPA Sampah Transisi, namun kapasitasnya sangat terbatas. Kabupaten Bantul telah melakukan proses pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yaitu TPST

Modalan dan ITF Niten.

Neraca pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul tahun 2023 menunjukkan bahwa potensi timbulan sampah 162.715,10 ton/tahun, jumlah sampah yang dikelola sebesar 104.032,38 ton/tahun (63,94%) dan jumlah sampah yang tidak terkelola sebesar 58.682,73 ton/tahun (36,06%) dengan capaian pengurangan sampah 25,74%% (41.882,71 ton/tahun; sedangkan untuk penanganan sampah tercapai 38,20% (62.149,66 ton/tahun). Analisis survei potensi timbulan sampah Kabupaten Bantul tahun 2023, dengan melakukan survei timbulan sampah sesuai SNI 19-3964-1994 didapatkan hasil potensi timbulan sampah sebesar 0,44 kg/orang/hari atau 1,63 liter/orang perhari.

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat Kabupaten Bantul menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Melalui program Bantul Bersama (Bantul Bersih Sampah 2025) Dinas Lingkungan Hidup berupaya untuk mengatasi permasalahan persampahan di wilayah kabupaten bantul dengan melibatkan *stakeholder* baik lingkup Instansi, Perguruan Tinggi maupun lembaga kemasyarakatan dengan upaya dan langkah:

- 1) Membangkitkan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- 2) Peningkatan peran dan kapasitas Kelompok Pengelola Sampah (BUMKal, TPS 3R dan Pelanggan Sampah).
- 3) Penyusunan dan Penetapan regulasi operasional terkait pengelolaan sampah.
- 4) Pembangunan fasilitas dan sarana prasarana pengelolaan sampah (Pembangunan *Intermediate Treatment Facility* (ITF)).

**Tabel 2.152 Pengelolaan Sampah Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	m <sup>3</sup> /th	m <sup>3</sup> /th	m <sup>3</sup> /th	ton/th	ton/th
Total sampah yang terkelola (a)	452.185,43	460.032,00	482.854,64	101.934,26	104.032,38

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	m <sup>3</sup> /th	m <sup>3</sup> /th	m <sup>3</sup> /th	ton/th	ton/th
Volume timbulan sampah (b)	608.731,64	752.154,00	775.148,22	160.382,71	162.715,10
Volume Sampah yang tertangani (a/b)x100%	74,28%	61,16%	62,29%	63,56%	63,94%

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2024

Pada tahun 2023 volume sampah yang dapat terkelola sebesar 104.032,38 m<sup>3</sup>, atau 63,94% sampah tertangani. Hal ini mengalami peningkatan dari Tahun 2022 dengan sampah tertangani 63,56%.

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk.

**Tabel 2.153 Rasio Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah TPS (unit)	334	350	378	384	384
2	Jumlah Daya Tampung TPS (m <sup>3</sup> )	2.668	3.088	3.354	3.412	3.412
3	Jumlah Penduduk (Jiwa)	949.325	954.706	956.513	964.245	972.161
	Rasio Daya Tampung TPS per 1000 penduduk (m <sup>3</sup> /1000 penduduk)	1,76	2,82	3,25	3,4	3,42

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2024

Rasio daya tampung TPS per 1000 penduduk di Kabupaten Bantul Pada tahun 2023 dengan jumlah TPS sebanyak 384 unit adalah 3,40 m<sup>3</sup>.

Upaya pengurangan sampah dari sumbernya salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk Bank Sampah. pembentukan bank sampah merupakan momentum awal dalam membina kesadaran kolektif masyarakat untuk mulai memilah, memanfaatkan, dan mendaur-ulang sampah. Hal ini penting, karena sampah mempunyai nilai jual dan

pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat menjadi budaya baru masyarakat.

Peran dan eksistensi bank sampah diperkuat secara hukum dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* melalui bank sampah. Menurut peraturan ini, bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

**Tabel 2.154 Jumlah Bank Sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Status Aktif	85	89	91	240
2	Status Tidak Aktif	77	83	142	131
3	Jumlah Bank Sampah	162	172	233	371

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2024

Sampai dengan Tahun 2022 sudah terbentuk Bank Sampah sebanyak 371 Bank Sampah dengan status aktif sebanyak 240 unit dan yang non aktif sebanyak 131 unit.

Disamping Bank Sampah, Kabupaten Bantul memiliki 29 TPS3R, 15 TPS3R terdapat di wilayah perkotaan Kabupaten Bantul dan 14 TPS3R terdapat di wilayah perdesaan Kabupaten Bantul. Hasil perhitungan jumlah sampah yang masuk di 29 TPS3R di Kabupaten Bantul sebesar 75,517 ton/hari, dan jumlah pendauran ulang sampah/sampah terkelola sebanyak 45,128 ton/hari (Laporan Jakstrada 2023).

**Tabel 2.155 Pengelolaan Sampah di TPS3R di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023**

No	Tahun	Sampah Yang Masuk Ton/hari	Bahan Baku Pakan Ternak	Bahan Baku Upcycle / Kerajinan	Bahan Baku Sumber Energi	Residu Ton/hari	Terkelola	
			Ton/hari	Ton/hari	Ton/hari		Ton/hari	Ton/hari
1	2022	29,94				14,59	15,34	51,25%
2	2023	75,52	5,56	0,06	0	30,39	45,13	59,76%

Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2024

### 2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pelayanan dokumen kependudukan diantaranya meliputi:

- 1) Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk;  
Pendaftaran Penduduk, yang akan membawa akibat terhadap penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak dan atau surat keterangan kependudukan lainnya;
- 2) Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil.  
Pencatatan sipil, yang akan membawa akibat terhadap penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian serta surat keterangan terkait lainnya.

#### a. Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk

##### 1) Penerbitan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Cakupan penerbitan KK di Kabupaten Bantul tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.156 Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kepala Keluarga	325.082	329.616	333.130	338.013	339.774
2	Kepemilikan Kartu Keluarga	325.082	329.616	333.130	338.013	339.774
3	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2024



## 2) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Kartu tanda penduduk (KTP) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

**Tabel 2.157 Cakupan Kepemilikan KTP di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk	945.441	954.706	956.513	964.245	968.237
2	Jumlah Wajib KTP	721.687	726.830	728.582	749.759	748.410
3	Kepemilikan KTP-EI	718.179	724.438	726.613	739.629	743.449
4	Cakupan Kepemilikan KTP-EI (%)	99,51	99,67	99,73	98,65	99,34

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2024

Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan standar pelayanan lima hari harus selesai diterbitkan KTP. Perkembangan pencapaian cakupan penerbitan kartu tanda penduduk di Kabupaten Bantul tahun 2018 – 2022 ditampilkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.158 Cakupan Penerbitan KTP di Kabupaten Bantul Tahun 2019 – 2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	718.179	724.438	726.613	739.629	743.449
2	Jumlah Penduduk Wajib KTP	721.687	726.830	728.582	749.759	748.410
3	Persentase penduduk yang memiliki KTP ber-NIK	99,51	99,67	99,73	98,65	99,33

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2024

Cakupan penerbitan KTP di Kabupaten Bantul meningkat dari tahun ke tahun hal ini dikarenakan adanya berbagai inovasi, antara lain Perekaman Jemput Bola, Go-KTP, Moro Lego (Disdukcapil datang ke kalurahan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat). Meskipun berbagai inovasi dilakukan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk

memperoleh KTP jika belum terbentur kepentingan menjadi salah satu penyebab belum semua penduduk wajib KTP memiliki KTP.

### 3) Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan identitas yang wajib dimiliki setiap anak agar bisa mengakses pelayanan publik secara mandiri. Selain mengurus akta kelahiran, para orang tua ketika memiliki anak yang baru lahir juga harus membuat KIA untuk buah hatinya. Lewat kartu tersebut pemerintah berupaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hal konstitusional bagi warga negara Indonesia yang masih berumur kurang dari 17 tahun, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.159 Cakupan Kepemilikan KIA di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Wajib KIA	224.420	226.230	214.483	219.824
2	Memiliki KIA	194.286	200.784	189.707	200.269
3	%	86,57	88,75	88,45	91,1

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2024

## b. Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Pendaftaran Penduduk

### 1) Penerbitan Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai dengan standar pelayanan tujuh hari harus selesai diterbitkan.

Penerbitan akta kelahiran dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penyebarluasan informasi publik tentang pelayanan akta kelahiran, registrasi setiap kelahiran dan penerbitan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran di tahun bersangkutan. Cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bantul tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.160 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk	949.325	954.706	956.513	964.245	968.237
2	Memiliki Akte Kelahiran	532.182	551.734	566.060	584.833	232.279
3	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (%)	56,06	57,92	59,18	60,65	99,65

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2024

Selanjutnya pencapaian cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bantul dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.161 Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-1 di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk berusia 0-1 yang memperoleh akta kelahiran	10.000	9.928	9.038	8.827	9.436
Jumlah Penduduk berusia 0-1	10.900	9.938	9.075	8.838	9.436
Persentase penerbitan akta kelahiran	99,88	99,90	99,59	99,88	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2023

## 2) Penerbitan Akta Kematian

Akta kematian merupakan dokumen sebagai tanda bukti sah mengenai peristiwa kematian seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dokumen Akta Kematian mempunyai manfaat penting bagi penduduk karena dapat digunakan sebagai penetapan status janda atau duda (terutama bagi pegawai negeri), sebagai syarat menikah lagi bagi janda atau duda cerai mati, persyaratan pengurusan pembagian waris (Peralihan Hak Atas Tanah), pengurusan pensiun bagi ahli warisnya, pengurusan uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, asuransi, dan perbankan.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 44 ayat 1, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di

domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, pejabat pencatatan sipil kemudian akan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, kalurahan dan kapanewon. Kebijakan ini bertujuan agar cakupan pencatatan kematian dapat meningkat secara signifikan.

**Tabel 2.162 Cakupan Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan	12.245	10.006	14.439	13.784	4.806

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, 2024

### 2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

#### a. Indeks Desa Membangun (IDM)

Pembangunan desa merupakan salah satu amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86, yang salah satu ayatnya menyebutkan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan". Selain itu juga mendukung salah satu Nawacita pemerintah, yaitu "Pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan".

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan

ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

**Tabel 2.163 Status Kabupaten Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2019-2023**

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	IDM Kabupaten Bantul	0,8018	0,8170	0,8356	0,8566	0,8751
	Status	Maju	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri
2	IDM DIY	0,7503	0,7684	0,8037	0,8128	0,8322
	Status	Maju	Maju	Maju	Maju	Mandiri

Sumber: E-Book Peringkat IDM, <http://idm.kemendes.go.id>, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa poin Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bantul mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, capaian IDM Kabupaten Bantul juga lebih tinggi dibandingkan dengan IDM DIY. Pada tahun 2022 capaian IDM Kabupaten Bantul menduduki peringkat 6 nasional dengan nilai indeks 0,8751 dengan status Mandiri. Adanya konsistensi peningkatan IDM Kabupaten Bantul karena adanya peningkatan IDM setiap desa/kalurahan di Kabupaten Bantul, sehingga terdapat peningkatan jumlah desa mandiri di Kabupaten Bantul.

**Tabel 2.164 Jumlah Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul Menurut Status Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023	
		Kapa newon	Kalu rahan	Kapa newon	Kalu rahan	Kapa newon	Kalu rahan	Kapa newon	Kalu rahan	Kapa newon	Kalu rahan
1	Mandiri	3	18	11	25	12	45	16	65	17	75
2	Maju	14	57	6	50	5	30	1	10	0	0
3	Berkembang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	17	75	17	75	17	75	17	75	17	75

Sumber: E-Book Peringkat IDM, <http://idm.kemendes.go.id>, 2024

### b. Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintahan kalurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD di Kabupaten Bantul tahun 2019-2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.165 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPMD di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022**

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kelompok Binaan LPMD	313	313	313	313	313
2	Jumlah LPMD	75	75	75	75	75
3	Rata-rata jumlah Kelompok Binaan LPMD	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, 2024

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPMD. Pada tahun 2023 sebanyak 75 LPMD di Kabupaten Bantul memiliki Kelompok Binaan LPMD berjumlah 313. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD di Kabupaten Bantul tahun 2022 sebesar 4,17. Hal ini berarti bahwa rata-rata satu LPMD membina lebih dari 4 kelompok.

### c. Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat. Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah tim penggerak PKK kalurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis.

**Tabel 2.166 Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022**

No	Nama Organisasi	Jumlah				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PKK Kapanewon	17	17	17	17	17
2	Kelompok PKK Dusun	933	933	933	933	933
3	Kelompok UP2K-PKK	-	-	75	75	75

No	Nama Organisasi	Jumlah				
		2019	2020	2021	2022	2023
4	Kelompok Simulasi (GNAKSA, PAAR)	-	-	75	75	75

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, 2024

Dalam tiga tahun terakhir, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, kelompok binaan PKK di Kabupaten Bantul hanya terdiri dari PKK kapanewon, kelompok PKK Dusun, kelompok UP2K-PKK, serta kelompok Simulasi (GNAKSA, PAAR). Jumlah masing-masing kelompok binaan PKK yaitu 17 kelompok PKK Kapanewon, 933 kelompok PKK Dusun, 75 kelompok UP2K-PKK, dan 75 Kelompok Simulasi (GNAKSA, PAAR).

### 2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

#### a. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate -TFR*)

Angka kelahiran total adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita sampai akhir masa reproduksinya atau masa subur untuk melahirkan anak. Angka tersebut dapat diperoleh dengan memperlihatkan angka kelahiran menurut kelompok umur (ASFR). TFR merupakan angka terbaik untuk membandingkan keadaan fertilitas di beberapa daerah atau negara.

**Tabel 2.167 Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate -TFR*) Kabupaten Bantul Tahun 2022**

No	Kelompok Umur	Jumlah Kelahiran	Jumlah Perempuan	ASFR (Age Specific Fertility Rate)
1	15 - 19	168	32,127	0,010557
2	20 - 24	2320	31,994	0,107882
3	25 - 29	4640	32,234	0,109613
4	30 - 34	2321	32,020	0,100666
5	35 - 39	1195	36,773	0,005075
6	40 - 44	167	36,002	0,000515
7	45 - 49	9	34,104	0
<b>Total Fertility Rate -TFR</b>				<b>1.657877</b>

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bantul 2023

Dari data dalam tabel di atas dapat diartikan bahwa satu perempuan berusia 15 sampai 49 tahun (usia produktif) di Kabupaten Bantul akan melahirkan satu atau dua orang anak (1,65 anak).

### b. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

**Tabel 2.168 Kepesertaan KB di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	PUS	139.938	-	141.317	-	139.938	-	141.317	-	152.998	-
2	Peserta KB Aktif	101.691	72,67	103.912	73,53	101.691	72,67	103.912	73,53	97.759	63,9
3	Peserta KB MKJP	35.850	35,25	36.454	35,08	35.850	35,25	36.454	35,08	-	-
4	Peserta KB Pria	1.021	1	9.651	9,29	1.021	1	9.651	9,29	-	-
5	Peserta KB Baru	9.473	53,54	17.686	44,42	9.473	53,54	17.686	44,42	6.388	56,11
6	PUS Unmet Need	14.757	10,55	14.226	10,07	14.757	10,55	14.226	10,07	23122	15,11

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bantul 2024

### c. Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Tribina

BKB adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan, dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak usia di bawah lima tahun (Balita), melalui optimalisasi rangsangan emosional, moral, dan sosial.

Cakupan anggota kelompok BKB ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKB terhadap anggotanya, khususnya yang masih Pasangan usia Subur (PUS) untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok.

**Tabel 2.169 Cakupan Anggota Kelompok BKB ber-KB di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan anggota Kelompok BKB ber-KB	94,40	86,40	85,90	87,60	87,57

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bantul 2023

Kegiatan Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat



terkait dengan pembinaan keluarga, yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai ketahanan, kesejahteraan di dalam keluarga sehingga mewujudkan keluarga Berkualitas.

**Tabel 2.170 Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Kelompok Tribina Tahun 2022**

Uraian	Jumlah sasaran	Jumlah anggota	Persentase
Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Kelompok Tribina	14.424	4.798	33,26

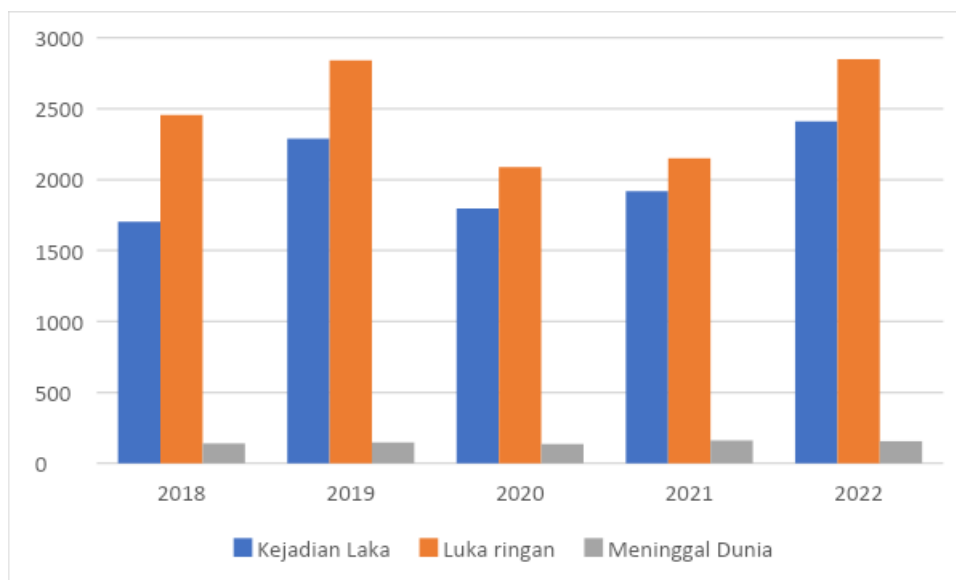
*Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bantul 2023*

### 2.1.3.2.9 Perhubungan

#### a. Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian kejadian yang pada akhirnya sesaat sebelum terjadi kecelakaan didahului oleh gagalnya pemakai jalan dalam mengantisipasi keadaan sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri dan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan terjadinya korban atau kerugian harta benda.

Jumlah kecelakaan lalu lintas dari tahun 2018- 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: POLRES Kabupaten Bantul, 2023

**Gambar 2.29 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022**

Jumlah kecelakaan lalu lintas dari tahun 2018 hingga tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan, dan di tahun 2020 mengalami penurunan. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 berpengaruh terhadap aktivitas warga berlalu lintas. Sebagai dampak dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pengurangan kegiatan perkantoran, peniadaan kegiatan di lingkungan sekolah dan pengurangan aktivitas warga.

Pada tahun 2022 terjadi kenaikan jumlah laka sebesar 494 kasus atau sebesar 26% dibandingkan kejadian tahun 2021. Jumlah korban meninggal terjadi penurunan dari 161 orang di tahun 2021 menjadi 156 orang di tahun 2022 (turun 3% dari tahun sebelumnya). Jumlah korban luka ringan pada tahun 2022 sebanyak 2850 naik sebesar 699 orang (32%) dibandingkan tahun 2021 sebesar 2151 orang. Jika diambil rata-rata, pada tahun 2022 setiap hari hampir terjadi 7 kasus laka. Peningkatan jumlah kejadian laka sangat erat kaitannya dengan pelanggaran PPKM. Masyarakat seakan mengalami euforia setelah sekitar dua tahun dibatasi aktivitasnya.

Detail profesi korban dan pelaku pada saat laka tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.171 Profesi Korban dan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2023**

No	Uraian	2021		2022		2023	
		Korban	Pelaku	Korban	Pelaku	Korban	Pelaku
1	PNS	70	62	79	85	95	67
2	TNI	4	2	4	3	5	1
3	POLRI	11	9	7	8	9	6
4	Karyawan	963	831	1.078	990	876	788
5	Pelajar	436	370	540	421	843	740
6	Mahasiswa	133	125	275	279		
7	Pengemudi	5	8	14	15	4	9
8	Pedagang/Petani	68	42	81	48	509	319
9	Buruh	270	200	336	217		
10	Lain-lain	167	113	285	160	309	216
<b>Jumlah</b>		<b>2.127</b>	<b>1.762</b>	<b>2.699</b>	<b>2.226</b>	<b>2.650</b>	<b>2.146</b>

Sumber: POLRES Kabupaten Bantul, 2024

Karyawan, pelajar, mahasiswa dan buruh menduduki peringkat atas baik sebagai korban maupun pelaku laka. Upaya untuk mengurangi angka kecelakaan harus ditingkatkan. Hal yang dapat ditempuh antara lain menggalakkan sosialisasi *safety riding*, memberlakukan batas kecepatan kendaraan, melengkapi rambu-rambu lalu lintas, mengatur perjalanan agar tidak berada pada satu jam puncak (misalnya mengatur jam masuk anak sekolah agar tidak berada pada jam yang sama), harus ada upaya memperkecil kepadatan lalu-lintas dengan mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi dengan kendaraan angkutan umum.

Adapun Daerah rawan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bantul adalah Jalan Samas, Jalan Imogiri, Jalan Jogja Wonosari, dan Jalan Ringroad Timur yang merupakan jalan utama menuju pusat kegiatan/pelayanan. Upaya tindak lanjut untuk menangani daerah rawan kecelakaan tersebut adalah pemasangan *road water barrier*, pemasangan/perbaikan PJU, pemangkasan ranting pohon yang mengganggu, pemasangan *warning light* dan manajemen rekayasa lalu-lintas yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

Regulasi dari pemerintah untuk meningkatkan keselamatan lalu-lintas terbit Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perpres ini diterbitkan karena dilatarbelakangi dengan peningkatan pergerakan manusia dan barang, yang berdampak pada meningkatnya potensi terjadinya kecelakaan transportasi, terutama LLAJ. Program nasional

KLLAJ terdiri atas lima pilar yang meliputi Manajemen Keselamatan Jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, pengguna jalan berkeselamatan, serta perawatan korban pasca kecelakaan.

## b. Rasio Konektivitas

Rasio konektivitas adalah rasio jumlah trayek dalam suatu wilayah berbanding dengan jumlah kebutuhan trayek pada wilayah tersebut. Rasio konektivitas Kabupaten Bantul pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.172 Rasio Konektivitas Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Trayek yang dilayani pada kabupaten	7	7	7	10	10
Jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten	23	23	23	26	26
Bobot Trayek	1	1	1	1	1
Bobot Angkutan Jalan	100	100	100	100	100
<b>Rasio Konektivitas (%)*</b>	<b>30,34</b>	<b>30,43</b>	<b>30,43</b>	<b>38,46</b>	<b>38,46</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2024

Keterangan :

\*) Rumus :

$$\frac{\text{JUMLAH TRAYEK YANG DILAYANI PADA KAB} \times \text{BOBOT TRAYEK}}{\text{JUMLAH KEBUTUHAN TRAYEK PADA KABUPATEN}} \times \text{BOBOT ANGKUTAN JALAN}$$

## c. Kinerja Lalu Lintas Kabupaten

Kriteria kinerja lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan nilai derajat kejenuhan atau kecepatan tempuh pada suatu kondisi jalan tertentu yang terkait dengan geometrik, arus lalu lintas, dan lingkungan jalan untuk kondisi eksisting maupun untuk kondisi desain (v/c ratio). Semakin rendah nilai derajat kejenuhan atau semakin tinggi kecepatan tempuh menunjukkan semakin baik kinerja lalu lintas.

Persyaratan teknis jalan menetapkan bahwa untuk jalan arteri dan kolektor, jika derajat kejenuhan sudah mencapai 0,75, maka segmen jalan tersebut sudah harus dipertimbangkan untuk ditingkatkan kapasitasnya, misalnya dengan menambah lajur jalan. Untuk jalan lokal, jika derajat kejenuhan sudah mencapai 0,90, maka segmen jalan tersebut sudah harus dipertimbangkan untuk ditingkatkan kapasitasnya.

Tabel 2.173 V/C Ratio Jalan Kabupaten

No	Jalan Kabupaten	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2023
1.	Jalan Jend. Sudirman	-	0,38	0,43	0,45	0,36
2.	Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo	-	0,17	-	0,42	0,34
3.	Jalan Bantul	0,45	-	-	-	
4.	Jalan Imogiri Barat	0,39	0,17	-	-	
5.	Jl. KH. Wahid Hasyim	-	-	-	0,39	034
6.	Jl. Prof. Dr. Supomo, SH	-	-	-	0,42	0,35

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2024

#### d. Izin Trayek

Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek adalah kumpulan trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, kewenangan kabupaten adalah memberikan izin trayek untuk pedesaan. Izin trayek di Kabupaten Bantul dikeluarkan oleh Dinas Perijinan dengan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Jumlah izin trayek yang ada di Bantul tidak ada penambahan, tetap berjumlah 7 trayek yang tersebar di lima kapanewon yaitu: Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlinggo, dan Kasihan.

Adapun 7 (tujuh) jalur trayek di Bantul adalah sebagai berikut:

1. Trayek Toyan-Goa Cerme-Imogiri-Jejeran-Terminal Giwangan-jl Pramuka-Karang Tunggal PP;
2. Trayek Dlingo-Terong-Pathuk-Piyungan-Ketandan-Rejowiangun-Terminal Giwangan PP;
3. Trayek Pantai Samas-Pabapang-Bantul-Dongkelan-Jokteng Kulon-Jokteng Wetan-Druwo-Terminal Giwangan PP;
4. Trayek Trisik-Brosot-Jokteng Kulon-Jokteng Wetan-Druwo-Terminal Giwangan PP;

5. Trayek Parangtritis-Pasar Gabusan-Druwo-Jokteng Wetan-Karangtunggal-Terminal Giwangan PP;
6. Trayek Pantai Baru-Bantul-Dongkelan-Jokteng Kulon-Jokteng Wetan-Druwo-Terminal Giwangan PP;
7. Trayek Srandakan-Palbapan-Bantul-Dongkelan-Jokteng Kulon-Tamansari PP.

#### **e. Angkutan Darat**

Angkutan Darat adalah jenis kegiatan ekonomi berupa pemberian/bisnis jasa angkutan/transportasi barang atau orang di darat, seperti yang dilakukan oleh perusahaan bus, taksi maupun kereta api. Angkutan darat yang terorganisir di Kabupaten Bantul berupa angkutan umum penumpang bus dan minibus.

Jumlah angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, baik angkudes, angkutan perbatasan maupun Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP). Penurunan jumlah pengguna angkutan umum karena saat ini masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibanding dengan angkutan umum akibat semakin mudahnya dalam memperoleh kendaraan pribadi (sepeda motor). Penggunaan angkutan umum sebagai sarana transportasi massal dapat mengurangi beban lalu lintas yang semakin padat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis dari Pemerintah Daerah sehingga masyarakat bersedia beralih menggunakan angkutan umum.

Kebijakan Kabupaten Bantul untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum antara lain:

1. Mengajukan usulan perluasan layanan transjogja dari terminal Palbapang-Ngabean dan sudah disetujui.
2. Mengusulkan perluasan layanan transjogja sampai terminal Imogiri (makam raja-raja).
3. Memberikan edukasi bagi masyarakat, dengan melakukan kajian layanan bus sekolah dan akan diuji coba tahun 2024.

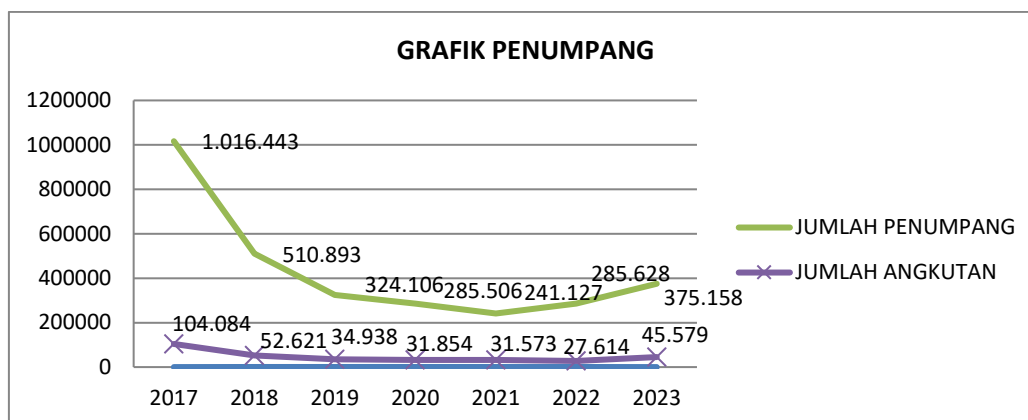
**Tabel 2.174 Data Trayek Kendaraan Angkutan Umum yang masih Beroperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Trayek	Jumlah Armada				
		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Angkudes</b>						
1	Ps.Bantul-Imogiri	0	0	0	0	0
2	Ps.Bantul-Tugu Genthong	0	0	0	0	0
3	Ps.Bantul-Pundong	0	0	0	0	0
4	Ps.Bantul-Kretak	0	0	0	0	0
5	Ps.Imogiri-Dlingo (lewat Munthuk)	0	0	0	0	0
6	Ps.Imogiri-Dlingo (lewat Seropan)	0	0	0	0	0
7	Ps.Bantul-Pleret	0	0	0	0	0
8	Ps.Bantul-Krebet	0	0	0	0	0
9	Dlingo-Rejoinangun	0	0	0	0	0
10	Pajangan-Bantul-Pajangan	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0
<b>Angkutan Perbatasan</b>						
1	Yogya- Parangtritis	15	15	15	15	15
2	Yogya- Samas	5	5	5	5	5
3	Yogya- Sorobayan	3	3	3	3	3
4	Yogya-Srandakan	2	2	2	2	2
5	Dlingo - Terminal Giwangan	13	13	13	13	13
6	Yogyakarta – Petoyan	6	6	6	6	6
7	Trisik – Giwangan	12	12	12	12	12
	Jumlah	56	56	56	56	56
<b>AKDP</b>						
1	Yogya- Panggang GK	13	0	0	0	0
2	Yogya- Parangtritis	26	0	0	0	0
3	Yogya- Samas	14	0	0	0	0
4	Yogya- Pandansimo	13	0	0	0	0
5	Yogya- Wates	17	0	0	0	0
6	Yogya- Ngentakrejo	8	0	0	0	0
7	YIA - Palbapang - Makam Raja Imogiri	-	-	5	4	2
8	Malioboro - Parangtritis - Baron	-	-	-	2	2
9	Palbapang - Ngabean - Malioboro	-	-	-	10	10
	Jumlah	91	0	5	16	14

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2024

#### f. Penumpang Angkutan Umum

Angkutan umum yang ada di Kabupaten Bantul berupa armada bis angkutan umum dengan jumlah penumpang yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2024

**Gambar 2.30 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2023**

Jumlah penumpang angkutan umum bus di Kabupaten Bantul dari tahun 2018-2022 cenderung mengalami penurunan. Penurunan penggunaan angkutan umum tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi tinggi, pelayanan angkutan umum belum memenuhi standar pelayanan, jumlah angkutan umum berkurang, rute/trayek angkutan umum belum menjangkau wilayah, dan kondisi sarana dan prasarana angkutan umum buruk. Kabar baiknya antusiasme masyarakat terhadap angkutan trans jogja sangat tinggi, sehingga jumlah penumpang pada tahun 2022-2023 meningkat.

Untuk mendukung rute Trans Jogja Palbapang-Malioboro Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan pembenahan di terminal Palbapang. Terminal Palbapang selain sebagai terminal tipe C juga menyediakan fasilitas *park and ride*. Masyarakat Bantul yang akan ke Malioboro dengan menggunakan kendaraan pribadi dapat memarkir kendaraannya di terminal Palbapang dan melanjutkan perjalanan dengan Trans Jogja. Pemda Bantul juga telah memasang rambu tempat pemberhentian Trans Jogja.

#### **g. Uji KIR Angkutan Umum**

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi uji tipe dan uji berkala. Uji tipe



merupakan pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, sedangkan uji berkala merupakan pengujian yang diwajibkan untuk mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul dilakukan enam bulan sekali oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis berdasarkan ketetapan oleh Menteri Perhubungan.

**Tabel 2.175 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Uji kir kendaraan umum	19.131	11.762	12.978	12.210	11.121

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2023

Jumlah kendaraan wajib di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang melaksanakan kewajiban uji berkala mengalami peningkatan dan penurunan. Penurunan jumlah kendaraan yang melaksanakan uji berkala antara lain disebabkan oleh:

- Adanya Penerapan ODOL (Over Dimension Overload) oleh Kementerian Perhubungan.
- Kesadaran masyarakat untuk mengujikan kendaraan sangat rendah.
- Penindakan/PPNS di jalan masih sangat kurang.

#### **h. Terminal Bus**

Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Di Kabupaten Bantul terdapat empat terminal dengan kategori C, selain itu terdapat tiga lokasi pemungutan retribusi yaitu TPR Imogiri, TPR Piyungan, TPR Sedayu dan TPR Parangtritis. Selama kurun waktu 5 tahun tidak mengalami penambahan atau pengurangan jumlah lokasi terminal.

**Tabel 2.176 Pembangunan Halte 2017- 2021**

2017	2018	2019	2020	2021
Halte Pasar Barongan	Halte Kasongan	Halte SMPN 1 Sewon	Halte Jigudan	Halte Depan Mess Persiba
Halte SMAN 1 Bantul	Halte Palbapang	Halte Pasar Angkruksari	Halte Pasar Hewan Pandak	Halte Depan Pasar Niten
Halte SMPN 1 Pandak	Halte Depan SMP 2 Bantul	Halte SMA N 1 Bambanglipuro	Halte Jejeran	
Halte Sapuangin	Halte dua Depan SMU Muhammadiyah Bantul (MUHIBA)	Halte SMAN 1 Sewon	Halte SMK N 1 Pleret	
Halte Srandakan				

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2023

Pada tahun 2022 Dinas perhubungan tidak membangun halte permanen sehingga tidak ada halte di tahun 2022. Adanya trans jogja ada penambahan beberapa halte *portable* yang merupakan hibah dari DIY.

#### i. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS)

Terminal Imogiri merupakan terminal Tipe C yang berada di Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri. Terminal yang berada pada Satuan Ruang Strategis Kawasan Pantai Samas-Parangtritis adalah Terminal Parangtritis dan Terminal Samas.

**Tabel 2.177 Aktivitas di Terminal yang berada di Satuan Ruang Strategis Tahun 2021- 2023**

No	Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS)	Terminal	Jumlah Angkutan			Jumlah Penumpang		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Satuan Ruang Strategis Kawasan Pantai Samas-Parangtritis	Parangtritis	10.518	8.982	7.120	87.560	88.190	22.795
		Samas	5.386	906	0	44.565	2.952	0
2	Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram Di Imogiri.	Imogiri	2.154	3.988	3.198	8.901	35.990	9.657

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2024

### **2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika**

#### **a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Dalam rangka mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi, maka perlu dilakukan modernisasi birokrasi pemerintahan yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (TIK). Sistem ini lebih dikenal dengan istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem ini sudah sejak lama dilakukan dengan intensitas yang semakin meningkat pula, namun permasalahannya sejauh ini masing-masing Perangkat Daerah membangun aplikasi pemerintahannya sendiri sendiri, dalam arti implementasi sistem informasi pemerintahan masih belum terintegrasi. Kondisi ini tidak sejalan dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi harus didasarkan pada arsitektur SPBE agar SPBE menjadi terpadu sehingga tercipta proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah.

#### **1) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai salah satu aktor penerapan SPBE juga terus menerus melakukan upaya meningkatkan indeks SPBE yang dimiliki. Berdasarkan Inpres No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government, disebutkan bahwa setiap Pemerintah Daerah (Pemda) dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya untuk melaksanakan pengembangan pelayanan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara nasional yang dikenal dengan sebutan SPBE.

Instrumen penilaian SPBE berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik, menggunakan 4 Domain, 8 Aspek, 47 Indikator. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pengembangan SPBE diarahkan untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu:

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
- Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Hasil evaluasi SPBE tahun 2019-2023 yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.178 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Indeks SPBE</b>	3,24 (baik)	3,24 (baik)	3,62 (sangat baik)	3,62 (sangat baik)	3,72 (sangat baik)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh indeks 3,72 dengan predikat sangat baik. Perolehan indeks SPBE tahun 2023 meningkat sebanyak 0,1 dari indeks tahun sebelumnya yaitu 3,62.

## 2) Nilai Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Penilaian aspek tata kelola SPBE meliputi :

1. Perencanaan strategis, dengan indikator:
  - a. Arsitektur SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
  - b. Peta rencana SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
  - c. Rencana dan anggaran SPBE
  - d. Inovasi proses bisnis SPBE
2. Teknologi informasi dan komunikasi, dengan indikator:
  - a. Pembangunan aplikasi SPBE
  - b. Layanan Pusat Data

- c. Layanan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah
  - d. Penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/pemerintah daerah
3. Penyelenggaraan SPBE, dengan indikator:
- a. Tim koordinasi instansi pusat/pemerintah daerah
  - b. Kolaborasi penerapan SPBE

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana salah satu indikator kinerja sasaran strategisnya adalah penilaian Indeks SPBE oleh KemenPAN RB sebagai dasar untuk Penerapan SPBE Pemkab Bantul, dengan hasil dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.179 Nilai Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Tatakelola SPBE	1,57	2,71	2,71	2,9	2,9

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2023

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, Nilai Tatakelola SPBE pada indeks SPBE Kabupaten Bantul mencapai 2,9 dari skala 5 . Ini menunjukkan peningkatan yakni, 0,19 dari indeks sebelumnya yaitu 2.71 pada tahun 2019, dan di tahun 2018 Nilai Tatakelola SPBE pada indeks SPBE sebesar 1,57. Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 tahun sekali sehingga pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mengikuti evaluasi dan menggunakan Nilai Tatakelola SPBE pada indeks SPBE Kabupaten Bantul yang sama dengan tahun sebelumnya.

#### **b. Keterbukaan Informasi Publik**

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan

melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Pada Tahun 2023 Komisi Informasi Daerah (KID) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di DIY beberapa tokoh pegiat keterbukaan informasi publik dari beberapa instansi di luar KID DIY baik dari lembaga perguruan tinggi (Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA), Universitas Atmajaya Yogyakarta, Program Studi Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, dan Klinik Keterbukaan Informasi Universitas Islam Indonesia (UII), dari lembaga penelitian (Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan juga dari Civil Society Organization/CSO IDEA Yogyakarta, Masyarakat Peduli Media, dan *Combine Resource Institution*). Dari instansi yang dimaksud kemudian melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi Badan Publik, dengan demikian seluruh Badan Publik akan mengetahui hasil monitoring dan evaluasi terhadap Badan Publik tersebut sehingga dapat meningkatkan kinerjanya pada masa-masa mendatang.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat peningkatan jumlah Badan Publik yang memperoleh kategori kualifikasi “informatif”.

**Tabel 2.180 Jumlah Badan Publik Informatif Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023**

Uraian	2020	2021	2022	2023
Badan Publik Informatif	8	10	30	31
Badan Publik Menuju Informatif	9	11	11	14

Sumber: KID D.I.Yogyakarta, 2024

Terdapat peningkatan jumlah badan publik yang memperoleh kategori kualifikasi informatif. Pada tahun 2020 hanya ada 8, tahun 2021 meningkat menjadi 10 dan 2022 meningkat pesat menjadi 30, tahun 2023 menjadi 31 Badan Publik. Pada tahun 2023 terdapat 14 badan publik yang berstatus “menuju informatif”.

Pada periode 2020-2022 nilai capaian keterbukaan informasi publik menurun di semua Kabupaten/Kota. Nilai Kabupaten Bantul tertinggi di DIY. Hal tersebut karena banyak perubahan variabel yang dinilai dan harus mengakomodir penyandang disabilitas, sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

### c. Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik

Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Hasil analisis terhadap penilaian Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik Kabupaten Bantul melalui kuesioner yang sudah disebar kepada responden menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika dari tahun 2019-2023 sebagai berikut:

**Tabel 2.181 Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik</b>	78,56	83,03	83,77	83,81	84,25

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2023

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik (Nilai Interval Konversi) pada tahun 2023 sebesar 84,25 yang artinya pelayanan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul berkategori “BAIK”. Jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik tahun 2022, maka nilai Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik tahun 2023 mengalami kenaikan 0,44 dari nilai 83,81 menjadi 84,25. Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik cenderung meningkat dari tahun ke tahun

#### d. Nilai Indeks Pembangunan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi)

Pembangunan TIK diukur dengan melihat indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan TIK suatu wilayah pada suatu waktu. Selain itu, IP-TIK dapat mengukur kesenjangan digital serta menginformasikan potensi dalam rangka pembangunan TIK.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU). IP-TIK sangat penting sebagai ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Selain itu, IP-TIK juga mampu mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur gap digital atau kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK.

Capaian indeks pembangunan TIK Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.182 Indeks Pembangunan TIK Tahun 2023**

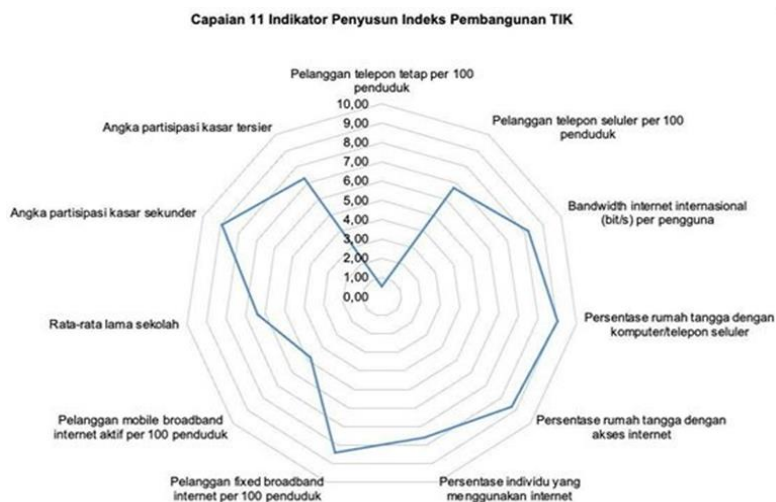
Sub indeks	Indeks Pembangunan TIK 2023		
	Nasional	DIY	Kabupaten Bantul
Akses dan Infrastruktur TIK	5,80	8,01	6,636
Penggunaan TIK	5,82	6,23	6,945
Keahlian TIK	6,00	7,77	7,557
<b>Indeks Pembangunan TIK</b>	<b>5,85</b>	<b>7,25</b>	<b>6,944</b>

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2022, diolah

Capaian Indeks pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebesar 6,944 terdiri dari sub indeks akses dan infrastruktur TIK 6,636, sub indeks penggunaan TIK 6,945 dan sub indeks keahlian TIK 7,557.

Penilaian IP-TIK menggunakan skala 0–10 dengan skala 10 menunjukkan capaian tertinggi dari indikator. Pembangunan TIK dikategorikan menjadi kategori tinggi (7,51–10,00), sedang (5,01–7,50), rendah (2,51–5,00), dan sangat rendah (0– 2,50). Pembangunan TIK Kabupaten Bantul sebesar 6,944 masuk dalam kategori sedang. Adapun capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK dapat dilihat pada bagan berikut:





**Gambar 2.31 Capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul 2023**

## e. Media Informasi

### 1) Surat Kabar Nasional/Lokal

Surat kabar merupakan penerbitan yang berupa lembaran yang berisi berita-berita karangan, iklan yang dicetak dan diterbitkan secara tetap atau periodik dan untuk dijual kepada umum. Lingkup berita dapat menyangkut berita internasional, nasional, maupun berita daerah (lokal). Fungsi dari surat kabar itu sendiri adalah untuk memberikan informasi yang beragam bagi masyarakat luas.

Di Kabupaten Bantul surat kabar yang beredar dari tahun ke tahun cenderung konstan, dengan total jenis surat kabar sekitar sepuluh jenis yang terdiri dari 4 (empat) surat kabar nasional dan 6 (enam) surat kabar lokal.

Selanjutnya selain memanfaatkan bahan referensi surat kabar, Pemerintah Kabupaten Bantul juga menerbitkan Buletin Sejada. Pada tahun 2021, Buletin Sejada diubah menjadi versi *ebook* dengan nama e-Sejada yang diunggah pada laman [bantulkab.go.id](http://bantulkab.go.id) dan berbagai macam *platform digital* penyebaran *ebook* yang ada. Tujuan utama dari penerbitan buletin ini selain sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat, juga sebagai sarana untuk mensosialisasikan program kerja dan kegiatan Pemerintah, sehingga masyarakat bisa mengetahui dan

memahami program kerja dan kegiatan pembangunan yang telah, sedang dan akan dilakukan.

Penerbitan buletin ini dilakukan 12 kali/edisi dalam setiap tahunnya. Adapun kendala yang dihadapi adalah dengan tidak adanya versi cetak dari Buletin Sajada ini, tidak dapat menjangkau masyarakat yang tidak menggunakan fasilitas online dalam kesehariannya.

## **2) Media Siber/Online**

Publikasi penyelenggaraan Pemerintah dituntut untuk lebih inovatif, kreatif, dan persuasif dalam menjalankan perannya, terutama dalam memberikan pelayanan penyebarluasan informasi (diseminasi) melalui media. Pemerintah dituntut untuk menyampaikan informasi mengenai program-program, kebijakan, realisasi kinerjanya secara terbuka, transparan, juga akuntabel. Pola komunikasi yang diusung dua arah, komunikatif, melibatkan dan menuntut peran aktif masyarakat secara langsung. Dengan perkembangan teknologi Pemerintah Kabupaten Bantul semakin intensif dalam memaksimalkan peran media siber/online. Secara waktu penggunaan Media siber/online lebih efektif, dari anggaran lebih efisien dan maksimal bisa menjangkau langsung, cepat, dan mudah ke seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah bisa memaksimalkan perannya melalui media siber/online dan itu memungkinkan pemerintah bisa berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Baik menginformasikan kebijakan yang akan berlaku, maupun memberikan informasi penting dan cepat. Selain itu akses langsung publik secara online kepada pemerintah menjadi faktor pendukung terciptanya pemerintahan yang baik dan transparan. Publikasi penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah kabupaten bantul dapat diakses melalui resmi Beranda - Website Pemerintah Kabupaten Bantul ([bantulkab.go.id](http://bantulkab.go.id)).

Selain menggunakan media website, penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah Kabupaten Bantul juga dipublikasi menggunakan media sosial resmi pemkab Bantul seperti Facebook,

Instagram, Twitter (X) dan Tiktok yang semuanya menggunakan nama akun @pemkabantul serta youtube dengan nama akun Bantul TV.

Peningkatan jumlah follower media social resmi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.183 Follower Media Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Social Media	2019	2020	2021	2022	2023
1	Facebook	10.160	172.549	175.347	175.152	175.658
2	Instagram	4.034	44.200	64.722	89.724	129.142
3	Twitter	955	7863	10.311	11.614	11.824
4	youtube	913	5.030	19.201	25.602	36.458
5	Tiktok				4.981	12.035

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2024

Dalam pemanfaatan media sosial, pemerintah kabupaten bantul bertujuan menyimak, untuk memahami dan menyerap aspirasi kebutuhan masyarakat, berbicara, dimanfaatkan untuk menyebarluaskan pesan dan informasi, serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses diseminasi informasi dan komunikasi.

### 3) Penyiaran Radio/TV

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bantul untuk melakukan interaksi dan komunikasi dengan masyarakat adalah melalui dialog interaktif berupa penyiaran di radio ataupun televisi. Tujuan kegiatan ini adalah agar program kerja dan kebijakan pemerintah tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Penyiaran di radio dilakukan bekerjasama dengan Radio Bantul, Radio Sonora, Radio Persatuan, dan RRI, sementara penyiaran televisi bekerjasama dengan TVRI dalam acara Taman Gabusan dan Saba Desa serta RB TV untuk Program Leyeh-leyeh. Model siaran adalah *talkshow* dengan dialog interaktif dengan pemirsa di luar studio.

#### 4) Website Milik Pemerintah Daerah

Keberadaan website milik pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki satu website utama dengan alamat <http://www.bantulkab.go.id>, dengan 33 subdomain yang terdiri dari 32 subdomain untuk SKPD dan 1 subdomain untuk produk hukum Kabupaten Bantul. Website dan subdomain yang terdapat di perangkat daerah, kalurahan ataupun lembaga diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul.

##### 2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

###### a. Koperasi

###### 1) Koperasi Berbadan Hukum

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan dan berwenang melakukan pengawasan terhadap koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Adapun koperasi yang menjadi kewenangan pembinaan dan pengawasan Kabupaten Bantul adalah Koperasi Berbadan Hukum.

**Tabel 2.184 Koperasi Berbadan Hukum di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No.	Kapanewon	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kasih	28	27	27	26	26
2	Sewon	42	44	44	45	44
3	Banguntapan	25	24	24	24	24
4	Pundong	9	9	8	8	8
5	Dlingo	16	16	17	17	17
6	Piyungan	16	17	16	16	16
7	Pajangan	8	8	8	8	8
8	Bantul	69	70	71	72	73
9	Srandakan	11	11	11	11	11
10	Pandak	13	14	15	15	15
11	Imogiri	25	25	28	30	30
12	Sanden	19	19	19	18	18
13	Kretek	10	10	10	9	9
14	Sedayu	15	15	15	16	16
15	Jetis	18	17	17	17	17

No.	Kapanewon	2019	2020	2021	2022	2023
16	Pleret	10	10	10	11	11
17	Bambanglipuro	15	15	15	15	15
<b>Jumlah</b>		<b>349</b>	<b>351</b>	<b>355</b>	<b>358</b>	<b>358</b>

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2024

Pada tahun 2023, jumlah koperasi berbadan hukum di Kabupaten Bantul adalah 358 koperasi, sama seperti tahun 2022, namun terjadi perubahan di kapanewon Bantul dan pengurangan di kapanewon Sewon

Koperasi menurut bentuknya dibagi menjadi 2, koperasi primer dan koperasi sekunder. Jumlah koperasi menurut bentuknya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada tahun 2023, tidak terdapat penambahan baru di Kabupaten Bantul.

**Tabel 2.185 Jumlah Koperasi Menurut Bentuk Koperasi Tahun 2019-2023**

No	Bentuk Koperasi	2019	2020	2021	2022	2023
1	Koperasi Primer	346	348	351	354	354
2	Koperasi Sekunder	3	3	4	4	4
Jumlah		349	351	355	358	358

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2024

Koperasi menurut jenisnya dibagi menjadi 5, yaitu koperasi simpan pinjam, produsen, konsumen, jasa dan pemasaran. Jumlah koperasi menurut jenisnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.186 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi Tahun 2019-2023**

No	Jenis Koperasi	2019	2020			2021			2022			2023		
			Aktif	Tidak Aktif	Total	Aktif	Tidak Aktif	Total	Aktif	Tidak Aktif	Total	Aktif	Tidak Aktif	Total
1	Koperasi Simpan Pinjam	121	107	14	121	107	15	122	97	24	121			133
2	Koperasi Produsen	40	35	5	40	36	5	41	36	8	44			41
3	Koperasi Konsumen	150	118	32	150	117	31	148	105	43	148			147
4	Koperasi Jasa	35	36	1	37	38	2	40	35	6	41			34
5	Koperasi Pemasaran	3	3	0	3	3	1	4	3	1	4			3

No	Jenis Koperasi	2019	2020			2021			2022			2023		
			Aktif	Tidak Aktif	Total	Aktif	Tidak Aktif	Total	Aktif	Tidak Aktif	Total	Aktif	Tidak Aktif	Total
	<b>Jumlah</b>	<b>349</b>	<b>299</b>	<b>52</b>	<b>351</b>	<b>301</b>	<b>54</b>	<b>355</b>	<b>276</b>	<b>82</b>	<b>358</b>			<b>358</b>

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2024

Pada tahun 2023 jumlah Koperasi Simpan Pinjam bertambah 12, , jumlah Koperasi Produsen berkurang 3 Koperasi, jumlah Koperasi Konsumen berkurang 1 koperasi, jumlah koperasi Jasa berkurang 7 koperasi dan jumlah koperasi pemasaran berkurang 3.

## 2) Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian kesehatan koperasi dilaksanakan pada koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah, Unit Simpan Pinjam, dan Unit Simpan Pinjam Pola Syariah dengan hasil dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.187 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Tahun Tutup Buku Tahun 2021-2022**

Jenis Koperasi	2021						2022					
	S	CS	DP	DPK	TD	Jumlah	S	CS	DP	DPK	TD	Jumlah
Koperasi Simpan Pinjam	31	47	2	0	0	80	23	46	2	0	7	78
Unit Simpan Pinjam	47	53	0	0	0	100						
Produksi							0	21	0	0	3	24
Pemasaran							1	1	0	0	0	2
Konsumen							11	58	0	0	7	76
Jasa							0	16	0	0	5	21
<b>Jumlah</b>	<b>78</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>35</b>	<b>142</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>201</b>

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Keterangan:

S : Sehat

CS : Cukup Sehat

DP : Dalam Pengawasan

DPK : Dalam Pengawasan Khusus

TD : Tidak Dapat Dinilai

Tahun 2022 terjadi perubahan tingkat kesehatan koperasi yang sangat signifikan, pada predikat **Sehat** berkurang 43 unit dari tahun 2021, **Cukup Sehat** bertambah 42 unit, **Dalam Pengawasan** 2 unit dan **Tidak dapat Dinilai** 22 unit dikarenakan adanya perubahan instrumen penilaian kesehatan sesuai dengan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian

Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi, dimana pemeriksaan kesehatan meliputi 4 aspek, yaitu aspek tata kelola, aspek profil risiko, aspek kinerja keuangan dan aspek permodalan.

Dampak Pandemi covid-19 terhadap keragaan koperasi di Kabupaten Bantul masih sangat terasa sehingga beberapa aspek belum bisa tumbuh kembali seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.188 Keragaan Koperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Koperasi	347	349	351	355	358
Jumlah Koperasi Aktif	295	297	299	301	276
Jumlah Karyawan (orang)	975	843	693	654	611
Anggota (orang)	160.921	160.658	142.908	128.372	155.556
Modal Sendiri (Rupiah)	246.042.269.333	258.292.291.608	331.476.874.701	281.002.247.587	244.301.397.591
Asset (Rupiah)	617.619.689.468	668.640.593.563	652.360.678.099	648.066.589.660	703.262.572.821
Volume Usaha (Rupiah)	421.499.538.845	459.346.775.492	429.146.007.088	395.239.478.408	443.998.019.817
Peningkatan Koperasi yang Berkualitas (%)	-	-	-	-5.35	3.65

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Keragaan koperasi di tahun 2022, jumlah koperasi ada kenaikan 3 koperasi namun jumlah yang aktif justru menurun 25 koperasi, keanggotaan meningkat 27 orang, namun jumlah karyawannya berkurang 43 orang. Modal sendiri menurun hingga Rp36.700.849.996,- assetnya meningkat Rp55.195.983.161,- dan volume usahanya juga meningkat hingga Rp48.758.541.409,- kualitas koperasi berhasil meningkat 9%.

## **b. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

### **1) Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Perkembangan UKM di Kabupaten Bantul menunjukkan hal yang positif bagi peningkatan aktivitas perekonomian. Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.189 Jumlah UMKM di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Usaha Mikro	29.098	30.486	86.361	85.099	78.549
2.	Usaha Kecil	11.992	12.201	-	1.674	1.683

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
3.	Usaha Menengah	7.058	7.114	-	60	62
<b>Jumlah</b>		<b>48.148</b>	<b>49.801</b>	<b>86.361</b>	<b>86.833</b>	<b>80.294</b>

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Usaha Mikro-Kecil dan Menengah (UMKM) dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Kriteria Usaha Mikro berubah dari modal usaha atau kekayaan bersih sebesar 50 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan menjadi modal usaha sampai dengan 1 milyar rupiah di luar tanah dan bangunan. Sedangkan hasil penjualan tahunan menurut UU NO. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sampai dengan 300 juta rupiah menjadi hasil penjualan tahunan sampai dengan 2 milyar rupiah.

Dengan adanya perubahan kriteria usaha mikro tersebut, perlu dilakukan updating data usaha mikro di Kabupaten Bantul. Namun karena pada tahun 2021 belum dilaksanakan updating data, maka data usaha mikro tahun 2021 masih dalam bentuk total UMKM dan belum sesuai dengan kriteria/klasifikasi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Usaha Mikro-Kecil dan Menengah (UMKM).

Updating data baru dapat dilaksanakan pada tahun 2022, sehingga data pada tahun 2022 telah sesuai dengan klasifikasi UMKM yang baru. Pada tahun 2023 TOTAL umkm 80.294 dengan rincian 78.549 Usaha Mikro, 1.683 Usaha Kecil dan 62 Usaha Menengah. Jumlah ini menurun jika dibandingkan tahun 2022 total UMKM 86.828 dengan rincian 85.099 Usaha Mikro, 1.674 Usaha Kecil dan 60 Usaha Menengah.

Penyerapan tenaga kerja pada UMKM dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 2.190 Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Usaha Mikro	58.225	59.890	259.083	123.782	63.434
2.	Usaha Kecil	36.048	36.925	-	31.431	1.086
3.	Usaha Menengah	112.977	113.884	-	72.932	110
<b>Jumlah</b>		207.250	210.699	259.083	228.145	64.630

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2023 terdapat penurunan penyerapan tenaga kerja, seiring dengan menurunnya jumlah UMKM.

## 2) Perizinan UMKM

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. Dengan adanya ketentuan baru maka IUMK sudah tidak berlaku dan digantikan dengan NIB.

**Tabel 2.191 Persentase Usaha Mikro Berizin di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Jumlah	Jumlah Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Berizin	Keterangan
1	2019	23.814	29.098	81,84%	IUMK
2	2020	-	30.486	-	OSS
3	2021	9.453	86.361	10,94%	NIB
4	2022	19.699	85.104	23,14%	NIB
5	2023	24581	92825	26,48%	NIB

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Sebelum berlakunya ketentuan NIB, perizinan dalam bentuk IUMK terdapat kenaikan dan relatif tinggi prosentase UM yang berizin. dengan berlakunya ketentuan perizinan berusaha melalui OSS dalam bentuk NIB prosentase UM yang berizin masih rendah, dikarenakan pemilik UM tidak dapat di integrasi ke dalam NIB sehingga pelaku UM harus mengajukan Kembali perizinan usahanya.

## 3) Kualitas UMKM

UMKM Naik kelas dapat diartikan dimana usahanya bisa semakin berkembang yang tentu diiringi dengan produktivitas, daya saing

meningkat. sehingga berpotensi mencapai lebih tinggi. Berikut beberapa indikator UMKM naik kelas adalah sebagai berikut:

- Total penjualan dan aset yang dimiliki haruslah meningkat.
- Usaha harus menjadi formal
- Jumlah karyawan meningkat
- Pelanggan yang dilayani meningkat
- Meningkatnya pajak yang dibayarkan
- Kualitas sumber daya manusia harus bertambah
- Produksi barang harus meningkat
- Administrasi dan keuangan meningkat
- Dana yang diakses dari perbankan meningkat.

Capaian UMKM naik kelas di tahun 2019-2023 di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.192 Capaian UMKM Naik Kelas di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Capaian UMKM Naik Kelas (unit)</b>	185	185	180	287	326

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Capaian kinerja UMKM yang naik kelas pada tahun 2023 sebesar 326 UMKM.

#### **2.1.3.2.12 Penanaman Modal**

##### **a. Investasi PMA dan PMDN**

Pertumbuhan nilai investasi di tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Target investasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 untuk Kabupaten Bantul sebesar Rp.348.678.672.473,-. Sementara nilai realisasi investasi tahun 2022 perhitungan secara total di Kabupaten Bantul telah melampaui target dengan capaian Rp486.378.805.000,- (139,49%). Perhitungan tahun 2022 kontribusi PMDN sebesar Rp15.000.000,- dari sektor primer, Rp.196.460.300.000,- dari sektor sekunder, dan Rp.201.130.100.000,- dari sektor tersier. Untuk PMA tahun 2022 kontribusinya sebesar Rp.64.448.720.000,- dari sektor sekunder dan Rp.24.324.685.000,- dari sektor tersier.

Perkembangan realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2.193 Realisasi Investasi Per Sektor Kabupaten Bantul Tahun 2022**

SEKTOR	PMDN		PMA	
	PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)
<b>SEKTOR PRIMER</b>	4	15.000.000	0	0
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	4	15.000.000	0	0
Kehutanan	0	0	0	0
Perikanan	0	0	0	0
<b>SEKTOR SEKUNDER</b>	106	196.460.300.000	60	64.448.720.000
Industri Makanan	36	64.528.900.000	0	0
Industri Tekstil	20	105.637.700.000	20	20.402.830.000
Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	3	1.872.500.000	2	838.040.000
Industri Kayu	4	940.700.000	3	456.330.000
Industri Kertas dan Percetakan	8	1.193.800.000	0	0
Industri Kimia dan Farmasi	23	8.691.700.000	2	266.910.000
Industri Karet dan Plastik	0	0	1	0
Industri Mineral Non Logam	3	4.048.800.000	1	0
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin & Peralatannya	0	0	0	0
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam	2	127.600.000	0	0
Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	0	0	0	0
Industri Lainnya	7	9.418.600.000	31	42.484.610.000
<b>SEKTOR TERSIER</b>	384	201.130.100.000	30	24.324.685.000
Listrik, Gas dan Air	0	0	0	0
Konstruksi	23	7.723.000.000	0	0
Perdagangan dan Reparasi	264	44.988.300.000	25	18.603.340.000
Hotel dan Restoran	16	19.900.000	1	76.055.000
Transportasi, Gudang dan Komunikasi	19	28.162.400.000	0	0
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	14	77.178.400.000	1	0
Pertambangan	2	0	0	0
Jasa Lainnya	46	43.058.100.000	3	5.645.290.000
<b>JUMLAH</b>	494	<b>397.605.400.000</b>	90	<b>88.773.405.000</b>

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2023

Capaian sektor tertinggi sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 masih pada sektor sekunder (industri tekstil, industri makanan, industri kayu, Industri Kimia dan Farmasi, Industri Kertas dan Percetakan, Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki).

Tabel 2.194 Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul Sampai dengan Tahun 2023

Tahun	Jumlah Proyek PMDN	Jumlah Proyek PMA	Nilai Investasi PMDN	Nilai Investasi PMA	Nilai Investasi PMDN+PMA	Pertumbuhan Nilai Investasi	Target Pertumbuhan*)	Capaian
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
s.d 2019	103	106	777.051.181.966,05	760.194.755.730,00	1.537.245.937.696,05	130.879.300.000,00	9,00	9,30
s.d 2020	338	96	808.479.481.966,05	786.267.395.730,00	1.594.746.877.696,05	57.500.940.000,00	9,25	3,74
s.d 2021	554	93	908.524.281.966,05	798.953.335.730,00	1.707.477.617.696,05	112.730.740.000,00	7,85	7,07
s.d 2022	1048	183	1.306.129.681.966,05	887.726.740.730,00	2.193.856.422.696,05	486.378.805.000,00	8,30	28,49
s.d 2023	1120	152	1.680.857.881.966,05	957.570.900.730,00	2.638.428.782.696,05	444.572.360.000,00		20,26

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2022, Februari 2024 (diolah)

\*) Target Perubahan Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026

Kurs yang digunakan : 1 US \$ = Rp. 14.350,- sesuai dengan APBN 2022

**b. Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja**

Rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Rasio ini mencerminkan daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja menunjukkan semakin besar daya tampung proyek investasi PMA/PMDN tersebut.

**Tabel 2.195 Rasio Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No.	Tahun	Jumlah Investor			Jumlah Tenaga Kerja			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
		PMA	PMDN	Jumlah	PMA	PMDN	Jumlah	
1	2019	103	106	209	17.146	11.834	28.980	138,66
2	2020	96	338	434	17.385	12.068	29.453	67,86
3	2021	93	554	647	18.058	13.168	31.226	48,26
4	2022	62	220	282	19.582	14.492	34.074	120,82
5	2023	87	279	366	21.395	15.555	36.950	137,54

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu, 2024

Pertumbuhan realisasi investasi memberikan dampak yang signifikan pada penyerapan tenaga kerja di sepanjang tahun 2023. Peningkatan penyerapan tenaga kerja dari PMA dan PMDN di Kabupaten Bantul sejumlah 2.876 orang. Sementara rasio daya serap tenaga kerja mencapai 137,54%, meningkat dari tahun 2022. Apabila dilihat dari data tersebut diatas selama periode tahun 2019-2023 Rasio Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul cenderung meningkat.

**Tabel 2.196 Daya Serap Investasi terhadap Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Tahun	TOTAL	PMDN				PMA			
		(Rp)	Perusahaan	PROYEK	INVESTASI (Rp)	TKI	Perusahaan	PROYEK	INVESTASI (Rp)	TKI
1	2019									
2	2020									
3	2021									
4	2022	486.378.805.000	220	494	397.605.400.000	1.324	62	90	88.773.405.000	1.524
5	2023									

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, 2024

Peningkatan realisasi investasi pada sektor sekunder (industri tekstil, industri makanan, industri kayu, Industri Kimia dan Farmasi, Industri Kertas dan Percetakan, Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki) di tahun 2022 mampu menciptakan peningkatan daya tampung tenaga kerja.

### **c. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

#### **1) Pemantauan**

Dalam Tahun 2022 telah ditarget sebanyak 116 Pelaku Usaha yang harus dipantau berhasil dicapai sebanyak 119 Pelaku Usaha. Dalam upaya pencapaian target realisasi penanaman modal dilaksanakan kegiatan Pemantauan Penanaman Modal kepada Pelaku Usaha berupa penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

#### **2) Pembinaan**

Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN di Tahun 2022 ditargetkan sejumlah 232 perusahaan dan terealisasi sejumlah 232 perusahaan. Pembinaan diberikan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, koordinasi, serta pendidikan dan pelatihan.

Bimbingan Teknis bagi Pelaku Usaha bertujuan meningkatkan pemahaman ketentuan dan keterampilan dalam pelaksanaan penanaman modal bagi pelaku usaha, sehingga pada akhirnya akan dapat mempermudah dalam rangka upaya peningkatan realisasi Investasi di Daerah khususnya Kabupaten Bantul.

#### **3) Pengawasan**

Pengawasan adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha yang dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS dan dikoordinir oleh

DPMPSTSP Kabupaten Bantul atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Target kegiatan pengawasan di tahun 2022 berupa berita acara pengawasan sejumlah 22 perusahaan dan dapat terealisasi sejumlah berita acara pengawasan 55 perusahaan.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinir oleh Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Bantul selama tahun 2022 mulai Bulan Maret 2022 s.d November 2022, telah dilakukan inspeksi lapangan terhadap 51 pelaku usaha sebagai tabel berikut.

**Tabel 2.197 Kegiatan Pengawasan Usaha Tahun 2022**

No	Sektor Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha	Jumlah BAP
1	Pariwisata	15	15
2	Perindustrian	16	17
3	Perdagangan	6	6
4	Kelautan dan Perikanan	2	2
5	Ketenagakerjaan	1	1
6	Kesehatan, Obat dan Makanan	12	13
7	Pendidikan dan Kebudayaan	1	1
8	Pertanian	2	2
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>	<b>57</b>

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, 2023

### 2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan di bidang pemuda dan olahraga di Kabupaten Bantul dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah organisasi dan prestasi olahraga yang dicapai oleh Kabupaten Bantul baik tingkat provinsi maupun nasional meskipun jumlah klub dan gedung olahraga yang ada masih terbatas. Melihat kelompok/organisasi olahraga yang semakin berkembang dan munculnya jenis olahraga baru yang dipertandingkan perlu upaya pemerintah dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia olahraga yaitu pelatih, wasit, pembina, klub olahraga dan atlet. Selain itu juga perlu melengkapi sarana dan prasarana olahraga yang dapat dimanfaatkan untuk latihan maupun pertandingan.

## a. Kepemudaan

### 1) Pemuda Pelopor

Pemuda pelopor merupakan pemuda-pemuda yang mempunyai jiwa kepeloporan di masyarakat dan lingkungan sekitar, mampu menginspirasi dan menggerakkan pembangunan masyarakat sesuai bidangnya masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Bantul menyelenggarakan seleksi pemuda pelopor tingkat kabupaten untuk mencari perwakilan pemuda yang akan dikirim untuk mengikuti seleksi pemuda pelopor tingkat DIY. Seleksi pemuda pelopor dibedakan dalam lima kategori bidang kepeloporan, yaitu: pendidikan; sosial budaya dan pariwisata; pengelolaan SDA dan lingkungan; pangan; dan inovasi teknologi. Seleksi pemuda pelopor bertujuan untuk memberikan penghargaan atas prestasi dan kontribusi kepeloporannya dalam kemajuan masyarakat di lingkungannya. Hal ini menjadi motivasi munculnya pemuda-pemuda pelopor yang lain di Kabupaten Bantul.

**Tabel 2.198 Jumlah Pemuda Pelopor di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten	5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2024

### 2) Organisasi Kepemudaan

Kapasitas Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan khususnya generasi muda yang tergabung dalam organisasi dan komunitas melalui pengembangan potensi pemuda dan peningkatan peran pemuda dalam pembangunan diantaranya melalui pelatihan bela negara, bakti pemuda dan sosial, expo pemuda, kader anti narkoba dan pemuda pelopor.

**Tabel 2.199 Data Organisasi Kepemudaan Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Jumlah Organisasi Kepemudaan Kabupaten</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
1. Penerima Hibah	25	24	21	21	21
2. Belum Menerima Hibah	21	22	25	25	25

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2023



Dari tahun 2019-2023 terdapat beberapa organisasi kepemudaan yang tidak memenuhi syarat dan tidak direkomendasikan oleh KNPI untuk memperoleh hibah pada tahun berikutnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

**b. Olahraga**

**1) Organisasi Olahraga**

Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Bantul tahun 2023 sejumlah 48 organisasi. Daftar nama organisasi olahraga di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.200 Organisasi Olahraga di Kabupaten Bantul**

No	Nama
1	Federasi Aero Sport Indonesia (FASI)
2	Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI)
3	Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI)
4	Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABSI)
5	Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI)
6	Ikatan Sport Sepeda Seluruh Indonesia (ISSI)
7	Perserikatan Baseball Softball Amatir Seluruh Indonesia (PERBASASI)
8	Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI)
9	Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI)
10	Perkumpulan Binaraga Fitnes Indonesia (PBFI)
11	Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI)
12	Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBSVI)
13	Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI)
14	Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI)
15	Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI)
16	Ikatan Olahraga Dansa Indonesia (IODI)
17	Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI)
18	Persatuan Drumband Seluruh Indonesia (PDBI)
19	Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (PERGATSI)
20	Persatuan Golf Indonesia (PGI)
21	Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI)
22	Federasi Hoki Indonesia (FHI)
23	Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI)
24	Federasi Olahraga Karate Do Indonesia (FORKI)
25	Persatuan Bela Diri Kempo Seluruh Indonesia (PERKEMI)
26	Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI)
27	Persatuan Menembak Sasaran & Berburu Seluruh Indonesia (PERBAKIN)
28	Persatuan Panahan Seluruh Indonesia (PERPANI)
29	Federasi Panjat Tebing Seluruh Indonesia (FPTI)

No	Nama
30	Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI)
31	Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI)
32	Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PERSANI)
33	Persatuan Rugby Union Indonesia (PRUI)
34	Persatuan Senam Seluruh Indonesia (PERSANI)
35	Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
36	Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI)
37	Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEROSI)
38	Tae Kwon Do Indonesia (TI)
39	Keluarga Olahraga Tarung Drajat (KODRAT)
40	Persatuan Lapangan Tenis Indonesia (PELTI)
41	Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)
42	Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA)
43	Indonesia Woodball Association (IWBA)
44	Hapkido (HI)
45	Kickboxing (KBI)
46	Pentaque (FOPI)
47	Youngmoodo (FYI)
48	PERWOSI

*Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2024*

Kabupaten Bantul mempunyai cabang olahraga unggulan antara lain: cabang olahraga panahan; senam; atletik; judo; sepak takraw; pencak silat, tae kwon do, gulat, tinju, tenis lapangan, dan tenis meja.

Cabang olahraga yang berkembang di masyarakat dan diselenggarakan dalam kompetisi olahraga antara lain: cabang olahraga bola voli; tenis meja; tenis lapangan; bulutangkis; futsal; pencak silat, *gate ball*, basket, *korfball*, *yoong moo do*, golf dan sepak bola putri.

### **c. Ketersediaan Sarana Prasarana Olahraga**

Sarana dan prasarana olahraga yang ada terdiri dari: Stadion Sultan Agung; Sirkuit Sepatu Roda; Lapangan Pacuan Kuda; Lapangan *Tennis Indoor*; Lapangan dan Tenis Dwi Windu. Sarana dan prasarana olahraga yang tersedia ini telah digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga. Lingkungan Stadion Sultan Agung juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengadakan acara Sunmor atau *Sunday Morning*, yang membolehkan masyarakat untuk berjualan dan mengadakan acara-acara olahraga massa, seperti senam pagi dan lain sebagainya. Pada masa pandemi Covid-19, kegiatan sunmor dan kegiatan lain di SSA yang

mengakibatkan kerumunan sempat dilarang dan dibatasi. Kegiatan baru dilaksanakan setelah masa PPKM turun dan tetap menjaga protokol kesehatan.

#### **d. Prestasi dalam Bidang Olahraga**

Dalam rangka mensosialisasikan dan memasyarakatkan olahraga maka Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengadakan berbagai macam kegiatan antara lain olahraga rekreasi yang dikemas dalam *Car Free Day* dan olahraga tradisional, serta mengikuti berbagai macam kompetisi olahraga seperti PORDA, POR, POPDA, Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA), POSPEDA dan lain sebagainya.

##### **1) Pekan Olahraga Daerah (PORDA)**

Penyelenggaraan PORDA dilaksanakan setiap dua tahun sekali.

- PORDA ke XV Tahun 2019 Kabupaten Bantul berada di posisi ketiga dan meraih 123 medali emas, 132 perak, dan 161 perunggu.
- PORDA tahun 2021 tidak terlaksana karena pandemi covid-19.
- PORDA ke XVI Tahun 2022 Kabupaten Bantul berada di posisi kedua dan meraih 135 medali emas, 138 perak, dan 165 perunggu.
- PORDA ke XVII Tahun 2023 tidak diadakan dan akan diadakan pada Tahun 2025

##### **2) Pekan Olahraga (POR) Pelajar dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)**

Pekan Olahraga (POR) Pelajar kabupaten merupakan kompetisi olahraga berjenjang yang mempertandingkan 23 cabang olahraga dengan peserta pelajar SD, SMP dan SMA. Kegiatan ini merupakan seleksi untuk memilih wakil kabupaten Bantul maju ke POPDA DIY.

**Tabel 2.201 Perolehan Medali pada Pekan Olahraga Pelajar Tingkat DIY Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah	Peringkat
1	2019	75	68	56	209	1
2	2020	96	77	72	245	1
3	2021	-	-	-	-	-
4	2022	92	62	68	222	1
5	2023	148	81	157	383	1

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2023

Pada ajang POPDA DIY Tahun 2019-2023, Kabupaten Bantul berhasil mempertahankan prestasi sebagai **Juara Umum**.

### 3) Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS)

NPC (National Paralimpiade Committee) Indonesia Pekan Paralimpik Nasional merupakan salah satu sarana peningkatan mutu prestasi difabel. Daftar prestasi Pekan Paralimpik tersaji dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.202 Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Emas	Perak	Perunggu	Keterangan
1	2019	4	5	6	NPC
2	2020	2	-	-	Kupusrehab Cup
3	2021	9	8	22	NPC Papua
4	2022	-	-	-	Tidak dilaksanakan
5	2023	1	3	1	NPC

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2024

#### 2.1.3.2.14 Statistik

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul melalui tahapan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data dengan melibatkan semua perangkat daerah dan Badan Pusat Statistik. Produsen data yang berpartisipasi dalam penyediaan data ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul Tahun 2023.

**Tabel 2.203 Jumlah Produsen Data Tahun 2019 – 2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Perangkat Daerah	0	37	54	53	53
Otoritas/Lembaga/Instansi Vertikal/ BUMN/BUMD/ Organisasi lainnya	0	0	13	25	26
Kalurahan	0	0	0	75	75
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>67</b>	<b>153</b>	<b>154</b>

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2024

**Tabel 2.204 Jumlah Kegiatan Statistik menurut Cara Pengumpulan Data Tahun 2021-2023**

No	Cara Pengumpulan Data	2021		2022		2023	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pencacahan Lengkap	0	0,00%	1	1,22%	19	14,07%
2	Survei	43	53,75%	33	40,24%	62	45,93%
3	Kompilasi Produk Administrasi	37	46,25%	48	58,54%	54	40,00%
4	Cara lain sesuai dengan perkembangan TI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total		80	100,00%	82	100,00%	135	100,00%

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2024

Kabupaten Bantul telah membangun Portal Data Bantul yang mencakup portal data statistik sektoral dan portal data geospasial (geoportal) dengan akses <http://data.bantulkab.go.id/>. Portal Data Bantul telah terhubung ke geoportal nasional (<https://tanahair.indonesia.go.id/>) dan portal data nasional (<https://data.go.id/>).

**Tabel 2.205 Jumlah Penyebarluasan Data Statistik dan Data Geospasial melalui Portal Data Bantul Tahun 2021-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Data Statistik	5.507	35.643	50.231	49.131	39.833
Data Geospasial	0	157	112	1.015	1.108

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2024

Tolak ukur kinerja yang dihasilkan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia, diantaranya sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.206 Tolak Ukur Kinerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Tahun 2019-2023**

Indikator/Tolak Ukur Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase data geospasial yang dipublikasi dari daftar data geospasial yang ditetapkan	%	0	58,15	53,7	96,88	105,76
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data	%	N/A	100	100	100	100
Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	0	95,48	97,4	100	100
Persentase kelengkapan metadana kegiatan statistik	%	83,75	100	70,53	92,68	91,94
Persentase kelengkapan metadana variabel dari kegiatan statistik	%	83,75	100	70,53	92,68	36,63
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	sistem	1	2	2	4	4
Tersedianya buku profil daerah	buku	1	1	1	1	1
Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan	kegiatan	42	43	35	33	62
Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	kegiatan	25	37	113	48	54
Jumlah survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	kegiatan	0	0	1	8	42
Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	kegiatan	0	0	0	5	7

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2024

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2023 Kabupaten Bantul dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral menghasilkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah sebesar 2,49 dengan predikat “Cukup”.

**Tabel 2.207 Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain Tahun 2023**

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
Prinsip SDI	28%	2,60	1,81	2,50
Kualitas Data	24%	2,60	1,70	2,70

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	1,82	2,32
Kelembagaan	17%	2,60	1,85	2,48
Statistik Nasional	12%	2,60	1,74	2,33
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	1,78	2,49

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2024

### 2.1.3.2.15 Persandian

#### a. Penyelenggaraan Pengamanan Persandian

Penyelenggaraan Pengamanan Persandian merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakikat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara.

Untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen di pemerintahan Kabupaten Bantul dilakukan dengan kegiatan berupa:

##### 1) Pengamanan Berita Rahasia

Sesuai peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pengamanan keluar masuk berita rahasia baik dari pusat maupun provinsi ke Kabupaten Bantul dan sebaliknya mutlak dilakukan. Proses penyandian dilakukan terhadap berita yang akan dikirim dan berita sandi yang masuk sebelum didistribusi ke alamat.

Proses penyandian harus dilakukan terhadap berita yang akan dikirim dan pembukaan berita sandi menjadi berita terang dilakukan terhadap berita sandi yang masuk sebelum didistribusi ke alamat. Kegiatan ini hanya bisa dilakukan oleh *sandi-man* karena hanya petugas sandi yang memiliki akses sandi terhadap peralatan sandi maupun sistem kunci yang telah ditetapkan secara nasional oleh BSSN RI sebagai lembaga tingkat pusat yang bertanggung jawab atas persandian secara nasional.

##### 2) Sterilisasi Ruang Pimpinan dan OPD yang Rentan Penyadapan.

Deteksi adanya potensi kebocoran informasi dengan cara penanaman peralatan penyadap di ruang kerja pejabat, atau adanya sinyal luar yang masuk ke ruang kerja pejabat.

**Tabel 2.208 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Kontra Penginderaan (Sterilisasi Ruang) Tahun 2022-2023**

Uraian	2022	2023
Jumlah Area Pengamanan (Perangkat Daerah)	10	11
Titik Pengamanan Persandian (Ruang Kerja dll)	29	23

Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika, 2023

Sterilisasi ruangan Tahun 2023 dititikberatkan pada Kapanewon dengan titik lokusnya hanya memiliki 1 ruangan yang difungsikan untuk ruangan pimpinan sekaligus ruang rapat. Jumlah perangkat daerah yang dilakukan sterilisasi ruangan dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan dari 10 perangkat daerah menjadi 11 perangkat daerah.

### 3) Penyelenggaraan Layanan Telekomunikasi Telepon dan Radio Komunikasi Internal Pemda.

Penyelenggaraan dan pengelolaan jaringan telepon di Kabupaten Bantul dilaksanakan bagi semua OPD dan 17 kapanewon di Kabupaten Bantul. Sampai dengan Tahun 2022 sambungan telepon ekstensi baik analog maupun IPPhone jumlah total 303 sambungan.

Sedangkan untuk layanan komunikasi radio saat ini telah digelar komunikasi radio dengan frekuensi VHF dan UHF sejumlah 4 jalur frekuensi. Pemanfaatan oleh Dinas Sosial, BPBD, Satpol PP, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Lingkungan Hidup. Gelar jaring komunikasi radio tersebut dengan memanfaatkan repeater dan link repeater di enam titik lokasi.

### 4) Penyediaan Filter Repeater RPU

Penambahan *repeater* dilakukan pada titik-titik strategis yang tidak terjangkau oleh sinyal radio akibat *blind spot*. Tujuan penambahan *repeater* adalah menghindari adanya *signal loss* ketika informasi menempuh jarak yang cukup jauh, atau menemui halangan seperti gunung atau bukit, sehingga memungkinkan tercapainya komunikasi yang lebih efektif dengan kecepatan pengiriman yang lebih *real-time* demi kelancaran komunikasi.



### 5) Layanan Call Center (Panggilan Darurat) 112

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 diatur tentang layanan nomor tunggal panggilan darurat atau call center harus menggunakan nomor 112, diselenggarakan di tingkat nasional dan daerah serta dilaksanakan untuk penanganan keadaan darurat yang meliputi kebakaran, bencana, kecelakaan, kesehatan, ketentraman dan kriminal.

Panggilan darurat 112 merupakan layanan untuk memudahkan masyarakat melakukan panggilan secara cepat untuk melaporkan berbagai permasalahan seperti kebakaran, gangguan keamanan, masalah kesehatan dan lain-lain. Dalam pengoperasiannya siap untuk melayani dalam waktu 24 jam dan telah terkoordinasi dengan semua pihak dalam penanganannya. Tujuan panggilan darurat 112 diantaranya, mempermudah masyarakat melakukan pelaporan kondisi darurat, mempercepat penanganan kondisi darurat oleh satuan terkait, mengurangi resiko terhadap gangguan dari masing-masing individu maupun masyarakat dan mengurangi dampak bahaya yang ditimbulkan oleh keadaan darurat.

Layanan Panggilan Darurat 112 Kabupaten Bantul dapat dikelompokkan ke dalam Panggilan Valid, *Prank* dan *Ghost*. Jumlah aduan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.209 Jumlah Aduan/Panggilan Valid, Prank dan Ghost Call Tahun 2020-2022**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Aduan/Panggilan Valid	214	235	9.453	11.347
2	Jumlah <i>Prank Call</i>	27.325	8.576	1.839	852
3	Jumlah <i>Ghost Call</i>	3.416	1.010	522	830

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2023

Penurunan tingkat panggilan Prank dan Ghost yang signifikan salah satunya dikarenakan adanya pembaruan sistem Layanan Nomor Tunggal Darurat 112. Sejak launching pada 18 November 2019 s.d 31 Maret 2021 aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi Versi 2 yang diberi nama ESA 112. Sementara per tanggal 1 April 2021 digunakan aplikasi Versi 3 dengan nama SAKTI 112.

Jumlah aduan/panggilan valid pada Tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan Tahun 2022 yaitu dari 9.453 menjadi 11.347, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul telah memperluas jaringan penyebaran informasi tentang *Call Center 112* Kabupaten Bantul

**Tabel 2.210 Jumlah Panggilan Masuk Call Center 112 Menurut Jenis Kejadian Tahun 2020-2023**

No	Kejadian	2020	2021	2022	2023
1.	Kebakaran	10	10	10	26
2.	Kecelakaan	99	116	110	144
3.	Kesehatan	11	9	8	32
4.	Evakuasi Hewan Liar/ Buas/ Berbisa	N/A	12	20	63
5.	Pohon Tumbang	3	11	11	5
6.	Banjir	N/A	0	0	0
7.	Bencana Alam	N/A	2	0	0
8.	Keamanan dan Ketertiban Umum/ Masyarakat	N/A	6	8	11
9.	Kerusuhan/ Tawuran	N/A	3	1	0
10.	Kriminalitas	N/A	1	2	3
11.	Kekerasan terhadap Perempuan/ Anak/ KDRT	N/A	0	0	0
12.	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	N/A	2	0	2
13.	Tiang Listrik Rubuh	N/A	1	2	1
14.	Kegawatdaruratan Lainnya	N/A	1	5	15
15.	Covid-19	28	39	2	N/A
16.	Informasi	2	2	0	N/A
17.	Penemuan mayat	N/A	N/A	0	1
18.	Kepolisian	3	N/A	N/A	N/A
19.	Kamtibmas	10	N/A	N/A	N/A
20.	Kebencanaan	8	N/A	N/A	N/A
21.	Binatang Buas	18	N/A	N/A	N/A
22.	KDRT	2	N/A	N/A	N/A
23.	Ambulance	27	27	12	N/A
	<b>Jumlah</b>	<b>221</b>	<b>242</b>	<b>192</b>	<b>303</b>

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2024

Tiket kejadian yang tercatat pada sistem bersumber dari panggilan langsung dari masyarakat dan tiket yang dibuat secara manual oleh petugas *call taker* 112 berdasarkan informasi yang diperoleh melalui media lain, misalkan radio, media sosial, atau melihat langsung kejadian. Pada

update Aplikasi SAKTI 112 di tahun 2021, beberapa penyesuaian dilakukan terkait jenis kejadian yang ada.

Tabel 2.211 Rekapitulasi Tindak Lanjut OPD terhadap Panggilan Darurat 112

No	Unit Kerja/ OPD	2020	2021	2022	2023
1	Dinas Kesehatan	108	149	180	233
2	BPBD	43	8	47	116
3	Kepolisian	18	8	148	201
4	Satpol PP	4	103	38	125
5	Dinas Sosial	2	20	29	51
6	Ambulance	87	N/A	N/A	N/A
	<b>Jumlah</b>	<b>262</b>	<b>288</b>	<b>442</b>	<b>726</b>

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2024

Satu tiket kejadian dapat direspon oleh lebih dari 1 perangkat daerah, sebagai contoh pada kejadian kerusakan, perangkat daerah yang merespon adalah Kepolisian, Satpol PP, dan bahkan Dinas Kesehatan untuk menangani korban.

## b. Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi

### 1) Pengamanan Sistem Elektronik

Berjalannya proses menuju *Smart City* dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sangat tinggi ketergantungannya dengan kualitas dan stabilitas jaringan internet. Hal ini tidak bisa terpisahkan dengan pengamanan terhadap sistem elektronik yang digunakan. Dimana ketika semua layanan maupun transaksi birokrasi dilakukan melalui sistem elektronik (aplikasi), maka semua hal tersebut akan menjadi keos ketika terjadi insiden terhadap sistem elektronik (aplikasi) yang digunakan. Menjadi keharusan untuk melakukan *scanning* sistem elektronik yang akan dipublish, deteksi dini terhadap kerentanan sistem elektronik serta *handling* terhadap gangguan yang terjadi.

Kegiatan pengamanan tersebut dilaksanakan dengan pengelolaan berbagai aspek infrastruktur, sistem, dan SDM antara lain melalui:

- Webinar, Workshop dan Bimtek terkait pengamanan sistem elektronik;
- Pendataan dan tindak lanjut identifikasi sistem elektronik yang *hosting* di Pusat Data Kabupaten Bantul;

- Penyusunan Dokumen dan Sertifikasi ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan ruang Lingkup Layanan Pusat Data Kabupaten Bantul;
- Pengajuan Verifikasi Penilaian Mandiri Indeks KAMI ke Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN-RI);
- Kegiatan Asesmen Keamanan Informasi, untuk sistem elektronik secara berkala dan yang baru akan di-*hosting* di Pusat Data Kabupaten Bantul,
- Kerja sama pelaksanaan Asesmen Keamanan Jaringan dan Sistem Elektronik dengan BSSN-RI;
- Pelatihan Audit Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pada Tahun 2023 Kabupaten Bantul telah memperoleh Sertifikasi ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan ruang lingkup Layanan Pusat Data Kabupaten Bantul.

## 2) Penanganan Insiden Keamanan Informasi

Insiden keamanan informasi merupakan gangguan terhadap suatu sistem atau jaringan elektronik yang berdampak merugikan sistem dan jaringan serta pengguna sistem dan jaringan tersebut. Kerugian dapat berupa terganggunya layanan publik secara elektronik, kerusakan perangkat dan hilangnya data penting maupun rahasia yang tersimpan pada sistem elektronik.

Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan layanan pemberian peringatan terhadap laporan insiden siber, layanan tersebut diantaranya berupa: layanan penanggulangan dan pemulihan, layanan penanganan kerawanan dan layanan penanganan artifak. Rekaman insiden yang terjadi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.212 Insiden Keamanan Informasi Tahun 2020-2023**

No.	Jenis Sistem Elektronik	Jenis Serangan	Penanganan
<b>Tahun 2020</b>			
1	Sistem Informasi, Layanan dan Web Profil	<i>Defacement</i> (Perubahan Tampilan Web)	<i>Take down</i> sementara selama upgrade aplikasi; perbaikan

No.	Jenis Sistem Elektronik	Jenis Serangan	Penanganan
3	Sistem Informasi dan Layanan berbasis desktop dengan database lokal	<i>Ransomware</i>	<i>Recovery</i> menggunakan <i>data backup</i>
2	Sistem Informasi	Akses server via web menggunakan <i>backdoor</i> yang ditanamkan di server Defacement (Perubahan Tampilan Web) Terdeteksi Malware/ Backdoor di server	Perbaikan Take down permanen,
3	<i>Abuse Report</i>	<i>Malware</i> pada perangkat end point (pc/ laptop)	<i>Tracing</i> dan blok ke ip tujuan serangan
<b>Tahun 2021</b>			
1.	<i>Abuse Report</i>	IP / perangkat dalam jaringan internal Pemkab digunakan untuk menyerang Server lain	Melakukan blokir supaya tidak dapat mengakses server yang diserang. Melakukan pelacakan terhadap perangkat penyerang dan melakukan scan malware.
2.	Email	<i>Phishing Mail</i> <i>Email Spam Attack</i> dari fitur komentar web profil	Menginformasikan ke pemerintah kab/kota pemilik email yang digunakan untuk phishing Menon-aktifkan fitur email, Web Profil pengganti dalam pengembangan
3.	Web Profil	<i>Defacement</i>	Shutdown, mengembangkan web profil baru
<b>Tahun 2022</b>			
1	<i>Abuse Report</i>	<i>Server Abuse (Zombie)</i>	Blokir Akses IP
2	Web/ Sistem Elektronik	<i>Exploit File Upload</i> <i>Web Defacement</i>	Asesmen dan Perbaikan Aplikasi Shutdown Aplikasi
3	Web Profil	<i>Web Defacement</i> <i>DDOS (Distributed Denial of Service)</i> <i>Web Defacement dan Ransom</i>	Shutdown Aplikasi Hardening Firewall Asesmen dan Pemulihan Aplikasi
4	Email	Notifikasi Breached Password dari BSSN Email Phishing dari domain go.id	Update Password dan Password Strength Enforcement Eskalasi ke BSSN
<b>Tahun 2023</b>			
1	Web/ Sistem Elektronik	Web Defacement - Situs Perjudian Ransom Database	Asesmen dan Perbaikan Aplikasi Take down aplikasi karena sudah tidak digunakan Pembatasan Akses Aplikasi
2	Akun Email Dinas	Phishing email	Reset Kredensial akun dan Edukasi kepada Admin
3	Akun Media Sosial Perangkat Daerah	Pembajakan Akun	Pemulihan Akun Berhasil
4	<i>Malware</i>	<i>Malware</i>	Scan Antivirus dan Antimalware Pada Perangkat Terindikasi

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

### 3) Pengamanan Sistem Elektronik

Dalam rangka pencegahan insiden siber dilakukan penilaian keamanan aplikasi yang ada di server pemerintah Kabupaten Bantul. Penilaian menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang senantiasa berorientasi pada keamanan data, informasi dan aset secara menyeluruh dan berkelanjutan serta langkah-langkah mitigasi risiko keamanan yang mungkin terjadi.

Pelaksanaan asesmen dapat memberikan penilaian terhadap celah kerentanan yang ditemukan pada jaringan maupun aplikasi dan memberikan rekomendasi serta solusi dari celah kerentanan tersebut, pengujian celah kerentanan aplikasi untuk meminimalisir dan menghindari kebocoran informasi, memverifikasi terhadap kemungkinan celah kerentanan pada aplikasi dan infrastruktur dari perspektif eksternal, yaitu dari Internet dan mengetahui efektivitas sistem pendeteksi serangan dini, pencegahan dan kemampuan dalam penanganan insiden. Hasil pelaksanaan asesmen pada tahun 2020 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.213 Rekapitulasi Asesmen Keamanan Aplikasi Tahun 2020-2023**

No	Kategori	Deskripsi		Jumlah
<b>2020</b>				
1	Sistem Elektronik Baru			237
	a. Layak	Sudah dilakukan assessment dan atau telah memenuhi standar keamanan	109	
	b. Rawan	Sudah dilakukan assessment dan sedang dalam tahap dilakukan perbaikan	10	
	c. Pending	Sistem Elektronik lama dan atau belum dilakukan assessment	118	
2	Sistem Elektronik Lama			30
<b>Total Sistem Elektronik yang dinilai</b>				<b>267</b>
<b>2021</b>				
1	Sistem Elektronik Baru			18
	a. Layak	Telah selesai penilaian dan perbaikan	3	
	b. Rawan	Telah selesai penilaian namun masih dalam tahap perbaikan	7	

No	Kategori	Deskripsi	Jumlah
	c. Pending	Dijadwalkan penilaian namun masih dalam pengembangan	8
2	Sistem Elektronik Lama		260
	a. Layak	Telah selesai penilaian dan perbaikan	109
	b. Rawan	Telah selesai penilaian namun masih dalam tahap perbaikan	151
<b>Total Sistem Elektronik yang dinilai</b>			<b>278</b>
<b>Tahun 2022</b>			
1	Telah Memenuhi Kriteria Keamanan Informasi		204
	a	Lama	102
	b	Tahun Berjalan	102
2	Proses Asesmen dan atau perbaikan		19
	a	Lama	6
	b	Tahun Berjalan	13
3	Proses Koordinasi Asesmen		35
<b>Total Sistem Elektronik yang dinilai</b>			<b>258</b>
<b>Tahun 2023</b>			
1	Telah Memenuhi Kriteria Keamanan Informasi		207
	a	Lama	190
	b	Tahun Berjalan	17
2	Proses Asesmen dan atau perbaikan		45
	a	Lama	9
	b	Tahun Berjalan	36
3	Proses Koordinasi Asesmen		9
<b>Total Sistem Elektronik yang dinilai</b>			<b>261</b>

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2024

Pada Tahun 2022, dilakukan pendataan ulang Sistem Elektronik yang ada pada Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bantul, dalam rangka mendukung implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi berbasis ISO 27001:2022. Hasil atas pendataan tersebut mengubah metode pengkategorian sistem elektronik serta mengurangi jumlahnya secara cukup signifikan karena terdeteksi sistem-sistem yang tidak aktif digunakan yang ditindaklanjuti dengan pe-non-aktifan (*take down*).

### **c. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan disruptif pola bisnis di era siber yang kini terus terjadi secara dinamis memunculkan risiko dan celah keamanan informasi. Digitalisasi

proses kerja menjadikan keamanan informasi menjadi hal yang berpengaruh pada keseluruhan proses bisnis sehingga sangat penting untuk menjadi perhatian utama. Keterlibatan pihak ketiga dalam *supply chain* layanan perusahaan menimbulkan risiko baru. Layanan berbasis *cloud* memberikan peluang efisiensi dan peningkatan kinerja yang sangat signifikan bagi perusahaan namun juga menimbulkan risiko baru terkait data yang berada pada pengendalian pihak penyelenggara layanan. Beberapa aspek kebutuhan keamanan baru tersebut perlu dimitigasi agar bisnis dapat terus berjalan dengan baik.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001, yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan dan Perlindungan Data Pribadi.

Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada Pimpinan Instansi. Implementasi Indeks KAMI dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi.

**Tabel 2.214 Hasil Pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMI)  
Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023**

No	Area Evaluasi	2020*		2021		2022		2023**	
		Skor	Maks	Skor	Maks	Skor	Maks	Skor	Maks
1.	Tata Kelola Keamanan Informasi	82	126	120	126	120	126	102	126
2.	Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi	33	54	63	72	63	72	41	72
3.	Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi	109	159	140	159	143	159	144	159
4.	Pengelolaan Aset Informasi	41	129	117	168	117	168	154	168



No	Area Evaluasi	2020*		2021		2022		2023**	
		Skor	Maks	Skor	Maks	Skor	Maks	Skor	Maks
5.	Teknologi dan Keamanan Informasi	65	111	89	120	88	120	114	120
<b>Nilai (Standar Indeks KAMI)</b>		<b>330</b>		<b>529</b>		<b>531</b>		<b>555</b>	

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2024

Keterangan :

\*) Pengukuran menggunakan Indeks KAMI v4.1

\*\*) Skor merupakan Hasil Verifikasi BSSN-RI

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat keamanan informasi yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, indeks tingkat keamanan informasi Kabupaten Bantul mencapai 531 di tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 yaitu 529. Kemudian di tahun 2023, dilaksanakan verifikasi oleh BSSN-RI dengan ruang lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul serta Layanan Pusat Data Kabupaten Bantul dengan Sistem Elektronik Surat Bantul (SURBAN) untuk pengelolaan Surat Elektronik di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan mendapatkan skor 555 dengan predikat Cukup Baik. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut juga merupakan dampak atas implementasi ISO 27001:2022 pada Pusat Data Kabupaten Bantul.

#### **2.1.3.2.16 Kebudayaan**

Kebudayaan merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan definisi dari Kemdikbud (2013), kebudayaan sendiri merupakan gagasan, perilaku, serta hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Proses interaksi berbagai macam budaya yang berjalan dalam waktu lama, terikat, dan terstruktur satu sama lain akan membentuk sistem kebudayaan (Kemdikbud, 2013). Kebudayaan memiliki peran yang cukup penting dalam jalannya pembangunan. Dalam hal ini, kebudayaan berfungsi sebagai penguat identitas jati diri bangsa yang berorientasi pada masa depan. Kebudayaan merupakan dasar untuk menentukan arah kebijakan dan arah pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah. Oleh karena itu, perhatian daerah terhadap kebudayaan lokal yang ada di wilayahnya menjadi hal yang penting untuk dikaji.

Secara eksplisit, hal ini tertera dalam UU Pemajuan Kebudayaan No. 5 Tahun 2017 yang membahas tentang peranan kebudayaan yang digunakan di segala lini kehidupan. Proses pemajuan kebudayaan dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional Indonesia. Sesuai undang-undang, terdapat 10 objek pemajuan kebudayaan, yakni tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, situs, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Pemajuan kebudayaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan UU Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tersebut, penting bagi tiap-tiap daerah untuk mengelola objek-objek budaya di wilayahnya. Berdasarkan undang-undang tersebut pula, tiap daerah memiliki kebijakan masing-masing terkait pengelolaan objek-objek kebudayaan. Budaya sebagai salah satu potensi penyangga utama wisata di Kabupaten Bantul berupa warisan budaya benda maupun warisan budaya tak benda berbasis wisata *heritage* dan obyek wisata cagar budaya. Upaya pelestarian budaya yang dilakukan meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, nilai tradisi budaya dan warisan budaya.

Pembangunan bidang seni budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni serta budaya merupakan dua hal yang saling berkaitan, setiap seni mengandung kebudayaan yang khas dan setiap kebudayaan pasti memiliki nilai seni yang indah.

#### **a. Pelestarian Seni dan Adat Tradisi**

Dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah perlu dilakukan upaya untuk mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat. Inventarisasi potensi masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok kesenian dan pembinaan kelompok akan mengoptimalkan tumbuh dan berkembangnya peran serta masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2020 tentang Nomor Induk Kesenian, pada pasal 5, ayat: (3) Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) dalam melaksanakan tugasnya melakukan inventarisasi potensi peran serta masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok kesenian. (4) Pelaksanaan inventarisasi potensi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pencatatan dan pemberian Nomor Induk Kesenian (NIK). Dengan berlakunya Peraturan Bupati tersebut maka NIK yang telah diterbitkan sebelum peraturan Bupati tersebut terbit diminta untuk melakukan pendaftaran kembali.

Dalam rangka menunjang kegiatan pemeliharaan dan pengembangan budaya Daerah, perlu dilakukan inventarisasi potensi masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok seni budaya sehingga dapat berperan serta dalam pelestarian dan pengembangan budaya Daerah. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2020 tentang Nomor Induk Kesenian belum mengatur pelayanan pemberian Nomor Induk terhadap seluruh objek kebudayaan, sehingga ditetapkanlah Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Nomor Induk Kebudayaan.

Adapun Jumlah Kelompok Seni yang terdaftar sejak tahun 2013 (Saat itu masih Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul) sampai dengan tahun 2022 terangkum pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.215 Data Register Kelompok Seni dan Budaya di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Jumlah		Keterangan		
		Per Tahun	Sampai Dengan Tahun N			
1	TAHUN 2019	223	Register	1.120	Register	
2	TAHUN 2020	258	Register	1.378	Register	Jumlah Kelompok Seni yang terdaftar belum berdasarkan Peraturan Bupati Bantul tentang NIK
3	TAHUN 2021	307	Register	1.685	Register	Jumlah Kelompok Seni terdaftar sebelum dan sesudah diberlakukan Registrasi sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Nomor Induk Kesenian sampai dengan Desember 2021

No	Tahun	Jumlah				Keterangan
		Per Tahun		Sampai Dengan Tahun N		
NIK Penyesuaian dengan Peraturan Bupati						
	Tahun 2021	307	Register	307	Register	Jumlah NIK baru dan yang sudah diperbaharui sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Nomor Induk Kesenian dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Nomor Induk kebudayaan
4	Tahun 2022	582	Register	899	Register	
5	Tahun 2023	367	Register	1.256	Register	

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2024

Sumber Data Register Nomor Induk Kesenian (NIK) yang selanjutnya disebut Nomor Induk Kebudayaan (sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 tahun 2022 pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2022 sejumlah 899 NIK. Untuk NIK yang terbit sebelum peraturan tersebut tetap berlaku, dan wajib memperbaharui pada saat mengajukan fasilitasi atau akan mendapatkan pembinaan/pendampingan. Registrasi ulang diperlukan sebagai bentuk update data kelompok seni/kelompok kebudayaan yang ada di Kabupaten Bantul, mengingat adanya kelompok yang dimungkinkan sudah tidak aktif lagi.

Pembinaan kelompok seni yang telah terdaftar dilaksanakan melalui pembinaan, fasilitasi pentas, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai agar kelompok seni budaya semakin mengembangkan karyanya. Pemerintah telah mempersiapkan pembangunan gedung/sanggar seni/taman budaya yang dapat memfasilitasi kelompok seniman dan budayawan untuk terus mengapresiasi karya-karyanya dengan rencana pembangunan Taman Budaya Kabupaten Bantul yang saat ini telah selesai dengan pengadaan lahan, FS, DED, dan Dokumen Lingkungan. Diharapkan Tahun 2024 sudah dimulai proses pembangunannya melalui Dana keistimewaan DIY.

Selain itu, seni budaya merupakan penunjang sektor pariwisata di Kabupaten Bantul maka perlu dikembangkan wisata budaya yang merupakan salah satu pilar pariwisata sekaligus dapat melestarikan seni

dan budaya lokal. Fasilitasi kelompok seni meliputi festival dan pentas seni yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Aktivitas seni budaya tahun 2020-2021 dibatasi karena Pandemi Covid-19 dan pada tahun 2022 geliat aktivitas seni budaya sudah dimulai.

Kegiatan pelestarian Seni, Adat Tradisi yang telah dilaksanakan adalah:

- 1) Fasilitasi Adat dan Tradisi di Rintisan Desa Budaya
- 2) Fasilitasi Kesenian dan Permainan Tradisional di Rintisan Desa Budaya
- 3) Fasilitasi Komunitas Seni Budaya Lokal
- 4) Fasilitasi HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME)
- 5) Pembinaan Wayang Kulit
- 6) Fasilitasi Pentas Kelompok Seni
- 7) Upacara Adat Tradisi
- 8) Meti Dusun

Sebagai upaya regenerasi dan pembinaan kebudayaan kedepan Sanggar Seni akan difasilitasi, mengingat dari sanggar dasar-dasar seni budaya diajarkan dan dari sana akan lahir bibit-bibit muda pelestari seni budaya.

Fasilitasi kelompok seni tahun 2019 merupakan kegiatan Provinsi (pembiayaan melalui sumber pendanaan Dana Keistimewaan yang disalurkan melalui Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY. Pada dimulai tahun 2020 melalui BKK Dana Keistimewaan Kabupaten Kota, kegiatan fasilitasi seni dilaksanakan Kabupaten Bantul seperti data pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.216 Rekapitulasi Fasilitasi Kelompok Seni di Kabupaten Bantul Tahun 2019 – 2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Fasilitasi Kelompok Seni	-	148	285	175	218

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2024

Tahun 2023, sejumlah 218 fasilitasi kelompok seni budaya dilakukan dengan pentas di area publik/langsung diharapkan upaya

pemberdayaan masyarakat melalui seni budaya/pentas seni dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Pada setiap kegiatan pentas tersebut akan menghadirkan /mengundang penonton dan pedagang (lokal maupun keliling), dipastikan ada aktivitas ekonomi yang terjadi.

**Tabel 2.217 Fasilitasi Pentas Seni di Kabupaten Bantul Tahun 2019 – 2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Fasilitasi Pentas Seni Budaya	228	239	324	211	450

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2024

Disamping fasilitasi kelompok seni, maupun pentas budaya, pembinaan komunitas/lembaga sebagai wadah dari aktivitas seni budaya di kabupaten Bantul juga dilaksanakan, yaitu fasilitasi bagi:

- Seniman Budayawan
- Komunitas Keroncong
- Komunitas Pasiban
- Komunitas Jathilan
- Komunitas Macapat
- Komunitas Teater
- Komunitas Kethoprak
- Komunitas Tari/Sanggar
- Komunitas Seni Lukis
- Komunitas Film

#### **b. Warisan Budaya dan Cagar Budaya**

Warisan budaya adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni. Warisan budaya dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat dan mengalami perkembangan dari generasi ke generasi, dalam alur suatu tradisi. Pemeliharaan warisan budaya meliputi warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku

kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. Benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a) berusia 50 lima puluh tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun; memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Register Nasional Cagar Budaya, dilakukan dengan tahapan: a). Pendaftaran; b) Pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya; c). Penetapan; d). Pencatatan; e). Pemeringkatan; f). Penghapusan.

Warisan budaya benda di Kabupaten Bantul yang dilestarikan dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Keputusan Gubernur DIY ataupun Keputusan Bupati Bantul sejak tahun 2000 sampai 2022 sejumlah 169 cagar budaya. Cagar Budaya tersebut tercatat dalam kepemilikan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Keraton Surakarta, Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) DIY, Badan Pengelola Sumber Daya Air (BPSDA) DIY, PT KAI, PLN DIY, Dinas Kebudayaan DIY, UGM, DPUPKP Bantul, Dinas Perdagangan Bantul, Dinas Sosial Bantul, Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Bantul, Yayasan Kanisius, Pengurus Gereja, milik pribadi ataupun pemerintah kalurahan.

Cagar Budaya di Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2023 disajikan secara terperinci pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.218 Jumlah (Kumulatif) Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten Bantul sampai dengan Tahun 2023**

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penetapan Cagar Budaya	100	126	149	169	191

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2024

Warisan budaya tak benda atau *intangible cultural heritage* bersifat tak dapat dipegang (*intangible/* abstrak), seperti konsep dan teknologi; dan sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, serta berbagai perilaku terstruktur lain.

Warisan Budaya Takbenda berdasarkan *UNESCO Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage 2003*: Warisan Budaya Takbenda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan—serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya—bahwa masyarakat, kelompok dan, dalam beberapa kasus, perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Warisan budaya takbenda ini diwariskan dari generasi ke generasi, yang secara terus menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya, interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan memberikan rasa identitas yang berkelanjutan, untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia.

Kabupaten Bantul kaya potensi Warisan Budaya Tak Benda, dan sebagai bentuk upaya pelestariannya dilakukan kajian warisan budaya tak benda, sebagai syarat awal dalam upaya untuk dapat ditetapkan menjadi warisan budaya benda. Potensi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan sejak tahun 2013 hingga 2023



oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejumlah 26 WBTB, secara rinci pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.219 Data Budaya Tak Benda Potensi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Bantul sampai dengan Tahun 2023**

POTENSI WBTB		NO. SERTIFIKAT	No. SK Kemendikbud
1	Nama Lokasi INDUSTRI GERABAH KASONGAN Desa Kasongan, Kasih , Bantul	Noreg : 192864 / MPK.F/DO/2013 tanggal 16 Desember 2013	Nomor : 238 / M / 2013 tanggal 13 Desember 2013
2	Nama Lokasi BLANGKON YOGYAKARTA	Nomor : 60085/MPK.E/KB/2017 Tanggal 4 Oktober 2017	Nomor : 260 /M/ 2017 tanggal 29 September 2017
3	Nama Lokasi MONTRO Desa Pleret, Pleret, Bantul	Nomor : 60075/MPK.E/KB/2017 Tanggal 4 Oktober 2017	Nomor :260 /M/ 2017 tanggal 29 September 2017
4	Nama Lokasi WEDANG UWUH IMOGIRI Desa Imogiri, Imogiri, Bantul	Nomor : 60087/MPK.E/KB/2017 Tanggal 4 Oktober 2017	Nomor : 260 /M/ 2017 tanggal 29 September 2017
5	Nama Lokasi SRANDUL	Nomor : 60077/MPK.E/KB/2017 Tanggal 4 Oktober 2017	Nomor : 260 /M/ 2017 tanggal 29 September 2017
6	Nama Lokasi REBO PUNGKASAN Desa Wonokromo, Pleret, Bantul	Nomor : 65675/MPK.E/KB/2018 Tanggal 10 Oktober 2018	Nomor : 264 /M/ 2018 tanggal 21 September 2018
7	Nama Lokasi GEPLAK BANTUL	Nomor : 65675/MPK.E/KB/2018 Tanggal 10 Oktober 2018	Nomor : 264 /M/ 2018 tanggal 21 September 2018
8	Nama Lokasi NINI THOWONG YOGYAKARTA Ds. Panjangrejo, Pundong, Bantul	Nomor : 65675/MPK.E/KB/2018 Tanggal 10 Oktober 2018	Nomor : 264 /M/ 2018 tanggal 21 September 2018
9	Nama Lokasi BATIK NITIK YOGYAKARTA Kembang songo, Trimulyo, Jetis, Bantul	Nomor : 65675/MPK.E/KB/2018 Tanggal 10 Oktober 2018	Nomor : 264 /M/ 2018 tanggal 21 September 2018
10	Nama Lokasi GEJOG LESUNG YOGYAKARTA	Nomor : 65675/MPK.E/KB/2018 Tanggal 10 Oktober 2018	Nomor : 264 /M/ 2018 tanggal 21 September 2018
11	Nama Lokasi BENTHIK YOGYAKARTA	Nomor : 65675/MPK.E/KB/2018 Tanggal 10 Oktober 2018	Nomor : 264 /M/ 2018 tanggal 21 September 2018

POTENSI WBTB		NO. SERTIFIKAT	No. SK Kemendikbud
12	Nama ANDONG YOGYAKARTA Lokasi	Nomor : 103617/MPK.E/KB/2019 Tanggal 8 Oktober 2019	Nomor : 362 /M/ 2019 tanggal 24 September 2019
13	Nama MIE LETHEK Lokasi Srandkan, Bantul	Nomor : 103617/MPK.E/KB/2019 Tanggal 8 Oktober 2019	Nomor : 362 /M/ 2019 tanggal 24 September 2019
14	Nama SHOLAWAT MAULUD JAWI Lokasi	Nomor : 103617/MPK.E/KB/2019 Tanggal 8 Oktober 2019	Nomor : 362 /M/ 2019 tanggal 24 September 2019
15	Nama CEMBENGAN YOGYAKARTA Lokasi Tirtonirmolo, Kasihlan, Bantul	Nomor : 103617/MPK.E/KB/2019 Tanggal 8 Oktober 2019	Nomor : 362 /M/ 2019 tanggal 24 September 2019
16	Nama SATE KLATAHAK Lokasi Jejeran, Pleret, Bantul	Nomor : 103617/MPK.E/KB/2019 Tanggal 8 Oktober 2019	Nomor : 362 /M/ 2019 tanggal 24 September 2019
17	Nama KERAJINAN KULIT TATAH SUNGGING YOGYAKARTA Lokasi Pucung, Wukirsari,Imogiri, Bantul	Nomor : 103617/MPK.E/KB/2019 Tanggal 8 Oktober 2019	Nomor : 362 /M/ 2019 tanggal 24 September 2019
18	Nama PEWARNA ALAMI YOGYAKARTA Lokasi Giriloyo,Wukirsari,Im ogiri,Bantul	Nomor : 103617/MPK.E/KB/2019 Tanggal 8 Oktober 2019	Nomor : 362 /M/ 2019 tanggal 24 September 2019
19	Nama NGURAS ENCEH Lokasi Pajimatan,Wukirsari, Imogiri,Bantul	Nomor : 103617/MPK.E/KB/2019 Tanggal 8 Oktober 2019	Nomor : 362 /M/ 2019 tanggal 24 September 2019
20	Nama Upc. Adat Kupatan Jolosutro Lokasi Kapanewon Piyungan	Nomor : 129245/MPK.F/KB/2020 Tanggal Desember 2019	Nomor : 1044 /P/ 2020 tanggal 1 Desember 2020
21	Nama Upc. Nyadran Agung Makam Sewu Lokasi Kapanewon Pandak	Nomor : Tanggal	Nomor : tanggal 22 November 2021
22	Nama Gudeg Manggar Lokasi Kapanewon Mangir Pajangan	Nomor Tanggal	Nomor : tanggal 22 November 2021
23	Nama Lemper Lokasi Kapanewon Sanden	Nomor : Tanggal	Nomor : tanggal 22 November 2021

POTENSI WBTB		NO. SERTIFIKAT	No. SK Kemendikbud
24	Nama Motif Batik Yogyakarta Lokasi	Nomor : Tanggal	Nomor : tanggal 22 November 2021
25	Nama Karanganyar Lokasi Kapanewon Kretek	Nomor Tanggal	Nomor : tanggal 21 Oktober 2022
26	Nama Upc.Adat Pisungsung Jaladri Lokasi Kapanewon Kretek	Nomor : Tanggal	Nomor : tanggal 21 Oktober 2022

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2024

### **c. Desa Pamor Budaya**

Sebagai suatu ikhtiar mewujudkan masyarakat Desa/Kalurahan yang berbudaya, maju dan mandiri, Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya mengintegrasikan potensi Desa/Kalurahan, meliputi kekuatan budaya, kekuatan ekonomi, dan kekuatan sosial dengan menetapkan suatu konsep Desa/Kalurahan Pamor Budaya. Kata pamor diilhami dari sebuah tosan aji keris sebagai pusaka orang Jawa yang mengandung estetika, dan makna simbolik sebagai do'a kepada Sang Maha Pencipta untuk pencapaian kualitas hidup si pemilik keris. Keris diciptakan oleh seorang empu melalui proses fisik dan spiritual sehingga menghasilkan pamor yang indah dan penuh makna simbolik. Demikian pula Pemerintah Kabupaten Bantul, ibarat sebagai seorang empu, maka harus mampu melakukan segala upaya untuk membangun kalurahan dengan sentuhan budaya, sehingga menjadi sebuah kalurahan yang mempunyai pamor budaya, sebuah kalurahan yang maju dan berbudaya.

Desa/Kalurahan Pamor Budaya hanya ada di Kabupaten Bantul, yang merupakan upaya sinergitas Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mendorong desa/kalurahan di Kabupaten Bantul dalam percepatan program Pemerintah Provinsi DIY dalam mewujudkan Rintisan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dan atau Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Predikat sebagai Desa Budaya, Desa Wisata, Desa Prima, dan Desa Preneur pada suatu desa sebagai syarat utama yang sinergikan. Sinergitas tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika. Sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika.

Dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan daerah, yaitu mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya, dengan sasaran pelestarian dan pengembangan budaya daerah. Untuk mengukur segala perubahan yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang akan dicapai, ditentukan suatu indikator. Desa Pamor Budaya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati pada RPJMD Tahun 2021-2026 dengan pengampu Dinas Kebudayaan dan didukung Dinas Pariwisata, DP3APPKB dan DKUKMPP Kabupaten Bantul.

Capaian Desa/Kalurahan Budaya Tahun 2022 yang merupakan tahun pertama RPJMD adalah 7 atau 175% dari target 4 di tahun 2022. Terlampauinya target didorong oleh jumlah Desa Budaya yang menjadi komponen utama penilaian di Kabupaten Bantul tahun 2021 sudah ada 19 Desa/Kalurahan. Perangkat daerah pengampu 3 predikat lain (desa wisata, desa prima dan desa preneur) di tingkat kabupaten dengan propinsi bersinergi dengan baik. Selanjutnya dibutuhkan kolaborasi bersama untuk mendorong desa/kalurahan di Kabupaten Bantul untuk mengoptimalkan potensi budaya, pariwisata, preneur dan prima agar dapat memenuhi syarat utama nominasi Desa/Kalurahan Pamor Budaya.

### **2.1.3.2.17 Perpustakaan**

#### **a. Jumlah Perpustakaan**

Budaya literasi (baca,tulis dan ucap) masih perlu ditingkatkan di Kabupaten Bantul, untuk itu pemerintah mempunyai peran penting dalam mencerdaskan masyarakat melalui penyediaan bahan bacaan atau literatur yang terseleksi dan *update*, selain itu memberikan layanan baca secara optimal kepada masyarakat di lokasi perpustakaan maupun perpustakaan keliling.

Perpustakaan di Kabupaten Bantul terdiri dari satu Perpustakaan Daerah yang melaksanakan layanan langsung di kantor, layanan secara online, layanan mandiri dan layanan perpustakaan keliling. Jangkauan layanan perpustakaan keliling mencakup 17 Kapanewon 75 kalurahan dengan sasaran sekolah (TK, SD/MI, SMP/MTs), tempat ibadah, komunitas, dan pojok baca. Layanan keliling dilakukan pada hari Senin sampai dengan Kamis. Semua unit armada yang ada sudah menerapkan IT dengan sistem otomasi perpustakaan. Pada tahun 2023 jumlah layanan mandiri mencakup 71 perpustakaan yang telah mengajukan kerjasama untuk mengakses buku- buku di perpustakaan. Pelayanan perpustakaan secara langsung di Perpustakaan Daerah dilaksanakan pada hari Senin-Jum'at jam 08.00 WIB – 15.00 WIB. Adapun layanan perpustakaan secara online dapat diakses selama 24 jam.

**Tabel 2.220 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bantul tahun 2019-2023**

No	Jenis Perpustakaan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perpustakaan Daerah/Kabupaten	1	1	1	1	1
2	Perpustakaan Desa	75	75	75	75	75
3	Perpustakaan SD/MI	389	398	398	398	398
4	Perpustakaan SMP/MTs	105	118	118	120	120
5	Perpustakaan SMA/SMK/MA	95	101	101	102	102
6	Perpustakaan Khusus/Instansi	7	9	9	9	9
7	Perpustakaan Tempat Ibadah	56	56	56	56	56
8	Perpustakaan Komunitas	107	106	106	106	106
9	Perpustakaan Pondok Pesantren	7	7	7	7	7
Jumlah		842	871	871	874	874

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul, 2024*

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perpustakaan di Kabupaten Bantul dari tahun 2019 s/d 2023 mengalami kenaikan sebanyak 32 perpustakaan atau 3,66%. Kenaikan tertinggi pada tahun 2020 dengan jumlah kenaikan sebesar 29 unit perpustakaan atau 3,32%. Pada tahun 2023 tidak terjadi penambahan perpustakaan.

#### **b. Pojok Baca**

Pembangunan pojok baca merupakan sarana meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat dengan lebih mendekatkan pelayanan

kepada masyarakat secara geografis. Pojok baca memiliki nilai lebih dalam membangun budaya baca melalui swadaya dan partisipasi masyarakat.

**Tabel 2.221 Jumlah Pojok Baca sampai dengan Tahun 2023**

No	Tahun	Jumlah	Lokasi
1	Sampai dengan 2019	27	- Muntuk , Dlingo - Sumbermulyo, Bambanglipuro - Sitimulyo, Piyungan - Muntuk, Dlingo - Metuk, Donotirto, Kretek - Janten, Triharjo, Pandak - Bojong, Gilangharjo, Pandak - SD Muh Pepe, Trirenggo, Bantul - Krebet, Sendangsari, Pajangan - Kembang Sari, Srimartani, Piyungan - Pringgolayan, Banguntapan - Serut, Palbapang, Bantul - Sanden, Murtigading, Sanden - SD Kanigoro, Mangunan, Dlingo - SD U Aisyiyah, Bantul - Perum Griya Tamansari, Srimartani, Piyungan - Kepuh Wetan Wirokerten Banguntapan - TK IT Ar Raihan Sitimulyo, Piyungan - Jetis, Tirtomulyo, Kretek - Guyangan, Wonolelo, Pleret - Karet, Pleret, Pleret - SD Muh. Bantul Kota, Bantul - SMP 3 Imogiri, Imogiri - Ngelosari, Srimulyo, Piyungan - Manggung, Wukirsari, Imogiri - Tembi, Timbulharjo, Sewon - Perpustakaan Palbapang, Bantul - TK LKMD, Kaliputih, Pendowoharjo, Sewon - Bogor, Trirenggo, Bantul - SD Muh. Blawong, Trimulyo Jetis
2	2020	0	
3	2021	4	- Sorowajan, Panggunharjo, Sewon - Mredo Gatak, Bangunharjo, Sewon - Sudimoro, Timbulharjo, Sewon - Jambon, Argosari, Sedayu
4	2022	3	- TK Negeri 1 Kretek, Parangtritis, Kretek - TK Negeri Pembina Bantul, Timbulharjo, Sewon - TK Negeri Srandakan, Trimurti, Srandakan
5	2023	1	Pojok Baca Digital Polres Bantul
	Jumlah	37	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2017 sampai dengan 2023 telah terbangun 37 pojok baca.

### c. Akreditasi Perpustakaan

Akreditasi perpustakaan dimaksudkan meningkatkan kinerja layanan berstandar nasional sehingga dengan semakin bertambahnya jumlah perpustakaan terakreditasi diharapkan semakin mampu

memberikan pelayanan yang lebih berkualitas yang pada akhirnya akan semakin meningkatkan jumlah pemustaka. Jumlah perpustakaan yang terakreditasi di Kabupaten Bantul dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 2.222 Jumlah Perpustakaan Terakreditasi di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Tahun	Reguler	Relaksasi
2019	4	-
2020	10	-
2021	12	55
2022	14	40
2023	13	13
<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>108</b>

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul, 2024

Jumlah perpustakaan terakreditasi melalui jalur reguler pada tahun 2019 s/d 2023 sebanyak 53 perpustakaan. Jumlah tertinggi perpustakaan terakreditasi pada tahun 2022. Sedangkan perpustakaan terakreditasi melalui jalur relaksasi sebanyak 108 perpustakaan, dengan perpustakaan terakreditasi paling banyak tahun 2021 berjumlah 55 perpustakaan.

#### **d. Jumlah Pengunjung Perpustakaan**

Jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan budaya baca di daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasarkan data yang diperoleh melalui system pendataan pengunjung. Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.223 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda)	841.154	140.366	114.325	1.075.333	1.412.776

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul, 2024

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bantul pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2019 jumlah pengunjung mencapai 841.154 orang, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan jumlah pengunjung 140.366 orang dan pada

tahun 2021 dengan jumlah pengunjung 114.325 orang. Penurunan pengunjung dari tahun 2019-2021 disebabkan pandemi covid. Untuk mengurangi risiko penularan covid, layanan perpustakaan sempat dihentikan sementara waktu dan pada saat dibuka kembali dilakukan pembatasan jumlah pengunjung dan dengan mewajibkan protokol kesehatan ketat diantaranya, pengunjung memakai masker dan mencuci tangan sebelum masuk perpustakaan serta wajib menjaga jarak. Sedangkan mulai tahun 2022-2023 pengunjung perpustakaan mengalami kenaikan dimana pada tahun 2022 sejumlah 1.075.333 orang dan pada tahun 2023 sejumlah 1.412.776 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya baca di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Peningkatan pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bantul antara lain disebabkan oleh metode layanan dengan menggunakan sistem otomasi dan manual, penambahan lokasi layanan keliling, sarana prasarana dan fasilitas khususnya layanan perpustakaan yang ada di kantor sudah dilengkapi WIFI, ruangan ber-AC, suasana nyaman serta tersedianya SDM pengelola perpustakaan yang memadai.

**Tabel 2.224 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Usia tahun 2019-2023**

Jenis Pemustaka	Usia	2019	2020	2021	2022	2023
Paud/TK	3-6 th	16.115	1.835	474	3.082	5.278
SD	7-12 th	463.769	109.253	80.464	318.058	810.302
SMP	13-15 th	75.367	3.503	16.015	144.620	337.590
SMA	16-18 th	146.549	4.3	2.152	522.811	101.167
Mahasiswa	>18 th	19.958	2.544	2.753	25.744	54.327
Umum	>18 th	119.396	18.931	12.467	42.915	104.112
<b>Jumlah</b>		<b>841.154</b>	<b>140.366</b>	<b>114.325</b>	<b>1.075.063</b>	<b>1.412.776</b>

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengunjung perpustakaan dari tahun 2019 s.d. 2023 didominasi oleh pelajar dan mahasiswa rata-rata setiap tahun 90%. Hal ini menunjukkan bahwa minat baca sudah dimulai sejak usia sekolah. Harapannya minat baca akan semakin meningkat sampai di usia dewasa. Sedangkan untuk pengunjung kategori umum/lain-lain rata-rata per tahun mencapai 10% memang masih jauh dari harapan.

Upaya yang perlu kita lakukan antara lain dengan mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu perpustakaan bisa



memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensinya. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan layanan informasi perpustakaan melalui koleksi bahan pustaka, layanan komputer dan internet untuk masyarakat.

**e. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan.**

Survey Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam usaha memperbaiki pelayanan public. Untuk mengetahui seberapa besar kualitas layanan yang telah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul kepada masyarakat.

Survey kepuasan masyarakat pada tahun 2019 s.d 2023 dengan menggunakan angket/kuesioner dan secara online melalui Portal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Adapun unsur yang dijabarkan dalam kuesioner meliputi: persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana prasarana.

**Tabel 2.225 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	89,01	89,95	89,21	89,38	91,74

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun 2019 s.d. 2023 mengalami kenaikan dan penurunan. Nilai IKM tertinggi pada tahun 2023 sebesar 91,74. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 89.21.

**a. Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah**

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah menunjukkan ketersediaan bahan pustaka dan bacaan yang dapat diakses oleh masyarakat. Jumlah koleksi buku yang tersedia di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kemitraan dengan stakeholder perpustakaan dan adanya variasi koleksi. Perkembangan jumlah koleksi bahan pustaka dari 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.226 Jumlah Koleksi Buku/ Bahan Pustaka di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Judul	39.547	39.812	40.364	40.753	41.227
Buku	113.897	114.162	114.963	115.352	116.182
e-book	2.104	3.372	3.372	3.372	3.981

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul, 2024

Berdasarkan tabel diatas koleksi bahan pustaka yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2023 sebanyak 41.227 judul, 116.182 buku cetak dan 3.981 buku digital (e-book).

Adapun kenaikan judul terbanyak pada tahun 2021 sejumlah 552 judul atau 1,3%, kenaikan buku cetak terbanyak pada tahun 2023 sejumlah 830 eksemplar atau 0,71% dan kenaikan buku digital (e-book) terbanyak pada tahun 2021 sejumlah 1.268 atau 31,85%.

Koleksi bahan pustaka ini diperoleh dari pengadaan buku, hibah Perpustakaan RI, hibah masyarakat.

#### **2.1.3.2.18 Kearsipan**

Arsip merupakan suatu rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik maupun organisasi lainnya.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, salah satu urusan yang ditangani daerah adalah kearsipan. Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti pelaksanaan kegiatan instansi memiliki fungsi strategis dan dinamis. Strategis artinya bahwa informasi yang terekam dalam arsip tidak hanya memiliki nilai guna primer yang berguna bagi instansi pencipta sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen, tetapi arsip tentu memiliki nilai guna sekunder yaitu nilai guna kepastian dan informasional yang berguna untuk lembaga lain, orang, dan masyarakat luas. Nilai guna kepastian suatu arsip karena terkait dengan keberadaan instansi, benda, tempat, dan orang. Sementara nilai guna informasional suatu arsip karena

terkait dengan terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, urusan kearsipan merupakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dalam upaya mendukung tugas dan fungsi kearsipan tersebut, telah ditempatkan sebanyak 35 arsiparis baru, 1 orang subkoordinator yang beralih ke jabatan fungsional arsiparis dan 12 orang Arsiparis dan 156 orang pengelola kearsipan dengan jumlah arsip yang dikelola sebanyak 143.588 dokumen arsip.

#### a. Pengawasan dan Penilaian arsip

Untuk mewujudkan tertib administrasi telah dilaksanakan pengawasan dan penilaian arsip kepada 45 Perangkat Daerah (PD). Hasil pengawasan dan penilaian sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.227 Data Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2019-2023**

No	Kategori Nilai	Jumlah PD				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sangat Memuaskan	0	2	5	3	1
2	Memuaskan	0	2	5	3	6
3	Sangat Baik	5	3	7	10	16
4	Baik	14	30	28	27	13
5	Cukup	7	4	9	5	9
6	Kurang	26	15	5	8	0
	Jumlah	52	54	54	53	45

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip dengan nilai baik dari tahun 2019-2023. Adapun rinciannya perangkat daerah dengan nilai baik adalah tahun 2019 ada 19 PD (36,53%), tahun 2020 ada 37 PD (68,51%), tahun 2021 ada 45 PD (83,33), tahun 2022 ada 43 PD (81,13%) dan tahun 2023 ada 36 PD (80%). Jadi rerata perangkat daerah yang melakukan

pengelolaan arsip dengan baik selama tahun 2019 s/d 2023 sebesar 69,9%.

Melihat data tersebut diharapkan di waktu yang akan datang perangkat daerah lebih meningkatkan pengelolaan kearsipan sesuai standar kearsipan dan dapat lebih memberdayakan pengelola kearsipan untuk melakukan pengolahan arsip yang sesuai standar dan aturan yang ada. Selain itu akan dilakukan pembinaan, pengawasan pengelolaan arsip oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul.

### **b. Akuisisi Arsip**

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa arsip statis sebagai bukti pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dijamin keselamatan arsipnya baik secara fisik dan informasinya sehingga tidak mengalami kerusakan atau hilang. Salah satu penyelamatan arsip adalah akuisisi arsip.

Akuisisi arsip adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, yang dilakukan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip (pemerintah daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, perusahaan swasta yang memperoleh anggaran negara dan/atau bantuan luar negeri), dan arsip perorangan.

Sejak tahun 2017 juga telah dilakukan akuisisi arsip terhadap berbagai macam peristiwa yang terjadi maupun dilaksanakan serta tokoh masyarakat, seniman, serta tokoh tokoh lainnya yang ada di Kabupaten Bantul. Daftar akuisisi yang telah dilaksanakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.228 Daftar Akuisisi yang Telah Dilaksanakan**

No.	Tahun	Obyek Akuisisi	Nama Tokoh
1.	2017	Tokoh keris	Mbah Djiwodiharjo
2.	2017	Pelukis	Ki Joko Pekik
3.	2018	Tokoh dalang	Ki Timbul Hadiprayitno

No.	Tahun	Obyek Akuisisi	Nama Tokoh
4.	2018	Arsip event tradisional Gerbang Madu Srimulyo Piyungan	-
5.	2019	Tokoh batik “Jogo Pertiwi”	R.Ngt.Djogo Partiw
6.	2020	Tokoh “seniman dagelan	Ki Ngabdul
7	2021	Akuisisi warisan budaya tak benda “bakmi letheke” Kapanewon Dlingo Dinas PPKBPMD	Yasir Ferry Ismatrada
8	2022	Akuisisi Arsip Bupati-Wakil Bupati Bantul periode 2016-2021	Drs. H. Suharsono dan Drs. H. Abdul Halim Muslih
9	2023	Akuisisi Arsip Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bantul	Perangkat Daerah, Kapanewon dan Kalurahan

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024.

Adapun arsip-arsip yang diakuisisi adalah arsip-arsip foto, arsip personal tokoh yang bersangkutan misalnya scanning atau fotocopy KTP, Ijazah, Kartu Keluarga, sertifikat, piagam penghargaan dan lain sebagainya. Selain itu arsip-arsip rekaman juga ada, selebihnya arsip tekstual. Untuk arsip penanganan Covid-19 berupa arsip tekstual dan non tekstual yang berisi informasi tentang pelaksanaan vaksinasi, pembatasan kegiatan masyarakat serta regulasi-regulasi yang dihasilkan selama pandemi Covid-19 berlangsung. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Kapanewon, dan Kalurahan

### c. Penyimpanan dan Pengelolaan Arsip

Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan menjadi acuan dalam pengelolaan kearsipan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul.

Adapun data jumlah arsip yang disimpan dan dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.229 Jumlah Arsip yang Disimpan dan Dikelola pada Tahun 2020-2023**

No	Jenis Arsip	2020			2021			2022			2023		
		Sudah dibuat daftar arsip/temubalik	Belum dibuat daftar arsip/temubalik	Jumlah	Sudah dibuat daftar arsip/temubalik	Belum dibuat daftar arsip/temubalik	Jumlah	Sudah dibuat daftar arsip/temubalik	Belum dibuat daftar arsip/temubalik	Jumlah	Sudah dibuat daftar arsip/temubalik	Belum dibuat daftar arsip/temubalik	Jumlah
1.	Arsip Aktif	359	101	460	485	123	608	134.779	57.863	192.642	103.843	39.745	143.588
2.	Arsip Inaktif	872	339	1.211	5.581	1.167	6.748	61.718	6.786	68.504	112.949	11.138	124.087

No	Jenis Arsip	2020			2021			2022			2023		
		Sudah dibuat daftar arsip/temubalik	Belum dibuat daftar arsip/temubalik	Jumlah	Sudah dibuat daftar arsip/temubalik	Belum dibuat daftar arsip/temubalik	Jumlah	Sudah dibuat daftar arsip/temubalik	Belum dibuat daftar arsip/temubalik	Jumlah	Sudah dibuat daftar arsip/temubalik	Belum dibuat daftar arsip/temubalik	Jumlah
3.	Arsip Statis	937	384	1.321	1.531	245	1.776	1.827	410	2.237	2.749	585	3334
4	Arsip yang Dialihmediakan	1.346	89	1.435	70	280	350	430	0	430	385	139	524
Jumlah Total		3.514	913	4.427	7.913	1.104	9.017	198.754	65.059	263.813	219.926	51.607	271.533

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

Pada tahun 2020 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menyimpan dan mengelola arsip sebanyak 4.427 penomoran arsip. Arsip aktif yang sudah dibuatkan daftar arsip temu balik sejumlah 359 arsip (78,04 %), Arsip in aktif sebanyak 872 arsip (72 %), Arsip statis sebanyak 937 arsip (70,93 %), dan Arsip yang di alih mediakan ada sebanyak 1346 arsip (93,73 %). Total arsip, yang disimpan dan dikelola pada tahun 2020 adalah sebanyak 4.427 nomor arsip.

Pada tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menyimpan dan mengelola arsip sebanyak 9.017 penomoran arsip. Arsip aktif yang sudah dibuatkan daftar arsip temu balik sejumlah 485 arsip (79,76 %), Arsip in aktif sebanyak 5.581 arsip (82,7 %), Arsip statis sebanyak 1.531 arsip (86,2 %), dan Arsip yang di alih mediakan ada sebanyak 70 arsip (20 %). Total arsip, yang disimpan dan dikelola pada tahun 2020 adalah sebanyak 9.017 nomor arsip. Jadi pada tahun 2021 ini terjadi peningkatan arsip yang disimpan dan dikelola.

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan arsip yang disimpan secara pesat yaitu arsip aktif sebanyak 192.642 (73%), arsip in aktif sebanyak 68.504 (25,9%), arsip statis sebanyak 2.237(0,84%), Arsip yang dialihmediakan sebanyak 430 (0,16%).

Pada tahun 2023 pengelolaan arsip dinamis aktif sebanyak 143.588 (52,88%), arsip inaktif sebanyak 124.087 (45,78), arsip statis sebanyak 3334 (0,12 %), dan arsip yang dialihmediakan sebanyak 524 (0,19%).

### **2.1.3.3 Layanan Urusan Pilihan**

#### **2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan**

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Bantul dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada (meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana dan sumberdaya lainnya) serta mengoptimalkan kerjasama *stakeholder* terkait bidang kelautan dan perikanan, berupaya mewujudkan pengelolaan kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten Bantul sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundangan tersebut.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan, serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya.

#### **a. Produksi Perikanan Tangkap**

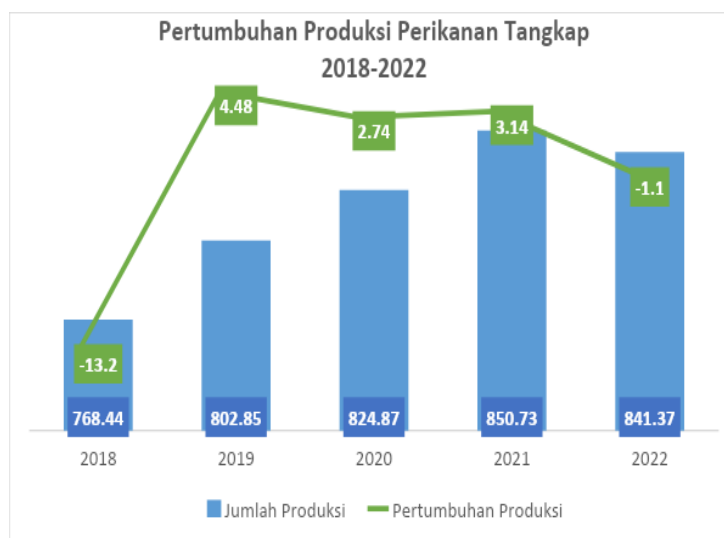
Perikanan tangkap di Kabupaten Bantul dikategorikan kedalam 2 jenis, perikanan tangkap laut dan perikanan tangkap perairan umum. Aktivitas perikanan tangkap laut oleh nelayan berlangsung di pantai Bantul sepanjang 13,5 km hingga menjorok ke laut sepanjang 4 mil laut. Sedangkan aktivitas perikanan tangkap perairan umum berlangsung di sungai, muara, laguna, embung dan perairan lainnya yang ada di daratan. Proses transaksi dan penatausahaan produksi perikanan tangkap laut didukung oleh adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berjumlah 5, yakni TPI Depok, TPI Ngepet, TPI Patihan, TPI Kuwaru dan TPI Ngentak.

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Bantul dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.230 Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No.	Uraian	Jumlah (ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi tangkap laut	497,77	470,14	490,98	467,19	463,64
2	Produksi tangkap perairan umum	305,08	354,73	359,75	374,18	314,25
<b>Jumlah</b>		<b>802,85</b>	<b>824,87</b>	<b>850,73</b>	<b>841,37</b>	<b>777,89</b>

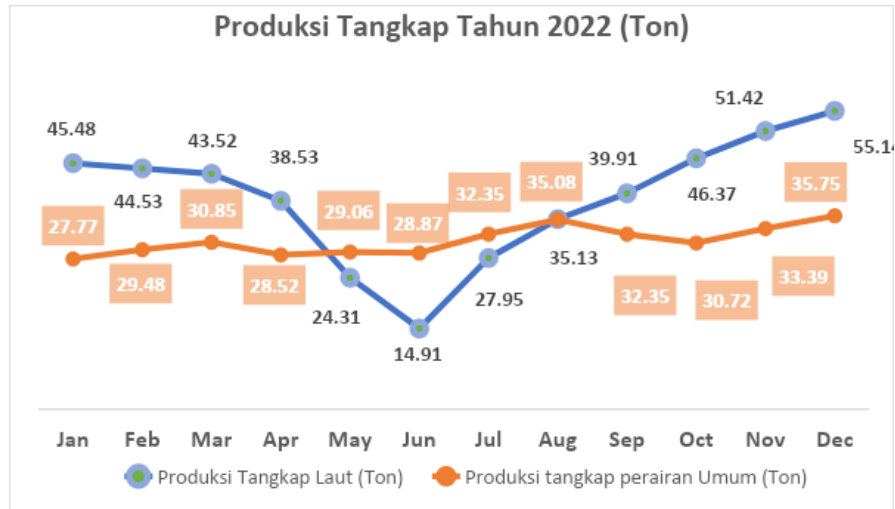
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2024



Gambar 2.32 Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Persentase pertumbuhan produksi dari tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif (Gambar 2-53). Merujuk pada Tabel 2-217, kondisi ini disumbang oleh hasil produksi tangkap laut perbandingan *year-on-year* (YoY) yang mengalami kenaikan di tahun 2019 kemudian mengalami penurunan di tahun 2020, mengalami kenaikan lagi di tahun 2021 dan kembali mengalami penurunan di tahun 2022. Sedangkan produksi tangkap perairan umum mengalami kenaikan tiap tahunnya dengan besaran pertumbuhan kenaikan yang berbeda tiap tahun.





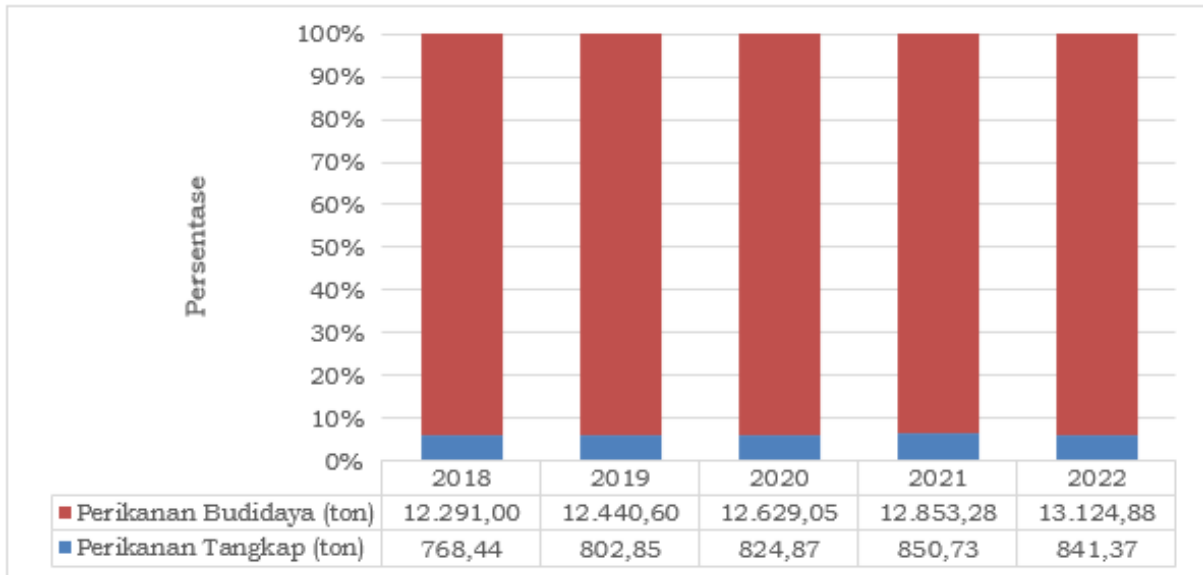
Gambar 2.33 Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Bantul Tahun 2022

Produksi Perikanan tangkap di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan negatif, yakni menurun sebanyak 1,1% dibandingkan dengan tahun 2021. Penurunan ini disumbang oleh produksi perikanan tangkap laut di musim paceklik pada bulan April hingga bulan September dengan puncak penurunan produksi di bulan Juni. Musim paceklik ditandai dengan terjadinya gelombang tinggi pada bulan-bulan tertentu dengan intensitas kejadian lebih sering dibandingkan dengan bulan lainnya. Kondisi gelombang tinggi berimbas pada bermigrasinya ikan-ikan yang ada di tepi laut yang menjadi target tangkapan nelayan kecil yang ada di Kabupaten Bantul (PMT dan non PMT) menuju ke arah laut lepas sehingga walaupun ada aktivitas penangkapan, baik oleh nelayan PMT dan non PMT, hasilnya relatif menurun. Selain itu, penurunan produksi juga dipengaruhi oleh adanya penurunan jumlah trip melaut pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 32,17%, dimana pada tahun 2022 jumlah trip melaut terdata sebanyak 4.811 trip sedangkan tahun 2021 sebanyak 7.093 trip.

#### **b. Produksi Perikanan Budidaya**

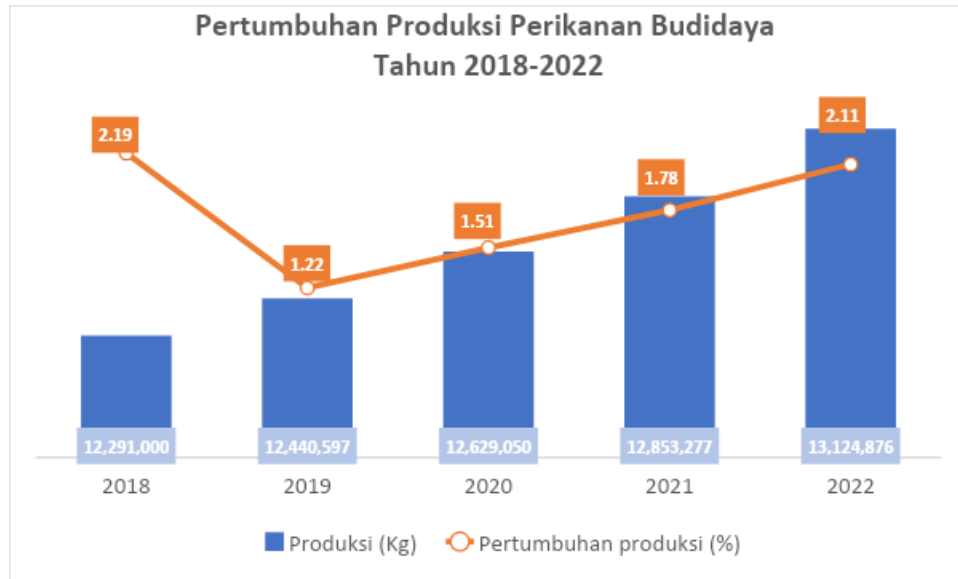
Berbeda halnya dengan perikanan tangkap dimana produksi perikananannya sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, produksi dan kapasitas pada perikanan budidaya relatif bisa dikontrol dengan adanya intervensi inovasi teknologi. Perikanan budidaya di Kabupaten Bantul memberikan sumbangsih terbesar dalam pencapaian sasaran

pembangunan kelautan dan perikanan terutama dalam hal peningkatan produksi perikanan. Dalam kurun waktu lima (5) tahun sejak tahun 2018 hingga 2022, produksi perikanan budidaya memberikan sumbangsih capaian produksi di atas 90%.



Gambar 2.34 Persentase Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Tiap Tahun dalam kurun waktu Tahun 2018-2022

Pertumbuhan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Bantul berdasarkan data produksi Tahun 2019-2023 menunjukkan pertumbuhan produksi positif. Hal ini diperlihatkan dengan adanya kenaikan produksi sektor perikanan budidaya tiap tahunnya sejak tahun 2018 hingga 2022. Sedangkan dari sisi pertumbuhan produksi, hanya di tahun 2019 yang menunjukkan penurunan pertumbuhan dari tahun sebelumnya dimana pertumbuhan produksi di tahun 2018 adalah sebesar 2,19% sedangkan di tahun 2019 hanya sebesar 1,22%. Pertumbuhan produksi kemudian menunjukkan tren positif meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa intervensi Pemerintah Kabupaten Bantul berhasil dalam mengintervensi pengembangan perikanan budidaya dalam rangka mewujudkan peningkatan produksi.



Gambar 2.35 Pertumbuhan Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2018-2022

Perikanan budidaya yang berkembang di Kabupaten Bantul adalah perikanan budidaya air tawar dan air payau. Komoditi perikanan budidaya air tawar meliputi ikan gurami, nila, lele, bawal, patin, mas, sedangkan perikanan budidaya air payau yang dibudidayakan adalah udang vanamei. Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Bantul per jenis komoditi pada kurun waktu Tahun 2019-2023 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.231 Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Komoditi di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No	Komoditas	Produksi (Kg)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Gurami	1.723.948	1.672.601	1.416.233	1.459.343	1.477.735
2	Nila	2.618.329	2.482.902	1.882.939	1.914.530	1.934.260
3	Lele	7.425.503	7.498.039	8.221.196	8.381.509	8.490.293
4	Bawal	218.661	236.653	359.912	387.254	391.876
5	Patin	42.888	103.535	261.006	264.861	268.226
6	Mas	36.828	35.876	24.193	22.558	22.848
7	Udang Vanamei	374.440	599.444	687.798	694.821	703.535
<b>Jumlah</b>		<b>12.440.597</b>	<b>12.629.050</b>	<b>12.853.277</b>	<b>13.124.876</b>	<b>13.288.773</b>

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2024

Produksi budidaya pada kurun waktu 2018-2022 secara umum menunjukkan adanya tren peningkatan. Namun, jika dilihat lebih detail pada produksi masing-masing komoditi perikanan budidaya, dari tujuh (tujuh) komoditi, empat (4) diantaranya menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun sedangkan tiga (3) komoditi lainnya menunjukkan tren

pertumbuhan yang fluktuatif. Komoditi perikanan budidaya yang menunjukkan tren peningkatan antara lain ikan lele, bawal, patin dan udang vanamei, sedangkan yang menunjukkan tren pertumbuhan fluktuatif antara lain ikan gurami, nila dan ikan mas.

Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan konsumsi yang menjadi favorit bagi sebagian besar masyarakat. Selain itu, ikan lele termasuk jenis ikan yang mudah dibudidayakan, memiliki umur panen relatif cepat, dapat dibudidayakan dengan padat tebar tinggi serta relatif memiliki tingkat ketahanan yang bagus terhadap kondisi lingkungan yang kurang baik. Hal-hal ini diperkirakan menjadi faktor pemicu banyak pembudidaya yang tertarik untuk membudidayakan ikan lele. Pemerintah Kabupaten Bantul juga aktif mensosialisasikan dan mentransfer penerapan teknologi budidaya ikan melalui sistem Matlair (hemat lahan dan air). Teknologi yang relatif baru ini memungkinkan masyarakat atau rumah tangga untuk melaksanakan budidaya ikan lele di pekarangan karena tidak membutuhkan lahan yang luas. Teknologi Matlair diterapkan dalam kolam bulat dengan *inlet outlet*, aerasi serta manajemen air secara intensif sehingga dapat meningkatkan padat tebar ikan lele sampai dengan 400 ekor per meter kubik. Hal-hal tersebut diperkirakan berimplikasi pada tingginya jumlah produksi komoditi ikan lele di Kabupaten Bantul.

### 1) Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya.

Pelaku usaha budidaya ikan di Kabupaten Bantul sebagian besar skala rumah tangga, biasa disebut sebagai Rumah Tangga Perikanan (RTP) budidaya.

Tabel 2.232 Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya (unit)	5.216	5.416	5.487	7.608	8107

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2024

Sejak tahun 2018, jumlah RTP budidaya di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan hingga tahun 2022. Jumlah RTP budidaya tahun 2019 meningkat sebanyak 40 RTP dibandingkan tahun 2018. Pada tahun

2020 terdapat penambahan jumlah RTP sebanyak 200 RTP, tahun 2021 bertambah sebanyak 71 RTP, dan tahun 2022 bertambah sebanyak 2.121 RTP. Penambahan RTP budidaya ini terutama pada budidaya lele. Pertambahan RTP pembudidaya ini dikarenakan adanya penambahan anggaran yang cukup signifikan pada bidang kelautan dan perikanan sejak Dinas Kelautan dan Perikanan berdiri kembali menjadi perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Penambahan RTP pembudidaya di tahun 2022 juga merupakan perwujudan dari upaya Kabupaten Bantul dalam meningkatkan produksi melalui penumbuhan pembudidaya baru.

## 2) UPTD Balai Budidaya Ikan (BBI).

Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki UPTD Balai Budidaya Ikan (BBI) dengan 5 unit kerja yang tersebar di beberapa lokasi, yakni di BBI Barongan (Dsn. Ngentak, Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis), BBI Sanden (Dsn Ngentak, Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden), BBI Gesikan (Dsn. Gesikan, Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak), BBI Krapyak (Dsn. Tegal Krapyak, Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon), dan BBI Pundong (Dsn. Derso, Kalurahan Srihardono, Kapanewon Pundong). UPTD BBI menjalankan fungsi penyediaan benih ikan dan penyediaan ikan konsumsi bagi RTP budidaya di Kabupaten Bantul serta bagi masyarakat Kabupaten Bantul non RTP budidaya. Produksi benih ikan (ekor) dan ikan konsumsi (kg) di UPTD BBI sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.233 Produksi Benih Ikan (ekor) dan Ikan Konsumsi (Kg) dari UPTD. BBI di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi Benih Ikan (ekor)	4.530.470	4.118.504	4.021.050	4.177.161	3.771.492
Produksi Ikan Konsumsi (Kg)	897	684	1.417	1.106	782

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2024

UPTD BBI mulai menjual ikan ukuran konsumsi kepada masyarakat sejak tahun 2019. Secara umum, produksi ikan konsumsi di BBI tiap tahunnya fluktuatif. Produksi ikan konsumsi tertinggi terdapat di tahun 2021 sebanyak 1.417 Kg dan produksi tertinggi kedua di tahun 2022 sebanyak 1.106 Kg. sedangkan produksi terendah terdapat di tahun 2020 sebanyak 684 Kg. Jenis ikan konsumsi yang terserap di pasaran adalah ikan gurami, nila hitam dan nila merah.

Produksi benih ikan di UPTD BBI sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 nilainya fluktuatif. Secara umum, produksi benih mengalami penurunan di tahun 2019 hingga tahun 2022 bila dibandingkan dengan produksi benih di tahun 2018 yang mencapai 4.629.118 ekor. Namun, produksi benih di BBI mengalami kenaikan di tahun 2022 bila dibandingkan dengan produksi di tahun 2021. Produksi benih tahun 2022 mencapai 4.117.161 ekor sedangkan tahun 2021 sebanyak 4.021.050 ekor.

Tabel 2.234 Produksi Benih Ikan (Ekor), Calon Induk (Ekor), Dan Ikan Konsumsi (Kg) Per Jenis Ikan di UPTD BBI Kabupaten Bantul Tahun 2023

Jenis ikan	Produksi benih (ekor)	Produksi calon induk (ekor)	Produksi konsumsi (Kg)
Gurami	-	-	17
Lele	-	-	140
Mas / tombro	468.300	-	-
Nila hitam	104.700	-	-
Nila merah	2.963.760	-	625
Tawes	538.599	-	-
Koi	1.760	-	-
Komet	1.840	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>4.078.959</b>	-	<b>782</b>

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2023

Benih ikan yang diproduksi di UPTD BBI meliputi gurami, mas/tombro, nila hitam, nila merah, tawes, koi dan komet. Produksi benih ikan terbanyak di tahun 2022 adalah benih ikan nila merah sebanyak 2.705.460 ekor.

Produksi benih yang dihasilkan BBI di Kabupaten Bantul pada dasarnya memiliki kualitas yang baik dan cukup diakui, hal ini terlihat dari adanya konsumen pengguna benih ikan di BBI yang berasal dari beberapa daerah di luar Kabupaten Bantul. Tingkat kepercayaan ini terbentuk berdasarkan informasi yang berkembang dari para pengguna jasa dan juga dikarenakan BBI Kabupaten Bantul selalu menggunakan induk berkualitas yang telah memiliki sertifikat tertentu sehingga benih yang dihasilkan terjamin secara kualitas maupun kuantitas. Dengan kualitas benih ikan yang dihasilkan di BBI dan membandingkan data produksi per komoditi di kurun Tahun 2019-2023 di Kabupaten Bantul, masih ada peluang yang cukup besar yang masih menjadi pekerjaan dan tantangan bagi BBI untuk kedepan.

### c. Potensi Pengembangan Produksi Garam

Kabupaten Bantul sebagai wilayah yang berbatasan dengan Samudera Hindia di sisi selatan, memiliki air laut dengan kadar garam cukup tinggi dan memperoleh sinar matahari sepanjang tahun memiliki potensi garam yang bisa dikembangkan sebagai salah satu komoditi yang cukup menjanjikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019 memberikan pelatihan dan bantuan peralatan untuk produksi garam di Kalurahan Gadingsari. Kegiatan produksi garam di Kalurahan Gadingsari hingga saat ini dikelola oleh BUMKal dengan lokasi produksi berada di Pantai Pandansari, Wonoroto.

Tabel 2.235 Produksi Garam, Luas Tambak Dan Rerata Produktivitas Per Bulan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

Tahun	Produksi (Kg)	Pertumbuhan Produksi (%)	Luas Tambak (m <sup>2</sup> )	Rerata Produktifitas per bulan (Kg/m <sup>2</sup> )
2019	833	-	61,25	1,13
2020	4.400	528,21	240,00	3,06
2021	9.600	218,18	240,00	3,33
2022	3.900	-40,63	2.036,00	0,16
2023	3.362	-13,79	2.036,00	0,14

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2024

Akhir tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan pengembangan tambak garam melalui perluasan jumlah tambak sebanyak 2.036 m<sup>2</sup>. Namun pada prosesnya, hanya tambak seluas 240 m<sup>2</sup> yang bisa beroperasi maksimal hingga tahun 2021. Pada tahun 2022 awal, dilakukan perbaikan tambak hingga dapat beroperasi seluruhnya, namun hanya selama tiga (3) bulan, yakni bulan Maret hingga bulan Mei. Hal ini dikarenakan ada beberapa permasalahan teknis dan non teknis sehingga sejak bulan Juni hingga Desember, tidak ada tambak yang beroperasi. Permasalahan teknis yang dihadapi adalah adanya kerusakan sarana tambak yang diakibatkan oleh alam sehingga memerlukan adanya perbaikan. Kerusakan ini belum dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan dikarenakan adanya pergantian lurah yang berimbas pada ketidakjelasan pengelola teknis tambak garam. Permasalahan teknis ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk segera menyelesaikannya karena pada dasarnya kualitas garam yang dihasilkan dari usaha ini bagus dan memiliki prospek.

#### **d. Pelanggaran Aturan**

Kabupaten Bantul secara geografis dengan luas wilayah daratan 506,85 km<sup>2</sup> dan laut sebesar 125,94 Km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 17 Km dan 6 sungai dengan panjang 114 Km memiliki potensi perikanan yang besar baik laut maupun darat. Disamping itu, kegiatan-kegiatan usaha perikanan seperti penangkapan ikan dan pembudidayaan Ikan di Kabupaten Bantul cukup berkembang sehingga dibutuhkan pengawasan supaya kegiatan usaha perikanan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelanggaran-pelanggaran di sektor penangkapan ikan yang sering terjadi di perairan umum daratan yaitu penangkapan ikan dengan stroom dan pemakaian obat yang mengakibatkan sumber daya perikanan mati mulai dari yang berukuran kecil hingga besar. Kegiatan penangkapan ikan dengan cara merusak ini secara nyata dapat menjadikan sumberdaya ikan semakin sedikit dan pada akhirnya akan mengalami kepunahan. Sementara pelanggaran yang ada di pembudidayaan ikan lebih banyak



berupa pelanggaran karena tidak memenuhi standar pembudidayaan ikan yang baik dan benar.

Kegiatan pengawasan sumber daya perikanan termasuk didalamnya penangkapan ikan dengan cara tidak benar yang dilaksanakan oleh Dislautkan DIY bekerjasama dengan OPD terkait dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) termasuk didalamnya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul serta kegiatan pengawasan pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul secara nyata memberikan dampak positif menurunnya jumlah kejadian pelanggaran penangkapan ikan yang merusak dan pelanggaran pembudidayaan ikan yang tidak benar. Berikut data jumlah pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Bantul selama kurun waktu 2019 – 2022.

Tabel 2.236 Kejadian pelanggaran aturan di Kabupaten Bantul tahun 2019-2023

Sektor	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Laut	-	-	1	-	-
PUD	10	7	4	4	-
Budidaya	-	-	25	24	-
Total	10	7	30	28	-

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2024

Pelanggaran aturan di Kabupaten Bantul tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 dari 10 kejadian pelanggaran aturan menjadi 7 kejadian. Pada tahun 2019 dan 2020 fokus pengawasan ada di Perairan Umum Daratan dan Laut. Hal ini sesuai dengan tupoksi yang tercantum didalam Peraturan Bupati Kabupaten Bantul No. 115 Tahun 2016 yaitu pelaksanaan pemantauan sumberdaya perikanan. Sementara tahun 2021 aturan tentang perizinan berusaha membuat adanya tambahan obyek pengawasan yaitu di bidang pembudidayaan ikan. Total jumlah kejadian pelanggaran aturan tahun 2022 sebanyak 28 kejadian mengalami penurunan dibanding tahun 2021 sebesar 30 kejadian dengan persentase penurunan sebesar 6,7%.

### e. Pengolahan Hasil Perikanan

Skala usaha unit pengolahan ikan di Kabupaten Bantul adalah usaha kecil dan menengah (UKM).

Tabel 2.237 Jumlah UKM, Tenaga Kerja dan Produksi Olahan (Ton) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UKM	N/A	N/A	25	26	31
Jumlah Tenaga Kerja	N/A	N/A	53	73	81
Produksi Olahan (Ton)	7.750	5.912	166.152	323.207	367

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2024

Hingga tahun 2022, jumlah UKM pengolah ikan yang ada di Kabupaten Bantul adalah sebanyak 26 UKM dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 73 orang. Berdasarkan data tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa rerata penyerapan tenaga kerja di bidang usaha pengolahan ikan di Kabupaten Bantul adalah sebanyak 2-3 orang per UKM. Produksi olahan yang dihasilkan di tahun 2022 sebesar 323,207 ton atau rata-rata 26,934 ton/bulan. Total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) di Kabupaten Bantul tahun 2022 adalah sebesar 13.966,25 ton. Jika diasumsikan bahwa bahan baku pengolahan ikan yang digunakan berasal dari produksi perikanan di Kabupaten Bantul, maka bahan baku yang baru terserap hanya sebesar  $\pm 2,31\%$  dari total produksi perikanan di tahun 2022. Namun demikian, bahan baku yang digunakan oleh UKM pengolahan ikan di Kabupaten Bantul tidak semuanya berasal dari hasil produksi perikanan di Bantul sehingga masih ada peluang untuk memanfaatkan produksi perikanan di Bantul sebagai sumber bahan baku utama pengolahan. Dilihat dari sisi ekonomi, produk hasil olahan ikan memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan dengan bahan baku mentah dan memiliki masa simpan lebih lama.

#### 2.1.3.3.2 Pariwisata

##### a. Kunjungan Wisatawan

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan

perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi sektor ini sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Meningkatnya jumlah wisatawan ke Kabupaten Bantul akan meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. Jumlah wisatawan dan PAD sektor pariwisata disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.238 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Jumlah Wisatawan (Orang)	Jumlah PAD (Rp)
1.	2019	5.166.615	31.756.578.250,00
2.	2020	2.348.313	16.874.969.250,00
3.	2021	2.819.748	13.385.022.250,00
4.	2022	5.687.729	26.513.478.000,00
5.	2023	5.772.527	26.283.785.500,00

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2023

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2023 mencapai 5.772.527 orang, sedangkan dari sisi kontribusi terhadap PAD 2023 mencapai Rp. 26.283.785.500,-

Pembangunan sektor pariwisata didukung oleh keanekaragaman obyek wisata yang meliputi alam, budaya/religius, dan minat khusus/buatan, juga didukung oleh pengembangan desa wisata sebagai *alternative tourism* di Kabupaten Bantul, sehingga dapat memberikan pilihan-pilihan destinasi wisata bagi wisatawan. Pencapaian jumlah kunjungan wisatawan tersebut di atas merupakan keberhasilan dari pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata antara lain melalui peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan pemberdayaan kapasitas desa wisata.

Tabel 2.239 Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata  
di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No	Jenis	2019	2020	2021	2022	2023	Satuan	Keterangan
<b>A. Daya Tarik Wisata</b>								
1	Alam	32	55	66	75	75	Unit	Kajian Penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata
2	Buatan	84	129	131	46	46	Unit	
<b>B. Usaha Pariwisata</b>								
1	Hotel bintang	3	3	3	3	3	Unit	Kajian Layanan Pendaftaran Usaha jasa Pariwisata
2	Hotel non-bintang	56	56	103	118	120	Unit	
3	Restoran/rumah makan	142	142	195	432	434	Unit	
4	Jasa perjalanan wisata	33	33	39	31	33	Unit	

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2023

Pada tahun 2023 terjadi penambahan daya tarik wisata dari usaha pariwisata berupa hotel non bintang sebanyak 2 unit, restoran 2 unit dan jasa perjalanan wisata 2 unit. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari upaya yang dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan bagi usaha jasa pariwisata dalam layanan pendaftaran usaha jasa pariwisata. Intervensi dalam usaha meningkatkan jumlah kunjungan antara lain memberikan kemudahan akses, menambah daya tarik wisata secara masif pada destinasi, dan memberikan layanan kepada para wisatawan pada saat berkunjung.

Kunjungan wisata meningkat pada lima hari besar tertentu, yaitu Tahun Baru 1 Masehi, Lebaran, Malam 1 Syuro, Natal, Akhir Tahun (Malam Tahun Baru), yang tersebar di semua kawasan obyek wisata yang dikelola antara lain : Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok, Kawasan Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, Pantai Patehan, Pantai Pandansari, Pantai Kwaru, Pantai Baru dan Pantai Pandansimo, Kawasan Goa Selarong dan Kawasan Goa Cerme. Namun dengan dibukanya jembatan Kretek II jumlah kunjungan di Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok sedikit mengalami penurunan karena adanya beberapa pengunjung yang masuk pada jam-jam TPR sudah tutup melalui pintu TPR Kawasan Wilayah Barat (Samas - Pandansimo) dan masih ada beberapa jalur masuk Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok yang tidak ada TPR (jalur tikus). Adapun jumlah penurunan jumlah kunjungan Kawasan Pantai Parangtritis

dan Pantai Depok pada tahun 2023 sebesar 6,09% dari tahun 2022. Sedangkan secara keseluruhan jumlah kunjungan mengalami kenaikan sebesar 1,49% dari tahun 2022. Sedangkan untuk database terkait Usaha Pariwisata berdasarkan hasil Kajian Usaha Jasa Pariwisata selain data tersebut di atas data usaha pariwisata yang sudah mempunyai koordinat antara lain :

Tabel 2.240 Jumlah Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2022

<b>Usaha Jasa Pariwisata</b>	<b>Jumlah</b>
Usaha Jasa Transportasi Wisata	7
Usaha Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	1.141
Usaha Daya Tarik Wisata	5

Sumber: Kajian Database Usaha Jasa Pariwisata Berbasis SIS9Sistem Informasi Geografi) – Dinas Pariwisata, 2023

Adapun jika dilihat dari data per kapanewon untuk data Daya Tarik Wisata dan Usaha Jasa Pariwisata bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.241 Data Usaha Pariwisata Yang Sudah Mempunyai Koordinat

Usaha Jasa Pariwisata	Bambanglipuro	Banguntapan	Bantul	Dlingo	Imogiri	Jetis	Kasih	Kretek	Pajangan	Pandak	Piyungan	Pleret	Pundong	Sanden	Sedayu	Sewon	Srandakan	Total
Penyediaan Akomodasi	1	17	1				48	25	1		2	1		1	1	23		121
Usaha Daya Tarik Wisata				2							1	1					1	5
Usaha Jasa Makanan dan Minuman	6	69	34	3	11	7	79	59	6	15	20	28	6	6	5	57	1	432
Usaha Jasa Perjalanan Wisata									1									1
Usaha Jasa Transportasi Wisata		1	1		1	2	1		1									7
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan																		0
Hiburan dan Rekreasi	45	51	65	92	91	44	122	58	77	89	54	44	63	50	48	79	49	1.141
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>138</b>	<b>101</b>	<b>97</b>	<b>103</b>	<b>73</b>	<b>250</b>	<b>142</b>	<b>86</b>	<b>104</b>	<b>77</b>	<b>74</b>	<b>69</b>	<b>57</b>	<b>64</b>	<b>159</b>	<b>61</b>	<b>1.707</b>

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2023

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan berbagai macam event sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.242 Data Event di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2023

Jenis Event Per Tahun				
2019	2020	2021	2022	2023
1. Festival Makanan Tradisional	1. Pentas di Desa Wisata	Njajah Bantul Milangkori	1. Njlajah Bantul Milang Kori	1. Njlajah Bantul Milang Kori
2. Festival Ingkung	2. Pentas Kecil		2. Festival Kuliner Mataram	2. Festival Kuliner Mataram
3. Festival Mie	3. Pentas Besar		3. Keroncong Pesisiran	3. Festival Keroncong Pesisiran
4. Festival Lampion	4. Pentas Malam Tahun Baru Secara Virtual		4. Symphony Gumuk Pasir	4. Festival Bergogo Mbantul Bumi Mataram
5. Festival Fashion Street	5. Festival Desa Wisata Secara Virtual			
6. Festival Dayung				

Jenis Event Per Tahun				
2019	2020	2021	2022	2023
7. Festival Jogja Air Show (JAS)	6. Festival Profil Digital Desa Wisata		5. Festival Lampion	5. Symphony Gumuk Pasir
8. Festival Malam 1 Syuro	7. Pentas Seni di Kawasan Pantai Parangtritis		6. Pameran Pariwisata	6. Festival Lampion
9. Festival Malam 15 Syuro	8. Pentas Seni di Kawasan Pantai Goa Cemara		7. Lomba Foto	7. Sendratari Sang Ratu
10. Pentas Jathilan	9. Pentas Seni di Kawasan Goa Selarong		8. Pentas Bandara	8. Lomba Kreatifitas Seni
11. Pentas Campursari			9. Pentas Rintisan di Desa Wisata	9. Pentas Seni di Destinasi Wisata
12. Pentas Koes Plus			10. Lomba Kreatifitas Seni (LKS)	10. Pentas Bandara
13. Pentas Akhir Tahun			11. Komunitas Sepeda Bantul	11. Pameran Pariwisata
14. Pentas Atraksi Wisata Parangtritis			12. Komunitas CRV dan Merce	
15. The Harmony Nature dan Culture Orchestra				
16. Symphoni Orkestra Surving Kompetisi				

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2023

Tujuan diselenggarakannya event di atas adalah untuk mengurangi kesenjangan jumlah kunjungan di semua destinasi wisata. Berikut ini data jumlah kunjungan wisata menurut destinasi.

Tabel 2.243 Jumlah Wisatawan per Destinasi Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

Nama Destinasi Wisata	2019	2020	2021	2022	2023
Pantai Parangtritis	2.796.934	1.463.420	1.182.000	2.363.900	2.219.880
Pantai Samas	537.873	240.152	182.010	338.509	458.156
Goa Cemara					
Pandansimo					
Kwaru					
Goa Selarong	38.700	20.000	12.200	22.402	18.589
Goa Cerme	6.828	3.403	2.013	3.205	5.217
Obyek wisata lainnya	1.768.280	621.338	1.441.525	2.959.713	3.070.685
<b>Jumlah</b>	<b>5.166.615</b>	<b>2.348.313</b>	<b>2.819.748</b>	<b>5.687.729</b>	<b>5.772.527</b>

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2023

Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Perda Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, untuk penyebutan kawasan ada perubahan khususnya untuk Kawasan Pantai Baros, Pantai Samas, Pantai Pandansari, Pantai Goa Cemara, Pantai

Patehan, Pantai Cangkring, Pantai Kwaru, Pantai Baru dan Pantai Pandansimo yang semula berbunyi Kawasan Pantai Samas, Pantai Patehan, Pantai Goa Cemara, Pantai Kwaru, Pantai Baru dan Pantai Pandansimo.

Rata-rata kunjungan wisatawan di obyek wisata yang dikelola pada tahun 2023 untuk kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok memperoleh jumlah kunjungan terbanyak sebesar 82,16%% dari total kunjungan yang bertribusi. Hal ini disebabkan karena Pantai Parangtritis merupakan ciri khas dari objek wisata di Kabupaten Bantul. Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2022 mencapai 86,66% dari total kunjungan yang bertribusi sehingga mengalami penurunan sebesar 5,19%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 sudah dibukanya jembatan Kretek II, masih banyak jalur-jalur masuk obyek wisata pantai Parangtritis dan Depok maupun adanya obyek wisata baru yang masih viral. Adapun data sebaran wisatawan bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.244 Data Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Uraian	Pengunjung		Asal Kebangsaan
		Wisnus	Wisman	
1	Pantai Parangtritis	2.219.880	-	
2	Pantai samas	303.060	-	
3	Pantai Goa Cemara	32.049	-	
4	Pantai Kwaru	21.107	-	
5	Pantai Pandansimo	101.940	-	
6	Goa Selarong	18.589	-	
7	Goa Cerme	5.217	-	
8	Pasar Seni Gabusan	205.364	-	
9	Kebun Buah Mangunan	114.607	-	
10	Gunung Pengger	415.792	-	
11	Puncak Becici	213.181	-	
12	Lintang 1000	9.023	-	
13	Pinus Asri	8.711	-	
14	Pinus Asri	346.915	-	
15	1000 Batu	68.426	-	
16	Bukit Panguk	14.070	-	
17	Bukit Mojo	-	-	
18	LBH Dahromo	-	-	
19	La Li Sa Farmer Village	111.181	-	
20	Balong Park	21.172	-	
21	Galaxi Water Park	22.084	-	
22	Grand Puri Water Park	75.530	-	
23	Taman Rekreasi Tirto Tamansari	102.920	-	
24	Lid Fun Park	177.003	-	
25	Selopamioro Adventure Park	-	-	
26	Kebun Pisang Mbah Lasio	1.970	-	
27	Goa Jepang	-	-	
28	Puncak Sosok	384.975	-	



No	Uraian	Pengunjung		Asal Kebangsaan
		Wisnus	Wisman	
29	Kawasan Cagar Budaya Jagalan	1.336	76	Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Jepang, Taiwan, China, India, Turki, New York, Kanada, Jerman, Hungaria, Spanyol, Belgia, Perancis, Belanda, Switserland, Itali Australia
30	Komplek Masjid Kotagede, Sendang Saliran dan Makam Raja-Raja Mataram di Kotagede	39.785	-	
31	Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	9.352	-	
32	Makam Sunan Cirebon	754	-	
33	Lembah Sorory	22.314	-	
34	Museum Soeharto	68.186	-	
35	Museum Muhammadiyah	48.537	-	
36	Padepokan Sumber Karahayon	115	-	
37	Museum Wayang Kekayon	1.239	-	
38	Museum Wayang Beber Sekartaji	2.213	119	Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Bruani, Laos, Jepang, Taiwan, China, Hongkong, Turki, Yunani, Amerika, Jerman, Spanyol, Belgia, Perancis, Belanda, Switserland, Inggris, Australia, Selandia Baru, Korea
39	Museum Laboratorium Sejarah UPY	7.417	-	
40	Museum Purbakala Pleret	7.813	-	
41	Museum Tani Jawa	3.808	-	
42	Museum History Of Java	3.091	-	
43	Museum Taman Tino Sidin	2.703	-	
44	Museum Rumah Belanda (Museum Bantul Masa Belanda)	772	-	
45	Museum Rumah Garuda	100	-	
46	Museum Gumuk Pasir (Geomaritime Sains Park)	13.090	-	
47	Museum Coklat Monggo	32.917	-	
48	Museum Tembi Rumah Budaya	1.025	-	
49	Kaki Langit	15.801	169	Katar, Singapura, Malaysia
50	Goa Gajah Lemah Abang	-	-	
51	Tapak Tilas Sultan Agung (TTSA)	14.736	-	
52	Songo Langit	-	-	
53	Banyu Nibo Rejosari	-	-	
54	Karangasem	195	-	
55	Gunung Cilik	-	-	
56	Karang Tengah	-	-	
57	Kebon Agung	1.995	152	Australia, Amerika, Singapura, Vietnam, Inggris, Belanda, Kanada, China, Taiwan, Taipei

No	Uraian	Pengunjung		Asal Kebangsaan
		Wisnus	Wisman	
58	Candran	2.700	-	
59	Giriloyo Wukirsari	40.117	157	Amerika, Jerman, Malaysia
60	Bendo	-	-	
61	Wayang Wukirsari	3.798	-	
62	Imogiri	-	-	
63	Sri Kementut	47.264	-	
64	Krebet	7.910	-	
65	Mangir Ki Ageng Wonoboyo	887	3	Australia, Belgia
66	Ngember Mbeji	-	-	
67	Guwosari Slarong	6.410	-	
68	Kampung Santan	31.337	-	
69	Kalak Ijo	49.046	53	Belanda
70	Dewi Gumi	-	-	
71	Tembi, Timbulharjo	10.493	1.475	India, Perancis, Belanda, Australia
72	Panggunharjo	-	-	
73	Juron	-	-	
74	Kajigelem	2.132	-	
75	Jipangan	5.046	-	
76	Manding	75.096	144	Australia, Malaysia
77	Ngringinan	826	-	
78	Jagalan	19.300	-	
79	Retno	2.367	-	
80	Kampung Surocolo	1.855	-	
81	Panjangrejo	-	-	
82	Puton	1.228	2	Swiss
83	Trimulyo	-	-	
84	Dewa Batu	-	-	
85	Kiringan	4.132	2	Malaysia
86	Mangrov	3.863	-	
87	Laguna Depok Parangtritis	70.690	-	
88	Kergan Kampung Gurami	424	-	
89	Mulyodadi	-	-	
90	Lopati	1.487	-	
91	Pandansari	51.385	-	
92	Goa Cemara	15.595	-	
93	Carakan	-	-	
94	Gadung Mlati	-	-	
95	Kaiji	861	2	Amerika
96	Dewi Sinta	896	6	
97	Mulia	-	-	
98	Bumi Mataram Pleret	18.962	-	
Jumlah		5.770.167	2.360	
Jumlah Total				

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2023

#### **a. Lama Tinggal Wisatawan**

Lama tinggal wisatawan merupakan salah satu faktor yang menentukan besar atau kecilnya devisa yang diterima untuk negara-negara yang mengandalkan devisa dari industri pariwisata. Lama tinggal yang dimaksud adalah banyaknya hari yang dihabiskan oleh seorang wisatawan berkunjung.

Tabel 2.245 Jumlah Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Lama Tinggal Wisatawan (hari)	2	1,56	1,57	2,03	

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2024

Realisasi lama tinggal untuk tahun 2022 meningkat 29,30 % dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pada tahun 2022 beberapa desa wisata mulai berbenah diri selama pasca pandemik covid-19 dan adanya pelatihan bagi pelaku wisata khususnya bagi usaha penginapan dan adanya dukungan promosi wisata baik melalui media cetak, elektronik maupun media lainnya seperti event-event wisata yang dilaksanakan di destinasi wisata. Disamping itu pada tahun 2022 sudah diberlakukannya PPKM level 1 dan pada akhir tahun 2022 dicabutnya PPKM sehingga dampak ini mempengaruhi peningkatan lama tinggal wisatawan walaupun belum bisa mencapai maksimal karena masih baru tahap perbaikan tingkat ekonomi masyarakat. Dan pada masa pandemi covid merupakan waktu/kesempatan dimanfaatkan untuk mempersiapkan dengan melakukan pembenahan-pembenahan sehingga pada saat nanti sudah tidak diberlakukannya PPKM maka siap untuk menjalankan aktivitasnya.

#### **b. Jumlah Belanja Wisatawan**

Jumlah Belanja Wisatawan pada tahun 2023 ditarget sebesar Rp781.397,00/orang dan terealisasi sebesar Rp767.234,00/orang atau sebesar 103,10%. Untuk jumlah belanja wisatawan ini mengalami kenaikan dari realisasi belanja wisatawan tahun 2021 Rp. 675.000,00/orang sebesar Rp. 92.234,00/orang atau 13,67%. Kenaikan ini masih belum maksimal hal ini dikarenakan masih minimnya nilai belanja masyarakat pada masa paska pandemi covid-19.

#### **c. Jumlah Parameter Kabupaten Kreatif yang Dipenuhi**

Jumlah parameter kabupaten kreatif pada tahun 2023 yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan target 16 jumlah parameter kabupaten kreatif dengan realisasi 17 jumlah parameter kabupaten kreatif atau sebesar 106,25%. Indikator ini untuk mendukung Kabupaten Kreatif menuju Kota Kreatif Dunia (UCCN) dengan pengembangan jejaring

ekonomi kreatif baik melalui seminar, workshop dan pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif.

#### d. Desa Wisata

Desa wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata

Kabupaten Bantul juga memiliki desa wisata, pada tahun 2023 terdapat 51 desa wisata yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.246 Jumlah Desa Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa Wisata	38	42	43	47	51

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2023 Peningkatan jumlah desa wisata dikarenakan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata kemudian ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan dinas pariwisata. Keegiatannya antara lain : Pembentukan kelembagaan sektor pariwisata di tingkat kalurahan yaitu pokdarwis dan desa wisata. Kegiatan yang lain yaitu peningkatan kelembagaan pokdarwis dan desa wisata. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas pengelola desa wisata diadakan pelatihan-pelatihan seperti : Pelatihan pengelolaan desa wisata, pengelolaan homestay, pemandu wisata dll.

Adapun tahapan pengembangan Desa Wisata dapat dijabarkan dalam 3 tahap yaitu Rintisan, Berkembang, Maju dan Mandiri. Tahapan ini menggambarkan posisi desa wisata dilihat dari program yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapannya antara lain sebagai berikut :

1. Rintisan
  - a) Masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata
  - b) Pengembangan sarana dan prasarana wisata masih terbatas

- c) Belum ada/masih sedikit sekali wisatawan yang berkunjung dan berasal dari masyarakat sekitar
  - d) Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh
  - e) Sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah, swasta)
2. Berkembang
- a) Sudah mulai dikenal dan dikunjungi, masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah
  - b) Sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata
  - c) Sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat
  - d) Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata sudah mulai tumbuh
  - e) Masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah, swasta)
3. Maju
- a) Masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi wisata termasuk pengembangannya
  - b) Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan termasuk wisatawan mancanegara
  - c) Sarana prasarana dan fasilitas pariwisata sudah memadai
  - d) Masyarakat sudah berkemampuan untuk mengelola usaha pariwisata melalui pokdarwis/kelembagaan lokal
  - e) Masyarakat sudah berkemampuan memanfaatkan dana desa untuk pengembangan desa wisata
4. Mandiri
- a) Masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi wisata desa (diversikan produk) menjadi unit kewirausahaan yang mandiri

- b) Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia
- c) Sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal ASEAN
- d) Pengelolaan desa wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar sektor dan pentahelix sudah berjalan baik
- e) Dana desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversikan produk wisata di desa wisata

Desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri (mampu membuat bahan promosi dan menjual secara mandiri melalui digitalisasi dan teknologi)

Tabel 2.247 Desa Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Nama Desa Wisata	Alamat	Potensi Wisata	Jenis Kategori
1	Wukirsari	Wukirsari, Imogiri	Batik pewarna alami	Mandiri (S)
2	Kakilangit	Mangunan, Dlingo	Alam, Kerajinan, Kuliner	Mandiri (S)
3	Kampungsantan	Guwosari, Pajangan	Kerajinan tempurung, Kuliner Inkgung	Maju
4	Krebet	Sendangsari, Pajangan	Kerajinan Batik Kayu	Maju
5	Tembi	Timbulharjo, Sewon	Kerajinan, Outbond	Maju
6	Karangtengah	Karangtengah, imogiri	Alam, Kerajinan	Maju
7	TTSA	Mangunan, Dlingo	Alam, Budaya, Kerajinan	Maju
8	Kebonagung	Kebonagung, Imogiri	Wisata Pendidikan Pertanian	Maju (S)
9	Manding	Sabdodadi, Bantul	Sentra Kerajinan Kulit	Maju
10	Candran	Kebonagung, Imogiri	Museum tani, Kesenian	Maju
11	Mulia	Srimulyo, Piyungan	Alam, Budaya	Maju (S)
12	Karangasem	Muntut, Dlingo	Alam, Kerajinan	Berkembang
13	Jipangan	Bangunjiwo, Kasihan	Budaya, Kerajinan	Berkembang
14	Lopati	Trimurti, Srandakan	Kuliner, Kerajinan	Berkembang
15	Puton	Trimulyo, Jetis	Alam	Berkembang (S)
16	Kalakijo	Guwosari, Pajangan	Budaya, Kuliner Inkgung	Rintisan/Embrio (S)
17	Dewi Kaji	Gilangharjo, Pandak	Alam, Budaya	Berkembang (S)
18	Goa Cemara	Gadingsari, Sanden	Alam, Outbond, Konservasi Penyu	Berkembang (S)
19	Srikemenut (wunut)	Sriharjo, Imogiri	Alam, Budaya	Berkembang (S)
20	Dewi Gumi	Guwosari, Pajangan	Alam, Budaya	Berkembang (S)
21	Carakan	Wijirejo, Pandak	Alam, Budaya	Berkembang
22	Bumi Mataram Pleret	Pleret, Pleret	Alam, Budaya	Berkembang (S)
23	Kiringan	Canden, Jetis	Sentra Jamu Tradisional	Berkembang (S)

No	Nama Desa Wisata	Alamat	Potensi Wisata	Jenis Kategori
24	Kregan Kampung Gurami	Tirtomulyo, Kretek	Pertanian, Perikanan	Rintisan
25	Juron	Pendowoharjo, Sewon	Kerajinan	Rintisan
26	Ngembel Mbeji	Sendangsari, Pajangan	Alam, Budaya	Rintisan
27	Gunung Cilik	Muntuk, Dlingo	Alam, Kerajinan, Budaya	Rintisan
28	Bendo	Wukirsari, Imogiri	Alam, Kerajinan Genteng Tradisional	Rintisan
29	Kajigelem	Bangunjiwo, Kasihan	Budaya, Gerabah	Rintisan
30	Songgo Langit	Mangunan, Dlingo	Alam, Budaya, Kerajinan	Rintisan
31	Goa Gajah (Lemahbang)	Mangunan, Dlingo	Alam, Goa Gajah	Rintisan
32	Banyu Nibo Rejosari	Terong, Dlingo	Pertanian, Alam	Rintisan
33	Guwosari Selarong	Guwosari, Pajangan	Cagar Budaya, Kerajinan	Rintisan
34	Trimulyo	Trimulyo, Jetis	Cagar Budaya, Batik	Rintisan
35	Jagalan	Jagalan, Banguntapan	Cagar Budaya, Kuliner	Rintisan (S)
36	Pucungrejo	Wukirsari, Imogiri	Kerajinan Kulit	Rintisan
37	Imogiri	Imogiri	Budaya	Rintisan
38	Mangir	Sendangsari, Pajangan	Wisata Sejarah Mataram, Kuliner	Rintisan
39	Panjangrejo	Panjangrejo, Pundong	Alam, Gerabah	Rintisan
40	Dewa Batu	Trimulyo, Jetis	Alam, Budaya	Rintisan
41	Pandansari	Gadingsari, Sanden	Alam, Budaya	Rintisan
42	Ngringinan	Palbapang, bantul	Museum, Kuliner	Rintisan
43	Mulyodadi	Mulyodadi, Bambanglipuro	Alam, Budaya	Rintisan
44	Retno	Baturetno, Banguntapan	Alam, Budaya	Rintisan
45	Kampung Surocolo	Seloharjo, Pundong	Cagar Budaya, Budaya	Rintisan
46	Mangrove	Tirtohargo, Kretek	Alam, Konservasi Mangrove	Rintisan
47	Laguna Depok	Parangtritis, Kretek	Outbond, Kuliner	Rintisan
48	Panggungharjo	Panggungharjo, Sewon	Budaya Kerajinan	Rintisan
49	Gadung Mlati	Caturharjo, Pandak	Alam, Pertanian	Rintisan
50	Dewi Sinta	Sitimulyo, Piyungan	Alam, Kerajinan	Rintisan
51	Banjoe Adji	Srigading, Sanden	Alam, Kuliner, Budaya	Rintisan

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2023

Pengembangan daya tarik wisata di Kabupaten Bantul perlu untuk terus ditingkatkan, terutama di Kawasan Pantai Selatan, sehingga kunjungan wisata tidak hanya terfokus di Pantai Parangtritis dan agar penyebaran jumlah kunjungan wisatawan bisa merata dengan cara pelaksanaan promosi wisata dan event wisata ke beberapa destinasi wisata. Disamping itu juga Peningkatan standar kualitas daya tarik destinasi wisata, jasa usaha pariwisata, SDM pariwisata dan jaringan ekonomi kreatif sehingga memiliki standar kualitas prima dalam memberikan

pelayanan pada wisatawan dengan meningkatkan sadar wisata dan sapta pesona ke semua stakeholder pariwisata dan masyarakat pada umumnya. Adanya Jalur Jalan Lintas Selatan dapat dijadikan peluang pengembangan destinasi wisata dengan tetap memperhatikan ciri khas Kabupaten Bantul.

### 2.1.3.3.3 Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bantul. Sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Kabupaten Bantul, karena merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB meskipun perannya semakin menurun karena pertumbuhan di sektor non pertanian pertumbuhannya relatif lebih cepat.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, yaitu pemanfaatan teknologi pertanian, SDM pertanian dan sarana produksi. Lahan pertanian di Kabupaten Bantul sesuai untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

#### a. Produksi Tanaman Pangan

Komoditas tanaman pangan utama di Kabupaten Bantul adalah padi, jagung, kacang tanah dan kacang kedelai.

Tabel 2.248 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No	Komoditas	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Padi Sawah</b>						
	Luas Panen	ha	29.524,00	30.077,00	29.081,90	30.336,92	29.204,90
	Produktivitas (GKG)	ku/ha	63,56	61,14	65,05	64,48	62,99
	Produksi (GKG)	ton	187.655,00	183.887,00	189.190,66	195.607,73	183.965,42
	Produksi beras	ton	120.099,20	117.687,68	121.082,02	123.350,23	116.008,59
<b>2</b>	<b>Jagung</b>						



No	Komoditas	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	Luas Panen	ha	4.934,00	3.790,80	3.482,80	3.194,32	3.326,05
	Produktivitas	ku/ha	70,74	74,75	83,21	69,95	81,40
	Produksi (pipilan kering)	ton	34.903,00	28.337,00	28.979,70	22.344,32	27.074,24
<b>3</b>	Kedelai						
	Luas Panen	ha	909,00	603,50	646,90	482,192	418,10
	Produktivitas	ku/ha	15,90	17,00	14,90	15,73	16,60
	Produksi (wose kering)	ton	1.445,00	1.026,00	963,88	758,39	694,17

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2024

Pada tahun 2023 terjadi penurunan produksi padi sebesar 5,95 % atau turun sebesar 11.642,31 ton dibandingkan tahun 2022. Dari produksi padi sebesar 195.607,73 ton GKG pada tahun 2022 menjadi 183.965,42 ton GKG pada tahun 2023. Penurunan produksi padi tahun 2023 ini disebabkan kondisi iklim kering (El Nino) sehingga petani banyak beralih dari komoditas padi ke komoditas palawija karena ditakutkan ketersediaan air tidak mencukupi untuk ditanami padi.

Produksi jagung pada tahun 2023 adalah 27.074,24 ton sedangkan tahun 2022 adalah 22.344,32 ton. Produksi jagung mengalami kenaikan sebesar 4.729,92 ton atau naik sebesar 21,168 %. Kenaikan produksi jagung dikarenakan adanya kenaikan luas panen jagung seluas 131,73 hektar akibat El Nino yang mana sebagian petani beralih menanam jagung.

Selain tanaman padi dan jagung, komoditas yang termasuk tanaman pangan unggulan Kabupaten Bantul adalah kedelai. Produksi kedelai, pada tahun 2023 ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Penurunan produksi kedelai mencapai 8,466 % atau 64,21 ton. Penurunan produksi kedelai ini disebabkan penurunan luas panen yaitu 64,09 hektar.

**b. Produksi Tanaman Hortikultura**

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman sayuran dan buah-buahan. Tanaman sayuran yang banyak ditanam di Kabupaten Bantul antara lain bawang merah, cabai merah, dan pisang.

Tabel 2.249 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No	Komoditas /uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Bawang Merah</b>						
	Luas Panen	Ha	893,00	864,00	1.645,00	1.301,00	1.624,50
	Produksi	Ton	9.427,00	9.131,70	16.900,84	11.618,83	19.372,06
	Produktivitas	ku/ha	105,57	105,69	102,74	89,31	119,25
<b>2</b>	<b>Cabai Merah</b>						
	Luas Panen	Ha	298,00	590,90	513,50	356,00	437,00
	Produksi	Ton	1.166,40	6.446,68	2.562,69	1.895,47	2.512,14
	Produktivitas	ku/ha	39,14	109,10	49,91	53,24	57,49
<b>3</b>	<b>Pisang</b>						
	Produksi	Ton	6.727,80	14.977,13	14.102,95	11.889,81	12.007,86

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2024

Komoditas bawang merah pada tahun 2023 ini mengalami peningkatan produksi sebesar 66,73% dibandingkan dengan tahun 2022 atau sebesar-77.532,34 kuintal. Peningkatan jumlah produksi bawang merah ini salah satunya akibat adanya peningkatan luas panen. Luas panen pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 323,50 ha dibandingkan tahun 2022. Peningkatan luas panen bawang merah sebagai akibat dari adanya pergeseran komoditas dari tanaman pangan menjadi tanaman hortikultura termasuk bawang merah sebagai akibat adanya fenomena El-Nino yang mengakibatkan ketersediaan air kurang untuk budidaya tanaman pangan terutama komoditas padi. Selain itu minat petani menanam bawang merah tahun ini tinggi karena harga bawang merah relatif stabil. Peningkatan produksi dan luas panen juga disertai dengan peningkatan produktivitas. Pada tahun 2022 produktivitas bawang merah sebesar

89,31 ku/ha. Sedangkan pada tahun 2023 produktivitas bawang merah sebesar 119,25 ku/ha. Hal ini didukung oleh curah hujan yang tidak terlalu tinggi sehingga pertumbuhan tanaman dapat optimal.

Produksi cabai merah tahun 2023 mengalami peningkatan 6.171 kuintal dibandingkan tahun 2022 atau peningkatan sebesar 32.56%. Hal tersebut disebabkan karena curah hujan tidak terlalu tinggi sehingga menyebabkan pertumbuhan tanaman optimal. Luas panen cabai merah juga mengalami peningkatan sebesar 81,00 ha dibandingkan tahun 2022. Peningkatan luas panen ini disebabkan adanya pergeseran komoditas tanaman pangan ke komoditas hortikultura, sebagai akibat adanya fenomena El-Nino yang mengakibatkan ketersediaan air kurang untuk budidaya tanaman pangan terutama komoditas padi. Selain itu minat petani menanam cabai tahun ini tinggi karena harganya relatif tinggi. Peningkatan produksi dan luas panen juga disertai dengan peningkatan produktivitas. Pada tahun 2022 produktivitas cabai merah sebesar 53,24 ku/ha. Sedangkan pada tahun 2023 produktivitas cabai merah sebesar 57,50 ku/ha. Hal ini didukung oleh curah hujan yang tidak terlalu tinggi sehingga pertumbuhan tanaman dapat optimal.

Pada tahun 2023, produksi pisang mengalami peningkatan 999 kuintal dibandingkan tahun 2022, atau mengalami kenaikan sebesar 0,8%. Pada tahun 2022 produktivitas pisang sebesar 0,36 ku/ha. Sedangkan pada tahun 2023 produktivitas pisang sebesar 0,4 ku/ha. Jumlah tanaman menghasilkan tahun 2022 sebesar 325.850. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah tanaman menghasilkan 298.446. Hal ini dipengaruhi oleh oleh jenis pisang. Pada tahun lalu jenis pisang yang ditanam cenderung pada pisang yang memiliki karakter buah kecil dan berat pertundunnya tidak seberat pisang kapok kuning. Namun kecenderungan pada tahun ini kembali pada jenis pisang kapok kuning sehingga produksi maupun produktivitasnya cenderung meningkat dibanding tahun lalu, meski jumlah tanaman menghasilkan lebih sedikit.

**c. Produksi Tanaman Perkebunan**

Komoditas perkebunan yang menjadi andalan di Kabupaten Bantul antara lain: tembakau, mete, tebu, kelapa dan kakao.

Tabel 2.250 Produktivitas Komoditas Perkebunan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No	Komoditas/ Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Tembakau Rakyat</b>						
	Luas Panen	Ha	175,00	206,00	227,00	87,00	154,50
	Produksi (Rajang kering)	Ku	1.321,30	1.580,13	1.825,08	650,79	1.966,45
	Produktivitas (Rajang kering)	ku/ha	7,55	7,67	8,04	5,56	12,72
<b>2</b>	<b>Tebu</b>						
	Luas Panen	Ha	1.042,67	1.096,00	996,06	824,75	415,44
	Produksi (hablur)	Ku	39.971,17	43.881,70	32.315,60	24.671,16	14.619,55
	Produktivitas (hablur)	ku/ha	38,34	40,04	32,44	29,91	35,19
<b>3</b>	<b>Kelapa</b>						
	Luas Panen	Ha	7.107,81	7.317,95	8.163,34	8.570,29	8.553,10
	Produksi (kopra)	ku	104.794,70	104.967,70	117.143,93	116.628,68	113.923,05
	Produktivitas (kopra)	ku/ha	14,74	14,34	14,35	13,99	13,37
<b>4</b>	<b>Kakao</b>						
	Luas Panen	Ha	18,10	18,30	18,55	23,30	23,10
	Produksi	Ku	65,18	162,00	223,70	190,98	111,27
	Produktivitas	Ku/Ha	3,60	8,85	12,06	8,07	4,71

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2024

Luas tanam tembakau di Kabupaten Bantul tahun 2023 mengalami kenaikan produksi dibandingkan tahun 2022 dari 650,79 kuintal. Kenaikan produksi dikarenakan adanya kenaikan luas panen tembakau dari 87 hektar menjadi 154,5 hektar. Adanya kenaikan luas

panen ini karena adanya kegiatan yang mendukung komoditas tembakau bersumber dari dana DBHCHT dan Dana Keistimewaan. Selain itu juga adanya kenaikan produktivitas dibandingkan tahun 2022, produktivitas tembakau tahun 2022 sebesar 5,56 ku/ha menjadi 12,72 ku/ha. Pengembangan tembakau saat ini fokus pada peningkatan produktivitas tembakau grompol yaitu dengan memanfaatkan hasil evaluasi kegiatan tembakau grompol dari tahun sebelumnya. Produktivitas tembakau karena kondisi cuaca kemarau panjang mendukung pertumbuhan tanaman tembakau.

Tahun 2023 komoditas kelapa mengalami penurunan produksi sebesar 2,32% (2.705,64 kuintal) dibandingkan tahun 2022. Penurunan produksi ini disebabkan adanya penurunan luasan panen sebesar 17,19 hektar dibanding tahun 2022. Selain itu adanya El Nino juga mempengaruhi penurunan produksi kelapa di Kabupaten Bantul.

Produksi tebu tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 40,74 % atau 10.051,61 kuintal dibanding tahun 2021. Penurunan produksi tebu (gula hablur) disebabkan oleh adanya penurunan luas panen tebu sebesar 409,31 ha dibandingkan tahun 2022 yaitu dari 824,75 ha menjadi 415,44 ha. Luas panen tebu yang berkurang diakibatkan oleh berkurangnya sewa lahan tebu oleh pabrik gula di wilayah Bantul.

Produksi kakao tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Penurunan produksi kakao yaitu sebesar 79,71 kuintal disebabkan oleh adanya penurunan produktivitas kakao dari 8,07 ku/ha pada tahun 2022 menjadi 4,71 ku/ha pada tahun 2023. Penurunan produktivitas kakao ini akibat adanya El Nino. Hal tersebut dikarenakan tanaman kakao mayoritas berada di daerah tadah hujan seperti Kapanewon Dlingo.

#### **d. Produksi Benih Pertanian**

Daftar Kelompok Penangkar Benih Padi di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.251 Daftar Kelompok Penangkar Benih Padi

No	Kelompok Penangkar	Alamat	Luas Tanam			
			2020	2021	2022	2023
1	Kel. Agribisnis Penangkaran Sumber Makmur	KBD, Sumberagung	2,5	2,5	4,3	4,5
2	Kel. Agribisnis Penangkaran Sumber Rejeki	Sumber, Sumberagung	3,5	3,5	-	6,0
3	Kel. Agribisnis Penangkaran Ngudyo Makmur	Ponggok, Trimulyo	1,5	1,5	-	-
4	Kel. Agribisnis Penangkaran Ngudi Makmur	Gulon, Srihardono	2	-	-	-
5	Kel. Agribisnis Penangkaran Rukun Makmur	Ngentak, Sumberagung	4,5	-	-	10,75
6	Kel. Agribisnis Penangkaran Ngudi Lestari	Pangkah, Tirtosari	0,5	0,5	-	-
7	Kel. Agribisnis Penangkaran Rukun Makmur	Ngentak Blok I, Sumberagung	-	-	5,9	-
8	Kel. Agribisnis Penangkaran Rukun Makmur	Ngentak Blok II, Sumberagung	-	-	0,9	-
9	Kel. Agribisnis Penangkaran Rukun Makmur	Ngentak Blok III, Sumberagung	-	-	0,75	-
10	Kel. Agribisnis Penangkaran Rukun Makmur	Mindi, Sumberagung	-	-	5,1	-
11	Kel. Agribisnis Penangkaran Sri Rejeki	Sawah, Sumberagung	-	-	-	3,0
12	Lahan BBP	Mindi, Sumberagung	-	-	1,5	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>14,5</b>	<b>11,5</b>	<b>18,45</b>	<b>24,25</b>

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2023

Varietas yang diproduksi pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.252 Produksi Benih Padi (ton) Tahun 2021-2023

No.	Varietas	2021			2022			2023		
		BD	BP	Total	BD	BP	Total	BD	BP	Total
1	Situ Bagendit	-	2.270	2.270	-	7.060	7.060	1.985	12.320	14.305
2	Sunggal	395	12.030	12.425	-	-	-	-	-	-
3	Mekongga	-	7.000	7.000	-	2.760	2.760	1.040	5.640	6.680
4	Ciherang	-	7.880	7.880	840	17.130	17.970	-	10.110	10.110
5	Pepe	-	12.550	12.550	-	-	-	1.000	5.520	6.520

No.	Varietas	2021			2022			2023		
		BD	BP	Total	BD	BP	Total	BD	BP	Total
6	Inpari 19	400	5.040	5.440	-	-	-			
7	Inpari 24	-	6.720	6.720	-	-	-			
8	Inpari 33	315	12.000	12.315	-	3.200	3.200			
9	Inpari Nutrizinc				640	2.440	3.080			
10	Padjajaran				480	6.095	6.575	-	13.210	13.210
11	Cakra Buana				360	10.585	10.945			
12	IR 64				1.210	-	1.210	-	5.760	5.760
13	Inpari 30				440	2.000	2.440			
14	Inpari 32				-	2.640	2.640	-	11.545	11.545
15	Inpari 42				935	10.640	11.575	1.490	14.360	15.850
16	Inpari 22							1.255	1.830	3.085
17	Logawa							-	2.880	2.880
<b>Jumlah</b>		<b>1.110</b>	<b>65.490</b>	<b>66.600</b>	<b>4.905</b>	<b>64.550</b>	<b>69.455</b>	<b>6.770</b>	<b>83.175</b>	<b>89.945</b>

Keterangan : BD= Benih Dasar BP = Benih Pokok

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2024

### e. Prasarana Pertanian

Pengelolaan irigasi dilaksanakan guna mewujudkan kemanfaatan air irigasi yang efisien dan efektif untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi bagi petani.

Tabel 2.253 Panjang Irigasi Tersier (dalam meter) Tahun 2023

No.	Irigasi Tersier	Panjang Saluran Tersier (m)	Panjang Sudah Pasangan (m)	Panjang Belum Pasangan (m)
1	Kewenangan Kabupaten	350.365,95	246.375,21	103.990,74
2	Kewenangan Provinsi	164.158	144.758	19.400

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2023

### f. Produksi Komoditas Peternakan

Salah satu cakupan pertanian dalam arti luas adalah peternakan. Peternakan di Kabupaten Bantul memiliki potensi yang cukup besar meliputi ternak besar, ternak kecil, dan unggas.

Tabel 2.254 Populasi Ternak Besar (Ekor) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No.	Jenis ternak	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sapi Potong	62.582	66.098	73.058	68.401	67.426
2	Sapi Perah	68	68	68	29	29
3	Kerbau	218	217	217	169	166
4	Kuda	1.631	1.583	1.428	1.291	1247

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2024

Populasi sapi potong tahun 2022 mengalami penurunan 6,37% atau berkurang sebanyak 4.657 ekor dibanding tahun 2021. Penurunan populasi juga terjadi pada sapi perah, kerbau dan kuda. Penurunan tersebut disebabkan adanya penyakit PMK (Penyakit Mulut dan Kuku).

Tabel 2.255 Populasi Ternak Kecil (ekor) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No.	Jenis Ternak	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kambing	95.467	95.104	90.887	77.521	70.614
2	Domba	74.441	74.577	68.727	60.629	61.206
3	Babi	5.136	4.512	3.916	3.554	3.401

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2024

Populasi ternak Kecil di Kabupaten Bantul didominasi oleh ternak kambing. Pada tahun 2022 terjadi penurunan populasi ternak kecil, populasi kambing turun 14,70%, populasi domba turun 11,78% dan populasi babi turun 9,24%. Penurunan tersebut disebabkan adanya penyakit PMK (Penyakit Mulut dan Kuku).

Tabel 2.256 Populasi Ternak Unggas (ekor) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No.	Unggas	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ayam buras	966.371	975.546	977.981	981.386	982.181
2	Ayam ras petelur	765.137	765.126	766.304	764.003	760.503
3	Ayam ras pedaging	1.128.489	1.127.715	1.121.844	1.121.779	1.121.360
4	Itik	201.805	202.180	201.283	200.493	202.388

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2024

Populasi ternak unggas didominasi oleh ayam ras pedaging. Secara umum pada tahun 2022 terjadi kenaikan populasi unggas. Peningkatan ini



didukung oleh menurunnya kejadian penyakit menular seperti Avian Influenza. Avian Influenza atau Flu burung adalah penyakit akibat virus influenza yang menjangkiti unggas. Penyakit ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang terjadi akibat kematian unggas dalam jumlah besar.

Komoditas hasil peternakan utama yang berasal dari ternak besar, ternak kecil dan unggas tersebut di atas, meliputi daging telur dan susu. Komoditas ini mempunyai nilai gizi tinggi sehingga kebutuhan akan komoditas ini selalu meningkat. Meningkatnya kebutuhan tentu seyogyanya diiringi dengan peningkatan ketersediaannya.

Tabel 2.257 Produksi Komoditas Hasil Peternakan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No.	Komoditas	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Daging	kg	15.088.317	15.228.523	15.510.221	15.634.165	15.976.963
2	Telur	Kg	7.789.187	7.782.977	7.914.817	7.904.014	7.872.234
3	Susu	Kg	80.541	82.625	83.360	39.964	39.964

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2024

Kenaikan produksi daging pada tahun 2022 dipengaruhi oleh kenaikan kebutuhan daging di wilayah Kabupaten Bantul serta kenaikan pemotongan hewan kurban saat Idul Adha. Produksi telur dan susu mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2021.

Produksi hasil peternakan secara umum mengalami peningkatan dari Tahun 2017 – 2022 terutama pada produksi daging dan telur. Hal ini didukung oleh adanya peningkatan populasi ternak yang dilaksanakan guna mendukung swasembada daging yang dicanangkan Pemerintah Pusat dengan program UPSUS SIWAB (upaya khusus sapi indukan wajib bunting) yang dilaksanakan sejak Tahun 2017 dan dilanjutkan dengan program SIKOMANDAN. Walaupun begitu, produksi susu mengalami penurunan dari Tahun 2019-2023 yang disebabkan oleh menurunnya jumlah sapi perah betina yang produktif.

**g. Penanganan Penyakit Ternak**

Pelayanan kesehatan ternak dilaksanakan melalui UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).

Tabel 2.258 Pelayanan Kesehatan Ternak UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kabupaten Bantul, Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pelayanan Kesehatan Ternak (ekor)	7.703	11.300	20.223	55.554	121.524

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2024

Pelayanan kesehatan ternak pada tahun 2023 sebanyak 121.524, terdapat kasus Penyakit Mulut dan Kuku yang menjangkit banyak ternak di Kabupaten Bantul.

Tabel 2.259 Jenis Penyakit Hewan Ternak Kabupaten Bantul, Tahun 2019-2023

No	Nama Penyakit	2019	2020	2021	2022	2023
1	Helminthosis	4.182	2.809	2.930	2.552	4.237
2	Avitaminosis	1.504	724	936	1.680	6.649
3	Scabies	723	1.451	1493	1.458	1.768
4	PMK	-	-	-	3.595	551
5	Enteritis	-	-	-	558	635
	<b>Total</b>	<b>6.409</b>	<b>4.984</b>	<b>7.380</b>	<b>9.843</b>	<b>13.840</b>

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2024

Jenis penyakit hewan ternak pada tahun 2023 sebanyak 13.840 kasus meningkat dari tahun 2022, dari jenis penyakit hewan tersebut dapat diketahui adanya kasus penyakit terbanyak yang secara berurutan disebabkan oleh cacing (Helminthosis), Avitaminosis, dan Scabies. Selain itu kasus PMK merupakan kasus terbesar yang ditangani selama tahun 2023.

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku dengan 41.575 dosis yang dilakukan di 17 Kapanewon oleh 10 Puskeswan dan 1 Rumah Potong Hewan.

UPTD Rumah Pemotongan Hewan (RPH) merupakan Unit pelayanan masyarakat dalam menyediakan daging yang aman, sehat, utuh dan halal.

Jumlah pelayanan pemotongan hewan ternak di UPTD RPH meningkat dibanding tahun 2021.

Tabel 2.260 Pelayanan Pemotongan UPT RPH Kabupaten Bantul, Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pelayanan Pemotongan (ekor)	2.249	1.553	1.008	1.028	1.246

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2024

#### 2.1.3.3.4 Kehutanan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan kehutanan sudah bukan merupakan wewenang pemerintah daerah kabupaten lagi, tetapi ditarik ke pemerintah daerah provinsi. Kewenangan kab/kota dalam urusan kehutanan berupa pelaksanaan pengelolaan taman hutan raya (TAHURA) kab/kota. Kabupaten Bantul tidak memiliki TAHURA sehingga urusan kehutanan tidak dilaksanakan di kabupaten Bantul.

#### 2.1.3.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Kewenangan urusan ESDM oleh Kabupaten ini hanya terbatas pada sub urusan energi baru terbarukan yaitu penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten. Dalam upaya menggali potensi sumber daya mineral di Kabupaten Bantul telah dilakukan kajian geothermal di Parang Wedang Kapanewon Kretek menunjukkan bahwa energi panas bumi di Parang Wedang adalah 40°C, dan belum dapat dijadikan alternatif energi dikarenakan standar panas minimal energi panas bumi seharusnya 90°C.

#### 2.1.3.3.6 Perdagangan

##### a. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.261 Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 (dalam miliar rupiah)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.645,73	1.576,54	1.595,94	1.672,16	angka dari BPS belum ada
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	8.64%	8.46%	8,18%	8,12%	angka dari BPS belum ada

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024

### a. Pasar Rakyat

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.

Pasar Rakyat terdiri atas toko, kios, los, dan/atau tenda. Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, terdiri dari: Pasar Rakyat tipe A, Pasar Rakyat tipe B, Pasar Rakyat tipe C, Pasar Rakyat tipe D.

- Pasar Rakyat tipe A dengan kriteria: a.operasional pasar harian; b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan/atau c. luas lahan paling sedikit 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
- Pasar Rakyat tipe B dengan kriteria: a.operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu; b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan/atau c. luas lahan paling sedikit 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi).
- Pasar Rakyat tipe C dengan kriteria : a. operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu; b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; c. dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi).

- Pasar Rakyat tipe D dengan kriteria : a. operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu; b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan/atau c. luas lahan paling sedikit 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi).

Data Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.262 Data Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2023

No	Nama Pasar	Tipe Pasar	Operasional Pasar	2021			2022			2023		
				Jumlah Pedagang			Jumlah Pedagang			Jumlah Pedagang		
				Kios	Los dan Arahan	Kebutuhan Pokok	Kios	Los dan Arahan	Kebutuhan Pokok	Kios	Los dan Arahan	Kebutuhan Pokok
1	Pasar Mogiri	A	Harian	100	815	143	100	100	578	126	1037	379
2	Pasar Bantul	A	Harian	189	505	114	220	1126	588	227	1299	144
3	Pasar Piyungan	A	Harian	84	693	85	702	57	276	57	703	185
4	Pasar Niten	A	Harian	122	549	100	114	692	437	114	687	166
5	Pasar Klitikan Niten	B	Harian	-	173	-	0	142	0	0	103	0
6	Pasar Ngipik	B	Harian	20	169	25	20	109	69	21	104	37
7	Pasar Pundong	B	Harian	-	261	82	46	444	173	44	426	154
8	Pasar Celep	B	Harian	17	134	5	17	142	77	17	136	71
9	Pasar Gatak	B	Harian	-	96	10	24	157	89	27	147	79
10	Pasar Jodog	B	Harian	23	120	17	30	296	120	32	273	100
11	Pasar Barongah	B	Harian	45	132	63	57	213	181	54	166	40
12	Pasar Pijenan	B	Harian	30	115	15	54	175	119	52	478	37
13	Pasar Dlingo	B	2x dalam 5 hari	34	173	20	33	159	107	33	149	52
14	Pasar Panasan	B	4x dalam 5 hari	24	187	28	24	229	109	24	190	48
15	Pasar Pleret	B	2x dalam 5 hari	71	511	70	70	464	220	74	460	148

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Nama Pasar	Tipe Pasar	Operasional Pasar	2021			2022			2023		
				Jumlah Pedagang			Jumlah Pedagang			Jumlah Pedagang		
				Kios	Los dan Arahan	Kebutuhan Pokok	Kios	Los dan Arahan	Kebutuhan Pokok	Kios	Los dan Arahan	Kebutuhan Pokok
16	Pasar Jejeran	B	3x dalam 5 hari	71	497	45	24	419	195	24	386	109
17	Pasar Angkruk Sari	B	4x dalam 5 hari	46	502	56	46	471	338	46	513	146
18	Pasar Turi	B	1x dalam 5 hari	-	444	27	3	435	152	3	462	83
19	Pasar Sorobayan	B	2x dalam 5 hari	9	151	17	8	397	192	11	352	120
20	Pasar Mangiran	B	2x dalam 5 hari	-	256	19	49	228	123	49	233	75
21	Pasar Gumulan	B	1x dalam 5 hari	-	269	10	0	292	100	0	267	76
22	Pasar Sungapan	B	2x dalam 5 hari	6	88	19	6	129	49	6	117	54
23	Pasar Semampitan	B	2x dalam 5 hari	12	254	20	11	292	115	11	240	57
24	Pasar Hewan Pandak	B	2x dalam 5 hari	-	13	-	5	5	0	5	5	0
25	Pasar Hewan Mogiri	B	1x dalam 5 hari	-	-	-	0	0	0	-	-	0
26	Pasar Janten	C	Harian	-	52	-	0	61	0	0	62	0
27	Pasar Grogol	C	Harian	-	32	4	0	32	13	0	34	7
28	Pasar Pragan	C	3x dalam 5 hari	-	44	1	0	36	18	0	27	12
29	Pasar Koripan	C	2x dalam 5 hari	-	54	-	0	41	14	0	42	15
30	Pasar Bendosar	D	2x dalam 5 hari	-	23	-	0	7	11	0	7	7
31	Pasar Sangkeh	D	2x dalam 5 hari	-	6	1	0	4	4	0	4	4
32	Pasar Jnggas Bantul	-	1x dalam 5 hari	12	56	-	0	56	0	12	116	0
33	Pasar Seni Gabusan	-	Harian	-	12	-	6	134	0	6	95	0
Jumlah				915	7.503		1064	9231	4475	1075	9320	2411

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2024

Pada Tahun 2023 di Kabupaten Bantul terdapat 33 pasar dengan jumlah pedagang yang memiliki kios, los dan arahan sebanyak 10.395

pedagang. Pedagang yang menyediakan kebutuhan pokok sebesar 23,19 % dari jumlah pedagang yang ada.

Data jumlah pedagang pasar 10.395 pedagang, dari jumlah tersebut terdapat beberapa pedagang yang memiliki kepemilikan ganda baik itu kios maupun los, dalam satu lokasi pasar maupun dalam lokasi pasar yang berbeda.

Terdapat beberapa pasar yang pedagangnya sama dan berpindah sesuai dengan hari pasaran/hari operasional pasar seperti Pasar Angkruksari - Pasar Turi, Pasar Pleret - Pasar Jejeran, dan Pasar Sorobayan - Pasar Gumulan - Pasar Mangiran.

**a. Stabilitas Bahan Pokok Antar Waktu**

Harga rata-rata sembilan bahan pokok berdasarkan Perpres No. 71 Tahun 2015, dengan mengambil sampling di Pasar Bantul, Pasar Imogiri, Pasar Niten, Pasar Piyungan dan Pasar Pijenan. Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilisasi bahan pokok antar waktu) untuk tahun 2023 adalah 8.876 % menurun dari tahun 2022 yaitu 11 %.

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

Tabel 2.263 Perkembangan Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2023

No.	Nama Bahan Pokok dan Jenisnya	Satuan	Bulan												Rata-Rata	Standar Deviasi	Koefisien Variasi Harga antar Waktu
			Jan.	Febr.	Mar.	Apr.	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.			
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)			
1.	<b>Beras</b>																
	- Premium	Kg	11.971	12.454	12.183	11.883	11.680	11.504	11.400	11.979	13.375	13.400	13.630	13.950	<b>12.451</b>	896,18	7,198
	- Medium	Kg	11.054	11.438	11.207	10.865	10.713	10.542	10.200	11.125	12.379	12.588	12.833	13.275	<b>11.518</b>	997,30	8,659
2.	<b>Gula Pasir</b>	Kg	13.342	13.258	13.255	13.348	13.667	13.795	13.799	13.657	14.146	15.117	16.568	16.686	<b>14.220</b>	1234,92	8,685
3.	<b>Minyak Goreng</b>																
	- Kemasan Premium	Lt	18.108	18.483	18.313	18.300	18.247	18.200	18.092	18.027	17.754	17.867	17.643	17.467	<b>18.042</b>	303,38	1,682
	- Curah	Lt	14.813	15.304	14.540	14.104	14.283	14.200	14.200	14.260	14.225	14.400	14.253	14.200	<b>14.399</b>	343,79	2,388
	- Kemasan Sederhana / Minyakkita	Lt	0	15.921	14.320	14.967	14.994	14.725	14.650	14.707	14.592	14.375	14.340	14.613	<b>13.517</b>	4278,31	31,652
4.	<b>Tepung Terigu</b>																
	- Kemasan	Kg	12.346	12.300	12.277	12.367	12.390	12.250	12.242	12.232	12.250	12.400	12.077	12.208	<b>12.278</b>	90,85	0,740
	- Curah	Kg	10.421	10.400	10.403	10.400	10.460	10.470	10.400	10.387	10.050	9.808	9.707	9.700	<b>10.217</b>	309,14	3,026
5.	<b>Daging</b>																
	Daging Sapi Murni																
	- Has	Kg	133.000	133.000	133.000	135.250	133.233	133.000	132.750	132.900	133.000	133.000	135.000	135.000	<b>133.511</b>	956,06	0,716
	- Rendang	Kg	121.389	120.000	120.167	123.889	121.278	121.250	120.000	120.000	120.000	120.000	123.833	125.000	<b>121.400</b>	1819,95	1,499
	Daging Ayam Broiler	Kg	31.383	30.817	31.593	34.354	35.360	37.983	38.203	35.553	35.408	34.642	32.460	31.342	<b>34.092</b>	2565,89	7,526
	Daging Ayam Kampung	Kg	69.792	68.438	69.667	73.177	73.042	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	71.875	70.625	<b>71.593</b>	1556,49	2,174
6.	<b>Telur</b>																



**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	Nama Bahan Pokok dan Jenisnya	Satuan	Bulan												Rata-Rata	Standar Deviasi	Koefisien Variasi Harga antar Waktu
			Jan.	Febr.	Mar.	Apr.	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.			
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)			
	- Telur Ayam Negeri	Kg	26.783	26.275	27.773	26.435	30.097	29.575	30.729	27.424	25.446	24.558	26.113	25.758	<b>27.247</b>	1948,59	7,152
	- Telur Ayam Kampung	Butir	2.450	2.500	2.500	2.500	2.505	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.475	<b>2.494</b>	15,81	0,634
7.	<b>Cabe Merah</b>																
	- Keriting	Kg	35.742	41.567	32.933	26.708	20.853	23.117	21.993	29.533	24.417	32.583	58.467	55.933	<b>33.654</b>	12584,58	37,394
	- Besar	Kg	34.627	39.528	36.167	31.615	26.678	30.219	30.792	34.161	31.604	32.931	46.800	50.833	<b>35.496</b>	7050,41	19,862
8.	<b>Cabai Rawit</b>																
	- Merah	Kg	50.517	53.908	58.680	27.050	27.533	27.388	20.748	31.292	21.442	45.125	76.760	75.092	<b>42.961</b>	20067,65	46,711
	- Hijau	Kg	50.917	49.608	45.647	41.071	32.160	33.425	33.708	27.885	32.392	37.533	58.067	47.058	<b>40.789</b>	9382,28	23,002
9.	<b>Bawang Merah</b>	Kg	35.792	38.458	33.500	35.813	39.107	36.783	30.960	23.837	19.358	19.283	25.340	32.800	<b>30.919</b>	7176,20	23,209
10.	<b>Bawang Putih</b>																
	- Cincou	Kg	23.271	25.677	28.958	28.490	31.883	34.469	39.360	35.600	34.823	33.292	32.642	35.365	<b>31.986</b>	4596,05	14,369
	- Kating	Kg	26.417	28.808	32.927	31.200	33.973	34.583	40.548	36.164	35.933	35.125	35.033	38.475	<b>34.099</b>	3900,25	11,438
11.	<b>Susu</b>												0	0			
	Susu kental Manis												0	0		0,00	#DIV/0!
	- Bendera	370 gr	11.717	12.000	12.000	12.000	12.040	12.100	12.100	12.090	11.950	11.900	12.203	12.400	<b>12.042</b>	165,91	1,378
	- Indomilk	370 gr	11.333	11.313	11.367	11.375	11.450	11.500	11.500	11.500	11.688	11.750	11.900	12.052	<b>11.561</b>	236,91	2,049
	Susu bubuk (Dancow)	400 gr	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	44.250	44.000	44.000	0	46.000	46.500	<b>44.977</b>	13004,13	28,913
	Susu bubuk (Frisian Flag)	400 gr	40.000	40.000	43.200	44.000	44.000	44.000	44.750	45.000	45.000	0	0	0	<b>43.328</b>	19667,81	45,393
12.	<b>Garam Yodium</b>												0	0			
	- Bata (besar)	pak	10.350	10.800	11.527	12.121	12.457	12.967	11.375	11.247	11.725	12.142	11.480	10.400	<b>11.549</b>	797,07	6,902

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	Nama Bahan Pokok dan Jenisnya	Satuan	Bulan												Rata-Rata	Standar Deviasi	Koefisien Variasi Harga antar Waktu
			Jan.	Febr.	Mar.	Apr.	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.			
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)			
	- Halus	1/4Kg	4.415	2.367	2.447	2.425	2.503	2.500	2.500	2.490	2.375	2.317	2.400	2.575	<b>2.609</b>	573,24	21,968
	- Krosok	Kg	2.420	4.513	4.847	5.100	5.530	6.075	5.900	5.587	4.483	4.304	3.980	4.000	<b>4.728</b>	1019,06	21,553
13.	<b>Kacang Kedelai</b>												0	0			
	- Eks Impor	Kg	14.492	13.572	12.933	12.592	12.233	11.713	11.775	11.950	11.875	12.121	12.955	13.463	<b>12.639</b>	866,89	6,859
	- Lokal	Kg	14.413	14.000	14.200	15.333	15.122	13.333	11.875	11.560	11.250	11.667	12.380	13.706	<b>13.237</b>	1442,41	10,897
14.	<b>Kacang Tanah</b>	Kg	14.313	28.675	29.793	31.492	29.720	28.717	28.133	28.600	29.100	28.242	27.533	27.396	<b>27.643</b>	4341,84	15,707
15.	<b>Kacang Hijau</b>	Kg	26.350	25.033	25.093	25.458	24.680	23.817	23.275	22.869	22.100	21.083	20.613	20.550	<b>23.410</b>	1989,23	8,497
16.	<b>Mie Instan</b>												0	0			
	- Goreng	Biji	2.945	2.960	2.960	2.993	2.976	2.980	2.940	2.940	2.930	2.900	2.911	2.940	<b>2.948</b>	27,59	0,936
	- Rebus	Biji	2.717	2.740	2.740	2.733	2.740	2.740	2.700	2.699	2.680	2.680	2.691	2.720	<b>2.715</b>	24,12	0,888
17.	<b>Ikan Asin Teri</b>	Kg	50.492	59.192	60.200	54.592	50.473	47.938	50.000	49.700	51.950	52.908	54.227	56.558	<b>53.186</b>	3881,97	7,299
18.	<b>Ikan Kembung</b>	Kg	39.000	40.083	39.567	40.375	39.717	39.458	39.917	39.950	39.125	38.875	39.150	39.250	<b>39.539</b>	475,13	1,202
19.	<b>Udang (Ukuran Sedang)</b>		0	79.031	80.092	82.698	83.625	81.563	81.302	79.110	79.521	79.556	77.722	79.722	<b>80.358</b>	23257,28	28,942
20.	<b>Ketela Pohon</b>	Kg	4.900	4.900	4.953	5.100	5.100	5.029	5.000	5.000	5.000	4.967	4.920	5.004	<b>4.989</b>	66,89	1,341
21.	<b>Jagung Pipilan Kering</b>	Kg	6.092	5.879	5.970	6.225	6.547	6.738	6.950	6.725	6.900	6.679	6.533	6.975	<b>6.518</b>	385,56	5,916
22.	<b>Tomat</b>	Kg	9.075	7.000	8.533	14.646	13.120	10.883	6.653	7.032	6.471	5.808	7.743	13.167	<b>9.178</b>	3032,33	33,040
23.	<b>Kol/Kobis</b>	Kg	11.971	6.946	6.783	6.871	6.920	6.800	5.550	5.633	5.700	5.963	6.947	9.300	<b>7.115</b>	1826,36	25,668
24.	<b>Tempe</b>	Kg	8.504	13.850	13.847	13.842	13.880	13.900	13.550	13.747	13.900	13.483	13.240	13.775	<b>13.293</b>	1521,87	11,449
25.	<b>Tahu Mentah Putih</b>	Kg	0	11.450	11.373	11.467	11.400	11.400	11.400	11.413	11.050	10.933	11.333	11.400	<b>11.329</b>	3274,56	28,904

## RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

No.	Nama Bahan Pokok dan Jenisnya	Satuan	Bulan												Rata-Rata	Standar Deviasi	Koefisien Variasi Harga antar Waktu
			Jan.	Febr.	Mar.	Apr.	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.			
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)			
26.	Pisang Ambon	Kg	0	11.717	12.200	13.717	12.720	13.067	13.117	13.573	14.192	14.333	14.907	15.967	<b>13.592</b>	4093,77	30,120
26.	Jeruk Lokal	Kg	0	18.025	18.673	21.388	17.560	16.250	15.770	15.777	15.575	16.367	18.060	19.875	<b>17.575</b>	5379,25	30,608

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2023

### a. Nilai Ekspor

Perkembangan nilai ekspor di Kabupaten Bantul tahun 2019-2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.264 Perkembangan Ekspor di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	Volume Ekspor (kg)	6.645.724,59	15.848.096,58	18.046.233,75	37.556.741,60	7.919.996,90
	Nilai Ekspor (US\$)	51.040.882,38	22.334.070,34	158.889.210,28	116.687.461,02	8.792.301,93
	Jumlah Negara Tujuan	79	77	62	77	85
	Macam Komoditi	39	49	30	37	53

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2023

Nilai ekspor Kabupaten Bantul tahun 2023 mencapai US\$118.792.301,93 naik US\$ 2.104.840,93 dibanding tahun sebelumnya. Nilai ekspor didukung oleh komoditi ekspor unggulan seperti Furniture, Garmen, Sarung Tangan, Kerajinan Kulit, Gula Kelapa, Alat Kesehatan, Kerajinan Kayu, Kerajinan Anyaman, Kerajinan Batu, dan Casting Semen, sedangkan negara tujuan ekspor utama adalah Jerman, Amerika Serikat, Belanda, Perancis, dan Australia.

### b. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan

Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan. Jumlah Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan mencapai 480 pelaku usaha dari 740 yang mendaftarkan usahanya. Jadi hanya 64,86% pelaku usaha yang telah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### c. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

Alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku untuk tahun 2023 berjumlah 10.124, dengan jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang sebanyak 22000. Capaian Persentase Alat UTTP bertanda tera yang sah berlaku sebesar 46.01 persen.

Jumlah ini naik dari capaian tahun 2022 sebesar 38.8 persen. Sedangkan untuk jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan adalah sebanyak 9953. Capaian persentase alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan sebesar 45.24 persen.

**2.1.3.3.7 Perindustrian**

**a. Pertumbuhan Industri**

Kegiatan pembangunan industri di Kabupaten Bantul diarahkan pada peningkatan aktivitas dan daya saing Industri Kecil Menengah (IKM). Lokasi dan jenis industri tersebar di Kabupaten Bantul dengan sektor industri yang ada meliputi pangan, sandang dan kulit, kerajinan, kimia dan bahan bangunan, logam dan jasa. Perkembangan sektor industri di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.265 Perkembangan Sektor Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2019 – 2023

No	Sektor Industri	2019		2020		2021		2022		2023	
		Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Pangan	9.712	31.267	9.838	31.387	9.821	31.431	9.961	31.714	10095	31928
2	Sandang dan Kulit	1.092	8.228	1.197	8.298	1.384	8.663	1.499	8.909	1615	9154
3	Kerajinan Umum	8.574	30.875	8.707	30.927	9.039	31.386	9.165	31.667	9308	31948
4	Kimia dan Bahan Bangunan	3.488	30.124	3.522	30.182	3.572	30.353	3.623	30.486	3692	30674
5	Logam dan Jasa	1.493	3.403	1.548	3.461	1.626	3.571	1.686	3.685	1744	3802
	<b>Jumlah</b>	<b>24.359</b>	<b>103.897</b>	<b>24.812</b>	<b>104.255</b>	<b>25.442</b>	<b>105.404</b>	<b>25.934</b>	<b>106.461</b>	<b>26454</b>	<b>107506</b>

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2024

Pada sektor industri pangan, sandang dan kulit, kerajinan umum, kimia dan bahan bangunan serta logam dan jasa pada tahun 2022 terdapat 25.934 unit usaha dan menyerap tenaga kerja sebanyak 106.461 dan pada tahun 2023 terdapat 26.454 unit usaha dan mempekerjakan 107.506

tenaga kerja. Dengan demikian terdapat kenaikan unit usaha sebesar 2.01% dan 0.98 % peningkatan jumlah tenaga kerja.

Tabel 2.266 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2019 – 2023

<b>Uraian</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Pertumbuhan Industri	3,50%	1,86%	2,54%	1,93%	2.01%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2024

Pertumbuhan industri pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan meningkatnya ekspor produk industri.

### **b. Sentra Industri**

Sesuai Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 526 Tahun 2021 Tentang Sentra Industri Kabupaten Bantul Tanggal 24 Desember 2021 telah menetapkan adanya 75 Sentra Industri Di Kabupaten Bantul, yang mana terbagi dalam 5 (lima) cabang bidang industri.

Tabel 2.267 Sentra Industri Kabupaten Bantul Berdasar Cabang Bidang Industri Tahun 2023

<b>Cabang Bidang Industri</b>	<b>Sentra</b>
Pangan	26
Sandang dan Kulit	7
Kimia dan Bahan Bangunan	18
Logam & Elektronika	3
Kerajinan	21
<b>Jumlah</b>	<b>75</b>

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2023

Sentra IKM mampu mengisi wilayah pasar yang luas serta terbukti mempunyai ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Sentra-sentra IKM tersebut membuka kesempatan kerja sehingga berkontribusi terhadap perekonomian di Kabupaten Bantul.

### **c. Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 dan Perda DIY No. 7 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi DIY terdapat Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Bantul yaitu:

- Kawasan Peruntukan Industri Piyungan (Lokasi Kalurahan Sitimulyo dan Kalurahan Srimulyo dengan luas 330,5 Hektar),
- Kawasan Peruntukan Industri Sedayu (Lokasi Kalurahan Argodadi dengan luas 188,33 Hektar), dan
- Kawasan Peruntukan Industri Pajangan (Lokasi Kalurahan Triwidadi dengan luas 72,46 Hektar).

Di dalam Kawasan Peruntukan Industri Piyungan telah terdapat perusahaan kawasan industri yaitu PT. Yogyakarta Isti Parama dengan diterbitkannya Izin Usaha Kawasan Industri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul No. 2/3402/IU/PMDN/2018 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Kawasan Industri dengan luasan 85 hektar.

#### **d. Pertumbuhan Industri Kreatif**

Industri Kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Sedangkan Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreatifitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama.

Klasifikasi industri kreatif sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri (KBLI) sektor yang termasuk industri kreatif meliputi 17 sub sector, yaitu : (1) arsitektur, (2) desain Interior, (3) desain komunikasi visual, (4) desain produk, (5) film animasi video, (6) fotografi, (7) kriya, (8) kuliner, (9) musik, (10) fashion, (11) aplikasi, (12) pengembangan permainan, (13) penerbitan, (14) periklanan, (15) televisi radio, (16) seni pertunjukan, (17) seni rupa.

Kabupaten Bantul telah ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif oleh tim PMK3I Badan Ekonomi Kreatif (Bekraft) pada tiga sub sektor unggulan yaitu Kriya, Fashion, Kuliner. Tiga sub sektor unggulan digunakan sebagai

subsektor potensial serta sebagai daya ungkit dalam membangun ekosistem industri kreatif.

Tabel 2.268 Data Industri Kreatif di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

<b>Uraian</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Jumlah Unit Usaha Industri	24.359	24.812	25.442	25.934	26454
Jumlah Unit Usaha Industri Kreatif	11.253	11.253	12.726	12.761	12841
Cakupan Industri Kreatif	46,2 %	46,2 %	50,02 %	49,21 %	48,54 %

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2024

Capaian Cakupan Industri Kreatif Kabupaten Bantul dari tahun 2018 s.d 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya di tahun 2020 cakupan industri kreatif tetap pada angka 46,2 % dikarenakan tidak ada penambahan produk baru, namun terjadi kreatifitas atau diversifikasi produk dikarenakan pandemi Covid 19.

Pada tahun 2021 cakupan industri kreatif mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang hanya 46,20 % menjadi 50,02% karena IKM memiliki strategi untuk mengembalikan perekonomiannya dengan cara meningkatkan daya saing serta memiliki keunikan pada produknya serta memanfaatkan teknologi sebagai sarana pemasaran, disamping itu sifat struggle IKM dalam menghadapi pandemi sangat mendorong masih eksisnya keberadaan mereka dan terbentuknya Komite Ekonomi Kreatif sebagai pendorong pembangunan ekonomi dalam pengembangan kegiatan industri sebagai sektor yang potensial yang mempunyai dampak pengganda (*multiplier effects*) bagi pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan industri kreatif di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 kurang optimal karena sektor kriya yang merupakan produk ekspor unggulan mengalami penurunan permintaan dari buyer sehingga menyebabkan banyak produk yang menumpuk di gudang. Hal ini disebabkan karena kondisi ekonomi dunia yang sedang tidak stabil dan adanya perang antara Rusia dan Ukraina serta nilai tukar mata uang rupiah yang lemah. Oleh karena itu pada tahun 2022 cakupan industri



kreatif mengalami penurunan dari tahun 2021 dari 50,02% menjadi 49,21%.

Konsep pembangunan Kota/Kabupaten Kreatif Indonesia adalah Fokus kepada pengembangan ide dan kreativitas; Eksistensi komunitas kreatif (*bottom-up*); dan Rantai nilai kreasi produksi distribusi konsumsi konservasi. Indikator kota/kabupaten kreatif yang harus dipenuhi oleh semua kota/kabupaten yang mengajukan ke UNESCO terdiri dari 18 indikator.

Dalam mendukung tercapainya Kabupaten Bantul menjadi Kabupaten Kreatif Dunia versi UNESCO ada program strategis dan terstruktur dalam menciptakan ekosistem Kabupaten Bantul sebagai kota kreatif dunia. Hal ini didukung dengan program super prioritas jangka pendek yaitu:

1. Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif,
2. Peningkatan Daya Saing Produk Kreatif Unggulan melalui pemasaran (event yang berskala internasional) contoh : Asean Tourism Forum, JIFFINA, Inacraft, Bantul Craft and Fashion, Kongres Internasional,
3. Peningkatan Daya Saing Produk Kreatif Unggulan melalui pembinaan dan pendampingan pelaku industri kreatif.

Selanjutnya, masih diperlukan koordinasi yang lebih intensif dengan ekosistem kreatif dan menjalin kerjasama antar daerah baik tingkat regional maupun internasional, sehingga terbentuk jejaring ekonomi kreatif yang saling bersinergi. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan bupati nomor 93 tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Surat Keputusan Bupati Bantul nomor 183 tahun 2023 tentang *Blueprint* Ekosistem Ekonomi Kreatif Kabupaten Bantul Tahun 2022-2027.

#### **e. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah**

IUI atau Izin Usaha Industri, adalah izin operasional yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang

Industri yang mengolah suatu bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru. Dimana IUI berdasarkan pada PP Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri. Yang kemudian Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, Dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional, yang mana terkait pada perizinan usaha industri.

Dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko maka, Ijin Usaha Industri (IUI) sudah tidak ada. Semua perizinan berusaha menggunakan sistem OSS RBA dan perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).

Perizinan berusaha sektor industri untuk resiko usaha menengah tinggi persyaratan perizinan berusahanya berupa NIB dan Sertifikat Standar yang terverifikasi. Resiko usaha tinggi persyaratan perizinan berusahanya berupa NIB dan Ijin yang terverifikasi. Pelaku usaha dengan resiko usaha menengah tinggi dan tinggi harus mengajukan permohonan verifikasi teknis standar kegiatan usaha sektor industri melalui akun SIINas. Pada tahun 2022 hanya terdapat 1 (satu) pengajuan permohonan verifikasi teknis perizinan berusaha perusahaan industri di akun SIINas.

Tabel 2.269 Izin Usaha Berdasar Tingkat Risiko

<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Risiko Rendah (R)</b>	<b>Risiko Menengah Rendah (MR)</b>	<b>Risiko Menengah Tinggi (MT)</b>	<b>Risiko Tinggi (T)</b>
Perizinan Berusaha	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh	Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lemb

		Pernyataan Mandiri	Kementerian/Lemaba/Pemerintah Daerah	aga/Pemerintah Daerah.
--	--	--------------------	--------------------------------------	------------------------

*Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2023*

Hingga Tahun 2022 sebanyak 181 pelaku usaha sektor industri telah terdaftar di Akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dengan 109 usaha sektor industri memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri yang masih berlaku.

#### **2.1.3.3.8 Transmigrasi**

Penyelenggaraan urusan Transmigrasi sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Bantul sampai saat ini masih tergantung pada kuota dari Pemerintah Pusat. Perkembangan yang terjadi sekarang justru semakin menurunnya kuota/jatah transmigran dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan animo, minat, serta pendaftar calon transmigran yang cukup besar.

Penempatan transmigran dari Tahun 2019-2023 ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.270 Jumlah Kepala Keluarga Transmigran di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Jumlah Kepala Keluarga Transmigrasi</b>	20	0	5	15	4

*Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2024*

Adanya pandemi Covid-19 berdampak terhadap penempatan transmigran. Beberapa kegiatan penyuluhan dan pembinaan tidak dapat dilaksanakan karena menghindari kerumunan, selain itu pemberangkatan transmigran juga ditunda pada tahun 2020.

Jumlah KK transmigran pada tahun 2021 sebanyak 5 KK dengan 16 jiwa. Adapun lokasi tujuan penempatan transmigran pada tahun 2021 adalah UPT Saluandeang Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 15 KK

dengan 47 jiwa yang di tempatkan di Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.

Tabel 2.271 Jumlah Pendaftar Transmigrasi di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

<b>Jumlah Pendaftar Transmigrasi (KK)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Sumatra	15	1	3	0	1
Kalimantan Timur	3	17	5	8	5
Kalimantan Barat	0	0	1	0	0
Kalimantan utara	5	6	4	5	5
Kalimantan Tengah	1	0	1	0	0
Sulawesi Selatan	0	4	2	6	4
Gorontalo	0	0	0	0	0
Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0
Sulawesi Barat	2	4	2	5	1
Sulawesi Tenggara	2	2	2	3	2
<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>23</b>

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2024

Pada tahun 2022, jumlah pendaftar transmigrasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah 27 KK dengan tujuan transmigrasi terbanyak di Kalimantan Timur.

#### **2.1.3.4 Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengawasan, Kewilayahan, dan Pemerintahan Umum**

##### **2.1.3.4.1 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah**

###### **2.1.3.4.1.1 Sekretariat Daerah**

Fungsi perumusan kebijakan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

###### **a. Reformasi Birokrasi**

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat

utama pembangunan yang berkualitas. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program kerja pembangunan.

Implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul telah dimulai tahun 2012 dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang diperbarui setiap tahun. Sebagai wujud komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul, telah disusun road map reformasi birokrasi tahun 2018-2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Bantul tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.272 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2018-2019

No	Area Perubahan	Bobot	2018	2019
	Komponen Pengungkit			
1.	Penataan Sistem manajemen SDM	6,79	12,95	6,79
2.	Penguatan pengawasan	6,04	7,16	6,04
3.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	2,71	2,71	2,71
4.	Penataan dan penguatan organisasi	3,84	3,89	3,84
5.	Manajemen perubahan	3,37	3,53	3,37
6.	Penguatan akuntabilitas	4,10	4,38	4,10
7.	Penataan tatalaksana	3,47	3,47	3,47
8.	Peningkatan kualitas pelayanan public	4,33	4,52	4,33
	<b>Total Komponen Pengungkit (A)</b>	<b>34,64</b>	<b>42,11</b>	<b>34,64</b>
	Komponen Hasil			
1.	Nilai akuntabilitas kinerja	9,84	11,39	9,84
2.	Survey internal integritas organisasi	3,88	4,47	3,88
3.	Survey eksternal persepsi korupsi	6,49	6,06	6,49
4.	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5.	Survey eksternal pelayanan public	9,60	9,33	9,60
	<b>Total Komponen Hasil (B)</b>	<b>32,79</b>	<b>34,25</b>	<b>32,79</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)</b>	<b>67,43</b>	<b>76,36</b>	<b>67,43</b>
	<b>Kategori</b>		<b>BB</b>	<b>BB</b>

Sumber: Bagian Organisasi, Setda, 2023

Pada tahun 2020 pelaksanaan evaluasi berpedoman pada PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman

tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistic.

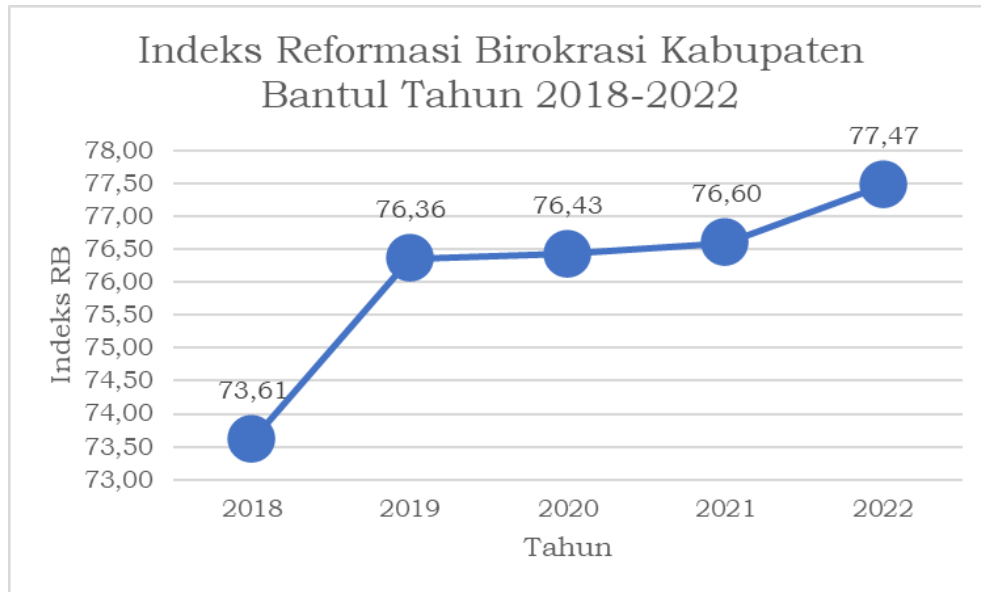
Tabel 2.273 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022

No	Area Perubahan	Bobot	Nilai		
			2020	2021	2022
A	Komponen Pengungkit				
1.	Pemenuhan	20	14,73	14,83	15,19
2.	Hasil Antara Area Perubahan	10	6,93	6,57	6,52
3.	Reform	30	20,74	20,72	22,58
Total Komponen Pengungkit (A)		60	42,40	42,12	44,29
B	Komponen Hasil				
1.	Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	10	8,73	8,66	8,81
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10	9,03	8,79	8,98
3.	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10	8,28	8,12	8,60
4.	Kinerja Organisasi	10	6,99	8,91	6,79
Total Komponen Hasil (B)		40	34,03	34,48	33,18
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100	76,43	76,60	77,47
<b>Kategori</b>			<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>

Sumber: Bagian Organisasi, Setda, 2023

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform, serta diikuti dengan peningkatan nilai pada komponen hasil.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2022 adalah 77,47 (BB) Kategori Baik, meningkat dari tahun 2021 yaitu 76,60 (BB). Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kategori BB memiliki interpretasi bahwa secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.



Sumber: Bagian Organisasi, Setda, 2023

Gambar 2.36 Indeks RB Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Peningkatan Indeks RB Kabupaten Bantul tahun 2022 didukung oleh peningkatan kualitas hasil antara, yaitu kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kualitas pelayanan publik, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, dan pengelolaan arsip. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan oleh Kemenpan-RB pada tahun 2021 yaitu:

1. Telah melaksanakan pelantikan berdasarkan hasil penyederhanaan struktur dan penyetaraan jabatan di lingkungan Kabupaten Bantul.
2. Meningkatkan pembangunan Zona Integritas (ZI) pada unit kerja strategis dengan mencanangkan pembangunan ZI di unit kerja Disdukcapil, DPMPT, RSUD, Disnakertrans, Kapanewon Pundong, Kapanewon Bantul dan Kapanewon Jetis.

#### **b. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

Bahwa dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk Peraturan sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 tahun dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 telah menghasilkan peraturan baik yang merupakan

amanah dari peraturan di atasnya maupun peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang dipunyai.

Tabel 2.274 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2017-2021

Jenis	2018	2019	2020	2021	2022
Peraturan Daerah	23	16	14	11	13
Peraturan Kepala Daerah	161	132	160	191	149

Sumber, *Bagian Hukum, Setda, 2022*

Perda yang ditetapkan tahun 2022 sebanyak 13 Perda dengan rincian:

- a. 12 Perda ditetapkan berdasarkan propemperda tahun 2022, yang berjumlah 13 Raperda, 1 raperda dilanjutkan di tahun 2023 yaitu raperda toko swalayan dan sudah masuk di propemperda tahun 2023
- b. 1 Perda luncuran propemperda tahun 2021 yang ditetapkan pada bulan Juni tahun 2022 yaitu perda perubahan kedua atas Perda 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

### **c. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (IKM) Kabupaten**

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bantul diperoleh dari rata-rata nilai IKM PD pemberi layanan se-Kabupaten Bantul. Nilai IKM di Kabupaten mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan di PD Kabupaten Bantul mengalami peningkatan.

Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kabupaten Bantul terhadap kualitas layanan publik di semua unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul, dilaksanakan survei kualitas layanan dengan pelaksana survei sebagai berikut:

- Badan dan Dinas sebanyak 28 unit kerja
- Kapanewon sebanyak 17 unit kerja
- UPT Puskesmas sebanyak 27 unit kerja

Jumlah responden yang ikut survei sebanyak 62.459 responden dengan periode survei 01 January 2022 – 31 Desember 2022. Metode survei yang digunakan adalah sebagai berikut :

- *Direct* link survei melalui No. Handphone pengguna layanan
- *QR Code* survei di masing-masing layanan
- Survei tatap muka dengan membagikan kuesioner



Hasil survei kepuasan masyarakat berupa Indeks kepuasan layanan masyarakat di Kabupaten Bantul tahun 2018-2022 masuk dalam kategori **”Baik”** disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.275 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Indeks Kepuasan Masyarakat IKM</b>	88,70	86,96	88,03	87,91	88,25

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Bantul, 2023

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan, dan kinerja unit pelayanan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.276 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Bantul, 2023

#### **d. Inovasi Pelayanan Publik**

Untuk mendorong budaya inovasi unit kerja pelayanan publik di Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten secara rutin mengikutkan inovasi-inovasi unit kerja pada Kompetisi inovasi pelayanan publik (Sinovik) nasional yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Beberapa inovasi dari Kabupaten Bantul berhasil mendapat prestasi yang bergengsi antara lain:

- 1) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional Tahun 2019
  - 1 Inovasi dari Kabupaten Bantul yang masuk Top 45, yaitu: SIPERKASA (Sistem Penjemuran Karya Santosa) dibidang pertanian dengan inovasi berupa mengatasi masalah pasca panen mendukung ketahanan pangan
  - 1 Inovasi dari Kabupaten Bantul yang masuk Top 99, yaitu:

Mobil Keliling Pajak Bantul, Pelayanan Pajak Daerah Keliling berupa pelayanan PBB lebih dekat, lebih mudah, lebih murah.

- 2) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional Tahun 2020
  - 1 Inovasi dari Kabupaten Bantul yaitu GELIMASJIWO (Gerakan Masyarakat Peduli Sehat Jiwo) **masuk TOP 99**. Inovasi ini berupa gerakan masyarakat terpadu mengentaskan kesehatan masyarakat dengan gangguan jiwa (ODGJ) di wilayah Puskesmas Kasihan II.
- 3) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional Tahun 2021
  - 1 Inovasi dari Kabupaten Bantul yaitu GELIMASJIWO (Gerakan Masyarakat Peduli Sehat Jiwo) **masuk TOP 45**. Inovasi ini berupa gerakan masyarakat terpadu mengentaskan kesehatan masyarakat dengan gangguan jiwa (ODGJ) di wilayah Puskesmas Kasihan II.
- 4) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten
 

Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2021 tidak diselenggarakan dikarenakan Pandemi COVID-19 yang membatasi beberapa kegiatan yang berpotensi menyebarkan virus COVID-19.
- 5) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional Tahun 2022
  - 1 Inovasi dari Kabupaten Bantul yaitu Bantul Seroja (Sehat Ekonomi Meningkatkan Karo Jamu) **masuk TOP 45**. Inovasi ini berupa pengembangan pelayanan kesehatan tradisional dengan memanfaatkan ramuan jamu di Kabupaten Bantul.

Sinovik yang telah dilaksanakan pada tahun 2017-2020, sejak saat pandemi sampai tahun 2022 Sinovik Kabupaten Bantul tidak dilaksanakan. Inovasi terbaik daerah sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini

Tabel 2.277 Top Inovasi Pelayanan Publik di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020

No	Nama PD/Unit Kerja	Inovasi
<b>Top 10 Pemenang Sinovik Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2017</b>		
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SITUPAT, Siji Entuk Papat
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	KAPERU, KTP Baru Bagi Pengantin Baru
3	Kapanewon Piyungan	Penerbitan IUMK Jemput Bola
4	Kapanewon Bantul	GETARR, Gerakan Tanggap Renovasi Rumah
5	Puskesmas Kasihan 1	KEKEP IBU
6	Puskesmas Jetis 1	GELIAT BARONGAN

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Nama PD/Unit Kerja	Inovasi
7	Puskesmas Pleret	KRIPEK PARU, Obat Mujarab Penanggulangan TBC
8	Puskesmas Bambanglipuro	Paguyuban Tresno Rogo
9	Balai Benih Pertanian	SIPERKASA (Sistem Penjemuran Karya Santosa)
10	PDAM	PDAM Bantul Siap Prima
<b>Top 7 Pemenang Sinovik Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2018</b>		
1	Dinas Kesehatan	PSC 119 ( <i>Public Safety Center</i> ) 119
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	AKSI SIMPATI (Akta Kematian Sehari Jadi)
3	Kapanewon Piyungan	E-lawar (Laporan Aduan Warga)
4	Puskesmas Jetis I	GROPYOK TBC
5	Puskesmas Kasihan II	Jamah Linsek Viagra
6	Puskesmas Pleret	BADOT TERSENYUM (Buatlah Anak dan Orang Tua Tersenyum)
7	Puskesmas Piyungan	Gardu Kelola
<b>Top 8 Pemenang Sinovik Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2019</b>		
1	BPBD	Biss (Bantul Intergreated Siren System)
2	Dinas Perhubungan	Pembayaran E-retribusi Kendaraan Bermotor.
3	Disdukcapil	Dukcapil Smart.
4	UPTD Puskesmas Sedayu I	Tante Sosialita (Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga Solusi Sehat Alami Untuk Kita)
5	UPTD Puskesmas Jetis II	Garpu Salad (Gerakan Peduli Kesehatan Sulang Kidul)
6	UPTD Puskesmas Jetis I	Sijawara Joss (Pasien Sakit Jiwa Sehat Sejahtera Jenius Olah Sampah)
7	UPTD Puskesmas Pundong	Geplak Manis Dibawa Andong (Gerakan Pemberantasan TB Bersama Warga Kec. Pundong)
8	UPTD Rumah Potong Hewan	Sijempol (Sistem Jemput Bola)
<b>Inovasi Kabupaten Bantul Tahun 2020</b>		
1	Dinas Kominfo	Surat Elektronik Bantul (e-Surban)
2	Dinas Kominfo	Web Site Pemkab Bantul
3	Dinas Kominfo	Portal Satu Data

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Bantul, 2021

**2.1.3.4.1.2 Sekretariat DPRD**

Target pembahasan Raperda tahun 2022 ditetapkan Propemperda dalam Keputusan DPRD Kab. Bantul Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebanyak 10 Raperda Non APBD dan 3 Raperda APBD dengan rincian sebagai tabel berikut.

Tabel 2.278 Target Raperda Tahun 2022

No	Judul Raperda	Materi Pokok	Pemrakarsa	Status	Rencana Pembahasan
1	Kabupaten Layak Anak	Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Bupati	Baru	Triwulan I

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Judul Raperda	Materi Pokok	Pemrakarsa	Status	Rencana Pembahasan
2	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung	Bupati	Baru	Triwulan I
3	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPRD (Bapemperda)	Perubahan	Triwulan I
4	Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan	Penyesuaian Perda Kab. Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	DRPD (Komisi A)	Baru	Triwulan II
5	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah	Penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2018, penambahan penyertaan modal untuk Perumda Air Minum Tirta Projotamansari dan evaluasi untuk penyertaan Modal pada Perumda Aneka Dharma dan PT. BPR Bank Bantul	DRPD (Komisi B)	Baru	Triwulan II
6	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyesuaian substansi Perda Kab. Bantul Nomor 19 Tahun 2019 dengan PP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DRPD (Komisi C)	Baru	Triwulan II
7	Pengelolaan Keuangan Daerah	Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Bupati	Baru	Triwulan II
8	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan	Pertanggungjawaban APBD 2021	Bupati	Baru	Triwulan II

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Judul Raperda	Materi Pokok	Pemrakarsa	Status	Rencana Pembahasan
	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021				
9	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Bupati	Baru	Triwulan III
10	Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan	Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Bupati	Baru	Triwulan III
11	Kawasan Tanpa Rokok	Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Bupati	Baru	Triwulan III
12	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Perubahan APBD	Bupati	Perubahan	Triwulan III
13	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	APBD Murni Tahun Anggaran 2025	Bupati	Baru	Triwulan IV

Sumber data : Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, 2023

Adapun rincian raperda beserta status pembahasan dan produk hukum yang dihasilkan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.279 Produk Hukum yang Dihasilkan Tahun 2022

No	Judul Perda	Materi Pokok	Pemrakarsa	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung	Bupati	Selesai dibahas. Perda Nomor 3 Tahun 2022 Tgl. 18 Agustus 2022.
2.	Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Bupati	Selesai dibahas. Perda Nomor 4 Tahun 2022 Tgl. 18 Agustus 2022.
3.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Bupati	Selesai dibahas. Perda Nomor 5 Tahun 2022 Tgl. 30 September 2022.

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Judul Perda	Materi Pokok	Pemrakarsa	Keterangan
4.	Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan	Penyesuaian Perda Kab. Bantul Nomor 3 Tahun 2016 BUMDesa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	DPRD (Komisi A)	Selesai dibahas. Perda Nomor 6 Tahun 2022 Tgl. 30 September 2022.
5.	Perubahan Atas Perda Kab. Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyesuaian substansi Perda Kab. Bantul Nomor 19 Tahun 2019 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPRD (Komisi C)	Selesai dibahas. Perda Nomor 7 Tahun 2022 Tgl. 30 September 2022.
6.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah	Penyempurnaan Perda Kab. Bantul Nomor 23 Tahun 2018, penambahan penyertaan modal untuk Perumda Air Minum Tirta Progotamansari dan evaluasi untuk penyertaan modal Perumda Aneka Dharma dan PT BPR Bank Bantul	DPRD (Komisi B)	Selesai dibahas. Perda Nomor 8 Tahun 2022 Tgl. 30 September 2022.
7.	Kawasan Tanpa Rokok	Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Bupati	Selesai dibahas. Perda Nomor 10 Tahun 2022 Tgl. 29 Desember 2022.
8.	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Bupati	Selesai dibahas. Perda Nomor 11 Tahun 2022 Tgl. 29 Desember 2022.
9.	Penyelenggaraan Perumahan	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPRD (Bapemperda)	Selesai dibahas. Perda Nomor 12 Tahun 2022 Tgl. 29 Desember 2022.
10.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Bupati	Selesai dibahas. Perda Nomor 2 Tahun 2022
11.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Bupati	Selesai dibahas. Perda Nomor 9 Tahun 2022

No	Judul Perda	Materi Pokok	Pemrakarsa	Keterangan
	Tahun Anggaran 2022			
12	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Bupati	Selesai dibahas. Perda Nomor 13 Tahun 2022

*Sumber data : Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, 2023*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari ke-13 raperda (APBD dan Non APBD) yang diagendakan untuk dibahas pada tahun 2022, 12 (duabelas) raperda telah selesai dibahas dan disetujui bersama antara legislatif dan eksekutif serta telah disahkan menjadi produk hukum Kabupaten Bantul. Adapun satu raperda belum selesai dibahas pada tahun 2022 yaitu raperda “Raperda Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan” karena masih proses pembahasan di tingkat Pansus.

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yaitu “Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama” pada tahun 2022 berdasarkan rumusan “(Prosentase raperda yang disetujui Bersama tahun N dibagi Jumlah target raperda tahun N) dikali 100% mencapai 92,31%. Capaian ini di atas target yang ditetapkan sebesar 72% pada dokumen Renstra Sekretariat DPRD tahun 2021-2026.

Tabel 2.280 Persentase Raperda yang Disetujui Bersama Kabupaten Bantul, Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Raperda yang disetujui bersama	23	17	10	12	12
Jumlah target Raperda	23	14	10	12	13
Persentase Raperda yang Disetujui Bersama	100%	82%	100%	100%	92,31%

*Sumber: LKJ Sekretariat DPRD Tahun 2018 s/d 2022.*

### **2.1.3.4.2 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

#### **2.1.3.4.2.1 Perencanaan**

Penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Bantul didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan maka dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah DIY dan pemerintah pusat.

Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin berkualitas dan kompetitif baik dalam aspek pelayanan publik dan akuntabilitas berbasis kinerja dan transparan memberi dampak terhadap penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang baik dan tepat dengan melibatkan seluruh *stakeholders* pembangunan secara komprehensif. Pengintegrasian perencanaan daerah dengan pengelolaan keuangan sampai dengan monev dan evaluasi kinerja dalam penerapan *e-Government* menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas tersebut.

Indikator kinerja perencanaan dapat dilihat dari IKU Bappeda selaku Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Penunjang Perencanaan. Indikator kinerja semula terdiri dari 3 indikator yaitu keselarasan program kegiatan RKPD dengan RPJMD, persentase capaian rata-rata pencapaian target kinerja dan persentase program kegiatan RKPD sesuai Musrenbang digunakan pada tahun 2016, namun dengan adanya perubahan RPJMD 2016-2021, untuk tahun 2017-2021 dirumuskan menjadi 1 indikator yaitu persentase rata-rata pencapaian sasaran daerah.

Pada tahun 2021 Kabupaten Bantul melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, sehingga terdapat perubahan indikator kinerja dalam rangka mendukung visi, misi dan sasaran daerah.

Tabel 2.281 Capaian Indikator Perencanaan 2018-2022

INDIKATOR KINERJA	2018	2019	2020
Persentase Rata-rata Pencapaian Sasaran Daerah	105,46%	107,31%	98,77%



Indikator	Satuan	Capaian		
		2020	2021	2022
Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Persen	n/a	100	100
Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Persen	94,5	100	100

Sumber: Bappeda, 2023

#### **2.1.3.4.2.2 Keuangan**

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat peraturan perundang-undangan lain yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Sumber-sumber keuangan yang menjadi pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan/dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan/dana transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari transfer dana dari pemerintah atasan (APBN dan APBD DIY) yang dialokasikan kepada

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak daerah, dan bantuan keuangan. Dana perimbangan/dana transfer selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan bagian dari transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Tabel 2.282 Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah PAD	Jumlah Pendapatan Daerah	Persentase
2018	462.653.956.229,75	2.227.752.027.348,97	20,77
2019	505.929.472.001,63	2.269.539.168.277,63	22,29
2020	479.610.812.119,42	2.104.840.663.186,42	22,79
2021	491.670.724.028,10	2.235.655.701.355,10	21,99
2022*)	540.572.423.372,80	2.234.584.500.583,54	24,19

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 2023

\*) data masih bersifat sementara karena masih unaudit

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan yang sah. Realisasi PAD pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari realisasi PAD tahun 2021 karena adanya upaya-upaya:

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak.

- b. Memperbaiki dan memperluas basis data objek dan subjek pajak/retribusi daerah.
  - c. Memberikan reward bagi pamong desa dan dukuh yang wilayahnya telah lunas sebelum jatuh tempo.
  - d. Mengembangkan pelaporan pajak secara online untuk wajib pajak yang melakukan sistem pemungutan secara self assessment.
2. Mengoptimalkan pengelolaan manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito;
  3. Optimalisasi pendayagunaan aset daerah yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
  4. Meningkatkan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah/BUMD;
  5. Mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait;
  6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah misal dengan memperbaiki fasilitas obyek retribusi.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,

efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Gambaran keuangan Kabupaten Bantul tahun 2018-2022 secara umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.283 Gambaran Keuangan Kabupaten Bantul

<b>No</b>	<b>Bidang Urusan/ Indikator</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	***
2	Persentase SILPA terhadap APBD	11,41%	12,22%	10,15%	10,80%	9,67%**
3	Persentase program/ kegiatan yang tidak terlaksana	-	-	-	-	-
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	31,11%	30,20%	27,09%	25,62%	29,86%**
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	18,66%	17,25%	18,23%	21,26%	19,75%**
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	47,25%	48,32%	41,96%*)	n/a	n/a
		52,75%	51,68%	58,04%*)	n/a	n/a
7	Bagi hasil kabupaten dan Kalurahan	0,82%	0,98%	0,98%	1,08%	1,17%**
8	Penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 2023

\*) Realisasi belanja termasuk belanja tidak langsung yang berasal dari sumber Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Desa.

\*\*\*) Angka sementara

\*\*) Data belum rilis

Kondisi keuangan di Kabupaten Bantul tahun 2018-2022 secara umum dalam kategori yang baik dimana secara konsisten mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan oleh BPK. Hal ini tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk mempersiapkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Bantul agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan

program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah.

Selain itu persentase Selisih Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan kinerja yang semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan persentase SILPA yang semakin kecil dari tahun ke tahun. Kemudian alokasi belanja wajib untuk bidang pendidikan dan kesehatan juga diketahui sesuai dengan kriteria minimal. Terkait dengan bagi hasil kabupaten dan kelurahan yang mengalami kenaikan hal ini disebabkan oleh kenaikan realisasi PAD, kedua hal tersebut berbanding lurus.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mulai tahun 2021 kategori rekening belanja langsung dan belanja tidak langsung berubah menjadi belanja operasi.

Tabel 2.284 Persentase Komponen Belanja terhadap Total Belanja Tahun 2021-2022

Uraian	Persentase	
	2021	2022*
<b>BELANJA OPERASI</b>	75,02	75,48
Belanja Pegawai	40,15	37,99
Belanja Barang dan Jasa	32,03	34,21
Belanja Hibah	2,70	2,92
Belanja Bantuan Sosial	0,13	0,36
<b>BELANJA MODAL</b>	12,31	9,87
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	1,20	0,88
<b>BELANJA TRANSFER</b>	11,46	13,78
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 2023

Ket: \*) data unaudit atau bersifat sementara

Berdasarkan data pada tabel di atas, Komponen belanja di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 didominasi oleh belanja pegawai 37,99% dan belanja barang dan jasa 34,21%. Berikut merupakan penjelasan mengenai tiap komponen belanja.

1. Belanja Operasi; Belanja operasi terdiri dari komponen belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial mengalami kenaikan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai; belanja pegawai mengalami penurunan disebabkan karena adanya ASN yang pensiun berbanding terbalik dengan penerimaan ASN.
  - b. Belanja Barang dan Jasa: belanja barang dan jasa mengalami kenaikan, dengan komponen kenaikan adalah belanja barang sebesar Rp. 16.460.749.252,00, belanja jasa sebesar Rp. 15.440.611.858,00, belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 7.865.083.578,00, belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp. 3.502.811.758,00 dan belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp. 17.684.223.341,60; sedangkan belanja barang dan jasa yang mengalami penurunan hanya belanja pemeliharaan sebesar Rp. 1.806.411.899,94 dan belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp. 3.820.881.081,00.
  - c. Belanja hibah: Sesuai dengan Permendagri 77 Tahun 2020 untuk Belanja Hibah dikelola oleh OPD teknis sesuai dengan urusan kewenangannya.
  - d. Belanja Bantuan Sosial: Belanja bantuan sosial mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.119.900.000,00.
2. Belanja Modal: Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bangunan dan Gedung, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal serta Aset Tetap Lainnya. Belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp. 52.496.227.236,55, dengan penurunan terbanyak adalah belanja tanah sebesar Rp. 29.926.509.073,00, diikuti belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 12.543.810.428,90, kemudian belanja gedung dan bangunan sebesar Rp. 5.887.140.615,16, selanjutnya belanja aset tetap lainnya sebesar Rp. 4.156.382.900,00 dan yang mengalami penurunan terakhir adalah belanja modal aset lainnya sebesar Rp. 42.546.454,00, sedangkan belanja peralatan dan mesin mengalami kenaikan sebesar Rp. 60.162.234,51.

3. Belanja Tidak Terduga (BTT): Sebagai dasar penggunaan BTT, di Kabupaten Bantul telah diterbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul. Rincian penggunaannya antara lain untuk: pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan, penegakan protokol kesehatan di masyarakat, mengoperasionalkan kembali *shelter ex RS Patmasuri* untuk karantina pasien, *screening* pasien dan operasional labkesda, penambahan ruang rawat pelayanan covid-19, pelayanan vaksinasi, pemulasaran jenazah korban kecelakaan bukit bego Imogiri. Namun penggunaan terbanyak adalah untuk insentif tenaga kesehatan.
4. Belanja Transfer: Realisasi Belanja Transfer tahun 2022 sebesar Rp 309.515.184.340,00 atau 99,73% dari anggaran sebesar Rp 310.339.184.340,00. Realisasi tahun 2022 tersebut mengalami peningkatan sebesar 17,53% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp 54.269.789.249,00.

Beberapa upaya strategis untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, ditempuh dengan:

Mempedomani kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah sesuai dengan regulasi terbaru;

Penggunaan aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yaitu Sistem Informasi Manajemen Aset (Simas) dan pengelolaan persediaan dengan SIMPERSADA;

Menjalin kerjasama dengan perwakilan BPKP DIY untuk asistensi penerapan manajemen pengelolaan keuangan daerah melalui pendampingan atau *coaching clinic* penyusunan neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas;

Melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan realisasi pendapatan dan belanja dari transaksi - transaksi non RKUD (BLUD, Dana Desa dan Bosnas)

Mengikuti Diklat teknis dan *workshop* mengenai pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, perkembangan peraturan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga keuangan lainnya;

Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari pemerintah pusat agar prediksi pendapatan daerah, khususnya dana perimbangan, dalam APBD semakin realistis;

Melaksanakan sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi melalui Simpada;

Meningkatkan koordinasi antar SKPD penghasil dalam upaya tercapainya target pendapatan asli daerah yang diampu oleh masing-masing SKPD penghasil dan mengevaluasi atas kinerja pendapatan asli daerah;

Meningkatkan koordinasi antar SKPD untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang menjadi tanggung-jawabnya;

Penyebarluasan informasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah melalui media massa, media *online*, *leaflet*, dan lain-lain;

Menambah dan merevisi Standard Operating Procedure (SOP) pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku;

Melaksanakan tata kelola keuangan berbasis akrual agar dapat menyajikan laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel.



### 2.1.3.4.2.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Paradigma baru manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) membawa perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif pengelolaan ASN secara administratif menjadi pengelolaan ASN sebagai sumber daya (aset) dalam pelaksanaan pembangunan. Perspektif ASN sebagai sumber daya diarahkan dan dimanfaatkan untuk penyelenggaraan program kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan.

Peta jalan pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan terwujudnya birokrasi yang berkelas dunia dengan *Smart ASN*, yaitu ASN yang berintegritas, nasionalisme, professional, berwawasan global, menguasai teknologi, memiliki jejaring dan berorientasi pelayanan. Sumber daya ASN memiliki peran penting dan strategis dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Data jumlah PNS di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.285 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Kabupaten Bantul Tahun 2017-2022

Tahun	Jumlah PNS Golongan I			Jumlah PNS Golongan II			Jumlah PNS Golongan III			Jumlah PNS Golongan IV			Jumlah Total
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	
2018	93	6	99	709	263	972	1.456	2.493	3.949	1.059	1.939	2.998	8.018
2019	86	5	91	664	360	1.024	1.446	2.754	4.200	932	1.764	2.696	8.011
2020	77	5	82	613	331	944	1.297	2.546	3.843	824	1.671	2.495	7.364
2021	64	4	68	582	399	981	1.385	2.823	4.208	706	1.437	2.143	7.400
2022	43	2	45	539	474	1.013	1.329	2.809	4.138	612	1.267	1.879	7.075

Sumber : BKPSDM Kab. Bantul, 2023

Berdasarkan data tersebut, jumlah PNS Kabupaten Bantul dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena dalam kurun waktu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bantul hanya mendapatkan formasi pengadaan CPNS di tahun 2018, 2019 dan 2020. Sementara itu PNS yang memasuki masa purna tugas setiap tahun selalu ada. Jumlah PNS yang memasuki

purna tugas dan pindah tugas keluar tidak dapat diimbangi dengan penambahan dari pengadaan CPNS dan mutasi masuk. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk, Kabupaten Bantul pada tahun 2022 yang berjumlah 1.013.170 penduduk (sumber BPS Kabupaten Bantul), maka persentase jumlah ASN Kabupaten Bantul dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bantul adalah 0,69%.

### **1. Kompetensi Pegawai**

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bantul, diperlukan kecakapan para pegawai sehingga dapat bekerja sesuai tugas dan fungsinya dengan maksimal. Untuk itu diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan khusus bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki.

Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2022 sebanyak 1.765 orang atau sebanyak 24,22% dari jumlah total ASN. Kemudian jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural sebanyak 275 orang atau sebanyak 56,35% dari total formasi jabatan structural.

### **2. Jabatan PNS**

Dalam Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, jabatan ASN terdiri dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah memiliki peran dan fungsi dalam memimpin serta memotivasi aparatur sipil negara (ASN) pada instansi pemerintahan. Yang termasuk dalam jabatan pimpinan tinggi yaitu pada tingkat eselon II. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan komisi aparatur sipil negara. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pratama pada instansi Pemerintah Kabupaten Bantul sebanyak 34 jabatan dari 35 formasi jabatan.

Jabatan administrasi terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana. Tahun 2022 jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah sebanyak 1.834 jabatan, yang terdiri dari 161 jabatan administrator, 293 jabatan pengawas dan 1.380 jabatan pelaksana.

Jabatan fungsional pada instansi pemerintah merupakan sekelompok jabatan yang memiliki fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada tahun 2022 sebanyak 5.207 jabatan.

### 3. Indeks Profesionalitas

Tabel 2.286 IKU Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020-2022

IKU PD	2020	2021	2022
Capaian Indeks Profesionalitas ASN	68,08 Nilai	68,5 Nilai	57,44 Nilai

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bantul, 2023

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Pengukuran indeks profesionalitas ASN Kabupaten Bantul di Tahun 2021 evaluasi tahun 2020 dilakukan dengan metode pengukuran secara mandiri (*self assessment*) dengan menggunakan Formulir Indeks Profesionalitas ASN yang dibagikan ke Perangkat Daerah. Hasil dari pengukuran mandiri ini kemudian diinputkan ke

dalam Aplikasi SAPK BKN dan mendapatkan hasil Pengukuran Indeks IP ASN dengan Nilai 68,47.

Pada tahun 2022, berdasarkan hasil pengukuran kinerja Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu Indeks Profesionalitas ASN, diperoleh hasil sebesar 57,44 dari target sebesar 69 atau pencapaian sebesar 83,25%. Pencapaian target kinerja tersebut didukung oleh optimalisasi kinerja SDM dan ketersediaan aplikasi kepegawaian. Namun, pencapaian kinerja belum sesuai dengan target yang ditetapkan karena mengalami beberapa hambatan, yaitu :

- 1) perubahan mekanisme penilaian dari penilaian mandiri (*self assessment*) ke metode pengukuran langsung dalam sistem SAPK BKN;
- 2) perubahan kebijakan/regulasi dalam manajemen ASN (penyetaraan jabatan, pengelolaan kinerja, manajemen jabatan fungsional dan mekanisme pengukuran Indeks Profesionalitas ASN);
- 3) belum terkoneksi secara *host to host* sistem informasi kepegawaian dengan SAPK BKN.

#### 4. Sistem Merit

Dalam Penilaian Sistem Merit yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh Kategori I atau predikat Buruk dengan nilai 135 dengan 8 aspek yang dirinci dalam 37 indikator. Penilaian tersebut dilakukan sebagai evaluasi agar ke depan penataan sistem merit semakin baik dan mampu menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan potensi dan kompetensinya.

Tabel 2.287 Indeks Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator	Nilai
1	Perencanaan Kebutuhan	15
2	Pengadaan	30
3	Pengembangan Karier	12,5

No	Indikator	Nilai
4	Promosi dan Mutasi	15
5	Manajemen Kinerja	25
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	17,5
7	Perlindungan dan Pelayanan	8
8	Sistem Informasi	12
Total Nilai		135

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bantul, 2023

#### 2.1.3.4.2.4 Penelitian dan Pengembangan

Dalam rangka meningkatkan daya saing antar daerah Pemerintah Kabupaten Bantul berusaha mendorong dan memotivasi baik aparat pemerintah, masyarakat, swasta, maupun seluruh stakeholders yang ada untuk bersama-sama mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Program dan kegiatan mengenai Penelitian dan Pengembangan tertuang dalam kegiatan Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA. SIDA merupakan keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga Litbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, maupun masyarakat di daerah.

Dalam melaksanakan pengembangan inovasi daerah Pemerintah Kabupaten Bantul menjalin kerjasama dengan daerah lain, pemerintah DIY maupun pemerintah pusat, swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kondisi kultural/budaya Bantul agar terjadi kolaborasi/sinergitas sehingga menjadi sebuah sistem inovasi daerah yang saling terkait dan berkelanjutan.

Kerjasama tersebut salah satunya adalah memanfaatkan program pengabdian kepada masyarakat dari berbagai unsur Perguruan Tinggi untuk mendorong pengembangan inovasi masyarakat. Hal ini penting karena program pengabdian kepada masyarakat memberikan banyak manfaat baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakat antara lain:

- mendapatkan bantuan pemikiran dan tenaga dalam pemecahan masalah pembangunan daerah/lokasi,
- dikenalkannya pola pikir dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan berbagai program pembangunan, khususnya di pedesaan,
- tumbuhnya dorongan potensi dan inovasi di kalangan anggota masyarakat setempat dalam upaya pemenuhan kebutuhan lewat pemanfaatan ilmu dan pengetahuan.

Gambaran pengembangan inovasi daerah dalam kurun waktu tahun 2018-2021 sebagaimana pada tabel di bawah ini

Tabel 2.288 Pengembangan Inovasi Kabupaten Bantul Tahun 2018-2021

<b>Tahun</b>	<b>No.</b>	<b>Nama Inovasi</b>
<b>2018</b>	1	SIMDUK (Sistem Informasi Kependudukan)
	2	Janur Kota (Jajan Sedulur Nukono Tangga)
	3	PATEN Berhadiah
	4	Yanperum (Layanan Antar KTP Sampai Rumah)
	5	RANTAI BAJA
	6	Jetis Joss
	7	GEPLAK MANIS DIBAWA ANDONG (Gerakana Pelaksanaan Pemberantasan Tuberkulosis Bersama Warga Masyarakat Kapanewon Pundong)
	8	KUDA (Kendaraan Untuk Darurat Warga)
	9	SIJAWARA JOS (Pasien Jiwa Sehat Sejahtera Jenius Olah Sampah)
	10	SEMAKIN (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan)
<b>2019</b>	1	Early Warning Systems pada Sistem Pendampingan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan oleh Rumpun Bidang terhadap Perangkat Daerah di Bappeda Kabupaten Bantul
	2	PAKDE BLANGKON (Penyuluhan Kesehatan Dengan Barcode Langkah Online)
	3	MOROLEGA (Mobil Operasional Layanan Administrasi Kependudukan Efektif sekaligus Akurat)
	4	APLIKASI DUKCAPIL SMART BANTUL
	5	Sistem Pendaftaran Nomor Induk Kesenian (NIK) Seni Online "SIPESO"
	6	Ruang Milenial Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
	7	Aplikasi Surban (Surat Elektronik Bantul)
	8	KOPERASI SAHABAT SI MISKIN (PERAS HABIS)
	9	Njaba Asri (Belanja Bawa Tas Sendiri)
	10	Bebakulan
	11	SIPENTOL (Sistem Pendaftaran dan Pembayaran Non Tunai Online) E-Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
	12	KASINAWA (Aplikasi Rusunawa) Pembayaran E-Retribusi Rusunawa
	13	Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SIMDAN)
	14	SKM (Survei Kepuasan Masyarakat Online)
	15	INOVASI JEMPOL I-MASS ( Jemput Bola IUMK Massal ) Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul D.I.Yogyakarta
	16	Jelajah Potensi Lokal Kapanewon Srandakan
	17	Tim Sahabat APBDES
<b>2020</b>	1	RUBLIK BILIK HATI (BKPP)
	2	Aplikasi sistem pelaporan kegiatan dan assesment kebencanaan
	3	E Risalah SETWAN DPRD
	4	Pensil Bu Sita
	5	SIMPONI (Sistem Informasi Pendidikan dan Olahraga Terkini)

## RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

Tahun	No.	Nama Inovasi
	6	Bantul Sinau
	7	SITI CERIA (Sistem Terintegrasi Layanan Rekam KTP yang Cepat, Responsif, Informatif, Akurat dan Efektif)
	8	Leontin Mas
	9	KAPERU (KTP Baru untuk Pengantin Baru)
	10	AKSI SIMPATI (Akta Kematian Sehari Jadi)
	11	PENARI DESA (PEmbiNAAn Rintisan DESa budaya)
	12	SIM-ELOG (Sistem Informasi Manajemen E-Logistik)
	13	Pengelolaan Surat Secara Elektronik
	14	DIVERSIFIKASI USAHA PEMBUATAN APD ( MASKER DAN COVERALL)
	15	LAYANAN SATU JARI JELAJAH BANTUL
	16	E-RETRIBUSI PASAR
	17	Pasar Siaga Covid-19
	18	Robot Uji Kolong Perhubungan Bantul - ROJIKO HUBBA
	19	SI JAMBUL MANDI DI KOLAM SISTIM PINJAM BUKU SERTA LITERATUR SECARA MANDIRI OLEH KOMUNITAS, SEKOLAH & TBM
	20	PEPES ARTIS (Penilaian dan Penyusutan Arsip Untuk Instansi)
	21	SUSITARUNG (Surat Rekomendasi Tata Ruang)
	22	LANTIP (Layanan Terpadu Investasi dan Perijinan)
	23	PTSP (Pelayanan terpadu satu pintu)
	24	SIPERKASA Mendukung Ketahanan Pangan
	25	SIKAPU (Sistem Informasi Kearsipan DPUPKP)
	26	GERIMIS SENJA (Gerakan Mengatasi Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial)
	27	KENANGA ( Kader siaga perlindungan Perempuan dan Anak )
	28	Pos Pelayanan Hukum
	29	GELAS BELING (Gerakan Pelaksanaan Bersih Lingkungan) BAMBANGLIPURO
	30	pasar BARTER Kec Banguntapan
	31	DLINGO PENAK (Kapanewon Dlingo Peduli Perempuan dan Anak)
	32	GERAKAN MADU MANIS (Gerakan Masyarakat Peduli Mengatasi Kemiskinan) di Kapanewon Sewon
	33	Aplikasi esurat Kapanewon Pandak
<b>2021</b>	1	Pengarusutamaan SDGs (Sustainable Development Goals) Dalam Perencanaan Pembangunan dengan Penyusunan draft Rencana Aksi Daerah (RAD) di Kabupaten Bantul
	2	Anjungan Mandiri Pajak Daerah
	3	Board Game Edukasi Bencana
	4	Buletin e- SEJADA : Buletin Elektronik Sejahtera Demokratis dan Agamis
	5	SIKUBIS (Sistem Informasi Konsultasi Bisnis) (UJI COBA)
	6	SIMPATIK (Sistem Informasi Manajemen Pariwisata berbasis Statistik)
	7	BANTUL PINTER (Sistem Perpustakaan Terintegrasi Berbasis Internet)
	8	PIPI ALUS ( Aplikasi Sistem Pelaporan Pilar Sosial )
	9	Si Pengkuh ( Sinergitas Pengurangan Angka Kemiskinan Berdasarkan Data Kewirausahaan (UMKM))
	10	BERBAGI BUNGA DERMAYA KAPANEWON BANTUL
	11	GIYAT KAMU MANTAP BUNG (baGI rakYAT KurAng Mampu pinjaMAN TAnPa BUNGA)
	12	PASEBAN (Pasukan Anak Sekolah Basmi Nyamuk) di Kapanewon Sewon
	13	ELODEA (pEmanfaatan Lahan kOsong Di kantor kEcamatan sAnden)
	14	Jum'at silaturahmi distribusi E-KTP ke warga ( Jum'at si DIEWA )
	15	Gerakan Bersama Penataan Kantor "GEBER TOR" Kapanewon Pandak
	16	Layanan Warga GO 3 in One Kapanewon Piyungan

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2022

Pada tahun 2022 Kabupaten Bantul telah menetapkan inovasi melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 606 Tahun 2022 tentang Penetapan Inovasi di Kabupaten Bantul Tahun 2022. Dalam Keputusan terdapat inovasi dari 66 Perangkat Daerah dan Puskesmas dengan rincian sebagai berikut.

## RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

Tabel 2.289 Inovasi Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Judul Inovasi
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	SIMDAN
		Sistem Penerimaan Tamu elektronik
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
2	Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	Digitalisasi Kartu Inventaris Ruang (KIR)
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Aplikasi Cinta Anak Bantul
		Aplikasi SEMAKIN PINTAR (Sistem Monitoring Penanggulangan Kemiskinan dan Program Ketrampilan)
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Bayar Pajak Mudah, Nggak Bikin Gerah
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	Aplikasi mutasi antar instansi pemerintah
		Diklat berbasis LMS
		Percetakan sertifikat otomatis
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	Aplikasi E-Pemilos EVOSS (Electronic Voting System for Students) Pemilihan ketua OSIS SMP, dan SMA sederajat
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	Board Game
8	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul	PENARI DESA ( Pembinaan Rintisan Desa Budaya)
		DIRECTORY KEBUDAYAAN
		GEMISETITI (gerakan memaksimalkan potensi ekonomi secara hati - hati)
		Peningkatan Informasi Cagar Budaya Pada Website Dinas Kebudayaan ( KUDHA KABUDAYAN )
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	BALPIRIK (Bantul Pinter Terintegrasi Internet dan Komunitas Si Jambul Mandi di Kolam (Sistem Pinjam Buku serta Literatur secara Mandiri oleh Komunitas, Sekolah dan taman Bacaan Masyarakat)
		Pusaka Susi Jintan (Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Pada Pengrajin Batik dan Petani Milenial)
10	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	SIPENTOL (Sistem Pendaftaran Online)
		ROJIKUHUBBA (Robo Uji Kolong Perhubungan Bantul)
		E-Retribusi Terminal Kios
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	SIPO (System Perizinan Online Terintegrasi)
		PRIMA (Pembayaran Retribusi Perizinan melalui Anjungan Tunai Mandiri)
		LANTIP (Layanan Terpadu Investasi dan Perizinan)
		FAMOUS (Fasilitasi Mediasi Pemohon yang Mengurus Izin)
		GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung)
		GEPLAK (Gerakan Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal)
12	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul	SIPETARUNG (Sistem Informasi Pertanahan dan Tata Ruang)
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	Profil Batik Giriloyo
		Sistem Informasi Metrologi Bantul (SiMantul)
14	Dinas Lingkungan Hidup	Bantul Bersama
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	SIMDUK-KKBPK BANTUL
		EDUKASI DIGITAL PARENTING TERPADU
16	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Sim Data "Resi Deswita (Registrasi Destinasi Wisata)"
		LAYANAN SATU JARI "JELAJAH BANTUL"
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	Akselerasi pemberdayaan petani milenial di Kab.Bantul melalui Klinik Agribisnis Keliling
		SIPERKASA Mendukung Ketahanan Pangan
		IB KADO (Inseminasi Buatan pada Kambing dan Domba)
18		Aplikasi E-Retribusi Kios Terminal



## RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

No	Perangkat Daerah	Judul Inovasi
	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Bantul Online Shop
		Aplikasi E-Pemilos
		Aplikasi Sistem Informasi Zona Kawasan Menara
		Aplikasi Pendaftaran Vaksinasi Covid-19
		Aplikasi Penanda Keistimewaan Makam Kotagede
		Aplikasi Penanda Keistimewaan Makam Imogiri
		Bantulpedia
		Aplikasi Persuratan Kabupaten Bantul (Surban)
		Portal Data Bantul
		Metadata Kabupaten Bantul
		Geoportal Kabupaten Bantul
		e-Sajada
		Citizen Journalism
		KIM Milenial
	Jalur Utama Fiber Optik Topologi Ring	
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	SIKAPITEN TNI SIKAPITEN POLRI
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) Aplikasi Dana Insentif Kalurahan (DIKAL) Seleksi Tobermas (Tokoh Pemberdayaan Masyarakat)
21	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	Sigadis Pentul dalam menangani Administrasi Kegiatan Penilaian Angka Kredit JFT Pendidik E-moneter dalam menangani monitoring Kegiatan Sekolah Ramah Anak
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	PAK PILING (Pelayanan Antar Kerja Keliling)
23	Dinas Sosial Kabupaten Bantul	TANGGUL BANTUL
24	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Bantul Seroja (Sehat Ekonomi Meningkatkan karo Jamu) Sistem Informasi Manajemen E-Logistik (SIM E-LOG)
25	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul	WEBGIS IRIGASI
26	RSUD Panembahan Senopati	KINANTHI (Kirim Obat Tanpa Antri) SELASIH (Sehat Lezat Sinaji Higienis) Catering Gizi SRIKANDI (Sistem Registrasi Lan Informasi Kanthi Daftar Mandiri)
27	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	Barcode Arsip Kepegawaian Satpol PP Kader Sapta Tertib
28	Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul	Jarimas
29	Kapanewon Bambanglipuro	Gerakan "BERLIAN MAHAL"
30	Kapanewon Banguntapan	PASKAMBANG (Pasar Kamis Banguntapan)
31	Kapanewon Bantul	Berbagi Bungadermaya (Bersinergi Menghubungkan Dermawan dan Masyarakat Tidak berdaya) Gerobak Menua (Gerakan Ngobrol Bareng Anak dan Keluarga Mencegah Nikah Usia Anak)
32	Kapanewon Dlingo	JODIPATI (Jogo Wargo Dlingo dengan Pendidikan Akhlak dan Budi Pekerti)
33	Kapanewon Imogiri	Saga Ketan Mikita (Sambang Warga Ke Kelompok Tani, Usaha Mikro Kecil dan Wisata).
34	Kapanewon Jetis	ASMARA (Agen Kesehatan Mandiri Keluarga harapan) IBU SAY (Implementasi Budaya Satriya)
35	Kapanewon Kretek	SISI AKAL (Sistem Inovasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan) PESAN MAS BEJI (Pesanren Masyarakat Berbasis Masjid) KEMBANG SETAMAN (Kapanewon Mengembangkan Seni dan Wisata untuk Meningkatkan Kesejahteraan)
36	Kapanewon Kretek	PILUNAKMAMIK (Pinjaman Lunak Untuk Masyarakat Miskin) KELAS ELING TAHAN BANTING (Kapanewon Layak Anak Sinergi Eliminasi Stunting, Tata Kelola Sampah Menjadi Tabungan Bersama Kapanewon Kasihan Menuju Trending)
37	Kapanewon Piyungan	MANUAL GAS COVID 19 (Masif Penyuluhan Keliling Cegah Selalu Covid 19)

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Perangkat Daerah	Judul Inovasi
		Panorama (Publikasi Aktif Informasi Masyarakat)
38	Kapanewon Pajangan	INARSIP (Inovasi Arsip)
39	Kapanewon Pleret	Bangkit Berjamaah (Pinjaman Modal Berbasis Masjid dan/atau Majelis Taklim)
		SEBAR CETING KARET
40	Kapanewon Pundong	SEHARUM MELATI( Selalu harus melayani sepenuh hati)
41	Kapanewon Pandak	GEBERGAS (Gerakan Berantas Gizi Buruk dan Anak Stunting) dengan cara berbagi setiap jumat 1 butir telur setiap karyawan karyawan Kapanewon Pandak
42	Kapanewon Sedayu	Jempol Landhep (Jemput Bola Layanan Difabel)
43	Kapanewon Sanden	SIPARIS KAGOL (Aplikasi Penyimpanan Arsip dan Inventaris Kapanewon Google Drive)
44	Kapanewon Sewon	Gerakan Masyarakat Peduli Mengatasi Kemiskinan (Gerakan Madu Manis)
45	Kapanewon Srandakan	Online Terlengkap Usaha Mikro (ONTEL SI UMI)
		Pojok KLA
46	Puskesmas Bambanglipuro	Paguyuban Prolanis Tresno Rogo Puskesmas Bambanglipuro (Paguyuban Pengelolaan Penyakit Kronis Tresno Rogo)
		POTENSI (Program Pengelolaan Hipertensi)
		Pandu Bumil ke Pantai (Pengelolaan Terpadu Ibu Hamil Kekurangan Energi Protein dan Anemia Terintegrasi)
		Geliat Jiwa (Gerakan Bambanglipuro Sehat Jiwa)
		Temannya TB (Temukan Analisa Tangani Tuberkulosis)
		Program Ku Tau Aku Hebat (Program Peningkatan PHBS)
47	Puskesmas Banguntapan I	TILIK IBU (Tensi Ibune Cah Cilik Cilik)
		GARDU BATUK (Gerakan Terpadu Bantu Penderita Tuberculosis)
		GEMA SIAGA BU RT (Gerakan Bersama STOP Kematian Ibu dan Bayi dengan Pemantauan Bumil Risti)
		CeTing BaPak RuPaDi (Pencegahan Stunting)
		KAK GISTI (Kartu Kontrol Kapan Gigi Susu Ganti)
		PELITA BANGSA (Pelayanan Klinik Sanitasi Puskesmas Banguntapan I)
		DUDHA KEREN (Dukungan ODHA dan Kelompok Rentan)
48	Puskesmas Bantul I	DISKO KIA (Diskusi dan Koordinasi Kesehatan Ibu dan Anak)
		SABU -SABU (Sambang Ibu Hamil Sambang Ibu Nifas)
		DIMAS (Deteksi Tanda Bahaya Masa Nifas)
		DUTA MEDIASOS (Edukasi Kesehatan Melalui Media Sosial)
		Jambore Remaja Hebat
		One Stop Service Pasien Batuk
49	Puskesmas Bantul II	Karak seceting (Kader aktif konseling cegah stunting)
50	Puskesmas Dlingo I	Little Dentist
51	Puskesmas Imogiri I	Eling Jiwa
		Senja Kesturi ( Sehat dengan Jamu dan Akupresure di Puskesmas Imogiri I )
		Gasing ( Gerakan Atasi Stunting )
		Carang Gesing (Cegah Anah Gizi Kurang dan Stunting bersama Gizi dan Kesling )
52	Puskesmas Imogiri II	Cintai Belahan Jiwa ( Cerita Indah TANpa tendensi untuk difaBEL dan orang dengan gAngguan JiWA)
53	Puskesmas Jetis I	GERDU INDAH (Gerakan Terpadu Cinta Sampah)
		TINGSITU PTM (Skrining Lansia Terpadu Penyakit Tidak Menular)
		KLASTERKU TENSI (Kelas Terpadu Khusus Hipertensi)
54	Puskesmas Jetis II	PANDU HATI (Posyandu Kesehatan Jiwa)
		GARDU SEDAP ( Gerakan Dusun Sehat Gadungan Kepuh)
		CETING SENI ( Cegah Stunting Sejak Dini )
55	Puskesmas Kretek	GEMAS SI CANTIK (Gerakan Minum Tablet Tambah Darah Seminggu Sekali Cegah Anemia Remaja Putri Kretek)
		PERGI LOMBA MANCING (Pemeriksaan Gigi Calon Manten Baru Manfaat Cegah Stunting)
		ASIK SERU BAHAGIA (Konsultasi Dokter Spesialis Gratis Untuk Perbaikan Pemenuhan Gizi Anak)
56	Puskesmas Kasihan I	Ceting Kencono (Cegah Stunting Kelola Bocah Kanthi Paripurno)
		Gerdu Savana (Gerakan Terpadu Sadari dan IVA Kasuhan I)
57	Puskesmas Kasihan II	Gelimas Jiwo (Gerakan Peduli Masyarakat Sehat Jiwa)

No	Perangkat Daerah	Judul Inovasi
		Kolam Tamansari (Kolaborasi Menangani Masalah Gizi Balita dengan Asuhan Mandiri)
58	Puskesmas Pajangan	Kleting Kuning (Kelola Tingkatkan Gizi untuk kurangi Stunting) Sasak TB ( Satu hasu satu suspek TB)
59	Puskemas Piyungan	Si Rian Makan Banyak
60	Puskesmas Pleret	TERRAS PENDOPO ( Integrasi Pendidikan Kesehatan Pondok Pesantren )
		GARDU PANDANG ( Gerakan Terpadu Penurunan Anemia Stunting)
		Dabu-Dabu (datangi Bumil Datangi Bufas)
		Pesona Bumil (Periksa Sore terencana ibu Hamil)
		Jubah Si Miftah (Jus dan Buah untuk Edukasi Minum Tablet Tambah Darah)
		LIONTIN EMAS (Layanan Calon Pengantin Terpadu untuk Mencegah Kehamilan Beresiko)
		Es Mangga (Edukasi, Skrining, dan Manajemen Gangguan Pertumbuhan Pada Balita
		AMBEGAN (Ambulans Mubeng kalurahan )
		SARASEHAN BERSAHAJA (Pemeriksaan Kesehatan Karyawan Bersama Menuju Sehat Jiwa Raga)
		ONCCOM (Online Comprehenship Covid Monitoring)
		Si JULIE (Sistem Rujukan Online)
61	Puskesmas Pandak I	SIGITA
62	Puskesmas Pandak II	PEKA TENSI ( Pendampingan Kader Pada Penderita Hipertensi)
		KALIGAJI (Kader Peduli Orang Dengan Gangguan Jiwa)
		POS INDAH (Posbindu PTM Ayah)
		CEMISTRI (Cegah Anemia Pada Remaja Putri)
63	Puskesmas Sanden	SIPARIS KAGOL (Aplikasi Penyimpanan Arsip dan Inventaris Kapanewon)
64	Puskesmas Srandakan	Kentong lemut
		Bakpia Seceting
65	Puskesmas Sedayu II	SEGA CEKER (Sekeluarga Cek Kesehatan Rutin)
		GEMILANG (Gemar Makan Ikan Lengkapi Gizi Seimbang)
66	Puskesmas Sewon I	CETOT TB (Cegah Temukan Obati TB/ Tuberkulosis)

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2023

### 2.1.3.4.3 Unsur Pengawasan

#### 2.1.3.4.3.1 Inspektorat Daerah

Salah satu fungsi penunjang pemerintahan adalah pengawasan. Fungsi ini lebih dititikberatkan pada tindakan konsultatif dan preventif agar pelaksanaan pembangunan daerah berada di jalur yang benar.

#### a. *Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK*

Upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah salah satunya dilakukan melalui program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas KPK (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam koordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah, KPK berkolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP), dan Kementerian/ Lembaga yang terkait lainnya. Implementasi pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah;
3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah; dan
4. Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

*Monitoring Center for Prevention* (MCP) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah. Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.290 Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) KPK Tahun 2021-2023

Indikator	Satuan	2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja <i>Monitoring Centre for Prevention</i> (MCP) KPK	Nilai	82	85,37	82,5	92,52	83,5	95,48 *

Sumber: Inspektorat Kabupaten Bantul, 2024

keterangan\*

tanda (\*) angka sementara menunggu hasil QA (Quality Assurance) KPK RI

Target nilai MCP KPK Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 sebesar 83,5% dan terealisasi sebesar 95,48%. Capaian ini melebihi target dalam RKPD Tahun 2023. Faktor Pendorong nilai MCP KPK melebihi Target pada tahun 2023, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat komitmen pimpinan dan perangkat daerah dalam mengimplementasikan pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Memperkuat komitmen perangkat daerah dalam rangka pengumpulan dan penyusunan data sehingga data yang tersaji

adalah data yang berkualitas dan valid, serta data terkumpul tepat waktu.

3. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah.  
Melakukan pendampingan kepada perangkat daerah.
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim MCP KPK.

MCP KPK meliputi 8 (delapan) area intervensi yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Perizinan, Pengawasan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan BMD, dan Tata Kelola Keuangan Desa.

Tabel 2.300 Progres Keberhasilan Pemda Bantul Pada 8 (Delapan) Area Intervensi Monitoring Centre for Prevention (MCP) Tahun 2023

No	Indikator/ Area Intervensi	Nilai
1	Perencanaan dan Penganggaran APBD	96,00
2	Pengadaan Barang dan Jasa	99,00
3	Perizinan	100,00
4	Pengawasan APIP	86,00
5	Manajemen ASN	92,00
6	Optimalisasi Pajak Daerah	100,00
7	Pengelolaan BMD	95,00
8	Tata Kelola Keuangan Desa	100,00

Sumber: Inspektorat Kabupaten Bantul, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada area Pengawasan APIP masih ada beberapa sub indikator dalam MCP yang tidak terpenuhi, yaitu kecukupan anggaran dan kecukupan SDM. Ketercukupan personil APIP masih jauh dari kebutuhan berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 247 Tahun 2023 Tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah pada Tahun 2023 masih terdapat kekurangan tenaga Aparatur Pengawasan sejumlah 69 personil.

Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri 84 Tahun 2022, Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran Pengawasan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran APBD di atas Rp2

Triliun paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan diatas Rp15 Miliar. Adapun anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2023 sejumlah Rp 13.053.794.258 dan % Total Anggaran APIP terhadap Anggaran APBD (nonGaji) hanya sebesar Rp 4.863.271.305 (0,2%) sehingga ketentuan besaran 0,50% tidak bisa terpenuhi.

**b. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)**

Kebijakan pengawasan Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan salah satu bentuk dan tekad untuk mendukung cita-cita reformasi yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai konsekuensi untuk menciptakan kabupaten yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN. Kebijakan tersebut diambil oleh manajemen (instansi atau pejabat yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan di bidang pengawasan) dan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh anggota organisasi APIP dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasannya.

Kondisi jumlah tenaga Aparatur Pengawasan dan rincian kebutuhannya terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.291 Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No	Jenis Jabatan	2019			2020			2021			2022			2023		
		Jml	Kebutuhan	Kekurangan	Jml	Kebutuhan	Kekurangan	Jml	Kebutuhan	Kekurangan	Jml	Kebutuhan	Kekurangan	Jml	Kebutuhan	Kekurangan
1	Struktural															
	Inspektur	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
	Sekretaris	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
	Inspektur Pembantu	4	4	0	4	4	0	4	5	1	4	5	1	5	5	0
	Kasubag	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	2	3	1
2	Fungsional Tertentu															
	Auditor	21	52	31	18	43	25	17	58	41	18	58	41	21	48	27
	P2UPD	6	35	29	11	40	29	22	48	36	11	48	36	13	45	32
	Auditor	0	8	8	2	0	0	2	5	3	2	5	3	0	0	0

## RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

No	Jenis Jabatan	2019			2020			2021			2022			2023		
		Jml	Kebutuhan	Kekurangan	Jml	Kebutuhan	Kekurangan	Jml	Kebutuhan	Kekurangan	Jml	Kebutuhan	Kekurangan	Jml	Kebutuhan	Kekurangan
	Kepegawaian															
	JFT	0	4	4	4	6	2	4	4	0	4	4	0	4	6	2
3	Fungsional Umum															
	JFU	14	40	26	9	19	10	9	9	0	9	9	0	8	15	7
	Jumlah	50	108	98	53	117	66	53	134	81	53	134	81	55	124	69

Sumber: Inspektorat Kabupaten Bantul, 2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 247 Tahun 2023 Tentang Hasil Analisis Jabatan dan Abalisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, pada Tahun 2023 masih terdapat kekurangan tenaga Aparatur Pengawasan sejumlah 69 personil.

Terkait dengan kompetensi tenaga fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah dilakukan pemetaan kompetensi terhadap pejabat fungsional yang ada. Kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan sasaran audit harus didukung dengan diklat fungsional dan diklat substantif. Untuk 3 jenis diklat fungsional (JFT Pertama, JFT Muda, JFA Madya) 34 personil pejabat fungsional telah mengikuti semua, dan 8 Jenis diklat substantif telah diikuti oleh pejabat fungsional dan dilakukan secara bertahap.

### c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian

2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

Pedoman penilaian SPIP telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP tidak hanya berguna sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP. Tingkatan atau Level Maturitas sesuai Pedoman tersebut, terdiri atas 6 tingkatan dengan level 0, 1, 2, 3, 4, dan 5.

Tabel 2.292 Nilai SPIP Kabupaten Bantul tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Manajemen Risiko Indeks (MRI)			2,53	2,70	2,807
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)			2,72	2,930	2,930

Sumber: Inspektorat Kabupaten Bantul, 2024

Berdasarkan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY sebagai berikut :

1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada level 3 (Terdefinisi), artinya: Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif
2. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) memperoleh score 2,807 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Resiko Indeks (MRI) pada Level 2. Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) dilakukan untuk



menilai kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup pemerintah daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.

3. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) memperoleh skore 2,930. Penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dilakukan untuk menilai kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi.

**d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)**

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dalam lingkup pemerintah daerah di Indonesia telah diatur dalam:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
- (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
- (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023,
- (5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tuntutan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor atau APIP di Indonesia dalam peraturan-peraturan tersebut, secara hukum mengisyaratkan kewajiban untuk penyelesaiannya. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari suatu rangkaian pengawasan yang meliputi: perencanaan pengawasan, proses pengawasan, laporan hasil pengawasan sampai dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.293 Realisasi Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

Tahun	Eksternal/BPK			Internal (Irda Bantul dan Irda DIY)			Persen Internal dan Eksternal selesai
	Jumlah rekomendasi	Jumlah rekomendasi selesai di Tindak Lanjuti	Persen Tindak Lanjut selesai	Jumlah rekomendasi	Jumlah rekomendasi selesai di Tindak Lanjuti	Persen Tindak Lanjut selesai	
2019	25	25	100	193	186	96,37	98,19*
2020	63	63	100	151	140	92,72	96,36*
2021	25	25	100	170	164	96,47	98,24*
2022	46	41	89,13*	266	261	98,12	93,63*
2023	35	22	62,86*	186	152	81,72	72,29*

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bantul, 2024

keterangan\*

tanda (\*) angka sementara menunggu hasil verifikasi BPK RI

Tanda bintang (\*) dari tahun 2019 sampai 2023 menunjukkan bahwa persentase masih tetap berjalan penghitungannya karena masih belum selesai dan masih proses tindak lanjut serta verifikasi BPK RI, bilamana sudah 100 persen berarti suatu rekomendasi sudah di selesai tindaklanjuti.

#### **2.1.3.4.4 Unsur Kewilayahan**

##### **2.1.3.4.4.1 Kapanewon**

Kapanewon dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kapanewon;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kalurahan;

8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Panewu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kapanewon.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator kinerja utama Kapanewon di lingkup Kabupaten Bantul. IKM Kapanewon dari 17 Kapanewon yang ada di Kabupaten Bantul menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Dilihat dari standar deviasinya menunjukkan bahwa nilai IKM antar Kapanewon cenderung mengalami fluktuasi. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan publik ditingkat Kapanewon mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun kualitasnya cenderung variatif. Dengan demikian, diperlukan adanya terobosan yang dapat memperkecil perbedaan kualitas layanan publik antar Kapanewon.

Pencapaian indikator kinerja utama Kapanewon di lingkup Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.294 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kapanewon  
Lingkup Kabupaten Bantul 2018-2022

No	Kapanewon	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dlingo	95,18	91,25	95,96	94,86	94,83
2	Piyungan	95,64	91,55	93,67	94,77	95,11
3	Pleret	96,83	89,73	95,82	95,19	93,35
4	Banguntapan	79,76	89,73	92,21	94,52	95,24
5	Imogiri	97,15	91,22	92,15	92,07	92,1
6	Sewon	95,38	88,51	98,48	89,95	90,5
7	Jetis	94,75	89,06	92,77	92,54	92,55
8	Pundong	97,09	90,56	93,74	94,09	95,08
9	Kretek	96,34	91,66	92,29	90,86	92,83
10	Bambanglipuro	97,38	90,18	95,73	97,02	95,72
11	Bantul	98,95	91,86	95,70	96,64	94,15

No	Kapanewon	2018	2019	2020	2021	2022
12	Kasihlan	94,85	89,01	94,26	91,08	92,33
13	Sedayu	95,45	88,03	95,61	89,99	94,22
14	Pajangan	87,42	90,62	95,78	94,88	94,75
15	Pandak	84,57	92,23	92,45	92,69	94,49
16	Sanden	95,74	96,01	98,48	97,57	97,2
17	Srandakan	86,25	90,29	92,58	90,67	92,42
<b>Rata-rata</b>		<b>93,45</b>	<b>96,17</b>	<b>94,13</b>	<b>93,49</b>	<b>93,93</b>

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Bantul, 2023

Dari data di tabel terlihat bahwa Pada Tahun 2022, kapanewon yang memiliki nilai IKM tertinggi adalah Kapanewon Sanden (97,20) sedangkan kapanewon yang memiliki nilai IKM terendah adalah Kapanewon Sewon (90,50).

#### **2.1.3.4.5 Unsur Pemerintahan Umum**

##### **2.1.3.4.5.1 Kesatuan Bangsa dan Politik**

###### **a. Pembinaan Politik Daerah**

Pembinaan politik dalam negeri di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan melibatkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum, Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Perguruan Tinggi. Pembinaan politik daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman terhadap demokrasi dan peran serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang politik seperti partisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dilakukan kegiatan antara lain:

- 1) Pendidikan politik dengan sasaran antara lain pelajar SMA/ sederajat, kelompok rentan, purnawirawan TNI/POLRI dan masyarakat lainnya.
- 2) Bimbingan teknis penyusunan proposal, laporan, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik bagi pengurus partai politik yang mendapat suara.

3) Kegiatan TOT (*Training of Trainer*) dan Sosialisasi Pemilos (pemilihan OSIS) dengan sasaran pelajar SMP/ sederajat dan pelajar SMA/ sederajat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada para pelajar mengenai pentingnya demokrasi, tahapan, teknis dan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Tabel 2.295 Kegiatan Sosialisasi Pemilos (Pemilihan OSIS) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No.	Kegiatan	Sasaran					Narasumber
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Sosialisasi	99 sekolah	0 sekolah	89 sekolah	200 sekolah	200 sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga /Balai Pendidikan Menengah Kantor Kementerian Agama KPU
2	TOT	78 sekolah	0 sekolah	89 sekolah	200 sekolah	200 sekolah	Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga /Balai Pendidikan Menengah Kantor Kementerian Agama KPU
3	Bimbingan Teknis	78 sekolah	0 sekolah	89 sekolah	200 sekolah	200 sekolah	KPU Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga/Balai Pendidikan Pemda/Kantor/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Pelaksanaan Pemilos	78 sekolah	0 sekolah	89 sekolah	200 sekolah	200 sekolah	KPU Kantor Kementerian Agama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga/Balai Pendidikan Pemda/Kantor/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Monitoring Evaluasi	78 sekolah	0 sekolah	89 sekolah	200 sekolah	200 sekolah	KPU Kantor Kementerian Agama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga/Balai Pendidikan Pemda/Kantor/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan pembinaan politik generasi muda dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, TOT, bimbingan teknis, pelaksanaan pemilihan OSIS (pemilos) dan monitoring

evaluasi yang melibatkan KPU, Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Balai Pendidikan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun Pada tahun 2020 kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19 yang menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan protokol kesehatan.

Selain pemilih pemula yang menjadi fokus utama dengan TOT pemilos, kelompok rentan seperti kelompok difabel dan kelompok perempuan yang ada di Kabupaten Bantul juga menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pendidikan Politik. Tahun 2022 sasaran kelompok difabel dan perempuan masih belum optimal dalam pelaksanaannya sehingga untuk tahun anggaran 2023 direncanakan untuk diberikan porsi yang lebih banyak. Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik di Kabupaten Bantul tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.296 Kegiatan Pendidikan politik di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

Kegiatan	Sasaran					Narasumber
	2019	2020	2021	2022	2023	
Sosialisasi	1200 orang (disabilitas 5%, Perempuan 15%)	300 orang (disabilitas 5%, Perempuan 15%)	1.650 orang (disabilitas 5%, Perempuan 20%)	1.500 orang (disabilitas 5%, Perempuan 20%)	2100 orang disabilitas 5 % perempuan 20 % dan Remaja 30 %)	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga /Balai Pendidikan Menengah - Kantor Kementerian Agama - KPU

**b. Partisipasi Pemilih dalam PEMILU**

Tabel 2.297 Persentase Pemilih yang Berpartisipasi

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pengguna Hak Pilih	644.079	567.557	-	-	-
Jumlah Pemilih	732.805	708.351	-	-	-
Persentase Pemilih yang Berpartisipasi (%)	87,89	80,12	n/a	n/a	n/a

Sumber: KPU Bantul diolah oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2023  
Keterangan : 2018, 2021 dan 2022 tidak diselenggarakan pemilu

Tahun 2018, 2021 dan 2022 tidak dilaksanakan pemilihan umum (presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD) maupun pemilihan kepala daerah sehingga tidak ada parameter yang dapat diukur.

Pada tahun 2019 partisipasi masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum mencapai 87,89%. Hal tersebut dapat dicapai karena pada tahun 2019 diselenggarakan pemilihan umum (presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD) dan kesadaran masyarakat yang mempunyai hak pilih yang tinggal di Bantul cukup tinggi sehingga dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum meskipun bukan warga Kabupaten Bantul.

Penurunan partisipasi masyarakat terjadi pada pemilihan kepala daerah tahun 2020. Hal tersebut disebabkan antara lain karena pemilihan kepala daerah diselenggarakan pada situasi pandemi Covid-19 dengan protokol kesehatan. Kondisi tersebut mengakibatkan banyaknya pemilih yang tidak dapat mendatangi TPS karena sedang menjalani karantina akibat terkonfirmasi Covid-19. Pemilihan kepala daerah juga belum diantisipasi menggunakan sarana teknologi informasi.

Tabel 2.298 Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bantul Menurut Kapanewon Tahun 2020

No	Kapanewon	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Pemilih	Persentase Pemilih yang Berpartisipasi
1	Srandakan	19.055	23.878	79,80
2	Sanden	20.484	24.775	82,68
3	Kretek	20.244	23.791	85,09
4	Pundong	23.282	27.380	85,03
5	Bambanglipuro	25.921	31.774	81,58
6	Pandak	32.762	39.796	82,32
7	Pajangan	23.479	27.630	84,98
8	Bantul	38.929	47.829	81,39
9	Jetis	36.822	43.826	84,02
10	Imogiri	39.819	48.052	82,87
11	Dlingo	26.557	30.950	85,81

No	Kapanewon	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Pemilih	Persentase Pemilih yang Berpartisipasi
12	Banguntapan	56.875	79.168	71,84
13	Pleret	29.684	35.187	84,36
14	Piyungan	32.140	38.643	83,17
15	Sewon	56.915	72.994	77,97
16	Kasihani	56.326	76.741	73,40
17	sedayu	28.263	35.937	78,65
<b>Jumlah</b>		<b>567.557</b>	<b>708.351</b>	<b>80,12</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum, 2023

Dari tabel diatas Kapanewon yang perlu mendapatkan perhatian dalam Partisipasi Pemilih di Masyarakat dalam Pemilu antara lain:

1. Kapanewon Banguntapan
2. Kapanewon Kasihan
3. Kapanewon Sewon
4. Kapanewon Sedayu
5. Kapanewon Srandakan

Untuk mengantisipasi pelaksanaan Pemilu di Tahun 2024 kami banyak memberikan perhatian daerah-daerah tersebut untuk diberikan pendidikan politik.

Sebagai daerah perbatasan dengan Kabupaten lain tentu ini juga menjadi perhatian kita bersama dalam memberikan antisipasi terjadinya konflik dalam Pemilu.

**c. Organisasi Masyarakat (Ormas)**

Pada tahun 2023 jumlah keseluruhan ormas yang ada di Bantul adalah 185.

Tabel 2.299 Jumlah ormas yang terverifikasi di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah ormas yang terverifikasi	18 Ormas	30 Ormas	40 Ormas	46 ormas	127 ormas
2	Jumlah ormas keseluruhan	180	182	183	185	185 ormas



No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
3	Persentase ormas yang terverifikasi	10 %	16 %	21,85 %	24,86 %	68,64 %

*Sumber: Bakesbangpol, 2023*

Dari Data diatas dapat kami sampaikan bahwa jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Bantul yang sudah terdaftar di Bakesbangpol Bantul sejumlah 185 Organisasi, dari sekian itu yang sudah terverifikasi sampai dengan tahun 2023 sebanyak 127 organisasi atau sekitar 68.64 %, untuk meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bantul dalam Pembangunan dan agar terpantaunya kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Masyarakat perlu diadakan verifikasi Organisasi Kemasyarakatan. Dalam hal ini Bakesbangpol Bantul pada tahun 2023 ini telah merencanakan kegiatan tersebut dari sisa Organisasi Kemasyarakatan yang belum terverifikasi bekerjasama dengan Tim Terpadu Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Bantul yang diketuai oleh Bapak Bupati Bantul H. Halim Muslih, Tim ini akan bekerja secara maksimal sehingga dapat menghasilkan data yang valid di Kabupaten Bantul tentang Organisasi Kemasyarakatan termasuk Organisasi yang belum melaporkan keberadaannya di Bakesbangpol tetapi telah melaksanakan kegiatan di Kabupaten Bantul ini.

Tabel 2.300 Organisasi Masyarakat (Ormas) yang terverifikasi pada Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah ORMAS yang Terverifikasi	18 Ormas	30 Ormas	40 Ormas	46 ormas	127 ormas

#### **d. Kerukunan Antar Umat Beragama**

Potensi intoleransi antar umat beragama di Kabupaten Bantul masih ada mengingat beragamnya agama yang dianut masyarakat. Kasus intoleransi merupakan isu sensitif di masyarakat sehingga menjadi

perhatian untuk penanganannya. Berikut jumlah kasus intoleransi yang terjadi pada tahun 2019-2023.

Tabel 2.301 Kasus Intoleransi Tahun 2019-2023

<b>Uraian</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Jumlah Kasus Intoleransi	3	0	0	0	0

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, 2024

Tahun 2018 terdapat satu kasus intoleransi yaitu adanya perusakan properti yang akan digunakan warga masyarakat pantai di Parangtritis dalam melaksanakan Labuhan sesaji dalam rangka sedekah laut, pelaku pengrusakan adalah kelompok masyarakat yang tidak menghendaki kegiatan tersebut terlaksana sehingga melakukan perusakan. Kasus ini diselesaikan dengan musyawarah antara pelaksana kegiatan dengan warga.

Tahun 2019 terdapat tiga kasus intoleransi yaitu

1. Penolakan warga pedukuhan Karet, Pleret, Pleret, Bantul terhadap pendatang yang mengontrak dan beragama non muslim (Kristiani). Hal ini terjadi karena ada peraturan di Pedukuhan yang tidak mengizinkan non muslim menetap di pedukuhan tersebut. Setelah dilakukan mediasi permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan adanya kesepakatan mencabut peraturan pedukuhan.
2. Penolakan warga terhadap Gereja GPDI di Sedayu, permasalahan muncul saat Gereja GPDI mengurus pemutihan IMB. Permasalahan bisa diselesaikan dengan kesepakatan tidak diadakan kegiatan peribadatan sementara di tempat tersebut dan lokasi pendirian gereja dipindahkan dengan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Pembubaran ritual keagamaan di Pedukuhan Mangir Sendangsari Pajangan Bantul. Permasalahan terjadi karena adanya kegiatan ritual yang mengundang pemeluk agama lain. Permasalahan bisa diselesaikan dengan mediasi yang menghasilkan kesepakatan bahwa selanjutnya kegiatan tersebut tidak diijinkan mengundang pemeluk agama lain.

Tahun 2020-2022 tidak terjadi kasus intoleransi di Kabupaten Bantul. Upaya upaya badan kesbangpol Bantul dalam menekan angka Intoleransi bersama dengan Tim Penanganan Konflik sosial maupun keagamaan yang sudah ada seperti FKDM, FKUB, FPK. Bakesbangpol Bantul telah memberikan ruang bagi tokoh masyarakat maupun stakeholder di Kapanewon se kabupaten Bantul untuk melaksanakan Dialog keagamaan guna mencegah terjadinya benturan di masyarakat antar tokoh keagamaan.

Selain itu kami juga rutin melakukan koordinasi kepada kalurahan maupun dusun secara tertutup dengan intelligent yang ada di tingkat Kabupaten Bantul.

Dengan kerjasama antar Intelegent yang ada di Kabupaten Bantul dapat membantu informasi dari bawah apa yang menjadi permasalahan-permasalahan sehingga tim kami bisa memberikan antisipasi agar sebuah permasalahan tidak menjadi suatu kasus yang dapat menimbulkan Intoleransi di masyarakat.

**2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah**

**2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah**

**2.1.4.1.1 Pengeluaran Perkapita**

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.

Tabel 2.302 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu rupiah/orang/tahun) Tahun 2018 – 2022

<b>Uraian</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kabupaten Bantul	15.386	15.636	15.517	15.545	16.002
D.I Yogyakarta	13.946	14.394	14.015	14.111	14.482
Nasional	11.059	11.299	11.013	11.156	11.479

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengeluaran rata-rata penduduk Kabupaten Bantul di atas DIY dan Nasional. Pada tahun 2022, pengeluaran perkapita Kabupaten Bantul adalah

Rp.16.002.000/kapita/tahun, DIY Rp.14.482.000/kapita/tahun dan Nasional Rp11.479.000/kapita/tahun.

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

**Tabel 2.303 Persentase Pengeluaran Konsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022**

No.	Jenis Pengeluaran Konsumsi	Persentase Pengeluaran Konsumsi (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Non Makanan	60,60	58,65	57,63	57,29	57,29
2	Makanan	39,40	41,35	42,47	42,70	42,70

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase pengeluaran non makanan penduduk Bantul lebih dominan dibandingkan pengeluaran makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat perekonomian penduduk di Kabupaten Bantul cukup baik.

#### **2.1.4.1.2 Nilai Tukar Petani (NTP)**

Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), di mana It menunjukkan fluktuasi barang-barang yang dikonsumsi petani termasuk barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Sektor pertanian yang dicakup dalam penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) meliputi lima subsektor yaitu subsektor tanaman

pangan, subsektor tanaman hortikultura, subsektor tanaman perkebunan rakyat (TPR), subsektor peternakan, dan subsektor perikanan.

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Tabel 2.304 Perkembangan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
NTP Kabupaten Bantul	103,16	103,75	101,13	97,38	98,40
NTP D.I Yogyakarta	100,76	103,41	101,12	97,38	98,40
NTP Nasional	102,30	103,36	101,65	104,64	107,39

Sumber: BPS, 2022

Dari tabel di atas menunjukkan perkembangan NTP Kabupaten Bantul dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 NTP Kabupaten Bantul lebih dari 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi.

Tahun 2021 dan 2022 data NTP Kabupaten Bantul tidak dihitung. Untuk mengetahui NTP menggunakan NTP DI Yogyakarta. Nilai NTP tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun 2021 yaitu 98,40. Meski mengalami kenaikan, NTP Kabupaten Bantul masih di bawah NTP Nasional. NTP < 100, berarti harga produksinya naik lebih kecil dari kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi, pendapatan petani turun.

#### **2.1.4.2 Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur**

##### **2.1.4.2.1 Penyediaan Fasilitas Telekomunikasi**

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menentukan kebijakan bahwa *e-Government* merupakan salah satu pengungkit percepatan reformasi birokrasi, hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2006 tentang *Blueprint Jogja Cyber Province*. Kebijakan ini berarti pemerintah Kabupaten Bantul memposisikan urusan komunikasi dan informatika sebagai komponen terpenting untuk menuju pemerintahan berbasis elektronik atau teknologi informasi dan komunikasi.

Pengembangan *e-Government* menitik beratkan pada layanan unggulan *Digital Government Services* (DGS). Agar sistem ini dapat berjalan dengan baik maka kebijakan ini didukung oleh sarana dan prasarana pengembangan jaringan internet yang baik.

Berkenaan dengan hal tersebut maka telah dilakukan penyajian informasi dan aplikasi *e-Gov* melalui *website*, serta 24 sistem informasi dan 68 aplikasi baik yang bersifat *intranet*, *desktop*, maupun *online* sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.305 Sistem Informasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Tahun	No.	Nama aplikasi
2018	1	Aplikasi E-Retribusi
	2	Aplikasi Kampung KB
	3	Aplikasi Pengembangan E-Lapor
	4	Aplikasi TIK
	5	Aplikasi Autentifikasi
	6	Jelajah Bantul
	7	Sigadis Pentul - SiPenTul
	8	Sistem Informasi Administrasi Puskesmas (SIAP)
	9	Sistem Informasi Manajemen Desa
	10	Survei Kepuasan Masyarakat
2019	1	eSurat Bantul
	2	Biss (Bantul Intergreated Siren System)
	3	Pembayaran E-retribusi Kendaraan Bermotor.
	4	Dukcapil Smart.
	5	Tante Sosialita (Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga Solusi Sehat Alami Untuk Kita)
	6	Garpu Salad (Gerakan Peduli Kesehatan Sulang Kidul)
	7	Sijawara Joss (Pasién Sakit Jiwa Sehat Sejahtera Jenius Olah Sampah)
	8	Geplak Manis Dibawa Andong (Gerakan Pemberantasan TB Bersama Warga Kec. Pundong)
	9	Sijempol (Sistem Jemput Bola)
2020	1	Aplikasi Kapung KB
	2	Aplikasi Pengelolaan Zakat Daerah
	3	Aplikasi Autentifikasi terpusat
	4	Aplikasi Sarana TIK
	5	Pengembangan Lapor Bantul (e-lapor)
	6	Pengembangan DGS Layanan Kesehatan
	7	Soerban (Aplikasi E-Surat Bantul)
	8	Pacoban (Pemantauan Pendetatng dan Kegiatan di Kabupaten Bantul
2021	1	Aplikasi Ikutvaksin
	2	Aplikasi Jaring Aspirasi Masyarakat
	3	Aplikasi E-Surat Bantul Mobile Based
	4	Aplikasi Bantulpedia
	5	Aplikasi Pengendalian Menara Telekomunikasi
	6	Aplikasi eRetribusi Menara Telekomunikasi
	7	Aplikasi Metadata Statistik
	8	Aplikasi Whistle Blowing System
	9	Aplikasi eAudit
	10	Aplikasi Simbersama DLH

Tahun	No.	Nama aplikasi
	11	Aplikasi Bantul Online Shop
	12	Aplikasi Siapkesos Dinsos
	13	Portal Bantulkab
	14	Portal Smartcity
	15	Portal Covid-19
2022	1	Government Service Bus (GSB) Kabupaten Bantul
	2	Web Profil Perangkat Daerah (Badan, Dinas, Kapanewon, Puskesmas, dan Lembaga)
	3	Aplikasi Makam Kotagede
	4	SISBANYANKES
	5	Aplikasi Visualisasi Data Portal SDI
	6	EVOSS
	7	SIDAMESRA
	8	Jelajah Bantul
	9	Web GIS Daerah Irigasi
	10	SIMDATA PARIWISATA
	11	LeontinMAS Legalisir dukcapil
	12	Bukti Potong PPh 21
	13	Aplikasi Whistle Blowing System
	14	Aplikasi eAudit
	15	OJS (Open Journal System/ Jurnal Riset Daerah)
	16	Aplikasi Sistem Informasi Zona Kawasan Menara Telekomunikasi (Siszora)
	17	DIREKTORI KEBUDAYAAN
	18	Aplikasi Kabupaten Layak Anak (KLA)
	19	Dana Insentif Kalurahan
	20	Computer Based Test (CBT) Dikpora

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2023

Selain website dan aplikasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas, juga diterapkan sarana komunikasi dan informasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya, yaitu berupa pemanfaatan media telematika, seperti penggunaan aplikasi sistem informasi, SMS center, website daerah yaitu [www.bantulkab.go.id](http://www.bantulkab.go.id), [bantulbiz.com](http://bantulbiz.com), [bantulcraft.com](http://bantulcraft.com), informasi SKPD melalui subdomain SKPD, Warung Informasi dan Teknologi (Warintek), fasilitas akses jaringan internet dan intranet SKPD dan telecenter.

Peningkatan pembangunan infrastruktur jaringan internet dan intranet OPD Pemerintah Kabupaten Bantul dapat dilihat dengan pembangunan jaringan *fiber optic* sepanjang 43,95 km yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, Kapanewon, dan pemerintah tingkat kalurahan serta puskesmas.

#### **2.1.4.2.2 Partisipasi Lembaga Swasta melalui CSR**

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah bentuk tanggung jawab organisasi atau

perusahaan terhadap masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di Kabupaten Bantul, CSR telah memberikan andil dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMN, lembaga keuangan non BUMN, instansi kesehatan, instansi pendidikan, dan perusahaan umum yang ada di Kabupaten Bantul telah banyak mengalokasikan dana CSR untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengapresiasi dan mendokumentasikan bantuan dana CSR tersebut, setiap tahun Pemerintah Kabupaten Bantul setiap tahun menerbitkan buku CSR Membangun Bantul.

Pada tahun 2022 tercatat ada 45 instansi/lembaga dan perusahaan yang memberikan dana CSR kepada masyarakat Bantul, sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.306 Pemanfaatan CSR di Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Nama Perusahaan	Bidang Kegiatan	Jumlah
1	BANK BRI KANCA BANTUL	Sosial, Kesehatan, Lingkungan, Pendidikan, UMKM dan Ekonomi Kreatif	Rp2.467.700.000
2	RSU PKU Muhammadiyah Bantul	Sosial, Kesehatan, Pendidikan	Rp1.303.308.409
3	PT PLN UP 2 Yogyakarta	Sosial, Pendidikan, Lingkungan	Rp1.176.023.798
4	PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu	Kesehatan, UMKM dan Ekonomi Kreatif	Rp1.074.000.000
5	BANK BPD DIY CABANG BANTUL	Lingkungan, UMKM dan Ekonomi Kreatif	Rp1.049.850.000
6	PAMELLA TIGA SUPERMARKET	Sosial dan Pendidikan	Rp725.505.000
7	BMT Artha Amanah Sanden	Sosial, Kesehatan, Lingkungan, Pendidikan, UMKM dan Ekonomi Kreatif	Rp723.318.809
8	Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY	Sosial, Kesehatan, Lingkungan, UMKM dan Ekonomi Kreatif	Rp635.980.000
9	PT MADUBARU	Sosial, Kesehatan, Lingkungan, Pendidikan, UMKM dan Ekonomi Kreatif	Rp539.866.750
10	BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA	Sosial	Rp408.500.000
11	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kesehatan, pendidikan	Rp398.246.182
12	PT SURADI SEJAHTERA RAYA	Sosial, lingkungan	Rp375.684.575
13	PT. Busanaremaja Agracipta	Sosial, Kesehatan, Lingkungan	Rp236.994.940
14	KSPPS BMT EL-BUMMI 381 BANTUL	Sosial, Pendidikan, UMKM dan Ekonomi Kreatif	Rp172.449.700



**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Bidang Kegiatan</b>	<b>Jumlah</b>
15	PT. Anggun Kreasi Garmen	Sosial, Pendidikan	Rp161.889.627
16	PT ANGKASA PURA I KANTOR YIA	Sosial	Rp160.000.000
17	Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia (Rs UII)	Kesehatan, Sosial	Rp148.400.000
18	PT SINAR KENCANA MAKMURJAYA	Sosial	Rp137.509.100
19	Mulia Toserba Bantul	Sosial	Rp130.589.400
20	PT.Busana Remaja Agracipta Giwangan	Sosial, Pendidikan, Lingkungan, UMKM dan Ekonomi Kreatif	Rp123.466.300
21	PT. Bayu Utama	Sosial	Rp120.356.500
22	PT. Ameya Livingstyle Indonesia	Kesehatan, Sosial	Rp113.687.858
23	PT. Indomarco Prismatama	Pendidikan, UMKM dan Ekonomi Kreatif	Rp112.000.000
24	PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 6	UMKM dan Ekonomi Kreatif	Rp67.910.000
25	KSP Adil Yogyakarta	Sosial, Pendidikan, Kesehatan, UMKM dan Ekonomi Kreatif	Rp50.709.500
26	KSPPS BMT NITI TENTREM NUGRAHA (NITEN)	Sosial	Rp49.274.286
27	KSPPS BMT Mitrama	Sosial	Rp48.773.900
28	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projo Tamansari	Lingkungan	Rp48.004.200
29	KSPPS BMT Assalam	Sosial, Pendidikan, UMKM dan Ekonomi Kreatif	Rp46.531.400
30	BMT INSAN SADAR USAHA	Sosial	Rp42.368.734
31	KSPPS BMT AD DA'WAH	Sosial, Pendidikan	Rp36.931.961
32	PT OUT OF ASIA	Sosial, Pendidikan	Rp33.700.000
33	KSPPS BMT MOJO BANGUN SENTOSA	Sosial, Lingkungan	Rp31.500.000
34	PT IDE STUDIO INDONESIA	Sosial	Rp31.200.000
35	PT. Telkom Indonesia	Pendidikan	Rp25.000.000
36	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI)	Lingkungan, UMKM dan Ekonomi Kreatif	Rp25.000.000
37	Rumah Sakit Santa Elisabeth	Sosial, Kesehatan	Rp20.700.000
38	PT IGP INTERNASIONAL BANTUL	Sosial	Rp17.275.000
39	Toserba dan Swalayan Purnama	Sosial	Rp16.000.000
40	GRAND ROHAN JOGJA	Sosial, Pendidikan, Kesehatan	Rp14.600.000
41	PT. PRODUK REKREASI (KIDS FUN)	Sosial, Kesehatan	Rp14.137.000
42	CV. Jawa Classic Aesthetics	Sosial	Rp10.000.000
43	PT. BPR Bank Bantul	Lingkungan, Pendidikan, Kesehatan	Rp8.750.000
44	ROS IN HOTEL	Sosial, Pendidikan, Lingkungan	Rp5.450.000
45	KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH AN-NAHDLAH	Sosial	Rp5.270.770
<b>TOTAL</b>			<b>Rp13.144.413.699</b>

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2023

Pada tahun 2021, data sementara tercatat ada 57 instansi/lembaga dan perusahaan yang memberikan dana CSR kepada masyarakat Bantul, meningkat dari tahun 2020. Data CSR 2021 sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.307 Pemanfaatan CSR di Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Nama Perusahaan	Bidang Kegiatan	Jumlah
1	Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY	Sosial, Ekonomi	Rp 1.580.220.000
2	PLN UP 3 YOGYAKARTA	Sosial, Pendidikan, Lingkungan	Rp 1.565.350.000
3	PT BANK BPD DIY	Sosial, Pendidikan, Ekonomi	Rp 1.185.000.000
4	PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu	Ekonomi, Lingkungan	Rp 973.000.000
5	RS Santa Elisabeth	Pendidikan	Rp 935.000.000
6	PT MADUBARU	Sosial, Ekonomi	Rp 827.029.900
7	BMT Artha Amanah	Sosial, Pendidikan, Ekonomi	Rp 736.028.100
8	Bank BRI Kantor Cabang Bantul	Sosial, Ekonomi	Rp 449.181.818
9	RS PKU Bantul	Sosial, Pendidikan	Rp 434.931.200
10	BMT Projo Artha Sejahtera	Sosial	Rp 419.413.800
11	BANK MANDIRI KCP BANTUL	Kesehatan	Rp 200.000.000
12	GOJEK	Kesehatan	Rp 175.000.000
13	BMT EL BUMMI 381	Sosial, Pendidikan, Ekonomi	Rp 138.915.900
14	KSP Koperasi Kredit Adil Dlingo	Sosial, Lingkungan	Rp 135.245.350
15	PT SURADI SEJAHTERA RAYA	Sosial, Kesehatan, Hukum Tata Kelola	Rp 110.200.000
16	CV Jawa Classic Aesthetics Furniture & Craft	Ekonomi	Rp 110.000.000
17	PT Indomarco Prismatama	Sosial, Pendidikan	Rp 109.929.000
18	BNI KC Yogyakarta	Sosial	Rp 102.315.000
19	PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yk	Ekonomi	Rp 100.000.000
20	KSPPS TAMZIS BINA UTAMA	Sosial, Pendidikan, Lingkungan	Rp 98.552.318
21	PT Anggun Kreasi Garmen	Sosial, Pendidikan, Lingkungan	Rp 97.098.376
22	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, & Ratu Boko	Sosial, Pendidikan	Rp 93.210.000
23	BMT INSAN SADAR USAHA	Sosial, Pendidikan	Rp 86.350.000
24	PT Yogyakarta Tembakau Indonesia	Sosial, Pendidikan	Rp 85.825.500
25	PT. Busanaremaja Agracipta	Sosial, Lingkungan	Rp 70.307.900
26	BMT Ad Da'wah	Sosial. Pendidikan	Rp 67.507.100
27	BMT NITI TENTREM NUGRAHA (NITEN)	Sosial, Pendidikan	Rp 66.514.050
28	BMT Mitrama	Sosial	Rp 63.775.400

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Nama Perusahaan	Bidang Kegiatan	Jumlah
29	PT BPR Bank Bantul	Ekonomi, Pendidikan	Rp 55.120.000
30	BMT MOJO BANGUN SENTOSA	Sosial, Ekonomi	Rp 55.000.000
31	GRAND ROHAN JOGJA	Sosial	Rp 52.217.000
32	PT Angkasa Pura I KC YIA	Ekonomi	Rp 50.000.000
33	PT Bank KB Bukopin	Sosial	Rp 50.000.000
34	PT Ameya Livingstyle Indonesia	Sosial, Pendidikan, Lingkungan	Rp 47.290.400
35	PT ADI SATRIA ABADI	Sosial	Rp 46.200.000
36	BMT Assalam	Sosial, Pendidikan, Ekonomi	Rp 42.560.700
37	BMT Sabilul Muhtadin	Sosial	Rp 32.907.000
38	PT Sinar Kencana Makmurjaya	Sosial	Rp 27.962.500
39	PT Ide Studio Indonesia (Karpenter)	Sosial, Pendidikan	Rp 27.750.000
40	PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	Sosial, Lingkungan, Hukum tata kelola	Rp 25.557.000
41	PAMELA SUPERMARKET	Sosial, Pendidikan	Rp 20.350.000
42	Bank Mandiri Taspen Bantul	Sosial	Rp 20.000.000
43	BMT RIZQI BAROKAH	Sosial, Pendidikan	Rp 19.778.400
44	PT IGP Internasional	Kesehatan	Rp 12.431.863
45	Kamar Dagang dan Industri Kab. Bantul	Sosial	Rp 11.150.000
46	KSP Graha Mandiri	Sosial	Rp 10.000.000
47	BMT EL BUMMI 373	Sosial	Rp 7.905.500
48	Kopdit Amrih Makmur	Pendidikan	Rp 7.250.000
49	BMT Barokah	Sosial	Rp 7.113.400
50	PT Anindya Mitra Internasional	Sosial, Ekonomi	Rp 6.910.000
51	PT Cahaya Mulia Persada Nusa	Sosial	Rp 5.875.000
52	KSPS AN NAHDLAH	Sosial	Rp 4.362.015
53	BANK WOORI SAUDARA	Sosial, Pendidikan	Rp 3.550.000
54	KSU Amanah Insani Makmur	Sosial	Rp 3.000.000
55	PT Bank Panin Dubai Syariah	Sosial	Rp 2.500.000
56	Kopwan BMT An-Nisa	Sosial	Rp 2.320.000
57	KSPPS Kube Sejahtera 23	Sosial	Rp 1.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>Rp 11.673.961.490</b>

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2022

Program CSR diarahkan untuk mendukung Program Prioritas Daerah, yaitu: pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanganan sampah, peningkatan sektor unggulan (pariwisata, industri dan pertanian) dan Kabupaten Layak Anak (KLA). Pelaksanaan CSR mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Dalam pelaksanaan CSR di Kabupaten Bantul terdapat

Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan masa bakti tahun 2020-2023 berdasarkan SK Bupati Bantul Nomor 270 tahun 2020 dan Tim Koordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan SK Bupati Bantul Nomor 51 tahun 2022.

#### 2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

##### 2.1.4.3.1 Angka Kriminalitas

Dalam mendukung terciptanya iklim berinvestasi di Kabupaten Bantul maka pemerintah daerah bersama dengan instansi vertikal (kepolisian dan kejaksaan) harus berupaya meningkatkan keamanan yang kondusif di masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani merupakan indikator yang berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Tabel 2.308 Angka Kriminalitas di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2021

No	Jenis Kriminal	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kasus Narkoba	78	95	98	78
2	Jumlah kasus Pembunuhan	2	2	2	3
3	Jumlah Kejahatan Seksual	15	41	43	36
4	Jumlah kasus Penganiayaan	81	85	87	90
5	Jumlah kasus Pencurian	281	362	375	307
6	Jumlah kasus Penipuan	94	122	125	162
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	0	0	0	1
a	Total Jumlah Tindak Kriminal Tertangani Selama 1 Tahun	551	707	730	677
b	Jumlah Penduduk	939.718	949.325	954.706	956.513
	Angka Kriminalitas ((a/b) x 100) (Permendagri 18/2019)	0,055	0,074	0,076	0,071
	Angka Kriminalitas ((a/b) x 10.000) (Permendagri 86/2017)	5,86	7,45	7,65	7,08

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul diolah, 2022

Dari data di atas, pada tahun 2021 terdapat 7 tindakan kriminal tiap 10.000 penduduk, menurun dari tahun 2020. Kriminalitas didominasi kasus pencurian dan penipuan. Mulai tahun 2022 Satpol PP Kabupaten Bantul sudah tidak menghitung angka kriminalitas karena angka kriminalitas bukan lagi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diampu oleh

Satpol PP. Berikut merupakan Angka Kriminalitas yang dihitung dari data Polres Kabupaten Bantul.

Tabel 2.309 Angka Kriminalitas di Kabupaten Bantul Tahun 2022

	<b>Uraian</b>	<b>2022</b>
a	Jumlah Kasus Kejahatan	1.577
b	Jumlah Penduduk	964.245
	Angka Kriminalitas ((a/b) x 10.000) (Permendagri 86/2017)	16,35

Sumber: Polres Kabupaten Bantul diolah, 2023

Angka kriminalitas tahun 2022 naik drastis dibandingkan tahun 2021 karena terdapat perbedaan perhitungan jenis kejahatan. Tahun 2018-2021 kejahatan yang dihitung hanya kasus narkoba, kasus pembunuhan, kejahatan seksual, kasus penganiayaan, kasus pencurian, kasus penipuan dan kasus pemalsuan uang, sedangkan pada tahun 2022 kejahatan sudah mencakup 103 jenis kejahatan.

#### **2.1.4.3.2 Demonstrasi**

Salah satu yang harus dikendalikan dalam mendukung iklim investasi yang kondusif adalah demonstrasi/unjuk rasa. Jumlah demonstrasi di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.310 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	Bidang Ekonomi	1	2	5	1	1
2	Bidang Politik	3	1	1	1	4
3	Bidang Lainnya	2	4	1	2	3
4	Mogok Kerja	6	-	2	-	-
	<b>Jumlah Demonstrasi</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>8</b>

Sumber: Polres Kabupaten Bantul, 2023

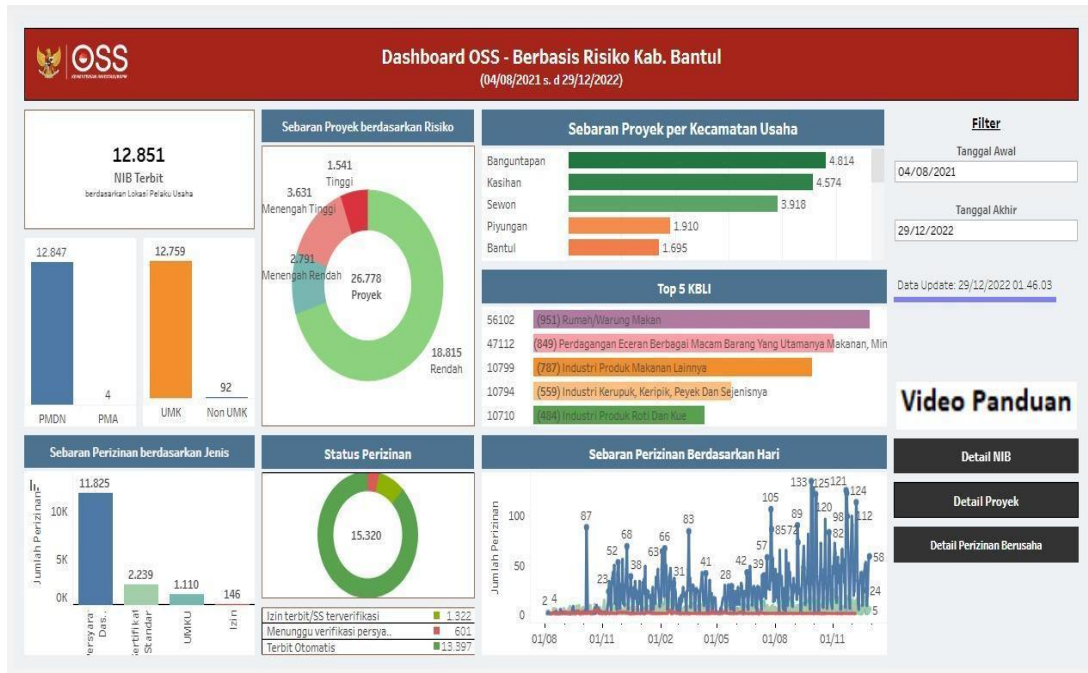
#### **2.1.4.3.3 Kemudahan Perizinan**

Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi, sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya meningkatkan kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk di antaranya pelayanan di bidang perizinan, baik berupa penyederhanaan proses pengurusan perizinan, pemberian informasi yang cepat dan akurat maupun respon dan penyelesaian terhadap aduan yang masuk. Kebijakan ini perlu dilaksanakan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga proses

penerbitan perizinan berusaha menjadi lebih cepat namun sesuai dengan standar pelayanan yang ada sekaligus memberikan kepastian waktu dan biaya yang diperlukan.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif. Para pelaku usaha, investor dan calon investor mengurus izin usaha secara *online* tanpa dibatasi waktu dan tempat, disamping juga memangkas birokrasi panjang dan memakan waktu yang semula diberlakukan. Segala bentuk usaha dapat menggunakan sistem OSS mulai dari PT, Firma, CV, hingga UKM.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, DPMPTSP Kabupaten Bantul selama periode 04 Agustus 2021 sampai dengan 29 Desember 2022 dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu melalui implementasi OSS RBA ( *Online Single Submission Risk Based Approach* ) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara *Online* terdiri dari telah terbit Nomor Induk Berusaha/NIB sejumlah 12.851.



Sumber data : <https://oss.go.id>

Catatan keterangan:

1. OSS RBA ( Online Single Submission Risk Based Approach ) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Online
2. Setiap Pelaku Usaha memiliki satu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang bisa digunakan untuk lebih dari satu kegiatan usaha

**Gambar 2.37 Statistik Penerbitan Nomor Induk Berusaha/NIB (04 Agustus 2021 s.d 29 Desember 2022)**

Sesuai kewenangan daerah melalui [izinonline.bantulkab.go.id](http://izinonline.bantulkab.go.id) terbit sejumlah legalitas yang terdiri dari beberapa jenis perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Terdapat 36 jenis izin, yaitu:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bukan Gedung
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung
3. Izin Mendirikan Rumah Sakit
4. Izin Operasional Puskesmas
5. Izin Operasional Rumah Sakit (Milik Daerah)
6. Izin Pengumpulan Uang atau Barang
7. Izin Penyelenggaraan Reklame / Media Informasi
8. Izin Praktik Ahli Teknis Elektromedis
9. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
10. Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT)
11. Izin Praktik Apoteker (SIPA)

12. Izin Praktik Bidan
13. Izin Praktik Epidemiologi Kesehatan
14. Izin Praktik Fisikawan Medis
15. Izin Praktik Fisioterapis
16. Izin Praktik Okupasi Terapis
17. Izin Praktik Ortosis Prostetis
18. Izin Praktik Penata Anestesi
19. Izin Praktik Penyuluh Kesehatan Masyarakat
20. Izin Praktik Perawat
21. Izin Praktik Perekam Medis
22. Izin Praktik Psikologi Klinis
23. Izin Praktik Radiografer
24. Izin Praktik Refraksionis Optisien
25. Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah
26. Izin Praktik Tenaga Gizi
27. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan
28. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
29. Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut
30. Izin Praktik Terapis Wicara
31. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Untuk Kegiatan Non Berusaha
32. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter
33. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Hewan
34. Surat Keterangan Penelitian
35. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
36. Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial

Terdapat *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang harus dipenuhi dalam penerbitan 36 jenis izin di atas. Jika sudah memenuhi SOP maka akan akan diterbitkan dan sebaliknya. Rekapitulasi penerbitan izin yang sesuai SOP sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

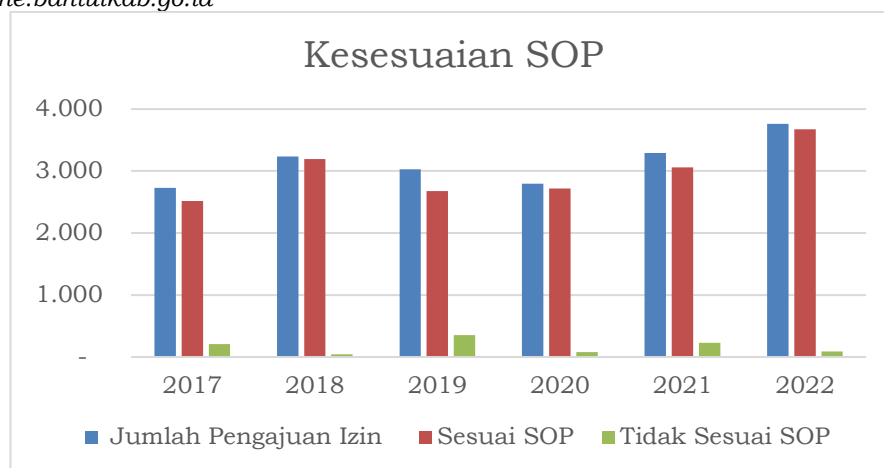


## RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

Tabel 2.311 Rekapitulasi Kesesuaian SOP dalam Penerbitan Izin di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2022

N O	Tah un	Jumlah Pengaj uan Izin	Sesuai SOP						Tidak Sesuai SOP					
			Terbit		Ditolak		Total		Terbit		Ditolak		Total	
			Ang ka	Pers en	Ang ka	Pers en	Ang ka	Pers en	Ang ka	Pers en	Ang ka	Pers en	Ang ka	Pers en
1	2017	2.729	2.319	84,98	69	2,53	2.519	92,30	183	6,71	13	0,48	209	7,66
2	2018	3.236	3.058	94,50	92	2,84	3.195	98,73	25	0,77	12	0,37	41	1,27
3	2019	3.026	2.491	82,32	116	3,83	2.675	88,40	306	10,11	39	1,29	351	11,60
4	2020	2.796	2.657	95,03	59	2,11	2.716	97,14	75	2,68	5	0,18	79	2,83
5	2021	3.289	3.020	91,82	41	1,25	3.061	93,07	223	6,78	5	0,15	228	6,93
6	2022	3.764	3.660	97,24	13	0,35	3.673	97,58	90	2,39	1	0,03	91	2,42

Sumber: [izinonline.bantulkab.go.id](http://izinonline.bantulkab.go.id)



Sumber: [izinonline.bantulkab.go.id](http://izinonline.bantulkab.go.id)

Gambar 2.38 Kesesuaian SOP dalam Penerbitan Izin di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2022

Data penerbitan IMB selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.312 Penetapan IMB per Satuan Bangunan Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2021

No.	Kapanewon	2018	2019	2020	2021
1	Kasih	701	504	175	7
2	Banguntapan	270	310	66	6
3	Sewon	174	242	36	15
4	Pleret	26	48	6	7
5	Bantul	106	121	154	12
6	Sedayu	141	318	317	37
7	Pajangan	116	28	366	75
8	Piyungan	49	56	342	37
9	Jetis	41	126	88	16
10	Bambanglipuro	19	14	18	18
11	Srandakan	9	17	6	319
12	Pandak	16	27	26	34

No.	Kapanewon	2018	2019	2020	2021
13	Imogiri	11	17	45	317
14	Kretek	8	11	11	144
15	Dlingo	12	8	18	692
16	Pundong	6	11	11	165
17	Sanden	13	4	5	324
<b>Jumlah</b>		<b>1.718</b>	<b>1.862</b>	<b>1.690</b>	<b>2.225</b>

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

Penerbitan IMB pada tahun 2021 terdapat peningkatan signifikan pada tiga wilayah kapanewon, yaitu Kapanewon Dlingo, Sanden, Imogiri dan Srandakan. Peningkatan ini didominasi IMB untuk rumah tinggal. Hal ini berbanding lurus dengan peningkatan pembangunan perumahan di tiga wilayah kapanewon tersebut.

Dalam perkembangannya pengaturan Retribusi Daerah mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu perubahan nomenklatur Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan perubahan dalam perhitungan tarif Retribusi PBG.

#### **2.1.4.3.4 Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha**

Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perijizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.

Tabel 2.313 Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha/Investasi di Kabupaten Bantul

<b>Peraturan Daerah</b>
1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha;
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang;
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelayanan Tera/Tera Ulang;

<b>Peraturan Daerah</b>
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian wilayah Perkotaan Sewon Tahun 2018-2038;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian wilayah Perkotaan Kasihan Tahun 2018-2038;
9. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

*Sumber: Bagian Hukum Kabupaten Bantul, 2022*

#### **2.1.4.4 Sumber Daya Manusia**

##### **2.1.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja**

Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari kualitas SDM yang mengenyam pendidikan tinggi dan mempunyai keahlian serta menguasai teknologi yang dibutuhkan di dunia kerja. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping

itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.

Pendidikan merupakan syarat utama yang harus ditempuh seseorang untuk dapat memasuki pasar kerja. Pendidikan yang diperoleh baik dari sekolah maupun dari luar sekolah akan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan, sehingga akan memudahkan penempatan seorang karyawan sesuai dengan kecakapannya. Tingkat pendidikan yang dimiliki seorang karyawan akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan dalam menghadapi suatu permasalahan yang timbul khususnya dalam masalah pekerjaan. Orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya lebih cepat mengatasi masalah yang dihadapi, daripada orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah.

Pendidikan mempunyai fungsi untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja agar dapat lebih produktif. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja karena pendidikan baik formal maupun non formal seseorang diharapkan memiliki kemampuan untuk lebih memahami dalam mengadaptasi perubahan-perubahan di lingkungan kerja dengan lebih cepat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan baik formal maupun non formal akan berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas kerja seorang karyawan dari segi kuantitas. Karyawan yang tingkat pendidikannya tinggi akan mempunyai keterampilan dalam pelaksanaan kerja sehingga mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan kerja.

Tabel 2.314 Persentase Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2022

No.	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Belum/Tidak Sekolah	18,7	18,93	18,97	19,28	19,23
2	Belum Tamat SD	8,02	8,06	7,96	7,77	7,59
3	Tamat SD/Sederajat	20,84	20,14	19,3	18,68	18,26
4	Tamat SMP/Sederajat	14,79	14,74	14,94	14,97	15,07
5	Tamat SMA/Sederajat	27,98	28,18	28,57	28,72	28,99
6	DI/DII	0,75	0,73	0,73	0,71	0,7
7	DIII/Sarjana Muda	2,13	2,17	2,21	2,25	2,28
8	D IV/ S I	6,21	6,44	6,69	6,95	7,18

No.	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
9	S II	0,52	0,56	0,59	0,62	0,65
10	S III	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2023

Pada tahun 2022 jumlah penduduk menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Bantul paling banyak adalah lulusan SMA/ Sederajat yaitu sebesar 279.556 jiwa atau 28,99%, kemudian belum/tidak sekolah menempati peringkat kedua sebesar 19,23%, dari jumlah penduduk di Kabupaten Bantul.

Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin tercapai tanpa adanya jaminan hidup yang pasti untuk didapatkannya, dan peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja harus disesuaikan dengan harkat dan martabat manusia.

#### **2.1.4.4.2 Rasio Ketergantungan**

Rasio ketergantungan menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Kelompok usia produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 15-64 tahun, yang dianggap dapat bekerja dan berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Kelompok non produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, yang dianggap belum mampu atau sudah tidak mampu bekerja sehingga tidak berkontribusi secara ekonomi maupun sosial.

Semakin besar rasio ketergantungan berarti semakin besar beban tanggungan bagi kelompok produktif. Angka ketergantungan dianggap rendah apabila kurang dari 30, sedang apabila antara 30-40 dan tinggi apabila lebih dari 40. Semakin rendah angka ketergantungan, mengindikasikan semakin baik kondisi perekonomian karena semakin rendah kelompok non produktif yang ditanggung secara ekonomi oleh kelompok produktif. Tanggungan dapat berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun dan fasilitas lain yang diperoleh kelompok non produktif.

Tabel 2.315 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bantul Tahun 2018–2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	198.537	198.900	201.101	200.543	199.973
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	91.837	94.847	91.539	92.059	94.925

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
3	Jumlah penduduk usia usia tidak produktif (1+2)	290.374	294.965	292.640	292.602	294.898
4	Jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun	649.344	654.360	662.066	663.911	669.347
5	Rasio ketergantungan (3/4)	44,72	45,08	44,20	44,07	44,06

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2023*

Rasio ketergantungan di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 sebesar 44,06. Hal ini menunjukkan bahwa 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Bantul harus menanggung 44 orang penduduk yang non produktif. Rasio ketergantungan tahun 2022 turun dibandingkan tahun 2021 (44,07) dan masih termasuk kategori tinggi. Oleh sebab itu untuk mengurangi dampak rasio ketergantungan diharapkan pemerintah dapat membentuk SDM unggul dengan meningkatkan kualitas Pendidikan mulai dari usia dini, pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat serta pemberdayaan bagi lansia.

## **2.2 Layanan Keistimewaan**

### **2.2.1 Urusan Keistimewaan**

Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan mengenai kewenangan istimewa terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 undang-undang ini. Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan keistimewaan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi: 1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; 2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 3. Kebudayaan; 4. Pertanahan; dan 5. Tata Ruang. Urusan keistimewaan yang melimpah ke Kabupaten/Kota di DIY meliputi empat (4) hal yaitu 1. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, 2. Kebudayaan, 3. Pertanahan dan 4. Tata Ruang.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan pada Bab IV Perencanaan, Bupati/Walikota menyampaikan usulan program dan kegiatan Dana Keistimewaan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada *Paniradya Kaistimewan* pada bulan September. Penyampaian usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan bidang Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang dari Kabupaten/Kota berupa program dan kegiatan tahun  $n+2$ .

#### **a. Urusan Kelembagaan**

Pelaksanaan penugasan keistimewaan urusan kelembagaan di Kabupaten Bantul diawali pada Tahun 2019 dengan mengakomodir aspek bentuk dan tata kelola pemerintahan asli yang memiliki karakteristik dan kekhususan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui kegiatan penataan bentuk kelembagaan asli. Implementasinya dengan

mendesain kelembagaan yang memiliki keunikan sebagai penciri keistimewaan dengan penambahan nomenklatur keistimewaan di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) serta penggantian nomenklatur kecamatan menjadi *Kapanewon* dan desa menjadi *Kalurahan*. Penciri keunikan lainnya adalah dalam tata naskah dinas, berupa menambahkan penulisan nomenklatur perangkat daerah dan kalurahan dengan aksara Jawa pada kop surat dinas.

Pada sisi budaya kerja urusan keistimewaan bidang kelembagaan mereview budaya kerja pemerintah daerah dan internalisasi nilai-nilai keistimewaan pada ASN yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme ASN DIY termasuk di Kabupaten Bantul. SATRIYA (Selaras, Akal Budi Luhur, Teladan, Rela Melayani dan Ahli Profesional) merupakan reformasi birokrasi dalam perspektif keistimewaan dalam rangka pembaharuan sikap dan tindakan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Selain kegiatan penataan bentuk kelembagaan asli, urusan kelembagaan juga mempunyai subkegiatan yang mendukung pelaksanaan keistimewaan pada semua urusan. Subkegiatan dimaksud yakni koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan. Keduanya merupakan kegiatan yang mengoordinasikan dan melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian keistimewaan.

Untuk tindak lanjut urusan keistimewaan ke dalam peraturan, didukung melalui subkegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi produk hukum tindak lanjut urusan keistimewaan di Kabupaten sampai dengan di Kalurahan. Produk hukum pada Tahun 2022 yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.



**Tabel 2.316 Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tindak Lanjut Urusan Keistimewaan**

No	Judul	Tanggal Terbit
<b>Peraturan Daerah</b>		
1	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan	Tanggal 12 Agustus 2019
2	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan	Tanggal 9 September 2020
3	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Tanggal 20 Juli 2020
<b>Peraturan Kepala Daerah</b>		
1	Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon	Tanggal 26 Desember 2019
2	Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan	Tanggal 31 Desember 2019
3	Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha Kabudayan</i> )	Tanggal 31 Desember 2021
4	Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> )	Tanggal 31 Desember 2021
5	Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	Tanggal 7 Juli 2020
6	Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan	Tanggal 3 Agustus 2020
7	Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Produk Hukum Kalurahan	Tanggal 3 Agustus 2020
8	Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kalurahan	Tanggal 25 September 2020
9	Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberhentian Lurah	Tanggal 4 Oktober 2021
10	Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan	Tanggal 4 Oktober 2021
11	Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan	Tanggal 4 Oktober 2021
12	Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan	Tanggal 11 Oktober 2021
13	Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan	Tanggal 21 Juli 2022
14	Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan	Tanggal 21 Juli 2022
15	Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2022 tentang Hak Cuti Bagi Pamong Kalurahan	Tanggal 5 September 2022
16	Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan	Tanggal 25 November 2022

Sumber: Bagian Hukum, Setda Kabupaten Bantul, 2023

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kalurahan, bahwa Kalurahan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang menjadi bagian dari Kasultanan/Kadipaten. Kalurahan bertugas menyelenggarakan

pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan melaksanakan tugas urusan keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal dan keberbikinan kepada rakyat. Untuk memperkuat kedudukan dan mengoptimalkan tugas Kalurahan, pada urusan kelembagaan terdapat subkegiatan penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan. Subkegiatan dilakukan di Bagian Tata Pemerintahan dan Kapanewon serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Kegiatan yang telah dilakukan di Bagian Tata Pemerintahan dan Kapanewon adalah memperkuat fungsi sebagai koordinator Kalurahan. Sedangkan yang dilakukan di DPMK adalah meningkatkan kapasitas lembaga maupun sumber daya manusia di Kalurahan.

#### **b. Urusan Kebudayaan**

Salah satu semangat yang menjadi inti dari pelaksanaan keistimewaan adalah menjadikan filosofi budaya sebagai dasar pembangunan di segala bidang. Kebudayaan melalui rekayasa revolusi mental diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kemakmuran masyarakat. Pemeliharaan, pengelolaan dan pengembangan nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni untuk mendukung kebudayaan istimewa merupakan salah satu strategi dalam pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bantul.

Pembangunan kebudayaan diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kemakmuran masyarakat. Berbagai capaian yang berasal dari program-program dan kegiatan inovatif menunjukkan Urusan Kebudayaan telah memberikan manfaat langsung bagi kegiatan seni dan budaya yang sebelumnya telah tumbuh di masyarakat. Pengelolaan program-program urusan kebudayaan mendorong peningkatan kreativitas kelompok masyarakat, berkembangnya pembinaan seni dan budaya, semakin optimalnya pelestarian cagar budaya penyelenggaraan event

kebudayaan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa spirit baru pembangunan kalurahan. Untuk mewujudkan kemandirian kalurahan diperlukan konsep yang dapat mewadahi dan mengakomodasi berbagai elemen kalurahan secara menyeluruh. Berbagai program pembangunan kalurahan yang ada di wilayah antara lain: Desa Budaya, Desa Wisata, Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri), Desa Preneur, dan Desa Mandiri Pangan.

Desa/Kalurahan yang memiliki 4 predikat sekaligus sebagai Budaya, Desa Wisata, Desa Preneur dan Desa Prima Desa disebut sebagai Kalurahan Mandiri Budaya, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Kalurahan Mandiri Budaya adalah kalurahan mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai nilai keistimewaan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumber daya dan kebudayaan yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan, dan ketenteraman warga dalam kebhinnekatunggalikaan.

Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2023 telah memiliki 7 (tujuh) Kalurahan Mandiri Budaya yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.317 Kalurahan Mandiri Budaya Kabupaten Bantul**

No	Desa/kalurahan	Kapanewon	Dasar Penetapan		Klasifikasi
1	Sabdodadi	Bantul	Keputusan Gub DIY No 364/KEP/2020	07 Desember 2020	Desa Mandiri Budaya Peringkat Utama
2	Bangunjiwo	Kasih	Keputusan Gub DIY No 383/KEP/2021	30 November 2021	Desa Mandiri Budaya Peringkat Madya
3	Gilangharjo	Pandak	Keputusan Gub DIY No 234/Kep/2022	15 Agustus	Desa Mandiri Budaya Peringkat Utama
4	Panggungharjo	Sewon		2022	
5	Trimurti	Srandakan			

No	Desa/kalurahan	Kapanewon	Dasar Penetapan		Klasifikasi
6	Mulyodadi	Bambanglipuro	Keputusan Gub DIY No. 245/KEP/2023	24 Juli 2023	Desa Mandiri Budaya Peringkat Utama
7	Srigading	Sanden			Desa Mandiri Budaya Peringkat Madya

Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2024

Kabupaten Bantul berupaya mendorong terbentuknya Kalurahan Mandiri Budaya melalui pembentukan Kalurahan Pamor Budaya yang merupakan Rintisan Kalurahan Mandiri Budaya

### 1) Desa/Kalurahan Budaya

Desa/Kalurahan Budaya adalah desa yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. Pembentukan Desa/Kalurahan Budaya sebagai salah satu upaya menampung segala aspirasi masyarakat dalam pengembangan, pembinaan dan pelestarian seni budaya yang berada di tingkat kalurahan. Tujuannya untuk memperkuat keberadaan kebudayaan daerah dan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat tentang kebudayaan. Bidang utama dalam memperkuat dan mengapresiasi budaya adalah pada sektor Pariwisata, Pendidikan, Ekonomi dan Ketahanan Pangan. Sementara itu aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Keterlindungan Warga menjadi isu penting dalam proses pembangunan kebudayaan.

Menurut SK Gubernur DIY No.454/KEP/2023 tentang Penetapan Kalurahan/Kelurahan Budaya, di Bantul ada penambahan 5 Desa Budaya. Penambahan lima Desa Budaya di Bantul, masing-masing adalah Gadingsari (Sanden), Guwosari (Pajangan), Jatimulyo (Dlingo), Wukirsari (Imogiri), dan Pleret (Pleret). Daftar lengkap Desa Budaya di Kabupaten Bantul ditampilkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.318 Penetapan Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul**

No	Kalurahan	Kapanewon	Keterangan
1.	Sabdodadi*	Bantul	Sudah menjadi Desa Mandiri Budaya di Tahun 2020 Keputusan Gub DIY No 364/KEP/2020 Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020
2.	Bangunjiwo*	Kasihlan	Sudah menjadi Desa Mandiri Budaya di Tahun 2021 Keputusan Gub DIY No 383/KEP/2021 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2021
3.	Gilangharjo*	Pandak	Sudah menjadi Desa Mandiri Budaya di Tahun 2022 Keputusan Gub DIY No. 234/KEP/2022 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2022
4.	Panggunharjo*	Sewon	Sudah menjadi Desa Mandiri Budaya di Tahun 2022 Keputusan Gub DIY No. 234/KEP/2022 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2022
5.	Trimurti*	Srandakan	Sudah menjadi Desa Mandiri Budaya di Tahun 2022 Keputusan Gub DIY No. 234/KEP/2022 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2022
6.	Mulyodadi*	Bambanglipuro	Sudah menjadi Desa Mandiri Budaya di Tahun 2023 Keputusan Gub DIY No. 245/KEP/2023 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2023
7.	Srigading*	Sanden	Sudah menjadi Desa Mandiri Budaya di Tahun 2022 Keputusan Gub DIY No. 245/KEP/2023 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2023
8.	Seloharjo	Pundong	
9.	Dlingo	Dlingo	
10.	Selopamioro	Imogiri	
11.	Sitimulyo	Piyungan	
12.	Triwidadi	Pajangan	
13.	Srimulyo	Srimulyo	
14.	Parangtritis	Kretek	
15.	Argodadi	Sedayu	
16.	Sendangsari	Pajangan	
17.	Muntuk	Dlingo	
18.	Girirejo	Imogiri	
19.	Sriharjo	Imogiri	
20.	Gadingsari	Sanden	
21.	Guwosari	Pajangan	

No	Kalurahan	Kapanewon	Keterangan
22.	Jatimulyo	Dlingo	
23.	Wukirsari	Imogiri	
24.	Pleret	Pleret	

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Tahun 2024

Dari 24 Desa Budaya di atas 7 desa sudah berpredikat Desa Mandiri Budaya. Adapun 7 desa/kalurahan tersebut adalah Sabdodadi, Bangunjiwo, Panggunharjo, Gilangharjo, Trimurti, Mulyodadi, dan Srigading.

Sebelum menjadi Desa Budaya ada rintisan desa budaya. Penetapan rintisan desa budaya melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 686 Tahun 2020, Keputusan Bupati Bantul Nomor 486 Tahun 2021, Keputusan Bupati Bantul Nomor 577 Tahun 2022, dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 424 Tahun 2023. Rintisan Desa/Kalurahan Budaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.319 Penetapan Rintisan Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul**

No	Kalurahan	Kapanewon	Dasar Penetapan
1.	Gadingsari*	Sanden	Keputusan Bupati Bantul No. 686 Tahun 2020
2.	Tamantirto	Kasihani	
3.	Guwosari*	Pajangan	
4.	Jatimulyo*	Dlingo	Keputusan Bupati Bantul No. 486 Tahun 2021
5.	Baturetno	Banguntapan	
6.	Wukirsari*	Imogiri	
7.	Timbulharjo	Sewon	
8.	Srimartani	Piyungan	Keputusan Bupati Bantul No. 577 Tahun 2022
9.	Pleret*	Pleret	
10.	Trimulyo	Jetis	
11.	Srihardono	Pundong	
12.	Ringinharjo	Bantul	
13.	Mangunan	Dlingo	Keputusan Bupati Bantul No. 424 Tahun 2023
14.	Karangtengah	Imogiri	
15.	Wijirejo	Pandak	
16.	Caturharjo	Pandak	
17.	Argomulyo	Sedayu	

Ket:

\*) Sudah naik tingkat menjadi Desa Budaya.

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Tahun 2024

## 2) Desa Wisata

Desa wisata adalah sebuah kawasan kalurahan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata.

Penduduk di kalurahan wisata memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan kalurahan wisata. Alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata. Desa wisata menawarkan keaslian baik dari segi sosial budaya, adat-istiadat, keseharian, arsitektur tradisional, struktur tata ruang Kalurahan yang disajikan dalam suatu bentuk integrasi komponen pariwisata antara lain seperti atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung.

Penetapan Desa Wisata melalui Keputusan Bupati Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.320 Desa Wisata di Kabupaten Bantul

No	Kapanewon	Kalurahan	Nama Desa Wisata	Potensi Wisata	Jenis Kategori
1	Bambanglipuro	Mulyodadi	Mulyodadi	Alam, Budaya	Rintisan
2	Banguntapan	Jagalan	Jagalan	Cagar Budaya, Kuliner	Rintisan*
3		Baturetno	Retno	Alam, Budaya	Rintisan
4	Bantul	Sabdodadi	Manding	Sentra Kerajinan Kulit	Maju
5		Palbapang	Ngringinan	Museum, Kuliner	Rintisan
6	Dlingo	Mangunan	Kakilangit	Alam, Kerajinan, Kuliner	Mandiri*
7			TTSA	Alam, Budaya, Kerajinan	Maju
10			Songgo Langit	Alam, Budaya, Kerajinan	Rintisan
11			Goa Gajah (Lemahbang)	Alam, Goa Gajah	Rintisan
8		Muntuk	Gunung Cilik	Alam, Kerajinan, Budaya	Rintisan
9			Karangasem	Alam, Kerajinan	Berkembang
12		Terong	Banyu Nibo Rejosari	Pertanian, Alam	Rintisan
13		Imogiri	Wukirsari	Wukirsari	Batik pewarna alami
14	Bendo			Alam, Kerajinan Genteng Tradisional	Rintisan
15	Pucungrejo			Kerajinan Kulit	Rintisan
16	Kebonagung		Kebonagung	Wisata Pendidikan Pertanian	Maju*
17			Candran	Museum tani, Kesenian	Maju
18	Sriharjo		Srikemenut (wunut)	Alam, Budaya	Berkembang*
19	Karangtengah		Karangtengah	Alam, Kerajinan	Maju
20	Imogiri	Imogiri	Budaya	Rintisan	
21	Jetis	Trimulyo	Puton	Alam	Berkembang*
23			Trimulyo	Cagar Budaya, Batik	Rintisan

No	Kapanewon	Kalurahan	Nama Desa Wisata	Potensi Wisata	Jenis Kategori
24			Dewa Batu	Alam, Budaya	Rintisan
22		Canden	Kiringan	Sentra Jamu Tradisional	Berkembang*
25	Kasih	Bangunjiwo	Jipangan	Budaya, Kerajinan	Berkembang
26			Kajigelem	Budaya, Gerabah	Rintisan
27	Kretak	Tirtomulyo	Kregan Kampung Gurami	Pertanian, Perikanan	Rintisan
28		Tirtoharjo	Mangrove	Alam, Konservasi Mangrove	Rintisan
29		Parangtritis	Laguna Depok	Outbond, Kuliner	Rintisan
30	Pajangan	Guwosari	Kampungsant an	Kerajinan tempurung, Kuliner Ingkung	Maju
32			Kalakijo	Budaya, Kuliner Ingkung	Rintisan/Embri o*
33			Dewi Gumi	Alam, Budaya	Berkembang*
35			Guwosari Selarong	Cagar Budaya, Kerajinan	Rintisan
31		Sendangsari	Krebet	Kerajinan Batik Kayu	Maju
34			Ngembel Mbeji	Alam, Budaya	Rintisan
36			Mangir	Wisata Sejarah Mataram, Kuliner	Rintisan
37	Pandak	Gilangharjo	Dewi Kaji	Alam, Budaya	Berkembang*
38		Wijirejo	Carakan	Alam, Budaya	Berkembang
39		Caturharjo	Gadung Mlati	Alam, Pertanian	Rintisan
40	Piyungan	Srimulyo	Mulia	Alam, Budaya	Maju*
41		Sitimulyo	Dewi Sinta	Alam, Kerajinan	Rintisan
42	Pleret	Pleret	Bumi Mataram Pleret	Alam, Budaya	Berkembang*
43	Pundong	Panjangrejo	Panjangrejo	Alam, Gerabah	Rintisan
44		Seloharjo	Kampung Surocolo	Cagar Budaya, Budaya	Rintisan
45	Sanden	Gadingsari	Goa Cemara	Alam, Outbond, Konservasi Penyus	Berkembang*
47			Pandansari	Alam, Budaya	Rintisan
46		Srigading	Banjoe Adji	Alam, Kuliner, Budaya	Rintisan
48	Sewon	Timbulharjo	Tembi	Kerajinan, Outbond	Maju
49		Pendowoharjo	Juron	Kerajinan	Rintisan
50		Panggunharjo	Panggunharjo	Budaya Kerajinan	Rintisan
51	Srandakan	Trimurti	Lopati	Kuliner, Kerajinan	Berkembang

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2024

### 3) Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Prima)

Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) merupakan sebuah kalurahan percontohan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan melalui upaya ekonomi disertai pengurangan beban biaya kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin, dengan memanfaatkan seluruh potensi dan mengoordinasikan berbagai program pemberdayaan perempuan dari instansi terkait, LSM, organisasi perempuan, dan



organisasi kemasyarakatan lainnya untuk bersama-sama membangun kepedulian menurunkan kemiskinan.

Pada tahun 2022 terdapat 51 Desa Prima yang telah terbentuk, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.321 Kelompok Prima di Desa Prima Kabupaten Bantul Tahun 2012 - 2022**

No	Kalurahan	Tahun Dibentuk	Nama Kelompok Desa Prima	Produk Unggulan
1	Banguntapan, Kapanewon Banguntapan	2012	Sekarningtyas	Makanan Kering
2	Sriharjo, Kapanewon Imogiri	2021	Sejahtera	Peyek Sagu, Kripik Sagu
3	Canden, Kapanewon Jetis	2022	Bangkit Bersama	Jamu Gendong
4	Gadingsari, Kapanewon Sanden	2018	Gadingsari Makmur	Peyek, Ubi Ungu
5	Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan	2013	Mukti Rejeki	Tempe, Tas Perca, Dompot Batik
6	Bangunharjo, Kapanewon Sewon	2012	Ngudi Rejeki	Bakpia, Tempe
7	Imogiri, Kapanewon Imogiri	2020	Anyelir	Snack, Cemilan Kripik
8	Timbulharjo, Kapanewon Sewon	2015	Timbul Rezeki	Kripik Gembus
9	Sumberagung, Kapanewon Imogiri	2016	Sumber Makmur	Olahan Hasil Perikanan
10	Dlingo, Kapanewon Dlingo	2021	Giri Prima Tama	Wedang Kekep Bunga, Tas, Menggleng, Emping Garut
11	Selopamiro, Kapanewon Imogiri	2021	Selomaju	Wedang Ereng-Ereng
12	Terong, Kapanewon Dlingo	2021	Sejahtera	Pangsit Daun Kelor
13	Patalan, Kapanewon Jetis	2021	Prima Niaga	Kerajinan Tas
14	Wukirsari, Kapanewon Imogiri	2021	Mandiri	Rajut, Batik Tulis, Kripik Gadung
15	Triwidadi, Kapanewon Pajangan	2021	Sumber Rejeki	Emping Melinjo, Emping Jagung, Emping Garut
16	Kebonagung, Kapanewon Imogiri	2021	Agung Mandiiri	Telur Asin, Aneka Kripik, Kembang Goyang
17	Tamanan, Kapanewon Banguntapan	2018	Wanudyotomo	Aneka Olahan Kue
18	Trimurti, Kapanewon Srandakan	2021	Murti Mandiri	Criping, Ampas Tahu, Bakpia Pisang
19	Mulyodadi, Kalurahan Bambanglipuro	2020	Maju Mulyo	Wingko, Geplak Waluh, Onde", Telur Asin, Karamel
20	Seloharjo, Kapanewon Pundong	2021	Optimis "Seloharjo"	Bakpia

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Kalurahan	Tahun Dibentuk	Nama Kelompok Desa Prima	Produk Unggulan
21	Panggunharjo, Kapanewon Sewon	2020	Panggung Makmur	Aneka Kue, Emping, Abon
22	Jatimulyo, Kapanewon Dlingo	2019	Prima Jati	Kue Kacang
23	Karanagtengah, Kapanewon Imogiri	2022	Ngudi Mukti	Kripik Gedebok Pisang, Criping Pisang, Aneka Bumbu Siap Saji
24	Sabdodadi, Kapanewon Bantul	2019	Dullor Subur Neco	Jusser, Okra, Kenikir
25	Srigading, Kapanewon Sanden	2019	Gadingmas	Telur Asin, Tahu Walik, Batik, Kue Kering, Olahan Gula Kelapa, KacangKacangan, Kue Basah
26	Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan	2021	Bangunjiwo	Brownies
27	Wonocatur, Banguntapan	2021	Mekar Sari	Bakpia 505, Wingko Dan Keripik Kentang 505
28	Gilangharjo Kapanewon Pandak	2019	Gilang Lestari	Jamur Crispy
29	Girirejo, Kapanewon Imogiri	2022	Mandiri Prima	
30	Muntuk, Kapanewon Dlingo	2022	Manunggal Jaya	Kerajian Bambu, Aneka Snak
31	Srimartani, Kapanewon Piyungan	2022	Murakabi	
32	Tamantirto, Kapanewon Kasihan	2022	Srikandi	Kriik Gembus, The Daun Kelon, Peyek Kacang Ijo
33	Argodadi, Kapanewon Sedayu	2022	Permata	
34	Sendangsari, Kapanewon Pajangan	2022	Sendang Prima Sejahtera	Emping Jagung, Emping Garut, Emping Mlinjo, Kripik Kelor, Kripik Bayem, Peyek Dele, Peyek Kacang
35	Parangtritis, Kapanewon Kretek	2022	Mutiara Selatan	
36	Srimulyo, Kapanewon Piyungan	2022	Gerbang Mulyo	
37	Pleret, Kapanewon Pleret	2022	Mandiri Mulyo	
38	Gadingharjo, Kapanewon Sanden	2022	Gading Sejahtera	
39	Sidomulyo, Bambanglipuro	2022	Mayangsari	Tepung Pisang, Stik Pisang, Keripik Pisang, Dawet Daun Pisang, Pilus Atos Dan Kripik Gayam
40	Karasan, Palbapang	2022	Anggrek	Telur Asin
41	Singosaren, Banguntapan	2022	Merpati 1	Mocafa Cookies

No	Kalurahan	Tahun Dibentuk	Nama Kelompok Desa Prima	Produk Unggulan
42	Ringinharjo, Bantul	2022	Nusa Indah 1	Peyek Gempa 5,9 Sr , Dan Sprei/ Sarung Bantal
43	Kadibeso, Sabdodadi	2022	Manunggal Lestari	Emping Melinjo, Es Jus, Bros Kain Perca, Sari Jahe Instan, Dan Bakso Tusuk, Cilok, Tahu Bakso
44	Terong, Dlingo	2022	Kangen	Dokangen, Criping Pisang Kangen
45	Guwosari ,Pajangan	2022	Dahlia	Aneka Kerajinan Dari Kain Flanel
46	Sendangsari Pajangan	2022	Kayen Mandiri	Emping Melinjo
47	Bawuran, Pleret	2022	Sanan 1	Snack Dan Makanan Kecil
48	Brajan Wonokromo, Pleret	2022	Lestari Jaya	Batik Prodo, Krupuk Rambak, Jamu, Nasi Box Dan Snack
49	Dingkikan, Argodadi, Sedayu	2022	Jaya Lestari	Beras Kencur Instan, Sirup Secang
50	Gunungpolo, Argorejo, Sedayu	2022	Flamboyan 1	Roti Marie Wijen, Wedang Telang
51	Bandung, Pendowoharjo, Sewon	2022	Melati Bandung	Batik Pendowo

Sumber: Dinas P3APPKB Kabupaten Bantul, 2023

#### 4) Kalurahan Preneur

Upaya untuk mendorong kehidupan wirausaha di desa adalah mengembangkan kampanye program kegiatan yang memiliki dimensi menggali potensi enterpreneurspirit pada tataran desa. Hal itu kemudian dikenal sebagai Desa/kalurahan Preneur. Desa/kalurahan Preneur menjadi salah satu respon terhadap isu kemiskinan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembang potensi usaha, peningkatan semangat kewirausahaan dan kualitas SDM para pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena itu, dengan prioritas pada peningkatan softskill dari para pelaku usaha, program Desa Preneur terwujud dalam bentuk Pendidikan, Pelatihan, Fasilitasi, dan Pendampingan.

Desa/kalurahan Preneur merupakan desa yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan unit-unit usaha skala desa, yang diusahakan oleh warga desa itu sendiri melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, peningkatan mutu produk/jasa, nilai tambah, dan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan tercapainya kesejahteraan hidup warga. Lembaga ekonomi desa, seperti: UMKM, koperasi, hingga BUMDES harus terlibat aktif. Mereka dapat membentuk konsorsium bagi pemasaran bersama barang dan jasa yang diproduksi warga. Strategi pemasaran diarahkan pada pembentukan sekaligus penguatan branding produk barang atau jasa yang potensial desa.

Kalurahan Preneur di Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY No. 529/kep/Bid IV/XII/2021 tentang Penetapan Desa Preneur tahun 2021 telah ditetapkan 11 Desa Preneur di Bantul.

**Tabel 2.322 Desa Preneur Kabupaten Bantul Tahun 2023**

No	Kelurahan	Status
1	Panggunharjo	Pengembangan
2	Trimurti	
3	Mulyodadi	
4	Sabdodadi	Maju
5	Gilangharjo	
6	Bangunjiwo	
7	Dlingo	Penumbuhan
8	Sriharjo	
9	Canden	
10	Triwidadi	
11	Argomulyo	
12	Sendangsari	
13	Sitimulyo	

Sumber : Dinas Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2023

**c. Urusan Pertanahan**

Urusan Pertanahan telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yaitu penyelenggaraan kewenangan pertanahan atas kepemilikan tanah keprabon dan bukan keprabon yang menjadi hak milik Kasultanan dan Kadipaten, sebagai badan hukum yang diakui

Undang-Undang, Kasultanan dan Kadipaten memiliki kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten untuk tujuan sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perda 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi: (a) kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah; (b) pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen; (c) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan; (d) penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten; (e) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan (f) kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.

Kondisi saat ini tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten banyak dimanfaatkan dan digunakan oleh instansi pemerintah untuk perkantoran maupun untuk kepentingan sosial dan masyarakat tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Dengan kedudukan Kasultanan dan Kadipaten masing-masing sebagai badan hukum khusus, maka penggunaannya harus mendapatkan persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten. Upaya untuk mengadministrasi keberadaan tanah Kasultanan dan Kadipaten dilakukan melalui proses pendaftaran. Upaya ini dimaksudkan untuk memperoleh data fisik maupun data yuridis tanah sebagai dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta sekaligus jaminan perlindungan hukum baik bagi Kasultanan dan Kadipaten maupun instansi atau masyarakat yang menempati tanahnya.

**Tabel 2.323 Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022**

<b>Uraian</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Pendaftaran Tanah Kasultanan (bidang)	400	500	395	122	0

Sumber : DPTR Kabupaten Bantul, 2023

Pendaftaran tanah kasultanan di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 2015-2021 telah mampu menyelesaikan 3.434 bidang tanah *Sultan Ground*. Namun untuk tahun 2022 target 297 tidak tercapai karena terkendala waktu yang tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga tidak ada realisasi (nol).

Selain pendaftaran tanah kasultanan, upaya yang dilakukan adalah identifikasi dan pendaftaran tanah desa sebagai bagian dari tanah kasultanan. Upaya ini dilakukan melalui penyusunan Peraturan Desa tentang Penggunaan Tanah Desa. Pada tahun 2021 telah diselesaikan 75 Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan.

**Tabel 2.324 Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan di Kabupaten Bantul**

No.	Kalurahan	Kapanewon	Keterangan	
			Nomor Perdes/Perkal	Tanggal
1	Sumberagung	Jetis	No. 3 Tahun 2019	19 Februari 2019
2	Imogiri	Imogiri	No. 2 Tahun 2019	10 Juni 2019
3	Sidomulyo	Bambanglipuro	No. 1 Tahun 2019	30 Januari 2019
4	Potorono	Banguntapan	No. 2 Tahun 2019	18 Juni 2019
5	Terong	Dlingo	No. 3 Tahun 2019	27 Agustus 2019
6	Wonokromo	Pleret	No. 6 Tahun 2019	19 Juli 2019
7	Trimurti	Srandakan	No. 4 Tahun 2019	15 Agustus 2019
8	Mangunan	Dlingo	No. 7 Tahun 2019	10 Juli 2019
9	Kebonagung	Imogiri	No. 4 Tahun 2019	26 Agustus 2019
10	Tirtonirmolo	Kasih	No. 4 Tahun 2019	16 September 2019
11	Guwosari	Pajangan	No. 7 Tahun 2019	16 Agustus 2019
12	Tirtosari	Kretek	No. 3 Tahun 2019	02 Juli 2019
13	Muntuk	Dlingo	No. 2 Tahun 2019	16 September 2019
14	Sitimulyo	Piyungan	No. 13 Tahun 2019	23 September 2019
15	Argorejo	Sedayu	No. 7 Tahun 2019	10 Oktober 2019
16	Tamanan	Banguntapan	No. 7 Tahun 2019	22 Oktober 2019
17	Baturetno	Banguntapan	No. 7 Tahun 2019	24 Oktober 2019
18	Sumbermulyo	Bambanglipuro	No. 8 Tahun 2019	12 November 2019
19	Mulyodadi	Bambanglipuro	No. 11 Tahun 2019	27 November 2019
20	Triwidadi	Pajangan	No. 7 Tahun 2019	20 Desember 2019
21	Jatimulyo	Dlingo	No. 5 Tahun 2019	25 November 2019
22	Wukirsari	Imogiri	No. 11 Tahun 2019	11 Desember 2019

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	Kalurahan	Kapanewon	Keterangan	
			Nomor Perdes/Perkal	Tanggal
23	Karangtalun	Imogiri	No. 05 Tahun 2019	11 Oktober 2019
24	Pleret	Pleret	No. 8 Tahun 2019	09 Desember 2019
25	Banguntapan	Banguntapan	No. 07 Tahun 2019	01 Oktober 2019
26	Argodadi	Sedayu	No. 07 Tahun 2019	23 November 2019
27	Tirtomulyo	Kretek	No. 04 Tahun 2019	30 Oktober 2019
28	Panggunharjo	Sewon	No. 5 Tahun 2019	28 Agustus 2019
29	Girirejo	Imogiri	No.6 Tahun 2019	14 Oktober 2019
30	Parangtritis	Kretek	No. 10 Tahun 2019	10 Desember 2019
31	Srigading	Sanden	No. 2 Tahun 2019	02 Juni 2019
32	Gadingsari	Sanden	No. 1 Tahun 2020 (4)	24 Januari 2020
33	Tirtohargo	Kretek	No. 04 Tahun 2020 (4)	10 Maret 2020
34	Triharjo	Pandak	No. 06 Tahun 2020 (4)	16 Juni 2020
35	Jagalan	Banguntapan	No. 06 Tahun 2020 (4)	2 Juli 2020
36	Sriharjo	Imogiri	No. 07 Tahun 2020 (4)	5 Oktober 2020
37	Sendangsari	Pajangan	No. 9 Tahun 2020 (4)	2 Oktober 2020
38	Temuwuh	Dlingo	No. 5 Tahun 2020 (4)	12 Oktober 2020
39	Argomulyo	Sedayu	No. 9 Tahun 2020 (4)	24 Oktober 2020
40	Poncosari	Srandakan	No. 2 Tahun 2020 (4)	17 Maret 2020
41	Donotirto	Kretek	No. 7 Tahun 2020 (4)	4 November 2020
42	Panjangrejo	Pundong	No. 7 Tahun 2020 (4)	26 November 2020
43	Karangtengah	Imogiri	No. 5 Tahun 2020 (4)	25 November 2020
44	Ngestiharjo	Kasih	No. 10 Tahun 2020 (4)	11 Desember 2020
45	Srihardono	Pundong	No. 10 Tahun 2020 (4)	4 Desember 2020
46	Caturharjo	Pandak	No. 11 Tahun 2020 (4)	1 Desember 2020
47	Singosaren	Banguntapan	No. 6 Tahun 2020 (4)	19 November 2020
48	Trirenggo	Bantul	No. 07 Tahun 2020 (4)	4 Desember 2020
49	Murtigading	Sanden	No. 07 Tahun 2020 (4)	16 Desember 2020
50	Segoroyoso	Pleret	No. 06 Tahun 2020 (4)	16 November 2020
51	Seloharjo	Pundong	No. 7 Tahun 2020 (4)	11 November 2020
52	Bawuran	Pleret	No. 1 Tahun 2021 (4)	13 Februari 2021
53	Patalan	Jetis	No. 10 Tahun 2020	28 Desember 2020

No.	Kalurahan	Kapanewon	Keterangan	
			Nomor Perdes/Perkal	Tanggal
			(4)	
54	Bangunjiwo	Kasihani	No. 1 Tahun 2021 (4)	25 Januari 2021
55	Tamantirto	Kasihani	No. 03 Tahun 2021 (4)	12 Maret 2021
56	Wijirejo	Pandak	No. 1 Tahun 2021 (4)	19 Februari 2021
57	Sabdodadi	Bantul	No. 3 Tahun 2021 (4)	29 Maret 2021
58	Palbapang	Bantul	No. 3 Tahun 2021 (4)	30 Maret 2021
59	Canden	Jetis	No. 03 Tahun 2020 (4)	31 Maret 2021
60	Srimulyo	Piyungan	No. 6 Tahun 2020 (4)	28 September 2020
61	Argosari	Sedayu	No. 02 Tahun 2021 (4)	22 Maret 2021
62	Trimulyo	Jetis	No. 3 Tahun 2021 (4)	31 Maret 2021
63	Wonolelo	Pleret	No. 11 Tahun 2020 (4)	30 Desember 2020
64	Gadingharjo	Sanden	No. 2 Tahun 2021 (4)	3 Maret 2021
65	Bantul	Bantul	No. 4 Tahun 2020 (4)	29 Desember 2020
66	Srimartani	Piyungan	No. 4 Tahun 2021 (4)	30 Maret 2021
67	Selopamioro	Imogiri	No. 6 Tahun 2020 (4)	16 November 2020
68	Pendowoharjo	Sewon	No. 2 Tahun 2021 (4)	29 Maret 2021
69	Timbulharjo	Sewon	No. 3 Tahun 2021 (4)	31 Maret 2021
70	Jambidan	Banguntapan	No. 01 Tahun 2021 (4)	4 Juni 2021
71	Ringinharjo	Bantul	No. 02 Tahun 2021 (4)	5 April 2021
72	Dlingo	Dlingo	No. 13 Tahun 2020 (4)	29 Desember 2020
73	Bangunharjo	Sewon	No. 3 Tahun 2021 (4)	31 Maret 2021
74	Gilangharjo	Pandak	No. 2 Tahun 2021 (4)	23 April 2021
75	Wirokerten	Banguntapan	No. 3 Tahun 2021 (4)	22 April 2021

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, 2023

Tanah Kasultanan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bantul dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan maksimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul melalui kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten melaksanakan



fasilitasi pemberian rekomendasi penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan dasar pelaksanaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

**Tabel 2.325 Daftar Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Tahun 2022 Kabupaten Bantul**

No	Pemohon Pemanfaat	Lokasi tanah		Luas (M <sup>2</sup> )	Pemanfaatan	Rekomendasi	Keterangan
		Kalurahan	Kapanewon				
1	Pemerintah Kalurahan Guwosari	Guwosari	Pajangan	1,339	Pengelolaan Sampah	143/00701/DISPE RTARU 15 Februari 2022	Tanah Kalurahan
2	Pemerintah Kalurahan Guwosari	Guwosari	Pajangan	53,107	Pembangunan Wisata Edukasi, Sejarah dan Budaya	143/00702/DISPE RTARU 15 Februari 2022	Tanah Kalurahan
3	PT. Navil Natural Organik	Argodadi	Sedayu	3,500	Pembangunan Gudang, Industri Gula Merah dan Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Cokelat	188/00974/DISPE RTARU 7 Maret 2022	Tanah Kalurahan
4	PT. Yogyakarta Tembakau Indonesia	Wirokerten	Banguntapan	9,327	Industri/Pabrik Rokok	143/01384/DISPE RTARU 28 Maret 2022	Tanah Kalurahan
5	Pemerintah Kalurahan Guwosari	Guwosari	Pajangan	7,808	Ruang Publik Taman Terbuka Hijau (Parkir dan Alun-Alun)	143/01467/DISPE RTARU 1 April 2022	Tanah Kalurahan
6	Pemerintah Kalurahan Segoroyoso	Segoroyoso	Pleret	2,642	Pembangunan Embung	143/01468/DISPE RTARU 1 April 2022	Tanah Kalurahan
7	Pemerintah Kabupaten Bantul	Tirtonirmolo	Kasihani	33,635	Pasar Niten dan TPST dengan Intermediate Treatment Facility (ITF)	188/01551/DISPE RTARU 7 April 2022	Tanah Kalurahan
8	Sdr. Eny Dyah Wijayanti	Bantul	Bantul	315	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	143/01654/DISPE RTARU 14 April 2022	Tanah Kalurahan
9	PT. Umbul Utama	Bantul	Bantul	1,600	Perdagangan dan Café	143/01655/DISPE RTARU 14 April 2022	Tanah Kalurahan
10	Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo	Bangunjiwo	Kasihani	19,581	Embung, Kios, Daur Ulang Sampah (Kolektif)	143/01876/DISPE RTARU 11 Mei 2022	Tanah Kalurahan
11	Pemerintah Kalurahan Banguntapan	Banguntapan	Banguntapan	1,750	Pembangunan Rumah Pilah Sampah Tipe A	143/02105/DISPE RTARU 24 Mei 2022	Tanah Kalurahan

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Pemohon Pemanfaat	Lokasi tanah		Luas (M <sup>2</sup> )	Pemanfaatan	Rekomendasi	Keterangan	
		Kalurahan	Kapanewon					
12	Pemerintah Kalurahan Timbulharjo	Timbulharjo	Sewon	5,000	Pembangunan Homestay Milik Kalurahan	143/02222/DISPE RTARU 31 Mei 2022	Tanah Kalurahan	
13	Pemerintah Kalurahan Timbulharjo	Timbulharjo	Sewon	1,200	Pembangunan Gedung Pertemuan, Ruang Olahraga dan Kegiatan Sosial	143/02223/DISPE RTARU 31 Mei 2022	Tanah Kalurahan	
14	PT. Kampung Perwita	Joglo	Potorono	Bangunpan	9,300	Warung Makan dan Tempat Parkir	143/02696/DISPE RTARU 28 Juni 2022	Tanah Kalurahan
15	Kantor Kalurahan Trimurti	Trimurti	Srandakan	2,535	Pembangunan Tempat Pemberdayaan Masyarakat/UMKM Desa Preneur (G2RT) Kalurahan Trimurti	143/02697/DISPE RTARU 28 Juni 2022	Tanah Kalurahan	
16	Dinas Pendidikan dan Olahraga	Bantul	Bantul	27,037	Lapangan Panjat Tebing, Stadion/Lapangan Dwi Windu, Lapangan Tennis dan Lapangan Olahraga SD Tegaldowo	143/03009/DISPE RTARU 18 Juli 2022	Tanah Kalurahan	
17	Pemerintah Kalurahan Panggungharjo	Panggungharjo	Sewon	87,633	Gedung Pertemuan, Gudang, Ruko, Kampung Mataraman, Lapangan Sepak Bola, Kawasan Budaya Karangkitri	143/03010/DISPE RTARU 18 Juli 2022	Tanah Kalurahan	
18	PT. Bumi Indonesia	Seduh	Tamanan	Bangunpan	1,500	Pembangunan Pondok Makan	143/03922/DISPE RTARU 7 September 2022	Tanah Kalurahan
19	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul	Bangunharjo	Sewon	1,076	Perluasan Samsat Pembantu Sewon	143/04017/DISPE RTARU 13 September 2022	Tanah Kalurahan	
20	Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo	Tirtomulyo	Kretek	320	Pembangunan Gedung Pertemuan	143/04018/DISPE RTARU 13 September 2022	Tanah Kalurahan	
21	Pemerintah Kalurahan Srigading	Srigading	Sanden	216	Pembangunan Kios Kuliner	143/03694/DISPE RTARU 24 Agustus 2022	Tanah Kalurahan	
22	Lembaga Pendidikan Ma'arif MWC NU Bantul	Bantul	Bantul	2,141	Madrasah Ibtidaiyah	143/13695/DISPE RTARU 24 Agustus 2022	Tanah Kalurahan	
23	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Bantul	Bantul	1,608	Perluasan Pembangunan Puskesmas Bantul II	143/03696/DISPE RTARU 24 Agustus 2022	Tanah Kalurahan	

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Pemohon Pemanfaat	Lokasi tanah		Luas (M <sup>2</sup> )	Pemanfaatan	Rekomendasi	Keterangan
		Kalurahan	Kapanewon				
24	Pemerintah Kalurahan Argorejo	Argorejo	Sedayu	2,275	Pembangunan Markas Komando Polsek, Rumah Dinas Kapolsek Sedayu dan Pos Lalu Lintas	143/06090/DISPE RTARU 19 Desember 2022	Tanah Kalurahan
25	Pemerintah Kalurahan Tamanan	Tamanan	Banguntapan	9,500	Pembangunan Plant Produk Beton	143/06091/DISPE RTARU 19 Desember 2022	Tanah Kalurahan
26	Pemerintah kalurahan Ngestiharjo	Ngestiharjo	Kasihani	-	Telaga Semar Seto	143/06092/DISPE RTARU 19 Desember 2022	Tanah Kalurahan
27	Ana Rina Herbranti, ST., MT. DPUESDM DIY	Sitimulyo	Piyungan	20,303	TPA Transisi Piyungan	593/00540/TN/2022 22 Februari 2022	Tanah Kasultanan (SG)
28	Wahid, ST., SIP., MA. Takmir Mushola Al-Ijdihad	Canden	Jetis	748	Mushola Al-Ijdihad	593/00543/TN/2022 2 Maret 2022	Tanah Kasultanan (SG)
29	Rabini	Caturharjo	Pandak	30	Lahan Pertanian	593/01556/TN/2022 31 Mei 2022	Tanah Kasultanan (SG)
30	Wagiman	Caturharjo	Pandak	30	Warung Makan	593/01557/TN/2022 31 Mei 2022	Tanah Kasultanan (SG)
31	Ir. Bayu Mukti Sasongko, M.Si. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	Parangtritis	Kretek	109,700	Kawasan Konservasi Penyus	593/02179/TN/2022 19 Juli 2022	Tanah Kasultanan (SG)
32	Drs. Noviar Rahmad, M.Si. SATPOL PP DIY	Poncosari	Srandakan	800	Posko SAR Satlinmas	593/03412/TN/2022 20 Oktober 2022	Tanah Kasultanan (SG)
33	H. Agus Effendi, S.E. Yayasan Dakwah Bantul	Caturharjo	Pandak	560	Akses Jalan	593/03413/TN/2022 20 Oktober 2022	Tanah Kasultanan (SG)
34	Drs. Suparyanto, M.Hum.	Parangtritis	Kretek	4,000	Pertanian	593/03414/TN/2022 20 Oktober 2022	Tanah Kasultanan (SG)
35	Drs. Helmi Jamharis, MM. Pemerintah Kabupaten Bantul	Srihardono	Pundong	592	Pos Pemadam Kebakaran	593/02437/TN/2022 3 Agustus 2022	Tanah Kasultanan (SG)
36	Drs. Helmi Jamharis, MM. Pemerintah Kabupaten Bantul	Srigading	Sanden	850	Konservasi Penyus Samas	593/03851/TN/2022 17 November 2022	Tanah Kasultanan (SG)
37	Drs. Helmi Jamharis, MM. Pemerintah Kabupaten Bantul	Sumberagung	Jetis	4,647	Gedung Pilat Plan Pengolahan Hasil Perikanan (LPPMPHP)	593/03852/TN/2022 17 November 2022	Tanah Kasultanan (SG)
38	Pemerintah Kabupaten Bantul Drs. Helmi Jamharis, MM. (DKP)	Tirtohargo	Kretek	319,100	Konservasi Mangrove dan Pengembangan Fasilitas Pendukung	593/04145/TN/2022 9 Desember 2022	Tanah Kasultanan (SG) (Wedikengser)
39	Pemerintah Kabupaten Bantul Drs. Helmi Jamharis, MM. (DKP)	Srigading	Sanden	213,300	Konservasi Mangrove dan Pengembangan Fasilitas Pendukung	593/04165/TN/2022 13 Desember 2022	Tanah Kasultanan (SG) (Wedikengser)

No	Pemohon Pemanfaat	Lokasi tanah		Luas (M <sup>2</sup> )	Pemanfaatan	Rekomendasi	Keterangan
		Kalurahan	Kapanewon				
40	Pemerintah Kabupaten Bantul Drs. Helmi Jamharis, MM. (DINSOS)	Sumberagung	Jetis	2,566	Gedung Tagana Kabupaten Bantul	593/04268/TN/2022 23 Desember 2022	Tanah Kasultanan (SG)
41	Pemerintah Kabupaten Bantul Drs. Helmi Jamharis, MM. (DPUPKP)	Wukirsari	Imogiri	46,274	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	593/04281/TN/2022 26 Desember 2022	Tanah Kasultanan (SG)
42	Pemerintah Kabupaten Bantul Drs. Helmi Jamharis, MM. (DKUKMPP)	Palbapang	Bantul	1,885	Outlet Koperasi Perkulakan dan Gudang	593/04285/TN/2022 27 Desember 2022	Tanah Kasultanan (SG)

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, 2023

#### **d. Urusan Tata Ruang**

Tata Ruang Keistimewaan merupakan kebijakan dan strategi tata ruang pada kawasan strategis DIY yang berwujud struktur ruang dan pola ruang pada tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, serta wilayah yang memiliki nilai-nilai Keistimewaan baik sebagian atau seluruhnya dan diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan di DIY. Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (2) huruf e adalah terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Kewenangan Pemerintah Daerah DIY dalam urusan Tata Ruang sesuai Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi : (a) penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten, (b) penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten; (c) penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten; (d) pelaksanaan penataan ruang; (e) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban pemanfaatan ruang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang menyalahi rencana tata ruang; (f) penanganan sengketa atas pemanfaatan ruang tanah kasultanan atau tanah kadipaten; (g) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang; (h)

pengendalian pemanfaatan ruang; dan (i) pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang. Penataan Ruang dilakukan dengan prinsip mengembalikan, memperbaiki, menguatkan dan mengembangkan yang akan difokuskan pada 18 kawasan keistimewaan. Terdapat beberapa aspek tata ruang yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pelestarian Kawasan Strategis Keistimewaan, seperti sarana dan prasarana yang saling menunjang dan harus direncanakan dengan baik. Sarana pra sarana yang baik dan sesuai konteks kawasan menjadikan perkotaan Yogyakarta sebagai kawasan yang merepresentasikan nilai dasar filosofi Keistimewaan Yogyakarta. Sinergi antara aspek fisik berupa sarana pra sarana dan upaya pelestarian lainnya sangat diperlukan dalam hal perencanaan kawasan strategis keistimewaan Yogyakarta ini.

Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 2017-2022 telah melaksanakan perencanaan dan pemanfaatan ruang satuan ruang strategis yang ada di wilayah Kabupaten Bantul sebagaimana pada tabel di bawah in.

**Tabel 2.326 Produk Perencanaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Strategis Keistimewaan di Kabupaten Bantul**

Tahun	Produk Perencanaan dan Pelaksanaan Penataan SRS
2017	Pembangunan RTH kawasan Pleret : Pembangunan perkerasan jalan 1.141 m <sup>2</sup> Pembangunan tempat parkir 1.626 m <sup>2</sup>
2018	Infrastruktur pendukung di zona penyangga makan raja-raja Imogiri berupa: Identifikasi kebutuhan lahan gapuran, landmark Rencana Induk dan reviu DED Satuan Ruang Strategis Kawasan Imogiri Infrastruktur pendukung kawasan Pleret berupa : Identifikasi kebutuhan lahan lansekap taman titik nol, gapura dan miniatur kerajaan Penyusunan rencana induk dan reviu DED satuan ruang strategis kawasan kerto-Pleret
2019	Dokumen perencanaan SRS Samas-Parangtritis: RTBL kawasan Depok RTBL kawasan Pusat Wisata Parangtritis

Tahun	Produk Perencanaan dan Pelaksanaan Penataan SRS
	Dokumen perencanaan SRS Kotagede : RTBL kawasan Watu Gilang
2020	RTBL kawasan Giriloyo, RTBL kawasan Banyusumurup, RTBL kawasan Segoroyoso, RTBL kawasan Masjid Pathok Negoro Babadan
2021	RTBL Perbukitan Parangtritis
2022	Rencana Induk SRS Samas - Parangtritis

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, 2023

## **2.2.2 Urusan Pemerintah Daerah yang didukung Pembiayaan Dana Keistimewaan**

### **a. Urusan Pendidikan**

Pendidikan Berbasis Budaya berupa Pembinaan Muatan Lokal dengan sasaran Lembaga/penyelenggara Pendidikan Formal dan Non formal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar yang menysasar pada pendidik/guru serta siswa, berupa pembinaan, pelatihan dan juga lomba.

**Tabel 2.327 Kegiatan Muatan Lokal Pendidikan Berbasis Budaya**

No	Kegiatan	Jenjang	Sasaran
1	Lomba Jemparangan	Sekolah Dasar	Siswa
2	Lomba Ngudhar Tembang	Sekolah Dasar	Siswa
3	Pelatihan Keterampilan Tarian Tradisional Yogyakarta	PAUD	Guru
4	Pelatihan Keterampilan Memainkan Dolanan Tradisional Jawa	PAUD	Guru
5	Pelatihan MC Basa Jawa/Pranata Cara	Non Formal	Masyarakat
6	Pelatihan Rias Pengantin Gaya Yogyakarta (Paes Ageng)	Non Formal	Masyarakat
7	Pembinaan dan Pelatihan Guru Muatan Lokal Bahasa Jawa (Naskah Ber Aksara Jawa, Huruf Jawa, Digitalisasi Aksara Jawa)	Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Guru
8	Pembinaan dan Pelatihan Guru Muatan Lokal Mambatik (Tulis, Cap, Pewarnaan Batik 3 Dan 4 Warna)	Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Guru

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2023

**b. Urusan Kesehatan****1) Kesehatan Tradisional Terintegrasi**

Pelayanan Kesehatan Tradisional merupakan salah satu upaya Kesehatan komprehensif yang dapat dipertanggungjawabkan, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Akhir Tahun 2014 merupakan momentum berharga dalam pelayanan kesehatan tradisional dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional yang meliputi: tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jenis pelayanan kesehatan tradisional, tata cara pelayanan kesehatan tradisional, sumber daya, penelitian dan pengembangan, publikasi dan periklanan, pemberdayaan masyarakat, pendanaan, pembinaan dan pengawasan serta sanksi administratif.

Berdasarkan hasil Riskesdas Tahun 2013 proporsi rumah tangga yang memanfaatkan pelayanan kesehatan tradisional sebesar 30,4% dengan jenis pelayanan yang paling banyak digunakan adalah ketrampilan tanpa alat sebesar 77,8% dan ramuan sebesar 49%. Kondisi ini menggambarkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional mempunyai potensi yang cukup besar dan perlu mendapat perhatian yang serius sebagai bagian dari pembangunan kesehatan daerah.

Sejak tahun 2011, Kabupaten Bantul telah melaksanakan rintisan puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer di Puskesmas Kasihan II dengan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat. Pada tahun 2019 melalui anggaran dari Danais Dinkes DIY telah dilaksanakan pelatihan pada petugas kesehatan di 3 puskesmas yang diharapkan bisa melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan konvensional.

Sampai dengan 2022 beberapa puskesmas sudah memberikan pelayanan kesehatan tradisional berupa akupuntur, akupresur, ramuan tradisional, meditasi, asuhan mandiri ramuan dan pijat.

**Tabel 2.328 Puskesmas dan Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi**

Tahun	Jumlah Puskesmas Pemberi Layanan	Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional
2019	5	Akupuntur, akupresur, ramuan tradisional dan meditasi, asuhan mandiri ramuan dan pijat
2020	7	
2021	9	
2022	9	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

### **c. Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Pelibatan masyarakat/komunitas dalam menjaga trantibum masih perlu ditingkatkan. Kelompok Jagawarga mulai dibentuk melalui Dana Keistimewaan dengan tujuan untuk meningkatkan ketenteraman ketertiban umum di tingkat dusun.

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Kelompok Jaga Warga, Kelompok Jaga Warga adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kalurahan/Kelurahan atas inisiatif masyarakat yang berada di tingkat padukuhan/Rukun Warga/Kampung, yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan partisipasi aktif masyarakat.

Peran kelompok jaga warga sebagai bagian mitra Pemerintah dalam mewujudkan keterlindungan warga adalah:

- 1) Meningkatnya peran pranata sosial yang ada dalam masyarakat yang belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.
- 2) Meningkatnya nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat.
- 3) Meningkatnya kepedulian masyarakat untuk menguatkan pembangunan keistimewaan serta rasa persatuan dan kesatuan di lingkungannya.
- 4) Membantu mengurangi dan/atau menangani kerawanan sosial dan bencana



Kelompok Jagawarga yang sudah terbentuk sampai dengan Tahun 2022 sejumlah 648 kelompok. Sebaran Kelompok Jagawarga Sampai Dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada table di bawah ini

**Tabel 2.329 Sebaran Kelompok Jagawarga Tahun 2022**

No	Kapanewon	Jumlah
1	Kapanewon Srandakan	43
2	Kapanewon Sanden	39
3	Kapanewon Kretek	52
4	Kapanewon Pundong	37
5	Kapanewon Bambanglipuro	45
6	Kapanewon Pandak	28
7	Kapanewon Pajangan	21
8	Kapanewon Bantul	15
9	Kapanewon Jetis	56
10	Kapanewon Imogiri	29
11	Kapanewon Dlingo	43
12	Kapanewon Banguntapan	41
13	Kapanewon Pleret	37
14	Kapanewon Piyungan	60
15	Kapanewon Sewon	5
16	Kapanewon Kasihan	53
17	Kapanewon Sedayu	44
Jumlah		648

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bantul, 2023

Periode Tahun 2020–2022 pembentukan kelompok Jagawarga menjadi kewenangan dari Kesbangpol kabupaten/kota, yang sebelumnya menjadi kewenangan dari Pemerintah DIY. Tahun 2023 kewenangan ada di Satpol PP.

**Tabel 2.330 Jumlah Kelompok Jagawarga di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

No	Keterangan	Jumlah				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kelompok Jaga Warga	219	279	358	648	803
2	Padukuhan	933	933	933	933	933
3	Rasio Jumlah Jagawarga	23,47%	29,90%	38,37%	69,45%	86,07%

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bantul, 2024

#### **d. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Indonesia mempunyai potensi yang besar, mulai dari sumberdaya alam hingga letaknya yang strategis. Salah satu misi pemerintahan pada periode pertama Presiden Joko Widodo menjabat adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Wacana membangun negara maritim sebenarnya sudah muncul pada tahun 1997, untuk membangun Indonesia baru sebagai negara bahari yang memaksimalkan laut sebagai potensi bangsa Indonesia.

Bersamaan dengan gagasan pemerintahan Presiden Jokowi yang akan menjadikan Indonesia sebagai Negara Maritim menargetkan Negara Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada hakekatnya negara maritim Indonesia merupakan pengembangan dari konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi negara maritim Indonesia perlu dijadikan pedoman dan rangsangan serta dorongan bagi bangsa kita dalam upaya pemanfaatan dan pendayagunaan secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, langkah utama yang dilakukan adalah membenahi terlebih dahulu desa pesisir. Anggaran yang telah disediakan pada pos dana desa pembangunan untuk kalurahan maupun pos anggaran lainnya dapat segera dilakukan dan dalam pelaksanaannya, tidak hanya mencakup pembangunan wilayah desa pesisir secara fisik, tetapi termasuk juga pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang berada di Kawasan desa pesisir.

Kabupaten Bantul memiliki 5 (lima) desa pesisir yang berada di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden dan Kapanewon Kretek. Desa pesisir yang ada di Kapanewon Srandakan yakni Kalurahan Poncosari, sedangkan desa pesisir yang ada di Kapanewon Sanden antara lain Kalurahan Srigading dan Kalurahan Gadingsari. Kapanewon Kretek hanya memiliki 2 (dua) desa pesisir, yakni Kalurahan Parangtritis dan Kalurahan Tirtohargo.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan ke Pemerintah Kalurahan Dalam Rangka Pengembangan Desa Maritim Tahun Anggaran 2022 yang disusun oleh Pemerintah Daerah DIY, dijelaskan bahwa ruang lingkup Desa Maritim adalah kalurahan pesisir yang berbatasan dengan laut atau kalurahan yang memiliki pantai. Pemerintah Daerah DIY melalui Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/00566 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Maritim telah menetapkan 34 (tiga puluh empat) Kalurahan Maritim di DIY dimana 5 (lima) diantaranya ada di wilayah Kabupaten Bantul, antara lain Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Tirtohargo dan Kalurahan Parangtritis.

Pada tahun 2022-2023 ada 3 kalurahan di Kabupaten Bantul yang mendapatkan BKK Dana Keistimewaan ke Pemerintah Kalurahan Dalam Rangka Pengembangan Desa Maritim yaitu Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Srigading dan Kalurahan Gadingsari. Sedangkan pada tahun 2024 lewat BKK Dana Keistimewaan ke Pemerintah Kalurahan ada 2 Kalurahan untuk pengembangan Desa Maritim yaitu di Tirtohargo dan Poncosari.

### **2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPД Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

Perencanaan pembangunan adalah suatu tahapan dalam proses Pembangunan yang akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi keberhasilan sesuatu pembangunan, oleh karenanya dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya memperhatikan berbagai faktor yang kemungkinan akan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan Pembangunan yang diperoleh dengan memperhatikan capaian target dan realisasi perencanaan Pembangunan dari hasil evaluasi rencana Pembangunan. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah

bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan, Pemerintah Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

RKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan Pembangunan daerah tahunan yang berisi program dan kegiatan serta target capaian kinerja dari setiap perangkat daerah untuk mendukung pencapaian sasaran daerah. Pelaksanaan RKPD sesuai dengan amanat Permendagri 86 tahun 2017 perlu dilakukan evaluasi, melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja jangka menengah sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana maupun perubahan rencana Pembangunan yang akan datang menjadi lebih baik.

Evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023, dilaksanakan untuk melihat tingkat ketercapaian program pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan periode selanjutnya, capaian tahun sebelumnya menjadi bagian penting untuk menentukan kebijakan dan perencanaan yang tepat..

### **2.3.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bantul**

RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 memuat tujuan dan sasaran daerah yang dijabarkan dalam RKPD tahunan. Indikator tujuan dan indikator sasaran daerah merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan menjadi IKU Kabupaten Bantul. Capaian IKU Kabupaten Bantul tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.331 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Satuan	Realisasi 2022	2023					Predikat	OPD Pengampu	Keterangan/Penjelasan
				Target RPJMD 2021-2026	Target Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Persentase Capaian (PRKPD)	Persentase Capaian (RPJMD)			
A	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77.47	82	82	77.47	94.48%	94.48%	Sangat Tinggi	Bagian Organisasi	Realisasi masih menggunakan realisasi tahun 2022
			(BB)	(BB)	(BB)	(BB)					
1	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	3.784	4.1815	4.1815	2.92	69.83%	69.83%	Sedang	KEMENDAGR I (BAG. TAPEM)	Realisasi Tahun 2022 berdasarkan LPPD Tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 29 April 2023 dengan Status Kinerja Sedang
2	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	100.00%	100.00%	Sangat Tinggi	BPK (BPKPAD)	Capaian Tahun 2023 atas LKPD 2022
3	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	Nilai	92.52	83.5	83.5	95	113.77%	113.77%	Sangat Tinggi	KPK (INSPEKTOR AT)	Nilai sudah selesai diverifikasi tetapi masih menunggu proses QA KPKP untuk penetapan nilai
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3.62	3.3	3.3	3.72	112.73%	112.73%	Sangat Tinggi	KEMENPAN RB (DISKOMINFO)	Realisasi tahun 2023 sesuai Keputusan KemenPANRB No. 13 tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2023, tertanggal 11 Januari 2024
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	88.25	88.4	88.4	88.73	100.37%	100.37%	Sangat Tinggi	BAG. ORGANISASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi tahun 2023</li> <li>Komitmen pimpinan yang tinggi dengan memasukan pelayanan prima pada visi dan misi RPJMD</li> </ul>
B	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80.69	81.09	81.09	81.74	100.80%	100.80%	Sangat Tinggi	BPS	Berita Resmi Statistik Nomor 89/12/34/Th.XXV, tanggal 1 Desember 2023
6	Usia Harapan Hidup	Tahun	73.9	74.11	74.11	74.64	100.72%	100.72%	Sangat Tinggi	BPS BANTUL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi tahun 2023 berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor 89/12/34/Th.XXV, tanggal 1 Desember 2023</li> <li>Didukung komitmen kepala daerah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</li> </ul>

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Satuan	Realisasi 2022	2023					Predikat	OPD Pengampu	Keterangan/Penjelasan
				Target RPJMD 2021-2026	Target Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Persentase Capaian (PRKPD)	Persentase Capaian (RPJMD)			
7	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15.48	15.25	15.25	15.61	102.36%	102.36%	Sangat Tinggi	BPS BANTUL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi tahun 2023 berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor 89/12/34/Th.XXV, 1 Desember 2023</li> <li>Di dukung peran pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan serta kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan</li> </ul>
8	Desa /Kalurahan Pamor Budaya	Kalurahan	7	6	6	10	166.67%	166.67%	Sangat Tinggi	DINAS KEBUDAYAA N (KUNDHA KABUDAYAN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi tahun 2023</li> <li>Antusiasme yang tinggi dari calon desa pamor budaya utk mengelola potensi desanya</li> </ul>
C	Indeks Rasa Aman	Indeks	n/a	2.73	2.73	4.7	172.16%	172.16%	Sangat Tinggi	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Realisasi Tahun 2023
9	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100.00%	100.00%	Sangat Tinggi	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Capaian Tahun 2023 Setiap ada aduan langsung ditindaklanjuti
D	Laju Pertumbuhan Ekonommi	Persen	5.2	3.97	3.97	5.2	130.98%	130.98%	Sangat Tinggi	BPS	Realisasi masih menggunakan realisasi tahun 2022
10	Rasio Gini	Angka	0.41	0.35	0,406-0,355	0.454	87.90%	70.29%	Sedang	BPS BANTUL	Capaian Tahun 2023 berdasarkan tabel dinamis BPS ( <a href="https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/333/1/gini-ratio-menurut-kabupaten-kota.html">https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/333/1/gini-ratio-menurut-kabupaten-kota.html</a> )
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.9	3.5	3.5	3.78	92.00%	92.00%	Sangat Tinggi	BPS BANTUL	Capaian Tahun 2023 berdasarkan BRS No. 83/11/34/Th.VVV, 6 November 2023 Rilis BPS bulan November 2023
12	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	83.33	90	90	94	104.44%	104.44%	Sangat Tinggi	Indonesia Creative Cities Network (ICCN) atau Jejaring	Capaian Tahun 2023 Semua komponen yang dipersyaratkan telah terpenuhi dan telah diajukan ke Tim Evaluator UCCN

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Satuan	Realisasi 2022	2023					Predikat	OPD Pengampu	Keterangan/Penjelasan
				Target RPJMD 2021-2026	Target Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Persentase Capaian (PRKPD)	Persentase Capaian (RPJMD)			
										Kota/Kabupaten Kreatif Indonesia (DKUKMPP)	
E	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	64.71	67.26	67.26	64.71	96.21%	96.21%	Sangat Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Realisasi masih menggunakan realisasi tahun 2022
13	Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	75.69	75.05	75.05	75.69	100.85%	100.85%	Sangat Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Realisasi tahun 2022, untuk realisasi 2023 masih proses penghitungan karena ada penyesuaian SK status jalan sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk penghitungan kondisi jalan
14	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75.2	75.05	75.03	75.57	100.72%	100.69%	Sangat Tinggi	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	Capaian Tahun 2023
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62.84	63.59	63.59	63.68	100.14%	100.14%	Sangat Tinggi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi tahun 2023 Dengan komponen:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- IKU 88,16 dengan target 87,50</li> <li>- IKA 39,83 dengan target 40,50</li> <li>- IKTL 59,34 dengan target 59</li> </ul> </li> <li>• Untuk Bantul belum memakai aplikasi LHK dan masih dihitung secara manual dengan memakai 3 komponen yaitu IKA, IKU dan IKTL</li> </ul>
16	Indeks Risiko Bencana	Indeks	167.97	169.94	169.94	149.27	87.84	87.84	Tinggi	BNPB (BPBD)	Realisasi 2023
F	Tingkat Kemiskinan	Persen	12.27	12.9	12.9	11.96	107.29%	107.29%	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL	Publikasi BPS Booklet Kemiskinan Kabupaten Bantul 2023
17	Jumlah Pemerlu Pelayanan	Orang	73689	71667	71667	40.323	199.94%	199.94%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial	Capaian Tahun 2023



**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Satuan	Realisasi 2022	2023					Predikat	OPD Pengampu	Keterangan/Penjelasan
				Target RPJMD 2021-2026	Target Perubahan RKPD 2023	Realisasi	Persentase Capaian (PRKPD)	Persentase Capaian (RPJMD)			
	Kesejahteraan Sosial (PPKS)										
G	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks		96,00	96,00					DP3AP2KB	
18	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	65.03	71.01	71.01	65.06	91.62%	91.62%	Sangat Tinggi	BPS BANTUL (DP3AP2KB)	*Realisasi merupakan Proyeksi dengan model Single Exponential Smoothing Realisasi tahun 2023 menunggu rilis dari BPS
19	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Utama	Utama	Utama	Utama	100.00%	100.00%	Sangat Tinggi	KEMEN PPPA (DP3AP2KB)	• Realisasi tahun 2023 • Sudah ada Satgas KLA di setiap kalurahan dan Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Setiap Kapanewon

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2024.

Dari tabel di atas, Capaian indicator tujuan Kabupaten Bantul Tahun 2023 dibandingkan dengan target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan target RPJMD Tahun 2021-2026 dari 7 (tujuh) indikator tujuan, sudah ada realisasi yaitu 3 (tiga) indikator dengan persentase capaian indicator >100% sedangkan 4 (empat) indikator masih menggunakan capaian tahun 2022 dan satu indicator belum ada data. Adapun indicator tujuan yang masih menggunakan capaian tahun 2022 terdiri dari 2 (dua) indicator memiliki persentase capaian <100% dan satu indicator memiliki persentase capaian >100% sehingga indikator tujuan yang tidak tercapai ada 2 (tiga) indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Pembangunan Infrastruktur.

Capaian IKU Kabupaten Bantul Tahun 2023 dibandingkan dengan target Perubahan RKPD Tahun 2023 dari 19 (sembilan belas) indicator kinerja terdapat 12 (empat belas) indikator yang memiliki persentase capaian >100%, 4 (empat) indikator dengan capaian sesuai target 100%, dan 3 (tiga) indikator dengan capaian < 100%. Adapun 3 (tiga) indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD 2023, yaitu Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pemberdayaan Gender.

Berdasarkan uraian di atas, untuk Indikator tujuan dan indikator sasaran daerah yang tidak mencapai target RKPD Tahun 2023 maupun target RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator Tujuan:

a. Indeks Reformasi Birokrasi

1) Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi didukung oleh 5 (lima) indikator sasaran daerah yaitu Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD), Opini Laporan Keuangan, Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK, Indeks Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Namun hanya 1 indikator yang tidak mencapai target yaitu Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD). Realisasi EPPD tahun 2023 sebesar 2.92 atau 70.68% merupakan realisasi Tahun 2022 berdasarkan LPPD Tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 29 April 2023 oleh Kemenpan RB dengan Status Kinerja Sedang. Capaian tahun 2023 masih menggunakan capaian tahun 2022 dikarenakan sampai saat ini belum ada realisasi capaian nilai EPPD Tahun 2023.

b. Indeks Pembangunan Infrastruktur

Indikator tujuan Indeks Pembangunan Infrastruktur didukung oleh 3 (tiga) indikator sasaran daerah yaitu Indeks kualitas infrastruktur, Kesesuaian pemanfaatan ruang, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan persentase capaian >100%. Realisasi Indeks Pembangunan Infrastruktur masih menggunakan tahun 2022 sehingga capaian masih <100% karena sebagai pembagi adalah target tahun 2023 baik di Perubahan RKPD maupun RPJMD Tahun 2021-2026.

2. Indeks Sasaran daerah

a. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

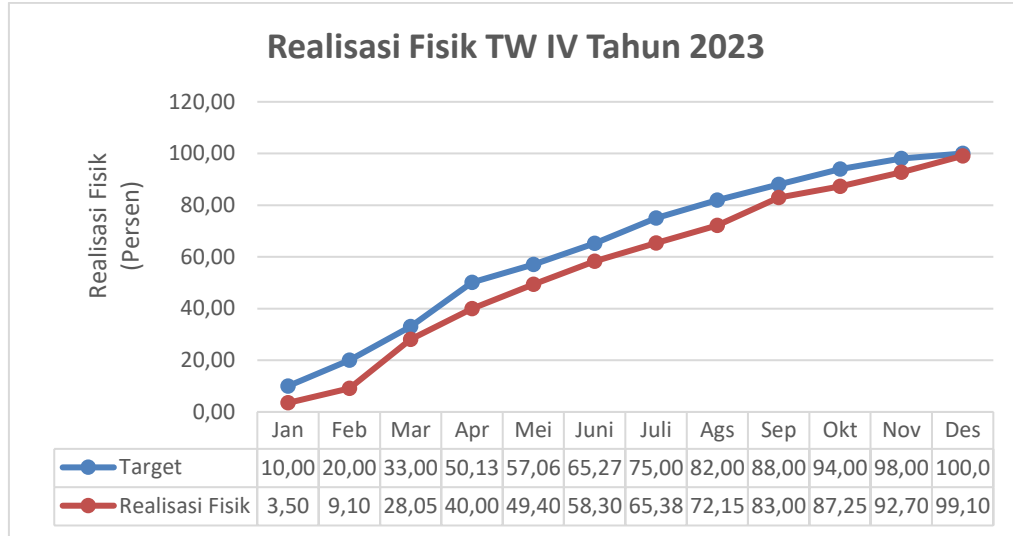
Nilai EPPD dikeluarkan oleh Kepmendagri dan sampai saat ini belum ada realisasi capaian nilai EPPD Tahun 2023 sehingga masih menggunakan realisasi tahun 2022 dengan hasil sebesar 2.92 atau 70.68% berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.1109 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 18 April 2023. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah:

- i. Belum terakomodirnya Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD secara keseluruhan ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah pelaksana IKK urusan, sehingga pencapaian beberapa Indikator Kinerja Kunci yang menjadi indikator penilaian belum maksimal;
  - ii. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait LPPD dan EPPD, maka penetapan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah juga mengalami perubahan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pengukuran skor kinerja dan status kinerja EPPD yaitu EPPD Tahun 2019 menggunakan peraturan lama maka skor kinerja 3,4463 berstatus kinerja Sangat Tinggi, dan target EPPD Tahun 2022 menggunakan peraturan baru maka skor kinerja 2.92 berstatus kinerja Sedang;
  - iii. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) EPPD dari Kemendagri tidak diberikan ke kabupatyaen/kota sehingga tidak bisa melihat komponen mana yang masih harus kita tingkatkan.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- Realisasi TPT Kabupaten Bantul Tahun 2023 berdasarkan BRS No. 83/11/34/Th.VVV, 6 November 2023 Rilis BPS bulan November 2023 adalah sebesar 3.78 atau 92% sehingga masih di bawah target yang telah ditetapkan di Perubahan RKPD maupun RPJMD Tahun 2021-2026. Adapun faktor penghambat adalah:
- i. Ketidaksiapan tenaga kerja dalam memasuki dunia kerja sehingga menyebabkan turnover yang tinggi di Perusahaan;
  - ii. Kepeminatan tenaga kerja di Kabupaten Bantul yang tidak match dengan ketersediaan lowongan kerja;

- iii. Krisis ekonomi global berdampak pada industry diluar DIY sehingga tidak dapat melakukan perekrutan di Kab. Bantul;
  - iv. Minat tenaga kerja disektor Informal tinggi tetapi peluangnya belum tersedia
- c. Rasio Gini
- Berdasarkan rilis BPS realisasi Rasio Gini tahun 2023 sebesar 0.454 dari target Perubahan RKPD 0,406-0,355 dan target RPJMD Tahun 2021-2026 sebesar 0.36 tidak tercapai. Bahkan capaian mengalami peningkatan dari tahun 2022
- d. Indeks Pemberdayaan Gender
- Realisasi Indeks Pemberdayaan Gender 2023 sebesar 65.06 atau 93.80% yang merupakan penghitungan dengan proyeksi model Kuadratik karena menunggu rilis dari BPS. Capaian masih di bawah target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan RPJMD Tahun 2021-2026.

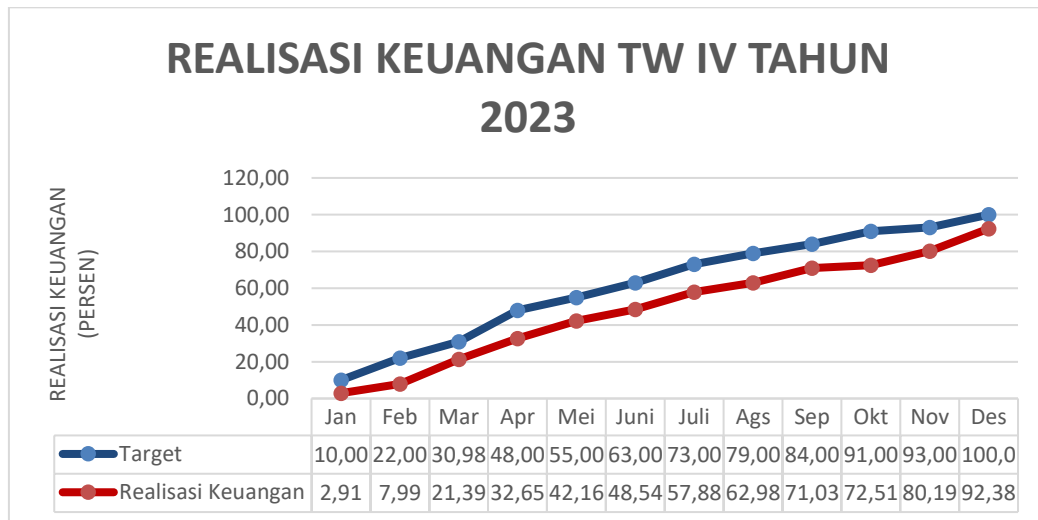
### **2.3.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022**

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian triwulan IV Tahun 2023, diketahui capaian fisik belanja langsung sebesar 99,10% dari target 100% sehingga terdapat deviasi fisik sebesar 0,90%. Potret target dan realisasi fisik selama tahun 2023 disajikan pada grafik dibawah ini.



Gambar 2.39 Grafik target dan realisasi fisik Tahun 2023

Capaian keuangan sebesar 92,38% dari target 100% sehingga terdapat deviasi keuangan sebesar 7,62%. Potret target dan realisasi keuangan selama tahun 2023 disajikan pada grafik berikut ini.



Gambar 2.40 Grafik target dan realisasi keuangan Tahun 2022

Masih adanya deviasi fisik dari hasil evaluasi pada triwulan IV yang berarti masih adanya target fisik hingga TW IV tahun 2023 belum dapat tercapai, hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya aplikasi perizinan yang belum dibangun karena adanya penyesuaian probis aplikasi dan regulasi belum ada . aplikasi ini untuk memenuhi data dukung MCP KPK

2. Berdasarkan hasil verifikasi piutang masih banyak daftar piutang yang harus ditindak lanjuti dengan penelitian lapangan, akan tetapi belum semua penelitian lapangan bisa terselesaikan di tahun ini.
3. Tenaga Pakar dan Tim Ahli DPRD tidak direalisasi seluruhnya karena menyesuaikan kebutuhan karena tidak banyak permasalahan yang memerlukan fasilitasi pakar atau tenaga ahli.

Selain itu masih adanya deviasi keuangan yang cenderung tinggi, hal ini disebabkan antara lain:

1. Sisa anggaran kegiatan dari akumulasi sisa belanja gaji
2. Pengeluaran belanja tak terduga disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/tidak terduga
3. Efisiensi belanja di bawah SHBJ serta pengadaan barang dan jasa
4. Adanya tenaga non ASN yang mengundurkan diri.
5. Adanya honor nara sumber yang tidak terserap sesuai rencana karena pemadatan pelaksanaan kegiatan
6. Aplikasi perizinan batal dibangun karena penyesuaian probis aplikasi dan regulasi belum ada.
7. Penapisan sasaran kurang optimal (IUD dan IMplan) dan sebagian sasaran dilayani untuk memenuhi kebutuhan praktek pelatihan Pelatihan Kontrasepsi /CTU bagi bidan dan dokter yang dilaksanakan di RSUP dr. Sardjito;
8. Minat pemakaian KB MKJP lebih rendah dibandingkan dengan Non MKJP. Persentase pemakaian MKJP masih 13.38%
9. Beberapa kegiatan sudah dicukupkan oleh Pemerintah DIY atau pemerintah pusat sehingga anggaran tidak terserap

Capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan capaian kinerja dari IKU perangkat daerah selama tahun 2021-2026, yang didasarkan dari capaian indikator sasaran perangkat daerah. Secara keseluruhan capaian indikator kinerja perangkat daerah (IKU PD) pelaksanaan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.332 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Ketercapaian	Perangkat Daerah
			2022	2023	2022	2023	2022	2023		
Indikator Sasaran Daerah: Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)										
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten	Persen	80.92	81.2	82.96	82.7	103%	101.85%	Tercapai	SEKRETARIAT DAERAH (Bag. Organisasi)
2	Persentase Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100%	100.00%	Tercapai	SEKRETARIAT DAERAH (Bag. Tapem)
3	Persentase rancangan perda dan perkara yang diharmonisasi	Persen	100	100	100	100	100%	100.00%	Tercapai	SEKRETARIAT DAERAH (Bag. Hukum)
4	Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100%	100.00%	Tercapai	SEKRETARIAT DAERAH (Bag. Tapem)
5	Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	Persen	90	93	100	100	111%	107.53%	Tercapai	SEKRETARIAT DAERAH (Bag. Organisasi)
6	Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100%	100.00%	Tercapai	SEKRETARIAT DAERAH (Bag. PerekosDA & Kesra)
7	Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	Persen	85	85	97.9	97.9	115%	115.18%	Tercapai	SEKRETARIAT DAERAH (Bag. PK)
8	Persentase Raperda yang Disetujui Bersama	Persen	72	74	92.31	92.31	128%	124.74%	Tercapai	SEKRETARIAT DPRD
9	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Persen	100	100	100	100	100%	100.00%	Tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10	Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Persen	95	96	100	95	105%	98.96%	Tidak Tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11	Capaian Indeks Profesionalitas ASN	nilai	69	70	57.44	72.68	83%	103.83%	Tercapai	BKN (BKPSDM)
12	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	100	100	100	100	100%	100.00%	Tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
13	Cakupan PD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	Persen	74	79	75.47	80	102%	101.27%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Ketercapaian	Perangkat Daerah
			2022	2023	2022	2023	2022	2023		
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	71.181	71.181	65.717	86.151	92%	121.03%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>Indikator Sasaran Daerah: Opini Laporan Keuangan</b>										
15	Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	Jumlah	6	5	0	0	100%	100.00%	Tercapai	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
16	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	21.69	22.19	24.19	22.19	112%	100.00%	Tercapai	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
<b>Indikator Sasaran Daerah: Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK</b>										
17	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	82.5	83.5	93.3	92.1	113%	110.30%	Tercapai	INSPEKTORAT
18	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	3	3	3	100%	100.00%	Tercapai	INSPEKTORAT
<b>Indikator Sasaran Daerah: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>										
19	Index kualitas layanan informasi publik	Angka	83.75	84	83.81	83.81	100%	99.77%	Tidak Tercapai	DISKOMINFO
20	Nilai Indeks Pembangunan TIK	angka	6.6	7.2	6.94	6.94	105%	96.39%	Tidak Tercapai	DISKOMINFO
21	Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	angka	2.7	2.75	2.9	2.9	107%	105.45%	Tercapai	DISKOMINFO
<b>Indikator Sasaran Daerah: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>										
22	IKM Kinerja PTSP	nilai/angka	85.25	85.5	87	87	102%	101.75%	Tercapai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23	Rata Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	99.81	99.82	99.85	99.9	100%	100.08%	Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24	Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data	Lembaga	4	6	4	10	100%	166.67%	Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
25	IKM Kapanewon	angka	90	90	94.15	94.92	105%	105.47%	Tercapai	Kapanewon Bantul

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Ketercapaian	Perangkat Daerah
			2022	2023	2022	2023	2022	2023		
26	IKM Kapanewon	angka	90	95	95.72	96.93	106%	102.03%	Tercapai	Kapanewon Bambanglipuro
27	IKM Kapanewon	angka	95	90	94.53	94.96	100%	105.51%	Tercapai	Kapanewon Dlingo
28	IKM Kapanewon	angka	90	90	92.1	94.28	102%	104.76%	Tercapai	Kapanewon Imogiri
29	IKM Kapanewon	angka	90	91	92.55	88.4	103%	97.14%	Tidak Tercapai	Kapanewon Jetis
30	IKM Kapanewon	angka	90	93	90	94	100%	101.08%	Tercapai	Kapanewon Kretek
31	IKM Kapanewon	angka	92	90	92.33	95.61	100%	106.23%	Tercapai	Kapanewon Kasihan
32	IKM Kapanewon	angka	90	90	94.35	94.55	105%	105.06%	Tercapai	Kapanewon Pandak
33	IKM Kapanewon	angka	90	90	95.08	92.01	106%	102.23%	Tercapai	Kapanewon Pundong
34	IKM Kapanewon	angka	90	91	93.35	93.37	104%	102.60%	Tercapai	Kapanewon Pleret
35	IKM Kapanewon	angka	90	93	95.11	95.28	106%	102.45%	Tercapai	Kapanewon Piyungan
36	IKM Kapanewon	angka	92	94.5	94.75	95.26	103%	100.80%	Tercapai	Kapanewon Pajangan
37	IKM Kapanewon	angka	94	91	97.2	95.04	103%	104.44%	Tercapai	Kapanewon Sanden
38	IKM Kapanewon	angka	90	90	92.42	95.44	103%	106.04%	Tercapai	Kapanewon Srandakan
39	IKM Kapanewon	angka	90	90	90.49	90.84	101%	100.93%	Tercapai	Kapanewon Sewon
40	IKM Kapanewon	angka	91	92	94.22	95.21	104%	103.49%	Tercapai	Kapanewon Sedayu
41	IKM Kapanewon	angka	90	90	94.5	95.55	105%	106.17%	Tercapai	Kapanewon Banguntapan
<b>Indikator Sasaran Daerah: Usia Harapan Hidup</b>										
42	Net Death Rate (NDR)	permil	21.5	21	20.4	20.55	105%	102.14%	Tercapai	Rumah Sakit Panembahan Senopati
43	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	88.7	80.7	146.88	84.36	34%	95.46%	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
44	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	7.7	7.3	7.7	7.59	100%	96.03%	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
45	Case Fatalilty Rate Covid 19	Persen	2.75	2.5	1.13	5.7	159%	-28.00%	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Ketercapaian	Perangkat Daerah
			2022	2023	2022	2023	2022	2023		
46	Insiden Rate DBD	per 100.000 penduduk	125	120	9	14	193%	188.33%	Tercapai	Dinas Kesehatan
47	Prevalensi stunting	Persen	9	8.5	6.42	6.34	129%	125.41%	Tercapai	Dinas Kesehatan
<b>Indikator Sasaran Daerah: Angka Harapan Lama Sekolah</b>										
48	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	94	94.22	105.63	100.05	112%	106.19%	Tercapai	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
49	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	95	95.22	101.18	95.94	107%	100.76%	Tercapai	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
50	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	98.5	98.6	99.15	94.41	101%	95.75%	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
51	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	14	14.22	13.51	15.64	97%	109.99%	Tercapai	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
52	Persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	Persen	33	33.5	112.32	145.91	340%	435.55%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
53	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	Indeks	85	85.5	89.38	91.74	105%	107.30%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
54	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	10	18	31	30	310%	166.67%	Tercapai	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
55	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	3.42	3.43	4.85	4.85	142%	141.40%	Tercapai	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
<b>Indikator Sasaran Daerah: Desa /Kalurahan Pamor Budaya</b>										
56	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	Kalurahan	15	18	19	24	127%	133.33%	Tercapai	Dinas Kebudayaan
<b>Indikator Sasaran Daerah: Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</b>										
57	Persentase gangguan trantribum yang dapat di selesaikan	Persen	100	100	100	100	100%	100.00%	Tercapai	Satuan Polisi Pamong Praja
58	Persentase Pemilih yang berpartisipasi	Persen	77	77	81.96	80.23	106%	104.19%	Tercapai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Ketercapaian	Perangkat Daerah
			2022	2023	2022	2023	2022	2023		
59	Jumlah intoleransi di masyarakat	Angka	0	0	0	0	100%	100.00%	Tercapai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
60	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan.	Jumlah kejadian	0	0	0	0	100%	100.00%	Tercapai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>Indikator Sasaran Daerah:Rasio Gini</b>										
61	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	90.4	90.8	92.1	92.2	102%	101.54%	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
62	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	Persen	0.714	0.714	9.79	2.12	1371%	296.92%	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
63	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	Persen	0.45	0.5	1.91	2.12	424%	424.00%	Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
64	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2,057,000	2,262,700	5,436,213	5.772.527	264%	225.12%	Tercapai	Dinas Pariwisata
65	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1.25	1.5	2.03	2.03	162%	135.33%	Tercapai	Dinas Pariwisata
66	Jumlah Belanja Wisatawan	Rupiah/org	744,188	781,397	767,234	1.551.123	103%	198.51%	Tercapai	Dinas Pariwisata
67	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB	Rupiah (Miliar)	1,788.16	1,850.72	1,671.16	1,762.95	93%	95.26%	Tidak Tercapai	Dinas Kopersai, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
68	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	persen	3.3	3.3	3.65	4.67	111%	141.52%	Tercapai	Dinas Kopersai, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
69	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (Miliar)	1,824.47	2,030.54	2,193.86	2,638.46	120%	129.94%	Tercapai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>Indikator Sasaran Daerah:Tingkat Pengangguran Terbuka</b>										
70	Jumlah tenaga kerja yang terserap	orang	7,500	8,500	12,742	19,585	170%	230.41%	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
71	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	Kalurahan	33	43	65	75	197%	174.42%	Tercapai	Dinas Pemberdayaan

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Ketercapaian	Perangkat Daerah
			2022	2023	2022	2023	2022	2023		
										Masyarakat dan Kalurahan
<b>Indikator Sasaran Daerah: Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif</b>										
72	Jumlah parameter Kabupaten Kreatif yang dipenuhi	jumlah parameter	14	16	14	17	100%	106.25%	Tercapai	Dinas Pariwisata
73	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Persen	70	70	70.1	70.19	100%	100.27%	Tercapai	Dinas Kopersai, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
74	Pertumbuhan industri	Persen	1.9	2	1.93	2.01	102%	100.50%	Tercapai	Dinas Kopersai, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
75	Pertumbuhan industri kreatif	Persen	0.31	0.41	0.31	0.63	100%	153.66%	Tercapai	Dinas Kopersai, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
<b>Indikator Sasaran Daerah: Indeks Kualitas Infrastruktur</b>										
76	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	78.43	78.84	78.43	64.68	100%	82.04%	Tidak Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
77	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	Persen	0.4	0.45	1.7	1.7	425%	377.78%	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
78	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	80.37	80.73	80.46	80.66	100%	99.91%	Tidak Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
79	Penduduk berakses air minum layak	Persen	83.56	84.38	83.56	83.56	100%	99.03%	Tidak Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Ketercapaian	Perangkat Daerah
			2022	2023	2022	2023	2022	2023		
80	Penduduk berakses sanitasi yang layak	Persen	87.86	90.89	87.86	87.86	100%	96.67%	Tidak Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
81	Penanganan kawasan kumuh	Persen	10.59	21.18	44.72	44.72	422%	211.14%	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
82	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	Persen	1.83	3.66	10.7	32.75	585%	894.81%	Tercapai	Dinas Perhubungan
<b>Indikator Sasaran Daerah:Kesesuaian pemanfaatan ruang</b>										
83	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persen	72	72.5	80	86.7	111%	119.59%	Tercapai	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
84	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	Persen	74	75	76.26	76.36	103%	101.81%	Tercapai	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
<b>Indikator Sasaran Daerah:Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>										
85	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	40	40.5	36.67	39.83	92%	98.35%	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
86	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	87	87.5	86.34	88.16	99%	100.75%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
87	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	57	59	64.34	59.34	113%	100.58%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
88	Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	Persen	83.33	76.67	83.33	83.3	100%	108.65%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
89	Capaian pengelolaan sampah	Persen	63.33	65.51	63.56	63.94	100%	97.60%	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
<b>Indikator Sasaran Daerah:Indeks Risiko Bencana</b>										
90	Indeks Ketahanan Daerah	angka	0.91	0.92	0.5	0.57	55%	61.69%	Tidak Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
91	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	menit	14.44	14.42	8.2	114.89	143%	- 596.74%	Tidak Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>Indikator Sasaran Daerah:Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>										
92	PPKS yang dilayani dan ditangani	Persen	100	100	100	100	100%	100.00%		Dinas Sosial
<b>Indikator Sasaran Daerah:Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</b>										

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Ketercapaian	Perangkat Daerah
			2022	2023	2022	2023	2022	2023		
93	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	Prevalensi	0.45	0.43	0.032	0.37	193%	115.12%	Tercapai	DP3AP2KB 2023
Indikator Sasaran Daerah: Kategori Kabupaten Layak Anak										
94	Nilai KLA	Angka	730	830	715	888.81	98%	107.09%	Tercapai	DP3AP2KB
95	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Angka	2.45	2.45	2.05	2.05	84%	83.67%	Tidak Tercapai	DP3AP2KB

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul 2024

Ket: Tanda biru capaian masih menggunakan realisasi 2022 karena masih dalam penghitungan

Secara umum, ringkasan kinerja capaian indikator pada sasaran perangkat daerah tersebut meliputi: 77 indikator yang memiliki persentase capaian lebih besar/sama dengan 100% (tercapai) dan 18 indikator yang memiliki persentase capaian lebih kecil dari 100% (tidak tercapai). 18 indikator yang tidak tercapai tersebut meliputi Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi, Index kualitas layanan informasi public, Nilai Indeks Pembangunan TIK, IKM Kapanewon Jetis, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Case Fatalilty Rate Covid 19, Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama, Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB, Tingkat Kemantapan Jalan, Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi, Penduduk berakses air minum layak, Penduduk berakses sanitasi yang layak, Indeks Kualitas Air (IKA), Capaian pengelolaan sampah, Inidkator Ketahanan Daerah (IKD), Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan, dan Rata-rata jumlah anak dalam keluarga.



## 2.3.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023

Tabel 2.333 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16		
<b>SASARAN 1</b>		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas																		
<b>1</b>		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel																		
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	614,701,064,830	2,92	126,574,094,445	4,1815	128,726,549,168	2,92	116,541,719,479	2,92	243,115,813,924	0,67	0,40	SEKRETARIAT DAERAH			
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	765,391,000	100	82,312,130	100	196,513,000	100,00	195,723,341	100	278,035,471	100,00	36,33	Bagian Hukum			
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah	Persen	100	116,000,000	100	62,943,400	100	13,450,000	100	13,450,000	100	76,393,400	100,00	65,86	Bagian Hukum			
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	279,000,000	100	53,700,000	100	53,700,000	100	53,700,000	100,00	107,400,000	100,00	38,49	Bagian Hukum			
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100	210,000,000	100	36,142,162	100	49,573,000	100,00	49,046,200	100,00	85,188,362	100,00	40,57	Bagian Hukum			
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase harmonisasi rancangan perda menjadi perda	Persen	100	2,271,161,000	100	776,281,500	100	1,093,486,000	0	1,084,843,700	0	1,861,125,200	-	81,95	Bagian Hukum			
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan koordinasi hukum	Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum	Persen	100	2,271,161,000	100	776,281,500	100	1,093,486,000	113	1,084,843,700	113	1,861,125,200	112,88	81,95	Bagian Hukum			
	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kelembagaan perangkat daerah dan kalurahan pada urusan keistimewaan	Persen	90	2,500,000,000	100	382,672,800	90	363,074,000	0	358,882,080	0	741,554,880	-	29,66	Bagian Hukum			
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persentase kelembagaan perangkat daerah dan kalurahan pada urusan keistimewaan	Persen	100	2,500,000,000	100	382,672,800	100	363,074,000	100	358,882,080	100	741,554,880	100,00	29,66	Bagian Hukum			
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI AKIP	Angka	83	2,183,185,400	83	423,329,389	83	542,309,620	95,41511766	517,445,362	95,415118	940,774,751	114,96	43,09	Bagian Kesra			
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Persen	100	239,520,000	100	59,880,000	100	59,880,000	97	57,880,000	97	57,880,000	96,66	24,16	Bagian Kesra			
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	873,608,970	100	147,434,043	100	247,090,960	94,04139269	232,367,780	94,041393	379,801,823	94,04	43,48	Bagian Kesra			
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Persen	100	689,760,180	100	218,849,346	100	141,078,660	99,52393934	140,407,040	99,523939	359,256,386	99,52	52,08	Bagian Kesra			
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	380,296,250	100	57,046,000	100	94,260,000	92,0756864	86,790,542	92,075686	143,836,542	92,08	37,82	Bagian Kesra			
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang	Persen	100	39,447,196,700	100	7,716,133,278	100	9,208,106,660	97,29254776	8,958,801,570	97,292548	16,674,934,848	97,29	42,27	Bagian Kesra			
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	39,447,196,700	100	7,716,133,278	100	9,208,106,660	97,29254776	8,958,801,570	97,292548	16,674,934,848	97,29	42,27	Bagian Kesra			
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	capaian Nilai AKIP	angka	83.00	1,397,286,037	84.30	404,176,100.00	83.00	1,077,079,000.00	83.49	626,383,288.00	83	1,030,559,388	100.59	73.75	Bagian Organisasi			
	4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat	persen	100.00	256,020,000	100.00	66,236,650.00	100.00	340,738,310.00	63.00	158,016,838.00	63	224,253,488	476.16	Bagian Organisasi				
	4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	351,715,987	14	67,433,300	100	96,202,300.00	3,619.83	70,206,300.00	3,620	137,639,600	39.13	Bagian Organisasi				
	4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Capaian Kinerja penataan organisasi perangkat daerah	persen	100	998,473,450	100	198,538,750	100	543,170,270	34.00	327,252,729.00	34	525,791,479	52.66	Bagian Organisasi				
	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	2,875,000,000	100	272,252,000	100	476,994,000.00	65	294,829,430	65	567,081,430	19.72	Bagian Organisasi				
	4.01.04.5.01	Kegiatan Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	Persentase Kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	persen	100.00	1,800,000,000	100	168,984,000	100	235,453,000	65.00	134,265,980.00	65	303,249,980	65.00	16.85	Bagian Organisasi			
	4.01.04.5.02	Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tingkat Penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	persen	58.00	1,075,000,000	70	103268000	78.6	241,541,000	68.00	160,563,450.00	68	263,831,450	117.24	24.54	Bagian Organisasi			
	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP	Angka	83	2,822,081,000	83	829,392,803	83	982,778,966	83	943,009,244	83	1,373,652,958	100,00	48,68	Bagian PBJ			
	4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	106,200,000	100	-	100	56,760,000	100	50,760,000	60,00	38,670,000	60,00	36,41	Bagian PBJ			
	4.01.01.2.06	Kegiatan Adminitrası Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	992,976,400	100	529,964,537	100	584,787,963	100	554,578,845	55	800,234,282	55,00	80,59	Bagian PBJ			
	4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Persen	100	1,183,658,588	100	196,353,168	100	210,441,130	100	208849399	70	333,652,278	70,00	28,19	Bagian PBJ			
	4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	539,246,012	100	103,075,098	100	130,789,873	100	128821000	60	201,096,398	60,00	37,29	Bagian PBJ			
	4 01 03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender	persen	80	3,578,430,184	100	577,188,832	80	605,652,000	100	600569500	70	993,746,582	87.50	27.77	Bagian PBJ			
	4 01 03 2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	persen	100	3,578,430,184	100	577,188,832	100	605,652,000	100	600569500	70	993,746,582	70.00	27.77	Bagian PBJ			
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Persen	100	99,277,611,380	100	18,441,343,728	100	21,059,748,314	100,00	20,503,484,373	200	38,944,828,101	200,00	39,23	Bagian PK			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RPKD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	681,640,700	100	90,245,000	100	304,022,000	100.00	283,513,500	200	373,758,500	200.00	54.83	Bagian PK		
		4.01.01.2.01.07	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	95,359,985,368	100	18,029,845,168	100	19,999,347,144	100.00	19,486,740,672	200	37,516,585,840	200.00	39.34	Bagian PK		
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	1,355,799,411	100	168,492,500	100	415,239,709	100.00	396,023,281	200	564,515,781	200.00	41.64	Bagian PK		
		4.01.01.2.06.10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	274,111,680	100	101,470,860		44,663,840	#DIV/0!	44,656,280	#DIV/0!	146,127,140	#DIV/0!	53.31	Bagian PK		
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100	1,249,689,221	100	51,290,200	100	296,475,621	100.00	292,550,640	200	343,840,840	200.00	27.51	Bagian PK		
		4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	2,109,992,500	83.49	492,055,045	83	414,882,500	83.36	410,615,400	83.36	902,670,445	100.43	42.78	Bagian PPSDA		
		4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	312,120,000	100	-	100	51,960,000	100	51,960,000	100	51,960,000	100.00	16.65	Bagian PPSDA		
		4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	1,288,964,900	100	284,029,165	100	267,862,500	100	265,005,400	100	549,034,565	100.00	42.59	Bagian PPSDA		
		4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	103,097,600	100	73,287,100	100	20,040,000	100	20,040,000	100	93,327,100	100.00	90.52	Bagian PPSDA		
		4.01.01.2.09	Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	405,810,000	100	134,738,780	100	75,020,000	16.67	73,610,000	16.67	208,348,780	100.00	51.34	Bagian PPSDA		
		4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Prosentase Kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti	Persen	100	1,744,008,000	100	1,489,119,850	100	285,805,000	100	284,762,750	100	1,773,882,600	100.00	101.71	Bagian PPSDA		
		4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Kabupaten	Persen	100	943,295,500	100	692,894,850	100	149,055,000	100	148,535,000	100	841,429,850	100.00	89.20	Bagian PPSDA		
		4.01.03.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan Kabupaten	Persen	100	355,500,000	100	10,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	60,000,000	100.00	16.88	Bagian PPSDA		
		4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten	Persen	28	445,212,500	100	786,225,000	7	86,750,000	100	86,227,750	100	872,452,750	357.14	195.96	Bagian PPSDA		
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	988,184,500	83.49	124,466,500	83	255,704,462	83.36	251,361,232.00	83.36	375,827,732	100.43	38.03	Bagian Tapem		
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	217,440,000	0	-	100	53,660,000	100.00	53,660,000.00	100.00	53,660,000	100.00	24.68	Bagian Tapem		
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	356,672,640	100	18,645,100	100	121,017,322	100.00	117,762,932.00	100.00	136,408,032	100.00	38.24	Bagian Tapem		
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Persen	100	209,561,860	100	77,691,000	100	38,485,640	100.00	38,265,000.00	100.00	115,956,000	100.00	55.33	Bagian Tapem		
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Persen	100	204,510,000	100	28,130,400	100	42,541,500	100.00	41,673,300.00	100.00	69,803,700	100.00	34.13	Bagian Tapem		
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Ketersediaan Dokumen Data Pendukung LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggara an Pemerintah Daerah (EPPD)	persen	92	5,354,233,600	92	1,154,589,800	92	1,106,184,140	92.00	1,095,572,982.00	92.00	2,250,162,782	100.00	42.03	Bagian Tapem		
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	Persen	100	4,428,912,600	100	1,065,190,300	100	875,824,140	100.00	871,633,550.00	100.0	1,936,823,850	100.00	43.73	Bagian Tapem		
		4.01.02.2.04	Fasilitas Kerjasama Daerah	Capaian kinerja fasilitas kerjasama daerah	Persen	100	925,321,000	192	89,399,500	100	230,360,000	100.00	223,939,432.00	100.00	313,338,932	100.00	33.86	Bagian Tapem		
		4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang proporsional	Persen	89.5	830,400,000	87.50	223,540,000	88	170,000,000	88.00	170,000,000.00	88.00	393,540,000	98.32	47.39	Bagian Tapem		
		4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	Persen	89.5	830,400,000	87.50	-	88	170,000,000	88.00	170,000,000.00	88.00	170,000,000	98.32	20.47	Bagian Tapem		
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	39,529,789,600	83	18,042,092,596	83	11,247,892,634	83.36	10,942,536,308	83	28,984,628,904	100.43	73.32	Bagian Umpro		
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	441,120,000	100	-	100	80,880,000	100	80,880,000	100	80,880,000	100.00	18.34	Bagian Umpro		
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	80,000,000	100	9,800,000	100	16,000,000	100	15,968,000	100	25,768,000	100.00	32.21	Bagian Umpro		
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	11,815,264,060	100	3,891,337,979	100	3,994,581,025	100	3,914,576,636	100	7,805,914,615	100.00	66.07	Bagian Umpro		
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	436,000,000	100	-	100	416,729,000	100	414,365,900	100	414,365,900	100.00	95.04	Bagian Umpro		
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	10,686,151,060	100	2,153,544,521	100	2,536,080,260	100	2,374,644,297	100	4,528,188,818	100.00	42.37	Bagian Umpro		
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	6,767,425,230	100	1,910,037,170	100	2,302,427,325	100	2,291,721,470	100	4,201,758,640	100.00	62.09	Bagian Umpro		
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen	100	5,193,699,000	100	868,028,996	100	1,077,087,260	100	1,038,046,225	100	1,906,075,221	100.00	36.70	Bagian Umpro		
		4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Capaian Kinerja Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persen	100	1,790,384,000	100	74,400,000	100	398,524,500	100	393,730,280	100	468,130,280	100.00	26.15	Bagian Umpro		

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RPKD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5																
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persen	100	2,319,746,250	100	412,772,486	100	425,583,264	100	418,603,500	100	831,375,986	100.00	35.84	Bagian Umpro		
		XX01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	Rp 216,229,187,229.00	84	Rp 37,854,598,392.00	84	Rp 35,150,530,158.00	83	Rp 33,073,233,797.00	167	Rp 70,927,832,189.00	196.47	32.80	Sekretariat DPRD		
		XX01.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	85	Rp 311,360,100.00	84	Rp 42,500,000.00	84	Rp 41,225,000.00	100	Rp 40,760,000.00	184	Rp 83,260,000.00	216.47	26.74	Sekretariat DPRD		
		XX01.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	85	Rp 27,095,045,910.00	84	Rp 5,385,190,287.00	84	Rp 5,417,672,741.00	100	Rp 5,288,354,500.00	184	Rp 10,673,544,787.00	216.47	39.39	Sekretariat DPRD		
		XX01.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	85	Rp 19,816,668,004.00	84	Rp 4,185,805,549.00	84	Rp 268,750,000.00	98.44	Rp 246,900,000.00	182.44	Rp 4,432,705,549.00	214.64	22.37	Sekretariat DPRD		
		XX01.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	85	Rp 13,301,189,949.00	84	Rp 2,583,106,699.00	84	Rp 2,474,175,881.00	100	Rp 1,831,924,698.00	184	Rp 4,415,031,397.00	216.47	33.19	Sekretariat DPRD		
		XX01.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persen	85	Rp 5,209,618,443.00	84	Rp 762,903,480.00	84	Rp 1,022,151,260.00	100	Rp 925,411,165.00	184	Rp 1,688,314,645.00	216.47	32.41	Sekretariat DPRD		
		XX01.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persen	85	Rp 9,227,688,740.00	84	Rp 1,216,299,325.00	84	Rp 1,265,504,764.00	100	Rp 1,144,443,387.00	184	Rp 2,360,742,712.00	216.47	25.58	Sekretariat DPRD		
		XX01.01.215	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persen	85	Rp 138,466,705,829.00	84	Rp 23,405,692,092.00	84	Rp 24,376,218,592.00	68.89	Rp 23,331,833,061.00	152.89	Rp 46,737,525,153.00	179.87	33.75	Sekretariat DPRD		
		XX01.01.215.03	Layanan Administrasi DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD	Persen	85	Rp 2,800,910,254.00	84	Rp 273,100,960.00	84	Rp 284,831,920.00	100	Rp 263,606,986.00	184	Rp 536,707,946.00	216.47	19.16	Sekretariat DPRD		
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Persen	90	Rp 56,401,244,517.00	82	Rp 15,420,696,650.00	84	Rp 17,647,168,500.00	83	Rp 12,305,928,366.00	165	Rp 27,726,625,016.00	183.33	49.16	Sekretariat DPRD		
		4.02.02.201	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persen	85	Rp 16,207,922,196.00	82	Rp 3,947,300,250.00	84	Rp 3,633,895,000.00	100	Rp 2,462,746,579.00	182	Rp 6,410,046,829.00	214.12	39.55	Sekretariat DPRD		
		4.02.02.202	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persen	85	Rp 6,019,668,274.00	82	Rp 1,919,619,000.00	84	Rp 1,611,850,500.00	100	Rp 1,021,672,497.00	182	Rp 2,941,291,497.00	214.12	48.86	Sekretariat DPRD		
		4.02.02.203	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	85	Rp 13,156,725,108.00	82	Rp 2,513,497,000.00	84	Rp 2,829,594,000.00	100	Rp 1,888,349,903.00	182	Rp 4,401,846,903.00	214.12	33.46	Sekretariat DPRD		
		4.02.02.203.07	Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	85	Rp 7,205,484,791.00	82	Rp 3,153,520,000.00	84	Rp 3,676,657,000.00	89.81	Rp 3,123,141,100.00	171.81	Rp 6,276,661,100.00	202.13	87.11	Sekretariat DPRD		
		4.02.02.205	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	Persen	85	Rp 4,393,487,606.00	82	Rp 1,085,632,800.00	84	Rp 1,942,562,500.00	100	Rp 1,701,295,500.00	182	Rp 2,786,928,300.00	214.12	63.43	Sekretariat DPRD		
		4.02.02.206	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	Persen	85	Rp 1,265,099,661.00	82	Rp 176,650,000.00	84	Rp 287,549,000.00	100	Rp 182,960,000.00	182	Rp 359,610,000.00	214.12	28.43	Sekretariat DPRD		
		4.02.02.208	Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	Persen	85	Rp 8,152,856,881.00	82	Rp 2,624,477,600.00	84	Rp 3,665,060,500.00	100	Rp 1,925,762,787.00	182	Rp 4,550,240,387.00	214.12	55.81	Sekretariat DPRD		
		4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Usuran Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	2,222,591,250	100	532,100,000	100	453,541,000	100	442,321,800	100	974,421,800	100.00	43.84	Bappeda		
		4.01.10.1.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Persen	100	2,222,591,250	100	532,100,000	100	453,541,000	100	442,321,800	100	974,421,800	100.00	43.84	Bappeda		
		2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage)	Persen	90	920,000,000	0	20	273,415,000	20	268,471,000	20	268,471,000	22.22	29.18	Bappeda			
		2.22.8.1.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya dalam zona inti	Capaian luasan yang terkonservasi di dalam zona inti	persen	90	920,000,000	0	20	273,415,000	20	268,471,000	20	268,471,000	22.22	29.18	Bappeda			
		XX01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	87.5	45,460,315,129	86	7,824,644,480	86	8,692,377,381	86	8,466,528,868	86	16,291,173,348	98.29	35.84	Bappeda		
		XX01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	215,780,876	100	26,292,400	100	66,250,000	100	66,236,600	100	92,529,000	100.00	42.88	Bappeda		
		XX01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	37,614,524,024	100	6,747,924,565	100	7,349,624,981	100	7,222,092,047	100	13,970,016,612	100.00	37.14	Bappeda		
		XX01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persen	100	723,550,000	100	109,055,000	100	27,975,000	100	27,700,000	100	136,755,000	100.00	18.90	Bappeda		
		XX01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	3,602,065,865	100	475,216,106	100	688,997,337	100	648,676,186	100	1,123,892,292	100.00	31.20	Bappeda		
		XX01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persen	100	751,766,246	100	87,489,000	0	0	0	0	0	87,489,000	-	11.64	Bappeda		
		XX01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persen	100	999,445,158	100	155,658,700	100	239,208,600	100	214,240,017	100	369,898,717	100.00	37.01	Bappeda		
		XX01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persen	100	1,553,182,960	100	223,008,709	100	320,321,463	100	287,584,018	100	510,592,727	100.00	32.87	Bappeda		
		5.01.2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPd)	Persen	100	17,938,226,188	100	1,977,976,318	100	1,887,448,810	100	1,870,983,192	100	3,848,959,510	100.00	21.46	Bappeda		
				Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Persen	97				100		100	100	100	103.09			Bappeda		
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah Ditetapkan dengan Perkada/Perda	Persen	100	10,363,764,411	100	1,150,503,420	100	1,250,685,180	100	1,237,187,612	100	2,387,691,032	100.00	23.04	Bappeda		



No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPd Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		3	4	5		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN SETIAP ASPEK KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA, PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSEN	73	283,101,000	69	13,623,500	70	14,020,000	100	13,985,000	100	27,608,500	136.99	9.75	Dispursip
		2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	persen	100	283,101,000	100	13,623,500	100	14,020,000	100	13,985,000	100	27,608,500	100.00	9.75	Dispursip
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel			Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	2,061,673,756,399	WTP	419,688,455,969	WTP	456,371,027,777	#REF!	#REF!	#REF!		1.00		BPKPAD
		4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	90	2,620,095,500	93.59	83,988,650	83	70,800,000	97.77262647	65,696,500	97.772626	149,685,150	108.64	5.71	BPKPAD
		4.01.04	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persen	100	2,620,095,500	100	83,988,650	100	70,800,000	100	65,696,500	100	149,685,150	100.00	5.71	BPKPAD
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Angka	85.5	354,256,844,139	84.11	70,191,165,806	85	73,462,091,362	83.34	70,126,025,012	83.34	140,317,190,818	97.47	39.61	BPKPAD
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	581,900,000	100	75,065,000	100	84,450,000	100	84,272,500	100	159,337,500	100.00	27.38	BPKPAD
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	121,643,629,369	100	20,730,331,618	100	22,079,397,677	100	21,967,337,810	100	42,697,669,428	100.00	35.10	BPKPAD
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Persen	100	579,570,000	100	395,825,000	100	19,345,000	90	2,975,000	90	398,800,000	90.00	68.81	BPKPAD
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	10,387,985,950	93	1,362,175,409	100	2,248,990,045	96.64516129	189,909,581	96.645161	3,261,271,990	96.65	31.39	BPKPAD
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persen	100	32,343,750,000	100	11,841,058,793	100	5,516,552,000	100	5,101,882,000	100	16,942,940,793	100.00	52.38	BPKPAD
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persen	100	184,573,045,720	84	34,959,105,594	100	42,470,369,640	100	40,249,884,265	100	75,208,989,859	100.00	40.75	BPKPAD
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persen	100	4,146,963,100	100	827,604,392	100	1,042,987,000	100	820,576,856	100	1,648,181,248	100.00	39.74	BPKPAD
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD tepat waktu	Persen	100	1,633,880,044,220	100	330,413,156,591	100	370,294,905,145	100	344,812,429,250	100	675,225,585,841	100.00	41.33	BPKPAD
				Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Persen	91		91.56		89		91.0014596	91	91.00146	91	100.00		BPKPAD
				Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Persen	100		100		100		100	0	100	0	100.00		BPKPAD
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Proporsi Belanja yang dialokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total belanja daerah	Persen	60	6,270,155,000	61.92	417,223,000	60	518,170,000	49.5549878	412,940,000	49.554988	830,163,000	82.59	13.24	BPKPAD
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD dengan penyerapan diatas target	Persen	15	3,112,252,126	93.48	343,883,116	15	437,963,876	94.44444444	404,953,463	94.444444	748,836,579	629.63	24.06	BPKPAD
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	9	3,032,000,120	9.62	423,596,716	9	461,961,376	8.31047886	4,226,633	8.31047889	846,263,029	92.34	27.91	BPKPAD
		5.02.02.2.04	Penunjang Usuran Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD dengan penyerapan diatas target	Persen	15	1,621,465,636,974	93.48	329,228,453,759	15	368,876,809,893	94.44444444	343,571,869,474.00	94.44444444	672,800,323,233	629.63	41.49	BPKPAD
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah tahun n-1	Persen	100	8,080,739,710	100	9,283,651,662	100	1,380,327,472	99.98639779	1,118,919,902	99.9863978	10,402,571,564	99.99	128.73	BPKPAD
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Persen	100	8,080,739,710	100	9,283,651,662	96	1,380,327,472	85.18518519	1,118,919,902	85.1851852	10,402,571,564	85.19	128.73	BPKPAD
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	100	62,836,032,830	103.79	9,716,493,260	100	11,162,903,798	104.57	10,241,707,650	104.57	19,958,200,910	104.57	31.76	BPKPAD
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Persen	46	62,836,032,830	48.10	9,716,493,260	42	11,162,903,798	47.86007339	10,241,707,650	47.86007334	19,958,200,910	104.04	31.76	BPKPAD
3	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel			Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	Nilai	84.5	76,142,833,441	95.52	11,518,840,113	83.50	13,053,794,258	#REF!	#REF!	#REF!				INSPEKTORAT DAERAH
		4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase PD Pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	55.56	1,020,355,670	-	-	38.89	175,000,000	38.89	170,439,300	38.89	170,439,300	0.70	0.17	INSPEKTORAT DAERAH
		4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yang ditindaklanjuti	Persen	100	1,020,355,670	-	-	74	175,000,000	74	170,439,300	74	170,439,300	0.74	0.17	INSPEKTORAT DAERAH
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	83	63,022,761,243	88.61	8,868,018,813	83	10,221,547,138	86.08	9,916,947,993	174.69	18,784,966,806	2.10	0.30	INSPEKTORAT DAERAH
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	95	30,000,000	95	5,938,750	95	13,600,000	95	13,600,000	95	19,538,750	2.00	0.65	INSPEKTORAT DAERAH
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persen	100	44,985,907,442	100	7,239,031,662	100	8,199,887,953	100	7,932,730,565	200	15,171,762,227	2.00	0.34	INSPEKTORAT DAERAH
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	95	3,473,368,000	95	221,097,760	95	406,738,000	95	403,675,914	190	624,773,674	2.00	0.18	INSPEKTORAT DAERAH

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5																16
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	95	9,062,120,801	95	816,940,168	95	1,153,555,305	95	1,130,868,776	190	1,947,808,944	2.00	0.21		INSPEKTORAT DAERAH	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persen	95	2,124,720,000	95	293,541,873	95	236,766,680	95	229,313,838	190	522,855,711	2.00	0.25		INSPEKTORAT DAERAH	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah (%)	95	95	3,346,645,000	95	291,468,600	95	210,999,200	95	206,758,900	190	498,227,500	2.00	0.15		INSPEKTORAT DAERAH	
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah Terhadap Peraturan yang Berlaku	Persen	16	2,593,534,662	12	1,040,046,700	13	1,002,690,500	13	939,856,700	25	1,979,903,400	1.56	0.76		INSPEKTORAT DAERAH	
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persen	100	2,368,904,662	100	908,877,200	100	919,612,800	100	874,959,000	200	1,783,836,200	2.00	0.75		INSPEKTORAT DAERAH	
		6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti	Persen	100	224,630,000	100	131,169,500	100	83,077,700	100	64,897,700	200	196,067,200	2.00	0.87		INSPEKTORAT DAERAH	
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Persen	40	9,506,181,866	20	1,610,774,600	25	1,654,556,620	25	1,632,303,900	45	3,243,078,500	1.13	0.34		INSPEKTORAT DAERAH	
		6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait regulasi di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan	Persen	90	829,941,866	70	63,824,000	75	57,061,100	75	55,488,600	145	119,312,600	1.61	0.14		INSPEKTORAT DAERAH	
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase laporan pendampingan dan asistensi	Persen	100	8,676,240,000	100	1,546,950,600	100	1,597,495,520	100	1,576,815,300	200	3,123,765,900	2.00	0.36		INSPEKTORAT DAERAH	
4			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3.45	117,028,253,784	3.62	21,304,133,824	3.30	25,234,469,975	#REF!	#REF!	#REF!					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai AKIP	Angka	92	Rp 40,590,143,399.00	86.18	Rp 6,443,868,438.00	89.00	Rp 7,726,397,679.00	84	7,529,016,193.00	84	13,972,884,631	91.51	34.42		Diskominfo	
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	Rp 517,392,299.00	100	Rp 106,152,500.00	100.00	Rp 91,740,000.00	100	91,700,000.00	100	197,852,500	100.00	38.24		Diskominfo	
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Daerah	%	100	Rp 29,885,295,148.00	100	Rp 4,948,344,655.00	100.00	Rp 6,013,741,250.00	100	5,881,435,909.00	100	10,829,780,564	100.00	36.24		Diskominfo	
		2 16 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	Rp 20,000,000.00		Rp -	100.00	Rp 4,972,500.00	100	4,955,000.00	100	4,955,000	100.00	24.78		Diskominfo	
		2 16 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%	100	Rp 16,000,000.00		Rp -	100.00	Rp 5,100,000.00	100	5,090,000.00	100	5,090,000	100.00	31.81		Diskominfo	
		2.16.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	Rp 350,000,000.00	100	Rp -	100.00	Rp 33,765,000.00	100	33,745,000.00	100	33,745,000	100.00	9.64		Diskominfo	
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	Rp 4,072,726,886.00	100	Rp 625,920,865.00	100.00	Rp 705,874,824.00	100	689,006,532.00	100	1,314,927,397	100.00	32.29		Diskominfo	
		2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	%	100	Rp10,000,000		Rp0	100.00	Rp 15,000,000.00	100	15,000,000.00	100	15,000,000	100.00	150.00		Diskominfo	
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Disediakan	%	100	Rp2,384,227,637	100	Rp342,236,175	100.00	Rp 294,333,100.00	100	269,637,847.00	100	611,874,022	100.00	25.66		Diskominfo	
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	Rp3,334,501,429	100	Rp421,214,243	100.00	Rp 561,871,005.00	100	538,445,905.00	100	959,660,148	100.00	28.78		Diskominfo	
		2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	74	Rp 8,187,592,098.00	99.1	Rp 1,388,978,140.00	72.00	Rp 3,495,590,436.00	99.1	3,377,721,916.00	99	4,766,700,056	133.92	58.22		Diskominfo	
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%	100	Rp 8,187,592,098.00	100	Rp 1,388,978,140.00	100.00	Rp 3,495,590,436.00	100	3,377,721,916.00	100	4,766,700,056	100.00	58.22		Diskominfo	
		2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Angka	3	Rp 51,556,102,996.00	2.9	Rp 12,071,794,499.00	2.85	Rp 11,067,977,000.00	2.90	10,475,196,030.00	3	22,546,990,529	96.67	43.73		Diskominfo	
			Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi	%	100	Rp 37,309,237,599.00	100	Rp 10,360,216,996.00	100.00	Rp 3,160,115,000.00	100	3,124,331,998.00	100	13,484,548,994	100.00	36.14		Diskominfo	
			Layanan domain/sub domain yang dimanfaatkan	domain/sub domain		416		258		371.00		371	-		-				Diskominfo	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RPKD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
		2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	95	Rp 14,246,865,397.00	79	Rp 1,711,577,503.00	80.00	Rp 7,907,862,000.00	79	7,350,864,032.00	79	9,062,441,535	83.16	63.61	Diskominfo
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	Rp 1,035,441,563.00	100	Rp 148,480,000.00	100.00	Rp 365,037,500.00	100	360,586,650.00	100	509,066,650	100.00	49.16	Diskominfo
		2.20.02.201	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data	%	100	Rp 1,035,441,563.00	100	Rp 148,480,000.00	100.00	Rp 365,037,500.00	100	360,586,650.00	100	509,066,650	100.00	49.16	Diskominfo
				Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	98		95				0	-			-		Diskominfo
				Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	95		92.68				0	-			-		Diskominfo
				Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	%	95		92.68				0	-			-		Diskominfo
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	81	Rp 7,360,469,378.00	83.2	Rp 792,715,797.00	75.00	Rp 1,554,217,360.00	82	1,540,832,995.00	82	2,333,548,792	101.64	31.70	Diskominfo
		2.21.02.201	Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	%	25	Rp 4,764,463,387.00	100	Rp 510,249,932.00	100.00	Rp 980,544,440.00	100	973,075,829.00	100	1,483,325,761	400.00	31.13	Diskominfo
		2.21.02.202	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	%	84	Rp 2,596,005,991.00	48	Rp 282,465,865.00	72.00	Rp 573,672,920.00	72	567,757,166.00	72	850,223,031	85.71	32.75	Diskominfo
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	%	100	Rp 8,298,504,350.00	33.3	Rp 458,296,950.00	57.14	Rp 1,025,250,000.00	33	1,012,896,020.00	33	1,471,192,970	33.30	17.73	Diskominfo
		2.22.08.2.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Capaian kinerja pembangunan sistem informasi	%	100	Rp 8,298,504,350.00	100	Rp 458,296,950.00	100.00	Rp 1,025,250,000.00	100	1,012,896,020.00	100	1,471,192,970	100.00	17.73	Diskominfo
5			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	89.5	407,737,916,462	88.25	68,305,796,278	88.40	70,546,040,269	#REF!	#REF!	#REF!				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
		2.18.4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Persen	100	2,324,310,580	100.00	497,848,694	100	383,746,940	100	379,372,922	100	877,221,616	100.00	37.74	DPMPTSP
		2.18.4.201	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan	Dokumen	55	2,324,310,580	55	497,848,694		383,746,940	0	379,372,922	0	877,221,616	-	37.74	DPMPTSP
				Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	legalitas	3000				3000		2784	-		-			DPMPTSP
		2.18.6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan aplikasi SIM dalam layanan perizinan dan non perizinan	Persen	100	540,321,120	100	98,387,516	100	175,141,180	100	164,821,408	100	263,208,924	100.00	48.71	DPMPTSP
		2.18.6.201	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/Kota	Jenis	2	540,321,120	2	98,387,516	2	175,141,180	0	164,821,408	0	263,208,924	-	48.71	DPMPTSP
				Data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kota	Database	2						0	-		-			DPMPTSP
		2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP)	Angka	84	56,842,708,726	84.20	9,644,668,922	83	10,034,833,672	84.72	9,707,193,586	84.72	19,351,862,508		34.04	Disdukcapil
		2.12.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	3,731,739,269	100	489,918,400	100	163,782,150	100	163,775,990	100	653,694,390	100.00	17.52	Disdukcapil
		2.12.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	38,783,711,951	100	6,428,838,842	100	7,191,047,410	100	6,882,230,069	75	13,311,068,911	75.00	34.32	Disdukcapil
		2.12.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	623,708,724	100	53,857,500	100	18,685,000	100	18,685,000	75	72,542,500	75.00	11.63	Disdukcapil
		2.12.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	9,346,598,094	100	1,841,082,687	100	1,696,950,240	100	1,688,073,960	75	3,529,156,647	75.00	37.76	Disdukcapil
		2.12.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100	1,020,467,465	100	116,354,000	100	239,925,000	100	235,239,900	100	351,593,900	100.00	34.45	Disdukcapil
		2.12.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	99	914,608,368	95	231,549,070	96	349,254,360	96	346,774,506	72	578,323,576	72.73	63.23	Disdukcapil
		2.12.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Persen	99	2,421,874,855	95	483,068,423	96	375,189,512	96	372,414,161	70	855,482,584	70.71	35.32	Disdukcapil
		2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	99.85	3,701,752,264	99.81	679,143,518	100	699,242,060	99.99	696,149,370	99.77	1,375,292,888	99.92	37.15	Disdukcapil
		2.12.02.2.01	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Dokumen	2	3,701,752,264	25	679,143,518	2	699,242,060	2	696,149,370	2	1,375,292,888	100.00	37.15	Disdukcapil
		02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	96.4	2,524,526,542	96	373,474,728	96.49	306,564,660	100	306,564,660		680,039,388	-	26.94	Disdukcapil
		2.12.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Dokumen	31050	2,057,780,506	27204	317,311,046	5,000	294,575,060	5000	294,575,060	3500	611,886,106	11.27	29.74	Disdukcapil
		2.12.03.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTRC)	Laporan	12	466,746,036	4750	56,163,682	12	11,989,600	12	11,989,600	9	68,153,282	75.00	14.60	Disdukcapil
		02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	Persen	99.9	2,719,000,285	99.5	651,108,548	99	798,977,253	95.7	798,803,370	75	1,449,911,918	75.08	53.33	Disdukcapil
		2.12.04.2.01	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan	Dokumen	3	1,320,328,635	12	399,276,382	12	169,007,803	12	169,003,970	9	568,280,352	300.00	43.04	Disdukcapil
		2.12.04.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Publikasi dan Sosialisasi Kebijakan Adminduk	Jenis	2	1,398,671,650	2	251,832,166	2	629,969,450	2	629,799,400	2	881,631,566	100.00	63.03	Disdukcapil

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPd Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
	02.12.05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Prosentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna Masyarakat	Persen	100	531,447,664	100	62,029,082	100	15,103,100	100	15,103,100	75	77,132,182	75.00	14.51	Disdukcapil
	2.12.05.2.01		Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Buku Profil Kependudukan	Dokumen	1	531,447,664	12	62,029,082	12	15,103,100	12	15,103,100	9	77,132,182	900.00	14.51	Disdukcapil
	2.22.8		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang berkualitas	persen	-	-	100	19,250,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	119,250,000			Kap. Banguntapan
	2.22.8.5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	persen	0	-	100	19,250,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	119,250,000			Kap. Banguntapan
	4.1.4		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen		309,460,000		45,300,000	100	35,000,000	100.00	33,140,000	100	78,440,000		25.35	Kap. Banguntapan
	4.1.4.5.06		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	persen		309,460,000		45,300,000	100	35,000,000	100.00	33,140,000	100	78,440,000		25.35	Kap. Banguntapan
	7.1.1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka		18,261,567,011	82.00	3,162,230,603	81	3,182,437,299	82	3,074,561,758	82.24	6,236,792,361		34.15	Kap. Banguntapan
	7.1.1.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	persen	100	73,050,000	100	7,800,000	81	6,950,000	81	6,949,750	81	14,749,750	81.00	20.19	Kap. Banguntapan
	7.1.1.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	persen		13,290,766,719	100	2,633,052,409	100	2,600,666,709	100	2,500,634,726	100	5,133,687,135		38.63	Kap. Banguntapan
	7.1.1.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	16,200,000	-	-	100	1,200,000	100	1,200,000	100	1,200,000	100.00	7.41	Kap. Banguntapan
	7.1.1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	100	1,749,776,900	100	151,670,975	100	182,769,843	100	182,085,879	100	333,756,854	100.00	19.07	Kap. Banguntapan
	7.1.1.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen	100	840,640,000	100	9,000,000	100	21,468,000	100	21,402,200	100	30,402,200	100.00	3.62	Kap. Banguntapan
	7.1.1.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	926,516,800	100	154,671,189	100	161,458,880	100	157,356,593	100	312,027,782	100.00	33.68	Kap. Banguntapan
	7.1.1.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	100	1,364,616,592	100	206,036,030	100	207,923,867	100	204,932,610	100	410,968,640	100.00	30.12	Kap. Banguntapan
	7.1.2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	344,500,000	100	57,662,500	100	43,275,000	100	43,274,000	100	100,936,500	100.00	29.30	Kap. Banguntapan
	7.1.2.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen	100	207,500,000	100	45,350,000	100	33,375,000	100	33,375,000	100	78,725,000	100.00	37.94	Kap. Banguntapan
	7.1.2.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	angka	92	137,000,000	92	12,312,500	92	9,900,000	92	9,899,000	92	22,211,500	100.00	16.21	Kap. Banguntapan
	7.1.3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	100	762,806,500	100	141,480,000	89	120,037,500	89	120,037,500	89	261,517,500	89.00	34.28	Kap. Banguntapan
	7.1.3.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	persen	100	545,344,000	100	75,992,500	89	83,087,500	89	83,087,500	89	159,080,000	89.00	29.17	Kap. Banguntapan
	7.1.3.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	persen	100	217,462,500	100	65,487,500	89	36,950,000	89.00	36,950,000	89	102,437,500	89.00	47.11	Kap. Banguntapan
	7.1.4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	98	846,600,400	98	135,325,000	89	126,850,000	89.00	126,850,000	89	262,175,000	90.82	30.97	Kap. Banguntapan
	7.1.4.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	100	846,600,400	100	135,325,000	89	126,850,000	89.00	126,850,000	89	262,175,000	89.00	30.97	Kap. Banguntapan
	7.1.5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	73,473,900	100	9,000,000	89	14,587,500	89.00	14,587,500	89	23,587,500	89.00	32.10	Kap. Banguntapan
	7.1.5.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	73,473,900	100	9,000,000	89	14,587,500	89.00	14,587,500	89	23,587,500	89.00	32.10	Kap. Banguntapan
	2.22.8		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	50,000,000	100	16,000,000	1	100,000,000	100	100,000,000	100	116,000,000	100.00	232.00	Kap. Bantul
	2.22.8.5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan tradisi	Persen	85	50,000,000	100	16,000,000	1	100,000,000	100	100,000,000	100	116,000,000	117.65	232.00	Kap. Bantul
	4.1.4		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Persen		309,460,000	100	45,300,000	100	35,000,000	99.9	34,951,500	99.9	80,251,500		25.93	Kap. Bantul
	4.1.4.5.06		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen		309,460,000	100	45,300,000	100	35,000,000	99.9	34,951,500	99.9	80,251,500		25.93	Kap. Bantul



No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPd Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
		7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	90	16,597,850,000	86	2,719,055,916	87	2,825,725,688	84,32	2,775,525,894	84,32	5,494,581,810	93.69	33.10	Kap. Bantul
		7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	100	76,200,000	100	3,000,000	100	3,000,000	100	3,000,000	100	6,000,000	100.00	7.87	Kap. Bantul
		7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Persen	100	12,602,583,040	100	2,249,887,678	100	2,294,372,125	98.3	2,254,283,623	98.3	4,504,171,301		35.74	Kap. Bantul
		7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	2,500,000	100	-	100	250,000	100	250,000	100	250,000	100.00	10.00	Kap. Bantul
		7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	1,012,758,320	86	102,518,864	100	164,410,124	99	162,320,460	99	264,839,324	99.00	26.15	Kap. Bantul
		7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	964,492,000	87	26,127,098	100	44,875,000	100	44,875,000	100	71,002,098	100.00	7.36	Kap. Bantul
		7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang usuran pemerintahan daerah	Persen	100	975,739,000	95	153,702,250	100	173,309,100	96.3	166,860,372	96.3	320,562,622		32.85	Kap. Bantul
		7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	963,577,640	100	183,820,026	100	145,509,339	99	143,936,439	99	327,756,465	99.00	34.01	Kap. Bantul
		7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Angka	95	212,224,000	90	62,819,000	91	28,590,000	100	28,590,000	100	91,409,000	105.26	43.07	Kap. Bantul
		7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Persen	100	151,604,000	100	59,529,000	100	18,190,000	100	18,190,000	100	77,719,000	100.00	51.26	Kap. Bantul
		7.1.2.2.04	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Persen	100	60,620,000	100	3,290,000	100	10,400,000	100	10,400,000	100	13,690,000	100.00	22.58	Kap. Bantul
		7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	352,600,000	100	102,175,000	100	114,200,000	100	114,200,000	100	216,375,000	100.00	61.37	Kap. Bantul
		7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan	Persen	100	260,000,000	100	55,375,000	100	75,625,000	100	75,625,000	100	131,000,000	100.00	50.38	Kap. Bantul
		7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	100	92,600,000	90	46,800,000	100	38,575,000	100	38,575,000	100	85,375,000	100.00	92.20	Kap. Bantul
		7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen													Kap. Bantul
		7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen													Kap. Bantul
		7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen													Kap. Bantul
		7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	844,753,440	100	102,850,000	100	5,100,000	100	5,100,000	100	107,950,000	100.00	12.78	Kap. Bantul
		2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	-	100	13,750,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	113,750,000	100.00		Kap. Bangli
		2.22.8.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan tradisi	Persen	100	-	100	13,750,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	113,750,000	100.00		Kap. Bangli
		4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Usuran Keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	309,460,000	100	45,300,000	100	35,000,000	100	33,070,000	100	78,370,000	100.00	25.32	Kap. Bangli
		4.1.4.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	309,460,000	100	45,300,000	100	35,000,000	100	33,070,000	100	78,370,000	100.00	25.32	Kap. Bangli
		7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka		16,148,500,940	80.02	2,739,840,872	81	2,871,790,274	80.97	2,846,061,759	80.97	5,585,902,631		34.59	Kap. Bangli
		7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	100	76,400,000	100	825,000	100	2,600,000	100	2,600,000	100	3,425,000	100.00	4.48	Kap. Bangli
		7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Persen	100	12,368,912,803	100	2,258,870,544	100	2,330,768,104	100	2,308,413,050	100	4,567,283,594	100.00	36.93	Kap. Bangli
		7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	3,400,000		-	100	850,000	100	850,000	100	850,000	100.00	25.00	Kap. Bangli
		7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	1,684,079,626	95	151,406,580	100	220,755,457	100	220,221,290	100	371,627,870	100.00	22.07	Kap. Bangli
		7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	145,373,400	100	11,010,000	100	2,000,000	100	200,000	100	13,010,000	100.00	8.95	Kap. Bangli
		7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang usuran pemerintahan daerah	Persen	100	856,382,400	95	133,908,722	100	132,313,120	100	131,108,870	100	265,017,592	100.00	30.95	Kap. Bangli
		7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	95	1,013,952,711	100	183,820,026	100	182,503,593	100	180,868,549	100	364,688,575	105.26	35.97	Kap. Bangli
		7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Angka	95	482,437,500	95	41,632,500	95	30,670,000	95	30,652,500.00	95	72,285,000	100.00	14.98	Kap. Bangli

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPDP Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP tahun )		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16		
		7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Persen	100	431,937,500	100	38,342,500	100	26,670,000	100	26,652,500	100	64,995,000	100.00	15.05	Kap. Bambanglipuro		
		7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Persen	95	50,500,000	95	3,290,000	95	4,000,000	100	4,000,000	100	7,290,000	105.26	14.44	Kap. Bambanglipuro		
		7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	94	857,886,000	100	136,733,750	91	123,256,850	100	122,751,850	100	259,485,600	106.38	30.25	Kap. Bambanglipuro		
		7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan	Persen	94	529,986,000	100	65,361,000	91	64,382,000	100	63,877,000	100	129,238,000	106.38	24.39	Kap. Bambanglipuro		
		7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	100	327,900,000	90	71,372,750	100	58,874,850	100	58,874,850	100	130,247,600	100.00	39.72	Kap. Bambanglipuro		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	734,307,000	100	95,678,500	100	89,075,000	100	89,055,000	100	184,733,500	100.00	25.16	Kap. Bambanglipuro		
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	734,307,000	100	95,678,500	100	89,075,000	100	89,055,000	100	184,733,500	100.00	25.16	Kap. Bambanglipuro		
		7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	131,000,000	100	5,000,000	100	6,500,000	100	6,467,500	100	11,467,500	100.00	8.75	Kap. Bambanglipuro		
		7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	131,000,000	100	5,000,000	100	6,500,000	100	6,467,500	100	11,467,500	100.00	8.75	Kap. Bambanglipuro		
		2.22.8	ROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Persen	0	0	100	18,500,000	100	100,000,000	100	98,425,000.00	100	116,925,000			Kap. Dlingo		
		2.22.8.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	0	0	100	18,500,000	100	100,000,000	100	98,425,000.00	100	116,925,000			Kap. Dlingo		
		4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	264,160,000	100	45,300,000	100	35,000,000	100	32,898,000.00	100	78,198,000	100.00	29.60	Kap. Dlingo		
		4.1.4.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	264,160,000	100	45,300,000	100	35,000,000	100	32,898,000.00	100	78,198,000	100.00	29.60	Kap. Dlingo		
		7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai AKIP	Angka	86	16,325,816,050	82,98	2,705,350,160	82	3,173,271,511	82.16	3,104,119,918	82.16	5,809,470,078	95.53	35.58	Kap. Dlingo		
		7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	100	54,250,000	93,47	4,250,000	100	4,250,000	100	4,250,000	100	8,500,000	100.00	15.67	Kap. Dlingo		
		7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Angka	80	12,097,626,944	100	2,202,815,346	80	2,589,353,620	97.59	2,527,015,495.00	97.59	4,729,830,841	121.99	39.10	Kap. Dlingo		
		7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persen	100	16,062,500	0	-	100	1,062,500	100	1,062,500.00	100	1,062,500	100.00	6.61	Kap. Dlingo		
		7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	1,362,714,734	82,93	149,952,802	100	200,777,911	100	200,261,310.00	100	350,214,112	100.00	25.70	Kap. Dlingo		
		7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	151,000,000	100	34,699,000	100	7,500,000	100	7,500,000.00	100	42,199,000	100.00	27.95	Kap. Dlingo		
		7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	1,400,276,072	82,98	157,634,658	100	178,281,800	100	173,282,733.00	100	330,917,391	100.00	23.63	Kap. Dlingo		
		7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	1,243,885,800	100	155,998,354	100	192,045,680	100	190,747,880.00	100	346,746,234	100.00	27.88	Kap. Dlingo		
		7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	429,990,000	100	57,955,000	100	47,950,000	100	47,950,000.00	100	105,905,000	100.00	24.63	Kap. Dlingo		
		7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Persen	100	289,000,000	100	49,960,000	100	37,125,000	100	37,125,000.00	100	87,085,000	100.00	30.13	Kap. Dlingo		
		7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	140,990,000	100	7,995,000	100	10,825,000	100	10,825,000.00	100	18,820,000	100.00	13.35	Kap. Dlingo		
		7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	100	1,021,977,500	100	81,020,000	100	108,227,945	100	108,191,000.00	100	189,211,000	100.00	18.51	Kap. Dlingo		
		7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	Persen	100	641,897,500	100	52,630,000	100	66,352,945	100	66,346,000.00	100	118,976,000	99.99	18.54	Kap. Dlingo		
		7.1.3.2.03	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	100	380,080,000	100	28,390,000	100	41,875,000	100	41,845,000.00	100	70,235,000	100.00	18.48	Kap. Dlingo		
		7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Persen	100	799,174,000	100	95,055,000	100	87,975,000	100	87,935,000.00	100	182,990,000	100.00	22.90	Kap. Dlingo		

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPDP Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP tahun )		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100	799,174,000	100	95,055,000	100	87,975,000	100	87,935,000.00	100	182,990,000	100.00	22.90	Kap. Dlingo
		7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	140,670,000	100	15,025,000	100	5,875,000	100	5,837,500.00	100	20,862,500	100.00	14.83	Kap. Dlingo
		7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	140,670,000	100	15,025,000	100	5,875,000	100	5,837,500.00	100	20,862,500	100.00	14.83	Kap. Dlingo
		2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang berkualitas	persen	0	-	100	23,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	123,000,000			Kap. Imogiri
		2.22.8.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	persen	0	-	100	23,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	123,000,000			Kap. Imogiri
		4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	309,460,000	100	45,300,000	100	35,000,000	95.00	33,070,000	95	78,370,000	95.00	25.32	Kap. Imogiri
		4.1.4.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	persen	100	309,460,000	100	45,300,000	100	35,000,000	95.00	33,070,000	95	78,370,000	95.00	25.32	Kap. Imogiri
		7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	82	16,978,946,335	80	2,567,106,368	80	2,975,998,171	82	2,951,704,388	82	5,518,810,756	100.12	32.50	Kap. Imogiri
		7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	persen	100	43,350,000	80	2,550,000	80	2,550,000	80	2,550,000	80	5,100,000	80.00	11.76	Kap. Imogiri
		7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	persen	100	13,272,384,835	85	2,160,473,906	81	2,484,553,770	81	2,463,805,284	81	4,624,279,190	81.00	34.84	Kap. Imogiri
		7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	10,950,000	0	-	100	750,000	100	750,000	100	750,000	100.00	6.85	Kap. Imogiri
		7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	99	1,437,836,096	100	170,548,600	100	190,240,589	100	189,724,149	100	360,272,749	101.01	25.06	Kap. Imogiri
		7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen	90	254,600,000	100	3,500,000	0	-	0	-	-	3,500,000	-	1.37	Kap. Imogiri
		7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	90	731,001,200	100	126,229,168	100	155,361,960	100	153,435,005	100	279,664,173	111.11	38.26	Kap. Imogiri
		7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	99	1,228,824,204	100	103,804,694	100	142,541,852	100	141,439,950	100	245,244,644	101.01	19.96	Kap. Imogiri
		7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	452,200,000	100	57,360,000	90	48,850,000	90	48,850,000	90	106,210,000	90.00	23.49	Kap. Imogiri
		7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	persen	100	360,400,000	100	50,560,000	85	35,300,000	85	35,300,000	85	85,860,000	85.00	23.82	Kap. Imogiri
		7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	angka	100	91,800,000	85	6,800,000	85	13,550,000	85	13,550,000	85	20,350,000	85.00	22.17	Kap. Imogiri
		7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	100	1,409,122,500	100	177,675,000	80	178,000,260	80	177,996,750	80	355,671,750	80.00	25.24	Kap. Imogiri
		7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	persen	100	876,840,000	100	111,415,000	80	103,100,000	80	103,100,000	80	214,515,000	80.00	24.46	Kap. Imogiri
		7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	persen	100	532,282,500	100	66,260,000	90	74,900,260	90.00	74,896,750	90	141,156,750	90.00	26.52	Kap. Imogiri
		7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	724,750,000	100	40,500,000	87	65,500,000	87.00	65,500,000	87	106,000,000	87.00	14.63	Kap. Imogiri
		7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	724,750,000	100	40,500,000	87	65,500,000	87.00	65,500,000	87	106,000,000	87.00	14.63	Kap. Imogiri
		7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	371,600,000	100	15,400,000	96	17,000,000	96.00	17,000,000	96	32,400,000	96.00	8.72	Kap. Imogiri
		7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	371,600,000	100	15,400,000	90	17,000,000	90.00	17,000,000	90	32,400,000	90.00	8.72	Kap. Imogiri
		2228	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	0	-	100	19,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	119,000,000			Kap. Jetis
		2228507	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Persen	0	-	100	19,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	200	119,000,000			Kap. Jetis
		04.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	445,300,000	100	45,300,000	100	35,000,000	96.50	33,777,500	96.50	79,077,500	96.50	17.76	Kap. Jetis
		04.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	persen	100	245,300,000	100	45,300,000	100	35,000,000	96.50	33,777,500	96.50	79,077,500	96.50	32.24	Kap. Jetis
			PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	persen	100	200,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	Kap. Jetis

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RPKD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
		x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	angka	82	18,000,149,010		2,576,709,963	81	2,638,437,733	82,28	2,621,145,195	82,28	5,197,855,158	100.34	28.88	Kap. Jetis
		x.xx.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	persen	100	287,074,000	100	7,225,000	100	4,250,000	100	4,250,000	100	11,475,000	100.00	4.00	Kap. Jetis
		x.xx.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	angka	85	13,534,296,510	80	2,094,520,532	82	2,146,267,219	82	2,135,701,161	82	4,230,221,693	96.47	31.26	Kap. Jetis
		x.xx.01.2.05.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	0	-	-	-	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000			Kap. Jetis
		x.xx.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	angka	80	1,030,371,369	80	145,327,450	100	169,319,994	81	168,766,861	81	314,094,311	101.25	30.48	Kap. Jetis
		x.xx.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	persen	100	838,506,000	100	25,100,000	-	0	-	0	-	25,100,000	-	2.99	Kap. Jetis
		x.xx.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persen	100	1,188,668,916	9983	142,598,181	100	165,075,520	97.09	160,280,273	97.09	302,878,454	97.09	25.48	Kap. Jetis
		x.xx.012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	100	1,121,232,219	99	161,938,800	100	148,525,000	99.07	147,146,900	99.07	309,085,700	99.07	27.57	Kap. Jetis
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	94	138,225,000	100	25,475,000	100	25,475,000	100	25,475,000	100	50,950,000	106.38	36.86	Kap. Jetis
		7.01.02.201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	76,100,000	100	11,350,000	100	11,350,000	100	11,350,000	100	16,750,000	100.00	22.01	Kap. Jetis
		7.01.02.04	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Persen	100	62,125,000	100	14,125,000	100	14,125,000	100	14,125,000	100	28,250,000	100.00	45.47	Kap. Jetis
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat	persen	95	775,491,000	100	163,435,000	100	164,580,000	100	164,580,000	100	328,015,000	105.26	42.30	Kap. Jetis
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	persen	100	496,565,000	100	129,415,000	100	107,855,000	100	107,855,000	100	237,270,000	100.00	47.78	Kap. Jetis
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan lembaga Masyarakat tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	persen	100	278,926,000	100	34,020,000	100	56,725,000	100	56,725,000	100	90,745,000	100.00	32.53	Kap. Jetis
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	cakupan koordinasi ketenteraman dan ketertiban kapanewon	persen	100	651,137,500	100	124,587,500	100	111,687,500	99.32	111,612,500	99.32	236,200,000	99.32	36.27	Kap. Jetis
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	persen	100	651,137,500	100	124,587,500	100	111,687,500	99.32	111,612,500	99.32	236,200,000	99.32	36.27	Kap. Jetis
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	36,000,000	100	5,250,000	100	5,250,000	100	5,250,000	100	10,500,000	100.00	29.17	Kap. Jetis
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	36,000,000	100	5,250,000	100	5,250,000	100	5,250,000	100	10,500,000	100.00	29.17	Kap. Jetis
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	0	-	100	43,500,000	100	100,000,000	100	99,942,000	100	143,442,000			Kap. Kasihan
		2.22.8.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Persen	0	-	100	43,500,000	100	100,000,000	100	99,942,000	100	143,442,000			Kap. Kasihan
		4.1.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	309,460,000	100	35,000,000	100	35,000,000	100	34,960,000	100	69,960,000	100.00	22.61	Kap. Kasihan
		4.1.4.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	4	309,460,000	100	35,000,000	100	35,000,000	100	34,960,000	100	69,960,000	2,500.00	22.61	Kap. Kasihan
		7.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persen	89	16,217,459,501	82.12	2,876,755,805	86	3,378,713,904	82.12	3,218,296,557	82.12	6,095,052,362			Kap. Kasihan
		7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	95	54,000,000	95	15,500,000	95	15,500,000	95	15,496,250	95	30,996,250	100.00	57.40	Kap. Kasihan
		7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Persen	100	13,140,646,030	85	2,225,460,569	85	2,693,478,768	85	2,544,887,194	85	4,770,347,763	85.00	36.30	Kap. Kasihan
		7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitorin, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	20,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	10,000,000	100.00	50.00	Kap. Kasihan
		7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Persen	95	775,994,650	95	177,599,000	95	177,799,000	95	176,825,760	95	354,424,760	100.00	45.67	Kap. Kasihan
		7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Persen	95	737,611,801	95	90,896,336	95	123,396,336	95	122,935,994	95	213,832,330	100.00	28.99	Kap. Kasihan
		7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang usuran pemerintah daerah	Persen	95	964,278,000	95	195,719,900	95	196,959,800	95	187,958,059	95	383,677,959	100.00	39.79	Kap. Kasihan
		7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	95	524,929,020	95	166,580,000	95	166,580,000	95	165,193,300	95	331,773,300	100.00	63.20	Kap. Kasihan
		7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	90	565,786,997	90	61,681,200	90	61,681,200	90	61,634,800	90	123,316,000	100.00	21.80	Kap. Kasihan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RPKD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD Kabupaten/kota s/d RPKD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
		7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Persen	90	377,191,427	90	41,120,800	90	41,120,800	90	41,086,300	90	82,207,100	100.00	21.79	Kap. Kasihan
		7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Persen	90	188,595,570	90	20,560,400	90	20,560,400	90	20,548,500	90	41,108,900	100.00	21.80	Kap. Kasihan
		7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	90	813,483,700	89	98,481,077	89	95,781,077	89	95,718,400	89	194,199,477	98.89	23.87	Kap. Kasihan
		7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Persen	90	542,322,950	89	67,194,927	89	64,494,927	89	64,459,900	89	131,654,827	98.89	24.28	Kap. Kasihan
		7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	90	271,160,750	89	31,286,150	89	31,286,150	89	31,258,500	89	62,544,650	98.89	23.07	Kap. Kasihan
		7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	91	416,759,471	91	18,419,800	91	18,419,800	91	18,413,700	91	36,833,500	100.00	8.84	Kap. Kasihan
		7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Hasil Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	90	416,759,471	89	18,419,800	89	18,419,800	89	18,413,700	89	36,833,500	98.89	8.84	Kap. Kasihan
		7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	90	616,570,652	90	45,328,123	90	45,328,123	90	45,300,000	90	90,628,123	100.00	14.70	Kap. Kasihan
		7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	90	616,570,652	90	45,328,123	90	45,328,123	90	45,300,000	90	90,628,123	100.00	14.70	Kap. Kasihan
		2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang berkualitas	persen	-	-	100	16,500,000	100	100,000,000	100	100,000,000	0	116,500,000			Kap. Kretek
		2.22.8.5.07	Adat, Seni, dan lembaga kebudayaan	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	persen	-	-	100	16,500,000	100	100,000,000	100	100,000,000	200	116,500,000			Kap. Kretek
		4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	309,460,000	100	45,270,000	100	35,000,000	100	35,000,000	100	35,000,000	200	80,270,000	25.94	Kap. Kretek
		4.1.4.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	persen	309,460,000	100	45,270,000	100	35,000,000	100	35,000,000	100	35,000,000	200	80,270,000	25.94	Kap. Kretek
		7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	80	16,209,334,540	0	2,917,848,067	80	3,127,975,582	83	3,021,570,361	83	5,939,418,428	103.75	36.64	Kap. Kretek
		7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	persen	100	59,400,000	0	10,000,000	100	14,705,000	100	14,705,000	100	24,705,000	100.00	41.59	Kap. Kretek
		7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100	13,000,089,520	0	2,460,142,365	100	2,694,881,966	92	2,593,647,168	92	5,053,789,533	92.00	38.88	Kap. Kretek
		7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	8,500,000		2,125,000	100	2,125,000	100	2,125,000	100	4,250,000	100.00	50.00	Kap. Kretek
		7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	100	1,429,570,544	0	185,961,000	100	136,460,571	99	134,156,400	98.5	320,117,400	98.50	22.39	Kap. Kretek
		7.1.1.2.07	Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen	100	340,000,000		750,000	100	17,000,000	100	17,000,000	100	17,750,000	100.00	5.22	Kap. Kretek
		7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	754,274,476		138,845,570	100	147,796,200	99	146,128,848	99	284,974,418	99.00	37.78	Kap. Kretek
		7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	100	626,000,000		122,149,132	100	115,006,845	98	113,807,945	98	235,957,077	98.00		Kap. Kretek
		7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	623,650,000		96,937,500	100	75,625,000	100	75,625,000	100	172,562,500	100.00	27.67	Kap. Kretek
		7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen	100	420,200,000		78,487,500	100	53,750,000	100	53,750,000	100	132,237,500	100.00	31.47	Kap. Kretek
		7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	angka	90	203,450,000		18,450,000	90	21,875,000	100	21,875,000	100	40,325,000	111.11	19.82	Kap. Kretek
		7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	100	1,095,000,000	0	136,735,000	100	148,953,000	99	147,430,500	99	284,165,500	99.00	25.95	Kap. Kretek
		7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	persen	100	708,000,000	0	89,985,000	100	109,528,000	99	108,805,500	99	198,790,500	99.00	28.08	Kap. Kretek
		7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	persen	100	387,000,000		46,750,000	100	39,425,000	99	38,625,000	99	85,375,000	99.00	22.06	Kap. Kretek
		7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	926,000,000		72,991,000	100	130,900,860	100	130,900,000	100	203,891,000	100.00	22.02	Kap. Kretek
		7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	100	926,000,000		72,991,000	100	130,900,860	100	130,900,000	100	203,891,000	100.00	22.02	Kap. Kretek
		7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	98,000,000		4,000,000	100	9,010,000	100	9,010,000	100	13,010,000	100.00	13.28	Kap. Kretek
		7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	98,000,000		4,000,000	100	9,010,000	100	9,010,000	100	13,010,000	100.00	13.28	Kap. Kretek
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	-	-	100.00	16,250,000.00	100	100,000,000.00	100.00	100,000,000	100.00	116,250,000			Kap. Pajangan
		2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	-	-	100.00	16,250,000.00	100	100,000,000.00	100.00	100,000,000	100.00	116,250,000			Kap. Pajangan
		04.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	509,460,000	100	45,300,000	100	35,000,000	100.00	33,795,000	100.00	79,095,000	100.00	15.53	Kap. Pajangan

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RPKD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5															16			
		04.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	309,460,000	100	45,300,000	100	35,000,000	100.00	33,795,000	100.00	79,095,000	100.00	25.56		Kap. Pajangan			
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	angka	80	14,692,140,077	79.53	5,839,343,596	80	2,845,768,873	81.69	2,739,362,805	81.69	8,578,706,401	102.11	58.39		Kap. Pajangan			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	100	88,375,000	100	648,145,000	100	6,000,000	100.00	6,000,000	100.00	654,145,000	100.00	740.19		Kap. Pajangan			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Persen	100	12,197,895,311	79.53	4,561,918,746	80	2,325,374,219	73.86	2,224,076,641	73.86	6,785,995,387	73.86	55.63		Kap. Pajangan			
		7.01.01.02.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	angka	100	13,440,000	79.53	695,889,900	80	3,360,000	81.03	3,360,000	81.03	699,249,900	81.03	5,202.75		Kap. Pajangan			
		7.01.01.02.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	angka	80	1,280,444,566	79.53	347,944,950	80	161,723,446	82.04	160,776,850	82.04	508,721,800	102.55	39.73		Kap. Pajangan			
		7.01.01.02.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Persen	100	127,250,000	100	36,567,500	100	27,116,000	100	27,050,000	100.00	63,617,500		49.99		Kap. Pajangan			
		7.01.01.02.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	371,140,000	100	158,273,600	100	161,379,500	100.00	159,668,464	100.00	317,942,064	100.00	85.67		Kap. Pajangan			
		7.01.01.02.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	613,595,200	100	123,061,300	100	160,815,708	100.00	158,430,850	100.00	281,492,150	100.00	45.88		Kap. Pajangan			
		07.01.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Persen	92	-	95	32,087,500.00	90	29,025,000	100.00	29,025,000	100.00	61,112,500	108.70			Kap. Pajangan			
		07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	persen	92	-	90	14,537,500.00	90	20,025,000	100.00	20,025,000	100.00	34,562,500	108.70			Kap. Pajangan			
		07.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persen	100	-	90	17,550,000.00	90	9,000,000	84.72	9,000,000	84.72	26,550,000	84.72			Kap. Pajangan			
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	persen	100	-		107,849,500.00	100	103,352,500	100.00	101,097,500	100.00	208,947,000	100.00			Kap. Pajangan			
		07.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	persen	100	-	100	107,849,500.00	100	72,910,000	100.00	72,855,000	100.00	180,704,500	100.00			Kap. Pajangan			
		07.01.03.02.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	88	-	100	30,725,000	88	30,442,500	100.00	28,242,500	100.00	58,967,500	113.64			Kap. Pajangan			
		07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	persen	100	-	100	25,835,000	100	121,776,500	100.00	121,704,000	100.00	147,539,000	100.00			Kap. Pajangan			
		07.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	-	100	25,835,000.00	100	121,776,500	100.00	121,704,000	100.00	147,539,000	100.00			Kap. Pajangan			
		07.01.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	persen	100	672,747,000	100	119,331,500.00	100	11,925,000	100.00	11,450,000	100.00	130,781,500	100.00	19.44		Kap. Pajangan			
		07.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	672,747,000	100	119,331,500.00	100	11,925,000	100.00	11,450,000	100.00	130,781,500	100.00	19.44		Kap. Pajangan			
		2.33.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			0	0	100	15,250,000	100	100,000,000	100	94479050	100	109,729,050				Kap. Pandak			
		2.22.8.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Event	0	0	1	15,250,000	100	100,000,000	100	94479050	100	109,729,050				Kap. Pandak			
		4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN.	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	309,460,000	100	45,300,000	100	35,000,000	100	33220000	100	78,520,000	100.00	25.37		Kap. Pandak			
		4.1.4.4.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	309,460,000	100	45,300,000	100	35,000,000	100	33220000	100	78,520,000	100.00	25.37		Kap. Pandak			
		7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	90	17,497,963,665	82	2,757,760,383	81	2,868,631,752	81	2,837,788,313	81	5,595,548,696	90.00	31.98		Kap. Pandak			
		7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	100	83,065,000	100	2,850,000	100	6,000,000	100	6,000,000	100	8,850,000	100.00	10.65		Kap. Pandak			
		7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Persen	100	13,340,052,665	100	2,375,164,872	100	2,384,100,372	100	2357016745	100	4,732,181,617	100.00	35.47		Kap. Pandak			
		7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	9,712,500	0	-	100	1,362,500	100	1,362,500	100	1,362,500	100.00	14.03		Kap. Pandak			
		7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	95	943,685,228	95	124,791,647	95	120,659,790	95	119778350	95	244,569,997	100.00	25.92		Kap. Pandak			
		7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah	Persen	98	707,550,000	95	49,045,700	95	40,000,000	95	39,592,800	95	88,638,500	96.94	12.53		Kap. Pandak			
		7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	95	1,101,894,745	95	161,087,564	95	157,240,040	95	156,152,818	95	317,240,382	100.00	28.79		Kap. Pandak			
		7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	95	1,312,003,527	95	44,820,600	95	159,269,050	95	157,885,100	95	202,705,700	100.00	15.45		Kap. Pandak			
		7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	94	289,675,000	90	73,872,900	91	28,035,000	91	28,035,000	91	101,907,900	96.81	35.18		Kap. Pandak			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RPKD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
	7.1.2.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon	Persen	90	195,625,000	85	58,922,900	90	20,275,000	90	20,275,000	90	79,197,900	100.00	40.48	Kap. Pandak
	7.1.2.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Persen	90	94,050,000	92	14,950,000	92	7,760,000	92	7,760,000	92	22,710,000	102.22	24.15	Kap. Pandak
	7.1.3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	88	1,213,390,000	82	141,980,500	84	129,195,750	84	129,195,750	84	271,176,250	95.45	22.35	Kap. Pandak
	7.1.3.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	88	631,980,000	82	69,170,500	84	65,975,750	84	65,975,750	84	135,146,250	95.45	21.38	Kap. Pandak
	7.1.3.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	88	581,410,000	82	72,810,000	84	63,220,000	84	63,220,000	84	136,030,000	95.45	23.40	Kap. Pandak
	7.1.4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	88	698,400,000	82	76,575,000	84	136,615,000	84	136,615,000	84	213,190,000	95.45	30.53	Kap. Pandak
	7.1.4.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	88	698,400,000	82	76,575,000	84	136,615,000	84	136,615,000	84	213,190,000	95.45	30.53	Kap. Pandak
	7.1.5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	Persen	100	82,360,000	100	6,310,000	100	6,560,000	100	6,560,000	100	12,870,000	100.00	15.63	Kap. Pandak
	7.1.5.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	82,360,000	100	6,310,000	100	6,560,000	100	6,560,000	100	12,870,000	100.00	15.63	Kap. Pandak
	2.22.8		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	0.00	0.00	100	17,500,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	117,500,000			Kap. Piyungan
	2.22.5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja Pembinaan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persen	0.00	0.00	100	17,500,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	117,500,000			Kap. Piyungan
	4.1.4		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	309,460,000	100	45,300,000	100	35,000,000	100	33,070,000	100	78,370,000	100.00	25.32	Kap. Piyungan
	4.1.4.5.06		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	309,460,000	100	45,300,000	100	35,000,000	100	33,070,000	100	78,370,000	100.00	25.32	Kap. Piyungan
	7.1.1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	86	16,414,176,530		3,214,673,986	83	3,156,659,255	82,13	3,037,997,502	82,13	6,252,671,488	95.50	38.09	Kap. Piyungan
	7.1.1.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	100	106,600,000	100	6,500,000	100	5,100,000	100	5,100,000	100	11,600,000	100.00	10.88	Kap. Piyungan
	7.1.1.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Persen	100	12,471,274,420	100	2,269,193,906	100	2,544,373,608	100	2,433,075,167	100	4,702,269,073	100.00	37.70	Kap. Piyungan
	7.1.1.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	6,500,000	100	7,203,000	100	1,700,000	100	1,700,000	100	8,903,000	100.00	136.97	Kap. Piyungan
	7.1.1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Persen	100	1,477,656,162	100	185,622,300	100	192,694,965	100	192,214,965	100	377,837,265	100.00	25.57	Kap. Piyungan
	7.1.1.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Persen	100	444,700,000	100	47,997,000	100	51,000,000	100	51,000,000	100	98,997,000	100.00	22.26	Kap. Piyungan
	7.1.1.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	1,077,372,860	100	513,130,480	100	167,561,960	100	161,756,448	100	674,886,928	100.00	62.64	Kap. Piyungan
	7.1.1.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	830,073,288	100	185,027,300	100	194,228,722	100	193,150,922	100	378,178,222	100.00	45.56	Kap. Piyungan
	7.1.2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	522,072,500	100	57,132,500	100	38,310,000	100	38,310,000	100	95,442,500	100.00	18.28	Kap. Piyungan
	7.1.2.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100	389,987,500	100	45,047,500	100	28,400,000	100	28,400,000	100	73,447,500	100.00	18.83	Kap. Piyungan
	7.1.2.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Persen	95	132,085,000	100	12,085,000	100	9,910,000	100	9,910,000	100	21,995,000	105.26	16.65	Kap. Piyungan
	7.1.3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	830,032,500	100	120,090,000	100	110,646,500	100	110,646,500	100	230,736,500	100.00	27.80	Kap. Piyungan
	7.1.3.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100	708,202,500	100	80,915,000	100	74,841,500	100	74,841,500	100	155,756,500	100.00	21.99	Kap. Piyungan
	7.1.3.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan	Persen	100	121,830,000		39,175,000	100	35,805,000	100	35,805,000	100	74,980,000	100.00	61.54	Kap. Piyungan
	7.1.4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	880,000,000	100	40,850,000	100	69,467,500	100	69,467,500	100	110,317,500	100.00	12.54	Kap. Piyungan
	7.1.4.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100	880,000,000	100	40,850,000	100	69,467,500	100	69,467,500	100	110,317,500	100.00	12.54	Kap. Piyungan
	7.1.5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	145,515,000	100	8,015,000	100	8,015,000	100	8,015,000	100	16,030,000	100.00	11.02	Kap. Piyungan
	7.1.5.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	145,515,000	100	8,015,000	100	8,015,000	100	8,015,000	100	16,030,000	100.00	11.02	Kap. Piyungan
	2.22.8		ROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persen	0.00	-	100	15,250,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	115,250,000			Kap. Pleret
	2.22.8.5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	persen	0.00	-	100	15,250,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	115,250,000			Kap. Pleret
	4.1.4		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	309,460,000	100	45,300,000	100	331,903,000	100	331,903,000	100	377,203,000	100.00	121.89	Kap. Pleret
	4.1.4.5.06		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	persen	100	309,460,000	100	45,300,000	100	331,903,000	100	331,903,000	100	377,203,000	100.00	121.89	Kap. Pleret
	7.1.1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	82	16,691,276,004	81.08	2,536,823,836	80	2,752,114,144	80	2,752,114,144	80	5,288,937,980	97.56	31.69	Kap. Pleret
	7.1.1.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	persen	100	36,250,000	100	3,000,000	100	5,950,000	100	5,950,000	100	8,950,000	100.00	24.69	Kap. Pleret
	7.1.1.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	persen	100	12,931,501,004	100	2,177,588,494	100	2,105,952,382	100	2,105,952,382	100	4,283,540,876	100.00	33.12	Kap. Pleret
	7.1.1.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	persen	100	17,100,000		-	100	2,550,000	100	2,550,000	100	2,550,000	100.00	14.91	Kap. Pleret
	7.1.1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	100	1,047,834,000	90	154,995,000	90	174,061,160	90	174,061,160	90	329,056,160	90.00	31.40	Kap. Pleret
	7.1.1.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen	100	359,571,000	100	30,500,000	100	56,060,000	100	56,060,000	100	86,560,000	100.00	24.07	Kap. Pleret
	7.1.1.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	983,990,000	100	131,042,342	100	143,804,039	100	143,804,039	100	274,846,381	100.00	27.93	Kap. Pleret
	7.1.1.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	1,315,030,000	100	39,698,000	100	218,562,100	100	218,562,100	100	258,260,100	100.00	19.64	Kap. Pleret
	7.1.2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	391,992,500	90	37,850,000	90	29,150,000	90	29,150,000	90	67,000,000	90.00	17.09	Kap. Pleret

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPDP Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16			
		7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen	100	268,992,500	100	23,175,000	100	14,492,500	100	14,492,500	100	37,667,500	100.00	14.00	Kap. Pleret		
		7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	persen	100	123,000,000	100	14,675,000	90	12,375,000	90	12,375,000	90	27,050,000	90.00	21.99	Kap. Pleret		
		7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen	100	929,887,500	90	147,425,000	90	112,212,500	90	112,212,500	90	259,637,500	90.00	27.92	Kap. Pleret		
		7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	persen	100	626,742,500	90	90,312,500	90	73,287,500	90	73,287,500	90	163,600,000	90.00	26.10	Kap. Pleret		
		7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	persen	100	303,145,000	90	57,112,500	90	32,325,000	90	32,325,000	90	89,437,500	90.00	29.50	Kap. Pleret		
		7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	persen	100	785,475,000	90	99,255,000	90	109,075,000	90	109,075,000	90	208,330,000	90.00	26.52	Kap. Pleret		
		7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	persen	100	785,475,000	90	99,255,000	90	109,075,000	90	109,075,000	90	208,330,000	90.00	26.52	Kap. Pleret		
		7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase	100	178,015,000	100	8,300,000	100	5,100,000	100	5,100,000	100	13,400,000	100.00	7.53	Kap. Pleret		
		7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	178,015,000	100	8,300,000	100	5,100,000	100	5,100,000	100	13,400,000	100.00	7.53	Kap. Pleret		
		2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang berkualitas	persen	100	-	100	14,750,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	114,750,000	100.00		Kap. Pundong		
		2.22.8.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	persen	100	-	100	14,750,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	114,750,000	100.00		Kap. Pundong		
		4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	309,460,000	100	45,300,000	100	35,000,000	100	33,770,000	100	79,070,000	100.00	25.55	Kap. Pundong		
		4.1.4.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	persen	100	309,460,000	100	45,300,000	100	35,000,000	100	33,770,000	100	79,070,000	100.00	25.55	Kap. Pundong		
		7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	90	16,409,889,431	82.48	2,669,221,776	80	2,818,201,752	80	2,682,258,355	80	5,351,480,131	88.89	32.61	Kap. Pundong		
		7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	persen	90	63,010,000	80	1,445,000	80	8,500,000	80	8,250,000	80	9,695,000	88.89	15.39	Kap. Pundong		
		7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	persen	90	13,015,248,006	85	2,206,282,202	85	2,332,583,222	85	2,201,823,042	85	4,408,105,244	94.44	33.87	Kap. Pundong		
		7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	83	15,500,000	0	-	100	3,000,000	100	3,000,000	100	3,000,000	120.48	19.35	Kap. Pundong		
		7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	90	935,174,125	85	90,322,100	100	115,013,108	100	114,475,218	100	204,797,318	111.11	21.90	Kap. Pundong		
		7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen	90	116,262,500	100	43,059,000	-	-	-	-	-	43,059,000	-	37.04	Kap. Pundong		
		7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	1,444,104,000	100	150,116,144	100	175,778,500	100	172,457,573	100	322,573,717	100.00	22.34	Kap. Pundong		
		7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	90	820,590,800	85	177,997,330	100	183,326,922	100	182,252,522	100	360,249,852	111.11	43.90	Kap. Pundong		
		7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	95	161,207,957	90	52,362,500	90	29,637,500	90	29,637,500	90	82,000,000	94.74	50.87	Kap. Pundong		
		7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen	95	93,984,875	90	39,640,000	85	16,787,500	85	16,787,500	85	56,427,500	89.47	60.04	Kap. Pundong		
		7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	angka	95	67,223,082	85	12,722,500	85	12,850,000	85	12,850,000	85	25,572,500	89.47	38.04	Kap. Pundong		
		7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	86	1,140,223,492	80	178,308,500	80	157,715,000	80	157,715,000	80	336,023,500	93.02	29.47	Kap. Pundong		
		7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	persen	86	718,619,492	80	114,212,000	80	96,562,500	80	96,562,500	80	210,774,500	93.02	29.33	Kap. Pundong		
		7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	persen	86	421,604,000	80	64,096,500	90	61,152,500	90	61,152,500	90	125,249,000	104.65	29.71	Kap. Pundong		
		7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	91	901,852,778	87	138,712,500	87	138,687,500	87	138,187,500	87	276,900,000	95.60	30.70	Kap. Pundong		
		7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	91	901,852,778	87	138,712,500	87	138,687,500	87	138,187,500	87	276,900,000	95.60	30.70	Kap. Pundong		
		7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	79,121,848	100	4,790,000	86	4,790,000	86	4,790,000	86	9,580,000	86.00	12.11	Kap. Pundong		
		7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	79,121,848	100	4,790,000	90	4,790,000	90	4,790,000	90	9,580,000	90.00	12.11	Kap. Pundong		
		2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persen	0	-	100	18,500,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	118,500,000			Kap. Sanden		
		2.22.8.5.07	Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persen	0	-	100	18,500,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	118,500,000			Kap. Sanden		



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPd Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						6		7		8		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	persen	100.00	309,045,000	100	45,300,000	100	35,000,000	100	35,000,000	100	80,300,000	100.00	25.98	Kap. Sanden
		4.1.4.5.06	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Persentase Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan	persen	100	309,045,000	100	45,300,000	2	35,000,000	2	35,000,000	2	80,300,000	2.00	25.98	Kap. Sanden
		7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	85	16,265,483,207	81.89	2,659,595,878	81	3,087,626,626	81.93	2,660,521,580	81.93	5,320,117,458	96.39	32.71	Kap. Sanden
		7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah kpanewon Sanden	persen	100	40,000,000	100	2,280,000	81	5,000,000	81	5,000,000	81	7,280,000	81.00	18.20	Kap. Sanden
		7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	persen	85	12,425,411,447	89.69	2,138,091,891	85	2,221,947,368	85	2,074,217,794	85	4,212,309,685	100.00	33.90	Kap. Sanden
		7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen		7,890,000		0	100	1,972,500	100	1,972,500	100	1,972,500		25.00	Kap. Sanden
		7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	95	1,504,750,307	95.67	164,719,000	95	204,063,531	95	202,807,790	95	367,526,790	100.00	24.42	Kap. Sanden
		7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Barang	Persen	100	297,738,000	100	20,738,000		0		0	0	20,738,000	-	6.97	Kap. Sanden
		7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	100	1,008,695,360	100	164,712,408	100	173,739,800	100	171,503,219	100	336,215,627	100.00	33.33	Kap. Sanden
		7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pengelolaan barang milik daerah	persen	100	980,998,093	100	169,054,579	100	206,933,877	100	205,020,277	100	374,074,856	100.00	38.13	Kap. Sanden
		7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	angka	94	350,000,000	100	70,975,000	91	46,250,000	91	46,200,000	91	117,175,000	96.81	33.48	Kap. Sanden
		7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon	persen	100	268,000,000	100	61,900,000	100	37,000,000	100	36,950,000	100	98,850,000	100.00	36.88	Kap. Sanden
		7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon	persen	94	82,000,000	100	9,075,000	95	9,250,000	95	9,250,000	95	18,325,000	101.06	22.35	Kap. Sanden
		7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	84	837,384,900	100	118,883,750	81	111,728,550	81	111,528,700	81	230,412,450	96.43	27.52	Kap. Sanden
		7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa	persen	85	523,172,500	100	55,070,000	81	63,825,750	81	63,825,750	81	118,895,750	95.29	22.73	Kap. Sanden
		7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	persen	100	314,212,400	10	63,813,750	81	47,902,800	81	47,702,950	81	111,516,700	81.00	35.49	Kap. Sanden
		7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	91	548,000,000	100	68,641,000	88	104,991,000	88	104,991,000	88	173,632,000	96.70	31.68	Kap. Sanden
		7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon	persen	100	548,000,000	100	68,641,000	88	104,991,000	88	104,991,000	88	173,632,000	88.00	31.68	Kap. Sanden
		7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	283,000,000	100	21,475,000	100	11,000,000	100	11,000,000	100	32,475,000	100.00	11.48	Kap. Sanden
		7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon	persen	100	283,000,000	100	21,475,000	100	11,000,000	100	11,000,000	100	32,475,000	100.00	11.48	Kap. Sanden
		2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Persen		-	100	16,500,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	116,500,000			Kap. Sedayu
		2.22.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persen		-	100	16,500,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	116,500,000			Kap. Sedayu
		4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	persen	100	309,460,000	100	45,300,000	100	35,000,000	100	33,212,500	100	78,512,500	100.00	25.37	Kap. Sedayu
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	persen	85	200,000,000				0		0		-			Kap. Sedayu
		4.1.4.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	persen	100	309,460,000	100	45,300,000	100	35,000,000	100	33,212,500	100	78,512,500	100.00	25.37	Kap. Sedayu
		7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	100	17,907,123,753	82.27	2,822,017,275	86.00	3,111,597,011.00	100	3,028,251,679	100	5,850,268,954	100.00	32.67	Kap. Sedayu
		7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen	100	74,400,000	100	6,567,500	100	4,500,000	100	4,500,000	100	11,067,500	100.00	14.88	Kap. Sedayu
		7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	persen	100	13,415,764,753	100	2,343,027,083	100	2,588,919,634	100	2,518,439,889	100	4,861,466,972	100.00	36.24	Kap. Sedayu
		7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	16,400,000		-	100	2,400,000	100	2,400,000	100	2,400,000	100.00	14.63	Kap. Sedayu
		7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	100	1,717,484,788	100	149,661,598	100	173,591,287	100	172,818,560	100	322,480,158	100.00	18.78	Kap. Sedayu
		7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen	100	461,860,000	100	34,900,000	100	21,155,000	100	21,050,000	100	55,950,000	100.00	12.11	Kap. Sedayu
		7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	913,279,920	100	114,691,014	100	139,499,060	100	128,743,673	100	243,434,687	100.00	26.65	Kap. Sedayu
		7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	1,307,934,292	100	173,170,080	100	181,532,030	100	180,299,557	100	353,469,637	100.00	27.03	Kap. Sedayu
		7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	94	240,850,000	100	67,150,000	91	38,300,000	100	38,300,000	100	105,450,000	106.38	43.78	Kap. Sedayu
		7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen	90	168,850,000	100	58,750,000	90	32,000,000	100	32,000,000	100	90,750,000	111.11	53.75	Kap. Sedayu

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RPKD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16				
		7.1.2.2.04	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	persen	90	72,000,000	100	8,400,000	90	6,300,000	100	6,300,000	100	14,700,000	111.11	20.42	Kap. Sedayu				
		7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	90	369,000,000	100	113,512,500	100	122,152,500	100	122,152,500	100	235,665,000	111.11	63.87	Kap. Sedayu				
		7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	persen	90	212,000,000	100	54,450,000	90	67,135,000	100	67,135,000	100	121,585,000	111.11	57.35	Kap. Sedayu				
		7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	persen	90	157,000,000	100	59,062,500	90	55,017,500	100	55,017,500	100	114,080,000	111.11	72.66	Kap. Sedayu				
		7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian Kinerja Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	343,850,000	100	133,865,000	100	134,750,000	100	133,036,675	100	266,901,675	100.00	77.62	Kap. Sedayu				
		7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	343,850,000	100	133,865,000	100	134,750,000	100	133,036,675	100	266,901,675	100.00	77.62	Kap. Sedayu				
		7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	768,000,000	100	5,200,000	100	4,200,000	100	4,200,000	100	9,400,000	100.00	1.22	Kap. Sedayu				
		7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	768,000,000	100	5,200,000	100	4,200,000	100	4,200,000	100	9,400,000	100.00	1.22	Kap. Sedayu				
		2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	persen	1	0	1	18,750,000	100	100,000,000	100	98,415,000	100	117,165,000	100,000.00		Kap. Sewon				
		2.22.8	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	persen	1	0	1	18,750,000	100	100,000,000	100.00	98,415,000.00	100	117,165,000	100,000.00		Kap. Sewon				
		4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase perencanaan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	309,460,000	100	45,300,000	100	35,000,000	98	34,327,500	98	79,627,500	98.08	25.73	Kap. Sewon				
		4.1.4	Perencanaan dan Pengendalian Usuran Kebudayaan	persentase perencanaan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	309,460,000	100	45,300,000	100	35,000,000	98	34,327,500	98	79,627,500	98.08	25.73	Kap. Sewon				
		7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai AKIP	Angka	92	29,664,217,697	90	3,027,424,118	90	3,027,551,886	99	2,998,465,464	99	6,025,889,582	107.65	20.31	Kap. Sewon				
		7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)	Angka	100	11,560,224,629	100	5,472,500	90	2,400,000	100	2,400,000	100	7,872,500	100.00	0.07	Kap. Sewon				
		7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)	persen	90	14,351,290,063	90	2,472,191,148	90	2,485,097,006	96	2,467,922,138	96	4,940,113,286	106.19	34.42	Kap. Sewon				
		7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)	persen	16	15,300,000	-	-	90	2,900,000	96	2,900,000	96	2,900,000	597.31	18.95	Kap. Sewon				
		7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	100	1,557,140,981	100	181,568,950	100	188,919,712	99	187,404,712	99	368,973,662	99.20	23.70	Kap. Sewon				
		7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)	persen	100	306,272,672	-	33,800,000	100	22,300,000	100	21,300,000	100	55,100,000	100.00	17.99	Kap. Sewon				
		7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)	persen	100	955,078,000	100	180,622,230	100	186,213,200	99	183,749,411	99	364,371,641	98.68	38.15	Kap. Sewon				
		7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)	persen	100	918,911,352	100	153,769,290	100	137,921,968	96	130,989,203	96	284,758,493	95.57	30.99	Kap. Sewon				
		7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	92	305,347,000	100	87,025,000	88	44,347,500	88	44,347,500	88	131,372,500	95.65	43.02	Kap. Sewon				
		7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	92	225,847,000	100	78,325,000	90	35,785,000	90	35,785,000	90	114,110,000	97.83	50.53	Kap. Sewon				
			Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	79,500,000	90	8,700,000	90	8,562,500	90	8,562,500	90	47,025,000	90.00	59.15	Kap. Sewon				
		7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen	92	759,389,152	100	79,225,000	88	117,003,750	88	117,003,750	88	196,228,750	95.65	25.84	Kap. Sewon				
		7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen	85	455,500,000	100	52,115,000	85	68,075,000	85	68,075,000	85	120,190,000	100.00	26.39	Kap. Sewon				
		7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen	91	303,889,152	91	27,110,000	91	48,928,750	91	48,928,750	91	76,038,750	100.00	25.02	Kap. Sewon				
		7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	persen	100	943,016,268	100	105,750,000	100	153,875,000	100	153,525,000	100	259,275,000	99.77	27.49	Kap. Sewon				
		7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	persen	100	943,016,268	100	105,750,000	100	153,875,000	100	153,525,000	100	259,275,000	100.00	27.49	Kap. Sewon				
		7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	403,328,000	100	9,850,000	100	10,300,000	100	10,300,000	100	20,150,000	100.00	5.00	Kap. Sewon				
		7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	403,328,000	100	9,850,000	100	10,300,000	100	10,300,000	100	20,150,000	100.00	5.00	Kap. Sewon				
		2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	persen	100	-	100	12,750,000	100	100,000,000	100	100,000,000.00	100	112,750,000	100.00		Kap. Srandakan				
		2.22.8.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Event	1	-	1	12,750,000	1	100,000,000	100	100,000,000	100	112,750,000	100,000.00		Kap. Srandakan				
		4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian Usuran Keistimewaan yang berkualitas	persen	100	245,300,000	100	45,300,000	100	35,000,000	100	35,000,000.00	100	80,300,000	100.00	32.74	Kap. Srandakan				
		4.1.4.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase perencanaan dan pengendalian Usuran Keistimewaan yang berkualitas	persen	100	245,300,000	100	45,300,000	100	35,000,000	100	35,000,000.00	100	80,300,000	100.00	32.74	Kap. Srandakan				
		7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	89	15,691,271,032	83.19	2,406,770,318	80.98	2,836,334,778	80.98	2,673,118,288.00	80.98	5,079,888,606	90.99	32.37	Kap. Srandakan				
		7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	100	12,210,580,032	80	2,004,434,382	85	2,351,273,317	85	2,204,549,329.00	85	4,208,983,711	85.00	34.47	Kap. Srandakan				
		7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	angka	100	1,800,000	85	312,500	85	312,500	85	312,000.00	85	624,500	85.00	34.69	Kap. Srandakan				
		7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	100	1,055,336,960	85	107,808,200	85	141,572,280	97	138,530,500.00	97	246,338,700	97.00	23.34	Kap. Srandakan				
		7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	100	496,400,000	85	16,594,500	85	30,000,000	85	29,637,000.00	85	46,231,500	85.00	9.31	Kap. Srandakan				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPd Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1		3	4	5		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	
		7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	98	928,804,436	85	148,972,936	85	159,682,520	85	147,210,159,000	85	296,183,095	86.73	31.89	Kap. Srandakan	
		7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	100	979,449,604	85	121,247,800	85	142,794,161	85	142,179,300,000	85	263,427,100	85.00	26.90	Kap. Srandakan	
		7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	100	18,900,000	85	7,400,000	85	10,700,000	85	10,700,000,000	85	18,100,000	85.00	95.77	Kap. Srandakan	
		7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	94	245,750,000	100	69,512,500	92	46,000,000	92	46,000,000,000	92	115,512,500	97.87	47.00	Kap. Srandakan	
		7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	201,750,000	100	61,512,500	90	38,000,000	90.00	38,000,000,000	90.00	99,512,500	90.00	49.32	Kap. Srandakan	
		7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	92	44,000,000	100	8,000,000	92	8,000,000	92	8,000,000,000	92	16,000,000	100.00	36.36	Kap. Srandakan	
		7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	98	815,625,000	95	153,851,250	95	138,003,500	95	137,990,000,000	95	291,841,250	96.94	35.78	Kap. Srandakan	
		7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	95	549,125,000	95	94,533,750	95	84,175,000	95	84,175,000,000	95	178,708,750	100.00	32.54	Kap. Srandakan	
		7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	95	266,500,000	95	59,317,500	95	53,828,500	95	53,815,000,000	95	113,132,500	100.00	42.45	Kap. Srandakan	
		7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETETRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketetraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	98	2,191,750,000	100	128,378,000	100	128,050,000	100	127,453,000,000	100	255,831,000	102.04	11.67	Kap. Srandakan	
		7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertetraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Ketetraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	95	2,191,750,000	100	128,378,000	100	128,050,000	100	127,453,000,000	100	255,831,000	105.26	11.67	Kap. Srandakan	
		7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	52,672,000	100	9,242,000	100	10,000,000	100	10,000,000,000	100	19,242,000	100.00	36.53	Kap. Srandakan	
		7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	52,672,000	100	9,242,000	100	10,000,000	100	10,000,000,000	100	19,242,000	100.00	36.53	Kap. Srandakan	
<b>Jumlah Anggaran Tujuan 1</b>							<b>3.277.283.824.916</b>		<b>647.391.320.629</b>		<b>693.931.881.447</b>		<b>#REF!</b>						
<b>SASARAN 2: Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi</b>																			
6	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi			Umur Harapan Hidup	Tahun	74.39	2,100,010,685,998	73.9	471,801,831,627	74.11	479,609,311,598	#REF!	#REF!	#REF!				DINKES	
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	83.5	899,644,134,783.00	76.00	211,566,047,280.13	82.15	223,965,040,162.00	84.04	219,719,793,528.00	84.04	431,285,840,808.13	0.00	47.94	RSUD	
				Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	%	82		80.00		81.00		80.91		80.91				RSUD	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	100	195,061,348,783.00	100.00	32,640,772,181.00	100	34,594,527,856.00	100.00	33,443,979,746.00	100.00	66,084,751,927.00	0.00	33.88	RSUD	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan Pelayanan BLUD	%	100	704,582,786,000.00	100.00	178,925,275,099.13	100	189,370,512,306.00	100.00	186,275,813,782.00	100.00	365,201,088,881.13	0.00	51.83	RSUD	
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Bed Occupation Rate (BOR)	%	80	248,425,000.00			67	16,210,464,000.00	63.62	16,201,211,560.00	63.62	16,201,211,560.00	0.00	6,521.57	RSUD	
				Turn Over Interval (TOI)	hari	2				2		1.97		1.97				RSUD	
				Bed Turn Over (BTO)	kalil	50				50		67.51		67.51				RSUD	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	%	96	248,425,000.00	0.00		96	16,210,464,000.00	100.00	16,201,211,560.00	100	16,201,211,560.00	0.00	6,521.57	RSUD	
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.50	501,852,596,495	85.01	80,065,218,508	84.15	87,101,176,583	84.56	82,066,294,293	169.57	162,131,512,801	200.67	32.31	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen	100	2,325,682,880	100	491,901,264	100	678,938,170	100	672,294,799	200	1,164,196,063	200.00	50.06	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	persen	100	488,940,860,175	100	76,870,473,770	100	82,951,051,698	100	77,789,398,461	200	154,659,872,231	200.00	31.63	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	100	3,123,121,740	100	688,438,171	100	1,276,928,078	100	1,239,318,854	200	1,927,757,025	200.00	61.73	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	3,208,931,700	100	960,020,936	100	1,080,510,920	100	1,050,504,431	200	2,010,525,367	200.00	62.65	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	persen	100	425,400,000	100	1,054,384,367	100	1,113,747,717	100	1,314,777,748	200	2,369,162,115	200.00	556.93	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Indeks pemenuhan UKP UKM	indeks	1	117,253,005,969	0.80	65,562,845,406	1	19,347,666,204	1.8	7,093,923,570	1.8	72,656,768,976	180.00	61.97	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	indeks	1	29,414,849,763	1	48,063,447,036	1	9,166,603,151	1	3,203,796,790	2	51,267,243,826	200.00	174.29	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	indeks	1	85,246,850,426	0.80	17,270,577,724	1	9,564,411,860	1	3,696,110,930	1.8	20,966,688,654	180.00	24.60	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan	aplikasi	2	1,945,420,500	2	103,000,000	1	255,073,993	1	244,861,250	3	347,861,250	150.00	17.88	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin	RS	7	645,885,280	3	125,820,646	4	361,577,200	4	359,520,910	7	485,341,556	100.00	75.14	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Indeks peningkatan kapasitas SDM	indeks	1	1,780,754,220	1	394,805,270	1	1,863,573,270	1	1,838,607,362	2	2,233,412,632	200.00	125.42	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Tenaga Kesehatan memiliki izin praktek	persen	1900	845,754,220	100	147,256,520	100	141,481,270	100	138,365,362	200	285,621,882	10.53	33.77	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendaaygunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan dan Penda	persen					100	155,400,000	100	154,900,000	100	154,900,000			DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SDM sesuai Standar	persen	100	935,000,000	100	247,548,750	100	1,566,692,000	100	1,545,342,000	200	1,792,890,750	200.00	191.75	DINAS KESEHATAN	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RPKD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5																
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar ( yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	indeks	1	4,188,733,000	1	714,015,800	1	991,559,650	1	318,245,000	2	1,032,260,800	200.00	24.64	DINAS KESEHATAN		
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persen	100	1,326,089,000	100	70,318,000	100	95,730,000	100	8,430,000	200	78,748,000	200.00	5.94	DINAS KESEHATAN		
		1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan sertifikat laik higiene yang diterbitkan	persen	100	170,850,000	100	193,090,000	100	351,295,000	50	178,932,500	150	372,022,500	150.00	217.75	DINAS KESEHATAN		
		1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Sertifikat Laik Higiene yang diterbitkan	sertifikat	77	1,395,745,000	77	339,818,650	71	339,818,650	71	15,000,000	148	354,818,650	192.21	25.42	DINAS KESEHATAN		
			Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Stiker pembinaan yang diterbitkan	sticker	179	660,452,000	179	5,000,000	0	0	0	0	179	5,000,000	100.00	0.76	DINAS KESEHATAN		
		1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Produk Makanan minuman industri rumah tangga sesuai standar	sampel	75	635,597,000	75	105,789,150	75	204,716,000	50	130,882,500	125	236,671,650	166.67	37.24	DINAS KESEHATAN		
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	60	4,752,164,600	100	1,097,376,546	45	835,751,190	75	826,951,291	175	1,924,327,837	291.67	40.49	DINAS KESEHATAN		
		1.02.05.2.01	Aktivasi, Pemberdayaan, Kemiraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah LP/LS	Persen	100	1,285,089,600	100	347,919,346	100	148,573,840	100	148,408,441	200	496,327,787	200.00	38.62	DINAS KESEHATAN		
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PHBS	Persen	1	975,675,000	75	360,409,700	76	284,375,000	54	277,358,500	129	637,768,200	16.125.00	65.37	DINAS KESEHATAN		
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	100	2,491,400,000	100	389,047,500	100	402,802,350	100	401,184,350	200	790,231,850	200.00	31.72	DINAS KESEHATAN		
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	Persen	63	10,749,050,000		579,549,830	40.70	1,472,060,000	41	1,416,154,286	103.7	1,995,704,116	164.60	18.57	DINAS KESEHATAN		
		2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian kinerja pengembangan potensi pelayanan kesehatan tradisional	Persen	100	10,749,050,000	100	579,549,830	100	1,472,060,000	100	1,416,154,286	200	1,995,704,116	200.00	18.57	DINAS KESEHATAN		
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84,50	948,145,120	100	181,800,348	84.15	195,493,480.00	84.56	193,090,282	98.77	374,890,630	116.89	39.54	DINAS KESEHATAN		
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	948,145,120	100	181,800,348	100	195,493,480	100	193,090,282	200	374,890,630	200.00	39.54	DINAS KESEHATAN		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Jamkesda	persen	100	185,650,755,263	100	36,419,751,593	100	41,531,342,230	100	34,627,660,884	200	71,047,412,477	200.00	38.27	DINAS KESEHATAN		
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Jamkesda	persen	100	185,650,755,263	100	36,419,751,593	100	41,531,342,230	100	34,627,660,884	200	71,047,412,477	200.00	38.27	DINAS KESEHATAN		
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84,50	929,531,680	85.01	178,202,112	84.15	193,133,380	84.56	191,066,880	169.57	369,268,992	200.67	39.73	DINAS KESEHATAN		
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	928,881,680	100	178,202,112	100	193,133,380	100	191,066,880	200	369,268,992	200.00	39.75	DINAS KESEHATAN		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Labkesda	persen	100	3,000,000,000	13,000	1,044,031,544	100	1,582,366,864	100	1,555,975,816	13100	2,600,007,360	13,100.00	86.67	DINAS KESEHATAN		
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	3,000,000,000	13,000	1,044,031,544	100	1,582,366,864	2	1,555,975,816	13002	2,600,007,360	13,002.00	86.67	DINAS KESEHATAN		
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,50	9,405,448,000	85.01	1,899,686,617	84.15	2,564,946,960	84.56	1271285432	169.57	3,170,972,049	200.67	33.71	DINAS KESEHATAN		
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	675,448,000	100	146,629,450	100	242,107,920	100	242,107,920	200	388,737,370	200.00	57.55	DINAS KESEHATAN		
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan kunjungan Puskesmas	persen	22050	8,730,000,000	100	1,753,057,167	100	2,322,839,040	100	2,206,732,383	200	3,959,789,550	0.91	45.36	DINAS KESEHATAN		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3,335,000,000	1	819,752,052	1	759,539,500	1	758,895,084	2	1,578,647,136	200.00	47.34	DINAS KESEHATAN		
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3,335,000,000	100	819,752,052	100	759,539,500	100	758,895,084	200	1,578,647,136	200.00	47.34	DINAS KESEHATAN		
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	N/A	N/A	18,650,000	45	48,487,500	75	48,487,500	75	67,137,500				DINAS KESEHATAN		
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	N/A	N/A	18,650,000	100	48,487,500	100	48,487,500	100	67,137,500				DINAS KESEHATAN		
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,50	12,196,858,400		3,828,329,638	84.15	2,698,911,195	84.56	959,624,436	84.56	4,787,954,074	100.07	39.26	DINAS KESEHATAN		
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100	550,358,400	100	1,914,164,819	100	241,694,620	100	60,113,680	100	1,974,278,499	100.00	358.73	DINAS KESEHATAN		
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	40000	11,646,500,000	100	1,914,164,819	100	2,457,216,575	100	2,391,966,989	100	4,306,131,808	0.25	36.97	DINAS KESEHATAN		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3,335,000,000		814,051,611	1	687,415,000	1	677,708,172	1	1,491,759,783	100.00	44.73	DINAS KESEHATAN		
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3,335,000,000		814,051,611	100	687,415,000	100	677,708,172	100	1,491,759,783	100.00	44.73	DINAS KESEHATAN		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPd Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						6		7		8		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5															16
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	N/A	N/A		25,510,000	45	47,335,000	75	47,335,000	75	72,845,000				DINAS KESEHATAN
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	N/A	N/A		25,510,000	100	47,335,000	100	47,335,000	100	72,845,000				DINAS KESEHATAN
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,50	13,295,268,800		1,778,514,653	84.15	2,538,776,151	84.56	2,481,750,746	84.56	4,260,265,399	100.07	32.04		DINAS KESEHATAN
				Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100				100		100		100	-	100.00			DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	425,268,800		87,978,048	100	181,167,640	100	163,632,491	100	251,610,539	100.00	59.17		DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	12,870,000,000		1,690,536,605	100	2,357,608,511	100	2,318,118,255	100	4,008,654,860	100.00	31.15		DINAS KESEHATAN
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3,771,000,000		720,076,714	1	889,694,500	1	873,385,294	1	1,593,462,008	100.00	42.26		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3,771,000,000		720,076,714	100	889,694,500	100	873,385,294	100	1,593,462,008	100.00	42.26		DINAS KESEHATAN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	N/A	N/A		8,855,000	45	7,800,000	75	7,800,000	75	16,655,000				DINAS KESEHATAN
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	N/A	N/A		8,855,000	100	7,800,000	100	7,800,000	100	16,655,000				DINAS KESEHATAN
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,50	15,570,358,400		2,214,516,832	84.15	3,098,392,005	85	1,297,584,598	84.56	3,512,101,430	100.07	22.56		DINAS KESEHATAN
				Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100				100		50	-	50	-	50.00			DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	550,358,400		117,303,560	100	241,694,620	50	87,163,317	50	204,466,877	50.00	37.15		DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	15,020,000,000		2,097,213,272	100	2,856,697,385	50	1,210,421,281	50	3,307,634,553	50.00	22.02		DINAS KESEHATAN
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3,335,000,000		747,132,050	1	661,835,000	1	650,333,098	1	1,397,465,148	100.00	41.90		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3,335,000,000		747,132,050	100	661,835,000	100	650,333,098	100	1,397,465,148	100.00	41.90		DINAS KESEHATAN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	N/A	N/A		10,725,000	45	28,300,000	75	28,300,000	75	39,025,000				DINAS KESEHATAN
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen					100	28,300,000	100	28,300,000	100	28,300,000				DINAS KESEHATAN
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,5	13,828,012,294		2,651,995,447	84.15	3,100,406,350	84.56	3,038,103,429	84.56	5,690,098,876	100.07	41.15		DINAS KESEHATAN
				Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100				100		100		100	-	100.00			DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	550,358,400		117,304,064	100	391,978,820	100	356,706,848	100	474,010,912	100.00	86.13		DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	13,277,653,894		2,534,691,383	100	2,708,427,530	100	2,681,396,581	100	5,216,087,964	100.00	39.28		DINAS KESEHATAN
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	5,837,137,464		1,013,585,828	1	655,034,000	0	119,872,500	0	1,133,458,328	-	19.42		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3,715,720,400		1,013,585,828	100	655,034,000	50	119,872,500	50	1,133,458,328	50.00	30.50		DINAS KESEHATAN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	N/A	N/A		7,365,000	45	43,445,000	75	35,845,000	75	43,210,000				DINAS KESEHATAN
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	N/A	N/A		7,365,000	100	43,445,000	100	35,845,000	100	43,210,000				DINAS KESEHATAN
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,50	10,172,628,656		1,722,799,382	84.15	2,222,342,523	84.56	2,218,141,400	84.56	3,940,940,782	100.07	38.74		DINAS KESEHATAN
				Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100				100		100		100	-	100.00			DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	550,358,400		117,304,064	100	181,580,940	100	180,340,980	100	297,645,044	100.00	54.08		DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	9,622,270,256		1,605,495,318	100	2,040,761,583	100	2,037,800,420	100	3,643,295,738	100.00	37.86		DINAS KESEHATAN
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3,325,000,000		738,163,351	1	761,566,000	1	757,462,011	1	1,495,625,362	100.00	44.98		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3,325,000,000		738,163,351	100	761,566,000	100	757,462,011	100	1,495,625,362	100.00	44.98		DINAS KESEHATAN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	N/A	N/A		25,280,000	45	105,735,000	75	105,735,000	75	131,015,000				DINAS KESEHATAN
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	N/A	N/A		13,480,000	100	105,735,000	100	105,735,000	100	119,215,000				DINAS KESEHATAN
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,50	8,211,531,396		1,354,105,842	84.15	1,707,085,016	84.56	1,654,307,708	84.56	3,008,413,550	100.07	36.64		DINAS KESEHATAN
				Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100			58,652,032	100	90,997,120	100	90,170,520	100	148,822,552	100.00	49.58		DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	300,179,200			100		100		100		100.00			DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	7,911,352,196		1,295,453,810	100	1,616,087,896	100	1,564,137,188	100	2,859,590,998	100.00	36.15		DINAS KESEHATAN
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3,325,000,000		778,302,256	1	594,837,000	1	591,383,946	1	1,369,686,202	100.00	41.19		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3,325,000,000		778,302,256	100	594,837,000	100	591,383,946	100	1,369,686,202	100.00	41.19		DINAS KESEHATAN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	N/A	N/A		1,150,000	45	105,210,000	75	105,210,000	75	106,360,000				DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5														16				
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	N/A	N/A		1,150,000	100	105,210,000	1	105,210,000	1	106,360,000			DINAS KESEHATAN				
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,50	11,687,289,115		1,754,540,712	84,15	2,116,184,026	84,56	894,739,370	84,56	2,649,280,082	100,07	22,67	DINAS KESEHATAN				
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	558,213,440		58,652,032	100	121,053,960	100	59,738,383	100	118,390,415	100,00	21,21	DINAS KESEHATAN				
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	11,387,109,915		1,695,888,680	100	1,995,130,066	100	835,000,987	100	2,530,889,667	100,00	22,23	DINAS KESEHATAN				
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3,325,000,000		701,302,574	1	567,251,500	1	555,751,500	1	1,257,054,074	100,00	37,81	DINAS KESEHATAN				
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3,325,000,000		701,302,574	100	567,251,500	100	555,751,500	100	1,257,054,074	100,00	37,81	DINAS KESEHATAN				
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	N/A	N/A		8,325,000	100	98,400,000	100	98,400,000	100	106,725,000			DINAS KESEHATAN				
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,50	4,306,089,600		1,415,077,135	84	1,713,981,186	84,56	1,682,947,635	84,56	3,098,024,770	100,07	71,95	DINAS KESEHATAN				
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	175,089,600		29,326,016	100	120,640,660	100	107,910,980	100	137,236,996	100,00	78,38	DINAS KESEHATAN				
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	8,000,500,000		1,385,751,119	100	1,593,340,526	100	1,575,036,655	100	2,960,787,774	100,00	37,01	DINAS KESEHATAN				
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3,335,000,000		1,022,080,827	1	753,368,000	1	677,110,588	1	1,699,191,415	100,00	50,95	DINAS KESEHATAN				
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3,335,000,000		1,022,080,827	100	753,368,000	100	677,110,588	100	1,699,191,415	100,00	50,95	DINAS KESEHATAN				
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,50	10,973,925,831		2,148,649,526	84,15	2,393,481,261	84,56	2,367,940,822	84,56	4,516,590,348	100,07	41,16	DINAS KESEHATAN				
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	425,268,800		87,978,048	100	151,110,800	100	146,068,540	100	234,046,588	100,00	55,03	DINAS KESEHATAN				
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	10,512,657,031		2,060,671,478	100	2,242,370,461	100	2,221,872,282	100	4,282,543,760	100,00	40,74	DINAS KESEHATAN				
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	4,328,000,000		974,511,317	1	665,697,000	1	650,586,748	1	1,625,098,065	100,00	37,55	DINAS KESEHATAN				
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	4,328,000,000		974,511,317	100	665,697,000	18,067	650,586,748	18,067	1,625,098,065	18,067,00	37,55	DINAS KESEHATAN				
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	N/A	N/A		6,725,000	45	35,197,500	75	34,677,500	75	41,402,500			DINAS KESEHATAN				
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	N/A	N/A		3,700,000	100	79,035,000	100	79,035,000	100	82,735,000			DINAS KESEHATAN				
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,50	1,811,378,240		1,538,940,138	84,15	1,561,945,852	84,56	1,542,680,518	84,56	3,081,620,656	100,07	170,13	DINAS KESEHATAN				
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	300,179,200		58,652,032	100	121,053,960	100	113,455,304	100	172,107,336	100,00	57,33	DINAS KESEHATAN				
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	6,768,200,000		1,480,288,106	100	1,440,891,892	100	1,429,225,214	100	2,909,513,320	100,00	42,99	DINAS KESEHATAN				
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3,678,832,000		879,432,088	1	598,400,000	1	587,853,032	1	1,467,285,120	100,00	39,88	DINAS KESEHATAN				
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3,678,832,000		879,432,088	100	598,400,000	100	587,853,032	100	1,467,285,120	100,00	39,88	DINAS KESEHATAN				
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	N/A	N/A		3,700,000	45	79,035,000	0	79,035,000	0	82,735,000			DINAS KESEHATAN				
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA	N/A	N/A		3,700,000	100	79,035,000	100	79,035,000	100	82,735,000			DINAS KESEHATAN				
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,50	9,019,884,235		2,243,236,704	84,15	2,552,715,936	84,56	2,447,557,745	84,56	4,690,794,449	100,07	52,01	DINAS KESEHATAN				
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	425,268,800	12	87,977,346	100	211,224,480	100	180,341,040	112	268,318,386	112,00	63,09	DINAS KESEHATAN				
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	8,594,615,435		2,155,259,358	100	2,341,491,456	100	2,267,216,705	100	4,422,476,063	100,00	51,46	DINAS KESEHATAN				
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	4,245,000,000		1,238,434,326	1	879,300,000	1	868,408,963	1	2,106,843,289	100,00	49,63	DINAS KESEHATAN				
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	4,245,000,000		1,238,434,326	100	879,300,000	100	868,408,963	100	2,106,843,289	100,00	49,63	DINAS KESEHATAN				
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	N/A	N/A		7,000,000	45	7,000,000	75	7,000,000	75	7,000,000			DINAS KESEHATAN				
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	N/A	N/A		7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000			DINAS KESEHATAN				
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,50	10,728,853,829		1,863,241,075	84	2,146,991,346	84,56	2,093,837,467	84,56	3,957,078,542	100,07	36,88	DINAS KESEHATAN				
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	175,089,600		29,326,016	100	150,697,500	100	150,284,200	100	179,610,216	100,00	102,58	DINAS KESEHATAN				
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	10,553,764,229		1,833,915,059	100	1,996,293,846	100	1,943,553,267	100	3,777,468,326	100,00	35,79	DINAS KESEHATAN				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RPKD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3,835,000,000		784,533,768	1	672,324,500	1	654,340,886		1,438,874,654	100.00	37.52	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3,835,000,000		784,533,768	100	672,324,500	100	654,340,886	100	1,438,874,654	100.00	37.52	DINAS KESEHATAN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	N/A	N/A		9,015,000	45	18,750,000	75	18,750,000	75	27,765,000			DINAS KESEHATAN
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	N/A	N/A		9,015,000	100	18,750,000	100	18,750,000	100	27,765,000			DINAS KESEHATAN
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,50	6,938,364,000		1,364,632,484	84.15	1,866,862,106	84.56	1,778,031,422	84.56	3,142,663,906	100.07	45.29	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100				100		100		100		100.00		DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	675,448,000	12	146,627,740	100	272,164,760	100	257,120,532	112	403,748,272	112.00	59.77	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	7,886,564,240		1,218,004,744	100	1,594,697,346	100	1,520,910,890	100	2,738,915,634	100.00	34.73	DINAS KESEHATAN
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3,362,000,000		683,505,514	1	873,035,000	1	861,625,873	1	1,545,131,387	100.00	45.96	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3,362,000,000		683,505,514	100	873,035,000	100	861,625,873	100	1,545,131,387	100.00	45.96	DINAS KESEHATAN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	N/A	N/A		7,400,000	45	16,115,000	75	16,115,000	75	23,515,000			DINAS KESEHATAN
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	N/A	N/A		7,400,000	100	16,115,000	100	16,115,000	100	23,515,000			DINAS KESEHATAN
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,50	6,654,111,600		1,318,649,735	84.15	1,472,724,348	84.59	1,431,358,444	84.59	2,750,008,179	100.11	41.33	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	175,089,600		29,325,890	100	150,697,500	100	109,331,902	100	138,657,792	100.00	79.19	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	6,479,022,000		1,289,323,845	100	1,322,026,848	100	1,322,026,542	100	2,611,350,387	100.00	40.30	DINAS KESEHATAN
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	4,245,000,000		956,474,154	1	746,325,000	1	689,125,809	1	1,645,599,963	100.00	38.77	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	4,245,000,000		956,474,154	100	746,325,000	100	689,125,809	100	1,645,599,963	100.00	38.77	DINAS KESEHATAN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	N/A	N/A		16,418,450	45	15,600,000	75	15,600,000	75	32,018,450			DINAS KESEHATAN
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA	N/A	N/A		16,418,450	100	15,600,000	100	15,600,000	100	32,018,450			DINAS KESEHATAN
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,50	14,952,878,400		2,747,616,137	84.15	3,165,763,593	84.56	3,088,441,019	84.56	5,836,057,156	100.07	39.03	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	550,358,400		117,303,560	100	237,561,620	100	236,321,615	100	353,625,175	100.00	64.25	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	14,402,520,000		2,630,312,577	100	2,928,201,973	100	2,852,119,404	100	5,482,431,981	100.00	38.07	DINAS KESEHATAN
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3,520,000,000		755,320,198	1	672,605,000	1	668,143,033	1	1,423,463,231	100.00	40.44	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3,520,000,000		755,320,198	100	672,605,000	100	668,143,033	100	1,423,463,231	100.00	40.44	DINAS KESEHATAN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	N/A	N/A		15,000,000	45	31,595,000	75	31,595,000	75	46,595,000			DINAS KESEHATAN
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	N/A	N/A		15,000,000	100	31,595,000	100	31,595,000	100	46,595,000			DINAS KESEHATAN
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,50	12,850,158,400		2,533,878,138	84.15	3,278,203,493	84.56	3,238,057,128	84.56	5,771,935,266	100.07	44.92	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	550,358,400	12	117,303,560	100	211,637,780	100	197,435,930	112	314,739,490	112.00	57.19	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	12,299,800,000		2,416,574,578	100	3,066,565,713	100	3,040,621,198	100	5,457,195,776	100.00	44.37	DINAS KESEHATAN
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	4,297,000,000		812,526,920	1	707,369,000	1	680,903,018	1	1,493,429,938	100.00	34.76	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	865,000,000		812,526,920	100	707,369,000	100	680,903,018	100	1,493,429,938	100.00	172.65	DINAS KESEHATAN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	N/A	N/A		13,887,500	45	27,500,000	75	27,500,000	75	41,387,500			DINAS KESEHATAN
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	N/A	N/A		13,887,500	100	27,500,000	100	27,500,000	100	41,387,500			DINAS KESEHATAN
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,50	5,350,037,982		2,019,522,309	84.15	2,517,853,728	84.56	2,465,920,435	84.56	4,485,442,744	100.07	83.84	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	175,089,600		29,326,016	100	150,697,500	100	101,039,076	100	130,365,092	100.00	74.46	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	10,156,033,382		1,990,196,293	100	2,367,156,228	100	2,364,981,359	100	4,355,077,652	100.00	42.88	DINAS KESEHATAN
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3,481,000,000		741,548,661	1	667,117,500	1	663,242,500	1	1,404,791,161	100.00	40.36	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	720,000,000		741,548,661	100	667,117,500	100	663,242,500	100	1,404,791,161	100.00	195.11	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RPKD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16			
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	N/A	N/A		2,062,500	45	49,282,500	75	49,282,500	75	51,345,000			DINAS KESEHATAN		
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	N/A	N/A		2,062,500	100	49,282,500	100	49,282,500	100	51,345,000			DINAS KESEHATAN		
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,50	8,246,068,800		1,546,009,719	84.15	1,732,380,940	84.56	1,669,812,746	84.56	3,215,822,465	100.07	39.00	DINAS KESEHATAN		
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	425,268,800		83,979,520	100	181,580,940	100	150,284,146	100	234,263,666	100.00	55.09	DINAS KESEHATAN		
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	7,820,800,000		1,462,030,199	100	1,550,800,000	100	1,519,528,600	100	2,981,558,799	100.00	38.12	DINAS KESEHATAN		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3,841,000,000		752,174,720	1	879,157,000	1	852,296,179	1	1,604,470,899	100.00	41.77	DINAS KESEHATAN		
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3,841,000,000		752,174,720	100	879,157,000	100	852,296,179	100	1,604,470,899	100.00	41.77	DINAS KESEHATAN		
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	N/A	N/A		3,622,250	45	66,975,000	75	66,975,000	75	70,597,250			DINAS KESEHATAN		
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	N/A	N/A		3,622,250	100	66,975,000	100	66,975,000	100	70,597,250			DINAS KESEHATAN		
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,50	4,040,179,200		1,551,534,286	84.15	1,235,387,292	84.56	1,235,291,256	84.56	2,786,825,542	100.07	68.98	DINAS KESEHATAN		
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	300,179,200		775,767,143	100	121,053,960	100	121,053,960	100	896,821,103	100.00	298.76	DINAS KESEHATAN		
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	4,053,000,000		775,767,143	100	1,114,333,332	100	1,114,237,296	100	1,890,004,439	100.00	46.63	DINAS KESEHATAN		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3,738,000,000		792,285,510	1	856,545,000	1	852,253,482	1	1,644,538,992	100.00	44.00	DINAS KESEHATAN		
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3,738,000,000		792,285,510	100	856,545,000	100	852,253,482	100	1,644,538,992	100.00	44.00	DINAS KESEHATAN		
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	N/A	N/A			45	52,125,000	75	52,125,000	75	52,125,000			DINAS KESEHATAN		
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	N/A	N/A			100	52,125,000	100	52,125,000	100	52,125,000			DINAS KESEHATAN		
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,50	13,975,620,063		2,662,470,155	84.15	3,386,722,043	84.56	3,345,690,029	84.56	6,008,160,184	100.07	42.99	DINAS KESEHATAN		
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	550,358,400		117,302,192	100	241,694,620	100	221,195,940	100	338,498,132	100.00	61.51	DINAS KESEHATAN		
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	13,425,261,663		2,545,167,963	100	3,145,027,423	100	3,124,494,089	100	5,669,662,052	100.00	42.23	DINAS KESEHATAN		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	4,073,844,080		989,953,825	1	692,062,500	1	676,654,905	1	1,666,608,730	100.00	40.91	DINAS KESEHATAN		
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	4,073,844,080		989,953,825	100	692,062,500	100	676,654,905	100	1,666,608,730	100.00	40.91	DINAS KESEHATAN		
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	N/A	N/A			45	18,287,500	75	18,287,500	75	18,287,500			DINAS KESEHATAN		
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	N/A	N/A			100	18,287,500	100	18,287,500	100	18,287,500			DINAS KESEHATAN		
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,50	10,625,953,052		1,989,769,766	84.15	2,558,148,583	84.56	2,537,176,246	84.56	4,526,946,012	100.07	42.60	DINAS KESEHATAN		
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	425,268,800		87,975,648	100	211,637,780	100	190,767,360	100	278,743,008	100.00	65.55	DINAS KESEHATAN		
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	10,200,684,252		1,901,794,118	100	2,346,510,803	100	2,346,408,886	100	4,248,203,004	100.00	41.65	DINAS KESEHATAN		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	4,246,000,000	501	18,975,000	1	668,000,000	1	616,424,100	502	635,399,100	50.200,00	14.96	DINAS KESEHATAN		
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	4,246,000,000	501	18,975,000	100	668,000,000	100	616,424,100	601	635,399,100	601.00	14.96	DINAS KESEHATAN		
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	N/A	N/A		5,100,000	45	30,600,000	75	29,240,000	75	34,340,000			DINAS KESEHATAN		
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	N/A	N/A		5,100,000	100	30,600,000	100	29,240,000	100	34,340,000			DINAS KESEHATAN		
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,50	14,750,448,000		2,696,886,486	84.15	3,272,625,598	84.56	1,408,973,048	84.56	4,105,859,534	100.07	27.84	DINAS KESEHATAN		
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	675,448,000		142,327,944	100	242,107,920	100	210,502,740	100	352,830,684	100.00	52.24	DINAS KESEHATAN		
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	14,075,000,000		2,554,558,542	100	3,030,517,878	100	1,198,470,308	100	3,753,028,850	100.00	26.66	DINAS KESEHATAN		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3,585,000,000		814,367,970	1	696,508,500	1	661,088,500	1	1,475,456,470	100.00	41.16	DINAS KESEHATAN		
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3,585,000,000		814,367,970	100	696,508,500	100	661,088,500	100	1,475,456,470	100.00	41.16	DINAS KESEHATAN		
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	N/A	N/A			45	13,835,000	75	13,835,000	75	13,835,000			DINAS KESEHATAN		
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	N/A	N/A			100	13,835,000	100	13,835,000	100	13,835,000			DINAS KESEHATAN		



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPDP Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP tahun )		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15=14/6 x100%	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		13		14 = 7 + 13		16		
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,50	8.511,379,200		1.689,092,814	84.15	2.567,540,101	84.56	2.498,412,818	84.56	4.187,505,632	100.07	49.20	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	300,179,200		1.689,092,814	100	121,053,960	100	116,094,360	100	1,805,187,174	100.00	601.37	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	8.211,200,000			100	2.446,486,141	100	2.382,318,458	100	2.382,318,458	100.00	29.01	DINAS KESEHATAN
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	4.247,000,000		862,863,614	1	628,781,000	1	613,076,458	1	1,475,940,072	100.00	34.75	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	4.247,000,000		862,863,614	100	628,781,000	100	613,076,458	100	1,475,940,072	100.00	34.75	DINAS KESEHATAN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	N/A	N/A		7,990,000	45	80,630,000		80,630,000	0	88,620,000			DINAS KESEHATAN
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA	N/A	N/A		7,990,000	100	80,630,000		80,630,000	100	88,620,000			DINAS KESEHATAN
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,50	13.315,878,200		2.218,178,125	84.15	2.822,936,972	84.59	2.664,760,698	84.59	4.882,938,823	100.11	36.67	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	550,358,400		117,304,064	100	241,694,620	100	240,454,720	100	357,758,784	100.00	65.00	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.10.01	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	12.765,519,800		2.100,874,061	100	2.581,242,352	100	2.424,305,978	100	4.525,180,039	100.00	35.45	DINAS KESEHATAN
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3.335,000,000		764,604,651	1	626,063,500	1	623,024,534	1	1,387,629,185	100.00	41.61	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3.335,000,000		764,604,651	100	626,063,500	100	623,024,534	100	1,387,629,185	100.00	41.61	DINAS KESEHATAN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	N/A	N/A			45	72,602,500	75	72,602,500	75	72,602,500			DINAS KESEHATAN
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA	N/A	N/A			100	72,602,500		72,602,500	100	72,602,500			DINAS KESEHATAN
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,50	8.414,858,400		1.567,666,629	84.15	1.981,524,853	84.15	983,496,832	84.15	2.551,163,461	99.59	30.32	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	550,358,400		117,304,064	100	241,694,620	100	240,454,636	100	357,758,780	100.00	65.00	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	7.864,500,000		1.450,362,565	100	1.739,830,233	50	743,042,196	50	2,193,404,761	50.00	27.89	DINAS KESEHATAN
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3.335,000,000		661,384,710	1	821,970,000	1	753,325,829	1	1,414,710,539	100.00	42.42	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3.335,000,000		661,384,710	100	821,970,000	100	753,325,829	100	1,414,710,539	100.00	42.42	DINAS KESEHATAN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	N/A	N/A		15,485,000	45	17,880,000	75	17,880,000	75	33,365,000			DINAS KESEHATAN
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA	N/A	N/A		11,510,000	100	17,880,000		17,880,000	100	29,390,000			DINAS KESEHATAN
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,50	7.539,114,231		1.404,697,029	84.15	1.652,801,628	84.56	1.622,624,069	84.56	3,027,321,098	100.07	40.15	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	300,179,200	12	58,652,032	100	181,167,640	100	160,108,288	112	218,760,320	112.00	72.88	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	7.238,935,031		1.346,044,997	100	1.471,633,988	100	1.462,515,781	100	2.808,560,778	100.00	38.80	DINAS KESEHATAN
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3.325,000,000		669,425,810	1	646,176,000	1	583,572,100	1	1,252,997,910	100.00	37.68	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3.325,000,000		669,425,810	100	646,176,000	100	583,572,100	100	1,252,997,910	100.00	37.68	DINAS KESEHATAN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	N/A	N/A	100	3,225,000	45	44,750,000	75	44,750,000	175	47,975,000			DINAS KESEHATAN
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA	N/A	N/A	1	100,000	100	44,750,000	100	44,750,000	101	44,850,000			DINAS KESEHATAN
<b>Jumlah Anggaran Sasaran 2</b>							<b>2,100,010,685,998.00</b>		<b>471,801,831,627.13</b>		<b>479,609,311,598.00</b>		<b>#REF!</b>					
<b>SASARAN</b>		<b>Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan</b>																
<b>7 Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan</b>				Angka Harapan Lama sekolah	tahun	15.32	3,601,414,764,592	15.48	681,505,891,819	15.25	720,783,042,182	#REF!	#REF!	#REF!				KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Persentase capaian SPM Pendidikan	persen	100	511,308,344,932	100	171,857,063,547	100	179,160,847,366	100	178,405,775,060	100	350,262,838,607	100.00	68.50	Dikpora
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Persentase capaian SPM Pendidikan SD	persen	100	240,879,740,052	100	89,602,945,606	100	92,436,456,443	100	91,624,195,017	100	181,227,140,623	100.00	75.24	Dikpora
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Persentase capaian SPM Pendidikan SMP	persen	100	111,681,832,240	100	55,493,667,574	100	56,256,844,903	100	56,664,859,859	100	112,158,527,433	100.00	100.43	Dikpora
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD	persen	100	130,084,351,200	100	22,947,454,969	100	25,791,812,090	100	25,590,602,260	100	25,590,602,260	100.00	19.67	Dikpora
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase capaian SPM Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	persen	100	28,662,421,440	100	3,812,995,398	100	4,675,733,930	100	4,526,117,924	100	4,526,117,924	100.00	15.79	Dikpora
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	persen	83	1,092,253,210,600	66	192,313,910,646	70	195,160,457,790	70	183,768,995,442	70	376,082,906,088	84.34	34.43	Dikpora
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	guru	8.339	1,092,253,210,600	8339	192,313,910,646	8.339	195,160,457,790	8339	183,768,995,442	8339	376,082,906,088	100.00	34.43	Dikpora

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RPKD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD tahun )		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5							8		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%	16
		1.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	persen	5	13,345,000,000	4.18	670,932,600	4	158,904,200	4.48	154,854,200	4.48	825,786,800	83.43	6.19	Dikpora
		1.01.05.01	Pendidikan Berbasis Budaya	Kurikulum Mulok yang disusun	buah	10	13,345,000,000	2	670,932,600	4	158,904,200	4	154,854,200	4	825,786,800	40.00	6.19	Dikpora
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi Olahraga	mendali	130	46,900,409,830		10,195,360,410	65	13,408,345,069	65	13,307,747,480	65	23,503,107,890	50.00	50.11	Dikpora
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	4,265,266,810	1	448,567,960	1	1,186,319,840	1	1,152,524,425	1	1,601,092,385	100.00	37.54	Dikpora
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	10,987,053,600	1	1,522,842,950	1	2,176,069,980	1	2,137,059,445	1	3,659,902,395	100.00	33.31	Dikpora
		2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	dokumen	1	4,839,059,340	1	750,000,000		-	0	-	0	750,000,000	-	15.50	Dikpora
		2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	dokumen	1	21,378,118,680	1	7,120,000,000	1	9,966,943,829	1	9,941,384,042	1	17,061,384,042	100.00	79.81	Dikpora
		2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	dokumen	1	5,430,911,400	1	353,949,500	1	79,011,420	1	76,779,568	1	430,729,068	100.00	7.93	Dikpora
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	persen	84	12,376,702,400		1,499,606,700	81	1,792,295,260	81	1,732,384,383	81	3,231,991,083	96.43	26.11	Dikpora
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirusaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirusaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	dokumen	1	10,924,623,280	80	1,299,606,700	1	1,592,295,260	1	1,532,384,383	1	2,831,991,083	100.00	25.92	Dikpora
		2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1,452,079,120	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	400,000,000	100.00	27.55	Dikpora
		2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Organisasi Pramuka yang aktif	organisasi	18	3,215,053,600	18	500,000,000	18	300,000,000	18	211,550,000	18	711,550,000	100.00	22.13	Dikpora
		2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	dokumen	1	3,215,053,600	1	500,000,000	1	300,000,000	1	211,550,000	1	711,550,000	100.00	22.13	Dikpora
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	82	1,882,712,086,259	82	298,197,475,798	82	323,748,655,550	82	295,233,608,290	82	593,431,084,088	100.00	31.52	Dikpora
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100	4,217,701,500	100	945,200,500	100	1,049,357,855	100	1,035,156,659	100	1,980,357,159	100.00	46.95	Dikpora
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100	1,856,141,779,084	100	292,664,935,406	100	319,014,444,103	100	291,110,711,733	100	583,775,647,139	100.00	31.45	Dikpora
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	150,000,000	100	-	-	0	-	0	-	-	-	-	Dikpora
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	9,997,917,661	100	1,098,301,910	100	1,180,008,558	100	967,951,093	100	2,066,253,003	100.00	20.67	Dikpora
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	8,590,380,224	100	2,676,242,870	100	1,725,248,779	100	1,466,805,262	100	4,143,048,132	100.00	48.23	Dikpora
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	3,614,307,790	100	812,795,112	100	779,596,255	100	652,983,543	100	1,465,778,655	100.00	40.55	Dikpora
		2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI AKIP	ANGKA	80	34,709,354,271	82.52	5,361,905,750	80	5,759,333,583	82.32	5,664,724,550	82.32	11,026,630,300	102.90	31.77	Dispursip
		2.23.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100	15,050,000	100	600,000	100	600,000	100	600,000	100	1,200,000	100.00	7.97	Dispursip
		2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi keuangan Perangkat Daerah	persen	100	31,294,221,995	100	4,639,357,814	100	4,999,853,527	101.3860014	4,925,144,934	101.386	9,564,502,748	101.39	30.56	Dispursip
		2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	persen	100	559,244,236	98	144,074,427	100	182,208,177	105.4285714	180,585,586	105.42857	324,660,013	105.43	58.05	Dispursip
		2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	1,269,110,054	100	231,423,090	100	340,572,570	100	328,065,650	100	559,488,740	100.00	44.09	Dispursip
		2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	1,571,727,986	100	346,450,419	100	236,099,309	100	230,328,380	100	576,778,799	100.00	36.70	Dispursip
		2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG TERAKREDITASI	PERSEN	19.95	4,594,602,700	10.49	909,636,368	12.55	1,294,203,364	13.16	1,285,883,234	13.16	2,195,519,602	65.96	47.78	Dispursip
		2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pembinaan perpustakaan	perpustakaan	65	4,334,602,700	17	909,636,368	29	1,073,653,364	30	1,065,783,234	30	1,975,419,602	46.15	45.57	Dispursip
		2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan masyarakat gemar membaca di masyarakat	laporan	4	260,000,000	0	-	1	220,550,000	1	220,100,000	1	220,100,000	25.00	84.65	Dispursip
<b>Jumlah Anggaran Sasaran 3</b>							<b>3,601,414,764,592</b>		<b>681,505,891,819</b>		<b>720,783,042,182</b>		<b>#REF!</b>					
<b>SASARAN 4: Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah</b>																		
		8	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Desa /Kalurahan Pamor Budaya	Kalurahan	12	173,514,991,136	7	19,318,941,325	6	28,468,888,587	#REF!	#REF!	#REF!				DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA)
		2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Angka	81.60	25,472,942,311	82.00	4,890,928,641	81.00	5,678,804,637	82.00	5,494,536,539	101.23	10,385,465,180	101.23	0.41	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Capaian Kinerja Perencanaan dan	Persen	100	174,542,600	100	87,907,500	100	54,000,000	100	53,990,000	100	141,897,500	1.00	0.81	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi	Persen	95	20,798,823,890	95	3,964,863,608	95	4,469,603,621	95	4,295,363,491	95	8,260,227,099	1.00	0.40	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik	Persen	100	14,617,500	100	2,867,500	100	1,200,000	100	1,185,000	100	4,052,500	1.00	0.28	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi	Persen	95	197,170,000	95	49,065,000	95	19,000,000	95	18,850,000	95	67,915,000	1.00	0.34	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik	Persen	100	367,903,462	100	46,873,450	100	95,093,212	100	94,729,000	100	141,602,450	1.00	0.38	DINAS KEBUDAYAAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RPKD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16	
		2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa	Persen	100	1.703.698.760	100	416.056.019	100	655.078.600	100	649.732.922	100	1.065.788.941	1.00	0.63	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang	Persen	95	1.195.008.064	95	191.693.314	95	244.770.000	95	241.263.396	95	432.956.710	1.00	0.36	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Cagar Budaya Yang	Persen	90	23.076.829.015	62.13	1.404.356.828	68.38%	2.713.864.000	70.22%	2.677.991.550	70.22%	4.082.348.378	0.70	0.18	DINAS KEBUDAYAAN	
			Bahasa Sastra yang dilestarikan	Pelestarian		132	30.355.109.550	18	3.244.355.824	46	3.672.435.250	46	3.628.374.886	46	6.872.730.710	0.35	0.23	DINAS KEBUDAYAAN	
			Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	Pelestarian		1.215	94.610.110.260	219	9.779.300.032	681	16.403.784.700	676	14.812.621.530	676	24.591.921.562	0.56	0.26	DINAS KEBUDAYAAN	
			Jumlah danais				148.042.048.825		14.428.012.684		22.790.083.950		21.118.987.966		35.547.000.650		0.24	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08.5.01	Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan	Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan,	Jenis	11	28.611.186.606	11	3.244.355.824	11	3.672.435.250	11	3.628.374.886	11	6.872.730.710	1.00	0.24	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08.5.02	Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan	Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak	Rekomendasi	110	24.252.940.700	22	1.404.356.828	22	2.713.864.000	22	2.677.991.550	44	4.082.348.378	2.00	0.17	DINAS KEBUDAYAAN	
			Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya****)	Dokumen Lingkungan	Dokumen	1	2.200.000.000	1	539.765.050	-	-	-	-	1	539.765.050	1.00	0.25	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08.5.04	Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan	Pemenuhan Sarana Prasarana Lembaga	Jenis	7	9.025.110.000	1	2.755.480.000	2	1.647.332.750	2	1.621.370.000	3	4.376.850.000	0.43	0.48	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08.5.07	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kali	1.151	70.283.256.839	211	6.484.054.982	397	14.756.451.950	392	13.191.251.530	603	19.675.306.512	0.52	0.28	DINAS KEBUDAYAAN	
			Jumlah Anggaran Sasaran 4				173,514,991,136		19,318,941,325		28,468,888,587		#REF!		#REF!				
<b>SASARAN 5 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis</b>																			
	9 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis			Persentase penanganan gangguan ketertarikan ketertarikan umum dan perlindungan masyarakat	Persen	100	147,689,131,988	100	18,584,297,565	100	43,468,731,863	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	53,675,302,539	81,67	8,047,916,951	79	8,302,875,289	96	7,980,078,910	96	16,027,995,861	115,80	29,86	BADAN KESATUAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.01	Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	155,145,852	99	25,130,000	100	25,402,500	100	25,370,000	100	50,500,000	99,87	32,55	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	46,181,503,650	85	6,627,218,906	100	6,911,480,146	96	6,617,721,291	96	13,244,940,197	95,75	28,68	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	1,049,432,385	97	190,907,200	100	251,330,000	99		99	440,358,700	99,25	41,96	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	1,371,141,592	99	403,259,550	100	131,191,288	99	129,878,820	99	533,138,370	99,00	38,88	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	2,140,176,427	98	354,982,494	100	342,172,960	99	338,464,203	99	693,446,697	98,92	32,40	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	100	2,699,902,633	97	446,418,801	100	555,398,395	98	541,515,116	98	987,933,917	97,50	36,59	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	80,000,000			100	85,900,000	90	77,677,980	90	77,677,980	90,43	97,10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	15,729,943,044	98	3,055,633,193	100	4,251,209,387	98	4,167,841,023	98	7,223,474,216	98,04	45,92	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelanggaran kantrantibus yang ditindaklanjuti	Persen	100	15,729,943,044	98	2,232,778,205	100	2,874,447,540	97	2,799,505,638	97	5,032,283,843	97,39	31,99	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	Persen	100	2,768,842,497	99	822,854,988	100	1,376,261,847	99	1,367,835,385	99	2,190,690,373	99,39	79,12	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Capaian kegiatan pembinaan PPNS	Persen	100	2,000,000			100	500,000	100	500,000	100	500,000	100,00	25,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	Persen	27	9,600,000,000	99	554,666,750	45,44	388,525,000	97	378,087,500	97	932,754,250	357,51	9,72	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	2.22.08.2.09	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan	Pedukuhan	262	9,600,000,000	99	554,666,750	155	388,525,000	97	378,087,500	97	932,754,250	37,14	9,72	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Lokasi yang diprakondisi	Persen	33	740,000,001		-	100	150,000,000	100.00	148,250,000	100.00	148,250,000	3.03	0.20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Cakupan lokasi yang prakondisi	Persen	33	740,000,001		-	100	150,000,000	100.00	148,250,000	100.00	148,250,000	3.03	0.20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	angka	89	17,623,673,434	80%	3,041,008,039	100	3,542,337,197	96.66	3,424,001,752	96.66	6,465,009,791	108,61	0,37	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	08.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian kinerja perencanaan Penganggaran evaluasi kerja perangkat daerah	persen	100	186,000,000	80%	18,500,000	100	27,925,000	99.94	27,907,500	99.94	46,407,500	99,94	0,25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Pembayaran gaji ASN dan Tunjangan Kinerja	persen	100	14,515,810,615		2,552,538,890	100	2,701,864,406	95.93	2,591,883,626	95.93	5,144,422,516	95,93	0,35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja pengelolaan Adm Umum	persen	100	951,792,914	100	149,119,564	100	334,338,000	100.00	331,158,104	100.00	480,277,668	100,00	0,50	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	x.xx.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	persen	100	348,450,000	1	4,200,000	100	122,947,000	100.00	122,050,000	100.00	126,250,000	100,00	0,36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	x.xx.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian pengelolaan administrasi umum	persen	100	375,429,360	100	121,586,240	100	51,577,500	98.00	50,887,322	98.00	172,473,562	98,00	0,46	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian pengelolaan administrasi umum	persen	100	1,246,190,545	100	195,063,345	100	303,685,291	100.00	300,115,200	100.00	495,178,545	100,00	0,40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	100	1,998,009,000	100	526,282,000	100	943,402,730	100.00	908,416,250	100.00	1,434,698,250	100,00	0,72	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	persen	100	1,998,009,000	100	526,282,000	100	943,402,730	100.00	908,416,250	100.00	1,434,698,250	100,00	0,72	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RPKD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan kelurahan dalam pemahaman berdemokrasi	Persen	100	43,579,614,380	100	2,395,378,400	100	24,179,190,640	100.00	24,139,282,595	100.00	26,534,660,995	100.00	0.61	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Cakupan kalurahan dalaam pemahaman demokrasi	persen	100	43,579,614,380	100	2,395,378,400	100	24,179,190,640	100.00	24,139,282,595	100.00	26,534,660,995	100.00	0.61	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pembinaan Ormas	Persen	37	706,049,000	18	61,000,000	100	289,980,000	100.00	286,346,852	100.00	347,346,852	270.27	0.49	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan pembinaan Ormas	persen	37	706,049,000	100	61,000,000	100	289,980,000	100.00	286,346,852	100.00	347,346,852	270.27	0.49	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	FKUB aktif	Persen	100	1,960,293,590	100	604,754,232	100	1,053,031,320	94.64	996,548,750	94.64	1,601,302,982	94.64	0.82	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		08.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kerukunan antar umat beragama	persen	100	1,960,293,590	100	604,754,232	100	1,053,031,320	95.00	996,548,750	95.00	1,601,302,982	95.00	0.82	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	Persen	100	2,076,247,000	100	297,658,000	100	368,180,300	90.00	324,880,700	90.00	622,538,700	90.00	0.30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		08.01.06.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Perumusan bahan kewaspadaan dini berkaitan dengan permintaan OPD	persen	100	2,076,247,000	100	297,658,000	100	368,180,300	90.00	324,880,700	90.00	622,538,700	90.00	0.30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
Jumlah Anggaran Sasaran 5							147,689,131,988		18,584,297,565		43,468,731,863		#REF!						
<b>SASARAN 6: Terwujudnya pemerataan pendapatan</b>																			
10 Terwujudnya pemerataan pendapatan				Rasio Gini	Angka		0.31		495,048,543,430	0.410	99,704,180,347	0.350	121,322,445,765	#REF!	#REF!	#REF!			PANGAN DAN PERTANIAN
	2.9.2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAUATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	Persen	100	92,900,000	14.28	2,900,000	28.57	11,225,000	28.57	11,225,000	28.57	14,125,000	28.57	15.20	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		2.9.2.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang operasional	Unit	1	92,900,000	1	2,900,000	1	11,225,000	1	11,225,000	1	14,125,000	100.00	15.20	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		2.9.3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Persen	157	5,875,635,120	149	941,091,016	151	1,870,618,350	151	1,851,456,130	151	2,792,547,146	96.18	47.53	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		2.9.3.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Persen	100	767,085,120	100	231,481,016	100	328,643,700	100	328,366,590	100	559,847,606	100.00	72.98	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		2.9.3.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Persen	100	3,124,800,000	100	112,625,000	100	335,601,500	100	333,336,000	100	445,961,000	100.00	14.27	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	SK Bupati			1	300,000				0	0	0	300,000		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		2.9.3.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor PPH	Poin	90.4	1,983,750,000	92.1	596,685,000	91.6	1,206,373,150	92.2	1,189,753,540	92.2	1,786,438,540	101.99	90.05	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		2.9.4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	Persen	17.33	1,038,687,000	22.67	304,762,000	21.33	461,350,000	21.33	460,352,360	21.33	765,114,360	123.08	73.66	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		2.9.4.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya peta ketahanan pangan	Dokumen	1	272,887,000	1	27,987,000	1	29,921,900	1	29,921,900	1.00	57,908,900	100.00	21.22	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		2.9.4.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertangannya kerawanan pangan	Persen	100	765,800,000	100	276,775,000	100	431,428,100	100	430,430,460	100	707,205,460	100.00	92.35	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		2.9.5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Persen	140	300,000,000	100	27,325,000	100	48,725,000	100	48,022,000	100	75,347,000	71.43	25.12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		2.9.5.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Persen	100	300,000,000	100	27,325,000	100	48,725,000	100	48,022,000	100	75,347,000	100.00	25.12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan	Persen	58.67	1,815,000,000	37.33	233,841,035	43	189,252,500	43	186,871,500	43	420,712,535	73.29	23.18	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		2.22.8.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian kinerja pengembangan lumbung mataraman	Persen	100	1,815,000,000	100	233,841,035	100	189,252,500	100	186,871,500	100	420,712,535	100.00	23.18	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPd Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
		1.3.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	2,833,025,000	100	98,095,150	100	1,382,210,240	100	1,123,579,590	100	1,221,674,740	100.00	43.12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		1.3.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian kinerja pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	2,833,025,000	100	98,095,150	100	1,382,210,240	100	1,123,579,590	100	1,221,674,740	100.00	43.12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	121,886,248,662	86	23,493,829,323	85	26,616,848,479	0	25,308,632,740	0	48,802,462,063	-	40.04	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	180,000,000	100	90,624,500	100	152,160,000	100	144,182,500	100	234,807,000	100.00	130.45	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	110,636,032,976	100	20,965,820,986	100	22,582,483,145	100	21,551,458,920	100	42,517,279,906	100.00	38.43	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	2,020,005,841	100	488,152,210	100	1,027,194,879	100	910,038,983	100	1,398,191,193	100.00	69.22	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	695,400,000	100	519,224,500	100	48,750,000	100	48,400,010	100	567,624,510	100.00	81.63	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	Persen	100	4,633,208,838	100	603,750,655	100	1,715,845,050	100	1,579,189,003	100	2,182,939,658	100.00	47.12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100	3,721,601,007	100	826,256,472	100	1,056,915,405	100	1,041,864,324	100	1,868,120,796	100.00	50.20	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan sarana pertanian	Persen	100	15,120,752,830	100	3,351,012,077	100	5,866,727,288	100	5,421,985,825	100	8,772,997,902	100.00	58.02	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.2.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran	Persen	100	3,271,805,550	100	1,831,485,885	100	4,465,539,408	100	4,030,557,057	100	5,862,042,942	100.00	179.17	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.2.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian kinerja Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Persen	100	4,889,495,480	100	784,216,344	100	1,003,840,880	100	1,001,600,368	100	1,785,816,712	100.00	36.52	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.2.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbarnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan benih/bibit ternak yang beredar dalam satu tahun	Persen	0.05	6,959,451,800	0.05	735,309,848	0.05	397,347,000	0.05	389,828,400	0.05	1,125,138,248	100.00	16.17	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Persen	100	3,910,625,000	100	4,538,398,839	100	9,589,082,696	100	9,307,002,490	100	13,845,401,329	100.00	354.05	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.3.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul	Ha	14819	363,125,000	14819	115,049,500	14,819	171,610,196	14,819	165,909,840	14,819	280,959,340	100.00	77.37	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.3.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian	Persen	100	3,235,000,000	100	4,415,649,338.78	100	9,406,377,500	100	9,129,997,650	100	13,545,646,989	100.00	418.72	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.3.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	Jenis	1	312,500,000	1	7,700,000	1	11,095,000	1	11,095,000	1	18,795,000	100.00	6.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100	8,962,648,960	100	3,224,085,818	100	4,852,333,896	100	4,538,081,414	100	7,762,167,232	100.00	86.61	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.4.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak	Persen	100	3,341,237,620	100	1,684,167,434	100	2,093,164,700	100	1,957,778,215	100	3,641,945,649	100.00	109.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.4.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	2,284,351,240	100	400,212,096	100	516,451,316	100	507,065,420	100	907,277,516	100.00	39.72	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.4.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	1,232,884,500	100	698,230,108	100	1,956,325,000	100	1,806,325,489	100	2,504,555,597	100.00	203.15	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.4.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Capaian kinerja pengelolaan kesehatan hewan dan ternak	Persen	100	1,954,175,600	100	438,976,180	100	283,580,380	100	264,099,790	100	703,075,970	100.00	35.98	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27.4.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Peningkatan Pengawasan pangan asal hewan yang ASUH	Persen	10	150,000,000	10	2,500,000	10	2,812,500	10	2,812,500	10	5,312,500	100.00	3.54	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPd Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		3.27.5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Persen	100	2,375,000,000	100	297,138,000	100	225,000,000	100	224,818,000	100	521,956,000	100.00	21.98	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
		3.27.5.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Serangan hama yang ditangani	Lokasi	52	2,375,000,000	52	297,138,000	100	225,000,000	100	224,818,000	100	521,956,000	192.31	21.98	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
		3.27.6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	100	100,700,000	100	2,700,000	100	26,177,250	100	26,052,250	100	28,752,250	100.00	28.55	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
		3.27.6.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan rekomendasi usaha pertanian	Jumlah Rekomendasi	1	10,000,000	1	2,000,000	1	25,427,250	1	25,302,250	1	27,302,250	100.00	273.02	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
		3.27.6.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Penerbitan rekomendasi usaha peternakan	Jumlah Rekomendasi	1	90,700,000	1	700,000	1	750,000	1	750,000	1	1,450,000	100.00	1.60	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
		3.27.7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	6.33	5,090,536,800	6.31	2,871,055,834	6	2,802,680,980	6.315	2,790,538,902	6.315	5,661,594,736	99.76	111.22	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
		3.27.7.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	Kelompok	5	5,090,536,800	5	2,871,055,834	5	2,802,680,980	5	2,790,538,902	5	5,661,594,736	100.00	111.22	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN	Kalurahan Bahari	Persen	20.00	625,000,000.00	-	-	20.00	200,000,000.00	20	199,321,200.00	20	199,321,200.00	100.00	31.89	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	persentase pengembangan	Persen	100.00	625,000,000.00	-	-	20.00	200,000,000.00	20	199,321,200.00	20	199,321,200.00	20.00	31.89	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	Ton	837.00	1,784,990,480.00	841.37	347,242,870.00	831.00	665,214,230.00	846.04	662,774,904.00	1,687	1,010,017,774.00	201.60	56.58	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai,	Persentase ketersediaan stok ikan di	Persen	58.00	66,000,000.00	50.00	1,000,000.00	50.00	187,115,000.00	50	186,804,105.00	100	187,804,105.00	172.41	284.55	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	5.00	454,300,000.00	9.19	167,466,750.00	5.00	297,347,500.00	5	295,782,529.00	14	463,249,279.00	283.80	101.97	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Persen	100.00	1,264,690,480.00	100.00	178,776,120.00	100.00	180,751,730.00	100	180,188,270.00	200	358,964,390.00	200.00	28.38	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	Ton	13,046.00	10,292,884,640.00	13,124.88	2,167,997,850.00	12,805.00	6,750,059,860.00	13,282	6,440,075,045.00	26,407	8,608,072,895.00	202.41	83.63	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan rekomendasi usaha perikanan	Rekomendasi	1.00	66,250,000.00	-	2,050,000.00	1.00	3,995,000.00	-	3,995,000.00	-	6,045,000.00	-	9.12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik	Pembudidaya	150.00	3,212,563,760.00	140.00	1,139,137,650.00	144.00	2,050,555,640.00	144	2,037,499,610.00	284	3,176,637,260.00	189.33	98.88	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen	1.50	606,787,080.00	2.11	100,865,264.00	0.40	386,014,460.00	0.40	381,722,890.00	3	482,588,154.00	167.33	79.53	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (UPTD BBI)	Peningkatan produksi benih ikan air tawar	Persen	5.00	6,407,283,800.00	5.00	925,944,936.00	0.40	4,309,494,760.00	0.40	4,016,857,545.00	5	4,942,802,481.00	107.96	77.14	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah pelanggaran peraturan	Persen	5.00	195,500,000.00	6.70	271,266,750.00	0.05	343,997,500.00	0.05	340,469,250.00	7	611,736,000.00	135.00	312.91	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan serta pelaksanaan pembinaan terhadap Pkmaswas dan pelaku usaha perikanan	Persen	100.00	195,500,000.00	100.00	271,266,750.00	100.00	343,997,500.00	100	340,469,250.00	200	611,736,000.00	200.00	312.91	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi perikanan yang diolah	Persen	2.00	797,550,000.00	2.31	1,006,749,616.00	2.00	998,233,840.00	2	993,705,495.00	4	2,000,455,111.00	215.50	250.83	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha	unit	2.00	87,250,000.00	2.00	27,159,416.00	2.00	106,228,840.00	2	105,120,295.00	4	132,279,711.00	200.00	151.61	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaku usaha yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan dan Kecil	Unit	10.00	309,800,000.00	5.00	978,640,200.00	6.00	778,175,000.00	6	776,853,200.00	11	1,755,493,400.00	110.00	566.65	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Nelayan dan Pembudidaya ikan yang bermitra dengan usaha pengolahan hasil perikanan	Orang	11.00	400,500,000.00	10.00	950,000.00	5.00	113,830,000.00	5	111,732,000.00	15	112,682,000.00	136.36	28.14	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		.25.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85.00	21,961,485,579.00	-	3,797,515,783.00	85.00	4,840,115,507.00	85	4,757,703,796.00	85	8,555,219,579.00	100.00	38.96	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
		3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100.00	237,000,000.00	100.00	25,627,250.00	1.00	26,520,000.00	1	26,515,000.00	101	52,142,250.00	101.00	22.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100.00	12,929,163,499.00	100.00	2,550,983,967.00	100.00	2,842,016,869.00	100	2,795,092,689.00	200	5,346,076,656.00	200.00	41.35	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	Capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah	Persen	100.00	8,000,000.00	-	-	100.00	4,700,000.00	100	4,700,000.00	100	4,700,000.00	100.00	58.75	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persen	100.00	87,000,000.00	100.00	4,000,000.00	100.00	12,387,500.00	1	12,365,000.00	101	16,365,000.00	101.00	18.81	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100.00	2,210,875,000.00	100.00	250,592,451.00	100.00	502,198,504.00	100	499,500,004.00	200	750,092,455.00	200.00	33.93	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja penyediaan pengadaan barang milik daerah	Persen	100.00	2,384,275,000.00	100.00	171,298,731.00	100.00	435,830,290.00	100	433,079,500.00	200	604,378,231.00	200.00	25.35	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pengadaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100.00	1,507,757,080.00	100.00	353,641,234.00	100.00	355,212,931.00	100	337,397,078.00	200	691,038,312.00	200.00	45.83	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	2,597,415,000.00	100.00	441,372,150.00	100.00	661,249,413.00	100	649,054,525.00	200	1,090,426,675.00	200.00	41.98	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		2.22.08	YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Desa Wisata	persen	93	4,424,000,000	33.33	977,419,850		1,197,750,000	-	1,192,381,730	-	2,169,801,580	-	49.05	DINAS PARIWISATA
		2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian Kinerja Pengembangan	persen	100	4,124,000,000	100	977,419,850		1,097,750,000	-	1,092,616,040	-	2,070,035,890	-	50.19	DINAS PARIWISATA
		2.22.08.5.07	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Cakupan Kinerja Pengembangan Kalurahan Preneur	persen	100	300,000,000	-	-		100,000,000	-	99,765,690	-	99,765,690	-	33.26	DINAS PARIWISATA
		3.26.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	84	45,621,532,401	80	8,553,003,846		9,344,996,473	-	9,073,150,100	-	17,626,153,946	-	38.64	DINAS PARIWISATA
		3.26.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen	100	221,655,640	100	53,592,780		56,951,130	-	56,951,126	-	110,543,906	-	49.87	DINAS PARIWISATA
		3.26.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	persen	100	33,124,968,684		6,282,694,147		6,736,608,597	-	6,596,868,822	-	12,879,562,969	-	38.88	DINAS PARIWISATA
		3.26.01.2.05	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	persen	100	70,322,000		-		32,580,500	-	32,580,500	-	32,580,500	-	46.33	DINAS PARIWISATA
		3.26.01.2.06	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	128,665,000		25,483,140		26,742,590	-	26,742,588	-	52,225,728	-	40.59	DINAS PARIWISATA
		3.26.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	100	6,013,154,241		962,493,148		1,324,954,827	-	1,248,787,773	-	2,211,280,921	-	36.77	DINAS PARIWISATA
		3.26.01.2.07	Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	872,260,000		479,216,300		239,300,000	-	228,964,457	-	708,180,757	-	81.19	DINAS PARIWISATA
		3.26.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	2,310,645,240		250,203,771		290,245,180	-	272,164,237	-	522,368,008	-	22.61	DINAS PARIWISATA
		3.26.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	persen	100	2,879,861,596		499,320,560		637,613,649	-	610,090,597	-	1,109,411,157	-	38.52	DINAS PARIWISATA
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	persen	3,13	30,235,537,191		6,427,624,465		5,247,359,089	-	5,189,925,587	-	11,617,550,052	-	38.42	DINAS PARIWISATA
		3.26.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	persen	40,91	8,765,614,960		2,173,363,184		2,253,229,629	-	2,213,529,866	-	4,386,893,050	-	50.05	DINAS PARIWISATA
		3.26.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	persen	100	15,612,484,967		2,987,293,146		1,427,709,849	-	1,412,685,736	-	4,399,978,882	-	28.18	DINAS PARIWISATA
		3.26.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Pengeolaan Destinasi Pariwisata	persen	100	2,221,595,664		347,361,141		806,323,541	-	803,824,915	-	1,151,186,056	-	51.82	DINAS PARIWISATA

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RPKD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16			
		3.26.02.2.04	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Ijin Usaha Pariwisata	persen	100	3,635,841,600		919,606,994		760,096,070	-	759,885,070	-	1,679,492,064	-	46.19	DINAS PARIWISATA		
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	persen	2	4,606,800,000		1,929,664,298		2,673,835,500	-	2,633,329,922	-	4,562,994,220	-	99.05	DINAS PARIWISATA		
		3.26.03.2.01	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	persen	2	4,606,800,000		1,929,664,298		2,673,835,500	-	2,633,329,922	-	4,562,994,220	-	99.05	DINAS PARIWISATA		
		2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	83	94,909,111,369	81.64	15,906,638,632	81.50	16,348,694,958	0	15,671,553,757	-	31,578,192,389	-	33.27	DKUKMPP		
		2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	persen	100	339,235,988	100	61,647,474	100	16,374,500	100	16,259,500	100	77,906,974	100.00	22.97	DKUKMPP		
		2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan	%	100	78,200,222,466	100	12,673,657,218	100	13,079,660,046	100	12,480,911,214	100	25,154,568,432	100.00	32.17	DKUKMPP		
		2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	persen	100	132,800,000			100	11,417,500	100	11,417,500	100	11,417,500	100.00	8.60	DKUKMPP		
		2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	persen	100	327,393,750			100	26,000,000	100	24,000,000	100	24,000,000	100.00	7.33	DKUKMPP		
		2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	100	3,499,027,303	100	456,212,560	100	1,277,889,443	100	1,241,809,240	100	1,698,021,800	100.00	48.53	DKUKMPP		
		2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan BMD	%	100	183,900,000	100	180,898,000	100	27,350,000	100	25,441,486	100	206,339,486	100.00	112.20	DKUKMPP		
		2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	8,572,950,533	100	1,594,972,876	100	1,241,654,340	100	1,209,897,773	100	2,804,870,649	100.00	32.72	DKUKMPP		
		2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	%	100	3,653,581,329	100	939,250,504	100	668,349,129	100	661,817,044	100	1,601,067,548	100.00	43.82	DKUKMPP		
		2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	3	145,335,120	6	24,438,148	2.5	38,748,840	3.03	38,748,840	3	63,186,988	121.20	43.48	DKUKMPP		
		2.17.02.2.01	Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	persen	100	145,335,120		24,438,148	100	38,748,840	100	38,748,840		63,186,988	-	43.48	DKUKMPP		
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	persen	78.59	798,297,620		73,350,648	73.58	74,647,840	77.9	74,647,840	78	147,998,488	99.12	18.54	DKUKMPP		
		2.17.03	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan koperasi yang diperiksa dan diawasi	persen	98	798,297,620		73,350,648	98	74,647,840	100	74,647,840	100	147,998,488	102.04	18.54	DKUKMPP		
		2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	pesen	68.45	231,835,120		27,075,648	63.99	63,050,740	64.62	63,017,840	65	90,093,488	94.40	38.86	DKUKMPP		
		2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya	pesen	96	231,835,120		27,075,648	96	63,050,740	100	63,017,840	100	90,093,488	104.17	38.86	DKUKMPP		
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	Persen	60	1,309,259,850	71	849,912,240	60	504,656,000	69	501,717,730	69	1,351,629,970	115.00	103.24	DKUKMPP		
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	persen	100	1,125,588,000		683,621,120	100	504,656,000	100	501,717,730	100	1,185,338,850	100.00	105.31	DKUKMPP		
		2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	UMKM yang Mengikuti Pelatihan	UMKM	60	183,671,850	60	166,291,120			0	0	-	166,291,120	-	90.54	DKUKMPP		
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	Persen	5	1,373,819,240	18	101,167,196	5	407,332,930	31	405,139,460	31	506,306,656	620.00	36.85	DKUKMPP		
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	persen	100	1,373,819,240		101,167,196	100	407,332,930	100	405,139,460	100	506,306,656	100.00	36.85	DKUKMPP		



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPd Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16		
		3.03.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan	%	55	970,284,000	68	302,598,444	52	591,924,100	64.86486486	576,619,001	65	879,217,445	117.94	90.61	DKUKMPP		
		3.03.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Cakupan Pengawasan Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	persen	100	467,484,000		302,598,444	100	479,349,100	100	466,798,751	100	769,397,195	100.00	164.58	DKUKMPP		
		3.03.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Prosentase Penerbitan Izin TDG	persen	100	150,000,000		-	100	87,887,500	66.66666667	85,133,000		85,133,000	-	56.76	DKUKMPP		
		3.03.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Prosentase Penerbitan Izin STPW	persen	50	130,000,000		-	50	14,960,000	0	14,959,750	-	14,959,750	-	11.51	DKUKMPP		
		3.03.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual	persen	60	80,000,000		-	50	7,560,000	0	7,560,000		7,560,000	-	9.45	DKUKMPP		
		3.03.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah	Cakupan pengawasan fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya, Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah	persen	100	92,800,000		-	100	2,167,500	100	2,167,500	100	2,167,500	100.00	2.34	DKUKMPP		
			Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi	Persen	1	50,000,000		-			100	0	100	-	10,000.00	-	DKUKMPP		
		3.03.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	%	6	35,122,321,713	2	8,915,196,586	3	7,362,385,996	27.88	7,131,869,208	28	16,047,065,794	464.67	45.69	DKUKMPP		
		3.03.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi perdagangan	Cakupan kondisi sarana prasarana distribusi perdagangan baik	persen	50	29,272,269,307		7,597,842,888	44	6,232,936,146	44	6,022,156,988	44	13,619,999,876	88.00	46.53	DKUKMPP		
		3.03.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Cakupan Pelaku Usaha yang dibina	%	25	5,850,052,406	5	1,317,353,698	10	1,129,449,850	26.26	1,109,712,220	26	2,427,065,918	105.04	41.49	DKUKMPP		
		3.03.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapak antar waktu)	%	5	1,037,007,175	11	270,890,492	7	343,469,520	8.876	340,551,280	9	611,441,772	177.52	58.96	DKUKMPP		
		3.03.04.2.01	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase cakupan hasil pemantauan ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting) di Pelaku Usaha	dokumen	12	80,000,000		-	60	83,741,600	62.22222222	82,797,400	62	82,797,400	518.52	103.50	DKUKMPP		
		3.03.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (Stabilitas Harga Bapak Antar Waktu)	%	5	887,940,167	11	235,773,944	7	245,602,920	8.876	243,628,800	9	479,402,824	177.52	53.99	DKUKMPP		
		3.03.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	%	50	69,067,008	85	35,116,548	46	14,125,000	80.26	14,125,000	80	49,241,548	160.52	71.30	DKUKMPP		
		3.03.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	Juta US\$	120	4,169,296,800	109	768,068,859	90	1,424,180,670	91.5	1,418,577,355	92	2,186,646,214	76.25	52.45	DKUKMPP		
		3.03.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKM Ekspor yang Mendapatkan Fasilitas Pemasaran	%	50	4,169,296,800	51	768,068,859		1,424,180,670	0	1,418,577,355	-	2,186,646,214	-	52.45	DKUKMPP		
		3.03.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	40	2,087,670,200	37	491,612,205	30	551,355,021	42.96	525,745,898	43	1,017,358,103	107.40	48.73	DKUKMPP		
		3.03.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	persen	40	2,087,670,200		491,612,205	35	551,355,021	42.66	525,745,898	43	1,017,358,103	106.65	48.73	DKUKMPP		
		3.03.07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	%	25	1,925,000,000		-	10	155,177,500	27	152,852,000	27	152,852,000	108.00	7.94	DKUKMPP		
		3.03.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase UMKM produk dalam negeri yang meningkat omset pemasarannya	persen	75	1,925,000,000		-	70	155,177,500	78	152,852,000	78	152,852,000	104.00	7.94	DKUKMPP		
		2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai AKIP	Angka	85	52,941,854,360	86.10	5,677,354,889	85	5,591,724,992	0	5,387,501,673	0	11,064,856,562.00	-	20.90	DPMPSTP		
		2 18 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan	Persen	100	578,500,000	100	27,452,500	100	13,100,000	100	13,100,000	100	40,552,500	100.00	7.01	DPMPSTP		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
		2.18.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Persen	100	25,554,652,048	100	4,037,271,016	100	4,436,915,858	100	4,258,523,178	100	8,295,794,194	100.00	32.46	DPMPTSP
		2.18.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	1,940,400,000	100	29,050,000	100	13,700,000	100	12,950,000	100	42,000,000	100.00	2.16	DPMPTSP
		2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Persen	100	12,236,824,000	100	637,343,381	100	581,740,800	100	568,489,580	100	1,205,832,961	100.00	9.85	DPMPTSP
		2.18.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	2,966,667,091	100	362,420,214	100	252,763,042	100	241,870,174	100	604,290,388	100.00	20.37	DPMPTSP
		2.18.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	8,781,436,221	100	505,717,778	100	215,380,292	100	214,451,241	100	720,169,019	100.00	8.20	DPMPTSP
		2.18.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan	Persen	100	883,375,000	100	78,100,000	100	78,125,000	100	78,117,500	100	156,217,500	100.00	17.68	DPMPTSP
		1.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	Persen	100	1,158,715,000	100	317,910,800	100	312,698,680	100	312,315,506	100	630,226,306	100.00	54.39	DPMPTSP
		2.18.02.201	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	Dokumen	1	599,925,000	1	220,412,500	1	207,611,180	1	207,606,046	1	428,018,546	100.00	71.35	DPMPTSP
		2.18.02.202	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta Potensi Investasi	Peta Potensi	2	558,790,000	1.00	97,498,300		105,087,500	0	104,709,460	0	202,207,760	-	36.19	DPMPTSP
				Peta potensi yang memuat data dan informasi investasi	Peta Potensi Investasi	2						0	-		-			DPMPTSP
		2.18.3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	Persen	17.79	1,978,354,500	28.49	134,935,000	11.29	350,625,000	20,26*)	349,979,200	20,26*)	484,914,200	24.51		DPMPTSP
		2.18.3.201	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	Persen	100	1,978,354,500	100	134,935,000	100	350,625,000	100	349,979,200	100	484,914,200	100.00	24.51	DPMPTSP
		2.18.4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	100	2,078,710,000	100	382,074,930	100	439,091,180	100	414,194,866	100	796,269,796	100.00	38.31	DPMPTSP
		2.18.4.201	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas permasalahan yang dihadapi perusahaan	Perusahaan	8	2,078,710,000	55	382,074,930			0	414,194,866	0	796269796	-	38.31	DPMPTSP
		2.18.4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Persen	100	2,324,310,580	100.00	497,848,694	100	383,746,940	100	379,372,922	100	877,221,616	100.00	37.74	DPMPTSP
		2.18.4.201	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan	Dokumen	55	2,324,310,580	55	497,848,694		383,746,940	0	379,372,922	0	877221616	-	37.74	DPMPTSP
		2.18.6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan aplikasi SIM dalam layanan perizinan dan non perizinan	Persen	100	540,321,120	100	98,387,516	100	175,141,180	100	164,821,408	100	263,208,924	100.00	48.71	DPMPTSP
		2.18.6.201	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/Kota	Jenis	2	540,321,120	2	98,387,516	2	175,141,180	0	164,821,408	0	263,208,924	-	48.71	DPMPTSP
			Terwujudnya pemerataan pendapatan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.2	#REF!	3.97	#REF!	3.50	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persen	84	55,482,630,582	82	8,713,187,601	81	9,891,814,471	81.29	9,467,699,100	81	18,180,886,701	96.77	32.77	Disnakertrans
		2.07.01.20.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	286,031,705	100	56,331,940	100	73,841,930	100	73731059.34	100	130,062,999	100.00	45.47	Disnakertrans
		2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	41,209,289,691	100	6,624,432,423	100	6,732,179,046	100	6363218495	100	12,987,650,918	100.00	31.52	Disnakertrans

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RPKD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16		
		2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	8,077,746,728	100	1,102,597,115	100	1,396,061,615	100	1381256767	100	2,483,853,882	100.00	30.75	Disnakertrans		
		2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian pengadaan barang milik daerah	Persen	100	1,466,300,000	100	26,100,000	100	379,300,000	100	374862000	100	400,962,000	100.00	27.35	Disnakertrans		
		2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Persen	100	1,585,717,960	100	362,139,423	100	281,066,880	24	257147388.1	24	619,286,811	24.00	39.05	Disnakertrans		
		2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pengadaan barang milik daerah	Persen	100	2,857,544,498	100	541,586,700	100	1,029,365,000	100	1017483390	100	1,559,070,090	100.00	54.56	Disnakertrans		
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	22.50%	5,016,700,000	23	619,300,560	19.5	1,073,448,663	23.76	1072638003	24	1,691,938,563	10,560.00	33.73	Disnakertrans		
		2.07.03.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi	Persen	52%	2,018,350,000	52	315,794,350	48.5	461,529,643	41.2	460852862.5	41	776,647,213	8,000.00	38.48	Disnakertrans		
		2.07.03.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Persen	73	282,050,000	75	30,000,000	73	24,460,000	96.2	24460000	96	54,460,000	131.78	19.31	Disnakertrans		
		2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			2.90%	592,300,000	0	0	1.4	79,000,000	0.34	79000000	0.34	79,000,000	1,172.41	13.34	Disnakertrans		
		2.07.03.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	30%	2,124,000,000	31	273,506,210	30	508,459,020	30.64	508325140.2	31	781,831,350	10,213.33	36.81	Disnakertrans		
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ Kota	Persen	62%	40,329,825,333	56	36,973,092,956	56	54,577,784,488	0	54323782937	0	91,296,875,893	-	226.38	Disnakertrans		
		2.07.04.201.	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota		3750	38,204,812,002	3,160	36,644,330,516	3,350	54,095,784,308	0	53852729797	0	90,497,060,313	-	236.87	Disnakertrans		
		2.07.04.203	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja		5500	1,856,778,090	4,000	289,675,340	4,050	437,347,680	4201	430693040.1	4201	720,368,380	76.38	38.80	Disnakertrans		
		2.07.04.204	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase CPMI, PMI dan PMI Purna yang		55	268,235,241	50	39,087,100	51	44,652,500	60.3	40360100	60.3	79,447,200	109.64	29.62	Disnakertrans		
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PPPKS, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar neserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	39	5,050,000,000	37	438,319,060	39	1,009,196,520	45.6	1004725812	46	1,443,044,872	116.92	28.58	Disnakertrans		
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sarana Hubungan Industrial	Persen	58	1,970,223,907	50	89,672,500	52	553,256,520	56.3	552120919.9	56	641,793,420	97.07	32.57	Disnakertrans		
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Persen	95	3,079,776,093	20	348,646,560	20	455,940,000	21.3	452604892	21	801,251,452	22.42	26.02	Disnakertrans		
		3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penempatan Transmigrasi	Persen	100	3,150,000,000	80	584,121,365	65	559,762,860	100	557196120.2	100	1,141,317,485	100.00	36.23	Disnakertrans		
		3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi	Persen	68	3,150,000,000	65	584,121,365	65	559,762,860	100	557196120.2	100	1,141,317,485	147.06	36.23	Disnakertrans		
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat	Persen	22.5	9,813,350,000	23	1,741,939,030	19.5	1,364,944,000	23.76	1353226530	23.76	3,095,165,560	31.54	Disnakertrans			
		2.07.03.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Persen	85	9,813,350,000	87	1,741,939,030	87	1,364,944,000	100	1353226530	100	3,095,165,560	117.65	31.54	Disnakertrans		
		2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	22,078,145,237	79	5,281,931,032	83	6,796,544,870	83	6,560,936,798	83	11,842,867,830	100.19	53.64	DPMK		
		2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	236,309,473	100	60,321,780	100	39,025,000	100	38,447,500	100	98,769,280	100.00	41.80	DPMK		
		2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	95	17,497,290,529	100	3,647,159,506	92	4,044,072,159	92	3,849,667,715	92	7,496,827,221	96.84	42.85	DPMK		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16			
		2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	89	1,771,272,435	85	259,566,220	86	1,318,727,069	86	1,304,197,510	86	1,563,763,730	96.63	88.28	DPMK		
		2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	94	125,000,000	90	-	91	27,650,000	94	25,741,485	94	25,741,485	100.00	20.59	DPMK		
		2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	1,275,239,800	100	280,667,788	100	488,952,717	100	476,862,128	100	757,529,916	100.00	59.40	DPMK		
		2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	94	1,240,000,000	90	573,376,851	91	878,117,925	91	866,020,460	91	1,439,397,311	96.81	116.08	DPMK		
		2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Penataan Desa	Persen	100	700,000,000	100	15,115,000	100	20,569,500	100	20,529,500	100	35,644,500	100.00	5.09	DPMK		
		2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kalurahan yang menyelenggara kan Penataan Desa	Kalurahan	75	700,000,000	75	15,115,000	75	20,569,500	75	20,529,500	75	35,644,500	100.00	5.09	DPMK		
		2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kalurahan yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Kewenangan Desa (Produk Hukum, Aset Kal, Batas Kal)	Kalurahan	-	-	75	15,115,000	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMK		
				Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Kalurahan	75	700,000,000	75	15,115,000	75	20,569,500	75	20,529,500	75	35,644,500	100.00	5.09	DPMK		
		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan	Persen	100	200,000,000	100	22,201,000	100	70,789,000	100	70,039,000	100	92,240,000	100.00	46.12	DPMK		
		2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Persentase Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa	Persen	100	200,000,000	100	22,201,000	100	70,789,000	100	70,039,000	100	92,240,000	100.00	46.12	DPMK		
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang Baik	Persen	100	20,374,141,135	100	4,900,841,350	100	7,054,502,104	100	6,824,701,906	100	11,725,543,256	100.00	57.55	DPMK		
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100	20,374,141,135	100	4,900,841,350	100	7,054,502,104	100	6,824,701,906	100	11,725,543,256	100.00	57.55	DPMK		
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	Persen	100	21,186,137,657		2,536,626,306	100	4,391,646,720	100	3,419,223,276	100	5,955,849,582	100.00	28.11	DPMK		
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam	Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jenis Lembaga	5	21,186,137,657		2,536,626,306	5	4,391,646,720	5	3,419,223,276	5	5,955,849,582	100.00	28.11	DPMK		
		2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi	Persen	100	3,500,000,000		487,503,650	36.00	450,000,000	36	448,337,500	36	935,841,150	36.00	26.74	DPMK		
		2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kalurahan yang mendapatkan pendampingan Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan)	Kalurahan	75	3,500,000,000		487,503,650	12	450,000,000	12	448,337,500	12	935,841,150	16.00	26.74	DPMK		
		4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan	Persen	66.67	6,258,352,500		1,107,520,500	41.67	1,041,000,000	42	1,034,217,500	42	2,141,738,000	62.50	34.22	DPMK		
		4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan	Kalurahan	75	6,258,352,500		1,107,520,500	75	1,041,000,000	75	1,034,217,500	75	2,141,738,000	100.00	34.22	DPMK		
3	Terwujudnya pemerataan pendapatan			Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	100	33,585,814,927	83.33	8,516,143,877	90	9,697,308,801	#REF!	#REF!	#REF!				DINAS PARIWISATA		
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	persen	100	2,388,000,000		-	-	161,529,500	-	155,764,838	-	155,764,838	-	6.52	DINAS PARIWISATA		
		3.26.05.2.01	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	dokumen	1	2,388,000,000		-	-	161,529,500	-	155,764,838	-	155,764,838	-	6.52	DINAS PARIWISATA		
		3.26.04	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	CBT	2	2,065,022,000		1,331,646,800		1,490,494,561	-	1,436,154,410	-	2,767,801,210	-	134.03	DINAS PARIWISATA		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RPKD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		3.26.04.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	persen	100	2,065,022,000		1,331,646,800		1,490,494,561	-	1,436,154,410	-	2,767,801,210	-	134.03	DINAS PARIWISATA	
		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL	Persentase UMKM yang berizin	Persen	70	3,044,170,940	47	852,332,846		1,162,345,010	70.7	1,151,974,440	7070.0%	2,004,307,286	101.00	65.84	DKUKMPP	
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Cakupan usaha mikro yang diberdayakan	persen	100	3,044,170,940		852,332,846	100	1,162,345,010	100	1,151,974,440	100	2,004,307,286	100.00	65.84	DKUKMPP	
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	Persen	80	1,933,878,940	60	721,477,846	65	1,269,062,770	70.19	1,261,257,620	70	1,982,735,466	87.74	102.53	DKUKMPP	
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Cakupan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	persen	180	1,933,878,940	205	721,477,846	100	1,269,062,770	100	1,261,257,620	100	1,982,735,466	55.56	102.53	DKUKMPP	
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemasaran pada Desa Preneur	Persen	17	12,069,073,000	8	670,461,000	9	916,291,500	10.53	911,134,025	11	1,581,595,025	60.76	13.10	DKUKMPP	
		2.22.08.2.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Pasar Rakyat Bercagar Budaya yang direvitalisasi	Persen	80	8,200,000,000	17	300,921,000	-	-	0	0	-	300,921,000	-	3.67	DKUKMPP	
		2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa	laporan		2,220,000,000				496,180,000	0	493,064,650	-	493,064,650		22.21	DKUKMPP	
		2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pendampingan Desa/Kalurahan Preneur	kalurahan	7	1,649,073,000		369,540,000		420,111,500	0	418,069,375	-	787,609,375	-	47.76	DKUKMPP	
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	100	11,617,434,927	86	4,662,521,337	90.65	4,229,067,610	90.84	4,161,529,686	91	8,824,051,023	90.84	75.96	DKUKMPP	
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	persen	100	11,617,434,927		4,662,521,337	100	4,229,067,610	50	4,161,529,686	50	8,824,051,023	50.00	75.96	DKUKMPP	
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (UI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	%	100	228,235,120	100	277,704,048	100	346,436,350	100	345,444,370	100000%	623,148,418	100.00	273.03	DKUKMPP	
		3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan sertifikat standar yang diverifikasi	persen	18	228,235,120		277,704,048	12	346,436,350	100	345,444,370	100	623,148,418	555.56	273.03	DKUKMPP	
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam Sil Nas terhadap total populasi perusahaan	pesen	0	240,000,000	-	-	0.22	122,081,500	1.3	122,081,500	1	122,081,500	590.91	50.87	DKUKMPP	
		3.32.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPK Ikwenangan Kabupaten/Kota	Cakupan kepatuhan pelaporan data industri melalui SINAS	persen	47.4	240,000,000	-	-	41.4	122,081,500	43.6	122,081,500	44	122,081,500	91.98	50.87	DKUKMPP	
<b>Jumlah Anggaran Sasaran 6:</b>							<b>5,034,049,000</b>		<b>1,035,511,317</b>		<b>955,677,000</b>		<b>#REF!</b>					<b>DKUKMPP</b>	
<b>SASARAN 7: Terpenuhi kualitas sarana prasarana publik</b>																			
Terpenuhi kualitas sarana prasarana publik				Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	79.08	907,664,004,197.00	75.69	173,894,902,996.00	75.05	191,741,547,114.00	#REF!	#REF!	#REF!					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	77.47	196,847,457,258	75.66	49,465,548,416	3	63,671,824,666	75.835	59,712,066,679	75.835	109,177,615,095	97,889.51	55.46	DPUPKP	
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	km	498.83	196,847,457,258	473.567	49,465,548,416	476	63,671,824,666	473.567	59,712,066,679	473.567	109,177,615,095	94.94	55.46	DPUPKP	
		1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN	Tingkat kemantapan infrastruktur permukiman (jalan desa)	Persen	82.67	114,060,198,983	82.51	21,357,759,816		18,480,037,057	3.45208333	17,660,082,447	3.4520833	39,017,842,263	4.18	34.21	DPUPKP	
		1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kinerja penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah	Persen	464.19	114,060,198,983	104	21,357,759,816		18,480,037,057	100	17,660,082,447	100	39,017,842,263	21.54	34.21	DPUPKP	
		1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai AKIP	Angka	84	80,832,442,577	85.56	17,299,203,640	3	13,137,203,233	3.48194444	12,751,233,473	3.4819444	30,050,437,113	4.15	37.18	DPUPKP	
		1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan kinerja perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	2,406,145,102	100	755,374,930	100	467,187,360	100	407,389,760	100	1,162,764,690	100.00	48.32	DPUPKP	
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja keuangan	Persen	100	54,943,937,720	100	10,543,501,379	100	11,084,228,932	100	10,891,270,818,00	100	21,434,772,197	100.00	39.01	DPUPKP	
		1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan administrasi perkantoran	Jenis	7	5,793,747,937	7	1,533,754,054	7	34,256,530	7	33,903,150	7	1,567,657,204	100.00	27.06	DPUPKP	
		1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan sarana prasarana perkantoran	Jenis	2	5,540,141,433	2	2,187,484,700	2	81,900,000	2	81,900,000	2	2,269,384,700	100.00	40.96	DPUPKP	
		1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang perkantoran	Jenis	8	5,022,060,100	3	809,621,246	3	39,000,000	3	20,762,987	3	830,384,233	37.50	16.53	DPUPKP	
		1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	Jenis	4	7,126,410,285	4	1,469,467,331	4	1,430,630,411	4	1,316,006,758	4	2,785,474,089	100.00	39.09	DPUPKP	
		1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Gedung pemerintah yang laik fungsi	Persen	50	191,372,237,491	10	13,781,107,398		28,455,709,177	20	26,799,560,010	20	40,580,667,408	40.00	21.21	DPUPKP	
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB	Persen	100	191,372,237,491	100	13,781,107,398		28,455,709,177	100	26,799,560,010	100	40,580,667,408	100.00	21.21	DPUPKP	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RPKD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5															16
		1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	78.84%	4,195,272,147	92.95	682,818,648	3	905,097,860	92.95	808,794,770	92.95	1,491,613,418		35.55		DPUPKP
		1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	orang	150	1,208,668,779	90	223,272,916	180	556,913,840	180	525,087,790	180	748,360,706	120.00	61.92		DPUPKP
		1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi data konstruksi	Jenis	6	924,401,800	6	244,307,432	10	321,209,020	10	256,731,980	10	501,039,412	166.67	54.20		DPUPKP
		1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Proyek tanpa kecelakaan konstruksi	proyek	0	2,062,201,568	0	215,238,300	0	26,975,000	0	26,975,000	0	242,213,300		11.75		DPUPKP
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Persen	86.76	37,955,911,258	83.56	4,706,644,382		1,639,757,721	0	83	0	4,706,644,465	-	12.40		DPUPKP
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Persen	100	37,955,911,258	100	4,706,644,382	100	1,639,757,721	100	1,550,719,640	100	6,257,364,022	100.00	16.49		DPUPKP
		1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R	Persen	33.33	4,124,650,000	22.67	628,767,000	1	18,790,000	0.96319444	18,790,000	0.9631944	647,557,000	2.89	15.70		DPUPKP
		1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan infrastruktur persampahan	unit	25	4,124,650,000	17	628,767,000		18,790,000	18	18,790,000	18	647,557,000	72.00	15.70		DPUPKP
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Persen	95.98	22,480,236,222	87.86	9,362,068,002	89.89	4,574,196,637	87.86	4,280,524,010	87.86	13,642,592,012		60.69		DPUPKP
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Persen	100	22,480,236,222	100	9,362,068,002	100	4,574,196,637	100	4,280,524,010	100	13,642,592,012	100.00	60.69		DPUPKP
		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan pengembangan sistem drainase lingkungan	Persen	6.49	24,156,174,808	3.97	3,741,914,800	0	5,192,378,474	0.19236111	4,912,827,640	0.1923611	8,654,742,440	2.96	35.83		DPUPKP
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase lingkungan tertangani	m	2068	24,156,174,808	1748	3,741,914,800	1,748	5,192,378,474	0	4,912,827,640	0	8,654,742,440	-	35.83		DPUPKP
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Persen	86	66,211,906,707	81.87	12,535,478,684		13,139,625,080	81.87	12,143,481,460	81.87	24,678,960,144		37.27		DPUPKP
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Ha	500	22,074,199,760	353.69	4,746,280,700		3,356,819,484	353.69	3,036,700,600	353.69	7,782,981,300	70.74	35.26		DPUPKP
		1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Daerah irigasi yang ditingkatkan	Persen	90	44,137,706,947	82.08	7,789,197,984		9,782,805,596	3.42222222	9,106,780,860	3.4222222	16,895,978,844	3.80	38.28		DPUPKP
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100	18,922,062,603	100	3,169,696,086	100	3,461,643,482	100	2,676,478,458	100	5,846,174,544	100.00	30.90		DPUPKP
		1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Capaian kinerja pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota	Persen	100	239,000,000	100	190,723,000	100	28,476,250	100	9,249,250	100	199,972,250	100.00	83.67		DPUPKP
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Capaian kinerja pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota	Persen	100	3,660,000,000	100	0	100	432,387,500	100	97,087,500	100	97,087,500	100.00	2.65		DPUPKP
		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Capaian kinerja pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Persen	100	13,322,601,883	100	2,678,194,254		2,920,744,552	100	2,515,007,718	100	5,193,201,972	100.00	38.98		DPUPKP
		1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Capaian kinerja penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Persen	12	1,700,460,720	100	300,778,832		80,035,180	100	55,133,990	100	355,912,822	833.33	20.93		DPUPKP
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	52.95	27,706,085,054	49.9	8,990,795,750	0	4,205,342,558	49.9	4,060,273,400	49.9	13,051,069,150	94.24	47.11		DPUPKP
		1.04.03.2.03	Penaatan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Capaian Kinerja Penaatan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	100	27,706,085,054	100	8,990,795,750	100	4,205,342,558	0	4,060,273,400	0	13,051,069,150	-	47.11		DPUPKP
		1.04.03.2.03.08	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni	Persen	100	10,084,832,515	99.25	340,000,000		340,000,000	4.14236111	340,000,000	4.1423611	680,000,000	4.14	6.74		DPUPKP
		1.04.04.2.01	Peneguhan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Peneguhan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	10,084,832,515	100	340,000,000		340,000,000	100	340,000,000	100	680,000,000	100.00	6.74		DPUPKP
		1.04.04.2.01.01	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100	1,699,130,100	100	363,530,000		778,178,200	100	705,204,350	100	1,068,734,350	100.00	62.90		DPUPKP
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Capaian kinerja penyelenggaraan PSU Perumahan	Persen	100	1,699,130,100	100	363,530,000		778,178,200	100	705,204,350	100	1,068,734,350	100.00	62.90		DPUPKP
		2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	81.50	38,361,637,474	82.68	7,293,638,746	80.75	7,643,759,016	82.68	7,499,338,932	82.68	14,792,977,678	101.45	38.56		Dishub
		2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	374,000,000	100	51,942,500	100	95,124,000	100	94,974,000	100.00	146,916,500	100.00	39.28		Dishub
		2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	100	33,383,364,150	100	5,435,524,630	100	5,850,300,642	100	5,717,970,775	100.00	11,153,495,405	100.00	33.41		Dishub
		2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	%	100	51,000,000	100	117,575,000	100	149,224,798	100	148,144,500	100.00	265,719,500	100.00	521.02		Dishub
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	675,783,900	100	423,869,736	100	526,980,570	100	521,562,640	100.00	945,432,376	100.00	139.90		Dishub
		2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	2,576,013,850	100	774,513,164	100	616,671,059	100	612,247,608	100.00	1,386,760,772	100.00	53.83		Dishub
		2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	%	100	1,301,475,774	100	490,213,716	100	405,457,947	100	404,439,409	100.00	894,653,125	100.00	68.74		Dishub

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RPKD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1																			
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	%	30.43	59,073,769,000	38.46	19,975,931,628	30.43	25,598,003,953	38.46	25,167,086,076	38.46	45,143,017,704	126.39	76.42		Dishub
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	%	31.02	40,251,776,750	13.92	15,394,359,600	18.19	20,462,101,800	18.19	20,107,699,050	18.19	35,502,058,650	58.64	88.20		Dishub
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C	%	50	1,235,200,000	40	934,859,131	40	906,649,289	40	873,737,296	40.00	1,808,596,427	80.00	146.42		Dishub
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor	%	55.2	5,795,571,430	50	911,361,775	51	693,340,000	51	669,262,780	51.00	1,580,624,555	92.39	27.27		Dishub
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	%	62.74	10,578,311,300	47.61	2,152,404,122	51.39	2,742,798,000	51.39	2,729,563,050	51.39	4,881,967,172	81.91	46.15		Dishub
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi	%	43.5	412,167,680	30.9	47,580,000	34.1	225,356,000	34.1	219,905,600	34.10	267,485,600	78.39	64.90		Dishub
		2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rencana Umum Jaringan Trayek	Angka	56.5	600,494,560	56.5	525,369,500	56.5	557,758,864	56.5	556,965,800	56.50	1,082,335,300	100.00	180.24		Dishub
		2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Ijin Trayek	Angka	0.28	200,247,280	0.28	9,997,500	0.28	10,000,000	0.28	9,952,500	0.28	19,950,000	100.00	9.96		Dishub
		1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	(%)	100	9,580,000,000	0	0	100	500,000,000	100	495,755,000	100.00	495,755,000	100.00	5.17		Dishub
		1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah kadipaten	%	100	9,580,000,000	0	0	100	500,000,000	100	495,755,000	100.00	495,755,000	100.00	5.17		Dishub
2			Terpenuhiya kualitas sarana prasarana publik	Kesesuaian pemanfaatan ruang	persen	75.2	48,606,986,695.00	75.2	12,019,361,983.00	75.05	15,902,155,456.00	#REF!	#REF!	#REF!					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	Persen	100	600,000,000	n/a	n/a	100	105,568,000	100	104,034,750	100	104,034,750	100.00	17.34		DPTR
		1.03.09.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	Persen	100	600,000,000	n/a	n/a	100	105,568,000	100	104,034,750	100	104,034,750	100.00	17.34		DPTR
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	persen	70,40	7,182,829,950	100	1,699,429,314	70,10	1,964,567,560	70,10	1,953,965,120	70,10	3,653,394,434	99.57	50.86		DPTR
		1.03.12.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan rencana Rinci Tata ruang (RRTR) Kabupaten /Kota	Capaian kinerja Kegiatan Penetapan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan rencana Rinci Tata ruang (RRTR) Kabupaten /Kota	persen	100	2,597,659,000	100	916,167,550	100	778,582,000	100	777,120,800	10000%	1,693,288,350	100.00	65.19		DPTR
		1.03.12.2.02	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota	capaian kinerja Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota	persen	100	785,000,000	100	94,648,750	100	144,735,000	100	144,574,000	10000%	239,222,750	100.00	30.47		DPTR
		1.03.12.2.03	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Persen	100	925,000,000	n/a	n/a	100	238,956,000	100	236,712,000	10000%		100.00			DPTR
		1.03.12.2.04	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten /Kota	Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten /Kota	persen	100	2,875,170,950	100	688,613,014	100	802,294,560	100	795,558,320	10000%	1,484,171,334	100.00	51.62		DPTR
		1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	persen	90	500,000,000	90	308,551,500	90	882,801,500	90	864,626,850	9000%	1,173,178,350	100.00	234.64		DPTR
		1.03.13.5.01	Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian kinerja Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen	2	500,000,000	1	308,551,500	1	582,801,500	1	571,836,400	1	880,387,900	50.00	176.08		DPTR
			Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	Capaian kinerja kegiatan pengendalian pemanfaatan penataan ruang satuan ruang strategis	Persen	100	-	n/a	n/a	100	300,000,000	100	292,790,450	10000%	292,790,450	100.00			DPTR
		2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	86	891,691,425	100	5,589,121,179	82	6,983,548,696	82.41	6,776,643,529	82	12,365,764,708	95.83	1,386.78		DPTR
		2.10.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100	94,900,000	100	7,600,000	100	30,000,000	100	29,913,500	10000%	37,513,500	100.00	39.53		DPTR
		2.10.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Daerah	persen	100	317,011,980	100	4,923,750,527	100	5,421,355,694	100	5,289,569,808	10000%	10,213,320,335	100.00	3,221.75		DPTR
		2.10.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100	153,923,120	100	30,464,416	100	36,629,066	100	35,660,700	10000%	66,125,116	100.00	42.96		DPTR
		2.10.01.2.06	Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	100	49,598,000.00	100	231,373,990.00	100	909,509,550	100	848,446,901	10000%	1,079,820,891	100.00	2,177.15		DPTR
		2.10.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	10,000,000	100	39,741,600			0	0		39,741,600	-	397.42		DPTR
		2.10.01.2.08	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan PemerintahanDaerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	5,600,000	100	156,031,696	100	184,983,240	100	179,300,400	10000%	335,332,096	100.00	5,988.07		DPTR
		2.10.01.2.09	Kegiatan pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	260,658,325.00	100	200,158,950.00	100	401,071,146	100	393,752,220	10000%	593,911,170	100.00	227.85		DPTR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RPKD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD Kabupaten/kota tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5																
		2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	persen	100	60,000,000.00		313,480,000.00	100	225,000,000	100	223,400,000	10000%	536,880,000	100.00	894.80	DPTR		
		2.10.04.2.01	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kinerja kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	60,000,000		313,480,000	100	225,000,000	100	223,400,000	10000%	536,880,000	100.00	894.80	DPTR		
		2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persen	90	35,986,090,320	65	274,122,890	90	563,451,700	90	416,897,925	9000%	691,020,815	100.00	1.92	DPTR		
		2.10.10.2.01	Kegiatan Penggunaan tanah yang hamperannya dalam satu daerah Kabupaten/ kota	Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamperannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	35,986,090,320	65	274,122,890	100	563,451,700	100	416,897,925	10000%	691,020,815	100.00	1.92	DPTR		
		2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipatan	persen	64.89	3,386,375,000	95	3,834,657,100	33.03	5,177,218,000	33.03	4,458,556,620	33.03	8,293,213,720	50.90	244.90	DPTR		
		2.10.11.5.01	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipatan	capaian kinerja kegiatan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipatan	persen	90	1,400,000,000	95	3,439,936,100	90	4,696,818,000	90	3,978,357,620	9000%	7,418,293,720	100.00	529.88	DPTR		
		2.10.11.5.02	Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipatan	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipatan	Persen	100	1,611,375,000	n/a	305,180,000	35.37	390,400,000	0	390,400,000	0%	695,580,000	-	43.17	DPTR		
		2.10.11.5.03	Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Cakupan penyediaan sarana dan prasarana pendukung keistimewaan	persen	100	375,000,000	n/a	89,541,000	100	90,000,000	100	89,799,000	100	179,340,000	100.00	47.82	DPTR		
Jumlah Anggaran Sasaran 7							956,270,990,892		185,714,264,979		207,643,702,570	#REF!	#REF!							
<b>SASARAN 8: Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas</b>																				
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas						Indeks	66.072	171,422,887,334	62.84	36,036,712,344	63.59	41,326,625,734	#REF!	#REF!	#REF!				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	1,100,000,000.00	-	-	100	877,765,400.00	100.00	861,603,560.00	100.00	861,603,560.00	100.00	78.33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		1.03.13.5.02	Kegiatan Pemanfaatan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipatan	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipatan	Persen	100	1,100,000,000.00	-	-	100	877,765,400.00	100	861,603,560.00	100	861,603,560.00	100.00	78.33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	84	73,922,397,574.00	83.11	13,179,155,104.00	83.25	14,628,332,814.00	82.26	14,248,528,728.00	82.26	27,427,683,832	97.93	37.10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		2.11.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	81,700,000.00	100	10,712,500.00	100	12,175,000.00	100	12,082,500.00	400	22,795,000	400.00	27.90	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		2.11.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	53,717,644,334.00	100	10,049,206,046.00	100	10,475,037,241.00	100.00	10,212,139,499.00	100	20,261,345,545	100.00	37.72	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		2.11.01.2.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian pengelolaan retribusi daerah	Persen	100	24,225,000.00	-	-	100	5,100,000.00	100	5,100,000.00	100	5,100,000	100.00	21.05	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		2.11.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Kantor	Persen	100	12,750,000.00	-	-	100	2,550,000.00	100	2,400,000.00	100	2,400,000	100.00	18.82	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		2.11.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	2,648,214,898.00	100	507,799,500.00	100	870,852,565.00	100	834,858,590.00	100	1,342,658,090	100.00	50.70	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		2.11.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	persen	100	31,332,434.00	100	60,531,000.00	-	-	-	-	-	60,531,000	-	193.19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		2.11.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	3,760,891,520.00	100	534,198,130.00	100	757,725,820.00	100	724,090,620.00	100	1,258,288,750	100.00	33.46	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		2.11.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100	13,645,639,388	100	2,016,707,928	100	2,504,892,188	100	2,457,857,519	100	4,474,565,447	100.00	32.79	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	persen	100	3,337,795,740.00	14.29	380,910,706.00	57.14	937,600,000.00	71.43	806,834,740.00	71	1,187,745,446	71.43	35.58	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		2.11.02.2.01	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Persen	100	1,737,795,740.00	100	380,910,706.00	100	430,700,000.00	100.00	417,532,200.00	100	798,442,906	100.00	45.95	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		2.11.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Capaian Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Persen	100	1,600,000,000.00	-	-	100	506,900,000.00	100	389,302,540.00	100	389,302,540	100.00	24.33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	persen	90	11,735,237,000.00	70	4,087,211,887.00	75	2,753,936,561.00	70	2,674,775,017.15	70	6,761,986,904	77.78	57.62	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	persen	80	8,812,494,760.00	65	3,579,618,315.00	68	1,796,175,301.00	68	1,734,811,001.15	68	5,314,429,316	85.00	60.31	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		2.11.03.2.02	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Uji Kualitas Lingkungan	Persen	100	1,597,742,240.00	100	403,337,973.00	100	679,911,260.00	100	669,485,356.00	100	1,072,823,329	100.00	67.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		2.11.03.2.03	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	persen	100	180,000,000.00	25	5,000,000.00	50.00	45,225,000.00	50	40,252,760.00	50	45,252,760	50.00	25.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	persen	38	27,222,737,680.00	45.54	3,941,555,831.00	32	5,179,296,945.00	40.35	5,013,622,946.00	40	8,955,178,777	106.18	32.90	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		2.11.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH kawasan perkotaan	persen	18	27,222,737,680.00	14.81	3,941,555,831.00	15	5,179,296,945.00	15.00	5,013,622,946.00			-	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)Taman	Persen	100		100		100		100		100	3,941,555,831	100.00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		2.11.05.2.01	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	Persen	38.32	95,175,000.00	137.5	14,675,000.00	33.10	15,300,000.00	131.58	15,195,000.00	132	29,870,000	343.37	31.38	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan pelayanan pengelolaan limbah B3	Persen	100	95,175,000.00	100	14,675,000.00	100	15,300,000.00	100	15,195,000.00	100	29,870,000	100.00	31.38	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		2.11.06.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang IZIN Lingkungan dan IZIN PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan	persen	33.33	301,900,000.00	16.67	31,765,000.00	23.33	105,549,960.00	16.67	105,509,154.00	17	137,274,154	50.02	45.47	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		



No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RPKD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pertumbuhan Pendampingan lembaga masyarakat dan institusi lingkungan hidup	persen	25	574,820,500.00	5	123,900,500.00	5.00	135,705,000.00	5.00	135,482,960.00	5	259,383,460	20.00	45.12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.08.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Pendidikan (Sekolah Adiwijaya), Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup	lembaga	25	574,820,500.00	27	123,900,500.00	22.00	135,705,000.00	22.00	135,482,960.00	22	259,383,460	88.00	45.12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional	penghargaan	5	205,310,000.00	1	20,157,500.00	1	33,025,000.00	1.00	33,002,500.00	1	53,160,000	20.00	25.89	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.09.2.01	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah	Cakupan penghargaan bidang lingkungan hidup	persen	100	205,310,000.00	100	20,157,500.00	100	33,025,000.00	100.00	33,002,500.00	100	53,160,000	100.00	25.89	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Capaian Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	persen	100	124,950,000.00	100	193,682,500.00	100	227,700,000.00	100	226,630,000	100	420,312,500	100.00	336.38	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.10.2.01	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Aduan	Persen	100	124,950,000.00	100	193,682,500.00	100	227,700,000.00	100	226,630,000.00	100	420,312,500	100.00	336.38	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	50.07	52,802,563,840.00	43.73	14,063,698,316.00	44.16	16,432,414,054.00	38.20	15,910,883,404.00	38	29,974,581,720	76.29	56.77	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.11.2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang terkurangi	persen	22.81	52,802,563,840.00	19.83	14,063,698,316.00	21.35	16,432,414,054.00	25.74	15,910,883,404.00		29,974,581,720	-	56.77	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
				Persentase Cakupan Area Pelayanan	persen	45		41.89		42.79		22.59		23		50.19		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Jumlah Anggaran Sasaran 8							171,422,887,334.00		36,036,712,344.00		41,326,625,734.00	#REF!	#REF!						
<b>SASARAN</b>	<b>Terwujudnya penurunan risiko bencana</b>																		
Terwujudnya penurunan risiko bencana			Indeks Risiko Bencana			Indeks	154.27	51,404,772,500	167.97	16,554,472,878	169.94	17,620,753,261	#REF!	#REF!	#REF!				BADAN PENANGGULANGAN BPBD
		1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	-	0	-	100	404,350,000	100	352,811,500	100.00	352,811,500	100.00			
		1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian Kinerja Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persen	100	-	0	-	100	404,350,000	100	352,811,500	100.00	352,811,500	100.00			
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	36,288,750,500	80	13,346,960,864	81	11,070,983,812	83.23	10,697,790,051	83.23	24,044,750,915	100.28	66.26	BPBD	
		1.05.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	96	232,625,000	95	13,935,000	95	24,000,000	100	23,070,000	100.00	37,005,000	104.17	15.91	BPBD	
		1.05.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	99	516,340,000	94	3,992,002,516	95	4,352,503,477	100	4,062,559,257	100.00	8,054,561,773	101.01	1,559.93	BPBD	
		1.05.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	98	20,000,000	95	4,061,790,016	95	1,000,000	100	1,000,000	100.00	4,062,790,016	102.04	20,313.95	BPBD	
		1.05.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	97	1,792,868,848	93	288,611,050	95	438,643,184	100	415,286,476	100.00	703,897,526	103.09	39.26	BPBD	
		1.05.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Capaian Kinerja Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	96	7,837,275,000	93	200,550,750	95	809,936,000	100	795,869,857	100.00	996,420,607	104.17	12.71	BPBD	
		1.05.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	97	21,927,910,586	92	3,873,475,135	95	4,416,755,380	100	4,394,560,414	100.00	8,268,035,549	103.09	37.71	BPBD	
		1.05.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	97	3,961,731,066	95	916,596,397	95	1,028,145,771	100	1,005,444,047	100.00	1,922,040,444	103.09	48.52	BPBD	
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	45	12,173,492,000	25	2,646,865,095	30	4,076,496,179	30	3,728,952,230	30.00	6,375,817,325	66.67	52.37	BPBD	
		1.05.03.2.01	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persen	75	452,000,000		802,768,000	60	1,247,117,659	60	1,134,317,500	60.00	1,937,085,500	80.00	428.56	BPBD	
		1.05.03	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	80	8,835,726,000		1,465,500,000	65	2,254,435,420	65	2,107,740,480	65.00	3,573,240,480	81.25	40.44	BPBD	
		1.05.03.2.03	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100	1,299,800,000		208,202,595	100	330,513,150	100	313,217,000	100.00	521,419,595	100.00	40.12	BPBD	
		1.05.03.2.04	PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	Capaian Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persen	90	1,585,966,000		170,394,500	82	244,429,950	82	173,677,250	82.00	344,071,750	91.11	21.69	BPBD	
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	2,942,530,000		560,646,919	100	2,068,923,270	100	1,987,077,925	100.00	2,547,724,844	100.00	86.58	BPBD	
		1.05.04.2.01	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Persen	89	1,783,580,000	85	392,531,919	86	1,047,148,250	86	1,000,066,800	86.00	1,392,598,719	96.63	78.08	BPBD	
		1.05.04.2.02	INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN	Capaian Pelayanan Peralatan Proteksi Kebakaran	Persen	75	165,000,000	50	23,575,000	65	30,599,970	65	30,536,250	65.00	54,111,250	86.67	32.79	BPBD	
		1.05.04.2.04	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persen	90	717,750,000	75	124,910,000	82	902,500,050	82	868,539,875	82.00	993,449,875	91.11	138.41	BPBD	
		1.05.04.2.05	PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA	Capaian Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persen	100	276,200,000	100	19,630,000	100	88,675,000	100	87,935,000	100.00	107,565,000	100.00	38.94	BPBD	
Jumlah Anggaran Sasaran 9:							51,404,772,500		16,554,472,878		17,620,753,261	#REF!	#REF!						
<b>SASARAN 1</b>	<b>Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)</b>																		

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPd Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
			Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	orang	70,668	136,134,077,503	73,689	17,533,983,112	71,667	13,064,178,788	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	DINAS SOSIAL
		X.XX.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	29,984,346,656	0	1,143,436,672	82	7,324,327,098	82	7,174,281,999	82	8,317,718,671	98.80	27.74	DINAS SOSIAL
		X.XX.1.201	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Angka	82	904,549,828	0	240,113,225	82	432,530,300	82	432,519,880	82	672,633,105	100.00	74.36	DINAS SOSIAL
		X.XX.1.202	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	bulan	12	23,598,806,212	0	352,628,582	12	5,099,129,048	12	4,997,049,735	12	5,349,678,317	100.00	22.67	DINAS SOSIAL
		X.XX.1.205	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	angka	100	15,142,260	0	4,642,500	82	2,540,250	100	2,507,750	100	7,150,250	100.00	47.22	DINAS SOSIAL
		X.XX.1.206	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	100	1,809,072,297	0	254,294,390	100	578,855,985	100	561,778,170	100	816,072,560	100.00	45.11	DINAS SOSIAL
		X.XX.1.208	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang	persen	100	945,311,551	0	345,041,875	82	286,271,115	100	271,688,179	100	616,730,054	100.00	65.24	DINAS SOSIAL
		X.XX.1.209	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	2,711,464,508	0	201,010,490	12	925,000,400	12	908,738,285	12	1,109,748,775	100.00	40.93	DINAS SOSIAL
		1.6.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	persen	80	47,993,931,785	0	8,401,423,098	70	-	-	0	8,401,423,098	-	17.51	DINAS SOSIAL	
		1.6.4.201	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan pengemis diluar panti sosial	Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	persen	70	47,671,900,553	70	8,248,088,722	100	7,693,072,753	70	7,801,418,390	140	16,049,507,112	200.00	-	DINAS SOSIAL
		1.6.4.202	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	persen	70	322,031,232	70	153,334,376	70	283,699,200	70	283,110,700	140	436,445,076	200.00	135.53	DINAS SOSIAL
		1.6.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	persen	80	51,502,243,794	0	6,943,201,818	60	3,800,403,885	80	3,774,340,735	80	10,717,542,553	100.00	20.81	DINAS SOSIAL
		1.6.5.202	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	persen	60	51,502,243,794	0	6,943,201,818	100%	3,800,403,885	60	3,774,340,735	60	10,717,542,553	100.00	20.81	DINAS SOSIAL
		1.6.6.x.x	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	persen	100	2,469,265,877	80	-	98	464,409,530	100	514,709,880	180	514,709,880	180.00	20.84	DINAS SOSIAL
		1.6.6.201	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	persen	80	859,416,877	97	304,711,500	98	272,599,750	80	324,669,730	177	629,381,230	221.25	73.23	DINAS SOSIAL
		1.6.6.202	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Capaian pemberdayaan masyarakatkesiapsiagaan bencana	persen	75	1,609,849,000	58.5	335,979,230	75	191,809,780	75	190,040,150	133.5	526,019,380	178.00	32.68	DINAS SOSIAL
		1.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	persen	85	2,769,797,239	60	873,920,398	70	1,248,345,470	85	1,247,429,070	145	2,121,349,468	170.59	76.59	DINAS SOSIAL
		1.6.2.202	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uangan barang	kelompok	35	25,208,748	0	12,450,000	35	10,582,500	35	10,582,500	35	23,032,500	100.00	91.37	DINAS SOSIAL
		1.6.2.203	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	persen	80	2,744,588,491	25	861,470,398	80	1,237,762,970	80	1,236,846,570	105	2,098,316,968	131.25	76.45	DINAS SOSIAL
		1.6.7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan lembaga/organisasi masyarakatyang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keberintisan, kepahlawanan, dankesetiakawanan sosial	persen	75	1,414,492,152	75	172,001,126	75	226,692,805	75	224,157,180	150	396,158,306	200.00	28.01	DINAS SOSIAL
		1.6.7.201	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Capaian pemeliharaan taman makapahlawan dan Monumen	persen	100	1,414,492,152	70	172,001,126	100	226,692,805	100	224,157,180	170	396,158,306	170.00	28.01	DINAS SOSIAL
Jumlah Anggaran Sasaran 10:							136,134,077,503		17,533,983,112		13,064,178,788	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
<b>SASARAN 1</b> Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak																		
Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	75.96	9,881,382,632	65.03	1,384,672,908	71.01	1,615,849,690	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Desa Prima	Persen	42.67	3,635,000,000	37.33	477,885,000	38.67	332,315,000	0	329,915,000	0	807,800,000	-	22.22	DP3AP2KB
		2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan	Desa	14	3,635,000,000	11	477,885,000	4	332,315,000	4	329,915,000	4	807,800,000	28.57	22.22	DP3AP2KB
				rekomendasi dan pendampingan desa prima	Desa							0						

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPd Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun )		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1																		
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	75	1,754,447,000	62	257,277,500	66	263,887,500	10	263,887,500	10	521,165,000	13.33	29.71	DP3AP2KB
		2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah yang melakukan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG Program) pada anggaran masing-masing perangkat daerah	Perangkat Daerah	45	766,085,000	25	10,625,000	45	20,025,000	45	20,025,000	45	30,650,000	100.00	4.00	DP3AP2KB
		2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Partisipasi Perempuan di organisasi masyarakat	Persen	83	320,737,000	50	16,575,000	72	129,075,000	0	129,075,000	0	145,650,000	-	45.41	DP3AP2KB
		2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	75	667,625,000	30	230,077,500	66	114,787,500	0	114,787,500	0	344,865,000	-	51.66	DP3AP2KB
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan	per 100.000 Penduduk	0.00026	3,541,015,392	0.00059	641,660,408	0.00032	950,860,570	0	905,400,400	0	1,547,060,808	-	43.69	DP3AP2KB
		2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Lembaga	55	437,273,814	40	146,950,000	40	149,500,000	40	144,000,000	40	290,950,000	72.73	66.54	DP3AP2KB
		2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga yang menyediakan layanan rujukan	Lembaga	11	2,997,491,578	7	472,185,408	7	626,635,570	7	587,925,400	7	1,060,110,808	63.64	35.37	DP3AP2KB
		2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPP	Lembaga	55	106,250,000	60	22,525,000	40	174,725,000	0	173,475,000	0	196,000,000	-	184.47	DP3AP2KB
		2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase partisipasi perempuan di lembaga	Persen	11	950,920,240	7	7,850,000	8	68,786,620	0	64,961,500	0	72,811,500	-	7.66	DP3AP2KB
		2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan analisis dan data gender dan anak	Dokumen	1	950,920,240	1	7,850,000	1	68,786,620	1	64,961,500	1	72,811,500	100.00	7.66	DP3AP2KB
2			Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	KLA (950)	63,509,742,308	Nindya (715)	17,273,503,564	Utama	19,344,007,029	#REF!	#REF!	#REF!	1.00	-	DP3AP2KB	
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan desa layak anak	Kalurahan	75	2,811,598,490	75	477,497,325	30	548,411,745	30	540,336,620	30	1,017,833,945	40.00	36.20	DP3APPKB
		2.08.06.2.01	Pengembangan P3A pada Lembaga Pemerintahan, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak	Persen	20	869,174,500	65.60	124,550,000	12	139,394,140	0	136,069,140	0	260,619,140	-	29.98	DP3APPKB
		2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga mitra P3A yang mengakomodir kegiatan anak	Lembaga	60	1,942,423,990		352,947,325	30	409,017,605	0	404,267,480	0	757,214,805	-	38.98	DP3APPKB
		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Capaian kegiatan anak yang terakomodir	Kegiatan	85		3				0		0		-	-	DP3APPKB
		2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	3,917,457,175	100	819,561,081	100	970,097,200	100	829,746,570	100	1,649,307,651	100.00	42.10	DP3APPKB
		2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak	Persen	100	3,610,957,175	100	717,255,081	100	868,437,200	100	728,086,570	100	1,445,341,651	100.00	40.03	DP3APPKB
		2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak	Lembaga	1	306,500,000	1	102,306,000	1	101,660,000	1	101,660,000	1	203,966,000	100.00	66.55	DP3APPKB
		2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	83	33,439,033,668	83	5,132,816,884	83	6,955,798,039	82.53	6,646,279,236	82.53	11,779,096,120	99.43	35.23	DP3APPKB
		2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	95,000,000		86,071,044	100	104,394,000	100	104,376,500	100	190,447,544	100.00	200.47	DP3APPKB
		2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	26,018,048,668	100	4,117,322,774	100	4,820,205,478	100	4,611,084,826	100	8,728,407,600	100.00	33.55	DP3APPKB
		2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	2,657,463,940	100	283,764,660	100	1,135,073,427	100	1,072,711,902	100	1,356,476,562	100.00	51.04	DP3APPKB
		2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persen	100	170,000,000			100	9,102,000	100	9,102,000	100	9,102,000	100.00	5.35	DP3APPKB
		2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	100						0				-	-	DP3APPKB
		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	1,141,872,090	100	276,777,338	100	191,538,000	100	175,665,608	100	452,442,946	100.00	39.62	DP3APPKB
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen	100	3,356,648,970	100	368,881,068	100	695,485,134	100	673,338,400	100	1,042,219,468	100.00	31.05	DP3APPKB
				Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))	Angka	1.62	734,544,950	1.67	273,096,350		494,850,000	0	463,892,300	0	736,988,650	-	100.33	DP3APPKB

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	Bulan	12	147,044,950	12	19,307,500	12	59,850,000	12	55,285,000	12	74,592,500	100.00	50.73	DP3APPKB
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Updading Data Program KKBPBK setiap bulan	Persen	100	587,500,000	100	253,788,850	100	435,000,000	100	408,607,300	100	662,396,150	100.00	112.75	DP3APPKB
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCP))	Persen	77.2	16,815,166,650	73.5	6,539,876,924	72.44	6,712,980,045	72.44	6,240,114,800	72.44	12,779,991,724	93.83	76.00	DP3APPKB
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE	Persen	80	8,079,621,635	80	2,004,438,774	80	1,983,416,250	80	1,971,633,250	80	3,976,072,024	100.00	49.21	DP3APPKB
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB	Persen	100	6,145,748,110	100	888,755,500	100	1,111,924,380	100	1,105,438,000	100	1,994,193,500	100.00	32.45	DP3APPKB
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Persen	90	1,585,000,000	90	2,729,557,650	90	2,788,176,915	90	2,337,706,050	90	5,067,263,700	100.00	319.70	DP3APPKB
		2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja	Persen	80	1,004,796,905	80	917,125,000	80	829,462,500	80	825,337,500	80	1,742,462,500	100.00	173.41	DP3APPKB
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persen	85.5	5,791,941,375	83	4,030,655,000	84	3,661,870,000	0	3,586,542,500	0	7,617,197,500	-	131.51	DP3APPKB
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R	Persen	100	3,461,561,730	100	4,016,432,500	100	3,515,187,500	100	3,469,065,000	100	7,485,497,500	100.00	216.25	DP3APPKB
		2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya	Persen	100	2,330,379,645	100	14,222,500	100	146,682,500	100	117,477,500	100	131,700,000	100.00	5.65	DP3APPKB
Jumlah Anggaran Sasaran 11:							73,391,124,940		18,658,176,472		20,959,856,719		#REF!					

## **2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah**

### **2.4.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

1. Permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah.

Pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 memiliki tema ” Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”. Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2023, sebagai berikut:

- a. Pengurangan Kemiskinan;
- b. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
- c. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
- d. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
- e. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
- f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Permasalahan pembangunan daerah dari hasil evaluasi pada tahun 2023 yang berhubungan dengan prioritas diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Pengurangan kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan krusial dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. Pada Tahun 2023 tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul menurun menjadi 11,96% atau lebih rendah 0,94% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 12,0. Apabila dibandingkan dengan dengan tingkat kemiskinan DIY dan Nasional, tingkat kemiskinan di Bantul masih relatif lebih tinggi. Dalam menyikapi angka kemiskinan Pemerintah Pusat menargetkan angka kemiskinan ekstrim mencapai nol persen pada tahun 2024. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bantul masih menjadi permasalahan termasuk jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan bantuan sosial bagi warga miskin melalui

program bantuan sosial pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

2) Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA)

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada periode tahun 2020-2024 merupakan puncak bonus demografi. Menghadapi kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Bantul harus cepat dan tepat dalam mengambil kebijakan pembangunan terutama Pembangunan manusia dan kependudukan, karena kondisi ini selain membawa dampak positif juga akan membawa dampak negative bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bantul. dengan menangkap peluang adanya bonus demografi khususnya kebijakan pendidikan, kesehatan dan Kebudayaan. Kendala dalam pelaksanaannya antara lain:

a. Pendidikan

Angka Harapan Lama sekolah di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan dari 15,48 menjadi 15,61, hal ini menunjukkan minat penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi (setara D3) semakin meningkat. Akan tetapi dilihat dari rata-rata lama sekolah diketahui bahwa juga terdapat kenaikan dari 9,55 tahun pada tahun 2020 menjadi 9,79 pada tahun 2023. Angka ini juga menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bantul bersekolah sampai tamat setingkat Sekolah Menengah Pertama. Hal ini selaras dengan angka putus sekolah yang cukup tinggi sebesar 0,039% pada jenjang SD/MI dan 0,098% pada jenjang SMP/Mts, yang berarti bahwa kesadaran dan pemahaman orang tua siswa tentang pentingnya Pendidikan meningkat.

b. Kesehatan

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bantul memiliki tren yang luktatif, untuk AKB pada tahun 2023 mengalami penurunan tercatat 7,59 per 1000 kelahiran hidup (81 kematian) dibanding

tahun 2022 sebesar 8,30 per 1.000 kelahiran hidup (90 kematian). Meskipun di tahun 2023 AKB Kabupaten Bantul menurun, urusan pelayanan kesehatan terhadap bayi dan balita masih perlu menjadi perhatian. AKB dilihat dari data Dinas Kesehatan diketahui faktor penyebab kematian bayi terbanyak disebabkan karena aspirasi, diare, perdarahan intrakranial dan penyebab lainnya dengan jumlah 29 kasus atau 36%.

Prevalensi stunting di Kabupaten Bantul tahun 2023 meningkat menjadi 6,45% setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 6,42%, akan tetapi jika dilihat dari angka absolut jumlah balita stunting di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 3.001 pada tahun 2023 menjadi sebanyak 2.863 balita. Determinan permasalahan penyebab stunting di Kabupaten Bantul tahun 2023 terbanyak adalah keluarga miskin sebesar 47,29% dan pengasuhan anak kepada campuran sebesar 30,03%.

#### c. Kebudayaan

Perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi saat ini, membawa dampak kepedulian dan etika generasi muda dalam menghargai budaya daerah dan toleransi menjadi berkurang. Kepedulian dan etika terhadap budaya daerah akan berpengaruh terhadap pola perilaku masyarakat. Kasus kriminalitas di Kabupaten Bantul tahun 2023 secara umum mengalami penurunan dibanding tahun 2022 lalu, berdasarkan data kriminalitas 2023 yang dirilis Polres Bantul (sumber: <https://medsosid.com/kasus-kriminalitas-di-kabupaten-bantul-menurun-di-tahun-2023/>), total kasus kejahatan selama tahun 2023 sebanyak 917 kasus, jumlah ini menurun dari tahun 2022 yang terdapat 1.577 kasus kejahatan. Akan tetapi masih tingginya kejadian kriminalitas di Bantul menjadikan pemerintah daerah bersama dengan instansi vertikal (kepolisian dan kejaksaan) harus berupaya meningkatkan keamanan yang kondusif di masyarakat,

menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi

Terbangunnya infrastruktur khususnya layanan publik sangat berperan terhadap peningkatan dan perkembangan ekonomi. Kondisi jalan yang rusak dan saluran irigasi yang belum memadai merupakan salah satu penyebab hambatan peningkatan dan perkembangan ekonomi suatu daerah. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sebagai prasarana distribusi barang dan jasa. Kabupaten Bantul masih memiliki jalan dalam kondisi belum mantap dengan panjang 427,63 km, sehingga untuk memperlancar transportasi dan mendukung perekonomian masih diperlukan penanganan jalan agar semua jalan di Kabupaten Bantul bisa dalam kondisi mantap. Demikian pula saluran irigasi, luas sawah sepanjang daerah irigasi kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik mencapai 80,66% (6.964,03 ha) di tahun 2023. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa belum semua daerah irigasi memiliki saluran irigasi kualitas baik dan teraliri dengan baik. Selain itu sarana prasarana publik pada destinasi wisata sebagai lokomotif perekonomian juga belum memadai. Pengembangan Desa Wisata dapat dijabarkan dalam 3 tahap yaitu Rintisan, Berkembang, Maju dan Mandiri. Desa Wisata di Kabupaten Bantul tahun 2023 sebanyak 51 Desa Wisata meningkat dari tahun 2022 yang sebanyak 47 Desa Wisata, dengan kategori mandiri sebanyak 2 Desa Wisata, kategori Maju sebanyak 9 desa wisata, kategori Berkembang sebanyak 11 desa wisata dan sisanya sebanyak 29 desa wisata termasuk kategori Rintisan/Embrio.

4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana

Sejak akhir November 2022 TPAS Regional Piyungan eksisting telah ditutup. Sampah rumah tangga yang berasal dari kabupaten dan kota sementara dibuang di TPA Sampah Transisi, namun



kapasitasnya sangat terbatas. Kabupaten Bantul sebagai salah satu daerah yang terimbas dengan penutupan TPAS Piyungan berusaha mengatasi permasalahan sampah dengan telah melakukan proses pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yaitu TPST Modalan dan ITF Niten. Pengelolaan sampah diawali dari sumbernya yaitu rumah tangga dan hal ini telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, sedangkan arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Neraca pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul tahun 2023 menunjukkan bahwa potensi timbulan sampah 162.715,10 ton/tahun, jumlah sampah yang dikelola sebesar 104.032,38 ton/tahun (63,94%) dan jumlah sampah yang tidak terkelola sebesar 58.682,73 ton/tahun (36,06%) dengan capaian pengurangan sampah 25,74%% (41.882,71 ton/tahun; sedangkan untuk penanganan sampah tercapai 38,20% (62.149,66 ton/tahun). Analisis survei potensi timbulan sampah Kabupaten Bantul tahun 2023, dengan melakukan survei timbulan sampah sesuai SNI 19-3964-1994 didapatkan hasil potensi timbulan sampah sebesar 0,44 kg/orang/hari atau 1,63 liter/orang perhari.

Permasalahan pengelolaan persampahan di wilayah Kabupaten Bantul antara lain:

- a) Kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi perlu ditingkatkan.
- b) Peran dan kapasitas Kelompok Pengelola Sampah (BUMKal, TPS 3R dan Pelanggan Sampah) masih perlu untuk ditingkatkan.

- c) Regulasi operasional terkait pengelolaan sampah perlu disusun dan ditetapkan.
- d) Masih perlunya pembangunan fasilitas dan sarana prasarana pengelolaan sampah (Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF)).

Upaya pengurangan sampah dari sumbernya salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk Bank Sampah. pembentukan bank sampah merupakan kesadaran kolektif masyarakat untuk mulai memilah, memanfaatkan, dan mendaur-ulang sampah.

Capaian Nilai Risiko Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah 149.27% yang tergolong kategori tinggi, meskipun lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 167,97%. Hal ini disebabkan kenaikan frekuensi bencana hidrometeorologi yang mengakibatkan kenaikan bencana khususnya longsor. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, berupa serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana). Pembentukan SPAB dan Kaltana di Kabupaten Bantul belum optimal, tahun 2023 baru sebanyak 45 SPAB dan 46 Kaltana

#### 5) Penguatan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi, maka perlu dilakukan modernisasi birokrasi pemerintahan yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Keterbukaan Informasi saat ini menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam pemenuhan akses informasi dibutuhkan sarana prasarana komunikasi dan informasi yang memadai untuk

memfasilitasi pelayanan dan transaksi elektronik di Perangkat Daerah, maupun pelayanan publik lainnya. Saat ini panjang sambungan *fiber optic* pada tahun 2023 sepanjang 186,179 km, meningkat sepanjang 22,076 km dari tahun 2022 yang hanya sepanjang 164,103 km.

2. Permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan sasaran pembangunan daerah.

Permasalahan yang berhubungan sasaran daerah adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel.

Permasalahan dalam sasaran ini antara lain jangkauan pelayanan publik secara digital belum bisa diakses seluruh kalurahan secara maksimal, dari 75 kalurahan baru menjangkau 45 kalurahan yang terkoneksi dengan fiber optik.

2. Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.

Wujud dari derajat kesehatan masyarakat yang tinggi diwakilkan dengan usia harapan hidup (UHH), UHH Kabupaten Bantul tahun 2023 sudah tercapai sebesar 74.64 bahkan melebihi target yang sebesar 74.11, akan tetapi jika dilihat dari indikator UHH di Kabupaten Bantul masih memiliki permasalahan yaitu masih tingginya kematian bayi (7,59 per 1.000 kelahiran hidup) dan kematian ibu (84,36 per 100.000 kelahiran hidup), yang disebabkan keterbatasan sumberdaya manusia kesehatan, dan sarana prasarana di puskesmas dan rumah sakit untuk kegawatdaruratan neonatal.

3. Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan.

Permasalahan dalam mencapai sasaran: adalah jumlah pendidik yang bersertifikasi di semua jenjang terbatas (47,18%) sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah pusat yang membatasi kuota tenaga kependidikan dan menaikkan *passing grade* pemberkasan

sertifikasi pendidik, serta sarana prasarana sekolah yang masih kurang lengkap.

4. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya.  
Permasalahan dalam mencapai sasaran antara lain masih terdapat potensi budaya yang belum dikembangkan secara optimal, hal ini ditunjukkan dengan perolehan predikat Desa Budaya dan Desa Mandiri Budaya di Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2023 untuk Desa Budaya berjumlah 24 Kalurahan dan 7 kalurahan yang merupakan Desa Mandiri Budaya.
5. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis.  
Permasalahan dalam mencapai kehidupan yang harmonis diantaranya pada tahun 2023 masih terdapat peningkatan penanganan terhadap PKL yang ditertibkan sebanyak 28 kejadian, Anak jalanan (Anjal) yang ditertibkan sebanyak 23 orang, meskipun untuk laporan kejahatan atau aduan Masyarakat tentang adanya gangguan ketertiban menurun menjadi 66 aduan.
6. Terwujudnya pemerataan pendapatan.  
Permasalahan belum tercapainya pemerataan pendapatan di Kabupaten Bantul karena angka pengangguran terbuka pada tahun 2023 masih tinggi yaitu sebesar 3.78 yang menunjukkan bahwa Bantul masih terdapat pengangguran, jika dilihat dari jumlah penduduk, penduduk yang menganggur sebanyak 24.875\* orang (data masih menggunakan data tahun 2022) dan juga semakin meningkatnya kesenjangan pembangunan di perkotaan dan perdesaan dilihat dari Gini ratio Bantul tahun 2023 sebesar 0,454, dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,410.
7. Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik  
Permasalahan sarana prasarana publik belum memadai antara lain infrastruktur jalan masih terdapat jalan di Bantul kondisi belum mantap (35.32%), dari 427.63 km sebagai bagian dari perubahan Keputusan Bupati mengenai status jalan Kabupaten

yang bertambah panjangnya dari 624,47 km menjadi 1.210,72 km. sedangkan untuk infrastruktur sektor pertanian, tingkat kecukupan air irigasi yang digunakan untuk mengalir lahan pertanian belum optimal karena masih terdapat 12,4% (12,567 km) saluran irigasi primer dan 8,85% (11.551 km) irigasi sekunder dalam kondisi rusak.

8. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas.

Permasalahan lingkungan hidup Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan indeks kualitas air tahun 2023 yang masih rendah di angka 39,83 meskipun jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 36,67 ada kenaikan akan tetapi kondisi ini tetap menunjukkan kualitas air di Kabupaten Bantul mengalami penurunan kualitas. Penurunan kualitas air ini sangat erat kaitannya dengan pola perilaku masyarakat dalam membuang sampah maupun limbah domestik ke sungai.

9. Terwujudnya penurunan risiko bencana.

Permasalahan dalam mencapai sasaran: masih tingginya kejadian bencana, khususnya bencana kebakaran dan tanah longsor, tahun 2023 bencana kebakaran di Kabupaten Bantul meningkat menjadi 357 kejadian. Jika dilihat dari indeks ketahanan daerah terdapat 2 prioritas yang masih harus ditingkatkan karena Kabupaten Bantul masuk kategori sedang (0,58). Untuk mencapai sasaran dibutuhkan prioritas penanganan bencana yaitu: Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

10. Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

Permasalahan perlindungan PPKS adalah belum semua tertangani dan terdata dengan baik.

11. Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak.

Permasalahan dalam mencapai sasaran adalah masih tingginya angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul bahkan meningkat dari tahun 2022 yang 161 kejadian menjadi 285 kejadian di tahun 2023. Dari kejadian tersebut yang paling banyak terjadi kekerasan secara fisik dan phisikis.

3. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah diuraikan berdasarkan hasil capaian kinerja penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

Tabel 2.334 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>							
	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>Indeks</b>	<b>81.09</b>	81.74	Melampaui			<b>INDIKATOR TUJUAN</b>
	<b>Umur Harapan Hidup</b>	<b>Tahun</b>	<b>74.11</b>	74.64	Melampaui			<b>IKU PEMDA</b>
	Net Death Rate (NDR)	permil	21	20.55	Melampaui		1. tersedianya tim Hospital Disaster Plan (HDP) dalam penanganan covid-19, peningkatan kapasitas SDM; 2. pembangunan jejaring kemitraan dengan rumah sakit mitra dan Puskesmas; 3. inovasi layanan serta tercapainya target standar pelayanan minimal.	Rumah Sakit Panembahan Senopati
	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	80.7	84.36	Tidak Tercapai	1. Prasarana (USG) yang belum terpenuhi di semua puskesmas 2. Pemanfaatan buku Kesehatan Ibu Anak yang belum optimal 3. Masalah pembiayaan bagi ibu melahirkan warga berdomisili di Bantul yang ber KTP di luar Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Faktor Sosial yang menyebabkan permasalahan dalam penanganan ibu hamil dengan komplikasi 5. Keterlambatan dalam mengambil keputusan. keterlambatan dalam mengidentifikasi faktor resiko dan kegawatdaruratan		Dinas Kesehatan

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama	
					Belum Tercapai (< )				
					Sesuai (=) Melampaui (>)				
	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	7.3	7.59	Tidak Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan sarana prasarana di Rumah Sakit untuk kegawatdaruratan neonatal</li> <li>2. Keterlambatan Identifikasi komplikasi pada pertumbuhan perkembangan janin</li> <li>3. Kemampuan tenaga kesehatan yang tidak merata di fasilitas kesehatan primer dalam penanganan kegawatdaruratan neonatal</li> </ol>			
	Case Fatalilty Rate Covid 19	%	2,5	5.7	Tidak Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kelonggaran kebijakan mengenai Covid menyebabkan Penderita Covid 19 yang diperiksa dan memeriksakan diri sedikit sehingga perbandingan untuk kasus Covid 19 menjadi meningkat</li> </ol>			
	Insiden Rate DBD	per 100.000 penduduk	120	14	Melampaui		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan dan komitmen kepala daerah serta stakeholder dalam upaya penangan DBD</li> <li>2. Terobosan teknologi terbaru dari World Mosquito Program dalam upaya penangan DBD</li> <li>3. Peran serta komprehensif dari kader, pamong desa dan lapisan masyarakat dalam program WoW Mantul</li> <li>4. Dukungan diagnosa dan tatalaksana di Fasyankes</li> </ol>		
	Prevalensi stunting	%	8.5	6.34	Melampaui		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen yang kuat dari masyarakat, lintas sektor, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah sakit dalam Penanganan stunting</li> </ol>		



## RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=) Melampaui (>)			
							2. Konvergensi 1000 Hari Pertama Kehidupan oleh lintas sektor dalam penanganan stunting berjalan baik 3. Adanya inovasi dalam penanganan stunting	
	<b>Angka Harapan Lama sekolah</b>	<b>Tahun</b>	<b>15.25</b>	15.61	Melampaui			<b>IKU PEMDA</b>
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	persen	94.22	100.05	Melampaui		1. Masih tersedianya dana BOP PAUD 2. Penyediaan alat praktik dan peraga 3. Mengoptimalkan penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen	95.22	95.94	Melampaui		1. Penambahan Ruang Kelas baru 3 paket 2. Rehabilitasi Gedung SMP sebanyak 4 sekolah dan laboratorium sebanyak 2 unit 3. Penyaluran BOSDA dan Hibah SMP Swasta, MTs Negeri dan MTs Swasta serta pencatatan BOSNAS 47 SMP Negeri. 4. pembinaan dan penyelenggaraan lomba FLSSN, KOSN, KSN, GSI dan KKD 5. pemberian insentif bagi GTT/PTT dan Guru Tetap Yayasan/Pegawai Tetap Yayasan, penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan bagi guru ASN, pengembangan aplikasi SI GADIS PENTUL	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam	persen	98.6	94.41	Tidak Tercapai	1. Masih ada peserta didik yang sekolah tidak sesuai dengan umur	1. Rehabilitasi Gedung SMP sebanyak 2 sekolah, perpustakaan sebanyak	

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=) Melampaui (>)			
	pendidikan menengah pertama						1 unit dan laboratorium sebanyak 1 unit 2. Penyaluran BOSDA dan Hibah SMP Swasta, MTs Negeri dan MTs Swasta serta pencatatan BOSNAS 3. pembinaan dan penyelenggaraan lomba FLSSN, KOSN, KSN, GSI dan KKD 4. pemberian insentif bagi GTT/PTT dan Guru Tetap Yayasan/Pegawai Tetap Yayasan, penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan bagi guru ASN, pengembangan aplikasi SI GADIS PENTUL	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	persen	14.22	15.64	Melampaui		1. Meningkatkan partisipasi warga dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal 2. Pemberian Bantuan Operasional Kesetaraan sudah optimal 3. Ditingkatkannya penyelenggaraan PKBM, dan pemberdayaan tutor kejar paket	
	Peningkatan prestasi olahraga	medali	18	30	Melampaui		1. Digalakkan pencarian bibit-bibit pelajar berprestasi 2. mengikuti berbagai macam kompetisi olahraga	
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	3.43	4.85	Melampaui		1. Koordinasi organisasi kepemudaan kabupaten/ kota dan pemberian hibah kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia/ KNPI	

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=)			
Melampaui (>)								
							2. Pembinaan dan pelatihan kewirausahaan pemuda, serta seleksi pemuda pelopor tingkat kabupaten	
	Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan	persen	33.5	145.91	Melampaui		1. Peran Bunda Literasi dalam berbagai event di perpustakaan 2. Partisipasi masyarakat dalam mendukung ketersediaan bahan Pustaka melalui hibah buku. 3. Adanya kerjasama dengan pemangku kepentingan serta masyarakat dalam upaya untuk ikut mempromosikan perpustakaan. 4. Partisipasi pengunjung dalam pengisian kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	<b>Desa /Kalurahan Pamor Budaya</b>	<b>Kalurahan</b>	<b>6</b>	10	Melampaui			<b>IKU PEMDA</b>
	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	Desa/ Kalurahan	18	24	Melampaui		Persiapan pemenuhan persyaratan kenaikan status menjadi Desa/Kalurahan Budaya di tahun mendatang	Dinas Kebudayaan
	<b>Indeks Rasa Aman</b>	<b>Indeks</b>	<b>2.73</b>	4.70	Melampaui			<b>IKU TUJUAN</b>
	<b>Persentase penanganan gangguan ketertiban ketertiban</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	100	Sesuai			<b>IKU PEMDA</b>
	Presentase gangguan trantribum yang dapat di selesaikan	persen	100	100	Sesuai (=)		1. Melaksanakan Operasi dan Patroli dalam rangka Penegakan Perda; 2. Implementasi Penegakan Perda dengan melibatkan stakeholder;	Satuan Polisi Pamong Praja

RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=)			
Melampaui (>)								
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	77	82.00	Melampaui		<ol style="list-style-type: none"> <li>Menambah cakupan kegiatan Pendidikan politik bagi masyarakat</li> <li>Pendidikan Politik Bagi Kaum Perempuan dan Difabel.</li> </ol>	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Jumlah Intoleransi di masyarakat	Angka	0	0	Sesuai	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya Kesadaran Masyarakat dalam menjaga Toleransi Antar Umat Beragama</li> <li>Adanya Koordinasi yang baik dengan Mitra Bakesbangpol seperti Intelejen, FKUB, FKDM, FPK dan Ormas/LSM.</li> </ol>		
	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan.	Jumlah kejadian	0	0	Sesuai	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)</li> <li>Pemantauan &amp; pembinaan satuan keamanan di masyarakat</li> <li>Pemberdayaan perangkat desa</li> </ol>		
	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>Persen</b>	<b>3.97</b>					<b>INDIKATOR TUJUAN</b>
	<b>Pemerataan Pendapatan/ Gini Ratio</b>	<b>Angka</b>	<b>0,406-0,355</b>	0.454	Tidak Tercapai			<b>IKU PEMDA</b>
	Skor PPH	Angka	90.8	92.2	Melampaui			Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	%	0.714	25.36	Melampaui			Dinas Pariwisata
	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	%	0.5	1.16	Melampaui			
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2,262,700					Dinas Pariwisata
	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,5					
	Jumlah Belanja Wisatawan	Rupiah/orang	744,188					
	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	persen	3.3	4.67	Melampaui		<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningatnya pembuinan koperasi sehingga semakin bertambah koperasi yang sehat</li> </ol>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB	Rupiah (Miliar)	1,850.72					dan Perdagangan
	Nilai Realisasi Investasi	nilai/angka	2,030.54	2,638.43	Melampaui			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
	<b>Tingkat pengangguran</b>	<b>Persen</b>	<b>3.5</b>	3.78	Tidak Tercapai			<b>IKU PEMDA</b>
	Jumlah tenaga kerja yang terserap	orang	8.500	19.585	Melampaui			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	kalurahan	43	75	Melampaui		Pendampingan Dan Pengembangan Desa Prima	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	<b>Cakupan Jaringan Kabupaten kreatif</b>	<b>Persen</b>	<b>90</b>	94	Melampaui			<b>IKU PEMDA</b>
	Jumlah parameter Kabupaten Kreatif yang dipenuhi	Jumlah Parameter	16	17	Melampaui			Dinas Pariwisata
	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Persen	70	70.19	Melampaui			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Pertumbuhan industri	Persen	2	2.01	Melampaui			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Pertumbuhan industri kreatif	persen	0.41	0.63	Melampaui			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	<b>Angka Kemiskinan</b>	<b>persen</b>	<b>12,9</b>	11,96	Melampaui			<b>INDIKATOR TUJUAN</b>

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=) Melampaui (>)			
	<b>Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>	<b>Orang</b>	<b>71,667</b>	40,323	Melampaui			<b>IKU PEMDA</b>
	PPKS yang ditangani dan dilayani	persen	100	100	Sesuai		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan dan pengadaan kebutuhan buffer stock yang tepat dan cermat berdasarkan analisis kebutuhan dan sasaran</li> <li>2. pemenuhan kebutuhan alat bantu untuk PPKS</li> <li>3. Razia PPKS Jalanan yang akan dikembalikan kepada keluarga, sehingga bisa dilakukan edukasi kepada PPKS maupun keluarga</li> <li>4. bimbingan dan edukasi kepada keluarga dari klien PPKS</li> <li>5. pemenuhan kebutuhan operasional Shelter Kesejahteraan Sosial</li> <li>6. Pemenuhan kebutuhan klien PPKS</li> <li>7. Pelatihan penanganan klien PPKS</li> <li>8. Pemulasaran jenazah terlantar.</li> <li>9. penjangkauan klien PPKS, pelatihan penanganan PPKS untuk Tim Reaksi Cepat Bidang Rehabilitasi Sosial dan pemberian layanan oleh Pekerja Sosial</li> <li>10. layanan rujukan PPKS</li> <li>11. Kerjasama dengan mitra LKS dan instansi terkait</li> </ol>	Dinas Sosial,

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=) Melampaui (>)			
	<b>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</b>	Indeks	96					<b>INDIKATOR TUJUAN</b>
	<b>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</b>	<b>Indeks</b>	71.01					<b>IKU PEMDA</b>
	Prevalensi Kekerasan terhadap Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	Rasio	0,43	0,37	Melampaui		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan</li> <li>2. Penyelenggaraan digital parenting terpadu</li> <li>3. Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Bantul</li> <li>4. Pembentukan forum perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>5. Pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang kabupaten bantul periode tahun 2022-2024</li> <li>6. Data pilah gender</li> </ol>	DP3AP2KB
	<b>Kategori Kabupaten Layak Anak</b>	<b>Kategori</b>	<b>Utama</b>	Utama	Sesuai			<b>IKU BUPATI</b>
	Nilai KLA	Angka	830	888.81	Melampaui	1. Partisipasi lembaga, dunia usaha, mitra & masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak belum optimal		DP3AP2KB
	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Angka	2.45	8.30	Melampaui		Ketersediaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), komitmen dan kemitraan dengan fasilitas kesehatan dan Jejaringnya dalam melaksanakan pelayanan KB, koordinasi dan komitmen yang baik dari berbagai mitra dan kelompok kegiatan.	DP3AP2kb
	Indeks Pembinaan Keluarga Berencana	angka	63.4	63.4				

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023		Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )	Sesuai (=)			
					Melampaui (>)				
	Indeks Advokasi dan Pengendalian Penduduk	Angka	60.24	60.24					
	Cakupan Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat	persen	52.21	52.21					
<b>II</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>								
<b>A</b>	<b>Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>								
<b>1</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>								
	Persentase capaian SPM Pendidikan	persen					1. Rehabilitasi Gedung PAUD,SD,dan SMP dan laboratorium 2. Penyaluran BOSDA dan BOSNAS sekolah Swasta dan Negeri Pembinaan dan penyelenggaraan lomba FLSSN, KOSN, KSN, GSI dan KKD	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	
	- SPM PAUD	Persen	100	100	Sesuai			Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	
	- SPM SD	Persen	100	100	Sesuai			Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	
	- SPM SMP	Persen	100	100	Sesuai			Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	
	- SPM Kesetaraan	Persen	100	100	Sesuai				
	kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	persen	70	68	Tidak Tercapai	1. Kurangnya pelatihan kurikulum dan materi pembelajaran bagi tenaga pendidik 2. Masih kurangnya pendampingan penyusunan bahan ajar bagi semua guru dan Tutor Pendidikan non			



RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=) Melampaui (>)			
						formal/ kesetaraan selama tahun Pelajaran		
	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	persen	4.48%	4.45%	Tidak Tercapai	Masih kurangnya Penguatan mata pelajaran Bahasa Jawa, Membatik, Tata Nilai Budaya Jawa bagi sekolah Negeri dan swasta.		
<b>2</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan</b>							
	Capaian SPM Rumah Sakit	Persen	80.5	82.61	Melampaui		<ol style="list-style-type: none"> <li>tersedianya tim Hospital Disaster Plan (HDP) dalam penanganan covid-19, peningkatan kapasitas SDM;</li> <li>pembangunan jejaring kemitraan dengan rumah sakit mitra dan Puskesmas;</li> <li>inovasi layanan serta tercapainya target standar pelayanan minimal</li> </ol>	Rumah Sakit Panembahan Senopati
	Bed Occupation Rate (BOR)	Persen	80	63.62			4.	Rumah Sakit Panembahan Senopati
	Turn Over Interval (TOI)	Hari	2	1.97			5.	Rumah Sakit Panembahan Senopati
	Bed Turn Over (BTO)	Kali	50	67.51			6.	Rumah Sakit Panembahan Senopati
	Indeks pemenuhan UKP UKM	indeks	1	1	sesuai		<ol style="list-style-type: none"> <li>Perubahan status laoratorium kesehatan lingkungan menjadi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah</li> <li>Pelaksanaan Uji fungsi dan training penggunaan USG</li> </ol>	Dinas Kesehatan
	indeks peningkatan kapasitas SDM	indeks	1	1	sesuai		1. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan	

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=)			
Melampaui (>)								
							2. Penjarangan Calon Tenaga Kesehatan Teladan, 3. Persiapan Uji Kompetensi Jabfung Kesehatan, 4. Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Kesehatan,	
	indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	indeks	1	1	sesuai		1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan. dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 2. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar	
	Desa Siaga purnama mandiri	persen	45	45	Sesuai		Kampanye kesehatan dan sosialisasi promosi kesehatan	
	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	persen	40	40	Sesuai		Pengembangan taman Toga percontohan, produksi jamu dengan binaan puskesmas, dan pengembangan pijat tumbuh kembang balita.	
	Cakupan Pelayanan Jamkesda	persen	100%	100%	Sesuai		Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).	Uptd Jamkesda
	Cakupan Pelayanan Labkesda	persen	100%	100%	Sesuai		Pembangunan gedung Labkesda.	Uptd Labkesda
	Indeks capaian SPM	indeks	1	1	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Srandakan
	Indeks capaian SPM	indeks	1	1	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Sanden
	Indeks capaian SPM	indeks	1	1	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam	Puskesmas Kretek

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=) Melampaui (>)			
							pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	
	Indeks capaian SPM	indeks	1	1	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Pundong
	Indeks capaian SPM	indeks	1	1	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Bambanglipuro
	Indeks capaian SPM	indeks	1	1	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Pandak I
	Indeks capaian SPM	indeks	1	1	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Pandak II
	Indeks capaian SPM	indeks	1	1	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Bantul I
	Indeks capaian SPM	indeks	1	1	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Bantul II
	Indeks capaian SPM	indeks	1	1	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Jetis I
	Indeks capaian SPM	indeks	1	1	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Jetis II
	Indeks capaian SPM	indeks	1	1	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam	Puskesmas Imogiri I

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=) Melampaui (>)			
							pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	
	Indeks capaian SPM	indeks	1	1	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Imogiri II
	Indeks capaian SPM	indeks	1	1	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Dlingo I
	Indeks capaian SPM	indeks	1	1	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Dlingo II
	Indeks capaian SPM	indeks	1	1	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Pleret
	Indeks capaian SPM	indeks	1	1	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Piyungan
	Indeks capaian SPM	indeks	1	1	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Banguntapan I
	Indeks capaian SPM	indeks	1	1	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Banguntapan II
	Indeks capaian SPM	indeks	1	1	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Banguntapan III
	Indeks capaian SPM	indeks	1	1	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam	Puskesmas Sewon I

RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=) Melampaui (>)			
							pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	
	Indeks capaian SPM	indeks	1	1	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Sewon II
	Indeks capaian SPM	indeks	1	1	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Kasihan I
	Indeks capaian SPM	indeks	1	1	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Kasihan II
	Indeks capaian SPM	indeks	1	1	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Pajangan
	Indeks capaian SPM	indeks	1	1	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Sedayu I
	Indeks capaian SPM	indeks	1	1	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Sedayu II
<b>3</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>							
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	persen	76.24	75.835	Tidak tercapai	Pembebasan lahan jalan Cinomati belum dapat dilaksanakan karena status tanah kehutanan, enclave dan oro-oro.	Kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman

## RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=) Melampaui (>)			
	Tingkat kemandapan infrastruktur permukiman (jalan desa)	persen	81.44	82.51	Tidak Tercapai	Kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jalan		
	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	persen	20	20	Sesuai			
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	74.34	92.95	Melampaui		Antusiasme pekerja untuk memiliki sertifikat keahlian	
	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	persen	83.3	81.87	Tidak Tercapai	Rehabilitasi belum mencakup semua daerah irigasi rusak		
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	persen	84.38	85.36	melampaui		Penambahan sambungan rumah pada jaringan perpipaan kawasan perkotaan dan perdesaan	
	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R	Persen	25.33	22.67	Tidak Tercapai			
	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	persen	46	39.7	Tidak Tercapai			
	Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	persen	100	100	Sesuai		kesadaran masyarakat terhadap ketentuan peraturan tentang penataan bangunan sudah meningkat	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang
	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Persen	70.1	70.1	Sesuai		kesadaran masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan tentang pemanfaatan ruang sudah meningkat	
	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	persen	90	90	sesuai		Tersusunnya dokumen rencana induk satuan ruang strategis pantai Samas-Parangtritis	
<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>							

RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=)			
Melampaui (>)								
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	persen	20		sesuai		Tidak terjadi bencana yang membutuhkan rehabilitasi rumah pada Tahun 2021, 2022	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	persen	3		melampaui	Terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani	Bersinergi dan berkolaborasi dengan KOTAKU, Forkom BKM	
	Persentase rumah layak huni	persen						
	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	persen	1	1	Sesuai		Tersedianya tempat pemakaman.	
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	persen			Sesuai		Tersusunnya dokumen rencana induk satuan ruang strategis pantai Samas-Parangtritis	
<b>5</b>	<b>Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat</b>							
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persen	100	100	Sesuai			Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	30	96.66	Melampaui		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) rawan bencana	
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	Sesuai		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) rawan bencana	
	Indeks Pemulihan Pascabencana	Persen	45					
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	100	100	Sesuai		Simulasi penanganan kebakaran, pemadaman dan pengendalian kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	
<b>6</b>	<b>Urusan Sosial</b>							

RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=)			
Melampaui (>)								
	Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS	persen	70	70	Sesuai		Koordinasi dan Sinkronisasi	Dinas Sosial
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	persen	100	100	Sesuai		Ketersediaan selter, boga sehat, layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti.	
	Persentase PMKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	persen	60	60	Sesuai		Pengelolaan multidata di Puskesmas-SLRT sudah optimal	
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	persen	100	100	Sesuai			
	cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	persen	75	75	Sesuai		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa, Monumen Soeharto, Segoroyoso, Pleret, Monumen Jenderal Sudirman Parangtritis, Kretek, Monumen Brimob Sedayu	
<b>B</b>	<b>Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>							
<b>1</b>	<b>Tenaga Kerja</b>							
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	persen	19.5	20.23	Melampaui		Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, pemagangan/ On The Job Training (OJT), pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	persen	56	80.67	Melampaui		Pembekalan kepada tenaga kerja baru dan pembekalan pengurus BKK untuk bisa melakukan pelayanan antar kerja.	



## RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=)			
Melampaui (>)								
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	persen	36	45.3	Melampaui		Sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan membina Lembaga Kerjasama Bipartit.	
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							
	Capaian Desa Prima	Persen	38.67			pendampingan dan pengembangan Desa Prima.		
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	persen	66	10	Tidak Tercapai	Masih rendahnya ;engetahuan ARG bagi SDM Perencana di PD		DP3AP2KB
	Rasio kekerasan terhadap perempuan	per 100.000 penduduk perempuan	0.00032				Sosialisasi one stop service pelayanan UPTD PPA dan sosialisasi pencegahan pernikahan dini.	
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen	8				Kebijakan kesetaraan gender.	
	Cakupan desa ayak anak	Kalurahan	30	75	Melampaui		Koordinasi, sinkronisasi program prioritas Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak	
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100	Sesuai		Layanan Pengaduan Masyarakat, koordinasi dan sinkronisasi, penguatan jejaring antar lembaga.	
<b>3</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>							
	Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan	persen						
	Persentase Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	Persen	28.57	28.57	Sesuai		Pembinaan dan penguatan kelembagaan	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan
	Persentase ketersediaan pangan	persen	151	151	Sesuai			
	Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	Desa	21.33	22.67	Melampaui		Pembinaan dan penguatan kelembagaan	
	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	persen	100	100	Sesuai		Semakin mebaiknya pemahaman petani tentang Organofosfat, Organoklorin dan Karbamat.	
<b>4</b>	<b>Pertanahan</b>							

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	persen	100	100	Sesuai		Sosialisasi penanganan permasalahan pertanahan.	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang
	Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	persen	90	90	Sesuai		Koordinasi dengan Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah Pemda, tanah warga, inventarisasi tanah desa.	
	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	persen	35.37	33	Tidak tercapai	Target yang meningkat akan tetapi sasaran menurun		
<b>5</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>							
	Presentase pemanfaatan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai Peraturan perundang-undangan	Persen	100	100	Sesuai			
	Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	persen	57.14	71.43	Melampaui		Koordinasi dengan Ditjen PDLKWS KLHK, P3EJ, BPKH XI dalam penyusunan dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH).	Dinas Lingkungan Hidup
	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	persen	75	70	Tidak Tercapai	Masih kurangnya kesadaran Masyarakat untuk berperilaku sehat dan bersih		
	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	persen	32	40.35	Melampaui		Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kebersihan jalan serta pemeliharaan RTH.	
	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	persen	33.1	131.58	Melampaui		Sosialisasi pengelolaan limbah B3 dan pendampingan penyusunan rincian teknis penyimpanan limbah B3.	
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	persen	23.33	16.67	Tidak Tercapai	Masih kurangnya kesadaran Masyarakat untuk uji amdal terhadap aktivitas yang akan dilaksanakan		
	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	persen	5	5	Sesuai			

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=)			
Melampaui (>)								
	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	persen	1	1	Sesuai			
	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	persen	100	100	Sesuai			
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	44.16	38.20	Tidak Tercapai	Imbas ditutupnya TPSR Piyungan	Program Pembangunan TP3SR semakin ditingkatkan	
<b>6</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>							
	Cakupan Kepemilikan dokumen Adminduk	persen	98.82	100	Melampaui		Koordinasi dengan kalurahan dan instansi terkait dalam integrasi layanan.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	persen	96.1	100	Melampaui		Inovasi pelayanan	
	Prosentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	persen	99.6	95.7	Tidak tercapai	Masih terbatasnya SDM pemvaliditas dokumen		
	Prosentase Pemanfaatan Profil oleh Lembaga Pengguna	persen	100	100	Sesuai			
<b>7</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>							
	Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan	persen	100	100	Sesuai			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	persen	100	100	Sesuai			
	Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	persen	5	5	Sesuai		Penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna.	

## RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=)			
Melampaui (>)								
	persentase ketersediaan bidang tanah desa berdasarkan hasil inventarisasi.	persen			Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan dan Kantor Pertanahan.	
	Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan	persen			Sesuai		Peningkatan kapasitas pamong dan lembaga kemasyarakatan kalurahan, peran lurah sebagai pemangku keistimewaan.	
<b>8</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>							
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))	Angka	1.65					
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	persen	77.2	63.9	Tidak Tercapai	Pembinaan kampung KB, pembuatan ILM program KB, Forum Kampung KB.		DP3AP2KB
	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	persen	84				Pengadaan BKB kit stunting, kit siap nikah anti stunting, pendampingan calon pengantin, pendampingan ibu hamil, dan pendampingan ibu melahirkan.	
<b>9</b>	<b>Perhubungan</b>							
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	100	Sesuai			
	Rasio Konektivitas Kabupaten	angka	30.43	38,46	Melampaui		Penyediaan perlengkapan jalan	
	Kinerja lalu lintas Kabupaten	angka	0,30	0,36	Melampaui		Penyediaan perlengkapan jalan, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan.	
<b>10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>							
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program	persen	71	99.1	Melampaui		Kebijakan dan implementasi SPBE, kolaborasi antarperangkat daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=)			
Melampaui (>)								
	prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten							
	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	persen	2.85	2.9	Melampaui			
	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	persen	57.14	33.33	Tidak Tercapai			
	Penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	angka			Sesuai			
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persen	100	100	Sesuai			
<b>11</b>	<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>							
	Persentase UMKM yang berizin Usaha mikro yang diberdayakan	persen	55	70.7	Belum tercapai		UMKM semakin tingginya pengetahuan teknologi informasi dan ketersediaan anggaran untuk memfasilitasi perijinan	
	Prosentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	persen	65	70.19	Sesuai		Pembinaan UMKM, tersedianya Bantul Online Shop	
	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	persen	2.5	3.03	Melampaui		Fasilitasi perijinan Koperasi Simpan Pinjam//Unit Simpan Pinjam, updating data perizinan koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian
	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	persen	73	77.9	Melampaui		Apresiasi koperasi berprestasi, patuhnya koperasi terhadap peraturan perundangan	
	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	persen	63.99	64.62	Melampaui		178 Kesehatan KSP/ USP/ KSPPS/ USPPS kategori sehat	

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=)			
Melampaui (>)								
	untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota							
	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	persen	60	69	Melampaui		Sosialisasi perkoperasian, pendidikan dan pelatihan bagi koperasi, pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas perkoperasian	
	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	persen	5	31	Melampaui		Fasilitas kemitraan koperasi, dan Penguatan Koperasi	
<b>12</b>	<b>Penanaman Modal</b>							
	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	persen	100	100	Sesuai		Raperbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	persen	11.29	20.26*(TW2)	Melampaui		Perda Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun. 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, bentuk pemberian insentif berupa pengurangan pajak daerah, pengurangan retribusi daerah, pemberian bantuan modal dan atau peralatan kerja kepada UMKM	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	persen	100	100	Sesuai		Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS RBA ( Online Single Submission Risk Based Approach ) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Online serta penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten melalui izinonline.bantulkab.go.id.	

RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	persen	100	100	Sesuai		Kunjungan langsung kepada pelaku usaha, mengadakan kegiatan pekan LKPM.	
	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	persen	100	100	Sesuai		Kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya pengembangan aplikasi dan pemeliharaan database, koordinasi penyelenggaraan PTSP terkait upaya inovasi, pengelolaan dan pengukuran mutu pelayanan perizinan dan non perizinan	
<b>13</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>							
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	persen	81	80	Tidak Tercapai			Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
	Organisasi Pramuka yang aktif	organisasi	18	18	Sesuai		Penyaluran hibah ke Pramuka Kabupaten Bantul	
	Jumlah prestasi Olahraga	angka	65	60	Tidak Tercapai		Juara umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah,	
<b>14</b>	<b>Statistik</b>							
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	persen	100	100	Sesuai			Dinas Komunikasi Dan Informatika
<b>15</b>	<b>Persandian</b>							
	Tingkat keamanan informasi pemerintah		70	82.33	Melampaui		Asesmen atas aplikasi yang akan dirilis, deteksi dini terhadap kerentanan sistem elektronik serta penanganan terhadap gangguan yang terjadi.	Dinas Komunikasi Dan Informatika
<b>16</b>	<b>Kebudayaan</b>							
	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	68.38	70.22	Melampaui		Penetapan 20 cagar budaya, Kajian Warisan Budaya Benda, dan pengembangan cagar budaya dan warisan budaya.	Dinas Kebudayaan
	Bahasa Sastra yang dilestarikan	Pelestarian	46	46	Sesuai		Kompetisi Kebahasaan dan Sastra, Kompetisi Kebahasaan dan Sastra.	

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=) Melampaui (>)			
	Adat Tradisi yang dilestarikan	Pelestarian	454	676	Melampaui		Facilitasi Adat dan Tradisi Rintisan Desa Budaya untuk 7 (tujuh) desa, Gelar Budaya Jogja	
<b>17</b>	<b>Perpustakaan</b>							
	Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi	Persen	12.55	13.16	Melampaui		Pembinaan perpustakaan, Pelatihan dan Pengelolaan Perpustakaan, dan Pembinaan Perpustakaan.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>18</b>	<b>Kearsipan</b>							
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional)	persen	61	79.81	Melampaui		Sosialisasi Arsip kepada Masyarakat, Reward Pengawasan Kearsipan Internal, Sosialisasi Arsip Keluarga/ Pengelolaan Arsip Ormas dan Orpol/Pengelolaan Arsip Kalurahan, dan Pengelolaan Arsip Statis.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	persen	70	100	Melampaui		Pendataan Arsip dalam Proses Pemusnahan	
<b>C</b>	<b>Layanan Urusan Pilihan</b>							
<b>1</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>							
	Kalurahan Bahari yang direvitalisasi	persen	20					Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan
	Produksi perikanan tangkap	ton	831	846.04	Melampaui		Pengembangan kapasitas nelayan, bimbingan teknis penangkapan ikan	
	Produksi perikanan budidaya	ton	12.805	13.281,77	Melampaui		Pendampingan kepada kelompok budidaya aktif, Pelatihan Perikanan Budidaya, Sarasehan Perikanan Budidaya, Sosialisasi Perikanan Budidaya dan Temu Lapang Perikanan Budidaya	



**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=)			
Melampaui (>)								
	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	persen	5	5	Sesuai		Adanya peran Pokmaswas dalam pengawasan	
	Prosentase produksi perikanan yang diolah	persen	2	2	Sesuai		Sosialisasi Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan), sosialisasi alih teknologi dan informasi (ati) hasil perikanan, pelatihan pasca panen hasil perikanan	
<b>2</b>	<b>Pariwisata</b>							
	Cakupan Desa Wisata	persen	34.67	34.67	Sesuai		Peningkatan gerakan sadar wisata dan sapta pesona 10 desa.	Dinas Pariwisata
	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	persen	3.13	3.13	Sesuai		Pelatihan kebersihan, pentas seni di desa wisata	
	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	persen	2	2	Sesuai		Pameran pariwisata, pembuatan kalender wisata, pembuatan video klip pariwisata.	
	Cakupan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Community Based Tourism (CBT)	25	25	Sesuai		Penguatan kelembagaan pokdarwis/desa wisata, Temu saka pariwisata.	
<b>3</b>	<b>Pertanian</b>							
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	100	Sesuai			
	Prosentase Ketersediaan sarana pertanian	persen	100	100	Sesuai		Pendampingan kepada kelompok penerima kegiatan RJIT, irigasi permompaan dan embung.	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan
	Ketersediaan sarana peternakan	persen	100	100	Sesuai		Penambahan populasi sapi	
	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	persen	100	100	Sesuai		Pembinaan dan pengawasan	
	Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	persen	100	100	Sesuai		Pertemuan pelestarian itik turi dan pemurnian kambing bligon,	
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	persen	100	100	Sesuai		Pengendalian penyakit hewan dan zoonosis	

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
	Produksi Daging	Ton	15.588	15.977	Melampaui			
	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	persen	100	100	Sesuai		Pengadaan bahan pengendali OPT berupa bahan non kimia/organik (pengadaan agensia pengendali hayati)	
	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	persen	100	100	Sesuai		Fasilitasi petani/gabungan kelompok tani untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).	
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ha	6.315	6.315	Sesuai		Kondisi iklim basah (hujan sepanjang tahun) dan bantuan benih yang tepat waktu dengan mutu baik	
<b>4</b>	<b>Kehutanan</b>							
	-							
<b>5</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>							
	-	-	-					-
<b>6</b>	<b>Perdagangan</b>							
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	persen	52	64.86	Melampaui		Pemberian surat keterangan izin usaha perdagangan sebanyak 32 surat keterangan	
	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	persen	3	26.26	Melampaui		Pembangunan atau rehabilitasi pasar rakyat	
	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bapak antar waktu)	persen	7	8.876	Melampaui		Melaksanakan pemantauan harga barang kebutuhan pokok setiap hari dan stok barang kebutuhan pokok setiap minggu di 5 (lima) pasar pantauan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Nilai ekspor	Juta US\$	90	91.5	Melampaui		Memfasilitasi 6 UKM/IKM yang berpotensi ekspor mengikuti pameran produk ekspor	
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	persen	35	42.96	Melampaui		Tera dan tera ulang untuk 9035 UTTP	
	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	persen	10	27	Sesuai		Promosi BOS (Bantul Online Shop), kurasi produk UMKM	

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
	Capaian Rintisan Desa Preneur	Kalurahan	12	8	Tidak Tercapai	Masih perlu pelatihan-pelatihan untuk mendukung rintisan desa preneur		
	Cakupan pemasaran pada Desa Preneur	Persen	28	10.53	Tidak Tercapai	Masih perlu pelatihan-pelatihan untuk mendukung pengembangan desa preneur		
<b>7</b>	<b>Perindustrian</b>							
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	persen	90.65	90.84	Melampaui		Dokumen Naskah Akademik RPIK dan Masterplan KIHT Sedayu-Pajangan.	
	Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	100	100	Sesuai		Melakukan verifikasi teknis permohonan melalui akun Siinas dan menerbitkan Berita Acara verifikasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian
	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil	Persen	0,22	1,33	Melampaui			
<b>8</b>	<b>Transmigrasi</b>							
	Persentase Penempatan Transmigrasi	persen	80	100	Melampaui		Penyuluhan, pengarahan dan memberikan pelatihan kepada calon transmigrasi. Pemindahan dan penempatan transmigran	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
<b>D</b>	<b>Layanan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan</b>							
	<b>Sekretariat Daerah</b>							
	Prosentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Kinerja Penyelenggaraan	persen	92	92	Sesuai		Koordinasi, desk keterisian data, validasi data	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan

## RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=)			
Melampaui (>)								
	Pemerintahan Daerah (EKPPD)							
	Persentase Rancangan Perda menjadi Perda	persen	100		Belum tercapai	Peraturan perundang-undangan dari pusat yang cepat berubah		Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
	Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	persen	100	97,29	Belum Tercapai			Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Persentase penyusunan peraturan perundang undangan desa (RKPDDes APBDes) tepat waktu	persen	92	92	Sesuai			
	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	persen	100	61.67*(TW3)	Sesuai		Komitmen pimpinan	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender	Persen	80	84.01	Melampaui		Identifikasi kebutuhan barang dan jasa, desk identifikasi, dan FGD manajemen kontrak	Sekretariat Daerah - PBJ
	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	83	83.36	Melampaui			Sekretariat Daerah - Bagian Umum dan Protokol
	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	Persen	88.5	90	Melmapai			Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persen	100	100	Sesuai			Sekretariat Daerah - Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	persen	84	83	Tidak Tercapai	Peraturan yang saling terkait dan menunggu peraturan diatasnya disahkan		Sekretariat DPRD
<b>E</b>	<b>Layanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan</b>							
<b>1</b>	<b>Penunjang Perencanaan</b>							

## RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=)			
Melampaui (>)								
	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	persen	100	100	Sesuai		Konsultasi public, forum lintas perangkat daerah, musyawarah perencanaan pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	100	Sesuai			
	Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage)	Persen	20	20	Sesuai			
	Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	persen	95.5	95.5	Sesuai		Pengendalian dan evaluasi dana keistimewaan	
	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	persen	100	100	Sesuai		Desk perencanaan, pengendalian, koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan.	
	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang Perekonomian dan SDA	persen	100	100	Sesuai		Desk perencanaan, pengendalian, koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan.	
	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	persen	100	100	Sesuai		Desk perencanaan, pengendalian, koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan.	
<b>2</b>	<b>Penunjang Keuangan</b>							
	Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	83	98	Melampaui		Pendampingan terhadap perangkat daerah penerima dana keistimewaan	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Sesuai		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, konsultasi dan pendampingan.	
	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Sesuai		Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, pengolahan data akuntansi, neraca daerah akhir tahun	

## RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=)			
Melampaui (>)								
	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	persen	89	91	Melampaui		Efisiensi anggaran, sisa lelang.	
	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	persen	100	100	Sesuai		Perencanaan kebutuhan barang milik daerah, penyusunan RKBMD dan RKPBM	
	Persentase Realisasi PAD	persen	100	104.57	Melampaui		Verifikasi piutang pajak PBB P2 sudah dapat terlaksana sehingga meningkatkan penerimaan	
<b>3</b>	<b>Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>							
	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	persen	40	25.43	Tidak Tercapai	Perbedaan standarisasi harga barang dan jasa antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Daerah DIY		
	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	persen	80	70	Tidak Tercapai			
	Peta Kompetensi ASN	persen	9	44.89	Melampaui		Koordinasi dan kerjasama yang baik antara internal badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan perangkat daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	persen	100	100	Sesuai		Kerjasama yang baik dari internal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan peran aktif dari semua perangkat daerah, adanya komitmen dari pembina kepegawaian untuk meningkatkan kinerja ASN	
<b>4</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>							
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan road map SIDA	persen	100	100	Sesuai		Rekomendasi hasil penelitian menjadi salah satu masukan kebijakan pembangunan	Bappeda

RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=) Melampaui (>)			
<b>F</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>							
<b>1</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>							
	Meningkatnya ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	persen	13	13	Sesuai		Membangun aplikasi e-audit dari perencanaan sampai dengan tindaklanjut	Inspektorat
	Jumlah PD Pelaksana Danais yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat di bagi seluruh PD Pelaksana Danais dikali 100%	persen	38.89	38.89	Sesuai		Adanya komitmen pimpinan yang tinggi	
	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Resiko	Persen	25	25	Sesuai		Adanya komitmen pimpinan yang tinggi	
<b>G</b>	<b>Kewilayahan</b>							
<b>1</b>	<b>Kapanewon</b>							
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	angka	93	93	Sesuai			Kapanewon Piyungan
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	0 persen	0 persen	Sesuai			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	100	Sesuai			Kapanewon Dlingo
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	100	Sesuai			

RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=) Melampaui (>)			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	96	96	Sesuai			Kapanewon Imogiri
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	90	94.55	Melampaui			Kapanewon Pandak
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	84	84	Sesuai			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	84	84	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	100	Sesuai			Kapanewon Bantul
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	100	Sesuai			Kapanewon Kretek
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	100	Sesuai			



**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=)			
Melampaui (>)								
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	angka	95	100	Melampaui			Kapanewon Bambanglipuro
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	91	100	Melampaui			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	100	Sesuai			Kapanewon Jetis
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	93	100	Melampaui			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	100	Sesuai			Kapanewon Kasihan
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	90	90	Sesuai			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	90	90	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	90	90	Sesuai			Kapanewon Pleret

RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=) Melampaui (>)			
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	90	90	Sesuai			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	90	90	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	100	100	Sesuai			Kapanewon Pajangan
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	91	91	Sesuai			
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	81	81	Sesuai			Kapanewon Sanden
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	88	88	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	91	100	Melampaui			
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	100	100	Sesuai			Kapanewon Sedayu
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	100	Sesuai			

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=)			
Melampaui (>)								
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	89	100	Melampaui			Kapanewon Sewon
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	89	100	Sesuai			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	92	100	Melampaui			Kapanewon Srandakan
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	95	99	Melampaui			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	99	Tidak Tercapai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	92	100	Melampaui			Kapanewon Banguntapan
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	93	100	Melampaui			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	95	100	Melampaui			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	92	92	Sesuai			Kapanewon Pundong
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	82	82	Sesuai			

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	88	88	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	100	Sesuai			
<b>H</b>	<b>Penunjang Pemerintahan Umum</b>							
	<b>Kesatuan Bangsa Dan Politik</b>							
	Persentase Pemilih yang berpartisipasi	persen	86					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi	persen	84	75	Tidak Tercapai			
	Jumlah intoleransi di masyarakat	persen	100	115	Melampaui			
	Cakupaaan Pembinaan Organisasi Masyarakat	persen	23	20	Tidak Tercapai			
	FKUB Aktif	persen	100	75	Tidak Tercapai			
	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan	persen	100	70	Tidak Tercapai			
	Cakupan Lokasi yang diprakondisi	persen	200	350	Melampaui			
<b>III</b>	<b>Aspek Daya Saing</b>							
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Indeks</b>	<b>82,00 (BB)</b>					<b>TUJUAN</b>
	<b>Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)</b>	<b>Angka</b>	<b>4.1815</b>	2.92	Tidak Tercapai			<b>IKU PEMDA</b>
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten	%	81.2	82.70	Melampaui		Dokumen keuangan dipublikasikan di website	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
	Persentase Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti	%	100	111.54	Melampaui		Peningkatan pajak daerah dan lain-lain pendapatan yang syah	Sekretariat Daerah (Bag. Tapem)
	Persentase perangkat daerah yang melaporkan	Persen	100	100.00	Sesuai			Sekretariat Daerah (Bag. Hukum)

## RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=)			
Melampaui (>)								
	capaian IKK LPPD secara tepat waktu							
	Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	Persen	93	100.00	Melampaui			Sekretariat Daerah (Bag. Tapem)
	Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100.00	Sesuai			Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
	Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	Persen	85	97.49	Melampaui			SEKRETARIAT DAERAH (Bag. PerekoSDA)
	Persentase Raperda yang Disetujui Bersama	Persen	74	91.67	Melampaui			Sekretariat Daerah (Bag. Pk)
	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Persen	100	100.00	Sesuai			Sekretariat Dprd
	Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Persen	96	94.74	Tidak Tercapai			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Capaian Indeks Profesionalitas ASN	nilai	70	72.68	Melampaui			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	100	100.00	Sesuai			Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKN)
	Cakupan PD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	Persen	79	80.00	Melampaui			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	72.25	86.15	Melampaui			Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	<b>Opini Laporan Keunagnan</b>	<b>Predikat</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>				<b>IKU PEMDA</b>
	Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	Jumlah	5	0.00	Sesuai			Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan

RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=)			
Melampaui (>)								
								Dan Aset Daerah
	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	22.19	24.44	Melmpai			Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
	<b>Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK</b>	<b>Nilai</b>	<b>83.5</b>	93.00	Melmapai			<b>IKU PEMDA</b>
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	83.5	92.10	Melmpai			<b>Inspektorat</b>
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	3.00	Sesuai			<b>Inspektorat</b>
	<b>Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>	<b>Indeks</b>	<b>3.3</b>	3.72				
	Index kualitas layanan informasi publik	Angka	84	84.25	Melampaui			Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Nilai Indeks Pembangunan TIK	angka	6.9					Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	angka	2.75					Dinas Komunikasi Dan Informatika
	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Angka</b>	<b>88.4</b>	88.73				
	IKM Kinerja PTSP	nilai/angka	85.5	88.84	Melampaui			Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=) Melampaui (>)			
	Rata Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	99.82	99.90	Melampaui		Inovasi layanan untuk meningkatkan cakupan kinerja layanan,	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data	Lembaga	6	10.00	Melampaui		Tersedianya buku agregat kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	IKM Kapanewon	angka	90	94.92	Melampaui			Kapanewon Bantul
	IKM Kapanewon	angka	95	96.93	Melampaui			Kapanewon Banglilipuro
	IKM Kapanewon	angka	90	94.96	Melampaui			KAPANEWON DLINGO
	IKM Kapanewon	angka	90	94.28	Melampaui			KAPANEWON IMOGIRI
	IKM Kapanewon	angka	91	95.22	Melampaui			KAPANEWON JETIS
	IKM Kapanewon	angka	93	93.00	Melampaui			KAPANEWON KRETEK
	IKM Kapanewon	angka	90	95.61	Melampaui			KAPANEWON KASIHAN
	IKM Kapanewon	angka	90	94.51	Melampaui			KAPANEWON PANDAK
	IKM Kapanewon	angka	90	92.01	Melampaui			KAPANEWON PUNDONG
	IKM Kapanewon	angka	91	92.37	Melampaui			KAPANEWON PLERET
	IKM Kapanewon	angka	93	95.12	Melampaui			KAPANEWON PIYUNGAN
	IKM Kapanewon	angka	94.5	95.26	Melampaui			KAPANEWON PAJANGAN
	IKM Kapanewon	angka	91	95.04	Melampaui			KAPANEWON SANDEN
	IKM Kapanewon	angka	90	95.44	Melampaui			KAPANEWON SRANDAKAN
	IKM Kapanewon	angka	90	92.68	Melampaui			KAPANEWON SEWON
	IKM Kapanewon	angka	92	95.21	Melampaui			KAPANEWON SEDAYU

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023		Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )	Sesuai (=)			
					Melampaui (>)				
	IKM Kapanewon	angka	90	95.57	Melampaui				KAPANEWON BANGUNTAPAN
	<b>Indeks Pembangunan Infrastruktur</b>	<b>Indeks</b>	<b>67.26</b>						<b>TUJUAN</b>
	<b>Indeks kualitas infrastruktur</b>	<b>Indeks</b>	<b>75.05</b>						<b>IKU PEMDA</b>
	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	78.84	64.68	Turun	Ada perubahan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Status Jalan Kabupaten			Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	Persen	0.45		Melampaui				Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	80.73	80.66	Tidak Tercapai				Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Penduduk berakses air minum layak	Persen	84.38		Sesuai				Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Penduduk berakses sanitasi yang layak	Persen	90.89		Sesuai				Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Penanganan kawasan kumuh	Persen	21.18		Melampaui				Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	Persen	3.66	32.75	Melampaui				Dinas Perhubungan



## RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Interpretasi 2023	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (< )			
					Sesuai (=) Melampaui (>)			
	<b>Kesesuaian pemanfaatan ruang</b>	<b>Persen</b>	<b>75.05</b>	75.57				<b>IKU PEMDA</b>
	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	%	72.5	86.70	Melampaui			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	persen	75	76.36	Melampaui			
	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>Angka</b>	<b>63.59</b>	63.68				<b>IKU PEMDA</b>
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	40.5	39.83	Belum tercapai			Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	87.5	88.16	Belum tercapai			Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	59	59.34	Melampaui			Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	Persen	76.67	83.30	Melampaui			Dinas Lingkungan Hidup
	Capaian pengelolaan sampah	Persen	65.51	63.94	Tidak Tercapai			Dinas Lingkungan Hidup
	<b>Indeks Risiko Bencana</b>	<b>Indeks</b>	<b>169.94</b>					<b>IKU PEMDA</b>
	Indeks Ketahanan Daerah	angka	0.92	0.58	Belum tercapai	Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan pengembangan sistem pemulihan bencana belum optimal		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	menit	<5	7 menit 38 detik (7,633)	Melampaui		Kesiapsiagaan personal, kendaraan dan system operasi	

Sumber: dari berbagai sumber Tahun 2024 (diolah)

### **BAB III**

## **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan adanya analisis kerangka ekonomi dan keuangan daerah. Kerangka ekonomi dan keuangan menggambarkan secara umum kondisi dan analisis statistik serta karakteristik perekonomian dan keuangan tahun anggaran sebelumnya dan prediksi perekonomian tahun anggaran berjalan.

### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bantul tahun 2025 mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 dan diselaraskan dengan RKP 2025 dan RKPd DIY tahun 2025. Arah kebijakan ekonomi daerah menjadi dasar kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam program dan kegiatan.

#### **3.1.1 Kondisi dan Arah Perekonomian Nasional**

##### **3.1.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional**

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia pada tahun 2022 berhasil tumbuh 5,31 persen dibanding tahun sebelumnya (*year-on-year/yoy*). Perekonomian domestik tahun 2022 berhasil tumbuh berkat tingginya pertumbuhan pada triwulan IV-2022 yang naik 5,01 persen (*yoy*). Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari angka pre-Covid-19, yang rata-rata sebesar 5 persen sebelum pandemi. Meski sempat mencatat pertumbuhan negatif saat diterpa badai pandemi Covid-19 pada tahun 2020, perekonomian nasional terus menunjukkan resiliensi dan beranjak pulih lebih cepat.

Dari sisi *demand*, mayoritas komponen pengeluaran pada kuartal IV-2022 tumbuh kuat. Didukung *windfall* komoditas unggulan, ekspor mampu tumbuh *double digit* mencapai 14,93 persen (*yoy*). Sementara itu,

impor tumbuh 6,25 persen (yoy) dengan didorong oleh kenaikan impor barang modal dan bahan baku. Kontributor utama dari PDB [produk domestik bruto) adalah konsumsi. Sektor konsumsi ini tumbuh 4,48 persen *yoy*. Dari investasi atau PMTB (pembentukan modal tetap bruto) itu tumbuh 3,33 persen dan konsumsi rumah tangga sebesar 5,7 persen. Meski demikian, konsumsi pemerintah masih mengalami kontraksi sebesar -4,77 persen *yoy*.

Dari sisi *supply*, seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di triwulan IV-2022. Sektor transportasi dan pergudangan menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 16,99 persen (yoy) diikuti oleh sektor akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 13,81 persen (yoy) yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan nusantara. Sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,64 persen (yoy).

Beberapa *leading indicators* menunjukkan prospek cerah yang akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan kinerja ekonomi global. Permintaan domestik tetap menjadi penopang utama ekonomi nasional pada tahun 2023, tercermin dari IKK [indeks keyakinan konsumen] yang masih tinggi menggambarkan optimisme ekonomi Indonesia ke depan yang masih bisa lebih kuat lagi.

Indikator sektor eksternal Indonesia juga menunjukkan kondisi yang relatif baik dan terkendali, tercermin dari surplus transaksi berjalan, cadangan devisa yang terus meningkat, ekspor impor yang masih positif meski melambat, *yield* obligasi pemerintah yang melandai, nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menguat, dan rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB dalam level aman.

### **3.1.1.2 Arahan Perekonomian Nasional**

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025, sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,7 - 6%(6-7);

- 2) Tingkat kemiskinan 6,0 – 7,0%;
- 3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) **75,54**;
- 4) Indeks Gini 0,79 – 0,382;
- 5) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,0%;
- 6) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 38,6%.

### **3.1.2 Kondisi dan Arah Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta**

#### **3.1.2.1 Kondisi Perekonomian DIY**

Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan IV-2022 mencapai Rp43,28 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp28,99 triliun.

Perekonomian DIY selama 2022 tumbuh sebesar 5,15 persen (c-to-c). Semua lapangan usaha tumbuh positif, dan yang tertinggi dicapai lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 18,26 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor luar negeri sebesar 8,33 persen.

Perekonomian DIY triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 tumbuh sebesar 5,53 persen (y-on-y). Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 15,85 persen, diikuti konstruksi sebesar 14,60 persen, dan jasa keuangan 13,40 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 7,03 persen.

Dibanding triwulan III-2022 perekonomian DIY tumbuh sebesar 3,00 persen (q-to-q). Lapangan usaha yang tumbuh tinggi adalah jasa lainnya, diikuti oleh penyediaan akomodasi dan makan minum serta transportasi dan pergudangan. Dari sisi pengeluaran, terutama didorong oleh pertumbuhan konsumsi pemerintah, dan pembentukan modal tetap bruto.

Struktur ekonomi DIY tahun 2022 didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan, informasi dan komunikasi, pertanian, konstruksi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum dengan kontribusi sebesar

52,01 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih mendominasi dengan kontribusi 61,63 persen, diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto 32,57 persen, dan pengeluaran konsumsi pemerintah 14,60 persen.

### **3.1.2.2 Arahan Perekonomian DIY**

Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah DIY Tahun 2022-2027, adalah: **“Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”**

Ada tiga komponen yang saling terkait dan menjadi prioritas dari visi tersebut. Ketiga hal itu adalah: (i) Reformasi Kalurahan, (ii) Kawasan Selatan, dan (iii) Teknologi Informasi, yang akan menjadi penopang terwujudnya Pancamulia Masyarakat Jogja. Selanjutnya, apabila diproposisikan, bahwa untuk mewujudkan Pancamulia Manusia Jogja, maka Kawasan Selatan akan diletakkan sebagai subyek prioritas pembangunan, melalui cara pandang atau jalan Reformasi Kalurahan, dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

Target indikator ekonomi makro yang akan dicapai Provinsi DIY pada tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,70%;
- 2) Tingkat Kemiskinan 9,93%;
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka 3,00%;
- 4) Indeks Gini 0,415;
- 5) Indeks Pembangunan Manusia 81,96

### **3.1.3 Kondisi dan Arahan Perekonomian Kabupaten Bantul**

Target indikator ekonomi makro yang akan dicapai Kabupaten Bantul pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Uraian	RPJMD	Proyeksi RKPD 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,83	5,28
2	Tingkat Kemiskinan	12,05	11,59
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,99	81,89
4	Indeks Gini	0,320	0,401
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,3	3,3

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Proyeksi ekonomi makro tahun 2025 pada tabel di atas merupakan hasil proyeksi dari capaian tahun 2019 sampai dengan 2023 dan arahan DIY.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2025 yang tertuang dalam Dokumen RPJMD 2021-2026 adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dengan peningkatan kualitas layanan perijinan dan non perijinan;
- 2) Memperkuat sistem kesehatan dengan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan Kesehatan dasar dan rujukan serta peningkatan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga;
- 3) Meningkatkan pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan Kesehatan dasar dan rujukan;
- 4) Meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat Masyarakat dengan pembudayaan pola hidup bersih dan sehat serta optimalisasi peran posyandu untuk layanan Kesehatan;
- 5) Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan dengan peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa melalui peningkatan peran orangtua siswa dan masyarakat, perbaikan metodologi mengajar guru dan memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang tertinggal dan bermasalah, serta pengembangan kapasitas pendidik dan penyempurnaan sarana prasarana Pendidikan formal dan nonformal;
- 6) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian melalui kebijakan peningkatan produksi dan kualitas produk pertanian serta pengembangan agrobisnis dan agrowisata;

- 7) Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat dengan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
- 8) Melindungi produk lokal dan mengembangkan jaringan pemasaran dengan modernisasi pasar rakyat/ tradisional;
- 9) Meningkatkan kualitas UMKM dengan peningkatan kualitas produk lokal oleh Usaha Mikro;
- 10) Meningkatkan pertumbuhan industri dengan pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif;
- 11) Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif dengan peningkatan dan pengembangan sumberdaya ekonomi kreatif;
- 12) Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dengan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata serta penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman;
- 13) Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar secara inklusif dengan peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga, peningkatan sarana prasarana penanggulangan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan Masyarakat dan relawan untuk peningkatan kesejahteraan sosial kelompok rentan;
- 14) Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan penguatan system perlindungan Perempuan dan anak;
- 15) Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dengan menyediakan layanan ramah anak.

Sesuai dengan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 yaitu **“Pemantapan Daya Saing Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Perekonomian”**. Adapun prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 yaitu:

1. Pencapaian Kota/Kabupaten Kreatif
2. Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah kabupaten dengan system pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan

perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana. Target pencapaian kategori Kabupaten Layak anak tahun 2025 yaitu kategori KLA dengan nilai 910 dengan target 17 kapanewon layak anak dan 60 kalurahan layak anak.

Pencapaian kabupaten layak anak didukung dengan penyelenggaraan PAUD, penyelenggaraan posyandu dan pusat kesejahteraan social (puskesmas)-sistem layanan rujukan terpadu (SLRT)

### 3. Permukiman bersih dan sehat

## 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah.

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang akan di tempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang merupakan salah satu faktor penting dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam penentuan kebijakan keuangan daerah diperlukan gambaran kondisi keuangan daerah yang meliputi analisis pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

### 3.2.1 Kemampuan Keuangan Daerah

#### 3.2.1.1 Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah



gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah.

Kapasitas Fiskal juga menjadi pertimbangan dalam pemberian pinjaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Selain itu, kapasitas fiskal daerah juga menjadi pertimbangan untuk mengusulkan pemerintah daerah sebagai penerima hibah sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 691) sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kategori Fiskal Daerah dalam PMK

<b>PMK Nomor 84 Tahun 2023</b>	
Formula:	
$RKFD_{kabupaten/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten/kota-i}}{Belanja\ Pegawai_{kabupaten/kota-i}}$	
Keterangan:	
$RKFD_{kabupaten/kota-i}$	= Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota
$KFD_{kabupaten/kota-i}$	= Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota
$Belanja\ Pegawai_{kabupaten/kota-i}$	= Belanja Pegawai suatu kabupaten/kota
Rentang RKFD	Kategori KFD
$RKFD < 0,947$	Sangat rendah
$0,947 \leq RKFD < 1,203$	Rendah
$1,203 \leq RKFD < 1,459$	Sedang
$1,459 \leq RKFD < 1,715$	Tinggi
$1,715 \leq RKFD$	Sangat tinggi
Kabupaten Bantul mempunyai nilai 1,378	
Kategori: Sedang	

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan RI.

### 3.2.1.2 Kemandirian Fiskal

Kemandirian Fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah tanpa tergantung bantuan dari luar termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian Fiskal daerah akan menghasilkan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai IKF maka semakin tinggi kemandirian Fiskal suatu daerah.

Penghitungan IKF menggunakan formula Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Berikut disajikan klasifikasi kondisi kemandirian fiskal daerah.

Tabel 3.3 Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah

Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
$0,00 \leq \text{IKF} < 0,25$	Belum Mandiri
$0,25 \leq \text{IKF} < 0,50$	Menuju Kemandirian
$0,50 \leq \text{IKF} < 0,75$	Mandiri
$0,75 \leq \text{IKF} < 1,00$	Sangat Mandiri

Sumber: Perhitungan Sampurna (2018) dalam laporan reuiu BPKRI, 2022

Nilai IKF Kabupaten Bantul pada tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Nilai IKF	Kategori
2019	505.929.472.001	2.269.539.168.278	0,22	Belum mandiri
2020	479.610.812.119	2.210.246.133.186	0,22	Belum mandiri
2021	491.670.724.028	2.235.655.701.355	0,22	Belum mandiri
2022	540.572.423.373	2.260.577.439.195	0,24	Belum mandiri
2023	551.994.008.396	2.283.955.356.166	0,24	Belum mandiri

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul (diolah), 2024

Nilai Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Kabupaten Bantul selama lima tahun mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2019, nilai IKF sebesar 0,22, selanjutnya pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,24 hingga tahun 2023. Nilai tersebut masih dalam kategori “belum mandiri”, artinya sangat tergantung dengan dana transfer dalam membiayai belanja daerah.

### 3.2.1.3 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap

pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula.

Tabel 3.5 Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

TAHUN	TOTAL PENDAPATAN (Rp.Juta)	PENERIMAAN PEMBIAYAAN (Rp.Juta)	TOTAL PENERIMAAN (Rp.Juta)	TOTAL BELANJA (Rp.Juta)	PENGELUARAN PEMBIAYAAN (Rp.Juta)	TOTAL PENGELUARAN (Rp.Juta)	KEMAMPUAN MENDANAI BELANJA DAERAH
1	2	3	4=(2+3)	5	6	7=(5+6)	8=(4:7)
2019	2.269.539	296.985	2.566.524	2.283.585	48.892	2.332.477	1,100
2020	2.210.246	238.679	2.448.925	2.199.124	11.599	2.210.723	1,108
2021	2.235.656	244.577	2.480.233	2.226.674	13.141	2.239.815	1,107
2022	2.260.577	259.029	2.519.606	2.272.475	31.500	2.303.975	1,094
2023	2.315.660	216.632	2.532.292	2.507.241	25.051	2.532.292	1,000

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul (diolah), 2024

Selama periode tahun 2019-2023, kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Bantul sudah cukup baik yang ditandai dengan angka kemampuan mendanai belanja daerah selama periode tersebut selalu berada di atas angka 1 yang berarti total penerimaan daerah selalu melebihi total pengeluaran daerah.

### 3.2.1.4 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan, dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan secara tepat.

Kapasitas riil keuangan adalah kemampuan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan (pendapatan *earmark*) dan belanja tertentu.

Perhitungan kapasitas fiskal dilakukan untuk memprediksi ketersediaan dana yang dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul pada program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2025 yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.6 Perhitungan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025

Uraian	TARGET RPJMD Tahun 2025 (Rp. Juta)
	Kapasitas Riil Penerimaan Daerah
Pendapatan Daerah	2.246.636
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	147.937
Pendapatan Mengikat	396.456
Belanja Mengikat	1.168.804
Belanja Wajib	504.570
Pengeluaran Pembiayaan	25.000
Total Pendapatan dan Belanja Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat	2.094.831
<b>KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN</b>	299.742
Persentase	12,52%

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Keterangan: belum memasukkan DAK fisik

Persentase proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Bantul masih relatif kecil, pada tahun 2025 sebesar 12,52%.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain diantaranya:

- 1) Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan dari Luar Negeri;
- 2) Optimalisasi dana CSR sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah;
- 3) Upaya merintis kerjasama pemerintah dengan Perguruan Tinggi, badan usaha/swasta.

### 3.2.2 Analisis Keuangan Daerah

Menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, dan neraca daerah. Realisasi pelaksanaan APBD tahun 2021-2023 akan menjadi evaluasi untuk memproyeksikan anggaran tahun 2025.

Tabel 3.7 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2023

No	Uraian (Permendagri 77 Tahun 2020)	Realisasi Tahun 2021 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.Juta)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	4	5	6		7
1	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	491.671	540.572	587.402	0.09

No	Uraian (Permendagri 77 Tahun 2020)		Realisasi Tahun 2021 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.Juta)	Rata-rata Pertumbuhan (%)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1	1	Pajak Daerah	203.758	252.857	269.929	0.15
1	1	2	Hasil Retribusi Daerah	27.769	42.179	42.383	0.26
1	1	3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	20.053	20.840	20.515	0.01
1	1	4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	240.091	224.696	254.586	0.03
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.656.162</b>	<b>1.712.038</b>	<b>1.821.467</b>	<b>0.05</b>
			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.394.235	1.469.252	1.541.172	0.05
			Pendapatan Transfer Antar Daerah	261.927	242.786	280.295	0.04
1	3		<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>87.823</b>	<b>7.967</b>	<b>7.182</b>	<b>(0.50)</b>
1	3	1	Pendapatan Hibah	6.167	6.725	7.164	0.08
			Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	81.656	22	18	(0.59)
			Pendapatan yang tidak bisa dikelompokkan		1.220		
			<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.235.656</b>	<b>2.260.577</b>	<b>2.416.052</b>	<b>0.04</b>

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul (diolah), 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan selama 3 tahun Pendapatan Daerah adalah 0,04%, dengan rincian rata-rata Pertumbuhan Asli Daerah (PAD) 0,09%, rata-rata pertumbuhan Pendapatan Transfer 0,05%, dan rata-rata pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah -0,50%.

Tabel 3.8 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul  
Tahun 2021-2023

No	Uraian (Permendagri 77 Tahun 2020)		Realisasi Tahun 2021 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.Juta)	Rata-rata Pertumbuhan (%)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>2</b>			<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.670.459</b>	<b>1.721.577</b>	<b>1.840.327</b>	<b>0.05</b>
2	1	1	Belanja Pegawai	894.085	853.342	860.579	(0.02)
			Belanja Barang dan Jasa	713.171	768.495	858.886	0.10
2	1	2	Belanja Hibah	60.212	91.629	115.915	0.39
2	1	3	Belanja Bantuan Sosial	2.991	8.110	4.948	0.66
			<b>Belanja Transfer</b>	<b>255.245</b>	<b>309.515</b>	<b>342.302</b>	<b>0.16</b>
2	1	4	Belanja Bagi Hasil	26.103	26.103	30.677	0.09
2	1	5	Belanja Bantuan Keuangan	229.142	283.412	311.625	0.17
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>26.691</b>	<b>19.684</b>	<b>1.122.990</b>	<b>27.89</b>
<b>2</b>	<b>2</b>						
2	2	1					
2	2	2					
2	2	3	<b>Belanja Modal</b>	<b>274.279</b>	<b>221.698</b>	<b>227.674</b>	<b>(0.08)</b>
			<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>2.226.674</b>	<b>2.272.475</b>	<b>2.411.426</b>	<b>0.04</b>

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul (diolah), 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan selama 3 tahun Belanja Daerah adalah 0,04%. Dengan rincian rata-rata

pertumbuhan Belanja Operasi 0,05%, Belanja Transfer 0,16%, Belanja Tidak Terduga 27.89% dan Belanja Modal -0,08%.

Tabel 3.9 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2023

No	Uraian (Permendagri 77 Tahun 2020)		Realisasi Tahun 2021 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.Juta)	Rata-rata Pertumbuhan (%)	
1	4		5	6		7	
<b>3</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>					
3	1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>					
3	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	238.201	240.504	215.632	(0.05)
3	1	3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.747	18.363		1.45
3	1	4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.629	162	33	(0.87)
			<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>244.577</b>	<b>259.029</b>	<b>215.665</b>	<b>(0.05)</b>
3	2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>					
3	2	2	Penyertaan Modal Daerah	12.341	31.500	24.051	0.66
3	2	5	Pemberian Pinjaman Daerah	800	0	0	
			<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>13.141</b>	<b>31.500</b>	<b>24.051</b>	<b>0.58</b>
			<b>SURPLUS /(DEFISIT) PEMBIAYAAN</b>	<b>231.436</b>	<b>227.529</b>	<b>191.613</b>	<b>(0.09)</b>
			Selisih Lebih Tahun Anggaran Berkenaan	240.418	215.632	196.239	(0.10)

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul (diolah), 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan selama 3 tahun Penerimaan Pembiayaan adalah -0,05%, lebih kecil dari rata-rata pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan 0,58%.

Tabel 3.10 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2022

Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.Juta)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
<b>KAS</b>	<b>240.503.861.658,33</b>	<b>215.631.865.732,74</b>	<b>-4,86%</b>
Kas Di Kas Daerah	193.368.116.811,73	186.937.014.179,24	-3,51%
Kas Di Bendahara Pengeluaran	64.990.196,00	39.974,00	-99,17%
Kas Di Bendahara Penerimaan	111.276.500,00	212.692.566,00	36,34%
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	45.745.324.646,60	28.290.251.443,50	-1,57%
Kas di Pengelola Dana Bergulir		20.000,00	
Kas di Bendahara BOS	1.214.153.504,00	191.847.570,00	-84,02%
.			
<b>Piutang</b>	<b>89.811.088.207,77</b>	<b>67.183.625.670,65</b>	<b>3,15%</b>
Piutang Pajak	140.875.161.976,19	149.648.052.721,50	7,09%
Piutang Retribusi	1.937.392.583,85	1.737.998.367,85	18,92%
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di			
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	74.501.657.507,87	63.838.312.888,00	7,72%
Piutang Transfer Pemerintah Pusat			
Piutang Transfer Antar Daerah	5.709.166.800,47	1.745.092.380,00	-44,71%
Piutang Lainnya	10.875.947.879,00	10.707.993.879,00	-15,03%
Penyisihan Piutang	-144.088.238.539,61	- 160.493.824.565,70	99,85%
.			
<b>Belanja Dibayar Dimuka</b>	<b>657.111.322,31</b>	<b>552.101.334,28</b>	<b>-36,14%</b>
.			
<b>Persediaan</b>	<b>60.367.722.354,00</b>	<b>41.025.618.885,38</b>	<b>-19,09%</b>

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.Juta)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>391.339.783.542,41</b>	<b>324.393.211.623,04</b>	<b>-6,76%</b>
<b>Investasi Jangka Panjang</b>			
<b>Investasi Nonpermanen</b>			
Pinjaman Jangka Panjang			
Investasi dalam SUN			
Investasi Nonpermanen lainnya			
<b>Jumlah Investasi nonpermanen</b>	<b>-</b>		
<b>Investasi Permanen</b>			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	203.992.913.215,88	216.419.085.966,95	3,66%
Investasi Permanen Lainnya	175.962.819.034,35	180.180.711.776,12	6,25%
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>379.955.732.250,23</b>	<b>396.599.797.743,07</b>	<b>4,81%</b>
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>379.955.732.250,23</b>	<b>396.599.797.743,07</b>	<b>4,81%</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Tanah	574.701.276.878,00	580.066.622.548,00	4,79%
Peralatan dan Mesin	944.028.237.113,99	1.000.515.263.647,17	8,04%
Gedung dan Bangunan	1.394.672.601.555,26	1.439.700.383.132,31	3,37%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.574.516.256.456,05	2.675.873.393.387,26	5,18%
Aset Tetap Lainnya	79.576.885.504,48	82.030.138.609,96	4,89%
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	
Akumulasi Penyusutan	-2.731.082.314.804,04	2.935.485.232.100,56	8,59%
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>2.836.412.942.703,75</b>	<b>2.842.700.569.224,14</b>	<b>1,91%</b>
<b>Dana Cadangan</b>			
Dana Cadangan			
<b>Jumlah Dana Cadangan</b>			
<b>Aset Lainnya</b>			
Tagihan Penjualan Angsuran			
Tagihan Jangka Panjang	15.311.414,00	15.311.414,00	0,00%
TGR			
Aset Tak berwujud	25.046.927.422,43	24.175.510.060,43	-1,12%
Aset Lain-lain			
Aset lain yang dibatasi penggunaannya	1.910.304.396,00	1.893.318.146,00	12,29%
Akumulasi Amortisasi Aset tak Berwujud	-16.208.789.124,40	16.333.937.538,00	5,11%
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>10.763.754.108,03</b>	<b>9.750.202.082,43</b>	<b>-7,75%</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>3.618.472.212.604,41</b>	<b>3.573.443.780.672,68</b>	<b>1,30%</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
Utang Bunga			
Bagian Lancar Utang Jangka panjang			
Pendapatan Diterima Dimuka	1.362.983.135,40	932.423.864,37	-30,32%
Utang Belanja	48.749.001.437,76	45.045.037.924,87	10,56%
Utang Jangka Pendek Lainnya			
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>50.111.984.573,16</b>	<b>45.977.461.789,24</b>	<b>8,90%</b>
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>			
Utang Dalam Negeri- Sektor Perbankan			
Utang Dalam Negeri- Obligasi Premium (diskonto) obligasi			
Utang Jangka Panjang Lainnya			
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>			

Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.Juta)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>50.111.984.573,16</b>	<b>45.977.461.789,24</b>	<b>8,90%</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>Ekuitas</b>	<b>3.568.360.228.031,25</b>	<b>3.527.466.318.883,44</b>	<b>1,21%</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>3.618.472.212.604,41</b>	<b>3.573.443.780.672,68</b>	<b>1,30%</b>

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul (diolah), 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan selama 2 tahun Aset adalah 1,30%, rata-rata pertumbuhan Kewajiban 8,9% dan rata-rata pertumbuhan Ekuitas 1,21%.

### 3.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2025

Dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu disusun kerangka pendanaan daerah yang matang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang memiliki struktur berikut:

- 1) Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a) Pendapatan Asli Daerah
- b) Pendapatan transfer
- c) Lain-lain Pendapatan yang sah

Terhitung Tahun 2021 perhitungan Pendapatan Daerah mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.



2) Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode waktu berkenaan

Belanja daerah terdiri dari:

- a) Belanja Operasi
- b) Belanja Modal
- c) Belanja Tidak Terduga
- d) Belanja Transfer

3) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri dari:

- a) Penerimaan pembiayaan
- b) Pengeluaran pembiayaan daerah

Hal-hal yang menjadi pertimbangan Belanja Daerah antara lain:

1) Belanja daerah diarahkan pada:

- a) Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan;
- b) Pemerataan Pembangunan dan Pemantapan Infrastruktur;
- c) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
- d) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
- e) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik;
- f) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan Menciptakan Kemandirian Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja;
- g) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya pemenuhan kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
- h) Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat (public interest);
- i) Mengakomodir sebanyak-banyaknya aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam skala mikro (bottom up);

- j) Memantapkan akuntabilitas publik dan efisiensi pengelolaan belanja;
  - k) Menjamin terlaksananya program kegiatan skala besar dan prioritas.
- 2) Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka belanja diprioritaskan pada:
- a) Prioritas I: diperuntukan Belanja wajib dan mengikat serta belanja untuk pemenuhan penerapan pelayanan dasar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b) Prioritas II: Untuk Belanja yang berkaitan dengan program sasaran yang menjadi unggulan kepala daerah serta mempunyai daya ungkit tinggi pada capaian visi/misi daerah.
  - c) Prioritas III: Belanja yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya seperti belanja hibah, bantuan sosial.  
Pengalokasian dana pada prioritas III dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- 3) Alokasi anggaran wajib (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) sering disebut sebagai *mandatory spending*. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
  - b) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
  - c) Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan

kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).

- d) Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

### 3.2.3.1 Pendapatan Daerah Tahun 2025

#### a. Analisis Sumber Pendapatan Daerah

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran proporsi dari setiap sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusinya yang dilakukan dengan cara menghitung persentase dari setiap objek pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran, dibandingkan dengan total realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Tabel 3.11 Persentase Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2023

No	Uraian (Permendagri 77 Tahun 2020)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)
1	4	5	6	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>1 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>21,99</b>	<b>23,91</b>	
1 1 1	Pajak Daerah	9,11	11,19	
1 1 2	Hasil Retribusi Daerah	1,24	1,87	
1 1 3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,90	0,92	
1 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10,74	9,94	
<b>1 2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>74,08</b>	<b>75,73</b>	
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	62,36	64,99	
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	11,72	10,74	
<b>1 3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>3,93</b>	<b>0,35</b>	
1 3 1	Pendapatan Hibah	0,28	0,30	
	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3,65	0,001	
			0,05	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul (diolah), 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa komponen Pendapatan Daerah terbesar adalah dari Pendapatan Transfer, diikuti Pendapatan Asli Daerah dan terkecil dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Persentase Pendapatan Transfer dan Pendapatan Asli Daerah meningkat dari tahun ke tahun sebaliknya Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang cenderung menurun.

### b. Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek pendapatan daerah yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Tabel 3.12 Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023

Uraian (Permendagri 77 Tahun 2020)	APBD Perubahan Tahun 2023 (Rp. Juta)	Realisasi APBD Tahun 2023 (Rp. Juta)	Selisih (3-2)	Kinerja
1	2	3	4	5
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	539.285	587.402	48.117	Over Target
Pajak Daerah	249.088	269.919	20.891	Over Target
Hasil Retribusi Daerah	43.302	42.383	(919)	Under Target
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	20.200	20.515	315	Over Target
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	226.695	254.586	27.891	Over Target
PENDAPATAN TRANSFER	1.770.375	1.821.467	51.092	Over Target
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.494.215	1.541.172	46.957	Over Target
Pendapatan Transfer Antar Daerah	276.160	280.295	4.135	Over Target
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.000	7.182	1.182	Over Target
Pendapatan Hibah	6.000	7.164	1.164	Over Target
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		18	18	Over Target
Pendapatan yang tidak bisa dikelompokkan				
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.315.660</b>	<b>2.416.052</b>	<b>100.392</b>	<b>Over Target</b>

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul (diolah), 2024

Keterangan kinerja realisasi pendapatan:

- Melampaui target pendapatan atau over target (OT),
- Tidak mencapai target yang ditetapkan atau under (UT),
- Mencapai target yang ditetapkan atau equal (E).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah melampaui target pendapatan atau *over target*.

### c. Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bantul tetap berupaya untuk lebih mengoptimalkan potensi PAD melalui:

- 1) Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
  - a) Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak.
  - b) Memperbaiki dan memperluas basis data objek dan subjek pajak/retribusi daerah.
  - c) Memberikan *reward* bagi pamong desa dan dukuh yang wilayahnya telah lunas sebelum jatuh tempo.
  - d) Mengembangkan pelaporan pajak secara online untuk wajib pajak yang melakukan sistem pemungutan secara *self assessment*.
- 2) Mengoptimalkan pengelolaan manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito;
- 3) Optimalisasi pendayagunaan aset daerah yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
- 4) Meningkatkan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah/BUMD;
- 5) Mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait;
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah misal dengan memperbaiki fasilitas obyek retribusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengamanatkan adanya restrukturisasi dan integrasi pajak daerah serta retribusi, yang dilakukan dalam rangka efisiensi pelayanan publik di daerah, mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha, namun tetap menjaga penerimaan PAD. Kabupaten Bantul telah

menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yaitu restrukturisasi dan integrasi pajak daerah dimana pajak daerah yang dulunya ada 16 jenis menjadi 14 jenis pajak, maka pajak perlu didorong sehingga transparansi pembagian pajak daerah antara provinsi dengan kabupaten bisa lebih baik, dan penguatan lokal *taxing power* dapat terwujud.

Beberapa jenis penerimaan pajak daerah yang dapat didorong peningkatan realisasinya pada tahun mendatang terutama:

- 1) Pajak Hotel sebenarnya masih punya potensi yang cukup tinggi untuk berkembang di Kabupaten Bantul seiring dengan berkembangnya wilayah DIY termasuk Bantul sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Sejauh ini hanya ada dua hotel berbintang yang dipungut pajak hotel, sedangkan hotel lain masih berstatus melati. Potensi lain dari pajak hotel yang dapat lebih diintensifkan adalah rumah kos;
- 2) Pajak Restoran sejauh ini yang banyak dipungut adalah dari catering yang melayani kegiatan-kegiatan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bantul, sedangkan restoran dan rumah makan lainnya perlu diintensifkan pemungutannya;
- 3) Pajak reklame masih dapat dikembangkan lagi dengan penentuan spot-spot reklame yang layak dan penguatan koordinasi dengan pihak terkait tata ruang wilayah daerah karena adanya batasan jumlah maksimal reklame pada titik tertentu;
- 4) Pajak parkir masih bisa dikembangkan, mengingat setiap tahun jumlah kendaraan meningkat.

Pajak sebenarnya masih memiliki potensi yang besar seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat terutama di sektor perdagangan. Meskipun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yaitu:

- 1) Belum optimalnya fungsi koordinasi antar Perangkat Daerah yang mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan pendapatan Daerah.

- 2) Sistem pengawasan pemungutan pajak dan retribusi belum optimal sehingga perlu ditingkatkannya sistem pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Sistem administrasi pencatatan penerimaan/pembayaran daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi belum seluruhnya bisa diterapkan pada pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- 4) Potensi obyek pajak dan obyek retribusi belum sepenuhnya bisa dikembangkan dengan optimal.

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

- 1) Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:
  - a) Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
  - b) Menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
  - c) Menerapkan transaksi non tunai;
  - d) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib retribusi daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
  - e) Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.
- 2) Beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan capaian terhadap penerimaan Retribusi Daerah adalah:
  - a) Adanya kebijakan Pemerintah yang menghapus beberapa jenis Retribusi Daerah, seperti: Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing;

- b) Sarana dan prasarana pemungutan Retribusi Daerah yang sudah tidak layak digunakan, namun belum dilakukan perbaikan/peremajaan.

Pos retribusi daerah yang dominan di Kabupaten Bantul dan terkait erat dengan pulihnya perekonomian daerah diharapkan akan kembali memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, yaitu: retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi pelayanan pasar, retribusi penjualan produksi usaha daerah, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi perngujian kendaraan bermotor serta retribusi parkir.

Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pengelolaan Kekayaan Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
- 2) Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan
- 3) Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain;
- 4) Mengoptimalkan pendapatan BLUD.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer



Pemerintah Pusat tahun 2025 yang bersumber dana DAK fisik dan non fisik belum diperhitungkan.

Berdasarkan penjelasan dalam Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukan penghitungan kembali dan penyesuaian dengan kondisi tahun rencana. Hasil analisis proyeksi pendapatan RKPD tahun rencana secara keseluruhan kemudian dibandingkan dengan proyeksi pendapatan tahun rencana di RPJMD. Dari perbandingan tersebut akan diketahui selisihnya, terjadi penambahan/pengurangan, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13 Penyangdingan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025

URAIAN	Realisasi APBD Tahun 2023 (Rp.Juta)	APBD Tahun 2024 (Rp. Juta)	Proyeksi RPJMD Tahun 2025 (Rp.Juta)	Proyeksi RKPD Tahun 2025 (Rp.Juta)	Selisih (Rp. Juta)
1	2	3	4	5	(5-4)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.416.052</b>	<b>2.480.009</b>	<b>2.246.636</b>	<b>2.246.636</b>	<b>0</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>587.402</b>	<b>576.586</b>	<b>551.834</b>	<b>551.834</b>	<b>0</b>
Hasil Pajak Daerah	269.919	257.000	272.352	272.352	0
Hasil Retribusi Daerah	42.383	291.601	42.681	42.681	0
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.515	20.200	27.400	27.400	0
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	254.586	7.786	209.400	209.400	0
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.821.467</b>	<b>1.897.423</b>	<b>1.694.602</b>	<b>1.694.602</b>	<b>0</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.541.172	1.639.372	1.425.711	1.425.711	0
Pendapatan Transfer Antar Daerah	280.295	258.051	269.091	269.091	0
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>7.182</b>	<b>6.000</b>	-	-	<b>0</b>
Pendapatan Hibah	7.164	6.000	-	-	0

### 3.2.3.2 Belanja Daerah Tahun 2025

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perencanaan belanja daerah

dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, sehingga belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Tabel 3.14 Penyandingan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025

<b>URAIAN</b>	<b>Realisasi APBD Tahun 2023 (Rp.Juta)</b>	<b>APBD Tahun 2024 (Rp. Juta)</b>	<b>Proyeksi RPJMD Tahun 2025 (Rp.Juta)</b>	<b>Proyeksi RKPD Tahun 2025 (Rp.Juta)</b>	<b>Selisih (Rp. Juta)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>(5-4)</b>
<b>BELANJA</b>	<b>2.411.426</b>	<b>2.406.377</b>	<b>2.369.573</b>	<b>2.369.573</b>	<b>0</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.840.327</b>	<b>1.812.705</b>	<b>1.825.402</b>	<b>1.825.402</b>	<b>0</b>
Belanja Pegawai	860.579	931.368	1.027.787	1.027.787	0
Belanja Barang dan Jasa	858.886	806.291	735.116	735.116	0
Belanja Hibah	115.915	70.019	56.699	56.699	0
Belanja Bantuan Sosial	4.948	5.027	6.000	6.000	0
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>227.674</b>	<b>230.168</b>	<b>188.439</b>	<b>188.439</b>	<b>0</b>
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.123</b>	<b>24.076</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>342.302</b>	<b>339.428</b>	<b>335.532</b>	<b>335.532</b>	<b>0</b>
Belanja Bagi Hasil	30.677	30.677	31.503	31.503	0
Belanja Bantuan Keuangan	311.625	308.750	304.028	304.028	0
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>(4.646)</b>	<b>(133.001)</b>	<b>(122.937)</b>	<b>(122.937)</b>	

Alokasi belanja daerah disesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah dengan memperhatikan kebijakan daerah untuk mendukung prioritas daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah yang sudah ditetapkan pada RPJMD, serta memperhatikan kebutuhan belanja daerah yang bersifat wajib mengikat dan *earmarked* sebagai berikut:

1. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang mengikat, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan;

2. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan belanja pegawai ASN dan pemberian gaji ke-13 serta tunjangan hari raya dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji dan tunjangannya (*acress* maksimal 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangannya), kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, tambahan penghasilan pegawai, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, jaminan kesehatan, dan jaminan kecelakaan dan kematian;
3. Belanja prioritas kedua adalah belanja wajib pelayanan dasar pada urusan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Penerimaan dari pajak daerah diutamakan untuk belanja program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan pajak daerah, belanja yang harus disediakan untuk layanan masyarakat yang terkait dengan perolehan pajak, serta belanja bagi hasil kepada desa minimal sebesar 10% dari total penerimaan pajak daerah. Selanjutnya sisanya dialokasikan untuk mendanai program pembangunan prioritas lainnya;
5. Penerimaan dari retribusi daerah diutamakan untuk belanja program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan obyek retribusi baik fisik maupun non fisik, belanja untuk pengelolaan penerimaan retribusi, serta belanja bagi hasil kepada desa minimal sebesar 10% dari total penerimaan retribusi daerah. Selanjutnya juga dialokasikan untuk mendanai program pembangunan prioritas lainnya;
6. Penerimaan dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah diarahkan untuk pemenuhan belanja Badan Layanan Umum Daerah;
7. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
8. Belanja Bantuan Keuangan diarahkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran daerah yaitu menurunkan angka kemiskinan dan

meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta meningkatkan infrastruktur perdesaan dan fasilitas umum;

9. Pemerintah Daerah mengalokasikan 50% dari realisasi penerimaan pajak rokok untuk program Jaminan Kesehatan Nasional bagi warga miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI);
10. Belanja yang bersumber dari dana transfer disesuaikan dengan peruntukannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Prioritas penggunaan dana transfer adalah sebagai berikut:
  - a. Dana Bagi Hasil Pajak; dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dan kinerja tertentu yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka mengurangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. penggunaan DBH pajak bersifat *block grant* yang penggunaannya diserahkan daerah sesuai kebutuhan daerah masing-masing.
  - b. Dana Alokasi Umum (DAU); untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
  - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) disesuaikan dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau mendukung operasional layanan publik.  
Pada penyusunan RKPD ini tidak memasukkan DAK fisik dan non fisik.
11. Belanja yang bersumber dari dana penyesuaian otonomi khusus disesuaikan peruntukannya sesuai peraturan yang berlaku:
  - a. Dana Insentif Daerah (DID); digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang mendukung

- pencapaian kinerja atas kategori DID sesuai dengan jumlah alokasi yang diterima.
- b. Dana Desa; digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Belanja yang bersumber dari BKK DIY untuk Penugasan Keistimewaan digunakan pada Urusan Kelembagaan, Kebudayaan, Tata Ruang dan Pertanahan.
13. Belanja prioritas Daerah meliputi:
- a. Pemenuhan Penerapan Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM).
  - b. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA).
  - c. Peningkatan infrastruktur kewilayahan dan pendukung ekonomi kewilayahan.
  - d. Pengurangan kemiskinan melalui pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat.
  - e. Pengembangan 3 sektor unggulan yaitu sektor pertanian, pariwisata dan industri.
  - f. Bantul sebagai Kabupaten Kreatif Dunia UCCN.
  - g. Bantul Bersih Sampah 2025 (Bantul BERSAMA).
  - h. Pemantapan layanan publik berbasis teknologi dan informasi.
  - i. Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2030.
14. Pemenuhan *mandatory spending* pada RKPD 2025 sebagai berikut:
- a. Alokasi anggaran pendidikan memenuhi amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
  - b. Alokasi anggaran kesehatan memenuhi amanat UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
  - c. Alokasi anggaran infrastruktur daerah merupakan infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka

meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Anggaran ini berada di OPD DPUPKP, Dinas Perhubungan, Diskominfo dan BPKPAD khusus belanja BKK untuk infrastruktur.

d. Alokasi Dana Desa (ADD).

15. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP). Ruang Lingkup dan Prioritas Sasaran Bantuan Keuangan PPBMP adalah bidang yang merupakan kewenangan Kalurahan meliputi: bidang Pendidikan Anak Usia Dini formal dan non formal, bidang Kesehatan, bidang lingkungan hidup. Terdapat 933 padukuhan di Kabupaten Bantul, masing-masing padukuhan mendapatkan dana PPBMP sebesar Rp 50.000.000,-

### **3.2.3.3 Pembiayaan Daerah Tahun 2025**

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran 2024, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Disisi lain apabila terdapat surplus maka pembiayaan daerah dapat dialokasikan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Tabel 3.15 Penyandingan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025

URAIAN	Realisasi APBD Tahun 2023 (Rp.Juta)	APBD Tahun 2024 (Rp. Juta)	Proyeksi RPJMD Tahun 2025 (Rp.Juta)	Proyeksi RKPD Tahun 2025 (Rp.Juta)	Selisih (Rp. Juta)
1	2	3	4	5	(5-4)
<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>216.632</b>	<b>157.701</b>	<b>159.937</b>	<b>159.937</b>	<b>0</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	215.632	156.701	147.937	147.937	0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000	1.000	12.000	12.000	0
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>25.051</b>	<b>24.700</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>
Penyertaan Modal	24.051	23.700	25.000	25.000	0
Pemberian Pinjaman Daerah	1.000	1.000	12.000	12.000	0
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>191.581</b>	<b>133.001</b>	<b>122.937</b>	<b>122.937</b>	<b>0</b>

BUMD Bantul terdiri dari 3 Perusahaan yaitu: PT BPR Bank Bantul, Perumdam Tirto Projotamansari dan Perumda Aneka Dharma.

1) PT. BPR Bank Bantul

Perusahaan ini bergerak di bidang aktivitas keuangan yang mencakup aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

2) Perumda Tirto Projotamansari

Perusahaan ini bergerak dalam penyelenggaraan penyediaan air minum dan air bersih bagi masyarakat. Perumda Air Minum Tirta Prajatamansari membentuk 3 (tiga) unit wilayah yang membawahi 15 (lima belas) Sub Unit PDAM yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

3) Perumda Aneka Dharma bergerak di bidang usaha sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2019 adalah: Perdagangan Umum; Pelayanan Jasa; Pertanian; Perindustrian; Pertambangan; Peternakan; dan Pariwisata.

Kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2025 diarahkan sebagai berikut:

1) Proyeksi alokasi untuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp25.500.000.000,00. Proyeksi tersebut disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang penyertaan modal dengan mempertimbangkan keuangan daerah, adapun rincian penyertaan modal sebagai berikut:

a) Bank BPD DIY	Rp12.230.000.000,00.
b) PT. BPR Bank Bantul	Rp4.970.000.000,00.
c) Perumdam Tirto Projotamansari	Rp6.000.000.000,00.
d) Perumda Aneka Dharma	Rp1.800.000.000,00.

2) Kebijakan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;

3) Penguatan pengelolaan dana bergulir; dan

4) Menjaga agar keuangan daerah dan apabila terdapat defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu.



## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, sementara prioritas pembangunan daerah pada dasarnya merupakan sekumpulan program unggulan Perangkat Daerah yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Elemen-elemen utama program unggulan memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan, pagu pendanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab. Program yang disusun dilaksanakan dengan mempertimbangkan waktu, anggaran, kapasitas, dan sumberdaya yang dimiliki. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya.

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah merupakan penetapan target atau hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan selama periode tertentu.

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2025 disusun berdasarkan capaian kinerja pembangunan Tahun 2023, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka satu sampai lima tahun namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan baik nasional maupun provinsi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan, dengan kata lain tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai sementara sasaran merupakan tindakan spesifik dan langkah terukur yang perlu diambil untuk mencapai tujuan.

Perumusan tujuan dan sasaran mengacu pada visi dan misi dalam RPJMD. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026, Visi Bupati dan Wakil Bupati Bantul adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

Secara filosofis visi tersebut merupakan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan dengan penjabaran sebagai berikut:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata

Untuk mewujudkan visi disusunlah misi yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan meliputi:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa. Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel. Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

Pelaksanaan Misi dalam rangka mewujudkan Visi harus selaras dan sinkron dengan sasaran pembangunan daerah. Tingkat keberhasilan capaian sasaran daerah ditentukan oleh indikator kinerja sasaran. Selanjutnya untuk mewujudkan sasaran daerah dilakukan serangkaian program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh semua perangkat daerah. Tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah diukur dengan indikator kinerja perangkat daerah yang juga harus sinkron dengan indikator sasaran daerah.

Sinkronisasi Indikator Sasaran Daerah dengan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

## RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

*Tabel 4.1 Sinkronisasi Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Bantul dengan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024*

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	4.2815	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten	Persen	81,70	SEKRETARIAT DAERAH
Persentase Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti					Persen	100	SEKRETARIAT DAERAH	
Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi					Persen	100	SEKRETARIAT DAERAH	
Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu					Persen	100	SEKRETARIAT DAERAH	
Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B					Persen	95	SEKRETARIAT DAERAH	
Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti					Persen	100	SEKRETARIAT DAERAH	
Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah					Persen	90	SEKRETARIAT DAERAH	
Persentase Raperda yang Disetujui Bersama					Persen	78	SEKRETARIAT DPRD	
Persentase Raperda yang Dibahas Bersama					Persen	88	SEKRETARIAT DPRD	
Tingkat keselarasan program RKPd dengan RPJMD					Persen	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi					Persen	97	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

## RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
					Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage)	Persen	70	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPd)	Persen	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Persen	96,5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Persen	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Capaian Indeks Profesionalitas ASN	nilai	72	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
					Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	75	
					Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Persen	32	BADAN KEPEGAWAIAN

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
								DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
					Peta Kompetensi ASN	Persen	15	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
					Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Persen	100	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
					Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	Persen	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Cakupan PD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	Persen	90	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	63	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	72	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
		Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	Jumlah	4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
					Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	88	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
					Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
					Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
					Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Persen	90	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
					Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Persen	100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
					Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	23,19	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
					Persentase Realisasi PAD	Persen	100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH



**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
		Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	Nilai	84	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	85	INSPEKTORAT DAERAH
					Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	INSPEKTORAT DAERAH
					Persentase PD pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	50	INSPEKTORAT DAERAH
					Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	Persen	15	INSPEKTORAT DAERAH
					Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Persen	35	INSPEKTORAT DAERAH
		Indeks SPBE	Indeks	3,4	Index kualitas layanan informasi publik	Angka	84,5	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persen	73	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Nilai Indeks Pembangunan TIK	Angka	7,5	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	Persen	85,71	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,85	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Angka	2,95	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Persentase Perangkat Daerah (PD) yang	Persen	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
					terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
					Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	80	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				89,1	IKM Kinerja PTSP	Nilai/angka	86	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Persen	100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	Persen	100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Rata Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	99,84	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data	Lembaga	10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	99,84	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	96,3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks					

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
					Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	Persen	99,8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat	Persen	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					KM Kapanewon	Angka	91	Kapanewon Bantul
					Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	KAPANEWON BANTUL
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	KAPANEWON BANTUL
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	93	KAPANEWON BANTUL
					Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	KAPANEWON BANTUL
					Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	KAPANEWON BANTUL
					Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	KAPANEWON BANTUL
					KM Kapanewon	Angka	95	Kapanewon Bambanglipuro
					Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	95	KAPANEWON BAMBANGLIPURO

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
					Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	93	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
					Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
					Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
					KM Kapanewon	Angka	91	Kapanewon Dlingo
					Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	KAPANEWON DLINGO
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	KAPANEWON DLINGO
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	KAPANEWON DLINGO
					Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	KAPANEWON DLINGO
					Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	KAPANEWON DLINGO
					Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	KAPANEWON DLINGO
					KM Kapanewon	Angka	91	Kapanewon Imogiri
					Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	KAPANEWON IMOIRI
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	KAPANEWON IMOIRI
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Persen	98	KAPANEWON IMOIRI
					Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	98	KAPANEWON IMOIRI

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
					Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	98	KAPANEWON IMOGIRI
					Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	KAPANEWON IMOGIRI
					KM Kapanewon	Angka	93	Kapanewon Jetis
					Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	KAPANEWON JETIS
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	KAPANEWON JETIS
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	94	KAPANEWON JETIS
					Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	95	KAPANEWON JETIS
					Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	KAPANEWON JETIS
					Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	KAPANEWON JETIS
					KM Kapanewon	Angka	95	Kapanewon Kretek
					Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	KAPANEWON KRETEK
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	KAPANEWON KRETEK
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	91	KAPANEWON KRETEK
					Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	85	KAPANEWON KRETEK

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
					Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	90	KAPANEWON KRETEK
					Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	KAPANEWON KRETEK
					KM Kapanewon	Angka	91	Kapanewon Kasihan
					Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	KAPANEWON KASIHAN
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	KAPANEWON KASIHAN
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	KAPANEWON KASIHAN
					Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	92	KAPANEWON KASIHAN
					Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	92	KAPANEWON KASIHAN
					Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	KAPANEWON KASIHAN
					KM Kapanewon	Angka	91	Kapanewon Pandak
					Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	KAPANEWON PANDAK
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	KAPANEWON PANDAK
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	93	KAPANEWON PANDAK
					Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	88	KAPANEWON PANDAK

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
					Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	88	KAPANEWON PANDAK
					Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	KAPANEWON PANDAK
					KM Kapanewon	Angka	91	Kapanewon Pundong
					Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	KAPANEWON PUNDONG
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	KAPANEWON PUNDONG
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	94	KAPANEWON PUNDONG
					Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	85	KAPANEWON PUNDONG
					Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	90	KAPANEWON PUNDONG
					Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	KAPANEWON PUNDONG
					KM Kapanewon	Angka	93	Kapanewon Pleret
					Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	KAPANEWON PLERET
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	KAPANEWON PLERET
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	95	KAPANEWON PLERET
					Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	95	KAPANEWON PLERET

**RANCANGAN AWAL RKPД KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
					Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	95	KAPANEWON PLERET
					Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	KAPANEWON PLERET
					KM Kapanewon	Angka	95	Kapanewon Piyungan
					Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	KAPANEWON PIYUNGAN
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	KAPANEWON PIYUNGAN
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Persen	95	KAPANEWON PIYUNGAN
					Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	KAPANEWON PIYUNGAN
					Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	KAPANEWON PIYUNGAN
					Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	KAPANEWON PIYUNGAN
					KM Kapanewon	Angka	95,5	Kapanewon Pajangan
					Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	KAPANEWON PAJANGAN
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	KAPANEWON PAJANGAN
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	91	KAPANEWON PAJANGAN
					Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	91	KAPANEWON PAJANGAN



**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
					Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	91	KAPANEWON PAJANGAN
					Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	KAPANEWON PAJANGAN
					KM Kapanewon	Angka	93	Kapanewon Sanden
					Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	KAPANEWON SANDEN
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	KAPANEWON SANDEN
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	93	KAPANEWON SANDEN
					Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	83	KAPANEWON SANDEN
					Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	90	KAPANEWON SANDEN
					Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	KAPANEWON SANDEN
					KM Kapanewon	Angka	91	Kapanewon Srandakan
					Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	KAPANEWON SRANDAKAN
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	KAPANEWON SRANDAKAN
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	93	KAPANEWON SRANDAKAN
					Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	97	KAPANEWON SRANDAKAN

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
					Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	97	KAPANEWON SRANDAKAN
					Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	KAPANEWON SRANDAKAN
					KM Kapanewon	Angka	91	Kapanewon Sewon
					Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	KAPANEWON SEWON
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	KAPANEWON SEWON
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	91	KAPANEWON SEWON
					Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	91	KAPANEWON SEWON
					Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	KAPANEWON SEWON
					Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	KAPANEWON SEWON
					KM Kapanewon	Angka	94	Kapanewon Sedayu
					Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	KAPANEWON SEDAYU
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	KAPANEWON SEDAYU
					Cakupan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	93	KAPANEWON SEDAYU
					Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	KAPANEWON SEDAYU

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
					Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	KAPANEWON SEDAYU
					Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	KAPANEWON SEDAYU
					KM Kapanewon	Angka	91	Kapanewon Banguntapan
					Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	KAPANEWON BANGUNTAPAN
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	KAPANEWON BANGUNTAPAN
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	94	KAPANEWON BANGUNTAPAN
					Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	95	KAPANEWON BANGUNTAPAN
					Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	97	KAPANEWON BANGUNTAPAN
					Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	KAPANEWON BANGUNTAPAN
2.	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,29	Net Death Rate (NDR)	Premil	20	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
					Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PD	Angka	83,10 angka	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
					Capaian SPM Rumah Sakit	Persen	81,50	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
					Bed Occupation Rate (BOR)	persen	71	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
					Turn Over Interval (TOI)	hari	2	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
					Bed Turn Over (BTO)	kali	50	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
					Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	64,5	DINAS KESEHATAN
					Angka Kematian bayi	Per 100.000 kelahiran hidup	6,5	DINAS KESEHATAN
					Case Fatality Rate Covid 19	Persen	2	DINAS KESEHATAN
					Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks	1	DINAS KESEHATAN
					Indeks sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makan minum sesuai standar dibagi dengan yang diawasi.	Indeks	1	DINAS KESEHATAN
					Cakupan Pelayanan Jamkesda	Persen	100	UPTD JAMKESDA
					Cakupan Pelayanan Labkesda	Persen	100	UPTD LABKESDA
					Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PD	angka	84,49	27 PUSKESMAS
					Cakupan Pelayanan Puskesmas	persen	100	27 PUSKESMAS
					Insiden Rate DBD	Per 100.000 kelahiran hidup	110	DINAS KESEHATAN
					Prevalensi stunting	Persen	7,5	DINAS KESEHATAN
					Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Indeks	1 indeks	DINAS KESEHATAN
					Cakupan Desa Siaga Purnama Mandiri	Kalurahan	55 Kalurahan	DINAS KESEHATAN

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
					Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	Persen	55 Persen	DINAS KESEHATAN
					Indeks capaian SPM	Indeks	1 indeks	27 PUSKESMAS
3.	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Angka Harapan lama sekolah	Tahun	15,3	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	94,26	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	95,26	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	98,8	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	14,26	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Persentase capaian SPM Pendidikan	Persen	100	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	Persen	79	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	Persen	5,07	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	Persen	34,5	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	Indeks	86,5	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

**RANCANGAN AWAL RKPД KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
					Persentase perpustakaan yang terakreditasi	Persen	17,48	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Peningkatan prestasi olahraga	Persen	25	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Jumlah prestasi Olahraga	medali	100	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	3,45	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	83	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Organisasi Pramuka yang aktif	Organisasi	18	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Desa /Kalurahan Pamor Budaya	Kalurahan	10	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	Kalurahan	24	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
					Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	83,08	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
					Bahasa Sastra yang dilestarikan	Pelestarian	104	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
					Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	Pelestarian	953	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
5.	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum	Persen	100	Persentase gangguan trantribum yang dapat di selesaikan	Persen	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**RANCANGAN AWAL RKPД KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
		dan perlindungan masyarakat			Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	Persen	88,31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Persentase Pemilih yang berpartisipasi	Persen	78	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi	Persen	100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					Jumlah intoleransi di masyarakat	Angka	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					Cakupan Pembinaan Ormas	Persen	33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					Kerukunan Antar Umat Beragama	Persen	100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan.	Jumlah Kejadian	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	Persen	100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					Cakupan Lokasi Yang di prakondisi	Persen	25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Rasio Gini	Angka	0,320	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	91,2	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN	Cakupan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	persen	53,33	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

**RANCANGAN AWAL RKPД KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
				PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
					Persentase lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	persen	85,71	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
					Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	persen	155	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
					Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	persen	18,67	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
					Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	persen	100	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
					Pertumbuhan produksi sektor pertanian	persen	0,714	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
					Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Persentase Ketersediaan sarana pertanian	Persen	100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Ketersediaan sarana peternakan	Persen	100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Persen	100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	Persen	100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Produksi Daging	Ton	15.850	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
					Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Persen	100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ha	6,325	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Pertumbuhan produksi sektor perikanan	Persen	0,6	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Kalurahan Bahari yang direvitalisasi	Persen	80	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Produksi perikanan tangkap	Ton	835	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Produksi perikanan budidaya	Ton	12.959	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Persen	5	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Persentase produksi perikanan yang diolah	Persen	5	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2,737,868	DINAS PARIWISATA
					Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2,00	DINAS PARIWISATA
					Jumlah Belanja Wisatawan	Rupiah/org	861,490	DINAS PARIWISATA
					Cakupan Desa Wisata	Persen	37,33	DINAS PARIWISATA
					Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	DINAS PARIWISATA
					Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Persen	3,13	DINAS PARIWISATA
					Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persen	2	DINAS PARIWISATA
					Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB	Rupiah (Miliar)	1.975,84	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
					Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	54	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dimodernisasi	Persen	5	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	Persen	6	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Nilai ekspor	Juta US\$	110	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	35	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	Persen	20	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Persen	3,3	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
					Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	2,5	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	76,92	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	66,96	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	60	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	Persen	5	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (Miliar)	2.640,66	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	Persen	100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Persen	15,29	DINAS PENANAMAN MODAL DAN

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
								PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,30	Jumlah tenaga kerja yang terserap	Orang	10.500	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi				Persen	21,5	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten				Persen	60	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).				Persen	38	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	Persentase Penempatan Transmigrasi				Persen	100	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri				Kalurahan	63	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	
	Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan				Persen	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	
	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan				Persen	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
					Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Persen	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
					Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	Persen	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
					Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi.	Persen	77	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
					Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan	Persen	58,33	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
		Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	100	Jumlah parameter Kabupaten Kreatif yang dipenuhi	Jumlah parameter	18	DINAS PARIWISATA
					Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persen	50	DINAS PARIWISATA
					Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	CBT	2	DINAS PARIWISATA
					Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Persen	70	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Persentase UMKM yang berizin	Persen	65	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	Persen	75	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
								DAN PERDAGANGAN
					Capaian Rintisan Desa Preneur	Persen	14,67	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Capaian pemasaran pada Desa Preneur	Persen	50	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Pertumbuhan industri	Persen	2,2	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Pertumbuhan industri kreatif	Persen	0,84	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	100	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan	Persen	0,22	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,

**RANCANGAN AWAL RKPД KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
					kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kabupaten			PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	77,47	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	79,66	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Tingkat kemantapan infrastruktur permukiman (jalan desa)	Persen	82,26	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	77,06	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	Persen	0,55	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya	Persen	100	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Gedung pemerintah yang laik fungsi	Persen	40	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	77,34	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

**RANCANGAN AWAL RKPД KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
					Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	81,45	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	45	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Persen	85,1	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Penduduk berakses air minum layak	Persen	85,98	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Persen	85,98	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Penduduk berakses sanitasi yang layak	Persen	96,95	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R	Persen	30,67	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air	Persen	93,95	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN



**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
					limbah domestik yang layak			KAWASAN PERMUKIMAN
					Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Persen	5,86	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Penanganan kawasan kumuh	Persen	42,36	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	42,36	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Persentase rumah layak huni	Persen	99,8	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	Persen	7,32	DINAS PERHUBUNGAN
					Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di	Persen	100	DINAS PERHUBUNGAN

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
					Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan			
					Rasio Konektivitas Kabupaten	Persen	30,43	DINAS PERHUBUNGAN
					Kinerja lalu lintas Kabupaten	Angka	0,30 angka	DINAS PERHUBUNGAN
		Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75,10	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persen	77,50	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	Persen	100	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Persen	70,3	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan	Persen	90	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	Persen	81	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
					Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

**RANCANGAN AWAL RKPД KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
					Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	Persen	90	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
					Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Persen	54,58	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
8.	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,24	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	41.50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	88.50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	63.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Persen	85	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Persen	36	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Persen	5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	Penghargaan	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	Persen	69	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
					Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	Persen	36,58	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	Persen	31	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	Persen	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Capaian pengelolaan sampah	Persen	69,23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	46,86	
9.	Terwujudnya penurunan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	169,33	Indeks Ketahanan Daerah	angka	0,94	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	persen	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	40	
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	
					Indeks Pemulihan Pascabencana	Persen	60	

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
					Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	menit	< 15	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	
10.	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	71,059	PPKS yang dilayani dan ditangani	Persen	100	DINAS SOSIAL
					Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	Persen	80	DINAS SOSIAL
					Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	80	DINAS SOSIAL
					Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Persen	80	DINAS SOSIAL
					Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Persen	75	DINAS SOSIAL
					Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persen	100	DINAS SOSIAL
					Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	Persen	80	DINAS SOSIAL

**RANCANGAN AWAL RKPД KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
11.	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74,31	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	Prevalensi	0,39	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Capaian Desa Prima	Persen	41,33	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	72	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Rasio kekerasan terhadap perempuan	Angka	0.00028	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Persentase partisipasi perempuan di lembaga	Persen	10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
								KELUARGA BERENCANA
		Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Utama	Nilai KLA	Angka	910	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Cakupan desa layak anak	Kalurahan	60	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	
					Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Angka	2,35	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))	Angka	1.63	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Persentase pemakaian kontrasepsi Modern	Persen	77,2	DINAS PEMBERDAYAAN

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No.	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025	PERANGKAT DAERAH
					(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)			PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	Persen	85	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sumber: Rancangan RPJMD Kabupaten Bantul 2021–2026



## 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah merupakan serangkaian program yang secara khusus berkaitan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan, dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, memperhatikan arah kebijakan dalam RPJMD 2021-2026, memperhatikan isu-isu strategis pembangunan baik nasional, regional DIY maupun daerah, serta tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Tema dan prioritas Pembangunan dalam RKPD Tahun 2025, sesuai RPJMD tahun 2021-2025 adalah “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur untuk Memantapkan Daya Saing Daerah” sementara Prioritas Pembangunan meliputi :

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan
2. Pemerataan kualitas infrastruktur
3. Peningkatan SDM berdaya saing
4. Pelestarian Lingkungan dan pengurangan resiko bencana
5. Pemanfaatan layanan public berbasis IT
6. Pengembangan Kawasan Pansela dan Kawasan Industri Piyungan

Penentuan prioritas dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih fokus sehingga upaya pencapaian tujuan dapat efektif dan efisien. Selanjutnya untuk melaksanakan prioritas pembangunan tersebut maka disusun sasaran Perangkat Daerah (PD). Masing-masing PD merencanakan program kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran. Keberhasilan setiap sasaran daerah yang telah ditetapkan ditentukan oleh keberhasilan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh PD sesuai dengan urusan serta tugas pokok dan fungsi PD. Rencana program yang diselenggarakan oleh PD selain merupakan program prioritas juga berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Interkoneksi Pendekatan

Rancangan Prioritas dan sasaran Kabupaten Bantul dengan sasaran dan program prioritas Perangkat Daerah tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 2 Interkoneksi Pendekatan Rancangan Prioritas dan sasaran Kabupaten Bantul dengan sasaran dan program prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025

RANCANGAN PRIORITAS KAB. BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
3	4	5	6	7
1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya jaringan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		Meningkatnya kualitas pariwisata	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
Program Pemasaran Pariwisata				
1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

<b>RANCANGAN PRIORITAS KAB. BANTUL</b>	<b>SASARAN DAERAH</b>	<b>SASARAN PD</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
			Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian Program Penyuluhan Pertanian	
		Meningkatnya produksi pertanian		
1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB  Meningkatkan koperasi yang berkualitas	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program Pengembangan Ekspor Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program Penilaian Kesehatan KSP/SP Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

<b>RANCANGAN PRIORITAS KAB. BANTUL</b>	<b>SASARAN DAERAH</b>	<b>SASARAN PD</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		Meningkatnya kualitas UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM	
		Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Pengendalian Izin Usaha Industri Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan dan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
2. Pemerataan kualitas infrastruktur	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Program Pengembangan Permukiman Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Program Penataan Bangunan Gedung Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

**RANCANGAN AWAL RKPД KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

<b>RANCANGAN PRIORITAS KAB. BANTUL</b>	<b>SASARAN DAERAH</b>	<b>SASARAN PD</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	
2. Pemerataan kualitas infrastruktur	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
2. Pemerataan kualitas infrastruktur	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang Meningkatkan kualitas penatagunaan tanah	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Program Penatagunaan Tanah Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
3. Peningkatan SDM berdaya saing	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	1. Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan PAUD 2. Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

RANCANGAN PRIORITAS KAB. BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
3	4	5	6	7
		3. Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	
		Meningkatnya prestasi olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
3. Peningkatan SDM berdaya saing	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	UPTD Jamkesda
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	UPTD Labkesda
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27 Puskesmas
		Meningkatnya pembudayaan masyarakat sehat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	27 Puskesmas	
3. Peningkatan SDM berdaya saing	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Meningkatnya pembinaan kebudayaan daerah	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

<b>RANCANGAN PRIORITAS KAB. BANTUL</b>	<b>SASARAN DAERAH</b>	<b>SASARAN PD</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
3. Peningkatan SDM berdaya saing	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
			Program Perlindungan Perempuan	
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	
		Meningkatnya nilai evaluasi KLA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
		Kelahiran penduduk terkendali	Program Perlindungan Khusus Anak	
			Program Pengendalian Penduduk	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				
3. Peningkatan SDM berdaya saing	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Menurunnya angka kematian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Panembahan Senopati
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
3. Peningkatan SDM berdaya saing	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Standar	Program Pengelolaan Arsip	
4. Pelestarian Lingkungan dan pengurangan resiko bencana	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	



**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

<b>RANCANGAN PRIORITAS KAB. BANTUL</b>	<b>SASARAN DAERAH</b>	<b>SASARAN PD</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan	
4. Pelestarian Lingkungan dan pengurangan resiko bencana	Terwujudnya penurunan resiko bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana  Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Program Penanggulangan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Pemantapan layanan public berbasis IT	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika  Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai  Pengembangan aplikasi dan statistik	Program Informasi dan Komunikasi Publik  Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan  Program Aplikasi Informatika Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika

**RANCANGAN AWAL RKPД KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

<b>RANCANGAN PRIORITAS KAB. BANTUL</b>	<b>SASARAN DAERAH</b>	<b>SASARAN PD</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
5. Pemantapan layanan public berbasis IT	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Satuan Polisi Pamong Praja
5. Pemantapan layanan public berbasis IT	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Pemantapan layanan public berbasis IT	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Program Penataan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
5. Pemantapan layanan public berbasis IT	Terwujudnya pemerataan pendapatan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya nilai investasi Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

<b>RANCANGAN PRIORITAS KAB. BANTUL</b>	<b>SASARAN DAERAH</b>	<b>SASARAN PD</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
5. Pemantapan layanan public berbasis IT	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kapanewon
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
5. Pemantapan layanan public berbasis IT	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	
5. Pemantapan layanan public berbasis IT	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang pemerintahan	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya kondusifitas masyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
		Meningkatnya kondusifitas masyarakat	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas	

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

<b>RANCANGAN PRIORITAS KAB. BANTUL</b>	<b>SASARAN DAERAH</b>	<b>SASARAN PD</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
			dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	
5. Pemantapan layanan public berbasis IT	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
5. Pemantapan layanan public berbasis IT	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya profesionalisme ASN	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
			Program Kepegawaian Daerah	
5. Pemantapan layanan public berbasis IT	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Inspektorat Daerah
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
5. Pemantapan layanan public berbasis IT	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah - Bagian Umum dan Protokol

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

RANCANGAN PRIORITAS KAB. BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
3	4	5	6	7
				Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
				Sekretariat Daerah - Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan
				Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat
				Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
				Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan
				Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
				Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
		Meningkatnya fasilitas pembahasan produk hukum DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD

Sumber : Bappeda Bantul, 2022, diolah,

### 4.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM merupakan sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang terdiri dari:

1. SPM Bidang Pendidikan;
2. SPM Bidang Kesehatan;
3. SPM Bidang Pekerjaan Umum;
4. SPM Bidang Perumahan Rakyat;
5. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. SPM Bidang Sosial.

Ketentuan penerapan SPM di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan jenis dan indikator pelayanan dasar yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Jenis dan Indikator Pelayanan SPM yang Harus Dipenuhi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
<b>I. SPM PENDIDIKAN</b>			
1. Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun
2. Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun
3. Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun

<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Batas Waktu Pencapaian</b>
<b>II. SPM KESEHATAN</b>			
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
4. Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
<b>III. SPM PEKERJAAN UMUM</b>			
1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun
<b>IV. SPM PERUMAHAN RAKYAT</b>			
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun
<b>V. SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			
1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun
2. Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun



<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Batas Waktu Pencapaian</b>
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun
<b>VI. SPM SOSIAL</b>			
1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Setiap tahun

Dalam rangka mendukung penerapan SPM sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal tersebut, Kabupaten Bantul telah menyusun Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 yang berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Strategi penerapan SPM di Kabupaten Bantul sebagaimana tertuang dalam peraturan bupati tersebut adalah sebagai berikut:

1. SPM Bidang Pendidikan
  - a. Meningkatkan pengelolaan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal/kesetaraan.
  - b. Meningkatkan dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan PAUD, dasar, dan non formal/kesetaraan.
2. SPM Bidang Kesehatan
  - a. Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).
  - b. Meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat masyarakat.
  - c. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
3. SPM Bidang Pekerjaan Umum
  - a. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pembangunan infrastruktur air minum dan air limbah yang lebih merata.
4. SPM Bidang Perumahan Rakyat
  - a. Meningkatkan Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
  - a. Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya melalui peningkatan operasi yustisi dan non yustisi.
  - b. Penguatan sistem komunikasi, operasi, data dan informasi kebencanaan.
  - c. Meningkatkan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana.
  - d. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.
  - e. Perkuatan Sistem Pencegahan Kebakaran.
  - f. Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
  - g. Pemenuhan Standar Kuantitas dan Kualitas SDM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

6. SPM Bidang Sosial
  - a. Mengoptimalkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.
  - b. Mengoptimalkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota.

#### **4.4 Pokok Pikiran DPRD Bantul**

##### **4.4.1 Pendahuluan**

Dalam rangka melaksanakan Permendagri Nomor 87 Tahun 2017 maka diperlukan adanya Forum Konsultasi Publik yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas dari peraturan dan meningkatkan akuntabilitas serta sarana menghimpun aspirasi atau harapan dari pemangku kepentingan terhadap tema dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota, DPRD melalui Badan Anggaran sebagai alat kelengkapan DPRD mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-pokok Pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2025 merupakan tahap keempat dari RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga arah kebijakan pembangunan disusun berpedoman pada arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Dengan visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

#### 4.4.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan DPRD Kab. Bantul Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib;

#### 4.4.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Bantul. Adapun tujuan disusunnya Pokok-pokok Pikiran DPRD yaitu :

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul, dalam menyusun dokumen awal draf RKPD Tahun Anggaran 2025;
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, dan RAPBD Tahun Anggaran 2025
3. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi Kabupaten Bantul melalui perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2025

4. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kab. Bantul dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD.
6. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

#### 4.4.4 Pokok Pikiran DPRD dalam RKPD Tahun 2025

Dengan memperhatikan permasalahan yang masih dihadapi dan isu-isu strategis tahun 2025 dan relevan menjadi prioritas pembangunan yang merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD tahun 2021 - 2026, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam rangka perencanaan tahun 2025 menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran sebagai berikut :

1. **Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia**, Pembangunan manusia menjadi isu strategis karena menyangkut pemenuhan hak dasar rakyat. Pemenuhan hak dasar antara lain meliputi hak untuk mendapatkan identitas/legalitas, akses layanan kesehatan, akses layanan pendidikan, pangan, perumahan sehat dan layak, serta fasilitas sanitasi dan akses terhadap air minum.
2. **Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang berkelanjutan.** Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dibarengi dengan perlindungan terhadap produk-produk masyarakat.
3. **Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat**, Kompleksnya permasalahan kemiskinan menyebabkan upaya penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Artinya upaya penanggulangan

kemiskinan harus mampu menyentuh akar penyebabnya tidak hanya menangani gejala yang nampak, harus mencakup seluruh strata keluarga miskin dengan sasaran yang jelas dengan melibatkan seluruh sektor terkait dan dilaksanakan secara terus-menerus

4. **Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah,** Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, prasarana irigasi, prasarana perkotaan, prasarana permukiman, serta prasarana pelayanan sosial dan ekonomi dengan kapasitas dan kualitas yang memadai mutlak dibutuhkan untuk menunjang kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Peningkatan kualitas lingkungan hidup (pengelolaan sampah), infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana juga sangat diperlukan. Oleh karena itu ketersediaan infrastruktur secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
5. **Kemandirian Desa sebagai Basis Pertumbuhan yang Berkeadilan,** Kemandirian desa merupakan isu yang sangat strategis dalam pembangunan masyarakat agar menjadi desa yang lebih berdaya guna. Potensi desa merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat serta tersimpan di desa. Dimana semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi keberlangsungan dan perkembangan desa. Pembangunan dan pemberdayaan Desa diharapkan mampu melahirkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah konsep mengenai perkuatan dan kontribusi yang disumbangkan oleh sektor ekonomi riil.

#### 4.4.5 Saran

Selanjutnya beberapa saran dan masukan terkait penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Keselarasan dan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga pokok-pokok pikiran hasil pelaksanaan kegiatan reses dan penjangkaran aspirasi masyarakat dapat menjadi salah satu masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) perlu selaras dengan RPJMD sehingga target, visi dan misi untuk tahun 2025 dapat tercapai.

Untuk masukan dari anggota DPRD yang terhimpun dalam fraksi sebagaimana terlampir. Demikian beberapa hal berkaitan dengan pokok-pokok pikiran DPRD, semoga dapat menjadi bagian dari penyempurnaan RKPD dengan harapan dokumen RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjadi masukan dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD, LKPJ serta LPPD di Kabupaten Bantul.

## BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

### 5.1 Rencana Pendanaan Program Perangkat Daerah

Rencana program memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan PD yang bertanggungjawab serta memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur pada tingkat capaiannya. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumber daya yang dimiliki daerah. Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran yaitu alokasi belanja;
- b. Menentukan keluaran/*output* setiap kegiatan;
- c. Menghitung alokasi pagu dari setiap *output* kegiatan untuk setiap program;
- d. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah *output* kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya;
- e. Menghitung alokasi pagu PD berdasarkan program yang menjadi tanggungjawab PD.

Rekapitulasi kebutuhan pendanaan per PD di Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pendanaan Menurut Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Pagu
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	332.115.313.000
2	RSUD Panembahan Senopati	140.411.890.000
3	Dinas Kesehatan	146.717.339.000
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	197.005.911.000
5	Satuan Polisi Pamong Praja	9.478.880.000



No.	Perangkat Daerah	Pagu
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.124.615.000
7	Dinas Sosial	16.990.599.000
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16.246.856.000
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	10.072.794.000
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12.991.898.000
11	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	24.262.107.000
12	Dinas Lingkungan Hidup	23.837.317.000
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.960.848.000
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	12.043.552.000
15	Dinas Perhubungan	17.160.318.000
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	18.269.613.000
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	19.969.230.000
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.376.669.000
19	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	32.448.611.000
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.102.673.000
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.311.889.000
22	Dinas Pariwisata	18.098.448.000
23	Sekretariat Daerah	23.311.249.000
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	45.580.036.000
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.670.683.000
26	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.064.375.492.000
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	109.730.194.000
28	Inspektorat Daerah	7.537.868.000
29	Kapanewon Piyungan	1.599.896.000
30	Kapanewon Dlingo	1.663.279.000
31	Kapanewon Imogiri	1.726.661.000
32	Kapanewon Pandak	1.611.081.000
33	Kapanewon Bantul	1.570.067.000
34	Kapanewon Kretek	1.517.870.000
35	Kapanewon Bambanglipuro	1.551.425.000
36	Kapanewon Jetis	1.596.168.000
37	Kapanewon Kasihan	1.689.378.000
38	Kapanewon Pleret	1.577.524.000
39	Kapanewon Pajangan	1.592.438.000
40	Kapanewon Sanden	1.525.327.000
41	Kapanewon Sedayu	1.581.253.000
42	Kapanewon Sewon	1.667.008.000

No.	Perangkat Daerah	Pagu
43	Kapanewon Srandakan	1.514.142.000
44	Kapanewon Banguntapan	1.662.972.000
45	Kapanewon Pundong	1.543.968.000
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.179.446.000
	<b>TOTAL</b>	<b>2.369.572.795.000</b>

Sumber: RPJMD Tahun 2021-2026

Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah (urusan wajib, pilihan dan urusan pendukung pemerintahan daerah) disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.2 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan  
di Kabupaten Bantul Tahun 2025

KODE	BIDANG URUSAN / SATUAN KERJA	PAGU 2025
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>856.918.943.784</b>
<b>101</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>319.876.879.834</b>
	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	319.876.879.834
<b>102</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>287.129.229.000</b>
	Dinas Kesehatan	146.717.339.000
	RSUD Panembahan Senopati	140.411.890.000
<b>103</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>194.531.514.475</b>
	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	184.488.684.525
	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	10.042.829.950
<b>104</b>	<b>Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>13.787.226.475</b>
	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	13.787.226.475
<b>105</b>	<b>Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>	<b>24.603.495.000</b>
	Satuan Polisi Pamong Praja	9.478.880.000
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.124.615.000
<b>106</b>	<b>Sosial</b>	<b>16.990.599.000</b>
	Dinas Sosial	16.990.599.000
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>176.386.646.716</b>
<b>207</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	<b>15.596.856.000</b>
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.596.856.000
<b>208</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>4.412.899.000</b>
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.412.899.000
<b>209</b>	<b>Pangan</b>	<b>1.958.750.000</b>
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.958.750.000
<b>210</b>	<b>Pertanahan</b>	<b>12.949.277.050</b>

<b>KODE</b>	<b>BIDANG URUSAN / SATUAN KERJA</b>	<b>PAGU 2025</b>
	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	12.949.277.050
<b>211</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>23.837.317.000</b>
	Dinas Lingkungan Hidup	23.837.317.000
<b>212</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>5.960.848.000</b>
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.960.848.000
<b>213</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>12.043.552.000</b>
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	12.043.552.000
<b>214</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>5.659.895.000</b>
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.659.895.000
<b>215</b>	<b>Perhubungan</b>	<b>17.160.318.000</b>
	Dinas Perhubungan	17.160.318.000
<b>216</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	<b>16.739.717.754</b>
	Dinas Komunikasi dan Informatika	16.739.717.754
<b>217</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>	<b>8.370.935.500</b>
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil an Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	8.370.935.500
<b>218</b>	<b>Penanaman Modal</b>	<b>3.376.669.000</b>
	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.376.669.000
<b>219</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>12.238.433.166</b>
	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	12.238.433.166
<b>220</b>	<b>Statistik</b>	<b>228.765.625</b>
	Dinas Komunikasi dan Informatika	228.765.625
<b>221</b>	<b>Persandian</b>	<b>1.301.129.621</b>
	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.301.129.621
<b>222</b>	<b>Kebudayaan</b>	<b>32.448.611.000</b>
	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	32.448.611.000
<b>223</b>	<b>Perpustakaan</b>	<b>1.550.000.000</b>
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.550.000.000
<b>224</b>	<b>Kearsipan</b>	<b>552.673.000</b>
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	552.673.000
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>44.691.779.500</b>
<b>325</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	<b>3.311.889.000</b>
	Dinas Kelautan Dan Perikanan	3.311.889.000
<b>326</b>	<b>Pariwisata</b>	<b>18.098.448.000</b>
	Dinas Pariwisata	18.098.448.000
<b>327</b>	<b>Pertanian</b>	<b>11.033.148.000</b>
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.033.148.000
<b>330</b>	<b>Perdagangan</b>	<b>9.177.467.500</b>
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	9.177.467.500
<b>331</b>	<b>Perindustrian</b>	<b>2.420.827.000</b>
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.420.827.000
<b>332</b>	<b>Transmigrasi</b>	<b>650.000.000</b>
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	650.000.000

<b>KODE</b>	<b>BIDANG URUSAN / SATUAN KERJA</b>	<b>PAGU 2025</b>
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>68.891.285.000</b>
<b>401</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>23.311.249.000</b>
	Sekretariat Daerah	23.311.249.000
<b>402</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>45.580.036.000</b>
	Sekretariat DPRD	45.580.036.000
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>1.182.776.369.000</b>
<b>501</b>	<b>Perencanaan</b>	<b>8.428.822.073</b>
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.428.822.073
<b>502</b>	<b>Keuangan</b>	<b>1.064.375.492.000</b>
	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	1.064.375.492.000
<b>503</b>	<b>Kepegawaian</b>	<b>109.730.194.000</b>
	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	109.730.194.000
<b>505</b>	<b>Penelitian</b>	<b>241.860.927</b>
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	241.860.927
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>7.537.868.000</b>
<b>601</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>7.537.868.000</b>
	Inspektorat Daerah	7.537.868.000
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>27.190.457.000</b>
<b>701</b>	<b>Unsur Kewilayahan</b>	<b>27.190.457.000</b>
	Kapanewon Piyungan	1.599.896.000
	Kapanewon Dlingo	1.663.279.000
	Kapanewon Imogiri	1.726.661.000
	Kapanewon Pandak	1.611.081.000
	Kapanewon Bantul	1.570.067.000
	Kapanewon Kretek	1.517.870.000
	Kapanewon Bambanglipuro	1.551.425.000
	Kapanewon Jetis	1.596.168.000
	Kapanewon Kasihan	1.689.378.000
	Kapanewon Pleret	1.577.524.000
	Kapanewon Pajangan	1.592.438.000
	Kapanewon Sanden	1.525.327.000
	Kapanewon Sedayu	1.581.253.000
	Kapanewon Sewon	1.667.008.000
	Kapanewon Srandakan	1.514.142.000
	Kapanewon Banguntapan	1.662.972.000
	Kapanewon Pundong	1.543.968.000
<b>8</b>	<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>	<b>5.179.446.000</b>
<b>801</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>5.179.446.000</b>
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.179.446.000
<b>JUMLAH</b>		<b>2.369.572.795.000</b>

Sumber: RPJMD Tahun 2021-2026

Kebutuhan pendanaan per program, kegiatan dan subkegiatan pada Perangkat Daerah Tahun 2024 di sajikan secara rinci pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.3 Kebutuhan Pendanaan per Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Perangkat Daerah Tahun 2025

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2025			
					TARGET	Rp		
(1)	(2)			(3)	(11)	(12)	(17)	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp846.876.113.834	
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp319.876.879.834	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka		Rp5.833.481.342	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM Pendidikan	100 Persen		Rp93.342.756.372	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	79 Persen		Rp218.310.642.120	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	5,07 Persen		2.390.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				Rp287.129.229.000	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,40 Angka		Rp2.776.600.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 indeks		Rp26.822.863.349	DINAS KESEHATAN
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1 indeks		Rp358.000.000	DINAS KESEHATAN

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(17)
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	1 indeks	Rp842.850.000	DINAS KESEHATAN
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	55 Kalurahan	Rp950.500.000	DINAS KESEHATAN
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	55 Persen	Rp2.035.000.000	DINAS KESEHATAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,40 Angka	Rp194.000.000	UPTD JAMKESDA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Jamkesda	100 persen	Rp37.131.000.000	UPTD JAMKESDA
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100 Persen	Rp190.650.000	UPTD LABKESDA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Labkesda	100 persen	Rp500.000.000	UPTD LABKESDA
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,40 Angka	Rp1.775.000.000	PUSKESMAS SRANDAKAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Indeks capaian SPM	1 indeks	Rp675.000.000	PUSKESMAS SRANDAKAN

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2025			
(1)			(2)	(3)	TARGET	Rp	(17)	
					(11)	(12)		
			UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,40 Angka	Rp2.475.000.000	PUSKESMAS SANDEN	
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen			
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	Rp675.000.000	PUSKESMAS SANDEN	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,40 Angka	Rp2.786.000.000	PUSKESMAS KRETEK	
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen			
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	Rp768.000.000	PUSKESMAS KRETEK	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,40 Angka	Rp3.215.000.000	PUSKESMAS PUNDONG	
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen			
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	Rp675.000.000	PUSKESMAS PUNDONG	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,40 Angka	Rp2.772.370.000	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen			

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
(1)			(2)	(3)	TARGET	Rp	(17)
					(11)	(12)	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	Rp761.000.000	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,40 Angka	Rp2.077.173.592	PUSKESMAS PANDAK I
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	Rp675.000.000	PUSKESMAS PANDAK I
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,40 Angka	Rp1.666.041.736	PUSKESMAS PANDAK II
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	Rp675.000.000	PUSKESMAS PANDAK II
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,40 Angka	Rp2.397.934.838	PUSKESMAS BANTUL I
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	Rp675.000.000	PUSKESMAS BANTUL I
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,40 Angka	Rp715.000.000	PUSKESMAS BANTUL II



**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
(1)			(2)	(3)	TARGET (11)	Rp (12)	(17)
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	Rp675.000.000	PUSKESMAS BANTUL II
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,40 Angka	Rp2.243.781.250	PUSKESMAS JETIS I
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	Rp872.000.000	PUSKESMAS JETIS I
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,40 Angka	Rp1.437.600.000	PUSKESMAS JETIS II
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	Rp750.000.000	PUSKESMAS JETIS II
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,40 Angka	Rp1.697.269.560	PUSKESMAS IMOGIRI I
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	Rp860.000.000	PUSKESMAS IMOGIRI I

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
(1)			(2)	(3)	TARGET	Rp	(17)
					(11)	(12)	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,40 Angka	Rp2.189.700.942	PUSKESMAS IMOGIRI II
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	Rp775.000.000	PUSKESMAS IMOGIRI II
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,40 Angka	Rp1.731.812.000	PUSKESMAS DLINGO I
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	Rp680.000.000	PUSKESMAS DLINGO I
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,40 Angka	Rp1.352.994.000	PUSKESMAS DLINGO II
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	Rp860.000.000	PUSKESMAS DLINGO II
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,40 Angka	Rp3.075.504.000	PUSKESMAS PLERET
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Indeks capaian SPM	1 indeks	Rp715.000.000	PUSKESMAS PLERET

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2025			
(1)			(2)	(3)	TARGET	Rp	(17)	
					(11)	(12)		
			UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,40 Angka	Rp2.479.540.000	PUSKESMAS PIYUNGAN	
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen			
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	Rp860.000.000	PUSKESMAS PIYUNGAN	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,40 Angka	Rp755.000.000	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen			
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	Rp715.000.000	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,40 Angka	Rp1.660.000.000	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen			
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	Rp715.000.000	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,40 Angka	Rp820.000.000	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen			

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
(1)			(2)	(3)	TARGET	Rp	(17)
					(11)	(12)	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	Rp755.000.000	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,40 Angka	Rp2.786.920.000	PUSKESMAS SEWON I
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	Rp820.000.000	PUSKESMAS SEWON I
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,40 Angka	Rp2.205.455.616	PUSKESMAS SEWON II
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	Rp861.000.000	PUSKESMAS SEWON II
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,40 Angka	Rp2.960.000.000	PUSKESMAS KASHIHAN I
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	Rp725.000.000	PUSKESMAS KASHIHAN I
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,40 Angka	Rp1.681.600.000	PUSKESMAS KASHIHAN II

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
(1)			(2)	(3)	TARGET (11)	Rp (12)	(17)
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	Rp860.000.000	PUSKESMAS KASHIHAN II
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,40 Angka	Rp2.669.000.000	PUSKESMAS PAJANGAN
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	Rp675.000.000	PUSKESMAS PAJANGAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,40 Angka	Rp1.654.000.000	PUSKESMAS SEDAYU I
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	Rp675.000.000	PUSKESMAS SEDAYU I
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,40 Angka	Rp1.534.178.117	PUSKESMAS SEDAYU II
				Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 Persen		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	Rp675.000.000	PUSKESMAS SEDAYU II

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
(1)			(2)	(3)	TARGET (11)	Rp (12)	(17)
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,10 angka	Rp140.347.144.000	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
				Capaian SPM Rumah Sakit	81,50 Persen		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Bed Occupation Rate (BOR)	71 Persen	Rp64.746.000	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
				Turn Over Interval (TOI)	2 hari		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
				Bed Turn Over (BTO)	50 kali		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Rp184.488.684.525	
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya	100 Persen	Rp10.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	Rp425.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	Rp6.667.624.734	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian	45 Persen	Rp13.655.542.281	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2025			
				TARGET	Rp		
(1)	(2)		(3)	(11)	(12)	(17)	
			banjir di WS Kewenangan Kabupaten				
			Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	85,1 Persen		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	85,98 Persen	Rp9.489.533.744	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R	30,67 Persen	Rp600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	93,95 Persen	Rp5.500.577.563	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	5,86 Persen	Rp5.540.013.742	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Tingkat kemantapan infrastruktur permukiman (jalan desa)	82,26 Persen	Rp23.063.347.640	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Gedung pemerintah yang laik fungsi	40 Persen	Rp66.089.613.546	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
(1)			(2)	(3)	TARGET	Rp	(17)
					(11)	(12)	
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	100 Persen	Rp150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	77,06 Persen	Rp41.110.247.704	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	77,34 Persen	Rp1.077.183.571	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	70,3 Persen	Rp970.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1	03	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	90 Persen	Rp150.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Rp13.787.226.475	
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	Rp4.984.687.619	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	42,36 Persen	Rp5.762.877.550	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
(1)			(2)	(3)	TARGET	Rp	(17)
					(11)	(12)	
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni	99,8 Persen	Rp2.493.951.306	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 Persen	Rp545.710.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			Rp24.603.495.000	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	Rp3.437.407.703	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	Rp2.541.472.297	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	88,31 Persen	3.500.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	03	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	Rp5.050.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	82,50 Angka	Rp6.247.815.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	40 Persen	Rp3.160.800.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
(1)			(2)	(3)	TARGET	Rp	(17)
					(11)	(12)	
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Indeks Pemulihan Pascabencana	60 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	Rp666.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			Rp16.990.599.000	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	Rp1.442.465.362	DINAS SOSIAL
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	80 Persen	Rp523.959.448	DINAS SOSIAL
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	80 Persen	Rp9.788.751.920	DINAS SOSIAL
				Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	80 Persen		DINAS SOSIAL

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
(1)			(2)	(3)	TARGET	Rp	(17)
					(11)	(12)	
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	75 Persen	Rp4.341.265.740	DINAS SOSIAL
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 Persen	Rp518.608.626	DINAS SOSIAL
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keberintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	80 Persen	Rp375.547.904	DINAS SOSIAL
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp186.429.476.666	-
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			Rp15.596.856.000	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	Rp3.250.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	21,5 Persen	Rp3.050.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	60 Persen	Rp8.346.856.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala	38 Persen	Rp950.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2025			
				TARGET	Rp		
(1)	(2)		(3)	(11)	(12)	(17)	
			Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).				
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Rp4.412.899.000		
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Desa Prima	41,33 Persen	Rp860.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	72 Persen	Rp547.899.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0.00028	Rp925.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	10 Persen	Rp294.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
					TARGET	Rp	
(1)	(2)			(3)	(11)	(12)	(17)
							KELUARGA BERENCANA
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan desa layak anak	60 Kalurahan	Rp900.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 Persen	Rp886.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			Rp1.958.750.000	
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	53,33 Persen	Rp390.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung pangan yang berfungsi dengan baik	85,71 Persen	Rp20.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	155 Persen	Rp1.276.750.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	18,67 Persen	Rp211.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
(1)			(2)	(3)	TARGET (11)	Rp (12)	(17)
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	100 Persen	Rp61.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			Rp22.992.107.000	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	Rp1.571.656.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 Persen	Rp10.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	90 Persen	Rp10.400.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2	10	11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	54,58 Persen	Rp11.010.451.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			Rp23.837.317.000	
1	03	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai	100 Persen	Rp500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
(1)			(2)	(3)	TARGET	Rp	(17)
					(11)	(12)	
				peraturan perundang-undangan			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,75 Angka	Rp3.980.745.040	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	100 Persen	Rp170.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	85 Persen	Rp1.705.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	36 Persen	Rp6.268.600.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	36,58 Persen	Rp22.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	31 Persen	Rp73.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	5 Persen	Rp124.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	1 penghargaan	Rp50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
					TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(17)
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	100 Persen	Rp30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	46,86 Persen	Rp10.913.471.960	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Rp5.960.848.000	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83.75 Angka	Rp4.029.945.929	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99,84 Persen	Rp792.979.817	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	96,3 Persen	Rp538.619.094	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	99,8 Persen	Rp479.554.771	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat	100 Persen	Rp119.748.389	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			Rp12.043.552.000	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	Rp953.969.955	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan	100 Persen	Rp140.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN



**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
(1)			(2)	(3)	TARGET	Rp	(17)
					(11)	(12)	
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan	100 Persen	Rp45.000.000	MASYARAKAT DAN KALURAHAN
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	100 Persen	Rp3.882.498.130	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	100 Persen	Rp4.971.991.915	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
2	10	11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi.	77 Persen	Rp750.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan	58,33 Persen	Rp1.300.092.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			Rp5.659.895.000	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	Rp1.650.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
(1)			(2)	(3)	TARGET	Rp	(17)
					(11)	(12)	
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate</i> (TFR))	1,63 Angka	Rp181.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern ( <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i> )	77,2 Persen	Rp2.704.599.135	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	85 Persen	Rp1.123.795.865	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			Rp17.160.318.000	
1	03	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang- undangan	100 Persen	Rp3.680.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,25 Angka	Rp1.167.875.000	DINAS PERHUBUNGAN

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
(1)			(2)	(3)	TARGET	Rp	(17)
					(11)	(12)	
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43	Rp12.312.443.000	DINAS PERHUBUNGAN
				Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	0,30 angka		
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Rp16.739.717.754	
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	85,71 Persen	Rp2.033.223.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90 Angka	Rp2.415.281.266	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	73 Persen	Rp1.698.953.412	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	2,95 Angka	Rp10.592.259.576	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 Persen		
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			Rp8.370.935.500	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,5 Angka	Rp3.682.832.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2025			
(1)			(2)	(3)	TARGET	Rp	(17)	
					(11)	(12)		
								PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	2,5 Persen	31.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	76,92 Persen	Rp166.757.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	66,96 Persen	52.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	60 Persen	Rp187.325.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	5 Persen	Rp314.845.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang berizin	65 Persen	Rp612.759.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	75 Persen	Rp379.917.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(17)
							MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Rintisan Desa Preneur	14,67 persen	Rp406.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian pemasaran pada Desa Preneur	50 Persen	Rp2.537.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			Rp3.376.669.000	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	Rp1.625.315.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	100 Persen	Rp282.535.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	15,29 Persen	480.003.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100 Persen	Rp439.351.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Persen	Rp432.337.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(17)
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	100 Persen	Rp117.128.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			Rp12.238.433.166	
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	83 Persen	Rp2.345.340.480	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi Olahraga	100 Medali	Rp9.250.081.966	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Organisasi Pramuka yang aktif	18 Organisasi	Rp643.010.720	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			Rp228.765.625	
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100 Persen	Rp228.765.625	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			Rp1.301.129.621	
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	80 Persen	Rp1.301.129.621	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2025			
(1)			(2)	(3)	TARGET	Rp	(17)	
					(11)	(12)		
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				Rp32.448.611.000	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,5 Angka		Rp1.213.332.240	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	83,08 Persen		5.733.225.960	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
				Bahasa Sastra yang dilestarikan	104 Pelestarian		7.177.450.500	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
				Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	953 Pelestarian		18.324.602.300	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				Rp1.550.000.000	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka		Rp950.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	17,48 Persen		Rp600.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				Rp552.673.000	
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional)	63 Persen		Rp400.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	72 Persen		Rp152.673.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2025			
				TARGET	Rp		
(1)	(2)		(3)	(11)	(12)	(17)	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		Rp44.691.779.500	-	
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		Rp3.311.889.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kalurahan Bahari yang direvitalisasi	80 Persen	125.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	Rp700.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	835 ton	Rp662.675.120,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	12.959 ton	Rp1.613.413.880,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	5 Persen	Rp53.900.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi perikanan yang diolah	5 Persen	Rp156.900.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			Rp18.098.448.000	
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Desa Wisata	37,33 Persen	Rp1.525.000.000	DINAS PARIWISATA
1	03	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	Rp400.000.000	DINAS PARIWISATA



**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
					TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(17)
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	Rp5.183.648.000	DINAS PARIWISATA
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 Persen	Rp8.902.000.000	DINAS PARIWISATA
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	2 Persen	Rp966.800.000	DINAS PARIWISATA
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	50 Persen	Rp622.000.000	DINAS PARIWISATA
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 CBT	Rp499.000.000	DINAS PARIWISATA
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			Rp11.033.148.000	
1	03	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	0 Persen	Rp0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	Rp2.230.167.802	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan sarana pertanian	100 Persen	Rp3.446.076.470	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Ketersediaan sarana peternakan	100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	100 Persen	Rp922.125.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
					TARGET	Rp	
(1)	(2)			(3)	(11)	(12)	(17)
				Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	Rp2.814.455.368	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Produksi Daging	15.850 Ton		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100 Persen	Rp570.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	100 Persen	Rp22.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,325 ton/ha	Rp1.028.323.360	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			Rp9.177.467.500	
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	54 Persen	Rp194.040.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	5 Persen	Rp6.923.334.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	6 Persen	Rp218.243.400	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
(1)			(2)	(3)	TARGET (11)	Rp (12)	(17)
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	110 juta US\$	Rp873.162.700	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	35 Persen	Rp443.687.400	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	20 Persen	Rp525.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			Rp2.420.827.000	
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100 Persen	Rp2.305.827.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 Persen	Rp52.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi	0,22 Persen	Rp63.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2025			
(1)			(2)	(3)	(11)	Rp (12)	(17)	
				perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota				
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				Rp650.000.000	
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penempatan Transmigrasi	100 Persen		Rp650.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp68.891.285.000	
4	01		SEKRETARIAT DAERAH				Rp23.311.249.000	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	Rp10.976.575.000		SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM - BAGIAN HUMAS PROTOKOL
				Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen			SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
				Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen			SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	92 Persen	Rp1.085.280.000,00		SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
				Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	100 Persen			SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUKUM
				Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan	100 Persen			SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
(1)			(2)	(3)	TARGET	Rp	(17)
					(11)	(12)	
				Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti			KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	100 Persen	Rp353.312.000	SEKREATRIAT DAERAH - BAGIAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN SDA
				Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Metode Tender	80 Persen	Rp1.138.468.000	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional	89 Persen	261.050.000	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
				Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	89,5 persen	500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUKUM
				Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	89.50 Persen	300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	84 Persen	245.000.000	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI
4	02		SEKRETARIAT DEWAN			Rp45.580.036.000	
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	Rp37.263.395.543	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	88 Persen	Rp8.316.640.457	SEKRETARIAT DPRD
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp1.182.776.369.000	
5	01		PERENCANAAN			Rp8.428.822.073	

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(17)
4	01	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	Rp554.065.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage)	70 Persen	Rp200.000.000	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	Rp1.675.542.813	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	100 Persen	Rp4.348.590.929	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	97 Persen		
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 Persen	Rp1.650.623.331	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	100 Persen		
				Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 Persen		
5	02		KEUANGAN			Rp1.064.375.492.000	

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
(1)			(2)	(3)	TARGET	Rp	(17)
					(11)	(12)	
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	88 Persen	Rp605.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,5 Angka	Rp730.029.284.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Rp318.197.011.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
				Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu		
				Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	90 Persen		
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	Rp2.114.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD	100 Persen	Rp13.430.197.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	03		KEPEGAWAIAN			Rp109.730.194.000	
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	75 Persen	Rp741.084.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
(1)			(2)	(3)	TARGET (11)	Rp (12)	(17)
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,6 Angka	Rp102.562.571.700	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	32 Persen	Rp6.426.537.800	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
				Peta Kompetensi ASN	15 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
				Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	100 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	05		PENELITIAN			Rp241.860.927	
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	100 Persen	Rp241.860.927	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			Rp7.537.868.000	
6	01		INSPEKTORAT			Rp7.537.868.000	
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase PD pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	50 Persen	266.026.970	INSPEKTORAT DAERAH
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	Rp4.260.897.302	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	15 Persen	Rp643.072.513	INSPEKTORAT DAERAH



**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2025			
				TARGET	Rp		
(1)	(2)		(3)	(11)	(12)	(17)	
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	35 Persen	Rp2.367.871.214	INSPEKTORAT DAERAH
7			UNSUR KEWILAYAHAN			Rp27.190.457.000	-
7	01		KECAMATAN			Rp27.190.457.000	-
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	66.040.000	KAPANEWON BANTUL
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	84 Persen	50.000.000	KAPANEWON BANTUL
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	89 Angka	Rp1.159.235.140	KAPANEWON BANTUL
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	93 Persen	Rp32.976.000	KAPANEWON BANTUL
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	Rp66.950.000	KAPANEWON BANTUL
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	Rp19.600.000	KAPANEWON BANTUL
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	Rp175.265.860	KAPANEWON BANTUL
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	Rp66.040.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	84 Persen	Rp50.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
					TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(17)
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	Rp976.385.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	95 Angka	Rp115.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	93 Persen	Rp172.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	Rp140.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	Rp32.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	Rp66.040.000	KAPANEWON DLINGO
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	84 Persen	Rp50.000.000	KAPANEWON DLINGO
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	88 Angka	Rp992.239.000	KAPANEWON DLINGO
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	Rp110.000.000	KAPANEWON DLINGO
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	Rp240.000.000	KAPANEWON DLINGO
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	Rp170.000.000	KAPANEWON DLINGO

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
(1)			(2)	(3)	TARGET	Rp	(17)
					(11)	(12)	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	Rp35.000.000	KAPANEWON DLINGO
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	Rp66.040.000	KAPANEWON IMOGIRI
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	84 Persen	Rp50.000.000	KAPANEWON IMOGIRI
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	Rp864.621.000	KAPANEWON IMOGIRI
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	98 Persen	Rp125.000.000	KAPANEWON IMOGIRI
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	98 Persen	Rp341.000.000	KAPANEWON IMOGIRI
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	98 Persen	Rp180.000.000	KAPANEWON IMOGIRI
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	Rp100.000.000	KAPANEWON IMOGIRI
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	Rp66.040.000	KAPANEWON JETIS
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	84 Persen	Rp50.000.000	KAPANEWON JETIS

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(17)
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	Rp1.152.411.500	KAPANEWON JETIS
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	94 Persen	Rp28.187.500	KAPANEWON JETIS
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95 Persen	Rp161.266.500	KAPANEWON JETIS
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	Rp133.012.500	KAPANEWON JETIS
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	Rp5.250.000	KAPANEWON JETIS
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	Rp66.040.000	KAPANEWON KRETEK
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	84 Persen	Rp50.000.000	KAPANEWON KRETEK
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	Rp840.830.000	KAPANEWON KRETEK
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	91 Persen	Rp108.000.000	KAPANEWON KRETEK
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	85 Persen	Rp229.000.000	KAPANEWON KRETEK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	90 Persen	Rp206.000.000	KAPANEWON KRETEK

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2025			
				TARGET	Rp		
(1)	(2)		(3)	(11)	(12)	(17)	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	Rp18.000.000	KAPANEWON KRETEK
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	Rp66.040.000	KAPANEWON KASIHAN
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	84 Persen	Rp50.000.000	KAPANEWON KASIHAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	88 Angka	Rp983.380.527	KAPANEWON KASIHAN
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	Rp144.569.320	KAPANEWON KASIHAN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	92 Persen	Rp194.306.972	KAPANEWON KASIHAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	92 Persen	Rp103.367.760	KAPANEWON KASIHAN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	Rp147.713.421	KAPANEWON KASIHAN
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	Rp66.040.000	KAPANEWON PANDAK
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	84 Persen	Rp50.000.000	KAPANEWON PANDAK

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(17)
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	93 Angka	Rp989.991.000	KAPANEWON PANDAK
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	93 Persen	Rp66.600.000	KAPANEWON PANDAK
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	88 Persen	Rp266.950.000	KAPANEWON PANDAK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	88 Persen	Rp149.000.000	KAPANEWON PANDAK
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	Rp22.500.000	KAPANEWON PANDAK
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	Rp66.040.000,00	KAPANEWON PUNDONG
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	84 Persen	Rp50.000.000	KAPANEWON PUNDONG
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	89 persen	Rp953.350.684	KAPANEWON PUNDONG
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	94 persen	Rp33.047.299	KAPANEWON PUNDONG
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	85 persen	Rp237.741.712	KAPANEWON PUNDONG
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	90 persen	Rp187.332.666	KAPANEWON PUNDONG

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2025			
				TARGET	Rp		
(1)	(2)		(3)	(11)	(12)	(17)	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	Rp16.455.639	KAPANEWON PUNDONG
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	Rp66.040.000	KAPANEWON PLERET
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	84 Persen	Rp50.000.000	KAPANEWON PLERET
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	Rp869.984.000	KAPANEWON PLERET
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	95 Persen	Rp119.500.000	KAPANEWON PLERET
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95 Persen	Rp232.000.000	KAPANEWON PLERET
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	95 Persen	Rp185.000.000	KAPANEWON PLERET
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	Rp55.000.000	KAPANEWON PLERET
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	Rp66.040.000	KAPANEWON PIYUNGAN
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	84 Persen	Rp50.000.000	KAPANEWON PIYUNGAN

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
					TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(17)
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	Rp955.906.000	KAPANEWON PIYUNGAN
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	95 Persen	Rp125.000.000	KAPANEWON PIYUNGAN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	Rp177.950.000	KAPANEWON PIYUNGAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	Rp185.000.000	KAPANEWON PIYUNGAN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	Rp40.000.000	KAPANEWON PIYUNGAN
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	Rp66.040.000	KAPANEWON PAJANGAN
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	84 Persen	Rp50.000.000	KAPANEWON PAJANGAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	Rp875.900.000	KAPANEWON PAJANGAN
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	91 Persen	Rp150.000.000	KAPANEWON PAJANGAN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	91 Persen	Rp185.000.000	KAPANEWON PAJANGAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	91 Persen	Rp120.000.000	KAPANEWON PAJANGAN



**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
(1)			(2)	(3)	TARGET	Rp	(17)
					(11)	(12)	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	Rp145.498.000	KAPANEWON PAJANGAN
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	Rp66.040.000	KAPANEWON SANDEN
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	84 Persen	Rp50.000.000	KAPANEWON SANDEN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	Rp985.079.400	KAPANEWON SANDEN
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	93 Persen	Rp75.000.000	KAPANEWON SANDEN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	83 Persen	Rp168.207.600	KAPANEWON SANDEN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	90 Persen	Rp113.000.000	KAPANEWON SANDEN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	Rp68.000.000	KAPANEWON SANDEN
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	Rp66.040.000	KAPANEWON SRANDAKAN
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	84 Persen	Rp50.000.000	KAPANEWON SRANDAKAN

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
					TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(17)
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	88 Angka	Rp1.012.352.000	KAPANEWON SRANDAKAN
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	93 Persen	Rp51.500.000	KAPANEWON SRANDAKAN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	97 Persen	Rp171.000.000	KAPANEWON SRANDAKAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	97 Persen	Rp152.250.000	KAPANEWON SRANDAKAN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	Rp11.000.000	KAPANEWON SRANDAKAN
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	Rp66.040.000	KAPANEWON SEWON
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	84 Persen	Rp50.000.000	KAPANEWON SEWON
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	91 Angka	Rp958.371.308	KAPANEWON SEWON
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	91 Persen	Rp63.351.000	KAPANEWON SEWON
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	91 Persen	Rp210.535.000	KAPANEWON SEWON
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	Rp220.194.692	KAPANEWON SEWON

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2025			
				TARGET	Rp		
(1)	(2)		(3)	(11)	(12)	(17)	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	Rp98.516.000	KAPANEWON SEWON
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	Rp66.040.000	KAPANEWON SEDAYU
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	84 Persen	Rp50.000.000	KAPANEWON SEDAYU
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	88 Angka	Rp1.110.913.000	KAPANEWON SEDAYU
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	93 Persen	Rp40.900.000	KAPANEWON SEDAYU
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	Rp75.900.000	KAPANEWON SEDAYU
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	Rp49.500.000	KAPANEWON SEDAYU
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	Rp188.000.000	KAPANEWON SEDAYU
4	01	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	Rp66.040.000	KAPANEWON BANGUNTAPAN
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	84 Persen	Rp50.000.000	KAPANEWON BANGUNTAPAN

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
					TARGET	Rp	
(1)			(2)	(3)	(11)	(12)	(17)
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	88 Angka	Rp1.105.000.000	KAPANEWON BANGUNTAPAN
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	94 Persen	Rp85.000.000	KAPANEWON BANGUNTAPAN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95 Persen	Rp163.434.500	KAPANEWON BANGUNTAPAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	97 Persen	Rp177.241.800	KAPANEWON BANGUNTAPAN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	Rp16.255.700	KAPANEWON BANGUNTAPAN
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			Rp5.179.446.000	
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			Rp5.179.446.000	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	88 Angka	Rp800.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan	100 Persen	Rp400.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi	100 Persen	Rp2.400.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pembinaan Ormas	33 Persen	Rp125.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2025		
(1)			(2)	(3)	TARGET	Rp	(17)
					(11)	(12)	
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama	100 Persen	Rp400.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	100 Persen	Rp409.446.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Lokasi Yang di prakondisi	25 Persen	Rp645.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

## **5.2 Rencana Pendanaan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal tersebut menyatakan bahwa rencana pemenuhan pelayanan dasar harus dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi: RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Rencana pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 sesuai Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 Rencana Pemenuhan SPM Kabupaten Bantul Tahun 2025

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	
				K	Rp
<b>TOTAL RENCANA PENERAPAN SPM</b>					<b>347.791.125.968</b>
<b>SPM BIDANG PENDIDIKAN</b>					<b>311.653.398.492</b>
<b>DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>					<b>311.653.398.492</b>
<b>1.01.02</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	<b>Persentase capaian SPM Pendidikan</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>93.342.756.372</b>
<b>1.01.02.201</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Persentase capaian SPM Pendidikan SD</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>40.713.957.444</b>
1.01.02.201.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	Ruang	3	100.000.000
1.01.02.201.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Ruang	4	100.000.000
1.01.02.201.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	100.000.000
1.01.02.201.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	6	100.000.000
1.01.02.201.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	1	93.000.000
1.01.02.201.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa	Unit	1	93.000.000
1.01.02.201.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Peserta Didik	58590	38.885.765.000
1.01.02.201.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Satuan Pendidikan Dasar Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	1	123.487.084
1.01.02.201.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	250	1.078.705.360
1.01.02.201.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1	10.000.000
1.01.02.201.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	365	10.000.000
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	365	10.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	
				K	Rp
1.01.02.201.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	1	10.000.000
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Persentase capaian SPM Pendidikan SMP</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>21.961.358.448</b>
1.01.02.202.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Ruang	1	10.000.000
1.01.02.202.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah NonFormal/Kesetaraan Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Unit	1	10.000.000
1.01.02.202.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Gedung Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	10.000.000
1.01.02.202.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	62.960.000
1.01.02.202.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Ruang Guru Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	10.000.000
1.01.02.202.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	10.000.000
1.01.02.202.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	10.000.000
1.01.02.202.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	10.000.000
1.01.02.202.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	1	60.000.000
1.01.02.202.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Paket	1	60.000.000
1.01.02.202.33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks	Buku	1	10.000.000
1.01.02.202.34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Perlengkapan Belajar Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1	10.000.000
1.01.02.202.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	1	10.000.000
1.01.02.202.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Peserta Didik	24790	20.648.888.208
1.01.02.202.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan Menengah Pertama Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	95	10.000.000
1.01.02.202.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	500	952.470.240



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	
				K	Rp
1.01.02.202.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1	10.000.000
1.01.02.202.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	95	37.040.000
1.01.02.202.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	95	10.000.000
1.01.02.202.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Orang	1	10.000.000
<b>1.01.02.2.03</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>25.799.870.240</b>
1.01.02.203.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terbangun	Unit	1	10.000.000
1.01.02.203.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Unit	1	10.000.000
1.01.02.203.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	10.000.000
1.01.02.203.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket	1	60.000.000
1.01.02.203.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Perlengkapan Siswa PAUD yang Tersedia	Paket	1	60.000.000
1.01.02.203.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Peserta Didik	450	135.000.000
1.01.02.203.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia	Paket	1	100.000.000
1.01.02.203.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Peserta Didik	1	10.000.000
1.01.02.203.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Satuan Pendidikan PAUD Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	1	10.000.000
1.01.02.203.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Orang	1	10.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	
				K	Rp
1.01.02.203.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	1295	497.470.240
1.01.02.203.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	1295	24.887.400.000
<b>1.01.02.2.04</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Persentase capaian SPM Pendidikan NonFormal/Kesetaraan</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>4.867.570.240</b>
1.01.02.204.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah NonFormal/Kesetaraan	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah NonFormal/Kesetaraan yang Terbangun	Unit	1	10.000.000
1.01.02.204.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah NonFormal/Kesetaraan	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah NonFormal/Kesetaraan yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	10.000.000
1.01.02.204.07	Pengadaan Mebel Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Mebel Pendidikan NonFormal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	1	10.000.000
1.01.02.204.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Perlengkapan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	1	110.000.000
1.01.02.204.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik NonFormal/Kesetaraan	Biaya Personil Peserta Didik NonFormal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Peserta Didik	2592	4.677.570.240
1.01.02.204.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa NonFormal / Kesetaraan	Alat Praktik dan Peraga Siswa NonFormal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	1	10.000.000
1.01.02.204.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan di	Satuan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	1	10.000.000
1.01.02.204.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Orang	1	10.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	
				K	Rp
1.01.02.204.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah NonFormal/Kesetaraan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah NonFormal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	27	10.000.000
1.01.02.204.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah NonFormal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah NonFormal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	27	10.000.000
<b>1.01.04</b>	<b>Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM</b>	<b>persen</b>	<b>79</b>	<b>218.310.642.120</b>
<b>1.01.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik &amp; Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, &amp; Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan NonFormal</b>	<b>guru</b>	<b>8339</b>	<b>218.310.642.120</b>
1.01.04.201.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Dokumen	1	218.134.407.000
1.01.04.201.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Laporan	1	176.235.120,00
<b>SPM BIDANG KESEHATAN</b>					<b>5.015.405.320</b>
<b>DINAS KESEHATAN</b>					<b>5.015.405.320</b>
1.2.2	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Indeks pemenuhan UKP UKM</b>		<b>1</b>	<b>26.822.863.349</b>
1.2.2.202	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP</b>		<b>1</b>	<b>16.822.434.399</b>

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	
				K	Rp
1.2.2.202.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	16156	3.360.038.654
1.2.2.202.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	16156	99.633.334
1.2.2.202.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	15388	79.833.334
1.2.2.202.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	57811	116.733.334
1.2.2.202.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	12159 0	273.333.333
1.2.2.202.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	86490 8	174.833.333
1.2.2.202.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	13794 5	178.333.333
1.2.2.202.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	10230 0	131.333.333
1.2.2.202.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	34728	131.333.333
1.2.2.202.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	3408	161.333.333
1.2.2.202.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	11786	160.333.333

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	
				K	Rp
1.2.2.202.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	17090	148.333.333
<b>SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM</b>					<b>14.128.492.807</b>
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>					<b>14.128.492.807</b>
1.03.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak</b>	<b>Persen</b>	<b>85,98</b>	<b>9.271.915.244</b>
1.03.03.2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase rumah tangga dengan akses air bersih</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>9.271.915.244</b>
1.03.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	4	375.000.000
1.03.03.2.01.02	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	Dokumen	3	350.000.000
1.03.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Liter/Detik	25	5.000.000
1.03.03.2.01.04	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	50	500.000.000
1.03.03.2.01.05	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	liter/detik	30	1.454.302.062
1.03.03.2.01.06	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit rumah tersambung pada Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	liter/detik	5	492.994.682

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	
				K	Rp
		Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan			
1.03.03.2.01.07	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan <i>Idle Capacity</i> dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	1000	4.000.000.000
1.03.03.2.01.08	Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM yang diperbaiki	unit	1	10.000.000
1.03.03.2.01.09	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum	Penyelenggara SPAM	1	2.000.000
1.03.03.2.01.10	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Badan Usaha	1	2.000.000
1.03.03.2.01.11	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Kelompok Masyarakat	20	10.000.000
1.03.03.2.01.12	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	Unit	1	3.000.000
1.03.03.2.01.13	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan	Unit	1	3.000.000
1.03.03.2.01.14	Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	Penyelenggara SPAM	5	217.618.500
1.03.03.2.01.15	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit	1	3.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	
				K	Rp
1.03.03.2.01.16	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit	1	3.000.000
1.03.03.2.01.17	Sub Kegiatan Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Rumah Tangga	5	50.000.000
1.03.03.2.01.18	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit	2	3.000.000
1.03.03.2.01.19	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan <i>Idle Capacity</i> dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM Perdesaan	SR	430	1.782.000.000
1.03.03.2.01.20	Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	unit	1	3.000.000
1.03.03.2.01.21	Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	1	3.000.000
<b>1.03.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</b>	<b>Persen</b>	<b>93.95</b>	<b>4.856.577.563</b>
<b>1.03.05.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak</b>	<b>Persen</b>	<b>93.95</b>	<b>4.856.577.563</b>
1.03.05.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	317.670.240
1.03.05.2.01.02	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/	Dokumen	1	55.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	
				K	Rp
	Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota			
1.03.05.2.01.03	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga	100	5.000.000
1.03.05.2.01.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	Unit	100	2.069.959.910
1.03.05.2.01.05	Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	rumah tangga	50	5.000.000
1.03.05.2.01.06	Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	rumah tangga	60	644.000.000
1.03.05.2.01.07	Sub Kegiatan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	orang	60	10.000.000
1.03.05.2.01.08	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	kelompok masyarakat	10	200.000.000
1.03.05.2.01.09	Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	orang	150	399.980.000
1.03.05.2.01.10	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	unit	2	659.967.413
1.03.05.2.01.11	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Dokumen	1	5.000.000



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	
				K	Rp
1.03.05.2.01.12	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	rumah tangga	60	450.000.000
1.03.05.2.01.13	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	unit	1	10.000.000
1.03.05.2.01.14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	rumah tangga	100	10.000.000
1.03.05.2.01.15	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	M <sup>3</sup> /Hari	20	5.000.000
1.03.05.2.01.16	Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	M <sup>3</sup> /Hari	5	5.000.000
1.03.05.2.01.17	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen	1	5.000.000
<b>SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT</b>					<b>1.093.000.000</b>
<b>DINAS PERKEJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>					
<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>4.984.687.619</b>
<b>1.04.02.2.01</b>	<b>Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi</b>	<b>jenis</b>	<b>5</b>	<b>33.000.000</b>
1.04.02.2.01.01	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	10.000.000
1.04.02.2.01.02	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	1	10.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	
				K	Rp
1.04.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	1	5.000.000
1.04.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	1	5.000.000
1.04.02.2.01.05	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	1	3.000.000
<b>1.04.02.2.02</b>	<b>Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah jenis sosialisasi/kegiatan</b>	<b>jenis</b>	<b>6</b>	<b>40.000.000</b>
1.04.02.2.02.01	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	100	15.000.000
1.04.02.2.02.02	Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	orang	30	5.000.000
1.04.02.2.02.03	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	orang	30	5.000.000
1.04.02.2.02.04	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang	20	5.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	
				K	Rp
1.04.02.2.02.05	Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	5.000.000
1.04.02.2.02.06	Sub Kegiatan Koordinasi untuk Menyetakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Dokumen	1	5.000.000
<b>1.04.02.2.03</b>	<b>Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi</b>	<b>unit</b>	<b>10</b>	<b>1.020.000.000</b>
1.04.02.2.03.01	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	unit	10	200.000.000
1.04.02.2.03.02	Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	10.000.000
1.04.02.2.03.03	Sub Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	meter	1000	100.000.000
1.04.02.2.03.04	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Pembangunan Rumah Korban Bencana atau Relokasi	unit	10	500.000.000
1.04.02.2.03.05	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	unit	5	200.000.000
1.04.02.2.03.06	Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	unit	5	10.000.000
<b>SPM BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLIDUNGAN MASYARAKAT</b>					<b>5.998.972.297</b>
<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>					<b>2.541.472.297</b>

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	
				K	Rp
1.05.02	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>2.541.472.297</b>
1.05.02.2-01	<b>Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 daerah kabupaten/kota</b>	<b>Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>1.976.423.909</b>
1.05.02.2-01.01	Sub kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patrol pengamanan dan pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan**)	Kasus	300	1.087.418.211
1.05.02.2-01.02	Sub kegiatan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penegakan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan**)	Kasus	300	358.329.620
1.05.02.2-01.04	Sub kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum**)	Dokumen	12	407.796.383
1.05.02.2-01.05	Sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM satuan pol pp dan satuan perlingungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya**)	Orang	100	104.907.695
1.05.02.2-01.08	Sub kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia**)	Unit	30	15.972.000
	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota *	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	12	500.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	
				K	Rp
	Sub Kegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum *	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	12	500.000
	Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat *	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	12	500.000
	Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada *	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	12	500.000
<b>1.05.02.2-02</b>	<b>Kegiatan Penegakan peraturan daerah kabupaten/kot a dan peraturan bupati/wali kota</b>	<b>Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>564.548.388</b>
1.05.02.2-02.02	Sub kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota**)	Laporan	12	105.683.175
1.05.02.2-02.03	Sub kegiatan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP**)	Laporan	12	441.865.213
	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota*	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	12	17.000.000
	<b>Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota *</b>	<b>Capaian kegiatan pembinaan PPNS</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>500.000</b>
	Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS*	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan	Laporan	12	500.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	
				K	Rp
		Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada			
<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>					<b>3.457.500.000</b>
<b>1.05.03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>	<b>Persen</b>	<b>40</b>	<b>3.160.800.000</b>
		<b>Persentase Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	
		<b>Persentase Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	
<b>1.05.03.2.01</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Capaian Kinerja Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persen</b>	<b>66</b>	<b>551.000.000</b>
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	430.000.000
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	orang	1800	121.000.000
<b>1.05.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	<b>Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	<b>Persen</b>	<b>75</b>	<b>1.960.000.000</b>
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	orang	400	600.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	
				K	Rp
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	12	110.000.000
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	34	600.000.000
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	1	50.000.000
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	16	150.000.000
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	orang	28	100.000.000
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	2	200.000.000
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	orang	200	110.000.000
1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0
1.05.03.2.02.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	keluarga	40	40.000.000
<b>1.05.03.2.03</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>280.500.000</b>
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	laporan	1	5.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	
				K	Rp
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	1	35.000.000
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	orang	950	100.000.000
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	950	100.000.000
1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	laporan	1	5.500.000
1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	1	35.000.000
<b>1.05.04</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non Kebakaran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>666.000.000</b>
<b>1.05.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun</b>	<b>Persen</b>	<b>87</b>	<b>366.500.000</b>
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	1	16.500.000
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan	laporan	150	88.000.000



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	
				K	Rp
		Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	12	22.000.000
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	1	20.000.000
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	4	100.000.000
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	orang	120	110.000.000
1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Kalurahan	5	5.000.000
1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan,	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan	Dokumen	1	5.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	
				K	Rp
	antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran			
<b>1.05.04.2.02</b>	<b>Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>Capaian Kinerja Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>Persen</b>	<b>70%</b>	<b>35.000.000</b>
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	1	5.000.000
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	60	30.000.000
<b>1.05.04.2.04</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>Persen</b>	<b>86</b>	<b>202.500.000</b>
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	orang	50	27.500.000
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	kalurahan	10	105.000.000
1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapradas Damkar	Dokumen	5	70.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	
				K	Rp
1.05.04.2.05	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>Capaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>62.000.000</b>
1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	unit	2	45.000.000
1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	laporan	1	17.000.000
<b>SPM BIDANG SOSIAL</b>					<b>9.901.857.052</b>
<b>DINAS SOSIAL</b>					<b>9.901.857.052</b>
1.6.4	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>	<b>Persen</b>	<b>80</b>	<b>9.788.751.920</b>
1.6.4.201	<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS</b>	<b>Persen</b>	<b>68</b>	<b>9.723.046.426</b>
1.6.4.201.1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	900	6.938.054.846
1.6.4.201.2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1	orang	50	7.435.854

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	
				K	Rp
		Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			
1.6.4.201.3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	10	5.311.324
1.6.4.201.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	5	16.067.286
1.6.4.201.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	100	303.399.182
1.6.4.201.6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	20	13.265.032
1.6.4.201.7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	92.089.795
1.6.4.201.8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	81.456.525
1.6.4.201.9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	97.023.282
1.6.4.201.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	20	2.003.785.602
1.6.4.201.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	20	157.057.931

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	
				K	Rp
1.6.4.201.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	10	8.099.769
<b>1.6.6</b>	<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>Indikator Program: Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>518.608.626</b>
<b>1.6.6.201</b>	<b>Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Indikator Kegiatan: Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial</b>	<b>persen</b>	<b>85</b>	<b>178.810.626</b>
1.6.6.201.1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	100	36.182.962
1.6.6.201.2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	6.593.441
1.6.6.201.3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	desa	75	118.865.398
1.6.6.201.4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	4	9.075.424
1.6.6.201.5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	15	8.093.401

### 5.3 Rencana Dana Keistimewaan

Perencanaan Keistimewaan Tahun 2025 telah diawali sejak tahun 2023. Rekapitulasi rencana usulan BKK Dana Keistimewaan per urusan tahun 2025 sesuai Renstra PD 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.5 Rencana Usulan BKK Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Urusan	Perangkat Daerah	Anggaran
<b>1</b>	<b>Kelembagaan</b>		<b>6.744.998.470</b>
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	1.300.092.000
		Inspektorat	266.026.970
		Bappeda	554.065.000
		BPKPAD	605.000.000
		BKPSDM	741.084.500
		Bagian TAPEM	261.050.000
		Bag Hukum	500.000.000
		Bag Organisasi	545.000.000
		17 Kapanewon	1.972.680.000
<b>2</b>	<b>Kebudayaan</b>		<b>57.881.502.260</b>
		Dinas Kebudayaan	31.235.278.760
		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	2.390.000.000
		Dinas Kesehatan	2.035.000.000
		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.000.000.000
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	645.000.000
		Satuan Polisi Pamong Praja	3.500.000.000
		DP3APPKB	860.000.000
		Dinas Komunikasi dan Informatika	2.033.223.500
		Dinas Kelautan dan Perikanan	125.000.000
		Dinas Pariwisata	1.525.000.000
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	390.000.000
		DKUKMPP	2.943.000.000
		Bappeda	200.000.000
<b>3</b>	<b>Pertanahan</b>		<b>11.760.451.000</b>
		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	11.010.451.000
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	750.000.000
<b>4</b>	<b>Tata Ruang</b>		<b>9.955.000.000</b>
		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	425.000.000
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.050.000.000
		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	150.000.000
		Dinas Lingkungan Hidup	500.000.000
		Dinas Perhubungan	3.680.000.000
		Dinas Pariwisata	150.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>86.341.951.730</b>

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2024

Sementara itu rincian program, kegiatan dan anggaran pada 4 urusan keistimewaan yang diusulkan untuk tahun anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5.6 Anggaran Keistimewaan Urusan Kelembagaan Berdasarkan Program dan Kegiatan di Kabupaten Bantul Tahun 2025

Perangkat Daerah	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan</b>				<b>1.300.092.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentase kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan	58,33 Persen	1.300.092.000
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan****)	Kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan	75 Kalurahan	1.300.092.000
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan****)	1. Peserta bimtek penyelenggaraan urusan keistimewaan		
		2. Pamong Kalurahan yang mendapatkan kompensasi pengganti pelungguh dan Pengarem-arem		
		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	1 Dokumen	1.300.092.000
<b>Inspektorat</b>				<b>266.026.970</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase PD Pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	50%	266.026.970
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yang ditindaklanjuti	80%	266.026.970
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan	Dokumen hasil pemeriksaan pelaksanaan urusan keistimewaan dalam satu tahun		
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	22 Laporan	266.026.970
<b>Bappeda</b>				<b>554.065.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100%	554.065.000

Perangkat Daerah	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
	KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	100%	554.065.000
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Rencana program dan kegiatan keistimewaan		
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun		
		Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun	4 Dokumen	277.104.950
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Laporan pengendalian dan evaluasi DAIS		
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY		
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Keistimewaan	4 Laporan	276.960.050
<b>BPKPAD</b>				<b>605.000.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	88%	605.000.000
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 Persen	605.000.000
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (dokumen)	3 Dokumen	302.500.000
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul		
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY (laporan)	3 Laporan	302.500.000
<b>BKPSDM</b>				<b>741.084.500</b>
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	75 Persen	741.084.500
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi	100 Persen	741.084.500
	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/	Jumlah ASN yang mengikuti diklat keistimewaan	1 Laporan	741.084.500
		Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	1 Laporan	741.084.500



Perangkat Daerah	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
<b>Bagian TAPEM</b>				<b>261.050.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	89 persen	261.050.000
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	89 persen	261.050.000
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Fasilitasi penyusunan rencanakegiatan penugasan urusan keistimewaan di Kapanewon		
		Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di Kapanewon		
		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan /Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	261.050.000
<b>Bag Hukum</b>				<b>500.000.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	89,5 persen	500.000.000
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	100 Persen	500.000.000
	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kab/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Laporan penyelenggaraan regulasi tindak lanjut keistimewaan		
		Peraturan Bupati		
		Kajian Penyesuaian Regulasi Tindak Lanjut Keistimewaan		
		Sosialisasi Perbup		
		Jumlah produk hukum kabupaten/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan yang disusun	4 dokumen	305.000.000
	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Bimtek Penyusunan Perkal		

Perangkat Daerah	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
		Laporan Penyelarasan Produk Hukum Kalurahan		
		Jumlah dokumen hasil pengawasan produk hukum kalurahan	1 dokumen	195.000.000
<b>Bag Organisasi</b>				<b>545.000.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	89.50 persen	300.000.000
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	84 Persen	245.000.000
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	85 persen	300.000.000
	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	1. dokumen monitoring dan evaluasi urusan kelembagaan di Kabupaten Bantul,		
		2. Perumusan analisa jabatan dan pengembangan kinerja jabatan		
		Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/ Kota	4 lembaga	200.000.000
	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	1 dokumen	100.000.000
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	81 Persen	245.000.000
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1. Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan		
		2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan		
		3. Agen Perubahan Kelompok Budaya Pemerintahan		
		4. Draft Perbub Pakaian Dinas		
		5. Pin satriya		
		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota	1 dokumen	245.000.000
<b>Kap Piyungan</b>				<b>116.040.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas		66.040.000

Perangkat Daerah	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
	URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul		50.000.000
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan	Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan		66.040.000
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		
		Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana keistimewaan per triwulan		
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	3 Dok	66.040.000
	Peningkatan budaya pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan		50.000.000
	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		
		ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		
		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya	1 Dok	50.000.000
		Pemerintahan Kabupaten/Kota		
<b>Kap Dlingo</b>				<b>116.040.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 persen	66.040.000
		Tingkat penerapan budayapemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	84 persen	50.000.000
	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan	Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan		
		Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 persen	66.040.000
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		
		Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan		
		jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	3 dokumen	66.040.000
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	terwujudnya Peningkatan Budaya Pemerintahan		

Perangkat Daerah	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
		Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	100 persen	50.000.000
	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		
		ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		
		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000
<b>Kap Imogiri</b>				<b>116.040.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	66.040.000
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	84 Persen	50.000.000
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 persen	66.040.000
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan di Kapanewon		
		Dokumen Perencanaan urusan Keistimewaan di Kapanewon		
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 Dokumen	66.040.000
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	100 persen	50.000.000
	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		
		ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		
		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000
<b>Kap Pandak</b>				<b>116.040.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 Persen	66.040.000
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	84 Persen	50.000.000

Perangkat Daerah	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 Persen	66.040.000
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	3 dok	66.040.000
		Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	4 dok	
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	84 Persen	50.000.000
	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon	1 Dok	50.000.000
		ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya	20 Orang	
<b>Kap Bantul</b>				<b>116.040.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	116.040.000
	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 Persen	66.040.000
	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		
		Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan		
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	2 dokumen	66.040.000
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tingkat Penerapan Budaya perintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	85 persen	50.000.000
	Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA di Kab.Bantul	Dokuemna rencana aksi tahunan budaya pemerintahan SATRIYA		
		ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan Internalisasi budaya pemerintahan satriya di Kapanewon Bantul		
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000
<b>Kapanewon Kretek</b>				<b>116.040.000</b>

Perangkat Daerah	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 Persen	66.040.000
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	85 Persen	50.000.000
	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 persen	66.040.000
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan		
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	7 Dokumen	66.040.000
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	100 persen	50.000.000
	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		
		ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		
		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	50.000.000
<b>Kap Banglipuro</b>				<b>116.040.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 Persen	116.040.000
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	85 Persen	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 Persen	66.040.000
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		
		Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaabn per triwulan		
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	2 dokumen	66.040.000
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	100 Persen	50.000.000

Perangkat Daerah	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000
<b>Kap Jetis</b>				<b>116.040.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	116.040.000
	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 Persen	66.040.000
	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		
		Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaabn pertriwulan		
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	2 dokumen	66.040.000
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tingkat Penerapan Budaya perintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	85 persen	50.000.000
	Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA di Kab.Bantul	Dokumen rencana aksi tahunan budaya pemerintahan SATRIYA	1 dokumen	
		Internalisasi budaya pemerintahan satriya di Kapanewon Bantul	75 orang	
		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000
<b>Kap Kasihan</b>				<b>116.040.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 Persen	116.040.000
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	85 Persen	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 Persen	66.040.000
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan di Kapanewon		
		Dokumen Perencanaan urusan Keistimewaan di Kapanewon		
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	2 Dokumen	66.040.000

Perangkat Daerah	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	100 Persen	50.000.000
	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon	1 Dokumen	50.000.000
		ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya	20 Orang	
<b>Kap Pleret</b>				<b>116.040.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 persen	66.040.000
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	85 persen	50.000.000
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 persen	66.040.000
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kapanewon		
		Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan		
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	2 dokumen	66.040.000
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	100 persen	50.000.000
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon	-	
		ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya	-	
		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000
<b>Kap Pajangan</b>				<b>116.040.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 persen	116.040.000
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	85 persen	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 persen	66.040.000



Perangkat Daerah	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		
		Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan Per Triwulan		
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	2 dokumen	66.040.000
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	85%	50.000.000
	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten/ Kota	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		
		ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		
		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000
<b>Kap Sanden</b>				<b>116.040.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 persen	66.040.000
		Tingkat penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	85 Persen	50.000.000
	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 persen	66.040.000
	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan		
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 dokumen	66.040.000
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	100 persen	50.000.000
	Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		
		ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		
		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000
<b>Kap Sedayu</b>				<b>116.040.000</b>

Perangkat Daerah	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 Persen	66.040.000
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	85 Persen	50.000.000
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 Persen	66.040.000
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		
		Dokumen Hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan Tingkat kapanewon		
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 dokumen	66.040.000
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	100 Persen	50.000.000
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		
		ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		
		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000
<b>Kap Sewon</b>				<b>116.040.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas,	100 persen	66.040.000
		Tingkat penerapan budayapemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	85 persen	50.000.000
	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 persen	66.040.000
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		
		Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan		
		jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 dokumen	66.040.000
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	100 persen	50.000.000
	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		

Perangkat Daerah	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
		ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		
		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000
<b>Kap Srandakan</b>				<b>116.040.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 persen	66.040.000
		Tingkat penerapan budayapemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	85 persen	50.000.000
	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 persen	66.040.000
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		
		Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan		
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 dokumen	66.040.000
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	100 persen	50.000.000
	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Tahunan Budaya Pemerintahan SATRIYA	1 Dokumen	50.000.000
		Dokumen Hasil Internalisasi Budaya Pemerintahan SATRIYA	75 orang	
<b>Kap Banguntapan</b>				<b>116.040.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	116.040.000
	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 Persen	66.040.000
	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		
		Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan		
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	1 dokumen	66.040.000

Perangkat Daerah	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tingkat Penerapan Budaya perintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	100 persen	50.000.000
	Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA di Kab.Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon	1 dokumen	
		ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya	75 orang	
		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000
<b>Kap Pundong</b>				<b>116.040.000</b>
	PROGRAM PENYELE NGGARAAN KEISTIME WAAN YOGYAKA RTA URUSAN KELEMBA GAAN DAN KETATAL AKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 persen	116.040.000
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	84 persen	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksana an Kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 persen	66.040.000
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		
		Dokumen laporan pengendali an dan evaluasi Dana Keistimewaan Per Triwulan		
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewan yang disusun	2 dokumen	66.040.000
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkat an Budaya Pemerintahan	100 persen	50.000.000
	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		
		ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		
		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya	1	50.000.000
		Pemerintahan Kabupaten/Kota	Dokumen	

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2024

Tabel 5.7 Anggaran Keistimewaan Urusan Kebudayaan Berdasarkan Program dan Kegiatan di Kabupaten Bantul Tahun 2025

Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran	
<b>Dinas Kebudayaan</b>				<b>31.235.278.760</b>	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	83,08%	6.155.250.000	
		Bahasa Sastra yang dilestarikan	104	7.100.000.000	
		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	953	17.980.028.760	
	Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa	11 jenis	7.100.000.000	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Peringatan Peristiwa Sejarah	2 kali		
		LCC Sejarah Tingkat Kabupaten	1 kali		
		LCC Sejarah Tingkat Propinsi	1 kali		
		LCC Sejarah Kab dan Propinsi	0		
		Kajian Sejarah Lokal	1 dokumen		
		Lawatan Sejarah	4 kali		
		Kelana Sejarah	2 kali		
		Kompetisi Bertema Sejarah Tingkat Kabupaten	3 jenis lomba		
		FGD Sejarah	5 kali		
		Publikasi Sejarah	4 kali		
		Dialog Sejarah	2 kali		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	9 Dokumen	1.650.000.000	
		Sub Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Kabupaten Bantul	0	
			Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Propinsi DIY	0	
			Pembinaan Sastra	0	
	Pawiyatan Pranatacara		0		
	Pawiyatan Aksara Jawa		0		
		Gelar Macapat	1 kali		

Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
		Dokumentasi Sastra (Majalah Mentaok dan Antologi)	2 judul	
		Kompetisi Kebahasaan dan Sastra (Tingkat Kabupaten dan Propinsi)	9 kali	
		Pawiyatan (Pranatacara/ Aksara Jawa)	15 desa	
		Pembinaan Macapat	18 paguyuban	
		Workshop dan Pembinaan Sastra	2 kali	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	42 Laporan	4.050.000.000
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman****)	LCC Museum Tingkat Kabupaten	0	
		LCC Museum Tingkat Propinsi	0	
		Wajib Kunjung Museum	4 kali	
		Fasilitasi Komunitas Museum	11 kali	
		Promosi Museum	3 kali	
		LCC Museum (Tingkat Kabupaten dan Provinsi)	2 kali	
		Peningkatan Kompetensi SDM Museum	1 kali	
		Kajian Museum	1 dokumen	
		Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	15 unit	1.400.000.000
	Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan	22 objek	6.155.250.000
	Sub Kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Penetapan Cagar Budaya	20 objek/CB	
		1. Sosialisasi CB	4 kali	
		2. Kajian Warisan Budaya Benda	2 dokumen	
		3. Rehab Cagar Budaya	1 CB	
		4. Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya	15 desa	
		5. Jelajah Situs	3 kali	
		6. Orientasi CB WB	1 kali	
		7. FGD Pengelola Cagar Budaya	1 kali	

Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
		8. Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya	4 kali	
		9. Lomba Pemeliharaan dan Kebersihan Cagar Budaya	1 kali	
		10. Lomba Dokumentasi Cagar Budaya	1 kali	
		11. Papanisasi Cagar Budaya	0	
		12. Bimtek pemeliharaan Objek CB	1 kali	
		12. Appraisal Tanah CB	1 kali	
		13. Pengamanan Lokasi /kawasan CB	1 dokumen	
		Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	20 Objek	3.945.250.000
	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya	15 kali	
		1. Internisasi Tata Nilai	3 kali	
		2. Festival Olahraga /Permainan Tradisional	1 kali	
		3. Workshop WBTB	4 kali	
		4. Seminar Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda	2 kali	
		5. Nyantrik Pada Pelestari	2 kali	
		6. Revitalisasi Karya Budaya	1 kali	
		7. Kemah Budaya	1 kali	
		8. Fasilitasi Forum Pelestari WBTB	10 kali	
		9. Sosialisasi Nilai-Nilai Ungguh Ungguh Jawa	2 kali	
		Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	8 objek	2.000.000.000
	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia****)	Kajian Budaya Tak Benda	2 objek	
		Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi	2 dokumen	210.000.000

Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
	Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya****)	Peningkatan Event Budaya di Taman Budaya Bantul	1 kali	500.000.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota****)	1. Pengadaan Lahan Taman Budaya Bantul	0	
		2. Dokumen Lingkungan	0	
		3. Gelar Budaya	1	
		4. Kemitraan Seni Budaya	0	
		Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	1 objek	500.000.000
	Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pemenuhan Sarana Prasarana	1 jenis	1.600.000.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	1. Gamelan Kuningan (Rintisan Desa Budaya)		-
		2. Perlengkapan Sanggar / Kelompok Seni/ Budaya		-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	5 unit	1.600.000.000
	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	236 kali	15.880.028.760
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	1. Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya	3 desa	
		2. Evaluasi dan Penetapan Rintisan Desa Budaya	1 dokumen	
		3. Festival Rintisan Desa Budaya	1 kali	
		4. Gelar Potensi Rintisan Desa Budaya	0	
		5. Fasilitasi Adat dan Tradisi Rintisan Desa Budaya	9 desa	
		6. Fasilitasi Kesenian dan Permainan Tradisional Rintisan Desa Budaya	9 desa	
		7. Fasilitasi Kesenian dan Permainan Tradisional Rintisan Desa Budaya	9 desa	
		8. Evaluasi Pembinaan Objek Kebudayaan	1 laporan	
		9. BKK Kalurahan melalui Kabupaten/kota	0	



Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
		Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya		700.000.000
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	1. Lomba Lukis Kyoto-DIY	1 kali	
		2. Workshop dan Lomba Film	1 kali	
		3. Rapat Kerja / Fasilitasi Dewan Kebudayaan Bantul	12 kali	
		4. Fasilitasi Komunitas Seni Budaya Lokal:	20 komunitas	
		5. Fasilitasi Sanggar Seni (Lomba Cipta Karya Seni)	1 kali	
		6. Kerjasama Institusi Pelestari Budaya	1 kali	
		Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	12 Lembaga	1.800.000.000
	Sub Kegiatan Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	1. Misi Kebudayaan Ke Dalam Pulau Jawa	5 kali	
		2. Misi Kebudayaan Ke Luar Pulau Jawa	4 kali	
		3. Gelar Pesona Nusantara	0	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	9 laporan	1.395.560.000
	Sub Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan	1. Penghargaan Seniman Budayawan	5 orang	
		2. Penghargaan Pelestari Adat Tradisi	5 kelompok	
		3. Penghargaan Pelestari Cagar Budaya	5 orang	
		Jumlah Seniman dan Budayawan yang mendapat penghargaan	15 orang	350.000.000
	Sub Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta	1. Pentas Seni	6 kali	
		2. Pawai Seni	2 kali	
		3. Pasar Seni	1 kali	
		Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	9 laporan	600.000.000
	Sub Kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta	1. Pengiriman Festival Kethoprak ke DIY	1 kali	

Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
		2. Pengiriman Sendratari ke DIY	1 kali	
		3. Pengiriman Festival Teater ke DIY	1 kali	
		4. Pengiriman Festival Karawitan ke DIY	1 kali	
		5. Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY	1 kali	
		6. Pengiriman Langen Sekar DIY	1 kali	
		7. Pengiriman Festival Permaianan Tradisional DIY	1 kali	
		8. Pengiriman Festival Jathilan DIY	1 kali	
		9. Pengiriman Festival Wayang Wong /Reyog DIY	1 kali	
		10. Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	0	
		11. Festival Kethoprak Tingkat Kabupaten	1 kali	
		12. Festival Teater Tingkat Kabupaten	1 kali	
		13. Festival Karawitan Tingkat Kabupaten	1 kali	
		14. Festival Keroncong Tingkat Kabupaten	1 kali	
		15. Mentaok Culture Fest	1 kali	
		16. Festival Langen Carita Tingkat Kabupaten	1 kali	
		17. Festival Jathilan Tingkat Kabupaten	1 kali	
		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	16 laporan	3.660.000.000
	Sub Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah	1. Publikasi Pariwara Seni Budaya	12 kali	
		2. Publikasi Melalui Media Cetak	2 kali	
		3. Updating/ Pemeliharaan Aplikasi Directory Kebudayaan	1 paket	
		Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	15 dokumrn	490.050.000
	Sub Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi	Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME		
		Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	240 orang	96.800.000

Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat	1. Pembinaan Wayang Kulit / Pawiyatan Dalang	2 kali	
		2. Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten	1 kali	
		3. Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja DIY	1 kali	
		Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	4 laporan	199.650.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Event Pnggiat Seni	1. Pentas Wayang Kulit	20 kali	
		2. Fasilitasi Pentas Kelompok Seni	175 kali	
		3. Event Besar	0	
		4. Pentas Kecil	0	
		5. Event Ceremonial	26 kali	
		6. Event Pendopo Parasamya	11 kali	
		7. Peristiwa Budaya : Pentas Hari Jadi Bantul, Pentas HUT RI, Pentas Seni Budaya Santri, Pentas Hari Wayang Nasional	0	
		8. Peristiwa Budaya : Pentas Seni Budaya Santri, Pentas Hari Wayang Nasional	2 kali	
		9. Sineprak Tumuruning Wakyu Mataram	0	
		10. Pentas Pastab (Pasar Seni dan Wisata Bantul)	52 kali	
		11. Sendratari Bulan Purnama	0	
		12. Pentas Akhir Pekan (Taman Budaya)	0	
		13. Festival Budaya Bantul /	0	
		14. Pentas Selasa Wagen	1 1 kali	
		15. Aubade HUT RI Tingkat Propinsi dan Kabupaten	2 kali	
		Jumlah Laporan Even Pnggiat Seni	284 laporan	5.544.377.300

Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1. Upacara Adat Tradisi	25 kali	1.043.591.460
		2. Merti Dusun	30 kali	
		Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	55 Laporan	
<b>Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga</b>				<b>2.390.000.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	5,07 Persen	2.390.000.000
	Kegiatan Pendidikan Berbasis Budaya	Kurikulum Mulok yang disusun	8	2.390.000.000
	Sub Kegiatan Pembinaan Muatan Lokal	Guru yang mengikuti Pelatihan Keterampilan tari tradisional Yogyakarta		
		Guru yang mengikuti Pelatihan keterampilan memainkan dolanan tradisional Jawa		
		Peserta/Masyarakat yang mengikuti Pelatihan rias pengantin Gaya Yogyakarta (Paes Ageng)		
		Peserta/Masyarakat yang mengikuti Pelatihan MC Basa Jawa/Pranata Cara)		
		Kurikulum Mulok Pembelajaran PAUD berbasis budaya Yogyakarta		
		Guru yang mengikuti pelatihan muatan lokal membuat batik		
		Guru yang mengikuti pelatihan guru muatan lokal bahasa jawa		
		Guru yang mengikuti pelatihan guru Muatan lokal Pembelajaran PAUD		
		Kurikulum Mulok Pembelajaran SD berbasis budaya Yogyakarta		
		Lomba Jemparingan dan Ngudar Tembang		
		Kurikulum Mulok Pembelajaran SMP berbasis budaya Yogyakarta		
	Lomba membuat batik			

Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
		Cabang olahraga tradisional yang dilombakan		
		Terlaksananya Pembinaan Muatan Lokal	7	2.390.000.000
<b>Dinas Kesehatan</b>				<b>2.035.000.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	55,56 persen	2.035.000.000
	Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian kinerja pengembangan potensi pelayanan kesehatan tradisional	100 persen	2.035.000.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Puskesmas dengan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	15 puskesmas	2.035.000.000
		Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional		
		Puskesmas dengan pengembangan pelayanan Kesehatan tradisional terintegrasi		
<b>Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>				<b>10.000.000.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya	10 Persen	10.000.000.000
	Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya	Capaian Kinerja pengelolaan dan pengembangan taman budaya	100 Persen	10.000.000.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Pembangunan Taman Budaya Tahap I, II dan Tahap III	0	10.000.000.000
		Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	1 objek	
<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>				<b>645.000.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Lokasi yang diprakondisi	25%	645.000.000
	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Lokasi yang diprakondisi	25%	645.000.000
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kader Pembauran	1 lap	645.000.000
		Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi		
<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>				<b>3.500.000.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	88,31%	3.500.000.000
	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terwujudnya Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan	832 pedukuhan	3.500.000.000

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
	Sub Kegiatan Pembinaan Jagawarga	Pembentukan kelompok Jagawarga	200 pedukuhan	3.500.000.000
		Pembinaan kelompok Jagawarga	816 pedukuhan	
		Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	5000 orang	
<b>DP3APPKB</b>				<b>860.000.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Desa Prima	41,33 Persen	860.000.000
	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan	4 desa	860.000.000
	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Pelatihan dan Pengembangan Desa PRIMA	15 Desa	860.000.000
		Workshop Desa PRIMA	70 Peserta	
<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>				<b>2.033.223.500</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	85,71	2.033.223.500
	Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Capaian kinerja pembangunan sistem informasi	100	2.033.223.500
	Sub Kegiatan Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Sistem Informasi Penanda Keistimewaan	4	2.033.223.500
		Lokasi Pembangunan jaringan Fiber Optik		
		Jumlah CCTV monitoring keamanan		
		Lokasi Pemeliharaan Penanda Keistimewaan		
		Pemeliharaan jaringan Fiber optik		
		Pemeliharaan jaringan internet		
		Pemeliharaan CCTV monitoring keamanan		
		Jumlah Publikasi Penanda Keistimewaan		
		Pemberdayaan KIM		
	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang dibangun	5		
<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>				<b>125.000.000</b>

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kalurahan Bahari yang direvitalisasi	80 persen	125.000.000
	Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Persentase pengembangan Kalurahan Bahari yang telah ditetapkan	80 persen	125.000.000
	Sub Kegiatan Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan	6 objek	125.000.000
		- pelatihan modifikasi alat tangkap		
		- Regenerasi nelayan	25 Orang	
		- Pengembangan perbengkelan kapal	1 unit	
		- Pengembangan pengolahan ikan	25 Orang	
		‘ Pengembangan pembuatan perahu fiber	1 Paket	
		‘ Pengembangan Kampung Lele	1 Paket	
		‘ Pengembangan Kampung Gurami	1 Paket	
<b>Dinas Pariwisata</b>				<b>1.525.000.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Desa Wisata	37,33 persen	1.525.000.000
	Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Wisata	100 persen	1.525.000.000
	Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	2 objek	1.525.000.000
<b>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</b>				<b>390.000.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan	53,33 Persen	390.000.000
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Cakupan pengembangan lumbung mataraman	100 persen	390.000.000
	Pengembangan Lumbung Mataraman	Peserta lumbung kemataraman		390.000.000
		Jumlah Lumbung Mataraman		
		Tanaman hortikultura lokal yang dikembangkan		
		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	2 Laporan	
<b>DKUKMPP</b>				<b>2.943.000.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Rintisan Desa Preneur	14,67 Persen	406.000.000
		Cakupan pemasaran pada Desa Preneur	50 Persen	2.537.000.000

Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Pasar Rakyat Bercagar Budaya yang direvitalisasi	65 Persen	2.200.000.000
	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Revitalisasi Pasar Bercagar Budaya	2 pasar	2.200.000.000
		DED/ DED Reviu Pasar Bercagar Budaya	2 dokumen	
		Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	2 objek	
	Pengembangan kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Persentase IKM di desa/kalurahan Preneur yang difasilitasi	30 persen	337.000.000
	Pengembangan Industri Kreatif	Pelatihan IKM Keris	250 unit usaha	337.000.000
		Pelatihan IKM Tatah Sungging		
		Pelatihan IKM Lurik		
		Pelatihan IKM Batik		
		Pelatihan IKM Kostum Pakaian Wayang Orang		
		Pelatihan Pembuatan Produk Kecantikan Tradisional		
		Pelatihan Kuliner di Rintisan Desa Preanur		
		IKM yang mempunyai legalitas usaha dan HKI		
		UKM yang difasilitasi sarana prasarana pemasaran		
		SDM UKM yang dilatih penguasaan bahasa inggris		
		Komunitas Antikan yang mendapat fasilitasi promosi		
		Komunitas Antikan yang mendapat fasilitasi promosi		
		Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan		
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pendampingan Desa/kalurahan Preneur	4 kalurahan	406.000.000
	Pengembangan kewirausahaan Desa	Pelatihan ketrampilan inovasi produk lokal	-	406.000.000
		Pelatihan Pemasaran Digital	-	
		Pengembangan daya tarik produk	-	
		Pelatihan IKM Perca Kayu	-	
		Pelatihan olahan makanan	-	



Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
		Pelatihan Kemasan (makanan)	-	
		Pelatihan Kerajinan Bambu kepeng	-	
		Pelatihan IKM sangkar Ayam	-	
		FGD Kemitraan IKM	-	
		Tes Pasar	-	
		Bimtek anyaman	-	
		Monev Pelatihan	-	
		Pengembangan kewirausahaan Desa Preaneur	10 Laporan	
<b>Bappeda</b>				<b>200.000.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage)	70%	200.000.000
	Pelestarian Cagar Budaya dan warisan Budaya	Capaian luasan yang terkonservasi di dalam zona inti	70%	200.000.000
	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Laporan fasilitasi forum Situs Warisan Geologi (Geoheritage)	2 Objek	200.000.000
		Laporan fasilitasi Pengelola Situs Warisan Geologi (Geoheritage)		
		Laporan Pengembangan Situs Warisan Geologi		
		Kajian identifikasi potensi zona pengembangan Situs Warisan Geologi (Geoheritage) Sesar Opak Bukit Mengger dan Gumuk Pasir Parangtritis		
		Kajian identifikasi potensi zona pengembangan Situs Warisan Geologi (Geoheritage) Sesar Opak Bukit Mengger dan Gumuk Pasir Parangtritis**		
		Fasilitasi Forum Warisan Geologi (Geoheritage) Kabupaten Bantul**		
		Fasilitasi Pengelola Situs Warisan Geologi Sesar Opak Bukit Mengger dan Gumuk Pasir Parangtritis**		
		Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola		

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2024

Tabel 5.8 Anggaran Keistimewaan Urusan Pertanahan Berdasarkan Program dan Kegiatan di Kabupaten Bantul Tahun 2025

Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
<b>Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</b>				<b>11.010.451.000</b>
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	54,58%	11.010.451.000
	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	90%	10.613.176.000
	Sub Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	sket bidang tanah desa	3 dokumen	10.263.176.000
		pemasangan patok tanah desa		
		Pembuatan patok tanah desa		
		Pengukuran tanah desa		
		pendaftaran tanah desa		
		Peta bidang tanah desa		
		pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa Kabupaten Bantul		
	Sub kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di Kabupaten Bantul	1 dokumen	350.000.000
	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa			
	Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Capaian kinerja kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	100%	322.275.000
	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	rekomendasi Bupati / kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa di Kabupaten Bantul		122.275.000
		Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	1 dokumen	
	Sub kegiatan Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	fasilitasi rekomendasi Bupati / kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa	5 berita acara	200.000.000
		Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa		

Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
	Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Cakupan penyediaan sarana dan prasaran pendukung keistimewaan	80%	75.000.000
	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	5 unit	75.000.000
<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan</b>				<b>750.000.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTAHANAN	Presentase ketersediaan bidang tanah kelurahan berdasarkan hasil inventarisasi	77 persen	750.000.000
	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kalurahan yang mendapatkan pendampingan Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan)	15 kal	750.000.000
	Sub Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	1 dokumen	750.000.000

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2024

Tabel 5.9 Anggaran Keistimewaan Urusan Tata Ruang Berdasarkan Program dan Kegiatan di Kabupaten Bantul Tahun 2025

Perangkat Daerah	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran	
<b>Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>				<b>425.000.000</b>	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	425.000.000	
	Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	100 Persen	425.000.000	
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Pelataran Budaya Imogiri	0	425.000.000	
		Peningkatan Jaringan SPAM Girirejo			
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri			1 Dokumen
		Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri			
<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>				<b>5.050.000.000</b>	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100%	5.050.000.000	
	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian Kinerja Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	100%	50.000.000	
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Penyediaan fasilitas penanganan bencana dan kebakaran	1 Dokumen	50.000.000	
		Penyusunan Rencana Manajemen Risiko Bencana Terintegrasi			
		Sosialisasi Rencana Manajemen Risiko Bencana Terintegrasi			
		Pemasangan Papan Informasi dan Evakuasi Bencana dan Kebakaran			
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri			
	Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Capaian Kinerja Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	100%	5.000.000.000	

Perangkat Daerah	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	1 Dokumen	5.000.000.000
<b>Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</b>				<b>150.000.000</b>
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	90%	150.000.000
	Kegiatan Pemanfaatan Ruang satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian kinerja kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	90%	150.000.000
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Dokumen revisi tata guna lahan	2 dokumen	150.000.000
		Sosialisasi pengendalian pembangunan bangunan dan instalasi baru		
		Dokumen pembatasan pendirian industri baru		
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri		
<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>				<b>500.000.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Presentase pemanfaatan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai Peraturan perundang-undangan	100 Persen	500.000.000
	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten	100 Persen	500.000.000
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Meningkatnya pemahaman peserta pelatihan persampahan 80% dari 90 Peserta (1. Panggung Krapyak, Krapyak Kulon, Panggunharjo Kapanewon Sewon- 2. Makam Pajimatan, Kalurahan Wukirsari, Imogiri- 3. Makam Pajimatan Kalurahan	1 Dokumen	75.000.000
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu		
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Terbentuknya Kelompok Pengelolaan sampah (Samas, Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden dan Padukuhan Parangtritis, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek		150.000.000

Perangkat Daerah	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	1 Dokumen	
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Terbentuknya kelompok Pengelolaan Sampah (Kalurahan Segoroyoso, Kalurahan Pleret dan Kalurahan Wonokromo)		125.000.000
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	1 Dokumen	
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Konservasi Sumber Daya Alam (Padukuhan Glondong Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon)		150.000.000
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	1 Dokumen	
<b>Dinas Perhubungan</b>				<b>3.680.000.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 persen	3.680.000.000
	Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah kadipaten	100 persen	3.680.000.000
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Rambu Lalu Lintas LPJU		
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 dokumen	940.000.000
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	LPJU		
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	1 dokumen	1.700.000.000
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	LPJU		
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	1 dokumen	1.040.000.000
<b>Dinas Pariwisata</b>				<b>150.000.000</b>
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul Sesuai Paraturan Perundang-undangan	100 persen	150.000.000

Perangkat Daerah	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian Kinerja Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	100 persen	150.000.000
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	1 dokumen	150.000.000

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2024

## BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam penyusunan RKPd Tahun 2025, kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengacu pada sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

Tabel 6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
<b>I</b>	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>			
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	81,99- 81,50	Dinkes RSUD UPTD Puskesmas Dikpora
	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,29	Dinas Kesehatan
	Net Death Rate (NDR)	permil	20	Rumah Sakit Panembahan Senopati
	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	64,5	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	6,5	Dinas Kesehatan
	Case Fatalilty Rate Covid 19	Persen	2	Dinas Kesehatan
	Insiden Rate DBD	per 100.000 penduduk	110	Dinas Kesehatan
	Prevalensi stunting	Persen	7,5	Dinas Kesehatan
	Angka Harapan Lama sekolah	Tahun	15,3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	94,26	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	95,26	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	98,8	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	14,26	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	Persen	34,5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	Indeks	86,5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	25	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	3,45	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Desa /Kalurahan Pamor Budaya	Kalurahan	10	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Didukung Oleh : Dinas Pariwisata Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	Desa/ Kalurahan	24	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	Indeks Rasa Aman	Indeks	2,79	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	100	Satuan Polisi Pamong Praja,  Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Presentase gangguan trantribum yang dapat di selesaikan	Persen	100	Satuan Polisi Pamong Praja
	Presentase Pemilih yang berpartisipasi	Persen	78	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Jumlah Intoleransi di masyarakat	Angka	0	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan.	Jumlah kejadian	0	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,83	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian, Dinas Kelautan Dan Perikanan Dinas Pariwisata Dinas Kukmp Perdagangan
	Rasio Gini	Angka	0,320	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian, Dinas Kelautan Dan Perikanan Dinas Pariwisata Dinas Kukmp Perdagangan

**RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	91,2	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	%	0,714	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	%	0,6	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2.737.867	Dinas Pariwisata
	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2	Dinas Pariwisata
	Jumlah Belanja Wisatawan	Rupiah/org	861.490	Dinas Pariwisata
	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB	Rupiah (Miliar)	1.975,84	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	persen	3,3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (Miliar)	2.640,66	Dinas Penanaman Modal Dan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,3	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Jumlah tenaga kerja yang terserap	orang	10.500	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	Kalurahan	63	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan
	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	100	Dinas Pariwisata Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Jumlah parameter Kabupaten Kreatif yang dipenuhi	jumlah parameter	18	Dinas Pariwisata
	Pertumbuhan industri kreatif	persen	0,84	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Pertumbuhan industri	persen	2,2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	persen	70	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Tingkat Kemiskinan	persen	12,05	Dinas Sosial
	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	71.059	Dinas Sosial
	PPKS yang dilayani dan ditangani	persen	100	Dinas Sosial
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,75	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74,31	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	Prevalensi	0,39	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	KLA	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Nilai KLA	Angka	910	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Angka	2,35	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
<b>II</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>			
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
	Persentase capaian SPM Pendidikan	Persen	100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	Persen	79	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	Persen	5,07	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,10	Rumah Sakit Panembahan Senopati
	Capaian SPM Rumah Sakit	Persen	81,50	Rumah Sakit Panembahan Senopati
	Bed Occupation Rate (BOR)	persen	71	Rumah Sakit Panembahan Senopati
	Turn Over Interval (TOI)	hari	2	Rumah Sakit Panembahan Senopati
	Bed Turn Over (BTO)	kali	50	Rumah Sakit Panembahan Senopati
	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks	1	Dinas Kesehatan

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Indeks sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makan minum sesuai standar dibagi dengan yang diawasi.	Indeks	1	Dinas Kesehatan
	Cakupan Pelayanan Jamkesda	Persen	100	UPTD Jamkesda
	Cakupan Pelayanan Labkesda	Persen	100	UPTD Labkesda
	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	84,40	27 Puskesmas
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	persen	100	27 Puskesmas
	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Indeks	1	Dinas Kesehatan
	Cakupan Desa Siaga Purnama Mandiri	Kalurahan	55	Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	Persen	55	Dinas Kesehatan
	Indeks capaian SPM	Indeks	1	27 Puskesmas
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Tingkat kemantapan infrastruktur permukiman (jalan desa)	Persen	82,26	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	77,06	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya	Persen	100	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Gedung pemerintah yang laik fungsi	Persen	40	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	77,34	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	45	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	85,1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Persen	85,98	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R	Persen	30,67	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Persen	93,95	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Persen	5,86	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	Persen	100	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Persen	70,2	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persen	90	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	42,36	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase rumah layak huni	Persen	99,8	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	Persen	88,31	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indeks Pemulihan Pascabencana	Indeks	60	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	Persen	80	Dinas Sosial
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	80	Dinas Sosial
	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Persen	80	Dinas Sosial
	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Persen	75	Dinas Sosial
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persen	100	Dinas Sosial
	cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	Persen	80	Dinas Sosial
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	21,5	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Persen	60	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja	Persen	38	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	Capaian Desa Prima	Persen	41,33	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	72	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Rasio kekerasan terhadap perempuan	per 100.000 penduduk perempuan	0,00028	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga	Persen	10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Cakupan desa layak anak	Kalurahan	60	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
	Cakupan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Persen	53,33	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Persentase lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	Persen	85,71	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Persen	155	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	Persen	18,67	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Persen	100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	Persen	90	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Persen	54,58	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Persen	85	Dinas Lingkungan Hidup
	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Persen	36	Dinas Lingkungan Hidup
	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Persen	5	Dinas Lingkungan Hidup
	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	Penghargaan	1	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	Persen	36,58	Dinas Lingkungan Hidup
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	Persen	31	Dinas Lingkungan Hidup
	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	Persen	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	46,86	Dinas Lingkungan Hidup
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	99,84	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	96,3	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	Persen	99,8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat	Persen	100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			



No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan
	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan
	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan
	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan
	Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi.	Persen	77	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan
	Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan	Persen	58,33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate</i> (TFR))	Angka	1,63	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern ( <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i> )	Persen	77,2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	Persen	85	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	Dinas Perhubungan
	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persen	30,43	Dinas Perhubungan
	Kinerja lalu lintas Kabupaten	Angka	0,30	Dinas Perhubungan
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persen	73	Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	Persen	85,71	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Angka	2,95	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
	Persentase UMKM yang berizin	Persen	65	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	Persen	75	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Capaian Rintisan Desa Preneur	Persen	14,67	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Capaian pemasaran pada Desa Preneur	Persen	50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	2,5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	76,92	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	66,96	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	60	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	Persen	5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	Persen	100	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Persen	15,79	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	100	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Persen	100	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	Persen	100	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
	Jumlah prestasi Olahraga	medali	100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	83	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Organisasi Pramuka yang aktif	Organisasi	18	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	80	Dinas Komunikasi Dan Informatika
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	83,08	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	Bahasa Sastra yang dilestarikan	Pelestarian	104	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	Pelestarian	953	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
	Persentase perputakaan yang terakreditasi	Persen	17,48	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	63	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara,	Persen	72	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat			
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	Kalurahan Bahari yang direvitalisasi	Persen	80	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Produksi perikanan tangkap	Ton	835	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Produksi perikanan budidaya	Ton	12.959	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Persen	5	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Persentase produksi perikanan yang diolah	Persen	2	Dinas Kelautan Dan Perikanan
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
	Cakupan Desa Wisata	Persen	37,33	Dinas Pariwisata
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	Dinas Pariwisata
	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Persen	3,13	Dinas Pariwisata
	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persen	2	Dinas Pariwisata
	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persen	50	Dinas Pariwisata
	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah CBT	2	Dinas Pariwisata
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	0	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Persentase Ketersediaan sarana pertanian	Persen	100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Ketersediaan sarana peternakan	Persen	100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Persen	100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	Persen	100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Produksi Daging	Ton	15.850	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Persen	100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ha	6,325	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
	-			
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
	-	-	-	-
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	54	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	Persen	5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	Persen	6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Nilai ekspor	juta US\$	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	35	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	Persen	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan	Persen	0,22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	perusahaan Kawasan industri di kabupaten			
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
	Persentase Penempatan Transmigrasi	persen	100	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
1	SEKRETARIAT DAERAH			
	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	Sekretariat Daerah
	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persen	100	Sekretariat Daerah
	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Persen	100	Sekretariat Daerah
	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Persen	92	Sekretariat Daerah
	Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	Persen	100	Sekretariat Daerah
	Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100	Sekretariat Daerah
	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	Persen	100	Sekretariat Daerah
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Metode Tender	Persen	80	Sekretariat Daerah
	Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional	Persen	89	Sekretariat Daerah
	Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	Persen	89,5	Sekretariat Daerah
	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	Persen	89,50	Sekretariat Daerah
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	Persen	84	Sekretariat Daerah
2	SEKRETARIAT DEWAN			
	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Persen	88	Sekretariat DPRD
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
1	PERENCANAAN			
	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage)	Persen	70	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPd)	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan Sangat Tinggi	Persen	97	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	<b>KEUANGAN</b>			
	Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	88	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Persen	90	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Persen	100	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
	Persentase Realisasi PAD	Persen	100	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
3	<b>KEPEGAWAIAN</b>			
	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	75	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Persen	32	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	Peta Kompetensi ASN	Persen	15	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Persen	100	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDA	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
	INSPEKTORAT DAERAH			
	Persentase PD pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	50	Inspektorat Daerah
	Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	Persen	15	Inspektorat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Persen	35	Inspektorat Daerah
G	UNSUR KEWILAYAHAN			
	KECAMATAN			
1	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Bantul
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	Kapanewon Bantul
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	93	Kapanewon Bantul
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	100	Kapanewon Bantul
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	Kapanewon Bantul
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	Kapanewon Bantul
2	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Bambanglipuro
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	Kapanewon Bambanglipuro
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	angka	95	Kapanewon Bambanglipuro
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	93	Kapanewon Bambanglipuro
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	Kapanewon Bambanglipuro
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	Kapanewon Bambanglipuro
3	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	persen	100	Kapanewon Dlingo
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	persen	84	Kapanewon Dlingo



No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	Kapanewon Dlingo
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	100	Kapanewon Dlingo
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	Kapanewon Dlingo
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	Kapanewon Dlingo
4	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Imogiri
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	Kapanewon Imogiri
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	98	Kapanewon Imogiri
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	98	Kapanewon Imogiri
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	98	Kapanewon Imogiri
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	Kapanewon Imogiri
5	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Jetis
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	Kapanewon Jetis
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	94	Kapanewon Jetis
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	95	Kapanewon Jetis
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	Kapanewon Jetis
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	Kapanewon Jetis
6	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Kretek
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	Kapanewon Kretek
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	91	Kapanewon Kretek
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	85	Kapanewon Kretek
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	90	Kapanewon Kretek

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	Kapanewon Kretek
7	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Kasihan
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	Kapanewon Kasihan
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	Kapanewon Kasihan
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	90	Kapanewon Kasihan
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	90	Kapanewon Kasihan
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	Kapanewon Kasihan
8	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Pandak
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	Kapanewon Pandak
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	93	Kapanewon Pandak
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	88	Kapanewon Pandak
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	88	Kapanewon Pandak
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	Kapanewon Pandak
9	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Pundong
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	Kapanewon Pundong
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	94	Kapanewon Pundong
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	85	Kapanewon Pundong
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	90	Kapanewon Pundong
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	Kapanewon Pundong
10	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Pleret
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	Kapanewon Pleret

<b>No</b>	<b>Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2025</b>	<b>Perangkat Daerah Penanggung Jawab</b>
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	95	Kapanewon Pleret
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	95	Kapanewon Pleret
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	95	Kapanewon Pleret
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	Kapanewon Pleret
11	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Piyungan
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	Kapanewon Piyungan
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	95	Kapanewon Piyungan
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	Kapanewon Piyungan
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	Kapanewon Piyungan
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	Kapanewon Piyungan
12	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Pajangan
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	Kapanewon Pajangan
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	91	Kapanewon Pajangan
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	91	Kapanewon Pajangan
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	91	Kapanewon Pajangan
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	Kapanewon Pajangan
13	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Sanden
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	Kapanewon Sanden
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	93	Kapanewon Sanden
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	83	Kapanewon Sanden
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	90	Kapanewon Sanden

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	Kapanewon Sanden
14	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Srandakan
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	85	Kapanewon Srandakan
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	93	Kapanewon Srandakan
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	97	Kapanewon Srandakan
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	97	Kapanewon Srandakan
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	Kapanewon Srandakan
15	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Sewon
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	Kapanewon Sewon
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	91	Kapanewon Sewon
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	91	Kapanewon Sewon
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	Kapanewon Sewon
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	Kapanewon Sewon
16	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Sedayu
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	Kapanewon Sedayu
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	93	Kapanewon Sedayu
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	Kapanewon Sedayu
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	Kapanewon Sedayu
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	Kapanewon Sedayu
17	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Banguntapan
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	84	Kapanewon Banguntapan

**RANCANGAN AWAL RKPd KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	94	Kapanewon Banguntapan
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	95	Kapanewon Banguntapan
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	97	Kapanewon Banguntapan
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	Kapanewon Banguntapan
G	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi	Persen	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Cakupan Pembinaan Ormas	Persen	33	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Kerukunan Antar Umat Beragama	Persen	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	Persen	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Cakupan Lokasi yang di prakondisi	Persen	25	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
III	<b>Aspek Daya Saing</b>			
	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	83,5 (BB)	Semua Perangkat Daerah
	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	4,2815	Sekretariat Daerah
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten	Persen	89	Sekretariat Daerah
	Persentase Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	100	Sekretariat Daerah
	Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi	Persen	100	Sekretariat Daerah
	Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu	Persen	100	Sekretariat Daerah
	Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	Persen	95	Sekretariat Daerah
	Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	Persen	100	Sekretariat Daerah
	Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	Persen	90	Sekretariat Daerah
	Persentase Raperda yang Disetujui Bersama	Persen	78	Sekretariat DPRD
	Tingkat keselarasan program RKPd dengan RPJMD	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Persen	97	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Capaian Indeks Profesionalitas ASN	nilai	72	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	Presentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Cakupan PD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	persen	90	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Opini Laporan Keuangan	predikat	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
	Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	Jumlah	4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	23,19	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	Nilai	84	Inspektorat Daerah
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	persen	85	Inspektorat Daerah
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	Inspektorat Daerah
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,4	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Index kualitas layanan informasi publik	Angka	84,5	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Nilai Indeks Pembangunan TIK	angka	7,5	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	angka	2,85	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	89,1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,  Kapanewon
	IKM Kinerja PTSP	nilai/angka	86	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Rata Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	99,84	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data	Lembaga	10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	IKM Kapanewon	angka	91	Kapanewon Bantul
	IKM Kapanewon	angka	95	Kapanewon Bambanglipuro
	IKM Kapanewon	angka	91	Kapanewon Dlingo
	IKM Kapanewon	angka	91	Kapanewon Imogiri

<b>No</b>	<b>Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2025</b>	<b>Perangkat Daerah Penanggung Jawab</b>
	IKM Kapanewon	angka	93	Kapanewon Jetis
	IKM Kapanewon	angka	95	Kapanewon Kretek
	IKM Kapanewon	angka	91	Kapanewon Kasihan
	IKM Kapanewon	angka	91	Kapanewon Pandak
	IKM Kapanewon	angka	91	Kapanewon Pundong
	IKM Kapanewon	angka	93	Kapanewon Pleret
	IKM Kapanewon	angka	95	Kapanewon Piyungan
	IKM Kapanewon	angka	95,5	Kapanewon Pajangan
	IKM Kapanewon	angka	93	Kapanewon Sanden
	IKM Kapanewon	angka	91	Kapanewon Srandakan
	IKM Kapanewon	angka	91	Kapanewon Sewon
	IKM Kapanewon	angka	93	Kapanewon Sedayu
	IKM Kapanewon	angka	91	Kapanewon Banguntapan
	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	69,50	Dpupkp, Dpтр, Dlh, Bpbd
	Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	77,47	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Tingkat Kemantapan Jalan	persen	79,66	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	Persen	0,5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	81,45	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Penduduk berakses air minum layak	Persen	85,98	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Penduduk berakses sanitasi yang layak	Persen	96,95	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Penanganan kawasan kumuh	Persen	42,36	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	Persen	7,32	Dinas Perhubungan
	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75,1	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang
	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persen	73,5	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang
	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	Persen	81	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	65,24	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	41,5	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	88,5	Dinas Lingkungan Hidup

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	63	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	Persen	69	Dinas Lingkungan Hidup
	Capaian pengelolaan sampah	Persen	69,23	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Risiko Bencana	Indeks	159,33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indeks Ketahanan Daerah	angka	0,94	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	menit	<15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



## **BAB VII PENUTUP**

Penyusunan RKPD Tahun 2025 ini mengacu dokumen RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026 dengan arah kebijakan pembangunan pada tahun 2025 adalah Pemantapan daya saing daerah untuk meningkatkan kualitas perekonomian. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, disusun tema dan prioritas pembangunan tahun 2025. Tema yaitu Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur untuk Memantapkan Daya Saing Daerah. Prioritas pembangunan pada tahun 2025 adalah: 1) Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, 2) Pemerataan kualitas infrastruktur, 3) Peningkatan SDM berdaya saing, 4) Pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana, 5) Pemantapan layanan publik berbasis IT, dan 6) Pengembangan kawasan Pansela.

Dokumen RKPD Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi media komunikasi antarpelaku pembangunan dan sebagai bahan untuk memberi masukan saran untuk perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul Tahun 2025.

**BUPATI BANTUL,**

**ABDUL HALIM MUSLIH**